PERUBAHAN RPJMD
KOTA PALOPO 2018-2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan terhadap kondisi yang ada saat ini serta sesuai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

4. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018-2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2019 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
2) Kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas riil keuangan Daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun kedepan.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALOPO 2018-2023

I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023, merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Visi Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2018- 2023 adalah "Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan pada Tahun 2023". Palopo Maju, Inovatif dan Berkelanjutan bermakna bahwa Kota Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan keseimbangan harmonis antara lingkungan hidup dan kondisi budaya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (b) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (c) terjadi perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka materi untuk menyusun perubahan RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023, mencakup:

1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Nasional;
2. Penyesuaian kembali struktur organisasi Pemerintah Kota Palopo dan struktur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang;

3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f. BAB VI Strategi, Arahan Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
h. BAB VIII Kinerja Peneyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
i. BAB IX Penutup.

4) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 8 Juni 2021

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 8 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

FIRMANZA DP

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 3

3. Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan amanat regulasi.

Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Keptusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Palopo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palopo, Peraturan Walikota Palopo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo, dan Peraturan Walikota Palopo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Palopo yang memuat Program Prioritas dan kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 4

Dihapus

Pasal II

Cukup jelas

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan I-1

1.1 Latar belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-5
1.4 Maksud dan Tujuan I-9
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RPJMD Kota Palopo I-10

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1

2.1. Kondisi Aspek Geografi II-1
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi II-1
2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis II-2
2.1.3. Topografi II-2
2.1.4. Geologi II-3
2.1.5. Hidrologi II-5
2.1.6. Klimatalogi II-6
2.1.7. Penggunaan Lahan II-7
2.2. Wilayah Rawan Bencana II-8
2.3. Potensi Pengembangan Wilayah II-15
2.3.1. Rencana Struktur Ruang II-15
2.3.2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) II-26
2.3.3. Kawasan Strategis Kota (KSK) II-26
2.3.4. Kawasan Peruntukan Perkantoran II-27
2.3.5. Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan II-27
2.3.6. Kawasan Peruntukan Pariwisata II-27
2.3.7. Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) II-28
2.3.8. Kawasan Peruntukan Ruang Kegiatan Sektor Informal II-29
2.3.9. Kawasan Peruntukan Pelayanan Pusat Kesehatan II-29
2.3.10. Kawasan Peruntukan Pelayanan Peribadatan II-29
2.3.11. Kawasan Peruntukan Pertemuan, Pameran dan Sosial Budaya II-30
2.3.12. Kawasan Peruntukan Olahraga II-30
2.3.13. Kawasan Peruntukan Transmigrasi II-30
2.3.14. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara II-30
2.3.15. Kawasan Hutan Produksi II-30
2.3.16. Kawasan Peruntukan Pertanian II-30
2.3.17. Kawasan Peruntukan Peternakan II-31
2.3.18. Kawasan Peruntukan Perikanan II-31
2.3.19. Kawasan Peruntukan Pertambangan II-31
2.4. Demografi II-32
2.4.1. Daya Tampung Penduduk II-34
2.5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tentang Daya Dukung dan Daya Tampung II-35
2.5.1. Daya Dukun Lahan II-35
2.5.2. Daya Dukung Permukiman II-37
2.5.3. Status Daya Dukung dan Ambang Batas Penyediaan Bahan Pangan II-39
2.5.4. Status Daya Dukung dan Ambang Batas Penyediaan Air Bersih II-41
2.6. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-45
2.6.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-45
2.6.1.1. Pertumbuhan PDRB II-45
2.6.1.2. Laju Inflasi II-48
2.6.1.3. PDRB Perkapita II-48
2.6.1.4. Indeks Gini II-49
2.6.1.5. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan II-50
2.6.1.6. Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari II-50

2.6.1.7. Persentase PAD Terhadap Pendapatan II-51
2.6.1.8. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) II-51
2.6.1.9. Pencapaian Sktor Pola Pangan Harapan (PPH)..... II-52
2.6.1.10. Penguatan Cadangan Pangan II-53
2.6.1.11. Penanaanan Daerah Rawan Pangan II-53
2.6.1.12. Kontribusi Sktor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB II-53
2.6.1.13. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDR II-54
2.6.1.14. Produksi Sektor Pertanian..... II-54
2.6.1.15. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB II-55
2.6.1.16. Produksi Sektor Perkebunan II-55
2.6.1.17. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB II-55
2.6.1.18. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB II-56
2.6.1.19. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB II-56
2.6.1.20. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB..... II-57
2.6.1.21. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB II-57
2.6.1.22. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB II-57
2.6.1.23. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB..... II-58
2.6.1.24. Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri II-58
2.6.1.25. Pertumbuhan Industri II-59
2.6.1.26. Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB II-59
2.6.2. Fokus Kesejahteraan Sosial..... II-59
2.6.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-59
2.6.2.2. Angka Melek Huruf (AMH) II-60
2.6.2.3. Angkat Rata – Rata Sekolah II-60
2.6.2.4. Angkat Harapan Hidup..... II-61
2.6.2.5. Persentase Balita Gizi Buruk II-62
2.6.2.6. Prevalensi Balita Gizi Kurang II-62
2.6.2.7. Cakupan Desa Siaga Aktif II-62
2.6.2.8. Angka Partisipasi Angkatan Kerja II-63
2.6.2.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja II-64
2.6.2.10. Tingkat Pengangguran Terbuka II-64
2.6.2.11. Rasio Penduduk yang Bekerja II-65
2.6.2.12. Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja..... II-65
2.6.2.13. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia15 Tahun ke Atas II-66
2.6.2.14. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja..... II-67
2.6.2.15. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I..... II-68
2.6.2.16. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) II-68
2.6.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga II-69
2.6.3.1. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga II-69
2.7. Aspek Pelayanan Umum..... II-69
2.7.1. Fokus Layanan Urusan Wajib..... II-69
2.7.1.1. Bidang Urusan Pendidikan II-69
2.7.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini II-69
2.7.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar..... II-70
2.7.1.1.3. Angkat Pendidikan yang di Tamatkan II-70
2.7.1.1.4. Angkat Partisipasi Murni II-71
2.7.1.1.4.1. Angkat Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A II-71
2.7.1.1.4.2. Angkat Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket II-71
2.7.1.1.4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/Paket C II-72

2.7.1.1.5. Angkat Partisipasi Sekolah II-72
2.7.1.1.5.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/ MI/Paket A II-72
2.7.1.1.5.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B..... II-72
2.7.1.1.5.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C II-73
2.7.1.1.6. Angkat Putus Sekolah II-73
2.7.1.1.6.1. Angkat Putus Sekolah (APS) SD/MI II-74
2.7.1.1.6.2. Angkat Putus Sekolah (APS) SMP/MTs II-74
2.7.1.1.6.3. Angkat Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA II-74
2.7.1.1.7. Angkat Kelulusana II-75
2.7.1.1.7.1. Angkat Kelulusan (AL) SD/MI II-75
2.7.1.1.7.2. Angkat Kelulusan (AL) SMP/MTs II-75
2.7.1.1.7.3. Angkat Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA..... II-76
2.7.1.1.8. Angkat Melanjutkan (AM) II-76
2.7.1.1.8.1. Angkat Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs II-76
2.7.1.1.8.2. Angkat Melanjutkan (AM) dari SMP/ MTs ke SMA/SMK/MA II-76
2.7.1.1.9. Fasilitas Pendidikan II-77
2.7.1.1.9.1. Sekolah Pendidkan SD/MI Kondisi Bagunan Baik II-77
2.7.1.1.9.2. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Banguna Baik..... II-78
2.7.1.1.10. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar II-78
2.7.1.1.11. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah..... II-79
2.7.1.1.12. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan dasar..... II-80
2.7.1.1.13. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah.... II-81
2.7.1.1.14. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata Pendidikan Dasar II-81
2.7.1.1.15. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata Pendidikan Menengah II-82
2.7.1.1.16. Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar II-83
2.7.1.1.17. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun, Perempuan dan Laki – Laki II-83
2.7.1.1.18. Penduduk Berusia ≥15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) II-84
2.7.1.1.19. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV II-84
2.7.1.2. Bidang Urusan Kesehatan II-85
2.7.1.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup..... II-85
2.7.1.2.2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)..... II-85
2.7.1.2.3. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup II-85
2.7.1.2.4. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup..... II-86
2.7.1.2.5. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup..... II-86
2.7.1.2.6. Rasio Posyandu Per Satuan Balita..... II-87
2.7.1.2.7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk..... II-87
2.7.1.2.8. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk..... II-88
2.7.1.2.9. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk II-88
2.7.1.2.10. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk II-88
2.7.1.2.11. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani II-89

2.7.1.2.12. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan II-89
2.7.1.2.13. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) II-90
2.7.1.2.14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan II-90
2.7.1.2.15. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Perkapita/Hari) II-91
2.7.1.2.16. Persentase Anak Usia 1 (satu) Tahun yang Diimunisasi Campak..... II-91
2.7.1.2.17. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk II-92
2.7.1.2.18. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani II-92
2.7.1.2.19. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA..... II-93
2.7.1.2.20. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) II-94
2.7.1.2.21. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) II-94
2.7.1.2.22. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS..... II-94
2.7.1.2.23. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS..... II-95
2.7.1.2.24. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD II-96
2.7.1.2.25. Penderita Diare yang Ditangani II-96
2.7.1.2.26. Angka Kejadian Malaria II-96
2.7.1.2.27. Tingkat Kematian Akibat Malaria..... II-97
2.7.1.2.28. Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida..... II-97
2.7.1.2.29. Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat II-97
2.7.1.2.30. Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi II-98
2.7.1.2.31. Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir II-98
2.7.1.2.32. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS II-99
2.7.1.2.33. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin II-100
2.7.1.2.34. Cakupan Kunjungan Bayi..... II-100
2.7.1.2.35. Cakupan Puskesmas..... II-100
2.7.1.2.36. Cakupan Pembantu Puskesmas II-101
2.7.1.2.37. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4..... II-101
2.7.1.2.38. Cakupan Pelayanan Nifas II-101
2.7.1.2.39. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani..... II-102
2.7.1.2.40. Cakupan Pelayanan Anak Balita II-102
2.7.1.2.41. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan Keluarga Miskin II-103
2.7.1.2.42. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat..... II-103
2.7.1.2.43. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin II-104
2.7.1.2.44. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 (Satu) yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)..... II-104

2.7.1.2.45. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam II-104
2.7.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.... II-105
2.7.1.3.1. Pekerjaan Umum II-105
2.7.1.3.1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik..... II-105
2.7.1.3.1.2. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk II-105
2.7.1.3.1.3. Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 (empat) II-106
2.7.1.3.1.4. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) II-106
2.7.1.3.1.5. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) II-106
2.7.1.3.1.6. Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar II-107
2.7.1.3.1.7. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi.. II-107
2.7.1.3.1.8. Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar II-107
2.7.1.3.1.9. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat..... II-108
2.7.1.3.1.10. Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun II-108
2.7.1.3.1.11. Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor. II-109
2.7.1.3.1.12. Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik II-109
2.7.1.3.1.13. Rasio Jaringan Irigasi II-110
2.7.1.3.1.14. Persentase Penduduk Berakses Air Minum II-110
2.7.1.3.1.15. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan II-110
2.7.1.3.1.16. Persentase Areal Kawasan Kumuh. II-112
2.7.1.3.1.17. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan II-112
2.7.1.3.1.18. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk II-112
2.7.1.3.1.19. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk II-113
2.7.1.3.2. Penataan Ruang II-113
2.7.1.3.2.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB..... II-113
2.7.1.3.2.2. Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan…… II-114
2.7.1.3.2.3. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan……..... II-114
2.7.1.3.2.4. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya…… II-115

2.7.1.3.2.5. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan…… II-115
2.7.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman…… II-115
2.7.1.4.1. Rasio Rumah Layak Huni…… II-115
2.7.1.4.2. Rasio Pemukiman Layak Huni…… II-116
2.7.1.4.3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni…….. II-116
2.7.1.4.4. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau…….. II-117
2.7.1.4.5. Persentase Pemukiman yang Tertata…… II-117
2.7.1.4.6. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh……. II-118
2.7.1.4.7. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan…… II-118
2.7.1.4.8. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan…….. II-119
2.7.1.4.9. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU…… II-119
2.7.1.5. Bidang UrusanKetentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat…….. II-119
2.7.1.5.1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)…… II-120
2.7.1.5.2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)…… II-120
2.7.1.5.3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota…… II-121
2.7.1.5.4. Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)……... II-121
2.7.1.5.5. Persentase Penegakan PERDA……..... II-121
2.7.1.6. Bidang Urusan Sosial…….. II-121
2.7.1.6.1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial…… II-121
2.7.1.6.2. Persentase PMKS yang Tertangani…….. II-122
2.7.1.6.3. Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar…… II-122
2.7.1.6.4. Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya…… II-123
2.7.1.6.5. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial…… II-123
2.7.1.6.6. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial…… II-124
2.7.1.6.7. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat…… II-124
2.7.1.6.8. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap…… II-124
2.7.1.6.9. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial…… II-125
2.7.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar…….. II-125

2.7.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja…… II-125
2.7.2.1.1. Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun…….. II-125
2.7.2.1.2. Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)…… II-126
2.7.2.1.3. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan…… II-126
2.7.2.1.4. Keselamatan dan Perlindungan…… II-126
2.7.2.1.5. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek……... II-127
2.7.2.1.6. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah……... II-127
2.7.2.1.7. Besaran Pemeriksaan Perusahaan…… II-127
2.7.2.1.8. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan….. II-128
2.7.2.1.9. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi…… II-128
2.7.2.1.10. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat……... II-129
2.7.2.1.11. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan…… II-129
2.7.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…….. II-129
2.7.2.2.1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah…… II-129
2.7.2.2.2. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR…… II-129
2.7.2.2.3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta…... II-130
2.7.2.2.4. Rasio KDRT…… II-130
2.7.2.2.5. Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur…….. II-130
2.7.2.2.6. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan…… II-130
2.7.2.2.7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu…… II-131
2.7.2.2.8. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus – Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak…… II-131
2.7.2.2.9. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan…… II-132
2.7.2.2.10. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SD…… II-132
2.7.2.2.11. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMP…… II-132
2.7.2.2.12. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMA…… II-133
2.7.2.2.13. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di Perguruan Tinggi…… II-133
2.7.2.3. Bidang Urusan Pangan…… II-133
2.7.2.3.1. Ketersediaan Pangan Utama…… II-133
2.7.2.3.2. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita……. II-134
2.7.2.3.3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan…… II-135
2.7.2.4. Bidang Urusan Pertanahan…… II-135
2.7.2.4.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat…… II-135
2.7.2.4.2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara…….. II-135
2.7.2.4.3. Penyelesaian Izin Lokasi…….. II-136
2.7.2.5. Lingkungan Hidup…… II-136
2.7.2.5.1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota……... II-136
2.7.2.5.2. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota…….. II-136
2.7.2.5.3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi…….. II-137

2.7.2.5.4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air…… II-137
2.7.2.5.5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara…… II-137
2.7.2.5.6. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan…… II-137
2.7.2.5.7. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota…….. II-138
2.7.2.5.8. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup…… II-138
2.7.2.5.9. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kota Palopo…… II-138
2.7.2.5.10. Timbulan Sampah yang Ditangani…….. II-139
2.7.2.5.11. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R…… II-139
2.7.2.5.12. Persentase Cakupan Area Pelayanan…….. II-139
2.7.2.5.13. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani…. II-140
2.7.2.5.14. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Palopo…. II-140
2.7.2.6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil…… II-140
2.7.2.6.1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk… II-140
2.7.2.6.2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran…….. II-141
2.7.2.6.3. Rasio Pasangan Berakte Nikah…… II-141
2.7.2.6.4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota…….. II-142
2.7.2.6.5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK…… II-142
2.7.2.6.6. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)…….. II-142
2.7.2.6.7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran…… II-142
2.7.2.7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan II-143
2.7.2.7.1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik…… II-143
2.7.2.7.2. Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)…… II-143
2.7.2.7.3. Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK…… II-144
2.7.2.7.4. Persentase LSM Aktif…… II-144
2.7.2.7.5. Persentase LPM Berprestasi…… II-144
2.7.2.7.6. Persentase PKK Aktif…… II-144
2.7.2.7.7. Persentase Posyandu Aktif…… II-145
2.7.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana…….. II-145
2.7.2.8.1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)…….. II-145
2.7.2.8.2. Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek…….. II-146
2.7.2.8.3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB…… II-146
2.7.2.8.4. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga…… II-146
2.7.2.8.5. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49…… II-146
2.7.2.8.6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun…… II-147
2.7.2.8.7. Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)…… II-147
2.7.2.8.8. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)…… II-147

2.7.2.8.9. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi…… II-148
2.7.2.8.10. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB…… II-148
2.7.2.8.11. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB…… II-149
2.7.2.8.12. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB…… II-149
2.7.2.8.13. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan…… II-150
2.7.2.8.14. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa…… II-150
2.7.2.8.15. Cakupan PKB/PLKByang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk…….. II-150
2.7.2.8.16. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri …….. II-151
2.7.2.8.17. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan…….. II-151
2.7.2.8.18. Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Gudang Kabupaten/Kota… II-151
2.7.2.8.19. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes…….. II-152
2.7.2.8.20. Persentase Faskes Dan Jejaringnya (diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan…….. II-152
2.7.2.8.21. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga.. II-152
2.7.2.8.22. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak…….. II-153
2.7.2.8.23. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes……... II-153
2.7.2.9. Bidang Urusan Perhubungan……... II-154
2.7.2.9.1. Arus Penumpang Angkutan Umum…… II-154
2.7.2.9.2. Rasio Ijin Trayek…… II-154
2.7.2.9.3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum…… II-155
2.7.2.9.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis…… II-155
2.7.2.9.5. Persentase Layanan Angkutan Darat…… II-155
2.7.2.9.6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum… II-156
2.7.2.9.7. Pemasangan Rambu – Rambu…… II-156
2.7.2.10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika…… II-156
2.7.2.10.1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan…… II-156
2.7.2.10.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi…… II-157
2.7.2.10.3. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet. II-157
2.7.2.10.4. Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi…… II-158
2.7.2.11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah…….. II-158
2.7.2.11.1. Persentase Koperasi Aktif…….. II-158
2.7.2.11.2. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif…… II-158
2.7.2.11.3. Persentase BPR/LKM Aktif…….. II-159
2.7.2.11.4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil…….. II-159
2.7.2.12. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)…… II-159
2.7.2.12.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA). II-159

2.7.2.12.2. Jumlah dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)…….. II-160
2.7.2.12.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja……... II-160
2.7.2.12.4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)……..… II-160
2.7.2.13. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga…… II-161
2.7.2.13.1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif…….. II-161
2.7.2.13.2. Persentase Wirausaha Muda…… II-161
2.7.2.13.3. Cakupan Pembinaan Olahraga…… II-161
2.7.2.13.4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi…….. II-162
2.7.2.13.5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda…….. II-162
2.7.2.13.6. Jumlah Atlet Berprestasi…… II-162
2.7.2.13.7. Jumlah Prestasi Olahraga…….. II-162
2.7.2.14. Bidang Urusan Statistik…… II-163
2.7.2.14.1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi…… II-163
2.7.2.14.2. Buku "Palopo Dalam Angka"…… II-163
2.7.2.14.3. Buku "PDRB"…… II-163
2.7.2.15. Bidang Urusan Persandian……..... II-163
2.7.2.15.1. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah…… II-163
2.7.2.16. Bidang Urusan Kebudayaan…… II-164
2.7.2.16.1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya…… II-164
2.7.2.16.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan…… II-164
2.7.2.16.3. Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi II-164
2.7.2.16.4. Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu… II-164
2.7.2.17. Bidang Urusan Perpustakaan…… II-165
2.7.2.17.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun..... II-165
2.7.2.17.2. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah…… II-165
2.7.2.17.3. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk…….. II-165
2.7.2.17.4. Jumlah Rata – Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun…… II-166
2.7.2.17.5. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan…… II-166
2.7.2.17.6. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat…… II-166
2.7.2.18. Bidang Urusan Kearsipan…… II-166
2.7.2.18.1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku…….. II-166
2.7.2.18.2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan…… II-167
2.7.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan…… II-167
2.7.3.1. Bidang Urusan Pariwisata…… II-167
2.7.3.1.1. Kunjungan Wisata…….. II-167
2.7.3.1.2. Lama Kunjungan Wisata…… II-167
2.7.3.1.3. PAD Sektor Pariwisata…….. II-167
2.7.3.2. Bidang Urusan Pertanian…… II-168
2.7.3.2.1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar…….. II-168
2.7.3.2.2. Cakupan Bina Kelompok Petani…….. II-168
2.7.3.3. Bidang Urusan Kehutanan…… II-169
2.7.3.3.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis…… II-169
2.7.3.3.2. Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan…… II-169
2.7.3.4. Bidang Urusan Energi dan Sumber daya Mineral…… II-169
2.7.3.4.1. Persentase Pertambangan Tanpa Ijin…… II-169
2.7.3.5. Bidang Urusan Perdagangan…… II-170

2.7.3.5.1. Ekspor Bersih Perdagangan…….. II-170
2.7.3.5.2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal……. II-170
2.7.3.6. Bidang Urusan Perindustrian…… II-171
2.7.3.6.1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin…… II-171
2.7.3.7. Bidang Urusan Transmigrasi …… II-171
2.7.3.7.1. Persentase Transmigran Swakarsa …….. II-171
2.7.3.8. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan…… II-171
2.7.3.8.1. Produksi Perikanan…… II-171
2.7.3.8.2. Konsumsi Ikan…… II-172
2.7.3.8.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan…… II-172
2.7.3.8.4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan…… II-172
2.7.3.8.5. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial…… II-173
2.7.3.8.6. Nilai Tukar Nelayan…….. II-173
2.7.4. FokusPenunjang Urusan…… II-173
2.7.4.1. Bidang UrusanPerencanaan Pembangunan…… II-173
2.7.4.1.1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA…… II-173
2.7.4.1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA…… II-174
2.7.4.1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA…… II-174
2.7.4.1.4. Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA…… II-174
2.7.4.1.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD…… II-175
2.7.4.1.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD……... II-175
2.7.4.1.7. Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW…… II-175
2.7.4.2. Bidang Urusan Keuangan…… II-175
2.7.4.2.1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan……... II-175
2.7.4.2.2. Persentase SILPA……... II-176
2.7.4.2.3. Persentase SiLPA Terhadap APBD…… II-176
2.7.4.2.4. Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana…… II-176
2.7.4.2.5. Persentase Belanja Pendidikan (20%)…… II-177
2.7.4.2.6. Persentase Belanja Kesehatan (10%)…….. II-177
2.7.4.2.7. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung…….. II-178
2.7.4.2.8. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa…… II-178
2.7.4.2.9. Penetapan APBD…….. II-179
2.7.4.3. Bidang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan…….. II-179
2.7.4.3.1. Rata – Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan…….. II-179
2.7.4.3.2. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal…….. II-179
2.7.4.3.3. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural…… II-180
2.7.4.3.4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah…….. II-180
2.7.4.3.5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah…… II-180
2.7.4.3.6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah…….. II-181
2.7.4.4. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan…….. II-181
2.7.4.4.1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan. II-181
2.7.4.4.2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan…… II-181

2.7.4.4.3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah…… II-181
2.7.4.4.4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah…… II-182
2.7.4.5. Bidang UrusanPengawasan…… II-182
2.7.4.5.1. Persentase Tindak Lanjut Temuan…….. II-182
2.7.4.5.2. Persentase Pelanggaran Pegawai…… II-182
2.7.4.5.3. Jumlah Temuan BPK…… II-183
2.7.4.6. Bidang Urusan Sekretariat Dewan…… II-183
2.7.4.6.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat – Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota…… II-183
2.7.4.6.2. Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)…… II-183
2.7.4.6.3. Terintegrasinya Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD…… II-184
2.8. Aspek Daya Saing Daerah…… II-184
2.8.1. Kemampuan Ekonomi Daerah…….. II-184
2.8.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita…… II-184
2.8.3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Per Kapita…… II-185
2.8.4. Produktivitas Total Daerah…….. II-185
2.8.5. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)…….. II-186
2.8.6. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum…….. II-186
2.8.7. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur…….. II-187
2.8.7.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan…… II-187
2.8.7.2. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum…. II-187
2.8.7.3. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun…….. II-187
2.8.7.4. Ketaatan Terhadap RTRW…… II-188
2.8.7.5. Jenis dan Jumlah Bank…….. II-188
2.8.7.6. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi …….. II-188
2.8.7.7. Jenis Kelas dan Jumlah Restoran …….. II-188
2.8.7.8. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih…… II-189
2.8.7.9. Rasio Ketersediaan Daya Listrik…… II-189
2.8.7.10. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik…… II-189
2.8.7.11. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon…… II-189
2.8.8. Fokus Iklim Berinvestasi…….. II-190
2.8.8.1. Angka Kriminalitas yang Tertangani…….. II-190
2.8.8.2. Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan…… II-190
2.8.9. Fokus Sumber Daya Manusia…….. II-191
2.8.9.1. Rasio Ketergantungan…….. II-191
2.8.9.2. Rasio Lulusan S1/S2/S3…….. II-191
2.9. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah…… II-192
2.9.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…… II-192
2.9.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) …… II-192
2.9.3. Capaian Kinerja SDG's/TPB…… II-220

BAB III Gambaran Keuangan Daerah…… III-1

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu…… III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD…….. III-2
3.1.1.1. Pendapatan Daerah…… III-2
3.1.1.2. Belanja Daerah…… III-11
3.1.1.3. Pembiayaan Daerah…… III-14
3.1.2. Neraca Daerah…….. III-18
3.1.2.1. Aset…… III-22
3.1.2.2. Kewajiban…… III-22
3.1.2.3. Ekuitas Dana…… III-22
3.1.2.4. Rasio Keuangan…….. III-22
3.1.2.5. Rasio Likuiditas…… III-22
3.1.2.6. Rasio Solvabilitas…… III-23
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu…… III-24
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran…… III-25
3.2.2. Analisis Pembiayaan…….. III-25
3.3. Kerangka Pendanaan…….. III-27
3.3.1. Asumsi Ekonomi, Sosial, dan Fiskal……. III-27
3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja……... III-28
3.3.2.1. Proyeksi Pendapatan …… III-29
3.3.2.2. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020 …… III-33
3.3.2.3. Proyeksi Belanja…… III-33
3.3.2.4. Proyeksi Pembiayaan ……... III-36
3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan…… III-38
3.4. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020… III-38
3.5. Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah…… III-40

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah IV-1

4.1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-1
4.2. Permasalahan Untuk Penyelenggaraan Urusan IV-7
4.3. Isu Strategis IV-46
4.3.1. Isu Strategis Global IV-46
4.3.1.1. Pendemi Covid-19..... IV-46
4.3.1.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDG's)*..... IV-46
4.3.1.3. Perubahan Iklim*(Climate Change)* IV-48
4.3.1.4. Bonus Demagrafi IV-49
4.3.1.5. Revolusi 4.0/ Era Digital/Transformasi Digital IV-49
4.3.2. Isu Strategis Nasional..... IV-50
4.3.3. Penetapan Isu Strategis Kota Palopo IV-51

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran..... V-1

5.1. Visi..... V-1
5.2. Misi..... V-1
5.3. Tujuan dan Sasaran V-1
5.4. Keterkaitan RPJMN dengan RPJMD Kota Palopo 2018-2023..... V-6
5.5. Keterkaitan RPJPD Kota Palopo 2005-2025 dengan RPJMD 2018-2023..... V-8

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah..... VI-1

6.1. Strategi Pembagunan Daerah..... VI-1
6.2. Arah Kebijakan VI-3
6.3. Program Pembangunan Daerah..... VI-13

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII-1
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah VII-1
7.2. Program Perangkat Daerah VII-2

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII-1
8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah VIII-1
8.1.1. Indikator Kinerja Makro VIII-1
8.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) VIII-2
8.1.3. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) VIII-4
8.2. Indikator & Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) VIII-40
8.3. Indikator & Target SDGs VIII-43

Bab IX Penutup IX-1
9.1. Pedoman Transisi IX-1
9.2. Kaidah Pelaksanaan IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keterkaitan Antar RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023…… I-8
Tabel 1.2. Keterkaitan Antar RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023…… I-9
Tabel 2.1. Luas dan Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan Kota Palopo ……. II-1
Tabel 2.2. Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat KemiringanLereng Kota Palopo Menurut Kecamatan…….. II-2
Tabel 2.3. Kondisi Topografi Kota Palopo Menurut Kecamatan…… II-2
Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Kota Palopo s.d Tahun 2020…… II-7
Tabel 2.5. Tingkat Bencana di Kota Palopo Tahun 2019…….. II-8
Tabel 2.6. Skor Ancaman Banjir Kota Palopo…… II-9
Tabel 2.7. Skor Ancaman Bencana Tanah Longsor Kota Palopo Tahun 2019…… II-10
Tabel 2.8. Skor Ancaman Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Palopo Tahun 2019 II-11
Tabel 2.9. Skor Ancaman Kebakaran Gedung dan Permukiman Kota Palopo Tahun 2019…… II-11
Tabel 2.10. Skor Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan…… II-12
Tabel 2.11. Indeks Penduduk Terpapar Kota Palopo Tahun 2019…… II-13
Tabel 2.12 Lokasi Potensi Kawasan Evakuasi/Relokasi Bencana Kota Palopo, Tahun 2019…… II-14
Tabel 2.13. Posisi Kota Palopo dalam Sistem Jaringan…… II-15
Tabel 2.14. Posisi Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan…… II-16
Tabel 2.15. Komposisi Penduduk Kota Palopo Tahun 2015- 2019…… II-32
Tabel 2.16. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palopo Tahun 2019…….. II-33
Tabel 2.17. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Palopo…… II-34
Tabel 2.18. Tingkat Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk…… II-34
Tabel 2.19. Pola Tutupan Lahan Wilayah Kota Palopo Tahun 2017…… II-35
Tabel 2.20. Luas Lahan Kritis Kota Palopo (Ha)…….. II-36
Tabel 2.21. Perkiraan Luas Kerusakan Hutan Menurut Penyebabnya, 2016…… II-37
Tabel 2.22. Angkat Kekurangan Rumah (backlog) Kota Palopo…… II-37
Tabel 2.23. Statistik Perumahan Kota Palopo 2014 – 2016…….. II-38
Tabel 2.24. Sebaran Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Palopo Tahun 2019 II-38
Tabel 2.25. Perkiraan Kebutuhan Air Minum di Kota Palopo Tahun 2032…… II-42
Tabel 2.26 Lokasi, Nama, dan Kapasitas Terpasang IPAMPAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo Tahun 2019…….. II-43
Tabel 2.27. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atsa Dasar Harga Konstan 2021 Menurut Lapangan Usaha Kota Palopo Tahun 2015-2019 (%) II-45
Tabel 2.28. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Palopo…… II-46
Tabel 2.29. Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2015-2019Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Palopo…… II-47
Tabel 2.30. Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2015 - 2019 (%)…… II-48
Tabel 2.31. PDRB Per Kapita Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-49
Tabel 2.32. Gini Ratio Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-49

Tabel 2.33. Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo Tahun 2015-2019…… II-50
Tabel 2.34. Persentase Pendapatan Penduduk Kurang dari USD.1,00 PPP di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-51
Tabel 2.35. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-51
Tabel 2.36. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2015 -2019 II-52
Tabel 2.37. Skor Pola Pangan Harapan Kota Palopo Tahun 2015-2019…… II-52
Tabel 2.38. Penguatan Cadangan Pangan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-53
Tabel 2.39. Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Palopo Tahun 2015 -2019 II-53
Tabel 2.40. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-54
Tabel 2,41. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 –2019…….. II-54
Tabel 2.42. Produksi Sektor Pertanian Kota Palopo Tahun 2015-2019…… II-54
Tabel 2.43. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-55
Tabel 2.44. Produksi Sektor Perkebunan Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-55
Tabel 2.45. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-56
Tabel 2.46. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-56
Tabel 2.47. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-56
Tabel 2.48. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-57
Tabel 2.49. Kontribusi Sektor Kelautan & Perikanan Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 -2019……... II-57
Tabel 2.50. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 -2019……... II-58
Tabel 2.51. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-58
Tabel 2.52. Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 -2019…….. II-58
Tabel 2.53 Persentase Pertumbuhan Industri Kota Palopo Tahun 2015 -2019…….. II-59
Tabel 2.54. Kontribusi Sektor Transmigrasi Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 -2019…….. II-59
Tabel 2.55. Indeks Pembangunan Manusia Kota PalopoTahun 2015–2019 …… II-60
Tabel 2.56. Angka Melek Huruf Kota Palopo Tahun 2015-2019…… II-60
Tabel 2.57. Rata-rata Lama sekolah Kota Palopo Tahun 2015-2019…… II-61
Tabel 2.58. Angka Usia Harapan Hidup Kota Palopo Tahun 2015– 2019…… II-61
Tabel 2.59. Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palopo Tahun 2015 –2019…….. II-62
Tabel 2.60. Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-62
Tabel 2.61. Persentase Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Kota Palopo Tahun 2016 – 2019…… II-63
Tabel 2.62. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota PalopoTahun 2015 – 2019 …….. II-63
Tabel 2.63. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo Tahun 2015-2019…… II-64
Tabel 2.64. Pengangguran Terbuka Kota Palopo Tahun 2015 -2019…….. II-64

Tabel 2.65. Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Palopo Tahun 2015 -2019…….. II-65
Tabel 2.66. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-66
Tabel 2.67. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-66
Tabel 2.68. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-67
Tabel 2.69. Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-68
Tabel 2.70 Indeks Kepuasan Masyarakat 2019 ……... II-69
Tabel 2.71. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-69
Tabel 2.72. Persentase Pendidikan Anak Usia Dini Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…. II-69
Tabel 2.73. Angka Partisipasi Kasar Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-70
Tabel 2.74. Persentase Pendidikan yang Ditamatkan pada Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-71
Tabel 2.75. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Kota Palopo Tahun 2015 –2019….. II-71
Tabel 2.76. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B…… II-72
Tabel 2.77. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Kota Palopo Tahun 2015 –2019…….. II-72
Tabel 2.78. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Kota Palopo Tahun 2015 – 2019……... II-72
Tabel 2.79. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-73
Tabel 2.80 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-73
Tabel 2.81. Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2015 –2019…….. II-73
Tabel 2.82. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-74
Tabel 2.83. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-74
Tabel 2.84. Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-75
Tabel 2.85. Angka Kelulusan Kota Palopo Tahun 2015 –2019…….. II-75
Tabel 2.86. Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-75
Tabel 2.87. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-76
Tabel 2.88. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-76
Tabel 2.89. Angka Melanjutkan (AL) dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-76
Tabel 2.90. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-77
Tabel 2.91. Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-77
Tabel 2.92. Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-78
Tabel 2.93. Persentase Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-78
Tabel 2.94. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah PendidikanDasar (SD/SMP yang sederajat) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-79

Tabel 2.95. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-80
Tabel 2.96. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Kota Palopo Tahun 2015 – 2019……... II-80
Tabel 2.97. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan MenengahKota Palopo Tahun 2015 –2019…… II-81
Tabel 2.98. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar Kota Palopo 2015 – 2019……. II-82
Tabel 2.99. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Menengah Kota Palopo 2015 – 2019…… II-82
Tabel 2.100. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun, Perempuan dan Laki – Laki Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-83
Tabel 2.101. Persentase Penduduk Berusia ≥15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-84
Tabel 2.102. Persentase Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Palopo Tahun 2015 –2019…… II-84
Tabel 2.103. Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-85
Tabel 2.104. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019……. II-85
Tabel 2.105. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 …… II-86
Tabel 2.106. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup(AKABA) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-86
Tabel 2.107. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2015 – 2019……... II-87
Tabel 2.108. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Palopo Tahun 2015 –2019…… II-87
Tabel 2.109. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 –2019……. II-87
Tabel 2.110. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 –2019 II-88
Tabel 2.111. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 –2019……. II-88
Tabel 2.112. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 –2019 II-89
Tabel 2.113. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2015 –2019……. II-89
Tabel 2.114. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Palopo Tahun 2015 –2019……... II-90
Tabel 2.115. Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Palopo Tahun 2015 –2019……. II-90
Tabel 2.116. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kota Palopo Tahun 2015 –2019……. II-91
Tabel 2.117. Penduduk yang Tingkat Konsumsinya Lebih Rendah dari 2.100 kkal/kapita/hari Kota Palopo Tahun 2015 –2019……. II-91
Tabel 2.118. Persentase Anak Usia 1 (Satu) Tahun yang Diimunisasi Campak Kota Palopo Tahun 2015 –2019……. II-91
Tabel 2.119. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 –2019 II-92
Tabel 2.120. Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2015 –2019…… II-93
Tabel 2.121. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Palopo Tahun 2015 –2019…… II-93

Tabel 2.122. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kota Palopo Tahun 2015 –2019…….. II-94
Tabel 2.123. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kota Palopo Tahun 2015 –2019…….. II-94
Tabel 2.124. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Palopo Tahun 2015 –2019…… II-95
Tabel 2.125. Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kota Palopo Tahun 2015 –2019…… II-95
Tabel 2.126. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderta Penyakit DBD Kota Palopo Tahun 2015 –2019…….. II-96
Tabel 2.127. Penderita Diare Yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2015 –2019…… II-96
Tabel 2.128. Angka Kejadian Malaria Kota Palopo Tahun 2015 –2019…….. II-96
Tabel 2.129. Tingkat Kematian Akibat Malaria Kota Palopo Tahun 2015 –2019…….. II-97
Tabel 2.130. Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida Kota Palopo Tahun 2015 –2019…….. II-97
Tabel 2.131. Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Kota Palopo Tahun 2015 –2019…….. II-98
Tabel 2.132. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi Kota Palopo Tahun 2015 –2019…….. II-98
Tabel 2.133. Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir Kota Palopo Tahun 2015 –2019…….. II-99
Tabel 2.134. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kota Palopo Tahun 2015-2019……. II-99
Tabel 2.135. Cakupan Kunjungan Bayi Kota Palopo Tahun 2015-2019…… II-100
Tabel 2.136. Cakupan Puskesmas Kota Palopo Tahun 2015-2019…… II-100
Tabel 2.137. Cakupan Pembantu Puskesmas Kota Palopo Tahun 2015-2019…… II-101
Tabel 2.138. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Palopo Tahun 2015-2019…… II-101
Tabel 2.139. Cakupan Pelayanan Nifas Kota Palopo Tahun 2015-2019…….. II-102
Tabel 2.140. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2015-2019…….. II-102
Tabel 2.141. Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Palopo Tahun 2015-2019……. II-102
Tabel 2.142. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan Keluarga Miskin Kota Palopo Tahun 2015-2019…… II-103
Tabel 2.143. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kota Palopo Tahun 2015-2019…….. II-103
Tabel 2.144. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 (Satu) yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kota Palopo Tahun 2015-2019…….. II-104
Tabel 2.145. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Kota Palopo Tahun 2015-2019…….. II-104
Tabel 2.146. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berkondisi Baik Kota Palopo Tahun 2015-2019…… II-105
Tabel 2.147. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-105
Tabel 2.148. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-106
Tabel 2.149. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-106

Tabel 2.150. Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-107
Tabel 2.151. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Palopo Tahun 2015-2019…….. II-107
Tabel 2.152. Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-108
Tabel 2.153. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-108
Tabel 2.154. Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-108
Tabel 2.155. Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-109
Tabel 2.156. Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 II-109
Tabel 2.157. Persentase Rasio Jaringan Irigasi Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-110
Tabel 2.158. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-110
Tabel 2.159. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-111
Tabel 2.160. Persentase Areal Kawasan Kumuh Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-112
Tabel 2.161. Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-112
Tabel 2.162. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-113
Tabel 2.163. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-113
Tabel 2.164. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-114
Tabel 2.165. Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-114
Tabel 2.166. Rasio Bangunan Ber – IMB Per Satuan Bangunan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-115
Tabel 2.167. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-115
Tabel 2.168. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-115
Tabel 2.169. Rasio Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-116
Tabel 2.170. Rasio Permukiman Layak Huni Kota Palopo Tahun 2015-2019…… II-116
Tabel 2.171. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-117
Tabel 2.172. Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-117
Tabel 2.173. Persentase Pemukiman Yang Tertata Kota Palopo Tahun 2015 – 2019… II-117
Tabel 2.174. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-118
Tabel 2.175. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-118
Tabel 2.176. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-119

Tabel 2.177. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-119
Tabel 2.178. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-120
Tabel 2.179. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-120
Tabel 2.180. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-120
Tabel 2.181. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-121
Tabel 2.182. Persentase Penegakan PERDA Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-121
Tabel 2.183. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 II-122
Tabel 2.184. Persentase PMKS yang Tertangani Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-122
Tabel 2.185. Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-122
Tabel 2.186. Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-123
Tabel 2.187. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-123
Tabel 2.188. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palopo Tahun 2015-2019…….. II-124
Tabel 2.189. Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-124
Tabel 2.190. Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-125
Tabel 2.191. Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-125
Tabel 2.192. Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun Di Kota Palopo 2015-2019…….. II-125
Tabel 2.193. Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-126
Tabel 2.194. Pencari Kerja yang Ditempatkan Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-126
Tabel 2.195. Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-127
Tabel 2.196. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Di Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-127
Tabel 2.197. Persentase Pemeriksaaan Perusahaan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-127
Tabel 2.198. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-128
Tabel 2.199. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-128
Tabel 2.200. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-129

Tabel 2.201. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-129
Tabel 2.202. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-129
Tabel 2.203. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-130
Tabel 2.204. Rasio KDRT Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-130
Tabel 2.205. Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-131
Tabel 2.206. Persentase Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Terpadu Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-131
Tabel 2.207. Persentase Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-131
Tabel 2.208. Persentase Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-132
Tabel 2.209. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019. II-132
Tabel 2.210. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMP Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 II-132
Tabel 2.211. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMA Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 II-133
Tabel 2.212. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di Perguruan Tinggi Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-133
Tabel 2.213. Persentase Ketersediaan Pangan Utama Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 II-134
Tabel 2.214. Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-134
Tabel 2.215. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-135
Tabel 2.216. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…. II-135
Tabel 2.217. Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-136
Tabel 2.218. Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…. II-136
Tabel 2.219. Tersusunnya RPPLH Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-136
Tabel 2.220. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-136
Tabel 2.221. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-137
Tabel 2.222. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-137
Tabel 2.223. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kota Palopo Tahun 2015 –2019.. II-137
Tabel 2.224. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-137
Tabel 2.225. Persentase Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-138
Tabel 2.226. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-138
Tabel 2.227. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-138
Tabel 2.228. Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-139
Tabel 2.229. Persentase Sampah yang Terkurangi Melalui 3R Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-139

Tabel 2.230. Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019… II-140
Tabel 2.231. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-140
Tabel 2.232. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-140
Tabel 2.233. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-141
Tabel 2.234. Rasio Bayi Berakte Kelahiran Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-141
Tabel 2.235. Rasio Pasangan Berakte Nikah Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-141
Tabel 2.236. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-142
Tabel 2.237. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019.. II-142
Tabel 2.238. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-142
Tabel 2.239. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019… II-143
Tabel 2.240. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019……. II-143
Tabel 2.241. Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-143
Tabel 2.242. Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-144
Tabel 2.243. Persentase LSM Aktif Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-144
Tabel 2.244. Persentase LPM Berprestasi Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-144
Tabel 2.245. Persentase PKK Aktif Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-145
Tabel 2.246. Persentase Posyandu Aktif Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-145
Tabel 2.247. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019……. II-145
Tabel 2.248. Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-145
Tabel 2.249. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-146
Tabel 2.250. Rata-rata jumlah anak per keluarga Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-146
Tabel 2.251. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-146
Tabel 2.252. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-147
Tabel 2.253. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-147
Tabel 2.254. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-148
Tabel 2.255. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-148
Tabel 2.256. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)ber-KB Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-148
Tabel 2.257. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-149
Tabel 2.258. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-149

Tabel 2.259. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-150
Tabel 2.260. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/MahasiswaKota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-150
Tabel 2.261. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-150
Tabel 2.262. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-151
Tabel 2.263. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Kelurahan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-151
Tabel 2.264. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Gudang Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-152
Tabel 2.265. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-152
Tabel 2.266. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Standarisasi Pelayanan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-152
Tabel 2.267. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-153
Tabel 2.268. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-153
Tabel 2.269. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-153
Tabel 2.270. JumlaArus Penumpang Angkutan Umum Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-154
Tabel 2.271. Rasio Ijin Trayek Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-154
Tabel 2.272. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-155
Tabel 2.273. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-155
Tabel 2.274. Persentase Layanan Angkutan Darat Kota Palopo Tahun 2015 – 2019….. II-155
Tabel 2.275. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-156
Tabel 2.276. Persentase Pemasangan Rambu – Rambu Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-156
Tabel 2.277. Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Palopo Tahun 2015 2019…… II-157
Tabel 2.278. Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-157
Tabel 2.279. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kota Palopo Tahun 2015 – 2019……..... II-157
Tabel 2.280. Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-158
Tabel 2.281. Presentase Koperasi Aktif Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-158
Tabel 2.282. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif Kota Palopo Tahun 2015 – 2019……. II-159
Tabel 2.283. Presentase Usaha Mikro dan Kecil Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-159

Tabel 2.284. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019……. II-160
Tabel 2.285. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019……. II-160
Tabel 2.286. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-160
Tabel 2.287. Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-161
Tabel 2.288. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Di Kota Palopo
Tahun 2015 – 2019…… II-161
Tabel 2.289. Persentase Wirausaha Muda Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-161
Tabel 2.290. Persentase Pembinaan Olahraga Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2109……. II-162
Tabel 2.291. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019….. II-162
Tabel 2.292. Persentase Pembinaan Atlet Muda Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019….. II-162
Tabel 2.293. Persentase Atlet Berprestasi Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-162
Tabel 2.294. PersentasePrestasi Olahraga Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-163
Tabel 2.295. Ketersediaan Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019……. II-163
Tabel 2.296. Ketersediaan Buku "Palopo Dalam Angka" Kota Palopo
Tahun 2015 – 2019…… II-163
Tabel 2.297. Ketersediaan Buku "PDRB" Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-163
Tabel 2.298. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-163
Tabel 2.299. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Di Kota Palopo
Tahun 2015 – 2019……... II-164
Tabel 2.300. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-164
Tabel 2.301. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-164
Tabel 2.302. Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-165
Tabel 2.303. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Di Kota Palopo
Tahun 2015 – 2019……. II-165
Tabel 2.304. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-165
Tabel 2.305. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Di Kota Palopo
Tahun 2015 – 2019……. II-165
Tabel 2.306. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-166
Tabel 2.307. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Di Kota Palopo
Tahun 2015 – 2019…… II-166
Tabel 2.308. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-166
Tabel 2.309. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019……. II-166
Tabel 2.310. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Di Kota Palopo
Tahun 2015 – 2019…… II-167
Tabel 2.311. Persentase Kunjungan Wisata Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-167
Tabel 2.312. Lama Kunjungan Wisata Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-167

Tabel 2.313. Persentase PAD Sektor Pariwisata Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-167
Tabel 2.314. Persentase Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-168
Tabel 2.315. Persentase Pembinaan Kelompok Tani Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 II-169
Tabel 2.316. Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-169
Tabel 2.317. Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-169
Tabel 2.318. Persentase Pertambangan Tanpa Ijin Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-170
Tabel 2.319. Nilai Ekspor Bersih Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-170
Tabel 2.320. Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-171
Tabel 2.321. Persentase Produksi Perikanan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-172
Tabel 2.322. Persentase Konsumsi Perikanan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019……. II-172
Tabel 2.323. Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-172
Tabel 2.324. Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-173
Tabel 2.325. Ketersediaan Dokumen RPJPD Kota Palopo Tahun 2019…….. II-173
Tabel 2.326. Ketersediaan Dokumen RPJMD Kota Palopo Tahun 2019…… II-174
Tabel 2.327. Ketersediaan Dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-174
Tabel 2.328. Ketersediaan Dokumen RTRW Kota Palopo Tahun 2019…… II-174
Tabel 2.329. Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-175
Tabel 2.330. Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-175
Tabel 2.331. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019. II-175
Tabel 2.332. Persentase SiLPA Terhadap APBD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-176
Tabel 2.333. Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-177
Tabel 2.334. Persentase Belanja Pendidikan (20%) Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019.. II-177
Tabel 2.335. Persentase Belanja Kesehatan (10%) Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019… II-177
Tabel 2.336. Persentase Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-178
Tabel 2.337. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kota Palopo Tahun 2015 – 2019….. II-178
Tabel 2.338. Ketepatan Waktu Penetapan APBD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019……. II-179
Tabel 2.339. Rata- Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-179
Tabel 2.340. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-179
Tabel 2.341. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-180
Tabel 2.342. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-180
Tabel 2.343. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-180

Tabel 2.344. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi PemerintahDi Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-181
Tabel 2.345. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-181
Tabel 2.346. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-181
Tabel 2.347. Persentase Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-182
Tabel 2.348. Persentase Tindak Lanjut Temuan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-182
Tabel 2.349. Persentase Pelanggaran Pegawai Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019….. II-182
Tabel 2.350. Jumlah Temuan BPK Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-183
Tabel 2.351. Tersedianya RKT Pada Alat – Alat Kelengkapan DPRD Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-183
Tabel 2.352. Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD dengan RPJMD dan RKPD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-183
Tabel 2.353. Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRDKota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-184
Tabel 2.354. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Di Kota Palopo Tahun 2015 -2019…….. II-184
Tabel 2.355. Persentase Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan Per Kapita Di Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-185
Tabel 2.356. Produktivitas Total Daerah Di Kota Palopo Tahun 2015-2019…… II-185
Tabel 2.357. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB Di Kota Palopo Tahun 2015-2019… II-186
Tabel 2.358. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum Kota Palopo Tahun 2015 -2019…… II-186
Tabel 2.359. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-187
Tabel 2.360. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-187
Tabel 2.361. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-187
Tabel 2.362. Data Jumlah dan Jenis Bank di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-188
Tabel 2.363. Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Palopo dan Kabupaten Sekitar, 2016…… II-188
Tabel 2.364. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Di Kota Palopo Tahun 2015– 2019…… II-189
Tabel 2.365. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-189
Tabel 2.366. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-190
Tabel 2.367. Angka Kriminalitas Yang Tertangani Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-190
Tabel 2.368. Persentase Desa Berstatus Berswasemba Terhadap Total Kelurahan Di Kota Palopo Tahun 2015 -2019…….. II-191
Tabel 2.369. Rasio Ketergantungan Di Kota Palopo Tahun 2015-2019…… II-191
Tabel 2.370. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…….. II-191

Tabel 2.371. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi DaerahTerhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… II-193
Tabel 2.372. Capaian SPM Kota Palopo Tahun 2019…….. II-217
Tabel. 2.373. Tabel Capaian Indikator Kinerja SDGs/TPB Kota Palopo Tahun 2019…….. II-220
Tabel 3.1. Perubahan target Pendapatan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020…. III-11
Tabel 3.2. Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2015-2019……..…… III-16
Tabel 3.3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015 – 2019 Kota Palopo……. III-16
Tabel 3.4. Rata-rata Pertumbuhan Neraca DaerahKota Palopo Tahun 2015-2019. III-18
Tabel 3.5. Rasio Lancar Kota Palopo Tahun 2017-2019……. III-22
TabeL 3.6. Rasio Quick Kota Palopo Tahun 2017-2019……... III-23
TabeL 3.7. Rasio Cash Kota Palopo Tahun 2017-2019……. III-23
Tabe 3.8. Rasio Total Kewajiban dengan Ekuitas Kota Palopo Tahun 2017-2019…. III-24
TabeL 3.9. Rasio Total Kewajiban dengan Aset Kota Palopo Tahun 2017-2019…….. III-24
Tabel 3.10. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palopo Tahun 2015 s/d Tahun 2019…… III-25
Tabel 3.11. Defisit Riil Anggaran Kota Palopo Tahun 2015 – 2019…… III-26
Tabel 3.12. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Palopo Tahun 2015 – 2019. III-26
Tabel 3.13. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Palopo 2015 – 2019…... III-27
Tabel 3.14. Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kota Palopo Tahun 2020-2023…… III-28
Tabel 3.15. Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kota Palopo Tahun 2021-2023…… III-28
Tabel 3.16. Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah……. III-32
Tabel 3.17. Proyeksi Belanja Daerah……. III-35
Tabel 3.18. Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah……. III-37
Tabel 3.19. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palopo 2021-2023…….…….. III-38
Tabel 3.20. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palopo…… III-38
Tabel 3.21. Perubahan Target Pendapatan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020 … III-38
Tabel 4.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah…… IV-2
Tabel 4.2. Interpretasi Capain Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kota Palopo… IV-16
Tabel 4.3. Keterkaitan SDGS dengan tanggung jawab pemerintah…… IV-47
Tabel 4.4. Kriteria dan Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis …… IV-51
Tabel 4.5. Penelaahan RPJMD Daerah lain dengan Kebijakan Pembangunan Kota Palopo …… IV-53
Tabel 5.1. Penjelasan Misi dan Keterkaitan dengan Visi……... V-2
Tabel 5.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Palopo Tahun 2018-2023…… V-4
Tabel 5.3. Keterkaitan Misi RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024……. V-6
Tabel 5.4. Sinergitas Visi Misi RPJMD Kota Palopo Terhadap Provinsi dan Nasional… V-7
Tabel 5.5. Keterkaitan RPJPD Kota Palopo 2005-2025 dengan RPJMD 2018-2023… V-11
Tabel 6.1. Rumusan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Palopo 2018-2023……. VI-2
Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palopo 2019-2023…… VI-4

Tabel 6.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kota Palopo 2018-2023…….. VI-7
Tabel 6.4. Program Pembangunan Daerah Kota Palopo 2019-2023…….. VI-14
Tabel 6.5. Program Pembangunan Daerah s.d Tahun 2020…….. VI-51
Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023 Kota Palopo…… VII-1
Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Palopo 2021-2023…….. VII-3
Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan PendanaanKota Palopo 2019-2020…… VII-33
Tabel 8.1. Indikator & Target Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kota Palopo 2019-2023…… VIII-1
Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palopo 2019-2023…… VIII-3
Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palopo 2019-2023…… VIII-4
Tabel 8.4. Penetapan Target Indikator Kinerja Terhadap Capaian Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minim (SPM) Kota Palopo 2019-2023…… VIII-40
Tabel 8.5. Penetapan Target Indikator Kinerja Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Palopo 2019-2023…… VIII-43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan I-7

Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Palopo II-1

Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Palopo II-3

Gambar 2.3. Peta Jenis Tanah di Kota Palopo II-4

Gambar 2.4. Peta Geologi Kota Palopo II-5

Gambar 2.5. Peta Hidrologi Kota Palopo II-5

Gambar 2.6. Peta DAS Kota Palopo II-6

Gambar 2.7. Peta Rawan Banjir Kota Palopo II-9

Gambar 2.8. Peta Rawan Kebakaran II-12

Gambar 2.9. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Palopo II-24

Gambar 2.10. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Palopo II-25

Gambar 2.11. Peta Kepadatan Penduduk Kota Palopo II-33

Gambar 2.12. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Palopo (2019) II-41

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Piramida Penduduk Kota Palopo Tahun 2019 ..... II-32

Grafik 2.2. Status Daya Dukung dan Ambang Batas Penyediaan Bahan Pangan KotaPalopo Tahun 2019 ..... II-40

Grafik 2.3. Perkembangan Ketersediaan Pangan Nabati Kota Palopo (2015-2019) II-40

Grafik 2.4. Perkembangan Jumlah Ternak yang Dipotong di RPH Kota Palopo (2015-2019) II-41

Grafik 2.5. Jumlah Sambungan Rumah PAM Tirta Mangkaluku Palopo 2015-2019 ..... II-43

Grafik 2.6. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Wilayah Tahun 2019 ..... II-65

Grafik 3.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Palopo TA. 2015-2019 ..... III-3

Grafik 3.2. Persentase Capaian Pendapatan Daerah Kota Palopo T.A. 2015-2019 ..... III-3

Grafik. 3.3. Persentase Perkembangan PAD Kota PalopoTahun 2015-2019 ..... III-4

Grafik 3.4. Rata –rata Persentase Komponen Sumber PADKota Palopo T.A.2015-2019 ..... III-5

Grafik 3.5. Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palopo Tahun 2015-2019 ..... III-7

Grafik 3.6. Perkembangan Pajak Daerah Kota Palopo Tahun 2015-2019 ..... III-8

Grafik 3.7. Capaian Komponen Pendapatan Transfer Kota Palopo Tahun 2015-2019 ..... III-9

Grafik 3.8. Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2015-2019 ..... III-10

Grafik 3.9. Perkembangan Komponen Belanja Daerah Kota Palopo Tahun 2015-2019 ..... III-12

Grafik 3.10. Rata-Rata Proporsi Komponen Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015-2019 ..... III-13

Grafik 3.11. Persentase Belanja Langsung Terhadap Total Belanja III-14

Grafik 3.12. Perkembangan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2015-2019 ..... III-15

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 342 mengemukakan bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila : a). hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b). hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan c). terjadi perubahan yang mendasar, dan perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Selanjutnya perubahan yang mendasar terkait perubahan RPJMD, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 didasarkan adanya perubahan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Selain itu, terjadinya Bencana Non-Alam yaitu Pandemi Covid-19 yang memberi imbas negatif pada beberapa aspek kehidupan, meliputi: Pertama, aspek kesehatan, dengan belum ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis. Kedua, aspek ekonomi, perekonomian Kota Palopo diperkirakan mengalami perlambatan. Ketiga, aspek sosial, berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang berimpilkasi pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Keempat, aspek keuangan, menurunnya kapasitas fiskal pemerintah daerah dan perubahan struktur APBD Kota Palopo.

Dokumen RPJMD menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 263 ayat(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintasPerangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.

Masalah pembangunan berkelanjutan juga menjadi perhatian dalam penyusunan perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018 – 2023. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda internasional dan Indonesia sebagai negara berkembang telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

Pada dasarnya, Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan dengan pendekatan proses (Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas) dan pendekatan substansi (Holistik-Tematik, Integratif, Spasial). Pendekatan Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan Politik artinya bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan, karena rakyat sebagai pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah dan wakil kepala daerah. Olehnya itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pendekatan atas-bawah *(top-down)* dan Bawah-atas *(bottom-up)*, dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Sementara pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. RPJMD Kota Palopo 2018-2023 merupakan tahapan atau periode ke IV (ke empat) dari pentahapan pembangunan dua puluh tahunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo 2005-2025.

Tahapan penyusunan perubahan RPJMD Kota Palopo 2018–2023 dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan Permedagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 344 yaitu berlaku ketentuan mutatis mutandis.

Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat dari RPJPD Kota Palopo Tahun 2005-2025 yang menjabarkan beberapa sasaran pembangunan lima tahun tahap keempat. Dokumen Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangkat Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau

dalam Rangkat Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangkat Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 77);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

17) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
21) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
28) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
31) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
39) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
40) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008 -2028 ;
41) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender;
42) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
43) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8);
44) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 9);
45) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 11);
46) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8);
47) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 3).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kota Palopo bukanlah suatu dokumen yang berdiri sendiri melainkan merupakan suatu rangkaian dokumen dari perencanaan lainnya baik pada level Nasional maupun Provinsi. Semua dokumen perencanaan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diwujudkan lebih lanjut dalam bentuk RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai konsekuensi negara kesatuan, perencanaan pembangunan daerah seharusnya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Bahkan sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan pilar dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu, Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan tidak mengabaikan kepentingan negara.

RPJMD Kota Palopo merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan dokumen tersebut mempertimbangkan aspek-aspek dokumen perencanaan lain seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi, RPJP Kota Palopo, RPJP Kabupaten Daerah sekitar, RTRW Nasional, RTRW Propinsi, RTRW Kota Palopo dan RTRW Kabupaten Daerah sekitar.

Secara prosedural Perubahan RPJMD telah berpedoman pada RPJP Nasional, RPJP Propinsi Sulawesi Selatan, RPJP Kota Palopo dan RPJP daerah sekitar. Disamping itu perubahan RPJMD Kota Palopo disusun dengan mengacu pada RPJM Nasional dan perubahan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan, dan memperhatikan RPJMD daerah sekitar. Perubahan RPJMD Kota Palopo juga berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Palopo dan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah sekitar agar terjadi keterpaduan pembangunan antar wilayah secara regional. RPJMD Kota Palopo yang telah dijadikan Peraturan Daerah, akan dijabarkan ke dalam RKPD dan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun dan menetapkan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.1.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

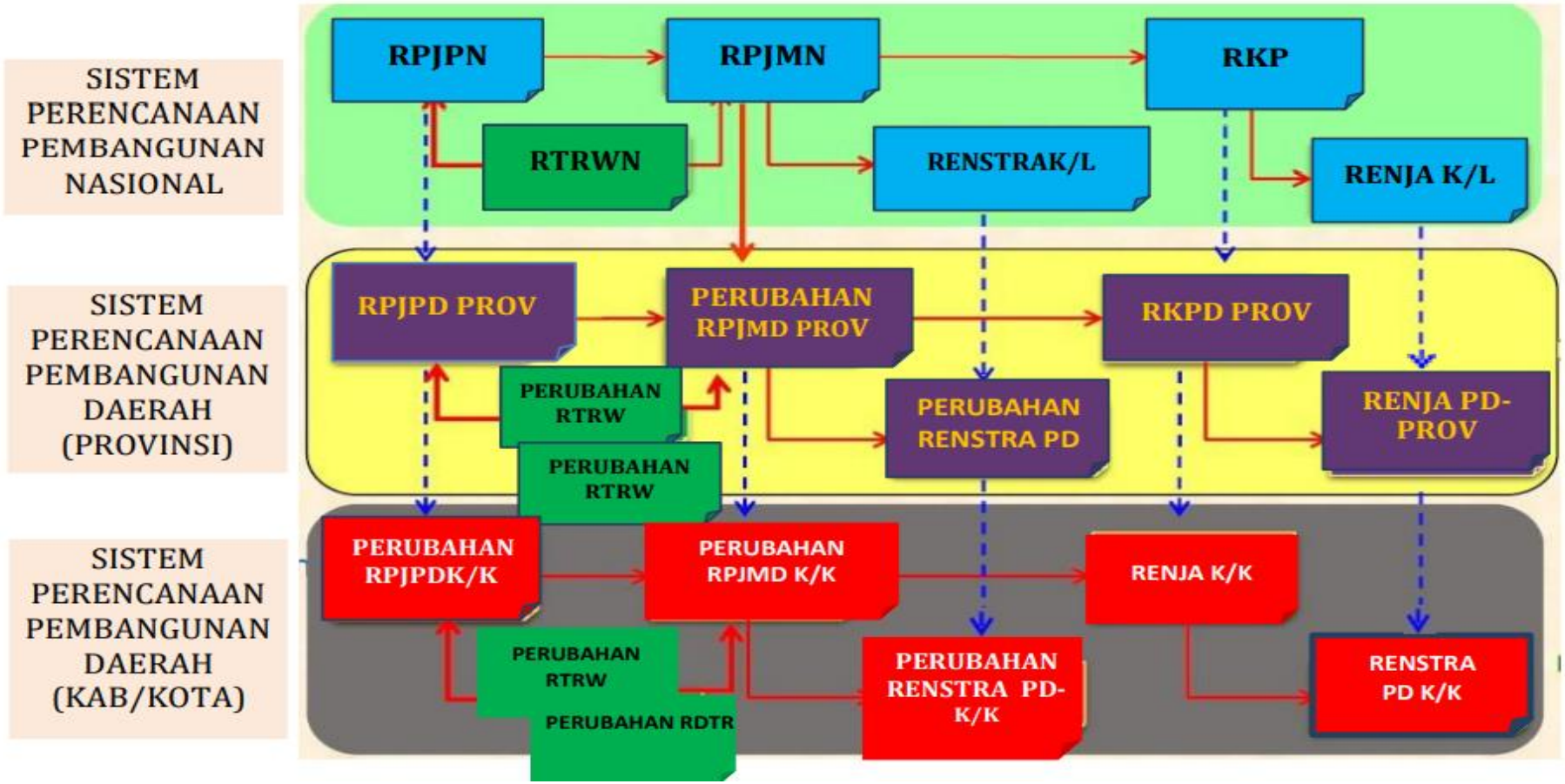

Keterkaitan dokumen RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Keterkaitan Antar RPJM Nasional Tahun 2020-2024
dengan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023

Visi Misi. RPJMN 2020-2024 **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**	Visi RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 **"Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan pada Tahun 2023"**
MISI	MISI
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan
2. Struktur Ekonomi yang Produktif Mandiri dan Berdaya Saing	4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisinis
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpecaya	3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan
7. Perlindungan bagi Segenap bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh warga	1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Terpecaya	3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	

Sedangkan keterkaitan dokumen RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Keterkaitan Antar RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
dengan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023

Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 : **Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter**	Visi RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 **"Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan pada Tahun 2023"**
MISI	MISI
1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisinis
	5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisinis

1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Kota Palopo Tahun 2005-2025 dan menerjemahkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan adalah sebagai berikut : 1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. 2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu tahun. 3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 4. Sebagai pedoman Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Palopo. 5. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RPJMD Kota Palopo

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 maka sistematika Perubahan RPJMD Kota Palopo 2018-2023, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan RPJMD yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan perubahan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan perubahan RPJMD serta sistematika penulisan perubahan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Palopo secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan.Aspek yang dibahas diantaranya aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi: kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan kerangka pendanaan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini menyajikan tentang permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kota Palopo dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kota Palopo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.Selain itu memberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunandan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misiserta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab IX Penutup

Menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan serta ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPJMD Kota Palopo 2018-2023.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Aspek Geografi

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017, Kota Palopo mempunyai luas wilayah **247,52** km², memiliki **9 Kecamatan**, dan **48 Kelurahan**. Sedangkan Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Palopo dan Mamasa, maka Kota Palopo berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah Utara, Teluk Bone di sebelah Timur dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah Selatan serta Kabupaten Luwu di sebelah Barat. Data ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Luas dan Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan Kota Palopo

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase (%)
1.	Wara Selatan	4	10,66	**4,21**
2.	Sendana	4	37,09	**14,66**
3.	Wara	6	11,49	**4,54**
4.	Wara Timur	7	12,08	**4,77**
5.	Mungkajang	4	53,80	**21,27**
6.	Wara Utara	6	10,58	**4,18**
7.	Bara	5	23,35	**9,23**
8.	Telluwanua	7	34,34	**13,57**
9.	Wara Barat	5	54,13	**23,56**
Jumlah		**48**	**247.52**	**100,00**

Sumber : Diolah dari beberapa sumber, 2020

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kecamatan Wara Barat merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dan kecamatan yang terkecil adalah Wara Utara. Kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Wara Timur dan kelurahan yang paling sedikit adalah Wara Selatan, Sendana, Mungkajang. Untuk melihat batas wilayah administrasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta Administratif Kota Palopo

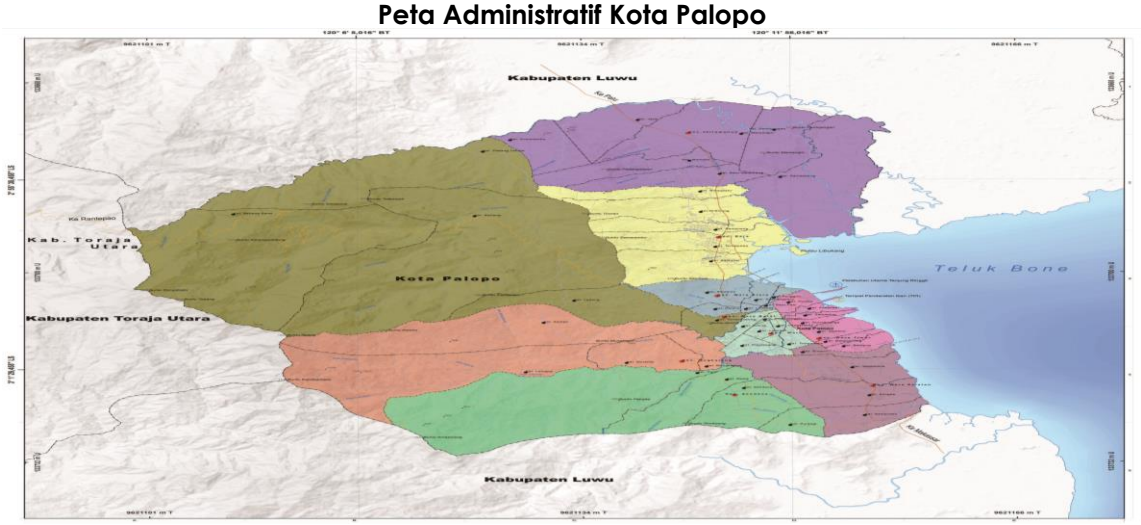

Sumber: Laporan Akhir Dokumen Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Palopo terletak antara **2°53'.15'' - 3°04'.08''** Lintang Selatan dan **120°03'.10'' - 120°14'.34''** Bujur Timur. Geografi wilayah mencakup pesisir di bagian Timur dan pegunungan di bagian Barat, serta dataran rendah memanjang dari utara sampai selatan, dengan 6 aliran sungai. Kemiringan lereng Kota Palopo dilihat dari titik ketinggiannya di atas permukaan air laut antara 0 – 25, 26 – 100, 101 – 500, 501 – 1000, dan 1000+ dpl dengan klimatologi Kota Palopo dipengaruhi oleh curah hujan, suhu dan kelembaban udara.

2.1.3. Topografi

Kondisi topografi Kota Palopo meliputi ketinggian antara 0 – 1.500 m dari permukaan air laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng antara 0–2 %, 2–15 %, 15–40 %, dan > 40 %. Adapun tingkat kemiringan lereng Kota Palopo berdasarkan luas wilayahnya yang terluas adalah wilayah dengan tingkat kemiringan lereng > 40 % dengan luas 92,959 Km^2 sedangkan tingkat kemiringan lereng dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat kemiringan lereng 2 % - 15 % dengan luas wilayah 8,951 Km^2. Untuk lebih jelasnya, luas wilayah berdasarkan tingkat kemiringan lereng Kota Palopo menurut kecamatan ditunjukkan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Kemiringan Lereng
Kota Palopo Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Tingkat Kemiringan Lereng (Km^2)			
			0-2 %	2–15 %	15–40 %	> 40 %
1.	Wara Selatan	10,66	7,462	1,066	2,132	-
2.	Sendana	37,09	5,564	-	22,254	9,272
3.	Wara	11,49	11,490	-	-	-
4.	Wara Timur	12,08	12,080	-	-	-
5.	Mungkajang	53,80	2,690	-	16,140	34,97
6.	Wara Utara	10,58	6,348	2,116	2,116	-
7.	Bara	23,35	7,005	2,335	14,010	-
8.	Tellu Wanua	34,34	24,038	3,434	6,868	-
9.	Wara Barat	54,13	-	-	5,413	48,717
Jumlah		**247,52**	**76,677**	**8,951**	**68,933**	**92,959**

Sumber : Diolah dari beberapa sumber, 2020

Kondisi topografi Kota Palopo meliputi ketinggian antara 0 – 1.500 m dari permukaan air laut (dpl) dengan tingkat ketinggian antara 0–25 m dpl, 26–100 m dpl, 101–500 m dpl, 501-1000 m dpl, dan > 1000 m dpl. Adapun tingkat ketinggian Kota Palopo berdasarkan luas wilayahnya yang terluas adalah wilayah dengan tingkat ketinggian 0 – 25 m dpl dengan luas 76,677 Km^2 sedangkan tingkat ketinggian dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat ketinggian 26 – 100 m dpl dengan luas wilayah 8,951 Km^2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Kondisi Topografi Kota Palopo Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Tingkat Ketinggian Daerah (M DPL)				
			0 – 25	26–100	101-500	501-1000	> 1000
1.	Wara Selatan	10,66	7,462	1,066	-	2.132	-
2.	Sendana	37,09	5,564	-	22,254	9,272	-
3.	Wara	11,49	11,490	-	-	-	-
4.	Wara Timur	12,08	12,080	-	-	-	-
5.	Mungkajang	53,80	2,690	-	16,140	13.450	21.520
6.	Wara Utara	10,58	6,348	2,116	2,116	-	-
7.	Bara	23,35	7,005	2,335	14,010	-	-
8.	Tellu Wanua	34,34	24,038	3,434	6,868	-	-
9.	Wara Barat	54,13	-	-	5,413	35.184	13.533
Jumlah		**247,52**	**76,677**	**8,951**	**66,801**	**60,038**	**35,053**

Sumber : Diolah dari beberapa sumber, 2020

Keadaan permukaan tanah bergunung dan berbukit terutama pada sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Daerah dengan kondisi topografi relatif rendah dan berbukit pada bagian Utara. Sedangkan bagian Timur merupakan daerah pantai yang membujur dari Utara ke Selatan dengan panjang pantainya kurang lebih 25 Km. Bagian Selatan berbukit terutama bagian Barat, sedangkan bagian lainnya merupakan dataran rendah yang datar dan bergelombang. Untuk melihat kondisi Topografi Kota Palopo dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kota Palopo

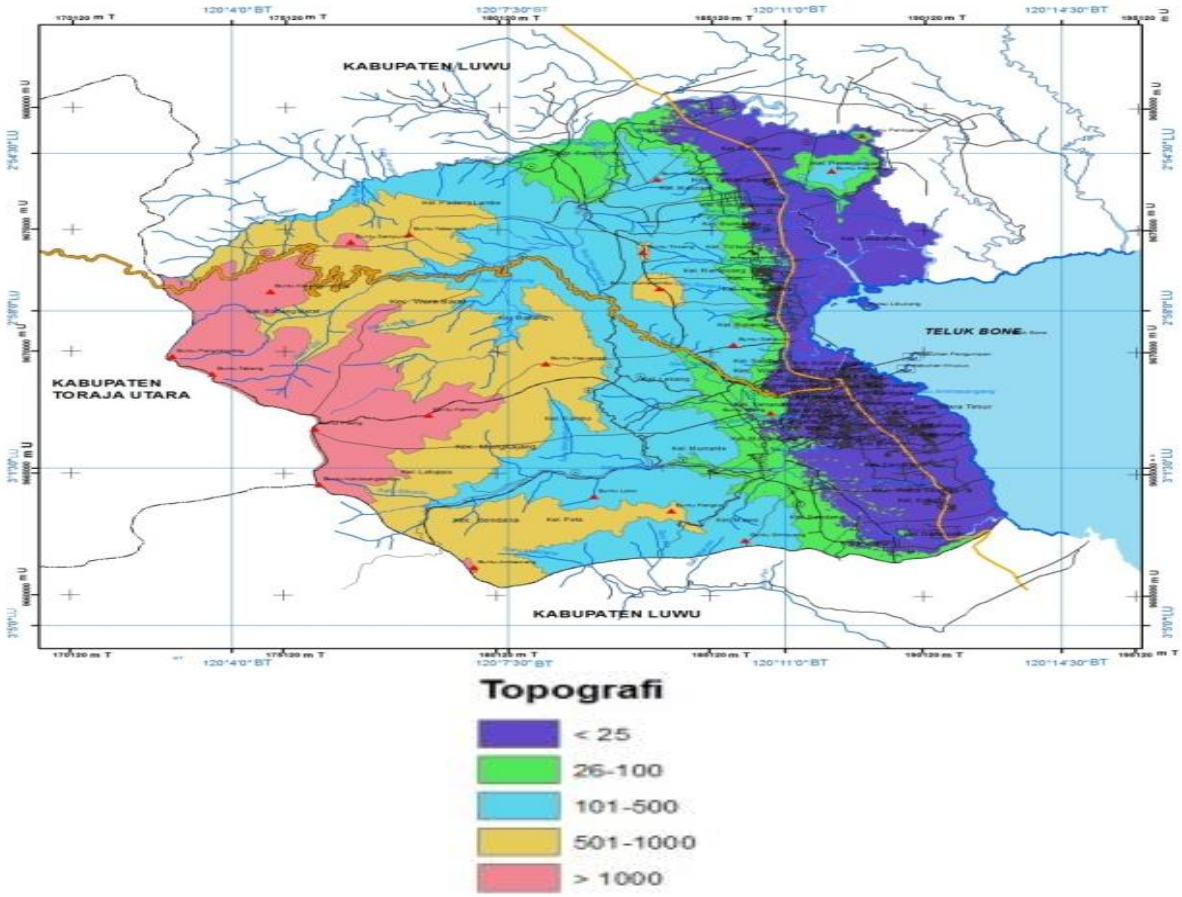

Sumber: Laporan Akhir Dokumen Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

2.1.4. Geologi

Struktur batuan di Kota Palopo pada umumnya terdiri dari 3 jenis batuan beku. Batuan metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah Kota Palopo. Batuan beku yang dijumpai secara umum terdiri dari intrusi batuan beku granit dan gebro serta beberapa intrusi kecil lainnya. Kemudian dijumpai pula batuan beku yang merupakan jejak aliran larva yang telah membeku yang bersusunan balstik hingga andesitik.Batuan sedimen yang dijumpai meliputi batu gamping, batu pasir, dan konglomerat, sedangkan batuan metamorf yang dijumpai meliputi batuan meta sedimen. Batuan vulkanik yang dijumpai terdiri dari tufa dan breksi vulkanik. Sedangkan endapan-endapan alluvial terdiri dari material-matrial bersusunan berangkal, kerakai, kerikil, pasir hingga lempung, kondisi geologi ini akan menunjukkan potensi lahan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan bangunan Kota Palopo.

Diwilayah Kota Palopo mempunyai struktur batuan yang merupakan bahan galian sebagai bahan induk pembentuk tanah, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut;

a. *Bahan tanah liat untuk pembentuk batu bata*, banyak diupayakan oleh masyarakat di areal sawah di Kecamatan Wara, dan Wara selatan.
b. *Batuan endapan sungai berupa sirtu (pasir dan batu),* banyak terdapat di sungai latuppa didominasi oleh batuan beku yang merupakan batuan sedimen beku, ukurannjya bervariasi dari yang sangat besar sampai yang kecil dan merupakan pecahan batu sampai butiran.

c. *Bahan galian atau butiran emas,*terdapat di sungai Latuppa pada bagian hulu di atas bukit, merupakan daerah bekas penambangan emas di beberapa tempat pada zaman belanda. Dan pada saat ini masih diusahakan oleh masyarakat secara tradisional.
d. *Batuan sedimen,* menyebar di bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
e. *Batuan terobosan,*yang menyebar di bagian utara yang merupakan daerah pegunungan.

Jenis batuan lainnya yang meruoakan pelapukan bahan pembentuk tanah, yang mempunyai kandungan potensial di Kota Palopo, adalah ;

a. *Batuan gamping dan marmer (limestone dan marble),* dimana lokasi penyebarannya di Kecamatan Telluwanua.
b. *Batuan Granit dan Granodiorit*, untuk bahan bangunan lantai rumah, batu hias dinding dan sebagainya serta untuk pengerasan jalan (aggrogat) dimana lokasi penyebarannya di Kecamatan Wara dan Wara Selatan.
c. *Batu sabak, filit, kuarsil, batu gamping, dan batu lamau*, terdapat di Kecamatan Wara, Wara Utara dan Bagian Barat Kota Palopo.

Jenis batuan ini dikelompokkan menurut umu pembentukannya yang diurut dari batuan yang termuda hingga yang tertua, maka batuan-batuan ini tersusun atas 5 (lima) kelompok, yaitu;

a. *Kelompok endapan alluvial* (termasuk didalamnya endapan Qal atau terumbu lokal)yang termasuk didalamnya endapan alluvial berupa karakal, kerikil, pasir dan batu, serta terumbu koral yang tersebar disepanjang pantai dan alur aliran sungai Latuppa.
b. *Batuan Tmb;*terdiri dari napal dan sisipan batu gamping setempat-tempat, mengandung batu pasir gamping, konglomerat dan breksi. Selain itu terdapat beberapa kelompok intrusi batuan beku yang terdiiri dari batuan beku granit dan gabro. Batuan granit ini dijumpai pada Kecamatan Wara dan Kecamatan Telluwanua.
c. *Batu Tol,* yaitu kelompok batuan hasil pembukuan aliran larva yang bersusun balastik hingga *andesitic*, kemudian breksi vulkanik, batu pasir dan batu lamau, serta batuan setempat-tempat mengandung fieldsphatoid. Batuan ini terususun di Bagian Selatan Kota Palopo dan banyak tersebar di daerah Kecamatan Wara Selatan.
d. *Batuan Tet,* yaitu terdiri dari serpih, batu gamping dan batu pasir dengan sisipan konlomerat. Kelompok batuan ini terdapat di Kecamatan Wara dan Kecamatan Telluwanua.
e. *Batuan TKI,*yaitu terdiri dari batuan-batuan yang mengalami metamorfisme, antara lain serpihan, filit, rijang, marmer, kuarsit dan beberapa bagian di utara Kota Palopo masuk dalam wilayah Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Selatan.

Gambaran tentang Jenis Tanah dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3
Peta Jenis Tanah di Kota Palopo

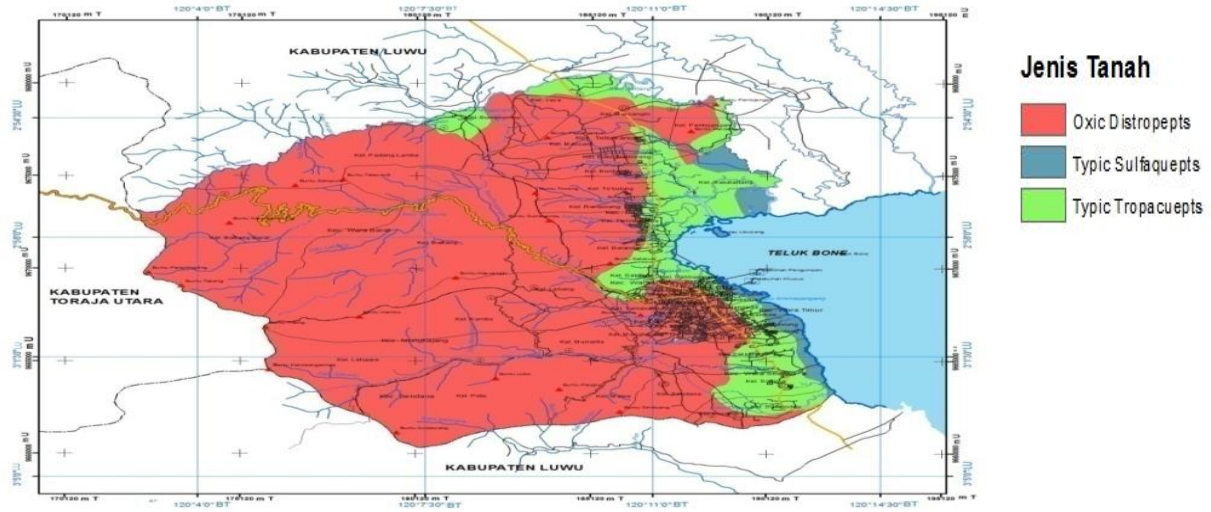

Sumber: Laporan Akhir Dokumen Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

Sedangkan gambaran tentang Geologi Kota Palopo dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kota Palopo

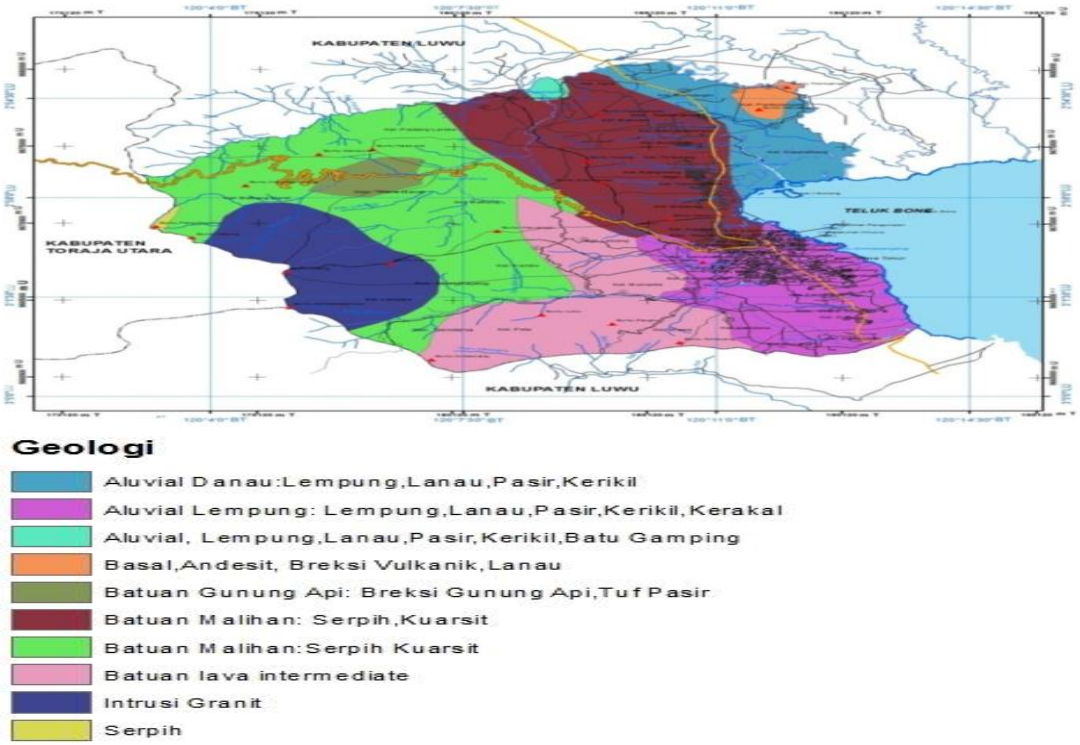

Sumber: Laporan Akhir Dokumen Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

2.1.5. Hidrologi

Keadaan Hidrologi di Kota Palopo umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Bambalu/Sungai Battang, Sungai Latuppa, Sungai Boting dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Disatu sisi keberadaan sungai-sungai tersebut sangat berpotensi dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya wisata permandian alam dan *rafting*. Kondisi hidrologi Kota Palopo secara umum adalah sebagai berikut;

1. Air tanah, air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter.
2. Air permukaan, air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan-genangan.

Untuk melihat gambaran Hidrologi dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5
Peta Hidrologi Kota Palopo

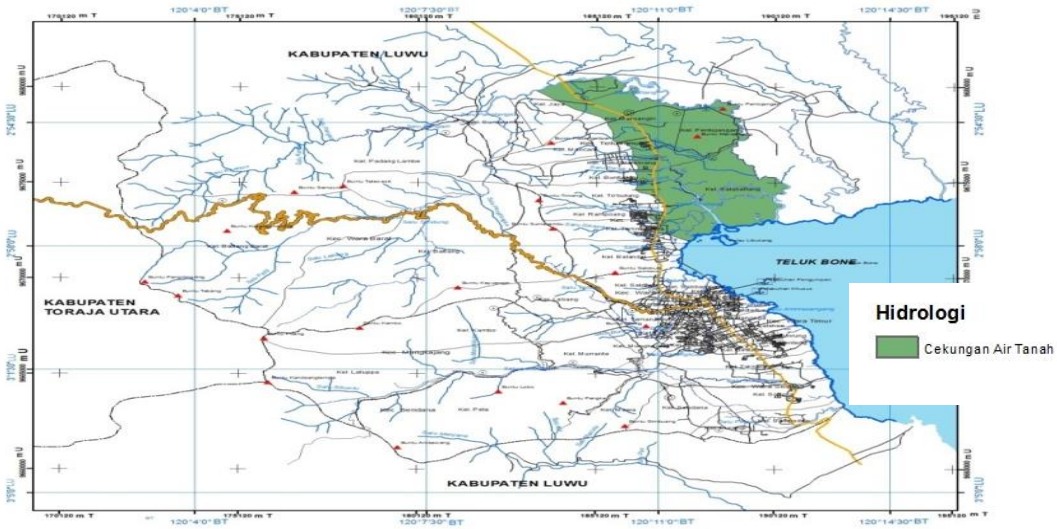

Sumber: Laporan Akhir Dokumen Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

Dalam hal ini, hidrologi di Kota Palopo untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan kelestariannya harus tetap dijaga.Potensi sumberdaya air di Kota Palopo selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang

melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya.

Potensi sumberdaya air di wilayah Kota Palopo yang telah termanfaatkan oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam air tanah dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran.

Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian, pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya penduduk menggunakan sumur air tanah dangkal, dalam *(artesis),* air permukaandan mata air yang bersumber dari pegunungan.

Wilayah Kota Palopo terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai baik yang melintas dalam pusat kota maupun dipinggiran Kota Palopoterdiri dari 6 daerah terdiri dari :

1. DAS Purangi dengan luas cakupan area lebih kurang 1.037 hektar.
2. DAS Bua dengan luas cakupan area lebih kurang 1.168,04 hektar.
3. DAS Songkama'ti dengan luas cakupan area lebih kurang 136,20 hektar.
4. DAS Pacangkuda dengan luas cakupan area lebih kurang 6.412,80 hektar.
5. DAS Boting dengan luas cakupan area lebih kurang 3.087,25 hektar.
6. DAS Salubattang dengan luas cakupan area lebih kurang 13.760,59 hektar.

Gambaran tentang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Palopo dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6
Peta DAS Kota Palopo

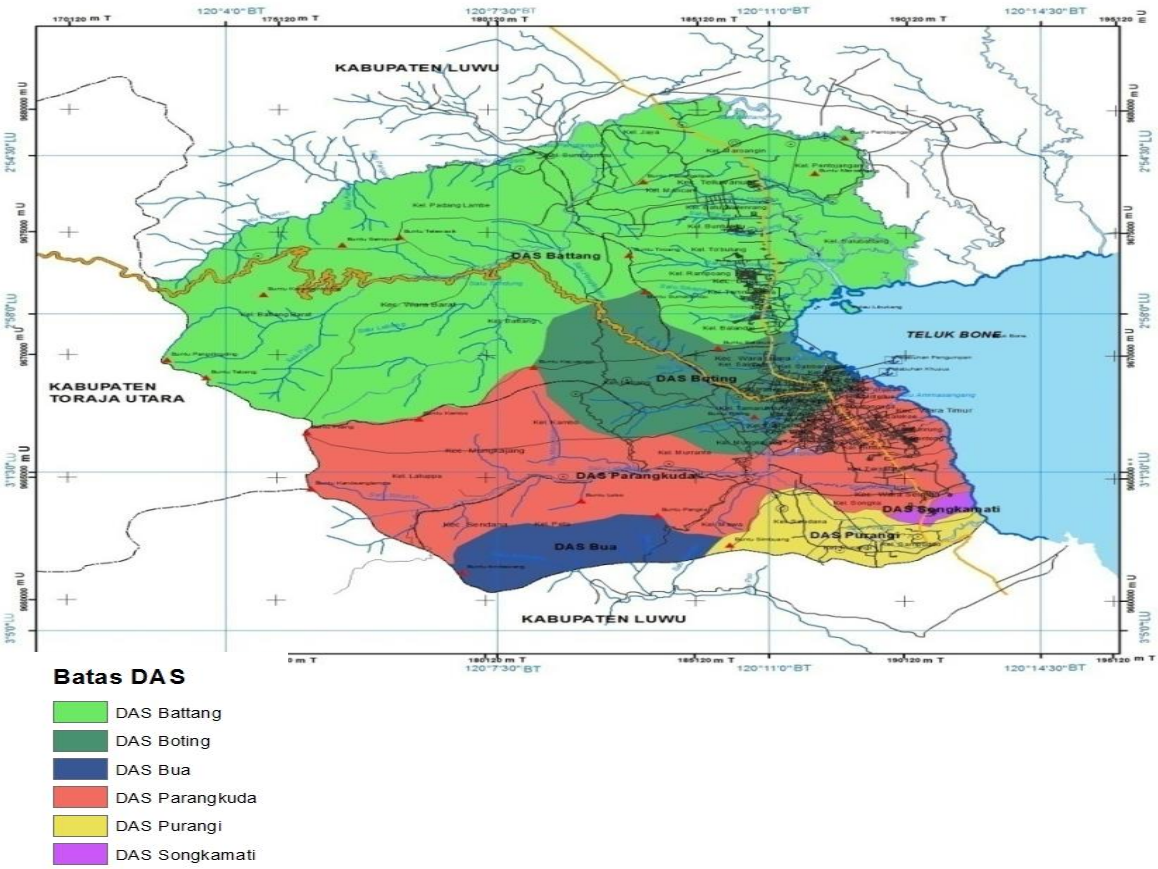

Sumber: Laporan Akhir Dokumen Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

2.1.6. Klimatologi

Curah hujan yang dicatat dari data Badan Metereologi dan Geofisika di pusat pencatatan di wilayah Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, menunjukkan curah hujan untuk daerah dataran rendah mempunyai variasi antara 500-1000 mm/th, sedangkan untuk daerah hulu (pengunungan) berkisar antrara 1000-2000 mm/tahun. Curah hujan dan hari hujan ini akan

menentukan pula potensi air permukaan (air sungai) maupun ketersediaan akir tanah (*ground water*) seperti dalam peta hidrogeologi Kota Palopo dan wilayah Kabupaten Luwu pada umumnya, yang dapat digunakan sebagai data potensi air tanah dalam jika diperlukan untuk fasilitas pengairan menggunakan sistem pompa air tanah dalam untuk kebutuhan pertanian maupun perkebunan/peternakan.

Kondisi hari hujan harian di Kota Palopo tidak menentu karena udara dan butir air yang diuapkan dari laut mengumpul menjadi awan dan mengenai pengunungan, akhirnya sewaktu-waktu menjadi hujan di Kota Palopo. Dalam hal ini dapat dirasakan, pada waktu musim kemarau masih dapat dirasakan hujan, sebaliknya pada musim hujan masih banyak didapatkan hari tanpa hujan, ini menjadi ciri khusus yang memungkinkan berbagai jenis tanaman buah bergantian berbuah sepanjang tahun. Demikian pula, panjang hari hujan lebih relatif lebih pendek jika dibandingkan dengan wilayah lain di Luwu Raya, sehingga lebih tepat untuk usaha pengeringan, baik untuk hasil laut maupun hasil pertanian.

Suhu udara rata-rata tahunan di dataran rendah Kota Palopo berkisar antara rata-rata $25{,}5^0$ C – $27{,}9^0$ C, angka ini berkurang $0{,}6^0$ C setiap kenaikan 100 Meter, sehingga makin tinggi keadaan permukaan tanah disuatu wilayah udaranya semakin tinggi.Kelembaban udara dipengaruhi oleh keadaan ketinggian permukaan tanah, suhu udara dan kecepatan angin. Kelembaban bervariasi antara 78,8 % sampai 85 % tergantung dari lamanya penyinaran matahari yang bervariasi antar 5,2 sampai 8,5 jam/hari.

Kecepatan angin berkisar antara 41,9-72 km/jam dalam keadaan normal. Angin bertiup dari laut ke daratan pada waktu pagi sampai sore hari dan pada malam hari angin darat mengarah ke laut. Cuaca Kota Palopo cepat berubah dari keadaan panas/kering menjadi mendung dan hujan, hal ini disebabkan uap air laut yang dihembuskan ke arah daratan sampai ke daerah pegunungan di wilayah bagian barat dan sebagian utara Kota Palopo, akan mengumpul menjadi butiran air hujan karena kelembaban udara di kawasan pegunungan, yang terbawa angin ke daerah dataran yang lebih rendah, sehingga terjadi curah hujan yang kebanyakan di wilayah pengunungan dan wilajyah daratan sewaktu-waktu. Sehingga Kota Palopo seakan-akan tidak mengenal musim kering yang berkepanjangan karean keadaan sehari-harinya sering terjadi hujan kiriman dan mendung secara mendadak dan hilang dengan cepat pula.

2.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Palopo cukup bervariasi sesuai dengan karakteristik wilayah yang dimukimi oleh masyarakat. Secara umum, Kota Palopo ini memiliki 3 dimensi wilayah yaitu pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah serta pesisir dan laut. Perbedaan dimensi wilayah ini mempengaruhi aktifitas masing – masing masyarakat yang bermukim ditempat tersebut. Luas dari masing – masing jenis penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Kota Palopo s.d Tahun 2020

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan	15.075,63	58,392
2	Permukiman	1.238,85	4,798
3	Sawah	2.689,00	10,415
4	Tambak	1.258,68	4,875
5	Padang Rumput	2,78	0,011
6	Kebun/Tegalan	1.711,77	6,630
7	Semak Belukar	3.724,87	14,427
8	Sungai	102,88	0,398
9	Rawa	1,22	0,005
10	Tanah Kosong	12,32	0,048
Jumlah		**24.752,00**	**100**

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa 58,392% wilayah Kota Palopo masih berupa hutan dengan luas permukiman sebesar 4,798%. Sementara luas sawah sebesar 10,415% dari luas Kota Palopo.

A. Kawasan Budidaya

Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya :

a. Perikanan budidaya tambak seluas lebih kurang 550 Ha di Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua;
b. Budidaya air tawar seluas 355,8 Ha di Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Telluwanua;
c. Kawasan potensil budidaya rumput laut meliputi tambak dan pantai yang berada di Perairan Teluk Bone seluas lebih kurang 150 Ha di wilayah Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua;
d. Balai Benih Ikan Salopao dengan luas 1,3 Ha di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua.

B. Kawasan Lindung

- **Kawasan Hutan Lindung**
  Kawasan hutan lindung dengan luas ± 8.297,58 hektar terletak di Kelurahan Latuppa, dan Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, dan Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat.
- **Kawasan Pelestarian Alam**
  Kawasan Taman Wisata Alam Nanggala III seluas 891 hektar terletak di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.
- **Kawasan Yang Memberikan Perlindungan TerhadapKawasan Bawahannya**
  Kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya ± 12 hektar merupakan kawasan resapan air di Kawasan Mangkaluku dan sekitarnya Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang.

2.2. Wilayah Rawan Bencana

Berikut adalah analisis kerentanan wilayah rawan bencana di Kota Palopo berdasarkan Laporan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG):

Tabel 2.5.
Tingkat Bencana di Kota Palopo,Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Terdampak Bencana dengan Klasifikasi Tinggi (Ha)							
		Banjir	Banjir Bandang	Longsor	Tsunami	Cuaca Ekstrim	Gempa	Kebakaran	Kekeringan
1	Wara Selatan	20	-	-	-	5	-	-	-
2	Wara	45	-	-	-	-	-	-	-
3	Wara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Wara Barat	-	-	5	-	-	-	12	67
5	Wara Utara	-	-	-	-	10	-	-	-
6	Mungkajang	-	-	-	-	-	-	7	53
7	Sendana	-	-	-	-	-	-	4	35
8	Bara	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Telluwanua	75	75	-	-	-	-	-	-
Jumlah		140	75	5	-	15	-	23	155

Sumber : BPBD, Damkar, dan BMKG, 2020

Adapun uraian dari tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Banjir

Berdasarkan Data Tahun 2019 pada Tabel 2.5 diatas disebutkan bahwa kecamatan yang pernah mengalami banjir adalah Kecamatan Wara Selatan (sekitar 20 Ha), yaitu di Jl. Memed dan Jl. Pantai 1. Sedangkan yang mengalami bencana banjir di Kecamatan Wara (sekitar 45 Ha) adalah Seputaran Daerah Kompi 721, Jl. Ahmad Dahlan, Jl. Ambe Nona, Jl. Mangga, dan Jl. Rambutan. Dan luasan bencana banjir untuk Kecamatan Telluwanua adalah sekitar 75 Ha. Sehingga secara keseluruhan, data akumulasi banjir di Kota Palopo sampai dengan Tahun 2019 adalah sekitar 140 Ha.

Kawasan rawan banjir berada di Berada di Kelurahan Salubattang, Kelurahan Jaya, Kelurahan Mancani, (Kecamatan Telluwanua), Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Batupasi (Kecamatan Wara Utara), Kelurahan Pontap, Kelurahan PonjalaE, Kelurahan SalotelluE (Kecamatan Wara Timur), Kelurahan Amassangan, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Tompotikka (Kecamatan Wara), dan Kelurahan Padanglambe (Kecamatan Wara Barat).

Ancaman bencana banjir masih kerap melanda Kota Palopo. Pada tahun 2017 terjadi bencana alam banjir dengan arus deras di Kecamatan Mungkajang yang menyebabkan 1 (satu) jembatan utama rusak. Selain itu, banjir juga terjadi di Kecamatan Telluwanua yang menyebabkan beberapa rumah warga, sarana umum (masjid) dan fasilitas pemerintahan (Kantor Lurah) terendam dan mengharuskan 16 KK mengungsi.

Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya banjir di Kota Palopo adalah:

- Kondisi DAS dalam keadaan kritis yang berakibat resapan air hujan ke dalam sistim akuifer semakin berkurang dan erosi lahan semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan pula sedimentasi di alur dan muara sungai yang juga tinggi.
- Kapasitas sistem pengendali banjir yang ada seperti dimensi palung sungai, tampungan air, sistem drainase dan lainnya kurang memadai.

Namun demikian, berdasarkan perhitungan Tim Revisi RTRW Kota Palopo, skor/indeks ancaman bencana banjir di Kota Palopo secara umum masih pada posisi rendah, yaitu pada skor 0,01, seperti yang terlihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Skor Ancaman Banjir Kota Palopo

Kedalaman (m)	Kelas	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 0,76	Rendah	1	100	0,01 (rendah)
0,76 – 1,5	Sedang	2		
>1,5	Tinggi	3		

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

Untuk melihat kerawanan banjir dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7
Peta Rawan Banjir Kota Palopo

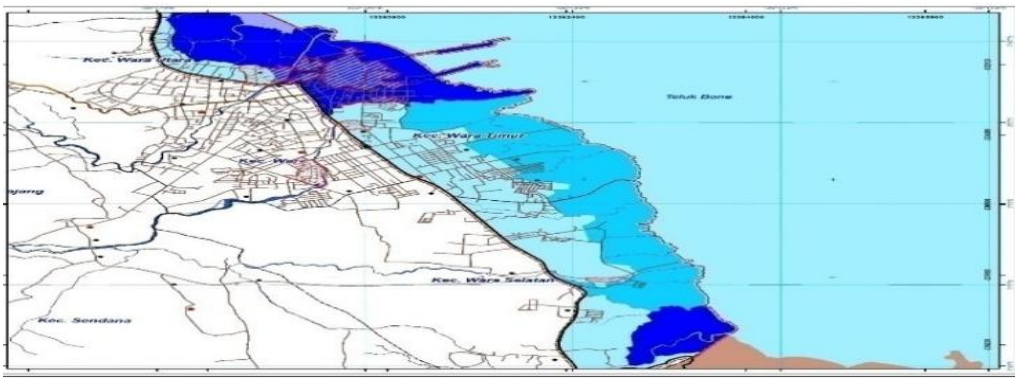

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

b. Banjir Bandang

Sejak terbentuknya Kota Palopo Tahun 2002, telah terjadi Banjir Bandang 1 (satu) kali, yaitu pada Tahun 2006. Kerusakan yang ditimbulkan oleh Banjir Bandang tersebut dapat dilihat pada

Tabel. 2.5 di atas. Adapun luasan yang terdampak diperkirakan sekitar 75 Ha yang berada di Kecamatan Telluwanua, yaitu Poros Palopo – Masamba, Salutete, Pentojangan, Salubattang, dan Marobo.

c. Longsor

Berdasarkan Data Tabel 2.5, bahwa pada Tahun 2019 telah terjadi bencana longsor di Kecamatan Wara Barat, yaitu Jalan Poros Palopo – Toraja (Battang Barat) sekitar 5 Ha.

Secara umum kawasan rawan bencana tanah longsor yang berada di Kawasan Battang Barat, dan Battang (Kecamatan Wara Barat), Kawasan Latuppa, dan Kawasan Kambo (Kecamatan Mungkajang), Kawasan Peta (Kecamatan Sendana).Intensitas terjadinya bencana gerakan tanah dalam beberapa tahun terakhir di beberapa lokasi di wilayah Kota Palopo cenderung meningkat frekuensinya. Dan pada tahun 2020 terjadi kejadian luar biasa, yaitu terjadinya tanah longsor pada KM 24 yang mengakibatkan terputusnya akses Jalan Nasional yang menghubungkan Kota Palopo dan Kabupaten Toraja Utara.

Bencana ini relatif sering terjadi di kawasan bagian barat Kota Palopo, khususnya di wilayah Kelurahan Battang Barat dan Kelurahan Battang. Fenomena ini disebabkan oleh makin meningkatnya pemanfaatan lahan di daerah rentan gerakan tanah. Kondisi ini diperparah saat intensitas hujan yang tinggi terjadi dalam durasi yang panjang. Namun demikian, berdasarkan perhitungan Tim Revisi RTRW Kota Palopo, skor/indeks ancaman bencana tanah longsor di Kota Palopo secara umum masih pada posisi rendah dan sedang dengan skor 0,01, seperti yang digambarkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Skor Ancaman Bencana Tanah Longsor Kota Palopo Tahun 2019

Zona Ancaman	Kelas	Nilai	Bobot (%)	Skor
Gerakan Tanah Sangat Rendah, Rendah	Rendah	1	100	0,01 (rendah)
Gerakan Tanah Menengah	Sedang	2		
Gerakan Tanah Tinggi	Tinggi	3		

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

Klasifikasi Zona dan Kelas Ancaman Longsor adalah sebagai berikut :

- Kelas Sedang : Kecamatan Wara Barat ; Jalan Poros Palopo - Toraja
- Kelas Rendah :
  1) Kecamatan Mungkajang Daerah Kambo
  2) Kecamatan Wara Utara Daerah Jalan Lingkar Barat
  3) Kecamatan Daerah Jalan Poros Pentojangan - Salubattang

d. Tsunami

Khusus untuk bencana tsunami, selama pembentukan Kota Palopo belum terjadi bencana tersebut.

e. Cuaca dan Gelombang Ekstrim serta Abrasi

Kondisi cuaca ekstrim juga dapat dilihat Tabel. 2.5 diatas. Dari data Tahun 2019, terlihat bahwa telah terjadi Cuaca Ekstrim / Angin Putting Beliung di Kecamatan Wara Selatan (Purangi) dengan luas dampak sekitar 5 Ha. Selain itu Cuaca Ekstrim ini juga terjadi di Kecamatan Wara Utara (Penggoli) yang luas dampaknya sekitar 10 Ha. Sehingga secara total dampak cuaca ekstrim adalah sekitar 15 Ha.

Kawasan rawannya berada di Berada di wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Bara. Ancaman gelombang ekstrim dan abrasi Kota Palopo berada pada klasifikasi/kategori Rendah yakni pada skor 1,50 atau masih dalam kelas interval 1,65–1,00 (seperti yang terlihat dalam Tabel 2.8). Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32–1,66, dan 3,00–2,23. Indikator yang digunakan untuk bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah tinggi gelombang, arus wilayah perairan (*current*) tutupan vegetasi di wilayah pesisir, bentuk garis pantai dan tipologi pantai.

Untuk melihat Skor Ancaman Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Skor Ancaman Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Palopo Tahun 2019

Paramater	Bobot (%)	Kelas			Skor
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Tinggi gelombang	30	<1 m	1-2,5 m	>2,5 m	0,30
Arus *(current)*	30	<0,2	0,2 – 0,4	>0,4	0,30
Tutupan vegetasi	15	>80%	40 – 80%	<40%	0,45
Bentuk garis pantai	15	Berteluk	Berteluk - lurus	lurus	0,15
Tipologi pantai	10	Berbatu karang	Berbatu pasir	berlumpur	0,30
Jumlah Skor					1,50

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

Keterangan: Hazard Gelombang Ekstrim dan Abrasi = (0,3* skor tinggi gelombang) + (0,3* skor arus) + (0,15 *skor tutupan vegetasi) + (0,15* skor bentuk garis pantai) + (0,1* skor tipologi pantai).

f. Gempa

Kota Palopo berada pada 2 (dua) jalur patahan, yaitu Sesar Palu Koro dan Sesar Walanae. Olehnya itu, Kota Palopo memiliki potensi terjadinya Gempa. Namun selama belum pernah terjadi gempa yang epicentrumnya di Kota Palopo.

g. Kebakaran

Kebakaran Gedung dan Permukiman

Berdasarkan Data Tahun 2019 yang terangkum dalam Tabel 2.5, kecamatan yang pernah mengalami bencana kebakaran adalah Kecamatan Sendana, Mungkajang, dan Wara Barat. Untuk Kecamatan Sendana (Kelurahan Peta) dengan luas dampak diperkirakan sekitar 4 Ha. Sedangkan untuk Kecamatan Mungkajang (Kelurahan Kambo) dampak kebakaran sekitar 7 Ha. Dan untuk Kecamatan Wara Barat (Kelurahan Battang) bencana kebakaran berdampak sekitar 12 Ha. Sehingga secara keseluruhan luasan dampak akibat bencana kebakaran diperkirakan sekitar 23 Ha.

Kawasan rawannya berada di Berada di kawasan permukiman kepadatan tinggi pada wilayah Kelurahan Penggoli, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Luminda, Kelurahan Pajalesang, Kelurahan Boting, Kelurahan Tompotikka, dan Kelurahan Dangerakko.

Ancaman kebakaran gedung dan permukiman berada pada klasifikasi/kategori *Rendah* yakni pada skor 1,00 atau dalam kelas interval 1,65 – 1,00 (seperti yang digambarkan dalam Tabel 2.9). Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32 – 1,66, dan 3,00 – 2,23.

Untuk melihat Skor Ancaman Kebakaran Gedung dan Permukiman Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Skor Ancaman Kebakaran Gedung dan Permukiman Kota Palopo Tahun 2019

Paramater	Bobot (%)	Kelas			Skor
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Frekuensi kejadian kebakaran (%)	60	<2%	2-5%	>5%	0,60
Kerugian ekonomi (miliar rupiah)	6	<1 m	1-3 M	>3 M	0,06
Jumlah korban meninggal	28	-	1 orang	>1 orang	0,28
Jumlah korban luka berat	6	<5 orang	5-10 orang	>10 orang	0,06
Jumlah Skor					1,00

Keterangan : Hazard Kebakaran Gedung dan Permukiman = (0,6* skor frekuensi kejadian) + (0,06* skor kerugian ekonomi) + (0,28* skor jumlah meninggal) + (0,06* skor jumlah luka berat.

Gambaran tentang Ancaman Kebakaran Kota Palopo dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8
Peta Rawan Kebakaran

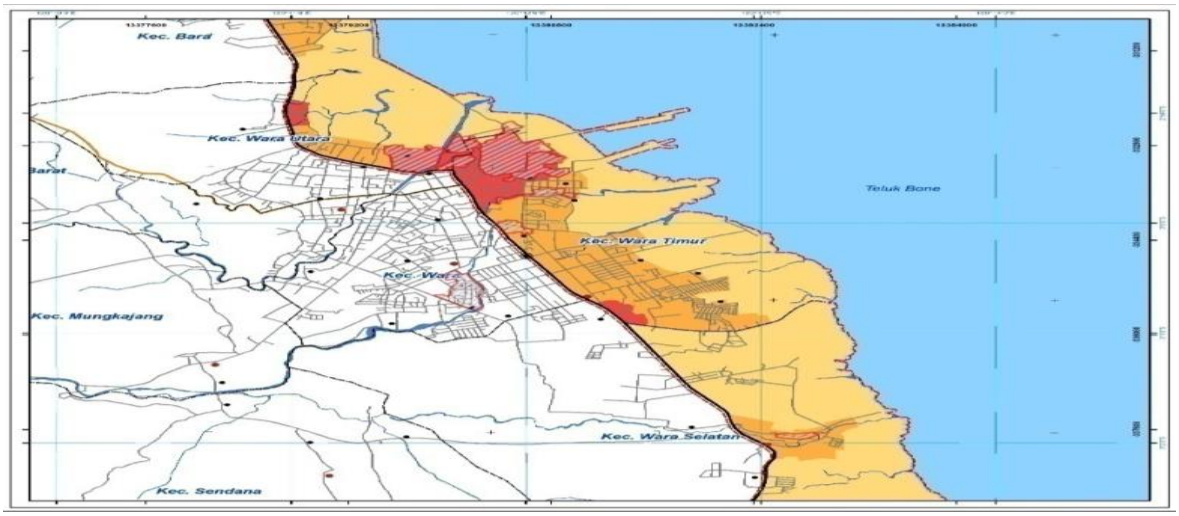

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

Kebakaran Hutan dan Lahan

Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan berada di Berada di wilayah Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana, dan Kecamatan Telluwanua. Ancaman kebakaran hutan dan lahan berada pada klasifikasi/kategori *Rendah* yakni pada skor 1,00 atau dalam kelas interval 1,65–1,00 (seperti yang terlihat pada Tabel 2.10). Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32–1,66, dan 3,00–2,23.

Untuk melihat Skor Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Skor Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Paramater	Bobot (%)	Minimum	Maximum	Kelas			Skor
				Rendah	Sedang	Tinggi	
Jenis Hutan	40			Hutan	Lahan Perkebunan	Padang rumput kering, semak belukar dan lahan pertanian	0,40
Curah Hujan Tahunan	30	0 mm	5000 mm	Penghujan	Penghujan-Kemarau	Kemarau	0,30
Jenis Tanah	30	Non bog soil	Bog soil	Non organik/ Non gambut	Semi organik	Organik/gambut	0,30
Jumlah Skor							**1,00**

Keterangan : Hazard Kebakaran Hutan dan Lahan = (0,4 skor jenis hutan) + (0,3* (curah hujan tahunan/5000) + (0,3* skor jenis tanah).*

h. Kekeringan

Berdasarkan dari Badan Meterologi dan Geofisika (BMKG), bahwa data kekeringan Tahun 2019 berada pada 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sendana, Mungkajang, dan Wara Barat. Untuk Kecamatan Sendana (Kelurahan Peta) bencana kekeringan diperkirakan berdampak sekitar 35 Ha. Selanjutnya untuk Kecamatan Mungkajang (Kelurahan Kambo) dengan luas dampak sekitar 53 Ha. Dan untuk Kecamatan Wara Barat (Kelurahan Battang)

berdampak sekitar 67 Ha. Sehingga secara total dampak bencana kekeringan di Kota Palopo berdasarkan Data Tahun 2019 adalah sekitar 155 Ha.

i. Indeks Penduduk Terpapar

Penentuan Indeks Penduduk Terpapar dihitung dari komponen sosial budaya di kawasan yang diperkirakan terlanda bencana. Komponen ini diperoleh dari indikator kepadatan penduduk dan indikator kelompok rentan pada suatu kawasan bila terkena bencana. Indeks ini baru bisa diperoleh setelah Peta Ancaman untuk setiap bencana selesai disusun. Data yang diperoleh untuk komponen sosial budaya kemudian dibagi dalam 3 kelas ancaman, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Selain dari nilai indeks dalam bentuk kelas (rendah, sedang atau tinggi), komponen ini juga menghasilkan jumlah penduduk yang terpapar ancaman bencana pada suatu daerah. Komponen dan indikator untuk menghitung Indeks Penduduk Terpapar dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Indeks Penduduk Terpapar Kota Palopo Tahun 2019

No	Bencana	Komponen/ Indikator		Kelas Indeks			Bonot Total	Skor
				Rendah	Sedang	Tinggi		
1.	Banjir	Sosial Budaya (40%)						1,6 (rendah)
		1	Kepadatan Penduduk	<500 jiwa/km2	500-1000 jiwa/km2	>1000 jiwa/km2	60%	
		2	Kelompok Rentan	<20%	20-40%	>40%	40%	
2.	Tanah Longsor	Sosial Budaya (40%)						1,6 (rendah)
		1	Kepadatan Penduduk	<500 jiwa/km2	500-1000 jiwa/km2	>1000 jiwa/km2	60%	
		2	Kelompok Rentan	<20%	20-40%	>40%	40%	
3.	Gelombang Ekstrim & Abrasi	Sosial Budaya (40%)						1,6 (rendah)
		1	Kepadatan Penduduk	<500 jiwa/km2	500-1000 jiwa/km2	>1000 jiwa/km2	60%	
		2	Kelompok Rentan	<20%	20-40%	>40%	40%	
4.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sosial Budaya (40%)						1,6 (rendah)
		1	Kepadatan Penduduk	<500 jiwa/km2	500-1000 jiwa/km2	>1000 jiwa/km2	60%	
		2	Kelompok Rentan	<20%	20-40%	>40%	40%	
5.	Kebakaran Gedung dan Permukiman	Sosial Budaya (40%)						1,6 (rendah)
		1	Kepadatan Penduduk	<500 jiwa/km2	500-1000 jiwa/km2	>1000 jiwa/km2	60%	
		2	Kelompok Rentan	<20%	20-40%	>40%	40%	

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada 5 (lima) kategori bencana Indeks Penduduk Terpapar, kesemuanya termasuk dalam kategori rendah dengan skor 1,6.

Adapun Potensi Kawasan Relokasi Bencana Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Lokasi Potensi Kawasan Evakuasi/Relokasi Bencana Kota Palopo, Tahun 2019

No	Kabupaten/ -Kota	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
I		**Jalur dan Tempat Evakuasi Bencana**	
1	Kota Palopo	Banjir	a. Ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-Lapangan Pancasila; b. Ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Lapangan Gaspa; c. Ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Kelapa-Jalan Lagaligo-Stadion Lagaligo; d. Ruas Jalan Sungai Pareman II-Jalan DR. Sam Ratulangi-Lapangan Kodim; e. Ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.
		Longsor	a. Ruas Jalan Poros Toraja Utara-Palopo-Lapangan Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat; b. Ruas Jalan Poros Latuppa-Kantor Kecamatan Mungkajang; c. Ruas Jalan Poros Purangi-Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Pantai II-Kantor Kecamatan Wara Selatan.
		Gelombang Ekstrim dan Abrasi	a. Ruas Jalan A. Tendriajeng – Jalan Andi Tadda – Jalan Jenderal Ahmad Yani - Lapangan Gaspa; b. Ruas Jalan Yos Sudarso-Jalan Landau-Jalan Sawerigading-Jalan Diponegoro – Lapangan Gaspa; c. Ruas Jalan Malaja Baru-Jalan Malaja-Jalan Andi Djemma-Lapangan Pancasila; d. Ruas Jalan Pantai I-Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.
		Kebakaran Gedung dan Permukiman	a. Ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-Lapangan Pancasila; b. Ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Lapangan Gaspa; c. Ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Kelapa-Jalan Lagaligo-Stadion Lagaligo; d. Ruas Jalan Sungai Pareman II-Jalan DR. Sam Ratulangi-Gedung Saodenrae Convention Centre; e. Ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre; f. Ruas Jalan Andi Tadda – Jalan Jenderal Ahmad Yani – Gedung Saodenrae Convention Centre; g. Ruas jalan Sungai Rongkong – Lapangan Kodim.
		Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Ruas Jalan Poros Toraja Utara-Palopo-Lapangan Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat; b. Ruas Jalan Poros Latuppa-Lapangan Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang; dan c. Ruas Jalan Poros Purangi-Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Pantai II-Lapangan Kelurahan Purangi Kecamatan Wara Selatan. d. Ruas Jalan Poros Kambo – Lapangan Kelurahan Kambo Kecamatan Wara Barat.
II	Kota Palopo	Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana	

No	Kabupaten/ -Kota	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
I	Kota Palopo	**Jalur dan Tempat Evakuasi Bencana**	
		Banjir, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Gelombang Ekstrim dan Abrasi	a. Lapangan Pancasila Kelurahan Tompotikka; b. Stadion Lagaligo Kelurahan Lagaligo; c. Lapangan Gaspa Kelurahan Boting; d. Lapangan Kodim Kelurahan Salobulo; e. Lapangan Islamic Centre Kelurahan Takkalala; f. Lapangan Rampoang Kelurahan Rampoang.
		Tanah longsor serta, kebakaran hutan dan lahan	a. Lapangan Kelurahan Battang (Kecamatan Wara Barat), Lapangan Kelurahan Peta (Kecamatan Sendana), Lapangan Kelurahan Murante (Kecamatan Mungkajang).

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2020

2.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kota Palopo diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan. Posisi Kota Palopo untuk mendukung pengembangan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan.

2.3.1. Rencana Struktur Ruang

- **Kota Palopo Dalam RTRW Nasional**

Rencana struktur ruang Kota Palopo diarahkan sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Kota Palopo.

Rencana struktur ruang wilayah di Kota Palopo meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Sulawesi Selatan mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional. Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah dan Lokal dalam RPJMD Sulsel sebagai berikut :

Tabel 2.13
Posisi Kota Palopo dalam Sistem Jaringan

No	Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Energi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Data Air
1	Palopo	Jaringan jalan arteri dan kolektor primer Jaringan jalan bebas hambatan dan antar kota	SUTT	Jaringan teresterial	Wilayah Sungai (WS)-Lintas Provinsi Pompengan –

No	Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Energi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Data Air
		Jaringan jalur KA			Larona

Sumber Data : Diolah dari RT RW Propinsi Sulsel 2009-2029

- **Kota Palopo Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan**

Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi sebagai "salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia dengan pengembangan industri berbasis logistik; serta lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; dan pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, dan biji besi; serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari."

Pusat kegiatan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru dan Pare - Pare, yang berfungsi mendukung peran Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai pusat jasa pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul transportasi serta pusat pelayanan publik berskala provinsi.

Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional di Sulawesi Selatan terkait posisi Kota Palopo sebagai berikut :

Tabel 2.14
Posisi Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan

No	Kota	Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
1	Palopo	Diarahkan sebagai Kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasinal (OKN) yang berorientasi pada kegiatan Pelayanan sentra pengolahan hasil pertanian (sentra pangan nasional) dan perkebunan	Agroindustri, Perkebunan dan Pertanian	-

Sumber Data : Diolah dari RTRWN 2009-2029

Arahan Pola Ruang Wilayah Nasional di Sulawesi Selatan Palopo masuk di Kawasan Palopo DSK (pariwisata mendukung Tana Toraja, perkebunan, pertanian, dan perikanan). Kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Sulawesi Selatan diarahkan dengan melakukan pengembangan kawasan budidaya unggulan yang memiliki nilai strategis dengan menumbuhkembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis pada kluster sentra-sentra produksi komoditas pertanian unggulan. Kawasan pertanian dan perikanan yang diarahkan sebagai kawasan pengembangan budidaya komoditas unggulan berupa kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Sedangkan pengembangan kawasan aglomerasi industry skala kecil dan menengah diarahkan pada Kota Palopo.

Kebijakan pengembangan kawasan perdagangan diarahkan tumbuh berkembang terpadu dengan pengembangan kawasan industri lokal di sentra-sentra produksi di seluruh wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan perdagangan skala besar diarahkan pada Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah, sedangkan kawasan perdagangan skala sedang diarahkan pengembangannya pada pusat kegiatan lokal provinsi. Pembangunan kawasan perdagangan diarahkan perencanaannya terpadu dengan fasilitas pendukungnya seperti; kawasan perkantoran, perbankan, pertokoan, hotel dan restoran, terminal bis dan kawasan pergudangan.

Kebijakan pengembangan kawasan pariwisata, diarahkan pada kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata dengan mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan. Pengembangan kawasan pariwisata di Sulawesi Selatan meliputi pengembangan kawasan pariwisata alam (TWA) yang mengandalkan potensi dan kekayaan alam diarahkan pada TWA yang berada di kabupaten Luwu Timur, Gowa, Bone, Soppeng, Pangkep, Kepulauan Selayar, Maros, Takalar, Jeneponto, Wajo, Enrekang, Tana Roraja, Sinjai, dan Kota Palopo serta Kota Makassar, pengembangan pariwisata budaya dan sejarah (TWB) yang mengandalkan kekayaan alam, adat, sejarah dan budaya pada kawasan permukiman

dan perdesaan tradisional maupun kawasan peninggalan kerajaan, serta situs peninggalan sejarah diarahkan pada kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Sinjai, Bone, Bulukumba, Gowa, Bulukumba serta Kota Makassar dan Kota Palopo.

Pengembangan kawasan pariwisata dilakukan dengan menunjuk pada peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS) yang telah menetepkan Daerah Pariwisata Nasional (DPN) Makassar-Takabonerate dan sekitarnya kemudian DPN Toraja-Lorelindu dan sekitarnya yang telah meliputi 7 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu: Maros (karst), Kota Makassar, Sengkang, Sinjai, Bulukumba, Selayar, dan **Palopo** dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu: Toraja dan Takabonerate.

1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Palopo

Tujuan Penataan Ruang Kota Palopo

"Mewujudkan Kota Palopo sebagai kota modern pusat pelayanan ekonomi dan pelayanan umum terdepan di Indonesia yang berkearifan lokal dan religi, serta nyaman dan produktif untuk semua".

Kebijakan Penataan Ruang Kota

a. Penyebaran pusat – pusat pelayanan skala regional dan skala kota;
b. Pengendalian intensitas fungsi primer kota;
c. Pengoptimalan pemanfaatan dan pengembangan lahan – lahan marginal di kawasan pesisir menjadi lahan produktif perkotaan;
d. Pengembangan jaringan lahan baru yang mengefisienkan mobilitas penduduk serta angkutan barang antar kota dan dalam kota;
e. Peningkatan kualitas kawasan lindung guna mendukung upaya pembangunan kota yang berkelanjutan;
f. Peningkatan daya saing kota melalui program – program inovasi daerah yang berkearifan lokal;
g. Peningkatan integrasi teknologi sarana dan prasarana pelayanan kota;
h. Pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Kota Palopo

a. Strategi penyebaran pusat – pusat pelayanan skala regional dan skala kota, meliputi :
    1. Mengendalikan intensitas pemanfaatan ruang secara horizontal di kawasan pusat kota;
    2. Mengarahkan investasi pembangunan baru pada sub – sub wilayah di luar kawasan pusat kota;
    3. Mengoptimalkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pada komponen – komponen kota skala regional dan skala kota yang telah tersedia di sub = sub wilayah, terutama yang ada di bagian Utara dan Selatan kota;
    4. Mengembangkan jaringan jalan baru guna meningkatkan aksesibilitas pergerakan antar sub – sub wilayah dengan daerah – daerah luar kota, maupun antar sub – sub wilayah dengan kawasan pusat kota.
b. Strategi pengendalian intensitas fungsi primer pusat kota, meliputi :
    1. Mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan – kegiatan skala regional;
    2. Menerapkan standar pelayanan minimum secara ketat, terutama kegiatan pada koridor jalan utama dengan memperhatikan daya tampung milik jalan untuk parkir;
    3. Mengoptimalkan pengembangan komponen – komponen skala regional yang telah ada saat ini dengan kelengkapan pendukung seperti area parkir, ruang terbuka hijau dan lainnya.
c. Strategi pengoptimalan pemanfaatan dan pengembangan lahan – lahan marginal di kawasan pesisir menjadi lahan produktif perkotaan, meliputi :
    1. Melakukan reklamasi kawasan pesisir Kota Palopo guna memenuhi kebutuhan pengembangan fisik kota ke arah Timur, serta mencegah terjadinya degradasi kawasan pesisir;
    2. Melakukan penataan kawasan permukiman kumuh nelayan di sepanjang pesisir Kota Palopo;
    3. Melakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada area sempadan pantai dan sungai terutama pada area sekitar muara sungai, guna mencegah terjadinya bencana alam banjir dan abrasi;

4. Mengembangkan kegiatan – kegiatan jasa dan perdagangan skala nasional, regional dan kota pada lahan – lahan hasil reklamasi di pesisir Kota Palopo.

d. Strategi pengembangan jalan baru guna mengefisienkan mobilitas penduduk serta angkutan barang antar kota dan dalam kota, meliputi :
   1. Melakukan pembangunan jalan – jalan baru guna mengurangi volume kendaraan pada jalan utama kota (jalan arteri primer) saat ini sehingga aksesibilitas pergerakan tetap tinggi, baik antar kota maupun dalam kota;
   2. Mengintegrasikan program nasional pengembangan jalan bebas hambatan penghubung antar kota di Sulawesi;
   3. Mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) terutama jalan – jalan utama kota dari kegiatan yang menganggu kelancaran fungsi jalan.

e. Strategi pengembangan jaringan jalan baru guna mengefisienkan mobilitas penduduk serta angkutan barang antar kota dan dalam kota, meliputi :
   1. Melakukan pembangunan jalan – jalan baru guna mengurangi volume kendaraan pada jalan utama kota (jalan arteri primer) saat ini sehingga aksesibilitas pergerakan tetap tinggi, baik antar kota maupun dalam kota;
   2. Mengintegrasikan program nasional pengembangan jalan bebas hambatan penghubung antar kota di Sulawesi;
   3. Mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) terutama jalan – jalan utama kota dari kegiatan yang menganggu kelancaran fungsi jalan.

f. Strategi peningkatan kualitas kawasan lindung guna mendukung upaya pembangunan kota yang berkelanjutan, meliputi :
   1. Mengendalikan pemanfaatan kawasan lindung dari kegiatan yang akan merusak ekosistem alami kawasan;
   2. Melakukan penghijauan/penanaman vegetasi pepohonan pada area kawasan lindung yang telah krisis akibat penebangan pohon secara liar;
   3. Tidak mengarahkan pengembangan kegiatan budidaya perkotaan ke dalam kawasan lindung yang berpotensi merubah bentang alam;
   4. Mempertahankan luasan kawasan lindung yang ada dan menjadikannya sebagai paru – paru kota;
   5. Mengoptimalkan nilai ekonomis kawsan lindung melalui pemanfaatan potensi wisata alam yang ada didalamnya.

g. Strategi peningkatan daya saing kota melalui program – program inovasi daerah yang berkearifan lokal, meliputi :
   1. Mengembangkan kegiatan yang bersifat inovasi yang berbeda dengan daerah lain, dengan mengaplikasikan teknologi dalam sistem kegiatannya;
   2. Mengembangkan program – program inovasi dengan memanfaatkan potensi unggulan komparatif wilayah dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta dalam kerangka membangun daya saing kota;
   3. Melakukan revitalisasi kawasan bersejarah sebagai perwujudan pengembangan kota pusaka dengan memanfaatkan teknologi dan memperhatikan ruang terbuka publik.

h. Strategi peningkatan integrasi teknologi sarana dan prasarana pelayanan kota, meliputi :
   1. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kota yang mengadopsi konsep kota modern guna mengoptimalkan kualitas pelayanannya;
   2. Mengembangkan utilitas kota yang mengintegrasikan teknologi termutakhir dan ramah lingkungan, guna mengefektifkan dan memperluas fungsi dan cakupan pelayanan masing – masing utilitas;
   3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kota sebagai upaya merespon peningkatan kebutuhan masyarakat.

i. Strategi pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi :
   1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang ada saat ini;
   2. Mengembangkan zona penyangga (barrier) pada kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi dengan kawasan lainnya yang tidak bersinergis dengan kawasan pertahanan dan keamanan;
   3. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kota yang berfungsi memperkuat fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Penataan Pola Ruang Daerah :

1. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

- **Pusat Pelayanan Kota (PPK)**

  Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi Kelurahan Tompotikka dan Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa.

- **Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)**

a. SPPK I berada di Keluarahan Maroangin Kecamatan Telluwanua, dengan fungsi meliputi perdagangan dan jasa, perkantoran, pelayanan kesehatan, perumahan kepadatan rendah dan pendidikan menengah.

b. SPPK II berada di Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara, dengan fungsi meliputi pelayanan kesehatan skala regional, perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan kepadatan sedang dan pendidikan menengah.

c. SPPK III berada di Kelurahan Songka Kecamatan Wara, dengan fungsi meliputi perkantoran, perdagangan dan jasa, perumahan kepadatan sedang, pendidikan tinggi, simpul transportasi regional dan pelayanan kesehatan skala lokal.

d. SPPK IV berada di Kelurahan Sendana Kecamatan Sendana, dengan fungsi meliputi perumahan kepadatan rendah, perkantoran, pelayanan kesehatan skala lokal, pusat budaya dan aolah raga.

e. SPPK V berada di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat, dengan fungsi meliputi perumahan kepadatan rendah, perkantoran dan pelayanan kesehatan skala lokal.

- **Pusat Lingkungan**

  PL meliputi pelayanan perkantoran, pemerintahan, perdagangan jasa dengan skala lingkungan, pelayanan sosial budaya, serta perumahan yang tersebar di setiap kelurahan.

2. Rencana Sistem Prasarana Wilayah

Rencana Sistem Jaringan Utama

Jaringan Transportasi Darat

Rencana Sistem Jaringan Jalan

Rencana sistem jaringan jalan terdiri dari Jaringan jalan arteri primer, Jaringan jalan kolektor primer;Jaringan lokal primer yang terdiri Ruas jalan penghubung Kelurahan Sampoddo – Kelurahan Jaya melalui Kecamatan Sendana – Kecamatan Mungkajang – Kecamatan Wara Barat – Kecamatan Telluwanua (jalan lingkar barat luar), Jaringan jalan lingkungan primer terdiri dari Pengembangan jaringan jalan lingkar barat dalam (ruas Buntu Pareppa – Pepabri – Pamenta – Lassik) sepanjang ± 9,0 km, Jaringan jalan bebas hambatan yang terdiri dari Ruas Palopo – Tindantana dan ruas Palopo – Pare-Pare.

Rencana pembangunan dan pengembangan terminal di Kota Palopo :

a. Terminal type C Dangerakko di Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara;
b. Pengembangan terminal type A di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan;
c. Pengembangan terminal type C Telluwanua di Kecamatan Telluwanua.

Rencana Sistem Jaringan Jalur Kereta Api

Rencana jaringan jalur kereta api melintasi wilayah Kecamatan Telluwanua – Kecamatan Bara – Kecamatan Wara Utara – Kecamatan Wara Timur – Kecamatan Wara Selatan.Jalur ini membangun konektivitas antara kawasan peruntukan industri Maroangin – Terminal type A Songka – Bandara Lagaligo – Pare-Pare – Makassar.(jalur kereta antar kota utama Makassar – Pare-Pare – Palopo – Palu – Manado). Kemudian menyediakan fasilitas Park and Ride yang berdekatan dengan Terminal type A Songka, sebagai tempat pergantian moda angkutan umum untuk selanjutnya menggunakan kereta api.Jalur ini sebagian berada di atas perairan laut, berhimpit dengan jalur jalan bebas hambatan.

Jaringan Transportasi Laut

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

Tatanan kepelabuhan adalah Pelabuhan Nasional Pengumpul Tanjung Ringgit terdapat di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur.

1. Alur pelayaran terdiri atas :

a. Alur pelayaran barang terdiri atas :

- ❖ Palopo – Surabaya – Jakarta.

- ❖ Palopo – Loktuan – Gresik – Tarjun – Batulicin – Bontang.
- ❖ Palopo – Makassar – Belawan – Bitung.
- ❖ Palopo – Saumlaki – Malinau – Tanjung Redep – Tanjung Jere.
- ❖ Palopo – Lemito – Gorontalo.
- ❖ Palopo – Irak – Swiss – USA.

b. Alur pelayaran penumpang dengan rute terdiri atas :

- ❖ Palopo – Kolaka Utara – Kendari.
- ❖ Palopo – Siwa – Kolaka Utara – Kendari.

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Jaringan Energi/Listrik

Rencana Sistem Jaringan Energi/Listrik

Pembangkit tenaga listrik terdiri atas :

a. Sumber energy listrik utama yang masuk dalam sistem interkoneksi Sulawesi yang melayani wilayah Kota Palopo yang terbesar adalah berasal dari PLTA Poso (PT. Poso Enenrgy) berkapasitas 2 x 65 MW melalui jaringan SUTET 275 KV, kemudian didistribusikan melalui Gardu Induk Latuppa masuk ke jaringan tegangan menengah yang dikelola oleh PT. PLN hingga ke konsumen.
b. Sistem jaringan interkoneksi regional Sulawesi pada jaringan tegangan menengah 20 KV.

Jaringan Telekomunikasi

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

1. Jaringan telepon kabel kini menggunakan kabel serat optik terintegrasi 3 (tiga) fungsi : Telepon, Internet dan TV.
2. Jaringan nirkabel meliputi :

a. Penyediaan dan pemanfaatan menara Base Transceiver Station yang digunakan secara bersama menjangkau seluruh wilayah kota;
b. Penyebaran jaringan internet hotspot pada pusat – pusat kegiatan dan kawasan strategis;
c. Pengembangan Microcell Pole di beberapa spot kawasan guna menambah kapasitas jaringan 4G LTE, dengan cakupan per Unit radius ± 2 km.

Jaringan Sumber Daya Air

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi :

a. DAS Purangi dengan luas cakupan area 1.037 hektar;
b. DAS Bua dengan luas cakupan area 1.168, 04 hektar;
c. DAS Songkamati dengan luas cakupan area 136,20 hektar;
d. DAS Pacangkuda dengan luas cakupan area 6.412,80 hektar;
e. DAS Boting dengan luas cakupan area 3.087,25 hektar;
f. DAS Salubattang dengan luas cakupan area 13.760,59 hektar.

***Daerah Irigasi (DI) terdiri atas* :**

a. Daerah Irigasi wewenang/tanggung jawab Provinsi Sulawesi Selatan, yakni :

- DI Padang Alipan

b. Daerah Irigasi wewenang/tanggung jawab Kota Palopo, yakni :

- DI Padang Lambe, DI Lappo, DI Kaluku, DI Sumarambu, DI To'Punti, DI Tomarundung 1, DI Tomarundung 2, DI Murante, DI Mawa, DI Lumandi, DI Songka, DI Purangi, DI Sendana, DI Batu Papan, DI Batu Lotong

  Cekungan air tanah terletak di Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwanua dengan luas area 2.634,71 hektar.

Jaringan Penyediaan Air Minum Kota

Jaringan air baku untuk air minum terdiri atas :

Sungai Latuppa di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;Sungai Babak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;Sungai Mangkaluku di Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang;Sungai Bambalu di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat;Rencana pengembangan DAM Latuppa.

Jaringan perpipaan

a. **Unit Air Baku yang bersumber dari** :

- Sungai Mangkaluku, dengan potensi debit air baku ± 4.800 liter per detik;
- Sungai Latuppa, dengan potensi debit air baku ± 6.600 liter per detik;
- Sungai Mangandang, dengan potensi debit air baku ± 60 liter per detik;
- Sungai Buludatu, dengan potensi debit air baku ± 5 liter per detik;
- Sungai Bambalu, dengan potensi debit air baku ± 8.200 liter per detik.

b. Unit Produksi Air Minum terdiri atas :

- IPAM I H. Abd Madjid di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang berkapasitas sebesar 350 liter/detik;
- IPAM II Magandang di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara berkapasitas sebesar 20 liter/detik;
- IPAM III Battang di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat berkapasitas 110 liter/detik;
- IPAM IV Mungkajang di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang berkapasitas 20 liter/detik;
- IPAM V Batupapan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Telluwanua berkapasitas 50 liter/detik.

Rencana pengembangan :

1. Penambahan kapasitas masing – masing 50 liter/detik untuk IPAM Batupapan, IPAM Abd. Madjid dan IPAM Battang;
2. Pengembangan pipa transmisi Batupapan sepanjang 34,3 km di Kelurahan Padang Lambe dan Kelurahan Battang;
3. Pengembangan pipa transmisi Latuppa sepanjang 3 km di Kelurahan Murante dan Kelurahan Latuppa;
4. Pengembangan pipa distribusi sepanjang 14 km di Kelurahan Benteng, Kelurahan Songka, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Jaya dan Kelurahan Maroangin;
5. Pengembangan pipa tersier sepanjang 17,5 km di Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Mancani, Kelurahan Jaya, Kelurahan Maroangin dan Kelurahan Padang Lambe;
6. Pembangunan DAM jaringan air baku air minum Latuppa di Kelurahan Latuppa.

Jaringan bukan perpipaan

Jaringan bukan perpipaan meliputi sungai, sumur dangkal, sumur pompa tangan pada spot = spot permukiman yang berada pada Kelurahan Salubattang, Kelurahan Sumarambu, Kelurahan Peta dan Kelurahan Kambo.

Pengelolaan air limbah Kota

Sistem air limbah domestik :

a. Sistem setempat (*on site*) : setiap bangunan gedung dilengkapi tangka septic;
b. IPAL Komunal skala lingkungan pada kawasan permukiman kepadatan tinggi dan permukiman kumuh;
c. Pengembangan Instalasi Pengilahan Limbah Tinja (IPLT) di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua.

Sistem pengolahan air limbah industri :

Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kota di Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua juga merupakan IPAL kawasan peruntukan industry (insentif infrastruktur).

Persampahan Kota

Rencana Sistem Jaringan Pengelolaan Persampahan

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) :

Dikembangkan di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua berhimpit dengan TPA dan IPLT Mancani.

Lokasi TPS :

TPS sampah organic dan TPS sampah an organic direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan kawasan Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) dan Pusat Lingkungan (PL).

Lokasi TPST 3R :

- Eksisting 2 unit di Kelurahan Lagaligo.
- Direncanakan dikembangkan di setiap kelurahan.

Lokasi TPA :

Di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua seluas 10 Ha dengan menggunakan metode Sanitary Landfilt.

Dainase Kota

Rencana Sistem Drainase

Saluran drainase primer :

a. Sungai Latuppa yang melintasi wilayah Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, dan Kecamatan Wara Timur;
b. Sungai Boting yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara, dan Kecamatan Wara Utara;
c. Sungai Takkalala yang melintasi Kecamatan Wara Selatan;
d. Sungai Amassangan yang melintasi Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur;
e. Sungai Pikun yang melintasi Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara;
f. Sungai Salu Battang yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Telluwanua;
g. Sungai Batu yang melintasi wilayah Kecamatan Telluwanua; dan
h. Sungai Andoli yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara.

Saluran drainase sekunder :

Melintasi wilayah Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur.

Saluran drainase tersier :

Di saluran-saluran berskala pelayanan lokal yang menyebar di seluruh wilayah kota.

Jaringan Pejalan Kaki

Rencana Sistem Jaringan Jalan Pejalan Kaki

1. **Jaringan jalan pejalan kaki, termasuk Difabel :**
   a) Ruas jalan arteri primer sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Djemma-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Jalan Sultan Hasanuddin-Jalan DR. Sam Ratulangi dari batas selatan kota hingga batas utara kota.
   b) Ruas jalan sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani-Jalan Andi Ahmad (eks Jalan Veteran);
   c) Ruas jalan lokal sepanjang Jalan Patang-Jalan Imam Bonjol-Jalan Imam Bonjol II;
   d) Ruas jalan lokal sepanjang Jalan KH. Ahmad Razak –Jalan Tandipau - Jalan M. Kasim;
   e) Ruas jalan lokal sepanjang Jalan Opu Tosappaile-Jalan Samiun;
   f) Ruas jalan lokal sepanjang Jalan Andi Kambo-Jalan A. Tendriajeng;
   g) Ruas jalan lokal sepanjang Jalan K.H. Ahmad Dahlan-Jalan Rambutan - Jalan Mangga - Jalan Durian;
   h) Ruas jalan lokal sepanjang Jalan Lagaligo dan Jalan Latamacelling;
   i) Ruas Jalan Pongsimpin hingga ke kawasan wisata alam Latuppa;
   j) Ruas Jalan A. Masjaya – Jalan Andi Sulthani – Jalan Ambe Nona;
   k) Ruas Jalan Sungai Rongkong;
   l) Jalur difabel diletakkan di semua jaringan pejalan kaki.
   m) Dari *park and ride* ke stasiun kereta api dan terminal tipe A Songka.
2. **Penataan jalur pejalan kaki**
   a. Pengembangan Zebra Cross pada pusat-pusat kegiatan di sekitar korior jalan arteri primer.

b. Penataan kembali jalur pejalan kaki pada kedua sisi Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Andi Djemma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Balai Kota, dan Jalan Sultan Hasanuddin, dan Jalan Veteran;
c. Pembangunan Jembatan Penyeberangan pada kawasan perkantoran, kawasan perdagangan, dan kawasan Jasa di sekitar koridor Jalan Andi Djemma dan Jalan Dr. Sam Ratulangi;
d. Mengintegrasikan jaringan pejalan kaki di kawasan pusat kota dengan fasilitas-fasilitas pemerintahan, jasa, dan pendidikan;
e. Mengintegrasikan semua jaringan pejalan kaki dengan pengguna difabel, berupa kelengkapan ubin sebagai pengarah dan peringatan.

Sempadan pantai :

1. Batas sempadan pantai pada wilayah Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Songka, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Binturu, Kelurahan Benteng, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Pontap, Kelurahan Penggoli, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Salobulo, dan Kelurahan Balandai berada pada bangunan terluar di atas lahan hasil reklamasi yang berfungsi sebagai bangunan peredam gelombang ekstrim dan abrasi.
2. Batas sempadan pantai pada wilayah Kelurahan Temmalebba berada pada bangunan terluar berupa tanggul yang berfungsi meredam gelombang ekstrim dan abrasi.
3. Batas sempadan pantai pada wilayah Kelurahan Salubattang meliputi daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Prasarana dan Sarana Perkotaan Lainnya

Jalur sepeda :

a. Ruas Jalan Balai Kota - Jalan Opu Tosappaile -Jalan Pongsimpin - Kambo - Jalan Andi Ahmad – Lapangan Gaspa;
b. Ruas Jalan Andi Baso Rahim - Jalan Andi Kambo - Jalan Andi Tendriajeng - Jalan Yos Sudarso - Jalan Sungai Rongkong - Jalan Imam Bonjol - Jalan Patang - Jalan Tandipau - Jalan Kelapa - Jalan Latamacceling - Lapangan Pancasila;
c. Rencana pengembangan ruas jalan akses pelabuhan – TPI/PPI – Terminal Songka – Stasiun kereta/park and ride di Songka

Kelengkapan jalur sepeda :

- Menyediakan rambu dan marka jalan di jalur sepeda;
- Menyediakan lahan parkir khusus sepeda pada gedung perkantoran, gedung komersial, terminal, gedung perdagangan, gedung pendidikan, dan park and ride kereta.
- Melengkapi jalur sepeda dengan penerangan jalan umum untuk meningkatan keamanan pengguna sepeda di malam hari;
- Mengintegrasi jalur sepeda dengan moda angkutan umum dengan menyiapkan perangkat pengangkut sepeda di angkutan umum berupa rak angkut di bus.

Untuk melihat gambaran Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Palopo dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9
Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Palopo

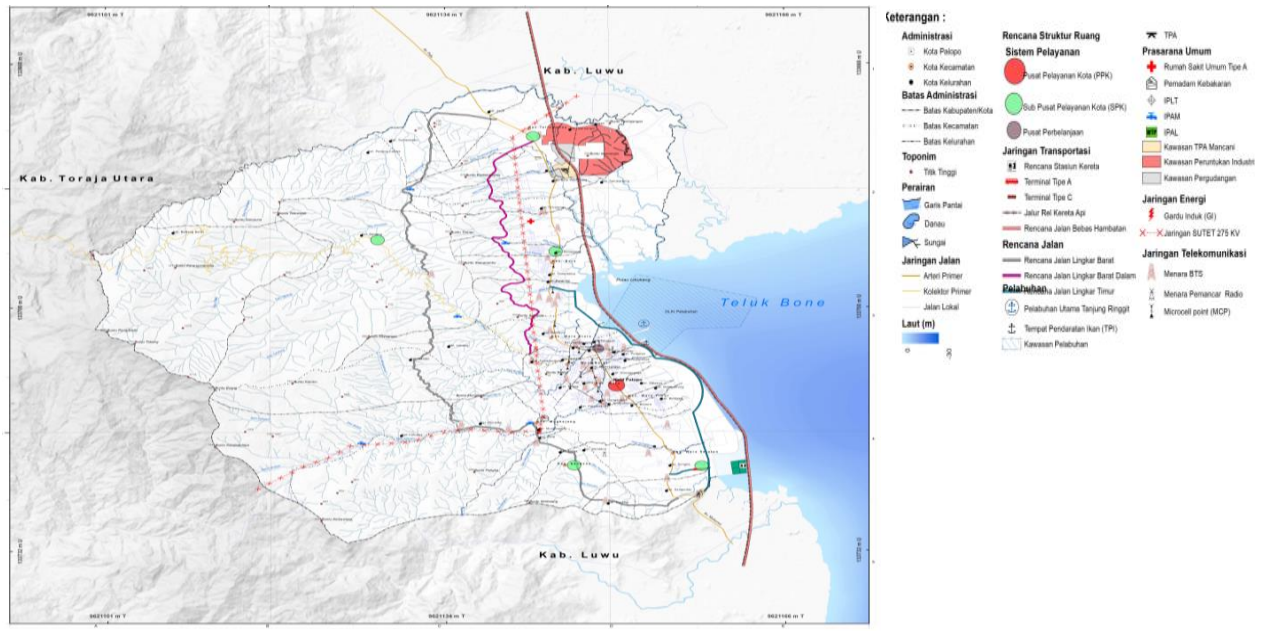

Sumber: Laporan Akhir Dokumen Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

- **Rencana Pola Ruang Wilayah Kota**

  Kawasan Perlindungan Setempat

  Sungai Tidak Bertanggul

  Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam wilayah Kota Palopo :

  a. Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
  b. Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
  c. Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

  Sungai Bertanggul

  Garis sempadan sungai bertanggul di dalam wilayah Kota Palopo ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

  Kawasan Sempadan SUTET

  Kawasan Sempadan SUTET 275 KV adalah 7,0 meter dari ayunan konduktor, yang melintasi Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Mungkajang, dan Kecamatan Sendana.

  Kawasan Sempadan Rel Kereta Api

  Kawasan sempadan Rel Kereta Api adalah batas ruang milik jalur kereta api yang merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 6 (enam) meter.

  Ruang Terbuka Hijau (RTH)

  - RTH Publik tersebar di wilayah Kota Palopo direncanakan seluas 5.269,55 hektar atau sebesar 20,41%.
  - RTH Privat seluas 2.601,7 hektar atau sebesar 10,08%.

  Kawasan Cagar Budaya

  Kawasan cagar budaya, yaitu cagar budaya provinsi berupa Masjid Djami Tua di Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara.

  Peninggalan Cagar Budaya berupa Bangunan Bersejarah terdiri atas:

  a. Istana Datu Luwu di Kecamatan Wara;
  b. Kantor Pos dan Giro di Kecamatan Wara Utara;
  c. Rumah Jabatan Wakil Walikota di Kecamatan Wara;

d. Rumah Jabatan Komandan Kodim di Kecamatan Wara;
e. Kantor Polisi Militer (PM) di Kecamatan Wara Utara;
f. Kantor KODIM di Kecamatan Wara;
g. Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya di Kecamatan Wara;
h. Kantor Bea Cukai Palopo di Kecamatan Wara Timur;
i. RSU Sawerigading Kecamatan Wara;
j. RSU Tentara Kecamatan Wara;
k. Makam Raja-Raja Luwu Lokkoe di Kecamatan Wara Utara;
l. Makam Belanda di Kecamatan Wara Utara;
m. Kantor Veteran RI di Kecamatan Wara;
n. Makam TallettuE di Kecamatan Wara Timur;
o. Makam JarraE di Kecamatan Wara Timur;
p. Gereja Pniel di Kecamatan Wara;
q. Kampus STISIPOL di Kecamatan Wara Utara;
r. Mess Belanda di Kelurahan Lebang Kecamatan Wara Barat;
s. Benteng Portugis di Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur.
t. Kawasan Lalebbata di Kecamatan Wara

Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

- Pulau Libukang di Kecamatan Bara.

Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir

- Kawasan pantai berhutan bakau di wilayah Kecamatan Telluwanua, dan Kecamatan Bara.

Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)

- Di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat.

Untuk gambaran Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Palopo dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10
Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Palopo

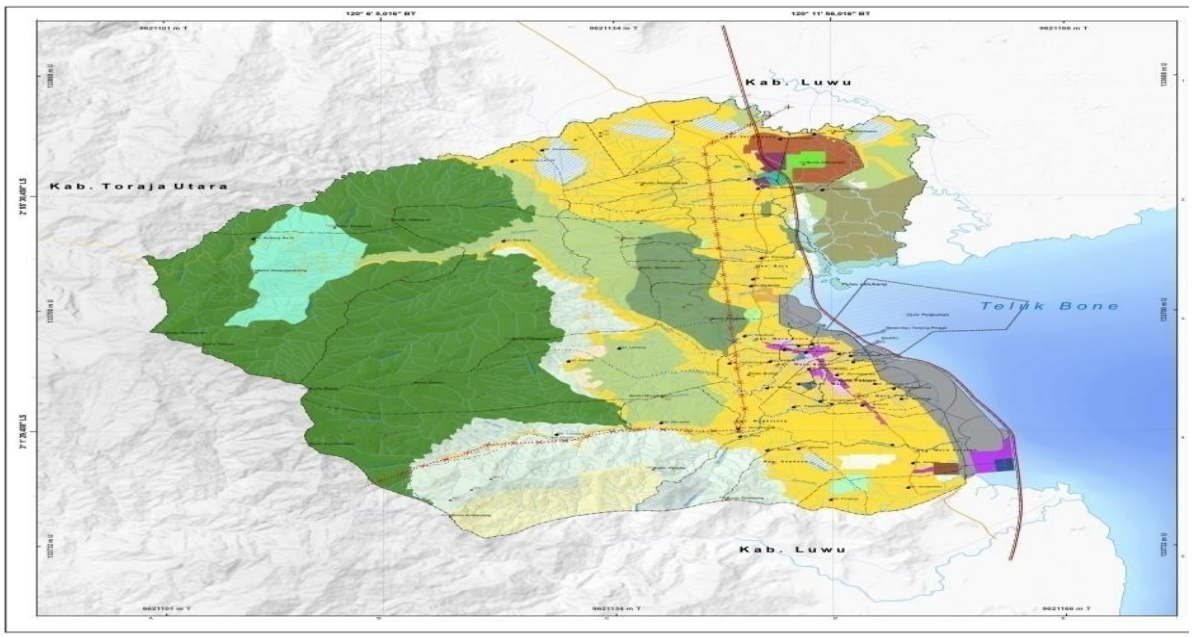

- Rencana pemanfaatan untuk perumahan dan permukiman menyebar ke bagian selatan dan bagian utara, mengakomodir kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangannya.

2.3.2. KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Di Wilayah Kota Palopo

1. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, merupakan kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Bara, dan sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua.
2. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi merupakan kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Bone Utara..
3. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:
   a. Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;
   b. Kawasan Taman Hutan Raya Nanggala ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat.

2.3.3. KAWASAN STRATEGIS KOTA (KSK)

KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :

1. Kawasan Reklamasi Salemo seluas ± 700 Ha di wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Bara;
2. Kawasan Satelit Pembibitan Ayam seluas 1,9 Ha wilayah Kelurahan Mancani;
3. Kawasan Perumahan Terpadu seluas ± 100,0 Ha di wilayah Kelurahan Purangi;
4. Kawasan Pusat Kota Palopo meliputi Kelurahan Tompotikka dan Kelurahan Salekoe;
5. Kawasan Pusat Niaga Palopo di wilayah Kelurahan Dangerakko;
6. Kawasan Pusat Perbelanjaan di wilayah Kelurahan Salobulo;
7. Kawasan Peruntukan Industri seluas ± 360 Ha di wilayah Kelurahan Maroangin;
8. Kawasan Terminal tipe A seluas ± 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Songka;
9. Kawasan Koridor Jalan Andi Djemma;
10. Kawasan Koridor Jalan Andi Kambo;
11. Kawasan Koridor Jalan DR. Sam Ratulangi;
12. Kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit di wilayah Kelurahan Pontap;
13. Kawasan Hiburan Labombo di wilayah Kelurahan Salekoe;
14. Kawasan Transmigrasi seluas ± 976,73 Ha di wilayah Kelurahan Peta;
15. Kawasan Resor Kambo seluas 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Kambo.

KSK dari sudut kepentingan Sosial Budaya terdiri atas :

1. Kawasan Bersejarah Istana Datu Luwu dan Mesjid Djami Tua seluas 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Ammassangan;
2. Kawasan Mesjid Agung Luwu Palopo seluas 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Boting;
3. Kawasan Menara Payung Luwu terintegrasi dengan Pusat Kuliner Tradisional seluas 1,0 Ha di wilayah Kelurahan Batupasi;
4. Kawasan Islamic Centre Palopo seluas ± 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Takkalala;
5. Kawasan Komunitas Adat Peta, Latuppa, Mungkajang dan Battang;

6. Kawasan Desa Wisata Peta, Murante, dan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
7. Kawasan Olah Raga Terpadu (kawasan stadion Lagaligo) seluas ± 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Lagaligo;
8. Kawasan Sirkuit Road Race seluas ± 8,0 Ha di wilayah Kelurahan Songka.

KSK dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Lindung yang berada di wilayah Kecamatan Mungkajang, dan di wilayah Kecamatan Wara Barat dengan luas keseluruhan 8.666 Ha;
2. Kawasan DAS Pacangkuda (sumber utama air baku air minum kota) seluas ± 6.646,66 di wilayah Kelurahan Latuppa dan Kelurahan Murante;
3. Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) seluas 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Padang Lambe.

KSK dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi

- Kawasan Sagu Teknopark Palopo seluas 10,0 Ha di wilayah Kelurahan Salubattang.

2.3.4. KAWASAN PERUNTUKAN PERKANTORAN

- **Kawasan Perkantoran Pemerintah Skala Kota :**
  Tersebar di beberapa sub wilayah sesuai dengan kondisi eksisting, yakni : Kelurahan Tompotikka, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Lagaligo, dan Kelurahan Boting (Kecamatan Wara), Kelurahan Salekoe, dan Kelurahan Pontap (Kecamatan Wara Timur), Kelurahan To'bulung (Kecamatan Bara), Kelurahan Tomarundung (Kecamatan Wara Barat), Kelurahan Batupasi (Kecamatan Wara Utara), dan Kelurahan Mungkajang (Kecamatan Mungkajang).
- **Kawasan Perkantoran Pemerintah skala kecamatan dan kelurahan (skala lokal)**
  Tersebar di masing sub-sub wilayah kota di masing-masing wilayah kecamatan dan kelurahan, yang akan lebih mengefisienkan pelayanan kepada masyarakat setempat.
- **Kawasan peruntukan perkantoran swasta, direncanakan pada :**
  a. Kawasan pusat kota;
  b. Koridor jalan-jalan utama kota, yakni koridor jalan arteri primer, jalan kolektor primer, serta jalan lokal primer yang memiliki akses yang tinggi dengan kawasan lainnya;
  c. Kawasan reklamasi Salemo.

2.3.5. KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DAN PERGUDANGAN

- **Kawasan Peruntukan Industri:**
  Di wilayah Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua direncanakan seluas 360Ha.
- **Kawasan industri kecil dan usaha mikro**
  Tidak menimbulkan limbah berbahaya, peruntukannya tersebar di sub-sub wilayah KotaPalopo.
- **Kawasan peruntukan pergudangan**
  a. Lokasinya berdekatan atau teraglomerasi dengan kawasan peruntukan IndustriKelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua seluas 25,0 Ha.
  b. Kawasan Pergudangan lainnya (eksisting) berada di Kelurahan Batu Walenrang yang direncanakan seluas 25, 0 Ha.

2.3.6. KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA

- **Kawasan pariwisata budaya meliputi:**
  a. Istana Kedatuan Luwu (Kawasan Lalebata) terletak di Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara;
  b. Rumah adat Peta dan tempat tarian adat di Kelurahan Peta Kecamatan Sendana;
  c. Rumah adat Mungkajang dan Latuppa dan tempat tarian adat di Kecamatan Mungkajang;
  d. Maccera Tasi (Pesta Laut) di Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara;
  e. Tempat pendaratan Belanda di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;
  f. Tempat pementasan kesenian di Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara.
- **Kawasan pariwisata alam** meliputi:
  a. Kawasan Agrowisata Latuppa di Kelurahan Latuppa, Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang dan Kelurahan Peta Kecamatan Sendana.
  b. Kawasan Air Terjun Babak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
  c. Kawasan Air Terjun Siguntu di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
  d. Kawasan Air Terjun Rantenase di Kelurahan Peta Kecamatan Sendana;

e. Kawasan Kali Jodoh di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang;
f. Pemandangan alam Kambo di Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang;
g. Kawasan Air Terjun Mawa di Kelurahan Mawa Kecamatan Sendana;
h. Puncak Sampoddo di Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan;
i. Kawasan wisata Pantai Labombo di Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur;
j. Kawasan wisata Permandian alam Batupapan, Batiok dan Lumarrang (kurungan batu) di Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat;
k. Gua Kalo Dewata di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
l. Kawasan wisata Pantai Songka di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan;
m. Kawasan wisata Permandian alam Batutongkon di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
n. Kawasan tempat pelelangan ikan (TPI) di Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur;
o. Kawasan wisata Pulau Libukang di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;
p. Kawasan wisata Lembah Kattun di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.

Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata Buatan:

a. Kawasan wisata seni kreatif di pedestrian jalan Jenderal Ahmad Yani di Kelurahan Amassangan;
b. Kawasan wisata seni kreatif di koridor lapangan Pancasila Kelurahan Tompotikka;
c. Rencana pengembangan kawasan Resor Kambo di Kelurahan Kambo;
d. Rencana pengembangan kawasan wisata kuliner di Kawasan Menara Payung Luwu di Kelurahan Batupasi.

2.3.7. KAWASAN PERUNTUKAN RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)

❖ **Plaza**

Pelataran tempat berkumpulnya massa *(assembly point)* dengan berbagai jenis kegiatan seperti sosialisasi, duduk-duduk, aktivitas massa, dan lain-lain.

- Rencana pengembangannya berada di kawasan Menara Payung (*Landmark* Kota Palopo), serta di kawasan reklamasi Pantai Salemo berada di Kelurahan Sabbamparu (Kecamatan Wara Utara), Kelurahan Ponjale (Kecamatan Wara Timur), dan di Kelurahan Salekoe (Kecamatan Wara), dan Kelurahan Takkalala (Kecamaran Wara Selatan).

❖ **Pelataran Parkir**

Pelataran parkir merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama meletakkan kendaraan bermotor seperti mobil atau motor; serta kendaraan lainnya seperti sepeda. Lahan parkir dikenal sebagai salah satu bentuk RTNH yang memiliki fungsi ekonomis.

- Rencana pengembangan lahan parkir umum di Kota Palopo direncanakan terintegrasi dengan Plasa, juga pada terminal tipe A Songka dan terminal C Dangerakko, fasilitas *park and ride* stasiun kereta api, serta di masing-masing kawasan pariwisata di beberapa sub wilayah.

❖ **Lapangan Olahraga**

Lapangan olah raga merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya kegiatan olah raga..

- Berupa lapangan olah raga bulutangkis dan basket. Pengembangannya di beberapasub wilayah, termasuk di lahan kawasan reklamasi Salemo nantinya.

❖ **Tempat Bermain dan Rekreasi**

Tempat bermain dan rekreasi merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan berbagai kelengkapan tertentu untuk mewadahi kegiatan utama bermain atau rekreasi masyarakat.

- Direncanakan berada di kawasan reklamasi Salemo, di Kelurahan Salekoe (Kecamatan Wara), Kelurahan Songka (Kecamatan Wara Timur), dan di wilayah Kelurahan Sampoddo berupa Anjungan Cerdas.

❖ **Koridor**

Koridor merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai jalur dengan fungsi utama sebagai sarana aksesibilitas pejalan kaki yang bukan merupakan trotoar (jalur pejalan kaki yang berada di sisi jalan). Koridor sebagai ruang terbuka non hijau dibentuk diantara dua bangunan atau gedung, dimana dimanfaatkan sebagai ruang sirkulasi atau aktivitas tertentu.

- Rencana pengembangan Koridor berada pada kawasan Reklamasi Salemo.

- Diprirotaskan pada kawasan Perdagangan dan Jasa sebagai pembatas antar blok-blok bangunan sehingga pengunjung lebih leluasa, nyaman, dan aman dalam beraktivitas berkeliling.
- Sementara untuk Koridor di kawasan pariwisata digunakan sebagai lintasan *jogging*, dan kegiatan sejenis lainnya.

❖ **Ruang Terbuka Biru (RTB)**

RTB tidak hanya sebagai penyimpan air, ruang terbuka biru (seperti kanal, danau, sungai, dll) juga memiliki fungsi sebagai tempat wisata, sarana transportasi air, dan fungsi lainnya.

- Badan air : Sungai Latuppa, Sungai Boting, Sungai Takkalala, Sungai Amassangan, Sungai Pikun, Sungai Salubattang, Sungai Batu, Sungai Songka Mati, Sungai Ponjalae, dan Sungai Andoli.
- Kanal Labombo di Kelurahan Salekoe dan Kanal Takkalala di Kelurahan Takkalala dalam kawasan reklamasi Salemo.

2.3.8. KAWASAN PERUNTUKAN RUANG KEGIATAN SEKTOR INFORMAL

Rencana pengembangan peruntukan ruang kegiatan sektor informal, meliputi :

1. Kawasan pelataran Lagota Pusat Niaga Palopo di Kelurahan Lagaligo;
2. Kawasan sekitar lapangan Kodim Kelurahan Salobulo;
3. Koridor jalan akses Pelabuhan – Lemo-Lemo di Kelurahan Sabbamparu dan Kelurahan Salobulo.
4. Koridor Jalan Guttu Patalo dan Jalan Wecudai sekitar stadion Lagaligo di Kelurahan Lagaligo
5. Kawasan terminal Tipe A Songka di Kelurahan Songka;
6. Kawasan terminal Tipe C Dangerakko di Kelurahan Dangerakko;
7. Kawasan stasiun kereta api di Kelurahan Songka;
8. Kawasan park and ride kereta api di Kelurahan Songka;
9. Kawasan reklamasi Salemo;
10. Kawasan puncak Sampoddo di Kelurahan Sampoddo;
11. Kawasan pelabuhan Tanjung Ringgit di Kelurahan Pontap;
12. Koridor jalan poros Latuppa di Kelurahan Latuppa;
13. Koridor jalan poros terminal tipe A Songka di Kelurahan Songka;
14. Koridor jalan poros Battang di Kelurahan Battang dan Kelurahan Battang Barat.

2.3.9. KAWASAN PERUNTUKAN PELAYANAN PUSAT KESEHATAN

Kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan:

a. Rumah Sakit Umum Sawerigading kelas/tipe B di Kecamatan Bara;
b. Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C dr. Palammai di Kecamatan Wara
c. Rumah Sakit Umum At Medika di Kelurahan Tompotikka;
d. Rumah Sakit Umum Siti Madyang di Kelurahan Salekoe;
e. Rumah Sakit Tentara di Kelurahan Amassangan;
f. Rumah Sakit Bintang Laut di Kelurahan Pattene;
g. Rumah Sakit Mega Buana d Kelurahan Binturu;
h. Rumah Sakit Mujaisyah di Kelurahan Balandai;
i. Rumah Sakit Umum Mitra Smart di Kelurahan Salubulo;
j. Rencana pengembangan Rumah Sakit Jiwa Kalang-Kalang di Kelurahan To'bulung;
k. Rencana pengembangan kawasan peruntukan sarana kesehatan skala regional dan skala kota di kawasan Reklamasi Salemo;
l. Rencana pengembangan kawasan peruntukan sarana kesehatan skala regional dan skala kota di wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, dan Kecamatan Wara Utara.
m. Kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan skala pelayanan lingkungan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar merata di setiap wilayah kecamatan, agar lebih mudah diakses oleh warga setempat.

2.3.10. KAWASAN PERUNTUKAN PELAYANAN PERIBADATAN

a. Kawasan Mesjid Agung Luwu Palopo di Kelurahan Boting Kecamatan Wara.
b. Kawasan Islamic Centre di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan.
c. Sementara untuk pengembangan kawasan peruntukan peribadatan lainnya yang berskala lingkungan akan disesuaikan dengan kebutuhan ummat masing-masing.

2.3.11. KAWASAN PERUNTUKAN PERTEMUAN, PAMERAN DAN SOSIAL BUDAYA

Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, insentif, konferensi, pemeran, dan sosial budaya meliputi :

a. Kompleks Islamic Centre di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan;
b. SaodenraE Convention Centre di Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara;
c. Rencana peruntukan perhotelan kelas berbintang di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Mungkajang;
d. Pengembangan perhotelan kelas berbintang di kawasan reklamasi Salemo;
e. Pengembangan Plasa Menara Payung (landmark Kota Palopo) di Kelurahan Batupasi;
f. Gedung Kesenian di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
g. Gedung Pemuda di Kelurahan Binturu Kecamatan Wara Selatan;
h. Gedung Merdeka Convention Hall di Kelurahan SalekoE Kecamatan Wara Timur; dan
i. Gedung Rasdiana Convention Hall di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
j. Kawasan Perkemahan di Kelurahan Padang Lambe.

2.3.12. KAWASAN PERUNTUKAN OLAHRAGA

Kawasan Peruntukan Olah Raga :

a. Kawasan olahraga terpadu Lagaligo di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
b. Kawasan Lapangan Gaspa di Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
c. Rencana pengembangan lapangan sepakbola di setiap wilayah kecamatan;
d. Rencana pengembangan lapangan bulutangkis dan sepak takraw di setiap wilayah kelurahan;
e. Rencana pengembangan kawasan sirkuit Road Race seluas 8,0 Ha di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan;
f. Rencana pengembangan kawasan lapangan Golf seluas 10,0 Ha di wilayah Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana.

2.3.13. KAWASAN PERUNTUKAN TRANSMIGRASI

Rencana pengembangan kawasan peruntukan Transmigrasi di wilayah Kota Palopo seluas 976,73 Ha di wilayah Kelurahan Peta Kecamatan Sendana.

2.3.14. KAWASAN PERUNTUKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi :

a. Komando Distrik Militer 1403 Sawerigading berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Wara;
b. Rumah jabatan Komando Distrik Militer 1403 Sawerigading berada di Jalan Wolter Mongsidi Kecamatan Wara;
c. Kantor Polisi Militer (PM) di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Wara Utara;
d. Kawasan Lapangan Tembak di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;
e. Lapangan Kodim di Jalan Dr. Samratulangi Kecamatan Wara Utara;
f. Lapangan Asrama TNI AD 721 Makkasau di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
g. Kantor Polisi Resort Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
h. Zibang Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
i. Tepbek Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
j. Koramil di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara dan Polsektersebar di masing-masing wilayah kecamatan.

2.3.15. KAWASAN HUTAN PRODUKSI

Kawasan Hutan Produksi terletak di Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwanua dengan luas 608 hektar *(Sumber : BPKH Wilayah VII Makassar)*

2.3.16. KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

- **Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan**

  Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang direncanakan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di wilayah Kota Palopo seluas 1.100 Ha, yang tersebar di beberapa sub wilayah, meliputi :

  1. Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:
     a. Wilayah Kecamatan Telluwanua :

1) Di wilayah Kelurahahan Jaya seluas 400 Ha;
2) Di wilayah Kelurahan Salubattang seluas 180 Ha;
3) Di wilayah Kelurahan Pentojangan seluas 150 Ha;
4) Di wilayah Kelurahan Sumarambu seluas 130 Ha;
5) Di wilayah Kelurahan Maroangin seluas 80 Ha.

b. Wilayah Kecamatan Sendana :
   - Di wilayah Kelurahan Sendana seluas 80 Ha.

c. Wilayah Kecamatan Wara Barat
   - Di wilayah Kelurahan Padang Lambe seluas 80 Ha.

2. Kawasan Sentra Pengolahan Hasil Pertanian masing-masing seluas 1,0 Ha di Kelurahan Songka dan Kelurahan Battang Barat.

- **Kawasan Peruntukan Perkebunan**
  Kawasan peruntukan perkebunan berupa kawasan perkebunan rakyat seluas 2.724 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Barat, dan Kecamatan Telluwanua.
- **Kawasan peruntukan pertanian Holtikultura**
  Kawasan peruntukan pertanian holtikultura seluas 2.083 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Telluwanua.

2.3.17. KAWASAN PERUNTUKAN PETERNAKAN

Kawasan peruntukan Peternakan di wilayah Kota Palopo meliputi :

a. Kawasan Satelit Pembibitan Ayam seluas 1,9 Ha di Kelurahan Mancani, dan seluas 1,0 Ha di Kelurahan Maroangin;
b. Kawasan Rumah Tahanan Hewan seluas 2,0 Ha di Kelurahan Padang Lambe;
c. Kawasan lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan ladang pembesaran kandang seluas 10,0 Ha di wilayah Kelurahan Padang Lambe.
d. Kawasan pakan ternak seluas 1,0 Ha termasuk didalamnya gudang dan tempat mesin pakan di wilayah Kelurahan Padang Lambe;
e. Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) seluas 1,5 hektar yang berlokasi di Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana;
f. Ternak unggas di dikembangkan di daerah pinggiran kota di wilayah Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Bara, dan Kecamatan Sendana;
g. Kawasan penggembalaan ternak sapi seluas 100 Ha di wilayah Kelurahan Peta;
h. Kawasan Pusat Kesehatan Hewan seluas 1,0 Ha di wilayah Kelurahan Mancani.

2.3.18. KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN

Kawasan Peruntukan Perikanan tangkap, meliputi :
Perikanan tangkap berada di Perairan Teluk Bone dan didukung oleh ketersedian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PonjalaE/ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

2.3.19. KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

1. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas terletak di Blok Bone Utara.
2. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral terdiri atas :
   a. Penambangan emas terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
   b. Penambangan galena terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat;
   c. Penambangan marmer terletak di Kelurahan Battang, Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat;
   d. Penambangan granit terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat, Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua.

   Potensi pengembangan kawasan peruntukan pertambangan rakyat berupa pertambangan **Golongan Batuan** yang terdapat di wilayah :
   a. Kecamatan Mungkajang;
   b. Kecamatan Wara Selatan;
   c. Kecamatan Wara Barat;
   d. Kecamatan Sendana;
   e. Kecamatan Telluwanua;
   f. Kecamatan Bara;

g. Kecamatan Wara Utara;
h. Kecamatan Wara.

Golongan Batuan ada 47 jenis, salah satunya adalah kerikil berpasir alami (Sirtu)

2.4. Demografi

Penduduk Kota Palopo pada akhir 2019 tercatat sebanyak 184.614 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 89.917 jiwa laki-laki dan 94.697 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 94,27, angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 93 - 94 penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 2,18 persen. Dengan luas wilayah 247,52 Km maka kepadatan penduduk di Kota Palopo yaitu 746 jiwa per Kilometer persegi.

Untuk melihat Komposisi Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel. 2.15
Kompisisi Penduduk Kota Palopo Tahun 2015- 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah	Jiwa	168,894	172,916	176.907	180.678	184.614
2	Laki-Laki	Jiwa	82,301	84,192	85.967	87.812	89.917
3	Perempuan	Jiwa	86,593	88,724	90.94	92.866	94.697
4	Pertumbuhan	%	2.42	2.62	2,97	2,13	2,18
5	Densitas	Jiwa/Km2	682	698	715	730	746
6	Sex Ratio	%	95.04	94.89	94,53	94,56	94,27

Sumber Data : Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2020

Sedangkan untuk melihat gambaran Komposisi Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 berdasarkan kelas umur dapat dilihat pada Grafik 2.1.

Grafik 2.1
Piramida Penduduk Kota Palopo Tahun 2019

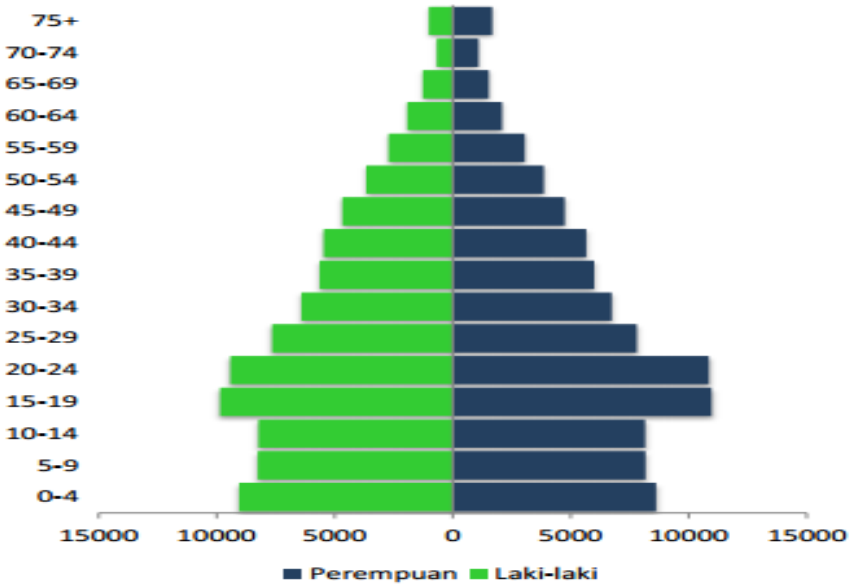

Sumber Data : Kota Palopo Dalam Angka 2020

Dari piramida penduduk di atas dapat terlihat bahwa dari 184.614 jiwa penduduk tercatat sekitar 28,33 persen berada pada usia muda (0-14 tahun) dan 4,19 persen pada kelompok usia tua (65 tahun keatas), selebihnya sekitar 67,48 persen yang berada pada kelompok usia produktif (usia 15 – 64 tahun) atau dengan kata lain beban tanggungan (*Dependency Ratio*) Kota Palopo Tahun 2019 sebesar 48,19 persen, yang berarti dari 100 penduduk usia produktif Kota Palopo akan menanggung secara ekonomi sebesar 48,19 persen penduduk usia tidak produktif.

Untuk melihat gambaran Kepadatan Penduduk Kota Palopo dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11
Peta Kepadatan Penduduk Kota Palopo

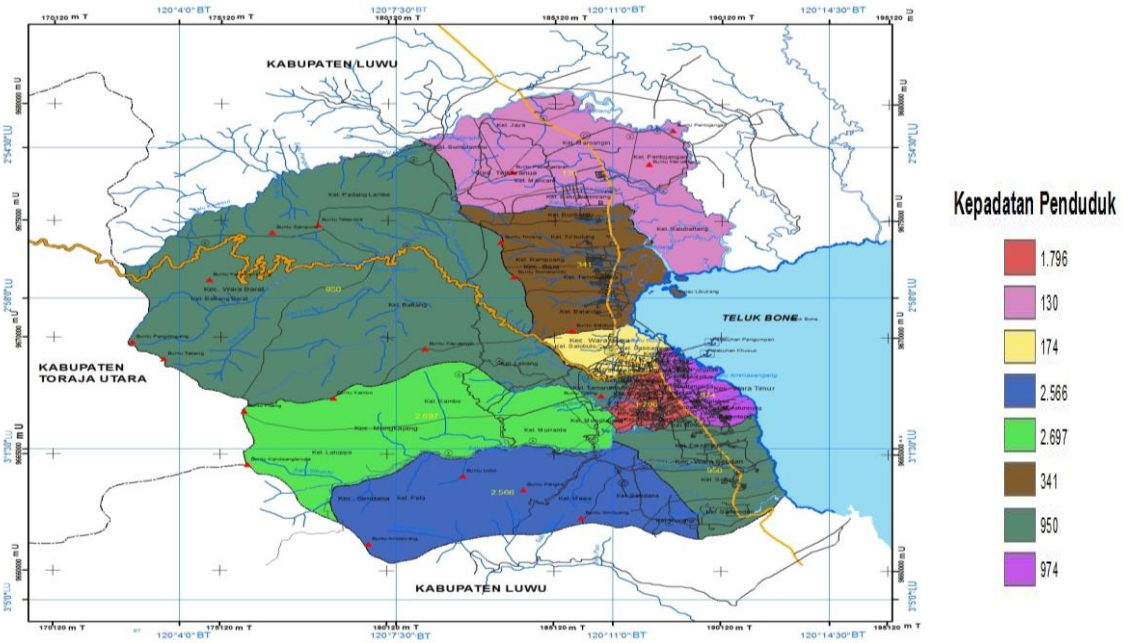

Sumber: Laporan Akhir Dokumen Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

Berdasarkan kelompok status pendidikan, sepanjang tahun 2015-2019, persentase penduduk Kota Palopo yang mengakses lembaga perguruan tinggi baik diploma maupun tingkat strata juga terus meningkat. Jika pada tahun 2015 hanya 27.31% yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi, pada tahun 2019 jumlah menjadi 20.70% (Badan Pusat Statistik Kota Palopo tahun 2015-2019).

Gambar diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, penduduk Kota Palopo yang berusia 20-24 tahun menempati struktur penduduk dengan jumlah terbanyak, disusul penduduk berumur 15-19 tahun. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan yang berumur 15-19 tahun dan 20-24 tahun lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki pada umur yang sama. Sex ratio atau rasio perempuan dan laki-laki di Kota Palopo pada tahun 2019 berada pada angka 94,27 artinya dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 94-95 orang penduduk laki-laki.

Dalam Tabel 2.16 menunjukkan data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di Kota Palopo sampai dengan Tahun 2019.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palopo Tahun 2019

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin L/P
		Laki-Laki	Perempuan		
1	0 – 4	9.199	8.803	18.002	95,69
2	5 – 9	8.541	8.494	17.035	99,45
3	10 – 14	8.455	8.451	16.906	99,95
4	15 – 19	9.911	11.065	20.976	111,64
5	20 – 24	9.989	11.371	21.360	113,,83
6	25 – 29	8.094	8.155	16.249	100,75
7	30 – 34	6.665	6.941	13.606	104,14
8	35 – 39	5.750	6.180	11.930	107,47
9	40 – 44	5.619	5.899	11.518	104,98

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin L/P
		Laki-Laki	Perempuan		
10	45 – 49	4.969	5.053	10.022	101,69
11	50 – 54	4.032	4.222	8.254	104,71
12	55 – 59	2.990	3.386	6.376	113,24
13	60 – 64	2.123	2.341	4.464	110,27
14	65 – 69	1.400	1.649	3.049	117,78
15	70 – 74	744	1.195	1.939	160,61
16	75+	1.102	1.826	2.928	165,69
Kota Palopo		**89.583**	**95.031**	**184.614**	**106,08**

Sumber: Palopo Dalam Angka, 2020

2.4.1. Daya Tampung Penduduk

Diproyeksikan bahwa pada tahun 2032 nanti jumlah penduduk Kota Palopo akan berjumlah sebanyak 313.766 jiwa, sedangkan pada tahun 2037 nanti diperkirakan akan berjumlah sebanyak 358.985 jiwa. Selengkapnya mengenai proyeksi jumlah penduduk Kota Palopo periode tahun 2018 – 2037 seperti terlihat pada Tabel 2.17 berikut:

Tabel 2.17
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Palopo
Tahun 2018–2037

No.	TAHUN	JUMLAH (Jiwa)
1.	2018	183.097
2.	2022	203.920
3.	2027	274.240
4.	2032	313.766
5.	2037	358.985

Sumber: Laporan Akhir Dokumen Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

Sedangkan data tentang tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Tingkat Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Kecamatan	Tingkat Pertumbuhan (%)			Kepadatan Penduduk (orang/Ha)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Wara	2.31	2.13	2.18	3322	3403.05	3477
Wara Utara	2.31	2.13	2.17	2140	2185.16	2233
Wara Selatan	2.32	2.14	2.19	1088	1111.25	1136
Wara Timur	2.31	2.13	2.18	3149	3216.31	3287
Mungkajang	2.31	2.13	2.18	147	151.59	154
Bara	2.30	2.14	2.17	1181	1206.38	1233
Sendana	2.30	2.12	2.15	176	180.24	184
Telluwanua	2.30	2.15	2.18	388	396.45	405
Wara Barat	2.29	2.12	2.16	202	206.71	211
Jumlah	**2.31**	**2.13**	**2.18**	**715**	**729**	**746**

Sumber: *Palopo Dalam Angka*

Persebaran penduduk Kota Palopo tergambarkan dari jumlah penduduk per satuan wilayah kecamatan, dimana wilayah Kota Palopo terdapat 9(sembilan) wilayah administrasi kecamatan dan 48 (empat puluh delapan) kelurahan. Berdasarkan data Tahun 2019, kecamatan dengan tingkat pertumbuhan penduduk terbesar adalah Wara Selatan, namun Wara menjadi Kecamatan dengan populasi terpadat. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Mungkajang.

2.5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tentang Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Dalam konteks ini kondisi eksisting suatu wilayah akan ditunjukkan dengan status kondisi lingkungan baik secara fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan telah terjadi kerusakan atau tidak. Oleh karena itu dibutuhkan baku kerusakan lingkungan hidup untuk menilai status kondisi lingkungan tersebut.

Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Dalam konteks ini daya tampung lingkungan dihubungkan dengan pencemaran lingkungan akibat dari suatu kegiatan, oleh karena itu dibutuhkan baku mutu lingkungan hidup untuk menilai status pencemaran lingkungan tersebut.

Secara umum konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat digambarkan melalui *framework* sisi permintaan (*demand*) dan sisi penawaran (*supply*). Sisi permintaan lebih didasarkan pada kebutuhan dan pola konsumsi akan sumber daya alam dan jasa lingkungan seperti lahan, air, dan sumber daya alam lainnya. Kebutuhan ini akan banyak dipengaruhi oleh perkembangan penduduk baik di suatu wilayah administrasi maupun wilayah ekoregion. Interaksi kebutuhan akan sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan jumlah yang diekstraksi akan meninggalkan jejak ekologis *(ecological foot print)* yang menunjukkan jejak ekosistim per satuan penggunaan sumber daya.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup harus menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah karena dengan diketahuinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka diketahui cadangan sumber daya wilayah serta kemampuan fisik wilayah dalam mendukung kebijakan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan di dalamnya. Ketika daya dukung dan daya tampung wilayah sudah terlampaui, maka:

- Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS;dan
- Segala usaha dan/atau kegiatan yang melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

2.5.1. Daya Dukung Lahan

Meskipun Kota Palopo dari aspek kegiatan merupakan kawasan perkotaan, namun pola penggunaan lahan saat ini (*existing condition*, 2017) masih didominasi oleh kegiatan non budidaya perkotaan. Data yang ada hasil overlay antara peta Rupa Bumi Indonesia tahun 2012 yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial dengan peta hasil survey lapangan tahun 2017 oleh Tim Revisi RTRW Kota Palopo, menunjukkkan bahwa jenis tutupan lahan yang dominan adalah hutan yakni seluas 15.075,63 Ha atau sebesar 58,39%, disusul masing-masing semak belukar seluas 3.724,87 Ha atau sebesar 14,43%, tegalan/ladang seluas 1.711,77 Ha atau sebesar 6,63%, sawah seluas 2.689,00 Ha atau sebesar 10,42%, tambak seluas 1.258,68 Ha atau sebesar 4,88%. Selengkapnya mengenai kondisi tutupan lahan wilayah Kota Palopo tahun 2019 seperti terlihat pada Tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.19
Pola Tutupan Lahan Wilayah Kota Palopo Tahun 2017

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan	15.075,63	58,39
2	Permukiman	1.238,85	4,79
3	Sawah	2.689,00	10,42
4	Tambak	1.258,68	4,88

5	Padang Rumput	2,78	0,01
6	Kebun/Tegalan	1.711,77	6,63
7	Semak Belukar	3.724,87	14,43
8	Sungai	102,88	0,39
9	Rawa	1,22	0,01
10	Tanah Kosong	12,32	0,05
Jumlah		**24.752,00**	**100**

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

Salah satu maksud dari analisis aspek tata guna lahan/tanah adalah untuk melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi pemanfaatan atau penggunaan/ tanah, distribusi penggunaan lahan serta kecenderungan swasta dan masyarakat dalam penguasaan/penggunaan lahan, baik karena pengaruh aspek fisik/lokasi, ekonomi, harga tanah, aksesibilitas, keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif dan aspek lainnya. Berdasarkan Palopo Dalam Angka 2020, data komposisi dan distribusi penggunaan lahan di Kota Palopo dimana luas kawasan hutan masih yang mendominasi wilayah Kota Palopo pada tahun 2019 yaitu seluas 15.075,63Ha atau sebesar 58,39%.

Dari komposisi tutupan lahan saat ini (*existing condition*, 2017) pada wilayah Kota Palopo, terlihat bahwa potensi ketersediaan lahan untuk mewadahi permukiman penduduk, maupun sarana dan prasarana kota masih sangat memadai. Potensi ketersediaan lahan yang cukup luas yang saat ini cenderung menjadi kawasan alternatif pengembangan fisik Kota Palopo mencakup wilayah Kecamatan Wara Selatan dan Wara Utara, dan Telluwanua. Sementara untuk lahan-lahan pada wilayah Kecamatan Wara saat ini harganya relatif tinggi di banding dengan di wilayah lainnya, sehingga lebih sesuai jika diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan yang produktif, seperti untuk bangunan fasilitas jasa komersial, perdagangan, dan perkantoran swasta. Sedangkan lahan-lahan di wilayah pesisir Teluk Bone yang mencakup sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, Wara Utara, dan Wara Selatan memerlukan teknologi atau perlakuan khusus seperti penimbunan untuk mematangkan lahan-lahan tersebut, sehingga akhirnya menjadi relatif mahal.

Secara umum, potensi sumber daya lahan wilayah Kota Palopo masih sangat besar untuk menampung berbagai aktivitas perkotaan. Lahan-lahan yang dapat dialihfungsikan menjadi peruntukan untuk budidaya perkotaan terdiri dari: padang rumput, kebun/tegalan, semak belukar, rawa, sawah tadah hujan, dan tambak kurang produktif. Dengan demikian, masih ada seluas 8.512,88 Ha atau sebesar 32,97% potensial sebagai alternatif pengembangan fisik Kota Palopo.

Sementara itu, berdasarkan Palopo Dalam Angka 2019 yang diuraikan dalam Tabel 2.20 menunjukkan bahwa luas lahan di Kota Palopo yang dalam kondisi agak kritis seluas 15.992,52 Ha, lahan kritis seluas 4.654,59 Ha, yang berpotensial menjadi lahan kritis seluas 592,55 Ha, lahan yang sangat kritis seluas 1.025,65 Ha, serta lahan yang tidak kritis seluas 5.755,06 Ha. Lahan kritis adalah lahan yang sangat tandus dan gundul dengan tingkat kesuburan yang sangat rendah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Lahan ini masih dapat dikelola walaupun produktivitasnya rendah.

Tabel 2.20
Luas Lahan Kritis Kota Palopo 2018 (Ha)

No	Di Dalam & Luar Kawasan	Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	Total
1	Luar Kawasan Hutan	9.922,02	2.220,62	363,99	82,95	4.796,17	17.385,75
2	Hutan Lindung	5.671,66	1.964,99	37,28	841,86	74,18	8.589,97
3	Hutan Produksi	-	-	-	-	-	-
4	Hutan Produksi Konservasi	-	-	-	-	-	-
5	Hutan Produksi Terbatas	29,54	40,38	181,45	17,38	884,71	1.153,46
6	Kawasan Suaka Alam	369,30	428,60	9,83	83,45	-	891,18
Total		15.992,52	4.654,59	592,55	1.025,65	5.755,06	28.020,36

Sumber: Palopo Dalam Angka, 2019

Beberapa penyebab kerusakan hutan diakibatkan oleh kebakaran hutan, perambahan hutan, ladang berpindah dan penebangan liar. Kerusakan hutan di Kota Palopo akibat perambahan hutan. Tabel di bawah menunjukkan bahwa penyebab kerusakan hutan yang terjadi di Kota Palopo disebabkan oleh perambahan hutan. Diperkirakan luas kerusakan hutan akibat perambahan sebesar 1.130 Ha.

Perkiraan Luas Kerusakan Hutan Menurut Penyebabnya pada Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Perkiraan Luas Kerusakan Hutan Menurut Penyebabnya, 2016

No	Penyebab Kerusakan	Luas (Ha)
1	Kebakaran hutan	-
2	Ladang berpindah	-
3	Penebangan liar	-
4	Perambahan hutan	1.130
5	Lainnya	-
Total		**1.130**

Sumber: Dinas Kehutanan & Perkebunan Kota Palopo, 2016

2.5.2. Daya Dukung Permukiman

Semakin berkembangnya Kota Palopo menjadi wilayah perkotaan yang memiliki sarana dan fasilitas yang cukup lengkap di bidang pendidikan, kesehatan, dan pasar tenaga kerja menjadikan Kota ini sebagai tujuan daerah sekitarnya untuk bekerja maupun menuntut ilmu. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya permintaan bangunan tempat tinggal.

Kondisi permukiman di Kota Palopo digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

- Permukiman Kepadatan Tinggi seluas lebih kurang 1.024 hektar berada pada Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur
- Permukiman Kepadatan Sedang seluas lebih kurang 680 hektar berada pada Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Bara
- Permukiman Kepadatan Rendah seluas lebih kurang 1.794 hektar berada pada Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Telluwanua.

Data tentang Kekurangan Rumah (Backlog) Kota Palopo Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Angka Kekurangan Rumah (Backlog) Kota Palopo 2019

No	Kecamatan	Kekurangan Rumah (*backlog*)
1	Wara Selatan	217
2	Sendana	160
3	Wara	1.037
4	Wara Timur	675
5	Mungkajang	251
6	Wara Utara	739
7	Bara	957
8	Telluwanua	442
9	Wara Barat	197
	Total	**4.675**

Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat kekurangan rumah sebesar 4.675 unit di Kota Palopo. Kecamatan dengan kebutuhan rumah terbanyak terdapat di Kecamatan Wara (1.037 unit) dan Kecamatan Bara (957 unit). Sedangkan kecamatan dengan kebutuhan rumah

terendah ada di Sendana dan Wara Barat masing-masing 160 dan 197 unit. Dilihat dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal, yang berstatus milik sendiri persentasenya sebesar 74,02 persen, sedangkan yang berstatus kontrak/sewa dan lainnya sebesar 25,98 persen.

Kualitas perumahan dapat diukur dengan melihat kondisi lantai, atap, dinding dan luas lantai perkapita. Secara umum kualitas perumahan di Kota Palopo cenderung baik. Kondisi rumah tangga di Kota Palopo 99,13 persen memiliki lantai bukan tanah, 93,25 persen memiliki atap layak dan 59,39 persen memiliki dinding permanen (tembok). Untuk melihat Statistik Perumahan Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Statistik Perumahan Kota Palopo 2015 – 2019

Uraian		2015	2016	2017	2018	2019
Rumah tangga menurut status kepemilikan bangunan tempat tinggal (%)						
	Milik sendiri	72,06	74,02	66.29	69.07	73.9
	Kontrak/sewa & lainnya	27,95	25,98	33.71	30.93	26.1
Rumah tangga menurut kualitas perumahan (%)						
	Lantai bukan tanah	97,6	99,13	99.32	99.25	98.47
	Atap layak	88,51	93,25	94.04	91.49	94.4
	Tembok	56,71	59,39	61.29	61.71	61.29

Sumber: Statistik Daerah Kota Palopo (BPS, 2020)

Kondisi perumahan di daerah perkotaan menunjukkan kualitas yang lebih baik dibandingkan daerah perdesaan. Namun sebaliknya, persentase rumahtangga yang sewa/kontrak & lainnya di perkotaan relatif lebih tinggi dibanding perdesaan mengingat daerah perkotaan merupakan kawasan yang menjadi pusat kegiatan yang cukup padat sebagai pusat niaga, pemerintahan maupun pusat pendidikan.

Kota Palopo, sebagai kota yang perkembangannya cukup pesat dalam berbagai faktor bila dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Fenomena ini menjadi beban tersendiri bagi pemerintah Kota Palopo terutama dalam menyediakan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang umumnya datang dari daerah pedesaan di sekitar Kota Palopo untuk mencoba kehidupan dan penghidupan yang baru. Selain itu, wilayah pesisir Kota Palopo yang telah lama dihuni oleh warga lokal yang sebagian besar merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan orientasi ekonominya pada laut, seperti nelayan tangkap, nelayan budi daya rumput laut dan sebagainya. Sebagian besar dari daerah tersebut merupakan kawasan permukiman kumuh yang masih perlu dilakukan penataan agar menjadi permukiman yang layak huni.

Selanjutnya terkait dengan permukiman kumuh di Kota Palopo, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 311/VII/2019 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Palopo, menyebutkan bahwa di wilayah Kota Palopo masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman kumuh seluas 426,37 Ha yang tersebar pada 47 kelurahan di 9 (Sembilan) kecamatan.. Selengkapnya dapat kita lihat dalam Tabel 2.24 berikut ini.

Tabel 2.24
Sebaran Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Palopo Tahun 2019

Kecamatan	Kelurahan	RT/RW	Luas (Ha)
Wara	Tompotikka	RW 01 & 05	16,38
	Pajalesang	RW 01 & 03	13,38
	Lagaligo	RW 01, 02, 04, & 08	13,48
	Dangerakko	RW 05 & 06	4,53
	Boting	RW 02, 03, & 05	14,31
	Amassangan	RW 01 & 02	4,18
Wara Timur	Ponjalae	RW 03, RW 04	12,00
	Pontap	RW 01/RT 03, RW 04/RT 01, RW 02/RT 04	4,1
	Malatunrung	RW 05	12,18
	Surutanga	RW 01/RT 01, 02, & 03	9,52

Kecamatan	Kelurahan	RT/RW	Luas (Ha)
	Benteng	RW 04/RT 02 & 03	9,37
	Salekoe	RW 04	7,36
	Salotellue	RW 01/RT 03, RW 02, RW 03/RT 05	3,96
Wara Selatan	Takkalala	RW 03 / RT 04	2,19
	Binturu	RW 01 & 02	5,20
	Sampoddo	RW 03/RT 03, RW 04 / RT 01	1,20
	Songka	RW 02	9,21
Wara Barat	Padang Lambe	RW 03	8,25
	Lebang	RW 01, 03, & 04	16,43
	Battang	RW 02	1,50
	Battang Barat	RW 02	3,36
	Tamarundung	RW 05 & 06	8,35
Bara	Temmalebba	RW 01, 04, 06, & 07	17,21
	Buntu Datu	RW 01	15,86
	Balandai	RW 01, 02, 03, & 04	19,72
	To'Bulung	RW 01, 02, & 03	211, 66
	Rampoang	RW 05 & 06	5,86
Mungkajang	Mungkajang	RW 03	14,16
	Murante	RW 01, 02, 06, & 08	20,43
	Kambo	RW 02	5,10
	Latuppa	RW 04	5,88
Sendana	Purangi	RW 04, 05, & 06	12,09
	Peta	RW 01	5,14
	Sendana	RW 02 & 03	4,19
	Mawa	RW 01 & 04	10,00
Telluwanua	Salubattang	RW 02/RT 03	3,73
	Pentojangan	RW 01, 02, 04, & 05	13,88
	Mancani	RW 02, 04, 05, 06, & 07	8,85
	Jaya	RW 03 & 04	5,65
	Batu Walenrang	RW 03	2,71
	Sumarambu	RW 03	5,52
	Maroangin	RW 05	4,63
Wara Utara	Penggoli	RW 01, 02, & 03	6,58
	Salobulo	RW 02 & 03	13,30
	Sabbamparu	RW 04/RT 11 & 12	7,2
	Pattene	RW 01, 02, & 03	21,36
	Luminda	RW 02 & 04	5,22
Total			**426,37**

Sumber: Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 311/VII/2019

2.5.3. Status Daya Dukung dan Ambang Batas Penyediaan Bahan Pangan

Indikator umum yang digunakan dalam melihat kondisi pangan dalam suatu wilayah biasanya merujuk pada ketentuan FAO yang mensyaratkan ketersediaan energi minimal 2200 kkal/kapita/hari dan protein 54 gram/kapita/hari. Jika merujuk pada standar ini, maka Palopo masih berada di bawah ketentuan FAO dalam hal ketersediaan energi, dimana pada tahun 2016 yakni masih berada pada angka 2.130,1 kkal/kapita/hari. Sedangkan untuk ketersediaan proteinnya, Palopo sudah melampaui karena sudah berada pada posisi 104,15 gram/kapita/hari (2019).

Untuk melihat gambaran Status Daya Dukung dan Ambang Batas Penyediaan Bahan Pangan Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik 2.2.

Grafik 2.2
Status Daya Dukung dan Ambang Batas Penyediaan Bahan Pangan KotaPalopo Tahun 2019

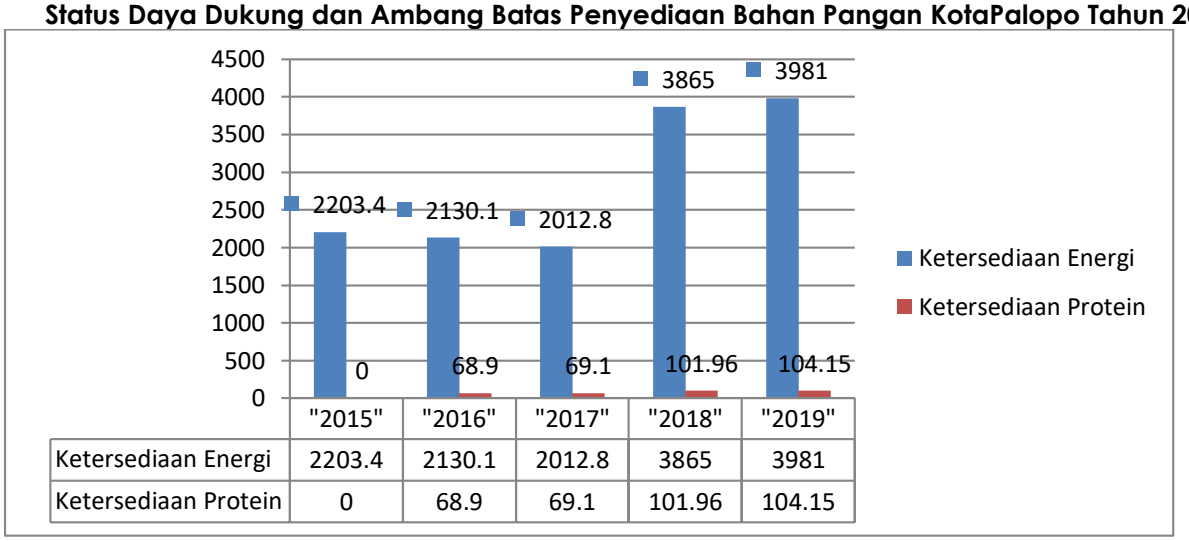

	"2015"	"2016"	"2017"	"2018"	"2019"
Ketersediaan Energi	2203.4	2130.1	2012.8	3865	3981
Ketersediaan Protein	0	68.9	69.1	101.96	104.15

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2020

Perkembangan produksi pangan nabati dan pangan hewani di Kota Palopo menunjukkan tren yang positif dari tahun 2015 sampai tahun 2018, tetapi mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2019. Produksi padi meningkat dari 28.630 ton pada tahun 2015 menjadi 30.167 ton pada tahun 2016. Selanjutnya produksi padi 32.444 ton pada tahun 2017, meningkat menjadi 33.259 ton pada tahun 2018.

Demikian pula dengan komoditas jagung, juga mengalami fluktuasi produksi selama periode tahun 2015 – 2019. Pada tahun 2015 produksi jagung 4.737 ton, kemudian meningkat menjadi 6.303 ton pada tahun 2016. Akan tetapi pada tahun 2017 produksi Jagung mengalami penurunan menjdi 5.086 ton dan semakin menurun pada tahun 2018, yaitu menjadi 4.988 ton. Tetapi pada tahun 2019, mengalami peningkatan produksi yang drastic menjadi 7.493 ton.

Sedangkan untuk melihat gambaran Perkembangan Ketersediaan Pangan Nabati Kota Palopo (2015-2019) dapat dilihat pada Grafik 2.3.

Grafik 2.3
Perkembangan Ketersediaan Pangan Nabati Kota Palopo (2015-2019)

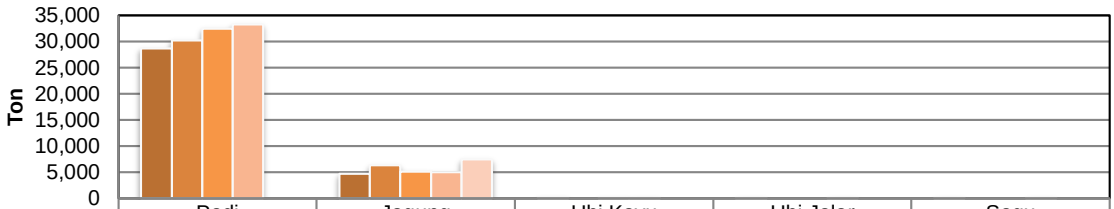

	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Sagu
2015	28,630	4,737	177	13	13
2016	30,167	6,303	0	0	0
2017	32,444	5,086	70	0	0
2018	33,259	4,988	39	1	2
2019	0	7,493	0	0	0

Sumber: RAD Pangan & Gizi Kota Palopo

Sementara itu, perkembangan produksi pangan hewani juga menunjukkan sedikit fluktuasi, tetapi secara umum masih pada angka yang stabil, khususnya pada komoditas sapi. Jumlah ternak sapi yang dipotong di RPH setiap tahun meningkat, yakni pada tahun 2015 sebanyak 2.694 ekor meningkat menjadi 2.768 ekor di tahun 2019. Data ini digambarkan dalam Grafik 2.4 berikut ini.

Grafik 2.4
Perkembangan Jumlah Ternak yang Dipotong di RPH Kota Palopo (2015-2019)

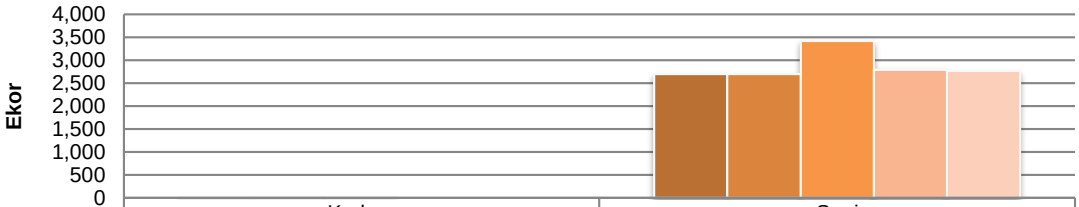

	Kerbau	Sapi
2015	6	2,694
2016	8	2,702
2017	6	3,423
2018	0	2,786
2019	0	2,768

Sumber: RAD Pangan & Gizi Kota Palopo

Berdasarkan indeks pangan komposit, posisi ketahanan dan kerentanan pangan Kota Palopo berada pada angka 0,32–0,48 yakni berada pada keadaan agak tahan. Melalui Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan Kota Palopo 2019, nampak bahwa terdapat beberapa kelurahan yang rentan terhadap kerawanan pangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah ini. Sementara itu, tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Perkembangan kualitas konsumsi pangan di Kota Palopo menunjukkan adanya peningkatan dengan skor PPH 72,22 gram/kapita/hari pada tahun 2018 menjadi 86,49 gram/kapita/hari pada tahun 2019.

Sedangkan untuk melihat gambaran Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Palopo Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 2.12.

Gambar 2.12
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Palopo (2019)

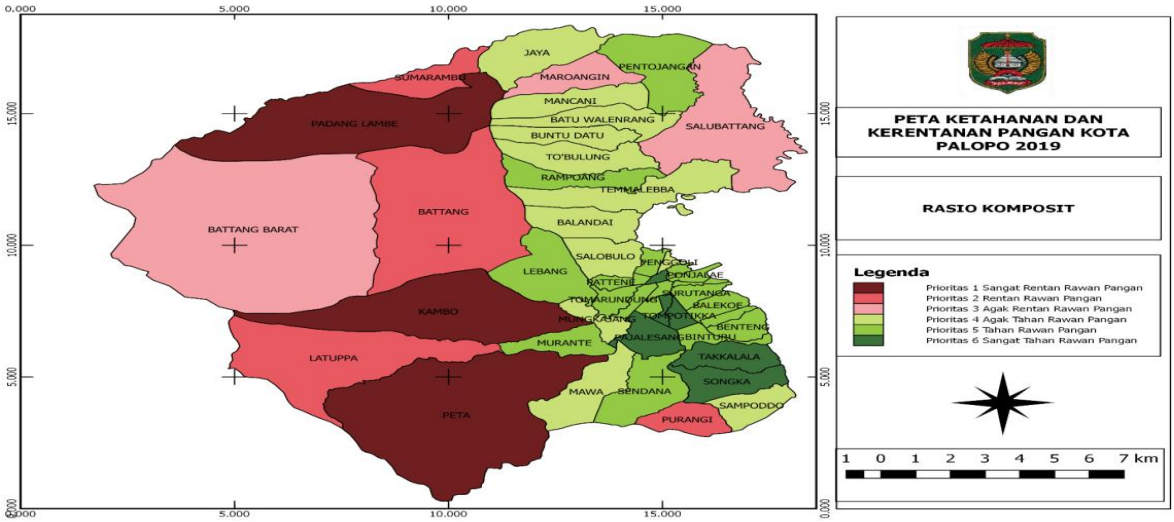

Sumber: RAD Pangan & Gizi Kota Palopo, 2019

2.5.4. Status Daya Dukung dan Ambang Batas Penyediaan Air Bersih

Kondisi penyediaan air minum di Kota Palopo hampir seluruh wilayah yang meliputi 48 (empat puluh delapan) kelurahan telah terlayani oleh jaringan air minum dari Pengolahan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo. Tercatat sampai tahun 2018 jumlah pelanggan air minum telah mencapai 33.879 pelanggan. Dimana kapasitas produksi air minum dari 5 (lima) Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) yang ada mampu memproduksi air minum sebesar 550 liter/detik.

Jika diasumsikan bahwa pelanggan tersebut adalah rumah tangga yang didalamnya masing-masing berpenghuni 5 orang (1 KK = 5 orang), maka secara keseluruhan cakupan

pelayanan jaringan air minum PAM Tirta Mangkaluku telah mengakses sebesar 93,10% atau sebanyak 169.395 jiwa penduduk Kota Palopo.

Diprediksi hingga tahun 2032, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk beserta aktifitasnya (± 313.766 jiwa), maka akan membutuhkan air minum minimum sebanyak 28.238 m3/hari atau dengan kapasitas produksi sebesar 327 lt/dtk untuk kebutuhan domestik (rumah tangga). Asumsi yang digunakan mengacu pada kriteria perencanaan Dirjen Cipta Karya, Dep. PU, dimana disebutkan bahwa untuk kota dengan kategori Sedang yang berpenduduk 100.000 jiwa s/d 500.000 jiwa konsumsi unit sambungan rumah (SR) adalah sebesar 90–120 liter/org/hari.

Asumsi-asumsi lainnya terkait dengan konsumsi air minum di kota/perkotaan adalah sebagai berikut:

1) Perdagangan dan jasa komersial, perkiraan komsumsi sebagai berikut :
   - Pasar = 12.000 liter/hektar/hari
   - Hotel = 150 liter/bed/hari
   - Rumah makan = 100 liter/tempat duduk/hari
2) Kesehatan, pendekatan perkiraan kebutuhan kegiatan ini dilandaskan pada kebutuhan untuk tiap tempat tidur. Kebutuhan untuk tiap tempat tidur menurut standar 400 liter/bed/hari;
3) Peribadatan; kebutuhan konsumsi air dikhususkan untuk kegiatan ummat Islam, dengan perkiraan 2% dari kebutuhan domestik;
4) Perkantoran, Pendidikan; 10% dari kebutuhan domestik;
5) Kepentingan umum 10% dari kebutuhan domestik.

Data Perkiraan Kebutuhan Air Minum di Kota Palopo sampai dengan Tahun 2032 dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25
Perkiraan Kebutuhan Air Minum di Kota Palopo Tahun 2032

No	Jenis Penggunaan	Jumlah Kebutuhan	
		M^3/Hari	Lt/Dt
1	Rumah Tangga	28.238	326,83
2	Perdagangan dan Jasa	304	3,52
3	Pendidikan	2.824	32,68
4	Kesehatan	288	3,33
5	Peribadatan	565	6,54
6	Perkantoran	2.824	32,68
7	Kepentingan Umum	2.824	32,68
Jumlah		**37.867**	**438,26**

Sumber: Laporan Revisi Dokumen RTRW Palopo, 2020

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut di atas, maka diperkirakan kebutuhan air minum di Kota Palopo hingga tahun 2032 terlihat pada tabel di bawah. Dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2032 nanti kebutuhan akan air minum di Kota Palopo sudah mampu dipenuhi. Karena kapasitas produksi air minum dari 5 (lima) IPAM yang ada milik PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo telah mampu memproduksi air minum sebesar 550 liter/detik.

Layanan air minum melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo relatif semakin baik. PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo (dahulu bernama PDAM Kota Palopo).

Sedangkan gambaran Jumlah Sambungan Rumah PAM Tirta Mangkaluku Palopo 2015-2019 di Kota Palopo dapat dilihat pada Grafik 2.5.

Grafik 2.5
Jumlah Sambungan Rumah PAM Tirta Mangkaluku Palopo 2015-2019

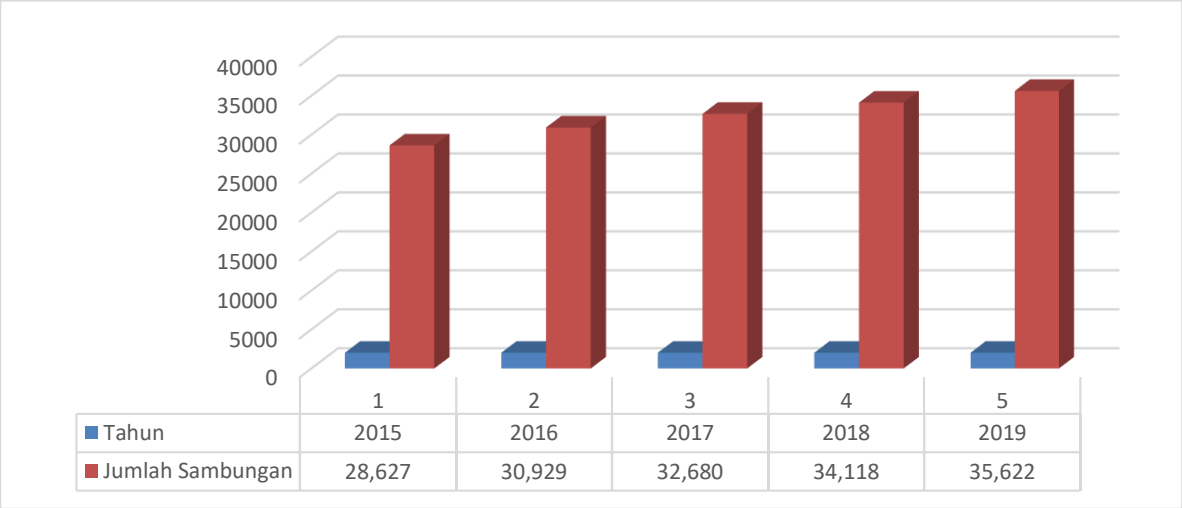

Sumber : Palopo Dalam Angka 2020

Kapasitas terpasang keseluruhan saat ini adalah sebesar 550 liter/detik dari 5 unit IPAM, yakni masing-masing sebagai berikut :

- IPAM I H. Abd. Madjid yang berlokasi di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang dengan kapasitas terpasang sebesar 350 liter/detik.
- IPAM II Magandang di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara dengan kapasitas terpasang sebesar 20 liter/detik.
- IPAM III Battang di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat dengan kapasitas terpasang sebesar 110 liter/detik.
- IPAM IV Mungkajang di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang dengan kapasitas terpasang sebesar 20 liter/detik.
- IPAM V Batupapan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Telluwanua dengan kapasitas terpasang sebesar 50 liter/detik.

Selengkapnya mengenai perkembangan dan kapasitas masing-masing IPAM tersebut seperti terlihat pada Tabel 2.26 berikut ini :

Tabel 2.26
Lokasi, Nama, dan Kapasitas Terpasang IPAM
PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo Tahun 2019

No	Nama IPAM	Kapasitas Terpasang
1	IPAM I H. Abd. Madjid di Kelurahan Murante Kec. Mungkajang	
	WTP 1	40 Liter/Detik
	WTP 2	100 Liter/Detik
	WTP 3	70 Liter/Detik
	WTP 4	50 Liter/Detik
	WTP 5	50 Liter/Detik
	WTP 6	20 Liter/Detik
	WTP 7	20 Liter/Detik
Jumlah		**350 Liter/Detik**
2	IPAM II Magandang di Kelurahan To'Bulung Kec. Bara	
	WTP 1	20 Liter/Detik
Jumlah		**20 Liter/Detik**
3	IPAM III Battang di Kelurahan Battang Kec. Wara Barat	
	WTP 1	50 Liter/Detik
	WTP 2	20 Liter/Detik
	WTP 3	20 Liter/Detik
	WTP 4	20 Liter/Detik
Jumlah		**110 Liter/Detik**

4	IPAM IV Mungkajang di Kelurahan Latuppa Kec. Mungkajang	
	WTP 1	20 Liter/Detik
Jumlah		**20 Liter/Detik**
5	IPAM V Batupapan Kelurahan Padang Lambe Kec. Telluwanua	
	WTP 1	50 Liter/Detik
Jumlah		**50 Liter/Detik**
Total Kapasitas Terpasang (KT)		**550 Liter/Detik**

Sumber: Laporan Revisi Dokumen RTRW Palopo, 2020

Walaupun dari segi daya dukung masih relatif aman, namun harus dipastikan bahwa kapasitas pasokan air baku tetap terjaga pada asumsi angka yang digunakan di atas. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang serius untuk menjaga sumber air baku PAM Tirta Mangkaluku agar produksinya tetap konsisten.

Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang terbaharui dan secara alamiah berada di dalam wilayah hidrografis yang disebut daerah aliran sungai yang mengikuti siklus hidrologis. Ketersediaan sumber daya air dalam setiap daerah aliran sungai sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan hidrogeologi setempat sehingga mengakibatkan adanya daerah aliran sungai dengan ketersediaan air yang melimpah dan daerah aliran sungai yang sangat kekurangan air.

Prasarana sumber daya air yang terdapat di wilayah Kota Palopo terdiri dari:

- **Daerah Aliran Sungai (DAS)**
  1. DAS Battang, sepanjang 221.130,490 meter dengan luas area cakupan 13.966,720 Ha, terdiri dari beberapa sungai (salu), yakni :
     - Salu Battang sepanjang 47.088,75 meter.
     - Salu Pangngala sepanjang 34.102,66 meter.
     - Salu Paredean sepanjang 36.911,88 meter.
     - Salu Patangke sepanjang 28.749,36 meter.
     - Salu Tandung sepanjang 39.874,48 meter.
     - Salu Tombang sepanjang 13.071,77 meter.
     - Salu Palangiran sepanjang 1.774,21 meter.
  2. DAS Pacangkuda sepanjang 45.593,69 meter dengan luas area cakupan 6.646,66 Ha, terdiri dari beberapa sungai (salu), yakni :
     - Salu Binturu sepanjang 3.597,76 meter.
     - Salu Songka sepanjang 1.382,78 meter.
     - Salu Tellue sepanjang 3.003,62 meter.
     - Salu Amassangang sepanjang 14.072,90 meter.
     - Salu Latuppa sepanjang 20.891,38 meter.
     - Salu Tabaro sepanjang 2.003,67 meter.
  3. DAS Songka Mati sepanjang 5.603,69 meter dengan luas area cakupan 155,09 Ha. yang terbentuk dari Salu Songka Mati.
  4. DAS Purangi sepanjang 1.759,20 meter dengan luas area cakupan 1.111,76 Ha. yang terbentuk dari Salu Pinang.
  5. DAS Boting sepanjang 41.712,37 meter dengan luas area cakupan 3.002,34 Ha, terdiri dari beberapa sungai (salu), yakni :
     - Salu Boting sepanjang 22.963,86 meter.
     - Salu Bulo sepanjang 5.544,88 meter.
  6. DAS Bua dengan luas area cakupan 1.168 Ha.
- **Daerah Irigasi (DI)**

Data tahun 2017 tercatat Daerah irigasi yang terdapat di wilayah Kota Palopo terdiri dari :

1. DI Padang Lambe sepanjang 1.079 meter.
2. DI Lappo sepanjang 114 meter.
3. DI Kaluku sepanjang 97 meter.
4. DI Sumarambu sepanjang 1.079 meter.
5. DI To'Punti sepanjang 208 meter.
6. DI Tomarundung 1 sepanjang 1.017 meter.
7. DI Tomarundung 2 sepanjang 739 meter.
8. DI Murante sepanjang 1.545 meter.
9. DI Mawa sepanjang 9.155 meter.

10. DI Lumandi sepanjang 555 meter.
11. DI Songka sepanjang 691 meter.
12. DI Purangi sepanjang 382 meter.
13. DI Sendana sepanjang 667 meter.
14. DI Batu Papan sepanjang 411 meter.
15. DI Batu Lotong sepanjang 212 meter.

- **Cekungan Air Tanah**

Cekungan air tanah merupakan suatu area dengan air yang berasal dari aliran permukaan. Cekungan air tanah merupakan salah satu contoh dari sistem geomorfologi.Sistem aliran air tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara alamiah cekungan air tanah dibatasi oleh batas hidrogeologi yang dikontrol oleh kondisi geologi dan atau hidrolika air tanah. Terkait dengan itu, di wilayah Kota Palopo terdapat Cekungan Air Tanah (CAT) yang berada di Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwanua seluas 2.634,71 Ha.

2.6. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.6.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.6.1.1. Pertumbuhan PDRB

Indikator ini menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan,menjadi dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan sektoral dan regional. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu. PDRB dibentuk melalui 17 lapangan usaha yang ada.

Adapun Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Palopo Tahun 2015-2019 dalam persentase dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Palopo Tahun 2015-2019 (%)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
PRIMER					
Pertanian, Kehutanan & Perkebunan	0,34	0,20	5,78	3,42	4.95
Pertambangan & Penggalian	4,66	5,54	4,76	2,55	1.73
SEKUNDER					
Industri Pengolahan	5,22	5,10	3,57	2,95	7.75
Listrik & Gas	-4,87	9,10	7,50	5,51	3.89
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah & Limbah dan Daur	0,38	3,75	6,66	8,05	4.56
TERSIER					
Bangunan/Konstruksi	4,97	7,21	6,32	5,41	6.10
Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil & Sepeda Motor)	12,21	11,21	10,36	9,15	10.05
Transportasi & Pergudangan	7,28	8,26	7,39	10,06	9.15
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7,15	8,45	7,36	7,27	7.93
Informasi & Komunikasi	7,82	10,25	11,56	13,26	10.63
Jasa Keuangan & Asuransi	7,40	14,92	0,30	1,67	-0.29
Real Estate	5,79	6,78	7,48	4,70	5.73
Jasa Perusahaan	4,10	4,74	7,88	9,23	9.94
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	6,42	(0,69)	5,36	16,75	3.27
Jasa Pendidikan	6,05	5,14	8,23	10,38	5.91
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	10,39	9,59	9,94	9,68	6.37
Jasa Lainnya	3,35	5,88	9,69	12,22	9.28
PDRB KOTA PALOPO	**6,45**	**6,98**	**7,17**	**7,52**	**6,75**

Sumber Data : Buku PDRB Kota Palopo Menurut Lapangan Usaha, 2015 - 2020

Untuk nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2015 - 2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel 2.28 sebagai berikut :

Tabel 2.28
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Palopo

Lapangan Usaha	2015		2016		2017		2018		2019	
	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%
PRIMER										
Pertanian, Kehutanan & Perkebunan	1.014.556,61	18,96	1.050.695,53	17,73	1,152,632.10	17.60%	1.232.239,19	16,91	1.301.470,00	16,37
Pertambangan & Penggalian	10.052,93	0,19	10.940,53	0,19	11,556.80	0.18%	12.159,36	0,17	12.390,00	0,16
SEKUNDER										
Industri Pengolahan	158,172,18	2,96	171.807,48	2,91	184,744.00	2.82%	197.013,76	2,70	216.260,00	2,72
Listrik & Gas	4.024,87	0,08	4.499,85	0,08	5,345.20	0.08%	5.812,45	0,08	6.050,00	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah & Limbah dan Daur	9.669,54	0,18	10.215,68	0,17	11,248.80	0.17%	12.499,25	0,17	13.550,00	0,17
TERSIER										
Bangunan/Konstruksi	826.601,61	15,45	933.701,03	15,76	1,046,984.50	15.98%	1.194.979,07	16,40	1.330.130,00	16,75
Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil & Sepeda Motor)	1.172.712,51	21,92	1.331.977,29	22,89	1,510,154.70	23.62%	1.723,393,30	23,66	1.938.860,00	24,41
Transportasi & Pergudangan	334.012,52	6,24	365.472,36	6,29	389,039.14	5.94%	432.448,23	5,94	475.890,00	5,99
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	63.278,44	1,25	71.797,13	1,31	78,800.25	1.20%	85.981,37	1,18	93.720,00	1,18
Informasi & Komunikasi	198.868,54	4,11	227.531,62	4,18	261,928.15	4.00%	301.913,78	4,14	335.270,00	4,22
Jasa Keuangan & Asuransi	434.404,30	8,22	509.957,72	8,66	535,106.86	8.17%	566.529,00	7,78	579.660,00	7,30
Real Estate	273.084,67	5,28	297.138,29	5,33	329,889.08	5.12%	358.341,68	4,92	384.060,00	4,84
Jasa Perusahaan	4.937,97	0,14	5.342,05	0,18	5,917.17	0.09%	6.718,57	0,09	7.520,00	0,09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	431.103,95	8,05	443.013,65	8,06	479,885.97	7.33%	580.053,81	7,96	616.970,00	7,77
Jasa Pendidikan	230.536,38	4,54	245.502,14	4,57	270,343.17	4.13%	309.438,31	4,25	342.260,00	4,31
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	119.642,55	2,24	135.142,78	2,29	153,715.00	2.35%	171.396,27	2,35	184.630,00	2,32
Jasa Lainnya	65.625,33	1,29	71.783,00	1,34	80,857.49	1.23%	94.224,94	1,29	103.820,00	1,31
PDRB KOTA PALOPO	**5.351.284,90**	**100**	**5.886.518,12**	**100**	**6,514.938,67**	**100**	**7.285.142,35**	**100**	**7.942.480,00**	**100**

Sumber Data : Buku PDRB Kota Palopo Menurut Lapangan Usaha, 2015 – 2019

Untuk nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2015 - 2019 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel 2.29 sebagai berikut :

Tabel 2.29
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2015-2019
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Palopo

Lapangan Usaha	2015		2016		2017		2018		2019	
	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%
PRIMER										
Pertanian, Kehutanan & Perkebunan	755.643,42	18,25	759.028,34	19,37	803.172,90	16.87%	830.610,04	16,28	871.740,00	16,00
Pertambangan & Penggalian	5.942,26	0,14	6.271,45	0,19	6,538.55	0.14%	6.705,03	0,13	6.820,000	0,13
SEKUNDER										
Industri Pengolahan	115.276,04	2,78	121.153,47	2,86	125,475.67	2.64%	129.178,07	2,53	139.200,000	2,56
Listrik & Gas	4.582,01	0,11	4.998,80	0,15	5,373.47	0.11%	5.669,65	0,11	5.890,000	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah & Limbah dan Daur	12.337,10	0,30	12.799,51	0,34	13,652.49	0.29%	14.752,18	0,29	15.420,000	0,28
TERSIER										
Bangunan/Konstruksi	609.159,05	14,71	654.707,96	15,77	696.639,09	14.63%	734.325,79	14,39	779.140,000	14,30
Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil & Sepeda Motor)	968.889,40	23,40	1.073.949,29	24,33	1.183.418,07	25.05%	1.291.727,37	25,31	1.421.610,000	26,10
Transportasi & Pergudangan	225.169,91	5,44	242.106,89	5,50	259,988.25	5.48%	286.149,20	5,61	312.340,000	5,73
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	47.878,36	1,16	51.926,44	1,25	55.748,04	1.17%	59.802,46	1,17	64.550,000	1,18
Informasi & Komunikasi	217.520,04	5,25	239.823,71	5,79	267.536,17	5.64%	303.015,60	5,94	335.220,000	6,15
Jasa Keuangan & Asuransi	326.916,03	7,89	375.792,00	8,48	376.911.25	7.94%	383.207,52	7,51	382.090,000	7,01
Real Estate	193.926,58	4,68	207.072,48	4,77	222,553.29	4.69%	233.019,45	4,57	246.380.000	4,52
Jasa Perusahaan	3.733,33	0,09	3.910,19	0,13	4.218,24	0.09%	4.607,67	0,09	5.070,000	0,09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	301.302,59	7,26	299.235,81	7,29	315,270.63	6.64%	368.085,50	7,21	380.140,000	6,97
Jasa Pendidikan	197.007,68	4,76	207.138,80	4,84	224,196.00	4.72%	247.464,13	4,85	262.100,000	4,81
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	103.715,47	2,51	113.661,00	2,57	124,964.33	2.63%	137.062,22	2,69	145.790,000	2,68

Lapangan Usaha	2015		2016		2017		2018		2019	
	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%
Jasa Lainnya	51.872,57	1,25	54.920,88	1,34	60,243.47	1.27%	67.605,31	1,32	73.880,000	1,36
PDRB KOTA PALOPO	4.140.871,84	100,00	4.428.497,.04	100	4.745.899,89	100.00%	5.102.987,20	100	5.447.360,000	100

Sumber Data : PDRB Kota Palopo Menurut Lapangan Usaha, 2015 – 2019

Pertumbuhan PDRB Kota Palopo 2019 yaitu sebesar 6,75, sedikit melambat dibandingkan tahun 2018 yang mencapai nilai 7,52 dan belum memenuhi target 2019 yaitu 7.14. Meski demikian, Pertumbuhan PDRB Kota Palopo 2019, masih berada diatas pertumbuhan PDRB nasional yaitu 5.02, pertumbuhan PDRB Kota Pare-Pare sebesar 6.65 dan Kabupaten Luwu sebesar yang hanya sebesar 6.26. Namun, pencapaian Kota Palopo ini belum lebih baik daripada Luwu Utara yang telah mencapai nilai 7.11 , Kota Makassar sebesar 8.79 dan pertumbuhan PDRB Sulsel yang sebesar 6.92.

2.6.1.2. Laju Inflasi

Merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikena dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi.

Gamabaran tentang Laju Inflasi Kota Palopo selama Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2015 - 2019 (%)

Uraian		Tahun			
	2015	2016	2017	2018	2019
Inflasi (%)	3,38	2,74	3,95	4,19	1,91

Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2020

Selama 5 (lima) terakhir , terjadi fluktuasi laju inflasi di Kota Palopo. Pada Tahun 2015 tingkat inflasi Kota Palopo sebesar 3,38 persen. Selanjutnya pada Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 2,74 persen. Akan tetapi pada Tahun 2017, kembali mengalami kenaikan menjadi 3,95 persen. Kenaikan laju inflasi ini masih berlanjut hingga Tahun 2018 menjadi 4,19 persen. Dan akhirnya menurun menjadi 1,91 persen pada Tahun 2019. Laju inflasi Kota Palopo tahun 2015 sampai tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 2. 29.

Capaian tingkat inflasi Kota Palopo tahun 2019 ini telah berada di bawah capaian inflasi nasional pada angka 2,48 persen. Tingkat inflasi di Kota Palopo pada tahun 2019 juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di Provinsi Sulsel yang berada pada angka 2,35 persen.

2.6.1.3. PDRB Perkapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum.Semakin besar angka PDRB per kapita, semakin sejahtera penduduk suatu wilayah.

Dengan mengeqivalenkan PDRB per kapita dengan ukuran pendapatan di suatu wilayah, dan upaya pemerintah menjadikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi riil yang menjadi pembentuk nilai PDRB, maka diharapkan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat di Kota Palopo merupakan salah satu dampak dari hasil dan keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tertentu.

PDRB Per Kapita Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 diuraikan dalam Tabel 2.31.

Tabel 2.31
PDRB Per Kapita Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	5,351,284.90	5,886,518.12	6,514,938.67	7,285,142.35	7.942.480,00
Jumlah Penduduk (Jiwa)	168,894	172,916	176,907	180,678	184,614
PDRB Perkapita (Juta)	**27,38**	**28,70**	**34,80**	**40,03**	**43,02**

Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa Angka PDRB per Kapita Kota Palopo tahun 2019 sebesar 43.02 Juta/Tahun. Ini lebih baik dari tahun 2018 yang berada pada angka 40.03 Juta/Tahun. Bahkan juga melampaui target daerah 2019 yang berada pada angka 37.1 Juta/Tahun. Bahkan juga telah melampaui target akhir RPJMD pada tahun 2023, yang berada pada angka 37.8 Juta/Tahun. Angka PDRB per Kapita Kota Palopo 2019 lebih tinggi/meningkat sebanyak 2.99 Juta/Tahun, dibandingkan tahun 2018.

Jika dikomparasikan dengan daerah/kota Lain di Sulawesi Selatan, PDRB per Kapita Kota Palopo 2019, lebih baik/lebih tinggi dari Kabupaten Luwu Utara (41.70 Juta/Tahun), tetapi belum lebih baik/lebih tinggi dari Kabupaten Luwu (43.25 Juta/Tahun), Luwu Timur (70.06 Juta/Tahun), Kota Pare-Pare (49.80 Juta/Tahun), Kota Makassar (116.87 Juta/Tahun). Pada level regional dan nasional, PDRB per Kapita Kota Palopo juga masih jauh dibawah rata-rata PDRB per Kapita Sulsel 2019 (57.03 Juta/Tahun), dan nasional (59.1 Juta/Tahun).

2.6.1.4. Indeks Gini

Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Gambaran tentang Gini Ratio Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Gini Ratio Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Gini Ratio	0,43	0,37	0,34	0,34	0,34

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, 2020

Kondisi gini rasio (GR) Kota Palopo 2019 0.34 (kategori sedang) dan belum memenuhi target daerah 2019 yang berada pada angka 0.32. Meski demikian capaian 2019 ini masih lebih baik dari GR rata-rata Sulsel 2019 0.389 point, Kota Makassar (0. 390) dan Kota Pare-Pare (0.350) dan nasional 2019 (0.382 per Maret).

Gini rasio Kota Palopo tahun 2015 (0.43) masih berada di atas gini rasio Sulsel yang berada pada angka 0,4 dan nasional 0,41. Tahun 2016, gini rasio Palopo (0.37) berada dibawah gini rasio Sulsel yang berada pada angka 0,4 dan nasional pada angka 0,41. Kemudian pada tahun 2017 sampai 2019 gini rasio Palopo (0.34), juga berada dibawah gini rasio Sulsel yang berada pada angka 0,42 dan nasional pada angka 0,39.

Nilai Indeks Gini di Kota Palopo menunjukkan tren yang relatif menurun dari tahun 2017-2019. Pada tahun 2017 Indeks Gini Kota Palopo berada pada nilai 0,34, kemudian di tahun 2018 tetap menjadi 0,34 dan di tahun 2019 Indeks Gini Kota Palopo tetap berada di nilai 0,34. Kondisi ini menunjukan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Kota Palopo selama tahun 2017-2019 tidak mengalami perubahan, yang artinya terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran masyarakat di Kota Palopo.

2.6.1.5. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sementara garis kemiskinan sendiri merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Berikut adalah data kondisi kemiskinan Kota Palopo 2015-2019 yang dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33
Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14.510	15.020	15.440	14.270	14.370
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,58	8,74	8,78	7,62	7,90
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	261.056	274.319	228.881	292.602	324.233
Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan (%)	**91,42**	**91,26**	**91,22**	**92,36**	**92,10**

Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2019, jumlah penduduk miskin Kota Palopo meningkat dibanding tahun 2018. Salah satu penyebab meningkatnya penduduk miskin adalah tingginya tingkat pengangguran dan urbanisasi penduduk dimana Kota Palopo yang menjadi destinasi para pencari kerja di wilayah Luwu Raya. Persentase penduduk miskin Kota Palopo pada tahun 2019 ini masih berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan yang tahun 2019 yang berada pada angka 7,90% dan dibawah persentase penduduk miskin nasional yang berada pada angka 9,41%.

Dibandingkan dengan 24 kabupaten/ kota Lain di Sulawesi Selatan, Persentase Penduduk Miskin 2019 Kota Palopo **masih lebih baik** daripada Kabupaten Luwu Utara (13.6%) dan Kabupaten Luwu (12.78%). Bahkan lebih baik dari rata-rata persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan 2019 (8.69%) dan nasional (9.4%). Meski demikian, capaian Pemerintah Kota Palopo ini masih dibawah capaian persentase penduduk miskin Kota Pare-Pare 2019 (5.26%), Kota Makassar (4.28%), bahkan kabupaten luwu timur yang 2019 hanya memiliki 6.98% penduduk miskin.

Namun dari sisi **jumlah,** Kota Palopo adalah wilayah di Luwu Raya dengan Jumlah Penduduk Miskin **paling sedikit**. Tahun 2019 Kota Palopo hanya memiliki penduduk miskin sebanyak 14.370 jiwa. Sementara Kabupaten Luwu (46.180 Jiwa), Luwu Utara (42.480 Jiwa), Luwu Timur (20.830 Jiwa). Bahkan dengan Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk miskin jauh diatas Kota Palopo, yakni sebanyak 65.120 Jiwa. Di Sulawesi Selatan, hanya Kota Pare-Pare yang memiliki penduduk miskin paling kecil (7620 Jiwa) disusul Kota Palopo (14.370 Jiwa).

2.6.1.6. Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari

Indikator ini mengindikasi bahwa persentase penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah $1 (PPP) per hari termasuk kategori miskin. Indikator ini disepakati menunjukkan status seseorang miskin dan bermanfaat untuk memonitor kemajuan upaya pengentasan kemiskinan setiap negara termasuk Indonesia.

Adapun data Persentase Pendapatan Penduduk Kurang dari USD.1,00 PPP di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34
Persentase Pendapatan Penduduk Kurang dari USD.1,00 PPP
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

URAIAN	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin dengan pendapatan di bawah $ 1 PPP	14.510	15.020	15.440	14.270	14.370
Jumlah Penduduk	168.894	172.916	176.907	187.236	181.949
Proporsi Penduduk Dengan Pendapatan Kurang dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari	**8,59%**	**8,69%**	**8,72%**	**7,62%**	**7,90%**

Sumber Data : BPS Kota Palopo Tahun 2020

2.6.1.7. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Tabel 2.35 digambarkan data perkembangan PAD Kota Palopo 2015-2019.

Tabel 2.35
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah
Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Pendaptan Asli Daerah	Rupiah	92.277.783.805,00	134.110.076.220,35	167.307.131.609,15	139.282.846.484,07	165.664.354.780,08
b	Total Pendapatan Daerah	Rupiah	854.330.445.704,26	1.004.346.574.517,06	934.121.533.937,22	964.783.951.705,73	984.500.257.290,51
c	**Persentase PAD terhadap Pendapatan**	**Persen**	**10,80**	**13,35**	**17,91**	**14,44**	**16,83**

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo (Perda APBD TA 2020)

Data di atas menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir, Kota Palopo mengalami fluktuasi besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2015 – 2017, PAD Kota Palopo mengalami peningkatan sekitar 3%, tetapi kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 sekitar 3% pula. Akan tetapi pada tahun 2019, PAD Kota Palopo mengalami peningkatan kembali dari 14,44% meningkat menjadi dari 16,83%. Ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan Kota Palopo ditunjang atau lebih banyak berasal dari dana dana pemerintah pusat seperti bagi hasil atau DAU. Sehingga kemandirian fiskal sebagai sebuah daerah otonom masih sangat rendah sebab masih sangat tergantung pada keuangan dari pemerintah pusat.

Angka pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa dari 854 Milyar Pendapatan Daerah Kota Palopo pada tahun 2015, hanya 92 Milyar yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Kondisinya kemudian meningkat pada tahun 2019, dimana dari 984 Milyar Pendapatan Daerah, sebanyak 165 Milyar berasal dari PAD Kota Palopo.

2.6.1.8. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pemerintah Kota Palopo selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak Tahun 2015 hingga 2019 telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2015 -2019 dapat dilihat perkembangannya pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Predikat Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo (Perda APBD TA 2020)

2.6.1.9. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikator kualitas konsumsi pangan oleh masyarakat. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

Dengan mengetahui skor PPH, pemerintah bisa menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan kemudian merencanakan strategi apa yang bisa dilaksanakan untuk memperbaiki konsumsi dan ketersediaan pangan. Semakin tinggi persentase indikator ini, semakin baik kualitas konsumsi pangan oleh amsyarakat.

Adapun data Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kota Palopo Tahun 2015 -2019 dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Skor Pola Pangan Harapan Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Uraian	Standar	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	**Angka Kecukupan Gizi /AKG(%)**						
	Padi	25.0	22,18	22,50	22,90	29,50	27,50
	Umbi	2.5	1,06	1,17	1,28	1,70	1,90
	Pangan Hewani	24,0	19,69	21,60	21,98	31,50	27,10
	Minyak dan Lemak	5,00	4,17	4,05	4,31	7,20	4,20
	Buah/Biji Berminyak	1,00	0,44	0,27	0,73	0,60	0,50
	Kacangan	10,00	3,28	3,69	4,12	5,30	7,00
	Gula	2,50	2,04	0,72	0,73	0,90	0,90
	Sayur Buah	30,0	25,81	27,00	27,48	39,80	29,20
	Lain	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Bobot masing-masing kelompok pangan**						
	Padi	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Umbi	2,50	1,20	1,30	1,40	1,70	1,80
	Pangan Hewani	24,0	22,2	24,0	24,0	24,0	24,0
	Minyak dan Lemak	5,00	4,70	4,50	4,70	5,00	4.20
	Buah/Biji Berminyak	1,00	0,50	0,30	0,80	0,60	0,50
	Kacangan	10,00	3,70	4,10	4,50	5,30	7,00
	Gula	2,50	2,30	0,80	0,80	0,90	0,90
	Sayur Buah	30,0	29,10	30,00	30,00	30,00	29,20
	Lain	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Skor Pola Pangan Harapan**	**100,00**	**88,70%**	**90,00%**	**91,60%**	**92,50%**	**92,60%**

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo, 2020

Tabel di atas menunjukkan adanya perbaikan kualitas konsumsi pangan oleh masyarakat Kota Palopo sejak 2015-2019. Jika pada tahun 2015 hanya pada angka 88,70, maka pada tahun 2019 mencapai angka 92,60. Ini menggambarkan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kota Palopo semakin memperhatikan aspek keberimbangan gizi, keamanan pangan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat yang semakin beragam.

2.6.1.10. Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam. Tabel 2.38 adalah kondisi cadangan Pangan Kota Palopo 2015-2019.

Tabel 2.38
Penguatan Cadangan Pangan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Cadangan pangan Kota Palopo (Ton)	663	689	691	1.019,6	1.041,5
2	Koefisien 100 Ton (Ton)	100	100	100	100	100
3	**Persentase Penguatan cadangan pangan Kota Palopo (%)**	**66,3**	**68,9**	**69,1**	**101,96**	**104,15**

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa cadangan pangan utama Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 terus menguat. Jika pada tahun 2015 berada pada angka 66,3%, tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 104,15%.

2.6.1.11. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kerawanan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk.

Secara teknis dari sisi waktu kejadiannya, kerawanan pangan dibagi menjadi 2 bagian yaitu : "Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis". Kerawanan Pangan Transien adalah : suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan karena bencana baik yang disebabkan karena alam (misalnya gempa bumi, angin kencang, kekeringan dll) maupun yang disebabkan karena perbuatan manusia (misalnya banjir ataupun konflik sosial, dll).

Kerawanan Pangan Kronis adalah suatu kondisi ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, aset produksi dan kekurangan pendapatan.

Data tentang Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Palopo Tahun 2015 -2019 dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39
Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Palopo Tahun 2015 -2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penanganan daerah rawan pangan (Skor atau Nilai)	Data Tidak Tersedia	0.32 - 0.48	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
Predikat	Data Tidak Tersedia	Agak Tahan	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2020

Sesuai data Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo, tidak ada satupun kelurahan atau spot wilayah yang berstatus daerah rawan pangan.

2.6.1.12. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Indikator ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana pertumbuhan ekonomi sebuah daerah dipengaruhi oleh sektor atau lapangan usaha pertanian/perkebunan. Untuk menghitungnya dibutuhkan angka jumlah kontribusi sektor terhadap jumlah PDRB daerah tahun berkenaan.

Uraian tentang Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 -2019 dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan	Juta	1.014.556,61	1.050.695,53	1.155.961,46	1.232.239,19	1.301.470,00
2	Jumlah PDRB	Juta	5.351.284,90	5.886.518,12	6.514.938,67	7.285.142,35	7.942,480,00
3	**Persentase (1/2 x 100%)**	**%**	**18,96**	**17,85**	**17,74**	**16,91**	**16,39**

Sumber Data : Buku PDRB Kota Palopo, 2020

2.6.1.13. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Tanaman palawija adalah jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Indikator ini untuk melihat sejauh mana kontribusi tanaman palawija terhadap PDRB Kota Palopo.

Data tentang Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kontribusi sektor pertanian (palawija)	Juta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah kontribusi PDRB sektor pertanian/perkebunan	Juta	1.014.556,61	1.050.695,53	1.155.961,46	1.232.239,19	1.301.470,00
3	**Persentase (1/2 x 100%)**	**%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber Data : Buku PDRB Kota Palopo, 2020

2.6.1.14. Produksi Sektor Pertanian

Produksi sektor pertanian merupakan capaian kinerja atas produksi komoditas bahan pangan utama di Kota Palopo yang terdiri dari padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar serta sagu.

Data Produksi Sektor Pertanian Kota Palopo Tahun 2015 -2019 diuraikan pada Tabel 2.42 berikut ini.

Tabel 2.42
Produksi Sektor Pertanian Kota Palopo Tahun 2015 -2019

Uraian	Tahun				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Jumlah produksi komoditas pertanian/peternakan (ton/tahun)					
Padi	28.631,00	30.167,00	32.444,00	32.664,00	20.355,70
Jagung	4.737,00	6.303,00	5.086,00	3.722,00	7.493,00
Ubi Kayu	177,00	70,40	70,00	141,00	-
Ubi jalar	13,00	18,94	4,55	1,12	-
Sagu	51,33	33,04	15,59	1,67	2,23
Daging Ruminansia	306,06	232,94	247,48	249,50	601,82
Daging Sapi	284,00	232,24	247,16	222,80	596,87
Daging Kerbau	22,06	0,70	0,32	0,10	1,03
Daging Kambing	-	-	-	-	3,92
Daging Unggas	2.185,40	3.085,93	3.028,82	3.968,92	3.803,16
Daging Ayam Kampung	133,81	143,72	145,01	148,40	123,77
Daging Ayam Ras	2.043,39	2.934,04	2.875,36	-	3.666,04

Pedaging					
Daging Itik/Bebek	8,20	8,17	8,45	8,70	13,36
Telur	666,85	2.063,90	1.778,18	2.065,87	1.422,30
Ayam Buras	563,08	1.999,48	1.590,19	-	1.222,38
Ayam Ras	14,54	-	45,00	-	86,87
Itik/Angsa/Entog	89,23	64,42	142,99	-	113,08
Nilai (Juta)	**12.040,57**	**27.454,47**	**78.511,00**	**43.194,08**	**39.505,53**

Sumber Data : Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan Kota Palopo, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa produksi komoditas pertanian seperti padi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Berbeda halnya dengan jagung yang produksinya fluktuatif. Produksi komoditas peternakan seperti daging dan telur juga terus mengalami peningkatan produksi secara siginikan.

2.6.1.15. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Tanaman keras adalah istilah pertanian yang merujuk pada kelompok tanaman perkebunan yang sifatnya tahunan atau prenial. Misalnya kopi dan cengkeh dan kakao.

Data Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 -2019 dapat dilihat pada Tabel 2.43 berikut ini.

Tabel 2.43
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kontribusi perkebunan (tanaman keras)	Juta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	Juta	1.014.556,61	1.050.695,53	1.155.961,46	1.232.239,19	1.301.470,00
	Persentase (1/2 x 100%)	**%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber Data : Palopo Dalam Angka Kota Palopo Tahun 2020

2.6.1.16. Produksi Sektor Perkebunan

Produksi sektor perkebunan merupakan capaian kinerja atas produksi komoditas perkebunan yang diusahakan di Kota Palopo. Gambaran tentang data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.44 berikut ini.

Tabel 2.44
Produksi Sektor Perkebunan Kota Palopo Tahun 2015 -2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah produksi komoditas perkebunan / ton					
Kelapa Dalam	55,82	49,67	31,92	37,17	17,70
Kopi Robusta	66,85	66,07	66,26	25,99	50,96
Kopi Arabika	0,61	0,05	0,01	0.00	0,00
Cengkeh	81,77	110,36	127,99	0,00	74,00
Kakao	1.546,48	1.240,17	1.411,83	820,84	1.297,40
Nilai (Juta)	**1.851,24**	**1.350,52**	**1.638,01**	**884,00**	**1.440,06**

Sumber Data : Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan Kota Palopo, 2020

Tabel diatas menggambarkan bahwa produksi komoditas perkebunan seperti kakao di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Produksi tertinggi komoditas ini terjadi pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa komoditi ini mengalami peningkatan produksi kembali, setelah tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan yang cukup signifikan.

2.6.1.17. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Adalah persentase antara Jumlah Produksi Padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani dibagi jumlah produksi Padi/bahan pangan utama. Data tersebut diuraikan dalam Tabel 2.45 berikut ini.

Tabel 2.45
Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah produksi Padi/bahan pangan utama local hasil kelompok petani (ton) tahun n	Ton	33.608	36.592	37.620	38.289	20.888,32
2.	Jumlah produksi Padi/bahan pangan utama di daerah (ton) tahun n						
	Padi	Ton	28.630	30.167	32.444	33.259	20.324
	Jagung	Ton	4.737	6.303	5.086	4.988	1.111
	Ubi Kayu	Ton	177	70,4	70	39,20	n/a
	Ubi Jalar	Ton	13	18,94	4,55	1,12	n/a
	Sagu	Ton	51,33	33,04	15,59	1,67	n/a
3	**Persentase (1/2 x 100%)**	**%**					
	Padi	**%**	74,97%	85,19%	82,44%	86,25%	
	Jagung	**%**	23,24%	14,09%	17,22%	13,52%	
	Ubi Kayu	**%**	1,11%	0,53%	0,19%	0,19%	
	Ubi Jalar	**%**	0,40%	0,04%	0,05%	0,01%	
	Sagu	**%**	0,28%	0,15%	0,09%	0,04%	

Sumber Data : Buku PDRB Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

2.6.1.18. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Data Kontribusi sektor kehutanan hanya disajikan sampai dengan tahun 2016, sebab sejak tahun 2017 kewenangannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Uraian tentang tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.46 berikut ini.

Tabel 2.46
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutanan	Milyar	214,20	199,20	Pindah kewenangan	Pindah kewenangan	Pindah kewenangan
b	Jumlah PDRB	Juta	5.351.284,90	5.906.480,42	Pindah kewenangan	Pindah kewenangan	Pindah kewenangan
c	**Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB**	**%**	**0,01**	**0,05**	Pindah kewenangan	Pindah kewenangan	Pindah kewenangan

Sumber Data : Buku PDRB Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

2.6.1.19. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kota Palopo sedikit sekali mengalami perubahan selama periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2015 – 2019. Pada tahun 2015 yaitu 0,19 persen, tahun 2016 tetap pada angka 0,19 persen, sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 0,18 persen dan tahun 2018 tetap turun menjadi 0,17 persen. Walaupun sektor pertambangan bukan menjadi sektor unggulan namun kontribusinya terhadap PDRB diharapkan bisa lebih ditingkatkan. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.47 berikut ini.

Tabel 2.47
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah Kontribusi PDRB dari	Juta	10.052,93	10.940,53	11.556,77	12.159,36	12,390,00

	Sektor Pertambangan						
b	Jumlah PDRB	Juta	5.351.284,90	5.886.518,122	6.514.938,67	7.285.142,35	7.285.142,35
c	**Persentase**	**%**	**0,19**	**0,19**	**0,18**	**0,17**	**0.17**

Sumber Data : Buku PDRB Kota Palopo Tahun 2015 – 2020

2.6.1.20. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja pembangunan di bidang kepariwisataan daerah mampu mengakselerasi pariwisata di Kota Palopo. Beberapa komponen yang biasanya digunakan dalam perhitungan ini adalah investasi di bidang hotel, jumlah wisatawan asing dan lama mereka tinggal. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.48 berikut ini.

Tabel 2.48
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata	Juta	63,278.4	71,797.1	78.800,25	85.981,37	82.100,00
b	Jumlah PDRB	Juta	5.351.284,90	5.906.480.42	6,550,688.67	7,285,142,35	7,942,480
c	**Persentase**	**%**	**1.18**	**1.22**	**1.20**	**1.18**	**1,03**

Sumber Data : PDRB Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

2.6.1.21. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja pembangunan di bidang perikanan daerah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Data tersebut diuraikan pada Tabel 2.49 berikut ini.

Tabel 2.49
Kontribusi Sektor Kelautan & Perikanan Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor kelautan dan Perikanan	Juta	1,014.56	1,050.70	1.155,96	1.232,24	1.301,47
b	Jumlah PDRB	Juta	5.351.284,90	5.906.480.42	6,550,688.67	7,285,142,35	7,942,480
c	**Persentase**	**%**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**

Sumber Data : PDRB Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

2.6.1.22. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja pembangunan di bidang perdagangan daerah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Data tersebut diuraikan pada Tabel 2.50 berikut ini.

Tabel 2.50
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	Juta	1.172.712,51	1.331.977,29	1.510.154,70	1.723.393,30	1.938.860,00
b	Jumlah PDRB	Juta	5.351.284,90	5.906.480.42	6,550,688.67	7,285,142,35	7,942,480
c	**Persentase**	**%**	**21,91**	**22,55**	**23,05**	**23,66**	**24,41**

Sumber Data : PDRB Kota Palopo 2015 – 2019

2.6.1.23. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja pembangunan di bidang perindustrian daerah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.51 berikut ini.

Tabel 2.51
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri	Juta	158.172,18	171.807,48	184.743,96	197.013,76	216.260,00
b	Jumlah PDRB	Juta	5.351.284,90	5.906.480.42	6,550,688.67	7,285,142,35	7,942,480
c	**Persentase**	**%**	**2,96**	**2,91**	**2,82**	**2,70**	**2,72**

Sumber Data : PDRB Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Data diatas menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo dari tahun ke tahun justru menurun. Ini menjadi persoalan mendasar mengingat Palopo sejatinya adalah sebuah Kota yang dipersiapkan menjadi Kota jasa dan perdagangan termasuk peningkatan kontribusi sektor industri yang berbasis rumah tangga.

Pada tahun 2015, kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Palopo pada angka 2,96%, namun 2019 justru menurun menjadi 2,72%. Meski menurun, secara persentase nilai kontribusi sektor indsutri terhadap PDRB Kota Palopo tetap meningkat. Jika 2015 pada angka 158.172,18 Juta/Tahun, sedangkan pada tahun 2019 menjadi 216.260,Juta/Tahun.

2.6.1.24. Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kontribusi konsumsi rumah tangga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.52 berikut ini.

Tabel 2.52
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri Rumah Tangga	Juta	n/a	n/a	78.066.036.000	80.578.984.000	n/a
b	Jumlah PDRB	Juta	5.351.284,9	5.906.480.4	6,550,688.67	7,285,142,35	7,942,48

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
			0	2			0
c	Persentase	%					

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Data PDRB Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

2.6.1.25. Pertumbuhan Industri

Data Persentase Pertumbuhan Industri Kota Palopo Tahun 2015 -2019 dapat dilihat pada Tabel 2.53 berikut ini.

Tabel 2.53
Persentase Pertumbuhan Industri Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah industri tahun n – Jumlah industri tahun (n-1)**)	Buah	183	11	135	210	232
b	Jumlah industri sampai tahun n	Buah	599	610	745	955	1.187
	Persentase	**%**	**43,99**	**1,84**	**22,13**	**21,99**	**19,55**

Sumber Data : Dinas Perindustrian Kota Palopo Tahun 2020

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah industri di Kota Palopo sepanjang 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2015 ada 183 industri baru (43,99%), sedangkan pada tahun 2016 hanya ada 11 industri baru (1,84%), tahun 2017 meningkat menjadi 135 industri baru (22,13%), tahun 2018 meningkat menjadi 210 industri baru (21,99%), dan pada tahun 2019 terjadi penambahan industri baru lagi menjadi 232 industri (19,55%).

2.6.1.26. Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja pembangunan di bidang transmigrasi daerah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.54 berikut ini.

Tabel 2.54
Kontribusi Sektor Transmigrasi Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Transmigrasi	Juta	0	0	0	0	0
b	Jumlah PDRB	Juta	5.351.284,90	5.906.480.42	6,550,688.67	7,285,142,35	7,942,480
c	**Persentase**	**%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber Data : RKPD Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Kontribusi transmigrasi terhadap kondisi perekonomian Kota Palopo sampai tahun 2019 belum dapat diukur. Sebab sampai dengan tahun pertengahan tahun 2020, untuk pembangunan daerah transmigrasi di Kecamatan Sendana, Kelurahan Peta, Kota Palopo masih pada tahap penyusunan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT).

2.6.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.6.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Adalah Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. IPM Merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). - IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. - Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu: 1. Kelompok "Sangat Tinggi": IPM ≥ 80 2. Kelompok "Tinggi": 70 ≤ IPM ≤ 80 3. Kelompok "Sedang": 60 ≤ IPM ≤ 70 4. Kelompok "Rendah": IPM < 60 Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Data Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo Tahun 2015–2019 dapat dilihat pada Tabel 2.55 berikut ini.

Tabel 2.55
Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo
Tahun 2015–2019

No	Tahun	IPM
1	2015	76,27
2	2016	76,45
3	2017	76,71
4	2018	77,30
5	2019	77,98

Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2020

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa selama periode 2015- 2019 angka IPM Kota Palopo mengalami peningkatan sebesar 1,71 point, dengan rata-rata peningkatan 0,34 point. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2018 ke tahun 2019, yaitu mengalami peningkatan sebesar 0,68 point.

Nilai IPM Kota Palopo sejak tahun 2017 ini berhasil menggeser Kota Pare-Pare sebagai daerah ber IPM tertinggi kedua di Sulawesi Selatan dan menempatkan palopo sebagai kota dengan IPM tertinggi setelah Kota Makssar. Pada tahun sebelumnya Palopo selalu berada dibawah nilai capaian IPM Kota Pare-Pare.

2.6.2.2. Angka Melek Huruf (AMH)

Indikator pendidikan yang mempresentasikan dimensi pengetahuan adalah angka melek huruf. Indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia. Indikator melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama didaerah dimana jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat sekolah dasar, menunjukkan kemampuan penduduk disuatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Data Angka Melek Huruf (AMH) Kota Palopo Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.56 berikut ini.

Tabel 2.56
Angka Melek Huruf Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Melek Huruf Kota Palopo	98,22	96,07	98,02	97,71	98,4

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2020

Data diatas menunjukkan, bahwa pada tahun 2015, jumlah penduduk Kota Palopo yang buta huruf masih tersisa sebanyak 1,78%, sebab ada sebanyak 98,22% penduduk yang melek huruf. Sedangkan Pada tahun 2019, besaran penduduk yang melek huruf mencapai 98.4% yang artinya besaran penduduk yang masih buta huruf adalah 1.6%. Tabel ini juga menunjukka bahwa AMH Kota Palopo lebih tinggi daripada Provinsi Sulawesi Selatan.

2.6.2.3. Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partsipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Perkembangan Rata-rata Lama sekolah Kota Palopo 2015-2019 diuraikan dalam Tabel 2.57 sebagai berikut :

Tabel 2.57
Rata-rata Lama sekolah Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata Lama Sekolah Palopo	10,25	10,26	10,33	10,51	10,75
2	Rata-rata Lama Sekolah Sulsel	7,64	7,75	7,95	8,02	8,26

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo & RKPD Sulsel 2020

Rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Palopo tahun 2017 masih lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata lama sekolah sulsel tahun 2017 yang berada pada angka 7,95 Tahun. Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2017, rata-rata lama bersekolah penduduk Kota Palopo 10,33 tahun, lebih lama dibandingkan tahun 2016, dan tahun 2019 rata-rata lama sekolah penduduk Kota Palopo 10,75 tahun.

2.6.2.4. Angka Harapan Hidup

Adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Kegunaan AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka usia harapan hidup masyarakat.

Perkembangan angka usia harapan hidup masyarakat Kota Palopo 2015-2019 disajikan dalam Tabel 2.58 berikut ini.

Tabel 2.58
Angka Usia Harapan Hidup Kota Palopo Tahun 2015– 2019

Angka Usia Harapan Hidup				
2015	2016	2017	2018	2019
70,3	70,25	70,3	70,49	70,79

SumberData : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Angka atau umur harapan hidup (AHH) di Kota Palopo tahun 2019 sebesar 70,79 Tahun. Ini lebih baik dari angka harapan hidup tahun 2018 yang berada pada angka 70,49 Tahun atau menguat 0,30 Point.

AHH Kota Palopo Tahun 2015 hanya berada pada angka 70,30, kemudian naik menjadi 70,25 (2016), 70,30 di 2017, setahun kemudian menjadi 70,49 (2018), 70,79 pada tahun (2019). Akselerasi atau lompatan tertinggi AHH Kota Palopo terjadi pada tahun 2018 dimana mampu mencapai 70,49 atau meningkat 0,19 point dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, trend peningkatan AHH Kota Palopo hanya meningkat antara 0,02 – 0,08 point.

Jika dibandingkan dengan 24 kabupaten/ kota Lain di Sulawesi Selatan, AHH 2019 Kota Palopo menempati posisi ke enam, dibawah Kabupaten Toraja Utara (73,35), Tana Toraja (73,15), Kota Makassar (72,00), Kota Pare-Pare (71,18), Kabupaten Enrekang (70,83). AHH Kota Palopo 2019, juga masih berada diatas rata-rata AHH Sulsel 2019 (70,43 Tahun), dan rata-rata AHH nasional 2019 (71,34 Tahun).

Angka Harapan Hidup Kota Palopo 2019, masih menjadi yang paling tinggi di luwu raya, dimana Angka Harapan Hidup beberapa kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Palopo, memiliki AHH yang masih di bawah capaian Kota Palopo. Kabupaten Luwu berada pada angka 70,19 Tahun, Luwu Timur 70,38 Tahun, dan Luwu Utara 68,31 Tahun.

2.6.2.5. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh.

Dalam istilah medis Gizi Buruk disebut sebagai Malnutrisi Energi Protein (MEP) Berat, MEP itu sendiri ada dua macam yaitu MEP ringan dan berat. Pada MEP ringan disebut juga sebagai gizi kurang, belum menunjukkan gejala klinis yang khas, anak yang mengalami gizi kurang hanya terlihat kurus dan gangguan pertumbuhan. Sedangkan MEP berat atau gizi buruk, anak sudah memiliki gejala-gejala klinis yang khas beserta gangguan biokimiawi dalam tubuh.

Data Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.59 berikut ini.

Tabel 2.59
Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jml Balita Gizi Buruk	Jiwa	11	3	4	2	0
b.	Jumlah Balita	Jiwa	17.304	16.177	16.963	17.826	18.002
c	**Persentase Balita Gizi Buruk**	**%**	**0,06**	**0,02**	**0,02**	**0,01**	**0**
d	**Balita Gizi Buruk per 10.000 balita**	Rasio	**6**	**2**	**2**	**1**	**0**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase balita gizi buruk di Kota Palopo 2015-2019 sangat rendah. Setiap tahun jumlah balita gizi buruk menurun. Dari 10.000 jumlah balita yang lahir pada tahun 2015 terdapat 11 kasus, dan tahun 2019 menurun menjadi 0 kasus per 10.000 balita.

2.6.2.6. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Dari Tabel 2.60 di bawah ini dapat dilihat mengalami fluktuatif persentase Balita gizi kurang dari tahun 2015-2017. Faktor yang menyebabkan terjadinya Balita gizi kurang yakni masih kurangnya pengetahuan orangtua tentang pentingnya memenuhi kebutuhan dan kecukupan gizi anak.

Tabel 2.60
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Palopo Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
a	Banyaknya Balita Gizi Kurang	Jiwa	346	402	339	300
b	Jumlah Balita	Jiwa	16.177	16.963	17,355	17,725
c	**Persentase Balita Gizi Kurang**	**%**	**2,14%**	**2,37%**	**2,0%**	**1,7%**
d	Balita Gizi Kurang per 10.000	Rasio	214	237	195	169

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10.000 jumlah balita yang lahir pada tahun 2016 terdapat 214 gizi buruk, dan tahun 2019 menurun menjadi 169 kasus. Dari aspek persentase, jumlahnya mengalami fluktuatif. Jika pada tahun 2016 sebanyak 2,14% pada tahun 2019 tersisa 1,7%.

2.6.2.7. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan,

bencana dan kegawat daruratan kesehatan, secara mandiri. Desa yang dimaksud dapat berarti kelurahan atau istilah-istilah lain bagi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah.

Data Persentase Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Kota Palopo Tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.61 berikut ini.

Tabel 2.61
Persentase Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif
Kota Palopo Tahun 2016 - 2019

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
a	Jumlah kelurahan siaga aktif	48	48	31	36
b	Jumlah kelurahan siaga yang dibentuk	48	48	48	48
Persentase Kelurahan Siaga Aktif		**100**	**100**	**64**	**75**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

2.6.2.8. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.62 berikut ini.

Tabel 2.62
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	**Jumlah Angkatan kerja 15 tahun ke atas**	**Orang**	**65.346**	**67.504**	**75.563**	**75.829**	**80.564**
	Laki – Laki	*Orang*	40.014	40.975	47.057	45.831	47.611
	Perempuan	*Orang*	25.332	26.529	28.506	29.998	32.953
b.	**Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas**	**Orang**	**120.400**	**123.168**	**134.147**	**129.460**	**133.176**
	Laki – Laki	*Orang*	57.633	58.952	63,6	61.,900	63.611
	Perempuan	*Orang*	62.767	64.216	70.547	67.560	69.565
c	**Angka Partisipasi Angkatan Kerja**	**%**	**54,27**	**54,81**	**56,33**	**58,57**	**60,49**
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	%	69,43	69,51	73,99	74,04	74,85
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	40,36	41,31	40,41	44,40	47,37

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, Badan Pusat Statistik Kota Palopo Tahun 2020, Olahan

Data di atas menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja di Kota Palopo sepanjang tahun 2015 – 2019 meningkat. Pada tahun 2015, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, mampu menyediakan 55 orang angkatan kerja berusia 15 tahun keatas yang aktif secara ekonomi bekerja, pada tahun 2019 angkanya meningkat menjadi 61 orang per 100 penduduk.

Dari aspek gender, tabel di atas juga menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2015– 2019 di Kota Palopo masih terus berada dibawah angka partisipasi angkatan kerja laki. Olehnya pengarusutamaan gender dalam aspek ketenagakerjaan di Kota Palopo diharapkan agar ke depan angka partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat.

2.6.2.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja.Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah.

Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Contoh: Jika TPAK 66% artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 66 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu.

Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.63 berikut ini.

Tabel 2.63
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Orang	**65.346**	**67.504**	**75.563**	**75.829**	**80.564**
	- *Laki – Laki*	*Orang*	40.014	40.975	47.057	45.831	47.611
	- *Perempuan*	*Orang*	25.332	26.529	28.506	29.998	32.953
2	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)	Orang	**113.180**	**116.200**	**126.879**	**121.883**	**124.755**
	- *Laki – Laki*	*Orang*	54.654	56.109	60.630	58.794	60.142
	- *Perempuan*	*Orang*	58.526	60.091	66.249	63.089	64.613
3	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**	**%**	**57,74**	**58,09**	**59,56**	**58,31**	**64,58**
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	**%**	73,21	73,03	77,61	77,95	79,16
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**%**	43,28	44,15	43,03	47,55	51,00

***S**umber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo 2020*

Dari aspek gender, tabel diatas juga menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2015 – 2019 di Kota Palopo masih jauh tertinggal dibawah TPAK laki. Olehnya pengarusutamaan gender dalam aspek ketenagakerjaan di Kota Palopo perlu agar ke depan TPAK perempuan terus meningkat.

2.6.2.10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal: TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengengguran.Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Untuk melihat Pengangguran Terbuka Kota Palopo Tahun 2015 – 2019, dapat dilihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64
Pengangguran Terbuka Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja	Orang	7.890	9.739	8.282	8.795	8.314
b	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	65.346	67.504	75.563	75.829	80.564
c	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**%**	**12,07**	**14,43**	**10,96**	**11,60**	**10,32**

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo & BPS Kota Palopo Tahun 2020

Pada tahun 2019, pengangguran terbuka (10.32%) lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2018 (11.6%) yang menempatkan Palopo masih lebih baik dari pada tingkat pengangguran terbuka Kota Makassar (10.39%).

Meski demikian, Angka capaian Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 pun **belum memenuhi target Kota Palopo 2019 (**9.81 %). Bahkan jika dikomparasikan dengan daerah/kota

Lain di Sulawesi Selatan, tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo belum lebih baik dibandingkan tingkat pengangguran terbuka beberapa kabupaten yang berbatasan wilayah secara langsung dengan Kota Palopo, yakni Kabupaten Luwu (4.66%), Kabupaten Luwu Utara (3.04%) dan Kabupaten Luwu Timur (4.08%), bahkan belum lebih baik daripada rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional 2019 (5.3%) Rata-Rata Sulsel (4.97%), Kota Pare-Pare (6.42%). Grafik perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo 2019 dibandingkan dengan daerah lain di Luwu Raya. Data ini dilihat lebih jelas pada Grafik 2.6.

Grafik 2.6
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Wilayah Tahun 2019

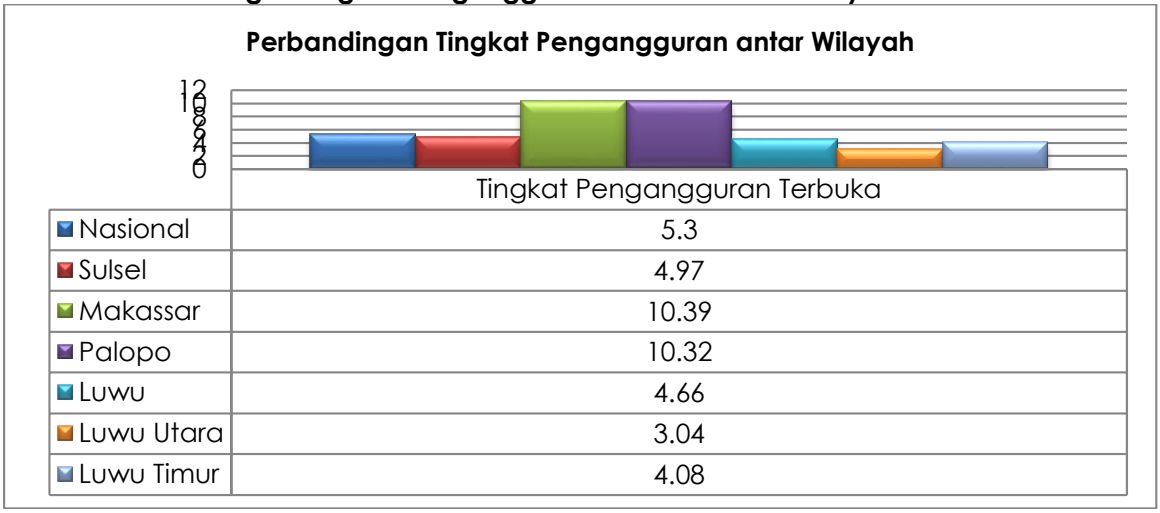

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka 10,32 persen itu setara dengan 8.314 orang menganggur, dari jumlah angkatan kerja di Palopo sebesar 80.564 jiwa.

2.6.2.11. Rasio Penduduk yang Bekerja

Adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja diperoleh rasio penduduk yang bekerja. Semakin tinggi nilai indikator ini artinya semakin banyak penduduk usia kerja yang bekerja. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 65 berikut ini.

Tabel 2.65
Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Penduduk yang bekerja	Jiwa	57.456	57.765	67.281	67.034	72.250
b	Angkatan kerja	Jiwa	65.346	67.504	75.563	75.829	80.564
c	**Persentase penduduk yang bekerja**	**%**	**87,93**	**85,57**	**89,04**	**88,40**	**89,68**

***S**umber Data : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2020*

Angka pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 persentase penduduk yang bekerja di Kota Palopo 89,04%, artinya dari 100 orang angkatan kerja hanya 89 orang yang bekerja, tahun 2019 dimana dari 100 orang angkatan kerja, sebanyak 90 orang telah bekerja. Angka ini menggambarkan bahwa semakin banyak angkatan kerja di Kota Palopo yang tidak bekerja sehingga akan berdampak pada jumlah dan persentase pengangguran. Olehnya ke depan angka yang menjadi target persentase indikator ini harus ditingkatkan.

2.6.2.12. Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.66 berikut ini.

Tabel 2.66
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Produk Domestik Regional Bruto (x 000) Harga Konstan	Juta	4.140.871,84	4.428.497,04	4.746.935,70	5.102.990,00	5.447.360,00
b.	Jumlah Tenaga Kerja (Yang Bekerja)	Orang	57.456	57.765	67.281	57.765	67.281
c.	**Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja**	**Juta/Orang**	**72,07**	**76,66**	**70,56**	**72,24**	**75,40**

Sumber Data : Buku PDRB Kota Palopo 2017, diolah

Data tersebut menunjukkan bahwa produktifitas tenaga kerja di Kota Palopo 2015-2017 mengalami peningkatan dimana tahun 2015 sebesar 57.456, thun 2016 sebesar 57.765 dan tahun 2017 naik menjadi 67.281, tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 57.765 dan tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 67.281.

2.6.2.13. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Kesempatan Kerja yang biasanya dinyatakan dalam bahasa tingkatan adalah persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja.Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja..

Semakin tinggi TKK, kesempatan kerja semakin tinggi. Misal: TKK 94%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), sebanyak 94 orang merupakan penduduk bekerja.Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih, dan bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Data Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.67 berikut ini.

Tabel 2.67
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Kesempatan kerja (= Jumlah Penduduk yang Telah Bekerja)	Orang	**57.456**	**57.765**	**67.281**	**57.765**	**67.281**
b.	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas						
	- *Laki – Laki*	*Orang*	54.654	56.109	60.630	58.794	60.142
	- *Perempuan*	*Orang*	58.526	60.091	66.249	63.089	64.613
	Jumlah	*Orang*	**113.180**	**116.200**	**126.879**	**121.883**	**124.755**
c.	**Rasio Kesempatan Kerja**	**%**	**45,21**	**46,9**	**50,15**	**46,9**	**50,15**

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2020

Data diatas menunjukkan bahwa, dari 100 orang penduduk usia 15 ke atas di Kota Palopo tahun 2017, hanya 50 orang yang memiliki kesempatan kerja atau merupakan penduduk yang bekerja. 50 orang lainnya tidak bekerja atau menganggur. Angka ini jauh menurun dibandingkan kondisi tahun 2015 dimana dari 100 orang penduduk usia 15 tahun keatas, hanya terdapat 45 orang yang tidak bekerja atau pengangguran.

Kemudian jika dilihat dari angka kinerja yang ada, capaian inipun masih sangat rendah. Pemerintah Kota palopo harus berupaya membuka akses yang lebih luas bagi penyediaan lapangan kerja baru melalui berbagai strategi dan program ketengakerjaan atau meningkatkan jiwa wirausaha bagi para penduduk usia kerja.

2.6.2.14. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Molai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 8 kategori. Yakni berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, Berusaha dibantu buruh tetap / buruh dibayar, Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja bebas di pertanian, Majikan, Pekerja bebas di nonpertanian, Pekerja keluarga/tak dibayar.

Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebolan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Indikator ini menunjukkan kemandirian tenaga kerja dalam membuka lapangan kerja sendiri. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin besar peluang tenaga kerja untuk membuka lapangan usaha sendiri. Data ini dapat dilihat pada Tabel 2.68 berikut ini.

Tabel 2.68
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Status Pekerjaan Utama	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Tenaga Kerja yang Berusaha sendiri				17.166		
	- Laki – Laki	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	12.145	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	- Perempuan	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	5.021	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	Pekerja Bebas Keluarga						
	- Laki – Laki	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	2.336	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	- Perempuan	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
b	Total Kesempatan kerja (= Jumlah Penduduk yang Telah Bekerja)	Orang	57.456	57.765	67.281	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
c	**Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja**						
		%	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	25,51	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	- Laki – Laki	Persen	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	18,05%	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	- Perempuan	Persen	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	7,46%	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Sumber Data : BPS, Palopo Dalam Angka Tahun 2020

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 hanya ada 25,51% tenaga kerja di Kota Palopo yang berusaha sendiri. Artinya dari 100 tenaga kerja, hanya ada 26 (pembulatan 25,51) tenaga kerja yang bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

Dari aspek gender, besaran tenaga kerja perempuan yang berusaha sendiri masih berselisih 10,59% berada dibawah besaran tenaga kerja laki laki yang berusaha sendiri yang berada pada angka 18,05%, sementara perempuan hanya pada angka 7,46%. Pada tahun 2017, dari 100 pekerja, ada 18 orang pekerja laki-laki yang berusaha sendiri, sementara dari 100 pekerja perempuan pada tahun tersebut hanya ada 8 orang pekerja perempuan yang berusaha sendiri. Artinya kemandirian pekerja laki-laki masih lebih baik dibandingkan kemandirian pekerja perempuan.

2.6.2.15. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah.

Sedangkan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs)* secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan psikologisnya *(psychological needs)* seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca dan tulis latin.

Tabel 2.69 menunjukkan data kondisi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di Kota Palopo 2015-2019 :

Tabel 2.69
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	40.28	30.34	28.9	26.82	26.09

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Jumlah Keluarga Prasejahtera di Kota Palopo Tahun 2019 sebanyak 26.09 %, jumlah ini lebih sedikit dari pada tahun 2018, dimana jumlah keluarga prasejahtera berada pada angka 26.82%, atau menurun sebanyak 0.73%.

Pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015 dimana tahun 2015 berada pada angka 40.28% dan tahun 2016 turun menjadi 30.34%. Ini memunjukan adanya pengurangan dari aspek persentase jumlah keluarga untuk kedua kategori ini.

2.6.2.16. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Survey Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo. Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2019 berada pada angka 83.08 poin. Ini mennunjukan kinerja unit layananan berpredikat baik dengan mutu layanan yang baik pula. Data yang menunjukkan IKM dapat dilihat pada Tabel 2.70 berikut ini

Tabel 2.70
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

NO	Perangkat Daerah	Nilai Indeks	IKM	Kinerja Unit Layanan	Mutu Pelayanan
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,44	85,91	Baik	B
2	RSUD Sawerigading	3,31	82,83	Baik	B
3	Puskesmas Wara	3,29	82,27	Baik	B
4	Dinas Sosial (Rastra APBN & APBD)	3,30	82,51	Baik	B
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,33	81,18	Baik	B
6	Kecamatan Wara	3,35	83,77	Baik	B
Rata-rata			**83,08**	**Baik**	**B**

Sumber : LAKIP Kota Palopo Tahun 2020

2.6.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

2.6.3.1. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.71 berikut ini.

Tabel 2.71
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Group Kesenian	12	14	16	18	18
Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1
Jumlah Klub Olahraga	4	4	8	8	8
Jumlah Gedung Olahraga	1	1	1	1	1

Sumber Data: Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2020, Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2020

Jumlah group kesenian di Kota Palopo meningkat dari tahun 2015 sebanyak 12 group menjadi 18 group kesenian pada tahun 2019, sementara jumlah gedung kesenian, jumlah klub olahraga dan gedung olahraga jumlahnya tetap sepanjang 2015-2019.

2.7. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.7.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Layanan urusan wajib dasar diarahkan pada pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

2.7.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

2.7.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Merupakan jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak dibagi jumlah seluruh anak yang berusia 4-6 tahun yang dinyatakan dalam persentase. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.72 berikut ini.

Tabel 2.72
Persentase Pendidikan Anak Usia Dini Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	Orang	4681	4338	4110	4698	4034
2	Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun	Orang	7411	6875	6511	6714	6554
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		**%**	**59,60**	**61,75**	**63,16**	**63,10**	**62,48**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa, meski pun meningkat, tingkat partisipasi anak berusia 4-6 tahun mengakses pendidikan anak usia dini relatif masih rendah dan belum mencapai angka 75%. Ini menunjukkan bahwa perlunya ada akselrasi program dan kegiatan sehingga lebih banyak anak usia 4-6 tahun yang mengakses lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Palopo.

Sampai dengan tahun 2019, jumlah lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Palopo, totalnya sebanyak 130 lembaga, termausk yang berada dibawah Kementerian Agama. Jumlah ini terdiri dari Raudatul Afhal (RA) sebanyak 5, TPA sebanyak 3, Satuan Paud Sejenis (SPS) sebanyak 2, Kelompok Bermain (KB) sebanyak 30, TK sebanyak 90.

Beberapa aspek yang mesti menjadi perhatian dalam meningkatkan angka patrisipasi ini adalah memastikan edukasi dan sosialisasi urgensi pendidikan anak usia dini terhadap orang tua dan memastikan bahwa biaya pendidikan pada level ini bisa dijangkau oleh semua kalangan.

2.7.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi Kasar adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angkanya menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau **lebih dari 100** persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Palopo Tahun 2015 -2019 dapat dilihat pada Tabel 2.73 berikut ini.

Tabel 2.73
Angka Partisipasi Kasar Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	APK SD/MI/Paket A	101,81	111,66	106,00	112.89	105.99
2	APK SMP/MTs/Paket B	88,23	86,17	84,91	84.17	86.02
3	APK SMA/MA/SMK/Paket C	91,56	95,35	85,39	110.31	110.74

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka & Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi kasar tingkat SD sederajat di Kota Palopo tahun 2015-2019 selalu melebihi 100%. Kondisi ini menggambarkan setiap tahunnya selalu ada penduduk yang sudah bersekolah di tingkat SD, meski umurnya belum mencukupi 7 tahun, atau melebihi umur yang seharusnya. Namun kondisi ini juga mencerminkan bahwa di Kota Palopo, untuk tingkat sekolah dasarnya, tetap mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya yakni penduduk berumur 7-12 tahun.

Pada tingkat pendidikan SMP/sederajat, partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan ini fluktuatif. Jika pada tahun 2015 dari 100 orang penduduk berumur 13-15 tahun yang bersekolah rata-rata sebanyak 88 orang, tahun 2016-2018 mengalami penurunan, pada tahun 2019 naik menjadi 86 orang per 100 penduduk umur 13-15 tahun.

Sementara pada jenjang SMA/sederajat partisipasi kasar pada jenjang pendidikan ini justru meningkat. Jika pada tahun 2015 dari 100 orang penduduk berumur 16-18, tahun yang bersekolah rata-rata sebanyak 91-92 orang, pada tahun 2019 meningkat menjadi 110 orang, per 100 penduduk umur 16-85 tahun.

Beberapa aspek yang sangat erat kaitannya dengan upaya meningkatkan partisipasi kasar adalah aspek ketersediaan sekolah, guru dan keterjangkauan biaya pendidikan. Olehnya ke depan melalui pelaksanaan pendidikan paripurna, Kota Palopo berharap mampu meningkatkan angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan dasar yakni SD dan SMP sederajat. Untuk menyikapi hal ini Pemerintah Kota Palopo melaksanakan program pendidikan gratis. Sehingga diharapkan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan partisipasi pada anak usia sekolah.

2.7.1.1.3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator ini menunjukkan besaran atau persentase komposisi penduduk usia menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki masing-masing tingkat pendidikan. Mulai dari SD, SMP dan

SMA/sederajat. Ini untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya atau sebagai bahan analisis pasar kerja.

Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk suatu wilayah maka mencerminkan semakin tinggi taraf intelektualitas masyarakat di wilayah tersebut. Tabel 2.74 ini menunjukkan data penduduk usia 10 tahun keatas di Kota Palopo 2015-2019, sesuai tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan.

Tabel 2.74
Persentase Pendidikan yang Ditamatkan pada Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A	**Angka pendidikan yang ditamatkan (%)**					
1	Tidak/Belum Bersekolah (%)	17.03	7.85	7.02	10.61	6.64
2	Tamat SD/sederajat (%)	19.23	30.47	14.18	14.94	15.79
3	Tamat SMP/sederajat (%)	18.02	11.82	23.63	22.05	20.02
4	Tamat SMA (%)	26.12	31.75	36.68	30.59	36.19
5	Tamat SMK (%)	3.89	4.06	2.81	3.5	3.52
6	Tamat Perguruan Tinggi (%)	15.72	14.08	15.67	16.00	17.84
7	Diploma I/II (%)	0.33	0.29	0.37	0.43	0.39
8	Diploma III (%)	2.61	1.82	1.39	3.21	1.79
9	Diploma IV/S1-S3 (%)	12.78	11.97	13.91	14.69	15.66

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2020

2.7.1.1.4. Angka Partisipasi Murni

Adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

2.7.1.1.4.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Tabel 2.75 di bawah ini menunjukkan, pada tahun 2015, terdapat 94,11% anak usia 7-12 tahun yang tepat waktu bersekolah di tingkat SD/MI sederajat. Dan pada tahun 2019 menjadi 99,44%. jumlah anak yang masuk tepat waktu sekolah semakin tinggi, yangmenunjukkan daya serap sekolah pada tingkat pendidikan ini cukup baik, misalnya dengan jumlah ketersediaan sekolah yang tersedia.

Tabel 2.75
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Kota Palopo Tahun 2015 –2019

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin					
Uraian	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
SD/MI	94,11	95,37	99,32	99,78	99.44
Laki-Laki	77,48	100.00	99,33	99,60	n/a
Perempuan	90.04	90,52	99,31	100,00	n/a

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Kota Palopo,2020

2.7.1.1.4.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Tabel 2.76 di bawah ini menunjukkan, APM pada tingkat pendidikan ini terus membaik setiap tahunnya. Jika tahun 2015, hanya 75,43 % anak usia 13-15 tahun yang tepat waktu bersekolah di tingkat SMP/MTs sederajat, pada tahun 2019 sudah mencapai angka 78,11%. Jumlah anak yang masuk tepat waktu sekolah semakin tinggi, menunjukkan daya serap sekolah pada tingkat pendidikan ini semakin membaik. Meski pun angkanya jika dibandingkan dengan APM tingkat SD sederajat, APM pada tingkat SMP/sederajat masih berada di bawah.

Tabel 2.76
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Tinkat Pendidikan dan Jenis Kelamin					
Uraian	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
SMP/MTs	75,43	76,61	77,89	78,39	78.11
Laki-Laki	68,49	77,50	75,35	79,35	n/a
Perempuan	81,02	75,52	80,28	77,55	n/a

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.1.4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C

Tabel 2.77 di bawah ini menunjukkan, APM pada tingkat pendidikan ini terus membaik setiap tahunnya. Jika tahun 2015, hanya 68,29 % anak usia 16-18 tahun yang tepat waktu bersekolah di tingkat SMA/SMK sederajat, pada tahun 2019 sudah mencapai angka 67,4%. Jumlah anak yang masuk tepat waktu sekolah semakin tinggi, menunjukkan daya serap sekolah pada tingkat pendidikan ini semakin membaik.

Tabel 2.77
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
Kota Palopo Tahun 2015 –2019

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin					
Uraian	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
SMA/MA/SMK	**68,29**	**65,72**	**66,42**	**67,99**	**67.4**
Laki-Laki	70,11	66,80	69,65	75,27	n/a
Perempuan	66,63	64,73	63,24	62,00	n/a

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.1.5. Angka Partisipasi Sekolah

Adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

2.7.1.1.5.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A

Data yang mengggambarkan tentang Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Kota Palopo selama Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.78 berikut ini.

Tabel 2.78
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
7 – 12	**98,98**	**100**	**99,32**	**99,78**	**99,70**
Laki-Laki	98,14	100	99,33	99,60	**n/a**
Perempuan	100	100	99,31	100	**n/a**

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Data diatas menunjukkan bahwa angka APS umur 7-12 tahun pada tahun 2019 sebesar 99,70 yang artinya rata-rata ada 997 orang penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah dari 1000 penduduk berusia 7-12 tahun.

2.7.1.1.5.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

Gambaran tentang Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Kota Palopo selama Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
13 - 15	**98,52**	**96,57**	**98,13**	**100**	**99.17**
Laki-Laki	98,01	95,14	96,15	100	n/a
Perempuan	98,92	98,35	100	100	n/a

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Pada tingkat usia 13-15 tahun, tahun 2019 APS nya sebesar 99,17%, artinya bahwa ada rata-rata sebanyak 991 orang penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah dari 1000 penduduk berusia 13-15 tahun pada tahun tersebut.

2.7.1.1.5.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C

Angka Partisipasi Sekolah (APS) selama tahun 2015 – 2018 pada kelompok umur 16-18 tahun (SMA/MA/SMK) mendekati angka 100%. Akan tetapi pada tahu 2019 mengalami penurunan hingga 84,43%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
16 - 18	**98,98**	**100**	**99,32**	**99,78**	**84,43**
Laki-Laki	78,74	85,33	84,71	88,56	**n/a**
Perempuan	84,76	91,24	91,92	81,62	**n/a**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo, Tahun 2020

2.7.1.1.6. Angka Putus Sekolah

Adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun).

Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Contoh APTS7-12 = 10,11% berarti secara rata-rata dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 10 sampai 11 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 10 anak yang putus sekolah.

Data Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.81 berikut ini.

Tabel 2.81
Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0.40	0	0.68	0,79	0,004
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	1.45	3.43	1.87	1,26	0,006
3.	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%)	15.87	9,10	10.28	7,35	n/a

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2016-2020

Data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa angka putus sekolah mengalami fluktuasi selama tahun 2015 – 2019 di Kota Palopo untuk tingkat SD/sederajat. Jika pada tahun 2015 pada posisi 0.40%, tahun 2016 turun draktis pada posisi 0%, tahun 2017 kembali naik pada posisi 0,68%, meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 0.79% dan tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 0,004%. Kondisi ini berbeda dengan angka putus sekolah pada tingkat pendidikan SMP/sederajat yang mengalami fluktuasi, dimana tahun 2015 1,45%, tahun 2016 naik

menjadi 3,43%, tahun 2017 kembali turun menjadi 1,87%, dan tahun 2019 turun menjadi 0,006%. dan SMA/sederajat juga mengalami fluktuasi.

2.7.1.1.6.1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Data Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.82 berikut ini:

Tabel 2.82
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Capaian Kinerja APTS SD/MI Kota Palopo	Orang	74	0	153	179	74
2.	Jumlah Seluruh APS SD/MI Kota Palopo (Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang pernah/sedang bersekolah)	Orang	18,470	21,952	22,500	22.617	n/a
3.	**Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI**	**%**	**0.40**	**0**	**0.68**	**0,79**	

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diolah dari Palopo Dalam Angka 2015-2019

Data diatas menunjukkan bahwa angka putus sekolah Kota Palopo 2015-2019 pada tingkat SD mengalami fluktuasi, tetapi cenderung meningkat. Angka putus sekolah Jika pada tahun 2015 sebesar 0,40% pada tahun 2018 sebesar 0,79%. Artinya pada tahun 2018, dari 100 siswa sekolah SD ada 1 orang siswa yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan pendidikannya pada jenjang SD/sederajat. Ini mesti disikapi oleh Pemerintah sehingga angkanya tidak semakin meningkat.

2.7.1.1.6.2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Data Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.83 berikut ini.

Tabel 2.83
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Capaian Kinerja APTS SMP/MTs Kota Palopo	Orang	153	385	214	146	69
2.	Jumlah Seluruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Kota Palopo (Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang pernah/sedang bersekolah)	Orang	10,567	11,213	11,465	11.595	n/a
3.	**Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs**	**%**	**1.45**	**3.43**	**1.87**	**1,26**	

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diolah dari Palopo Dalam Angka 2015-2019

Data di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah Kota Palopo 2015-2019 pada tingkat SMP mengalami fluktuasi. Dari 153 kasus pada tahun 2015 menurun menjadi 69 kasus pada tahun 2019.

2.7.1.1.6.3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Data Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.84 berikut ini.

Tabel 2.84
Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Capaian Kinerja APTS SMA/SMK/sederajat se Kota	Orang	1,869	962	1,147	854	n/a
2	Jumlah Seluruh APS SMA/SMK/sederajat se- Kota Palopo(Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun yang pernah/sedang bersekolah)	Orang	11,776	10,573	11,162	11.620	n/a
3.	**Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA**	**%**	**15.87**	**9,10**	**10.28**	**7,35**	**n/a**

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diolah dari Palopo Dalam Angka 2015-2019

Data di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada tingkat ini di Kota Palopo mengalami fluktuasi. Jika pada tahun 2015 terdapat 15-16 orang orang siswa putus sekolah dari 100 siswa, pada tahun 2018 hanya terdapat 7 orang (7,35%) siswa yang putus sekolah per 100 orang siswa.

2.7.1.1.7. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menunjukkan besar jumlah siswa yang tidak tinggal kelas atau berhasil menamatkan pendidikannya pada level yang sedang ia tempuh. Indikator ini menunjukkan keberhasilan para siswa dalam mengikuti ujian sekolahnya. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.86 berikut ini

Tabel 2.85
Angka Kelulusan Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Kelulusan SD	97,48	98,87	100	100	100
2.	Angka Kelulusan SMP	99,05	99,62	99,30	99,38	100
3.	Angka Kelulusan SMA/SMK	102,82	102,44	99,75	100	n/a

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota PalopoTahun 2020

2.7.1.1.7.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Data Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.86 berikut ini.

Tabel 2.86
Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Orang	2.936	2.830	3.038	3.072	3193
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	Orang	3.012	2.862	3.038	3.047	3193
3.	**Angka Kelulusan (AL) SD/MI**	**%**	**97,48**	**98,87**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa angka kelulusan dari tahun ke tahun pada tingkat SD terus membaik. Jika pada tahun 2015 persentase angka kelulusan mencapai 97.48%, pada tahun 2019, semua siswa pada jenjang pendidikan SD/sederajat lulus atau mencapai 100%.

2.7.1.1.7.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Demikian halnya dengan kelulusan tingkat SMP sederajat. Data pada tabel dibawah menunjukkan bahwa angka kelulusan dari tahun ke tahun pada tingkat ini terus membaik. Jika

pada tahun 2015 persentase angka kelulusan masih pada posisi 99.05%, pada tahun 2019 meningkat menjadi 100%. Data ini dapat dilihat pada Tabel 2.87 berikut ini.

Tabel 2.87
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Orang	2.759	2.822	2.865	2.900	3178
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	Orang	2.785	2.833	2.885	2.918	3178
3.	**Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs**	**%**	**99,05**	**99,62**	**99,30**	**99,38**	**100,00**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.1.7.3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Data Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.88 berikut ini.

Tabel 2.88
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA**	**%**	**102,82**	**102,44**	**99,75**	**n/a**	**n/a**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa angka kelulusan SMA sederajat pada dua tahun 2015-2016 angkanya melebih 100%. Ini disebabkan karena mereka yang sebelumnya tinggal kelas atau tidak lulus, baru berhasil 2015 dan 2016. Kemudian pada tahun 2017 angka kelulusan 99,75%, artinya masih terdapat 0,25% siswa yang tidak berhasil menamatkan pendidikan SMA sederajatnya tepat waktu karena tidak berhasil lulus.

2.7.1.1.8. Angka Melanjutkan (AM)

Indikator ini menggambarkan persentase pelajar yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka ini diperoleh dengan membagi Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs terhadap jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya.

2.7.1.1.8.1. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Data Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.89 berikut ini.

Tabel 2.89
Angka Melanjutkan (AL) dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Siswa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya	Siswa	2.936	2.830	3.038	n/a	n/a
3.	**Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs**	**%**					

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2020

2.7.1.1.8.2. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Data Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.90 berikut ini.

Tabel 2.90
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	4420	4531	n/a	4.681	n/a
2.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya	Siswa	3213	3228	3361	3.388	3.178
3.	**Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA**	**%**	**131.25**	**141.24**	**137.56**	**140.36**	**n/a**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah lulusan SMP/Sederajat yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/Sederajat mengalami fluktuasi. Jika pada tahun 2015 pada angka 131.25%, tahun 2016 naik menjadi 141,24%, tahun 2017 turun kembali menjadi 137,56% dan pada tahun 2018 naik kembali menjadi 140.36%. Angka melanjutkan yang melebihi 100% ini menunjukkan bahwa semua lulusan SMP/MTS yang ada di Kota Palopo, melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA/SMK/sederajat.

Angka melanjutkan melebihi 100% ini, menurut data Dinas Pendidikan Kota Palopo, karena cukup banyak lulusan SMP/sederajat yang berada di luar wilayah Kota Palopo, memilih untuk bersekolah di SMA/sederajat yang berada di wilayah Kota Palopo. Terutama lulusan SMP/sederajat yang menetap di perbatasan Kabupaten Luwu.

Beberapa alasannya adalah, sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah sekolah di Kota Palopo lebih kompetitif dibandingkan dengan sekolah SMA/Sederajat yang berada di wilayah mereka tinggal. Faktor lainnya adalah karena orang tua mereka bekerja di wilayah Kota Palopo.

Kondisi ini juga menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap sistem zonasi pendidikan belum berjalan cukup baik. Sebab masih banyak lulusan sekolah yang memilih bersekolah diluar dari zona wilayahnya. Namun ini juga menunjukkan adanya ketimpangan kualitas sekolah maupun pendidikan sehingga para lulusan memilih bersekolah di wilayah Kota Palopo dengan alasan sarana dan prasarana sekolah serta kualitas pembelajaran yang lebih kompetitif. Meski demikian kondisi ini juga menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018, daya serap pendidikan menengah baik SMA, SMK atau MA di Kota Palopo cukup baik, sehingga mampu menampung lulusan yang berasal dari luar Kota Palopo.

2.7.1.1.9. Fasilitas Pendidikan

2.7.1.1.9.1. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Indikator ini menggambarkan kondisi umum bangunan sekolah SD atau yang setingkat yang layak dipakai proses belajar mengajar. Semakin tinggi nilai persentasenya, menunjukkan bahwa tersedia ruang kelas yang cukup untuk menunjang proses belajar mengajar. Untuk melihat gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.91 berikut ini.

Tabel 2.91
Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik
Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	**Jumlah Sekolah SD/MI berkondisi Baik**	**77**	**77**	**77**	**77**	**80**
A	Jumlah SD Negeri Berkondisi Baik	62	62	63	63	65
B	Jumlah SD Swasta Berkondisi Baik	11	11	11	11	12
C	Jumlah MI Negeri Berkondisi Baik	4	4	4	4	3
D	Jumlah MI Swasta Berkondisi Baik	-	-	-	-	-
2	**Jumlah seluruh SD/MI di Kota Palopo (Negeri & Swasta)**	**79**	**79**	**80**	**80**	**80**
E	Jumlah SD Negeri	64	64	65	65	65
F	Jumlah SD Swasta	11	11	11	11	12
G	Jumlah MI Negeri	4	4	4	4	-
H	Jumlah MI Swasta	-	-	-	-	3

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
3	**Persentase Sekolah SD/MI Kondisi baik(%)**	**97.47**	**97.47**	**96.25**	**96,25**	**100**

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Palopo Dalam Angka
Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Data menunjukkan bahwa seluruh sekolah dasar (SD) di Kota Palopo kondisinya sudah baik dalam menunjang proses belajar mengajar. Yakni Sekolah

2.7.1.1.9.2. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik

Data Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.92 berikut ini.

Tabel 2.92
Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik
Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Jml SMP/MTs Kondisi Baik**	**28**	**29**	**30**	**31**	**33**
a.	Jumlah SMP Negeri Berkondisi Baik	13	13	14	15	14
B	Jumlah SMP Swasta Berkondisi Baik	8	8	8	8	11
C	Jumlah MTs Negeri Berkondisi Baik	7	8	8	8	8
D	Jumlah MTs Swasta Berkondisi Baik	-	-	-	-	7
2.	**Jml Seluruh SMP/MTs**	**28**	**29**	**30**	**31**	**33**
E	Jumlah SMP Negeri	13	13	14	15	14
F	Jumlah SMP Swasta	8	8	8	8	11
G	Jumlah MTs Negeri	7	8	8	8	1
H	Jumlah MTs Swasta	-	-	-	-	7
3.	**Persentase Sekolah SMP/MTs Kondisi baik (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : BPS dan Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Sedangkan Data Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.93 berikut ini.

Tabel 2.93
Persentase Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik
Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	**Jml SMA/SMK/MA Kondisi Baik**	**34**	**31**	**31**	**31**	**31**
a.	Jumlah SMA Negeri Berkondisi Baik	6	6	6	6	6
b	Jumlah SMA Swasta Berkondisi Baik	6	6	6	6	6
c	Jumlah SMK Negeri Berkondisi Baik	7	7	7	7	7
d	Jumlah SMK Swasta Berkondisi Baik	14	11	11	11	11
e	Jumlah MA Berkondisi Baik	1	1	1	1	1
2	**Jml Seluruh SMA/SMK/MA**	**34**	**31**	**31**	**31**	**31**
e	Jumlah SMA Negeri	6	6	6	6	6
f	Jumlah SMA Swasta	6	6	6	6	6
g	Jumlah SMK Negeri	7	7	7	7	7
h	Jumlah SMK Swasta	14	11	11	11	11
i	Jumlah MA Negeri	1	1	1	1	1
j	Jumlah MA Swasta	0	0	0	0	0
3	**Persentase SekolahSMA/SMK/MA Kondisi baik (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : BPS dan Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.1.10. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Adalah gambaran ketersediaan atau daya tampung sekolah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Pendidikan dasar adalah tingkat SD/Mi dan SMP/MTs. Sehingga jumlah

sekolah yang berada dalam tabel di bawah ini adalah jumlah SD dan Jumlah Sekolah madrasah Ibtidaiyah (MI) yang pengelolaannya dibawah Kementerian Agama dan Pihak Swasta lainnya, namun berlokasi di Kota Palopo. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.94 berikut ini.

Tabel 2.94
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Dasar (SD/SMP yang sederajat) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	**SD/MI**					
1.1	**Jumlah gedung sekolah**	**79**	**79**	**80**	80	**80**
	SD Negeri	64	64	65	65	65
	SD Swasta	11	11	11	11	12
	MI Negeri	4	4	4	4	-
	MI Swasta	-	-	-	-	3
1.2.	**Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun**	**18,586**	**21,952**	**22,500**	**22.617**	**20.292**
1.3.	**Rasio SD/MI (per 10.000)**	**43**	**36**	**36**	**36**	**39**
2	**SMP/MTs**					
2.1	**Jumlah gedung sekolah**	**28**	**29**	**30**	31	**33**
	SMP Negeri	13	13	14	14	14
	SMP Swasta	8	8	8	8	11
	MTs Negeri	7	8	8	8	1
	MTs Swasta	0	0	0	0	7
2.2.	**Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun**	**10,572**	**11,226**	**11,469**	11.583	**10.864**
2.3.	**Rasio SMP/MTs (per 10.000)**	**26**	**26**	**26**	**26**	**30**
3						
3.1	Total Jumlah gedung sekolah (SD + SMP sederajat)	107	108	110	112	
3.2	Total jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun + jumlah penduduk usia 13-15 tahun	29,158	33,178	33,969	34.200	31.156
3.4	**Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Per 10.000**	**37**	**33**	**32**	**32**	**36**

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2016-2020
Dinas Pendidikan Kota Palopo

Tabel di atas menggambarkan bahwa rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar yakni SD atau yang sederajat di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 cenderung mengalami fluktuasi. Jika pada tahun 2015 untuk 10.000 penduduk usia pendidikan dasar (7-12 tahun) tersedia sekolah sebanyak 43 sekolah, tahun 2016-2018 tidak mengalami perubahan sebanyak 36 sekolah, tahun 2019 mengalami penambahan sebanyak 39 sekolah. Sementara untuk SMP, tahun 2015-2018 tersedia 26 sekolah, tahun 2019 bertambah menjadi 30 sekolah untuk sebanyak 10.000 penduduk usia 13-15 tahun.

Untuk tingkat pendidikan dasar SD dan SMP, rasio ketersediaan sekolah 2015-2019 mengalami fluktuasi. Jika 2015 terdapat sebanyak 37 sekolah untuk penduduk sebanyak 10.000 jiwa, tahun 2016 turun menjadi 33 sekolah, tahun 2017 tetap turun menjadi 32 sekolah, tahun 2018 tidak mengalami penambahan, dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 36 sekolah untuk menampung 10.000 penduduk.

2.7.1.1.11. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

Perbandingan antara murid dan sekolah, mencerminkan besarnya daya tampung anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA dan SMK. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.95 berikut ini.

Tabel 2.95
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	SMA/MA/SMK					
1	**Jumlah Sekolah**	**34**	**31**	**31**	31	31
	SMA Negeri	6	6	6	6	6
	SMA Swasta	6	6	6	6	6
	SMK Negeri	7	7	7	7	7
	SMK Swasta	14	11	11	11	11
	Madrasah Aliyah	1	1	1	1	1
2	**Jumlah Penduduk Usia 16-18 th**	**12.411**	**10.962**	**11.457**	**11.790**	**11.790**
3	**Rasio Ketersediaan Sekolah (per 10.000 penduduk)**	**27**	**28**	**27**	**28**	**28**

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2015-20120
Dinas Pendidikan Kota Palopo

Tabel di atas menggambarkan bahwa rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan menengah di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi. Jika pada tahun 2015 untuk 10.000 penduduk usia pendidikan 16-18 tahun tersedia sekolah sebanyak 27 sekolah, tahun 2016 naik menjadi 28 sekolah, tahun 201 turun lagi menjadi 27 sekolah, dan tahun 2019 bertambah kembali menjadi 28 sekolah.

2.7.1.1.12. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru sekolah yang bersangkutan. Indikator ini untuk menggambarkan ketersediaan guru pada level pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa pada level pendidikan tersebut.

Indikator ini akan menunjukkan perkembangan beban kerja guru. Semakin rendah nilai rasio ini berarti semakin tinggi beban kerja guru yang bersangkutan, yang berdampak pada berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Tabel 2.96 di bawah ini menunjukkan bahwa untuk pendidikan dasar, rasio guru dan murid sepanjang tahun 2015-2019, untuk tingkat pendidikan dasar menurun. Artinya beban kerja yang dirasakan oleh guru pendidikan dasar pada tingkat SD dan SMP semakin tinggi, meskipun jika dilihat dari angka rasio masih dalam kondisi normal.

Jika pada tahun 2015, untuk 10.000 siswa pendidikan dasar (SD dan SMP) dilayani 890 orang guru, pada tahun 2019 hanya dilayani oleh 649 orang guru. Pada jenjang SD/Mi/sederajat, tahun 2015 sampai tahun 2019, pada tingkat SD/MI, rasio guru dan murid 937 guru per 10.000 murid pada tahun 2015, menjadi 601 guru per 10.000 murid pada tahun 2019.

Jenjang SMP/MTs/Sederajat, pada tahun 2015, rasio guru murid berada pada angka 800 guru per 10.000 murid pada tahun 2015 menjadi 737 guru per 10.000 murid pada tahun 2019.

Tabel 2.96
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	**SD/MI**					
1.1.	**Jumlah Guru**	**1.833**	**1.208**	**1.136**	**1.128**	**1878**
	SD Negeri	1613	986	933	924	898
	SD Swasta	158	160	142	142	170
	MI Negeri	62	62	61	61	0
	MI Swasta	0	0	0	0	45
1.2.	**Jumlah Murid**	**19.565**	**19.091**	**18.719**	**18.969**	**18505**
	SD Negeri	16.471	15.867	15.393	15.451	14.342
	SD Swasta	2.384	2.514	2.659	2.742	2.959
	MI Negeri	710	710	667	642	0

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	MI Swasta	0	0	0	0	1204
	Rasio Guru/Murid SD/MI (per 10.000)	**937**	**633**	**607**	**595**	**601**
2	**SMP/MTs**					
2.1.	**Jumlah Guru**	**827**	**764**	**697**	**682**	**765**
	SMP Negeri	514	497	478	479	489
	SMP Swasta	153	101	86	73	107
	MTs Negeri	160	166	133	147	74
	MTs Swasta	0	0	0	0	95
2.2.	**Jumlah Murid**	**10.338**	**10.167**	**10.137**	**10.173**	**10370**
	SMP Negeri	7.823	7.615	7.562	7.610	7276
	SMP Swasta	1.105	1.135	1.289	1.308	1589
	MTs Negeri	1.410	1.417	1.286	1.311	903
	MTs Swasta	0	0	0	0	602
	Rasio Guru/Murid SMP/MTs (per 10.000)	**800**	**751**	**688**	**670**	**737**
3	**Pendidikan Dasar (SD + SMP, Sederajat)**					
3.1.	**Jumlah Guru (SD dan SMP)**	**2.660**	**1.972**	**1.833**	**1.811**	**1664**
3.2.	**Jumlah Murid (SD dan SMP)**	**29.903**	**29.258**	**28.856**	**29.142**	**28875**
3.3	**Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar (per 10.000)**	**890**	**674**	**635**	**621**	**649**

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.1.13. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah

Adapun data tentang Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.97 dibawah ini.

Tabel 2.97
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah
Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	SMA/MA/SMK					
1	**Jumlah Guru**	**2.771**	**990**	**980**	**1.085**	**910**
	SMA Negeri	1820	331	331	333	314
	SMA Swasta	114	87	87	74	76
	SMK Negeri	481	361	351	421	331
	SMK Swasta	301	169	169	215	144
	MA	55	42	42	42	45
2	**Jumlah Murid**	**12.017**	**11.121**	**11.131**	**11.671**	**11.269**
	SMA Negeri	5.059	5.005	5.005	5.172	4.726
	SMA Swasta	832	892	902	1.082	1.223
	SMK Negeri	4.455	3.496	3.496	3.473	4.163
	SMK Swasta	1.671	1.728	1.728	1.944	1.157
3	**Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah per 1000**	**231**	**89**	**88**	**93**	**80.75**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo dalam Angka 2016-2020
Dinas Pendidikan Kota Palopo

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2015, untuk mendidik 1000 siswa SMA/SMK/MA sederajat di Kota Palopo tersedia guru sebanyak 231 orang. Sementara pada tahun tahun 2019, hanya tersedia 80 orang guru untuk melayani 1000 orang siswa.

2.7.1.1.14. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata Pendidikan Dasar

Adalah rata-rata jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas dibagi jumlah murid pendidikan dasar. Rasio guru per kelas diperoleh dengan membagi jumlah ruang kelas tersedia dengan jumlah guru yang tersedia.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan **ketersediaan tenaga pengajar per kelas**. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Data tersebut dapat dilihat pada 2.98 berikut ini.

Tabel 2.98
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar
Kota Palopo 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs, Swasta dan Negeri)					
1	Jumlah Guru Pendidikan Dasar (Orang)	2,660	1,972	1,833	1.811	1.878
2	Jumlah Kelas Pendidikan Dasar (Buah)	1,095	1,145	1,120	1.137	1.137
3	Rasio Guru Per Kelas Pendidikan Dasar (Guru/ Kelas)	2.43	1.72	1.64	1,59	1,01
4	Jumlah Murid Pendidikan Dasar (Orang)	29,903	29,258	28,856	29.142	28.875
5	Rasio Siswa Per Kelas Pendidikan Dasar (Siswa/ Kelas)	27.31	25.55	25.76	25,81	25,39
6	**Rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar per 10.000 (Guru/Siswa/Kelas)**	**0.81**	**0.59**	**0.57**	**0,55**	**0,57**

Sumber : Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo dalam Angka 2016-2020 dan Buku Potensi Wilayah Kota Palopo, Dinas Pendidikan Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) di tahun 2015, tersedia 1 orang (pembulatan 0.81) guru untuk setiap kelas pendidikan dasar, di tahun 2018, kondisinya tidak jauh berbeda yakni terdapat 1 orang guru (pembulatan 0.55) untuk setiap ruang kelas pendidikan dasar.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun 2015, jumlah rata-rata murid untuk setiap kelasnya pada pendidikan dasar sebanyak 28 orang per kelas (pembulatan 27.31), di tahun 2019 kondisinya juga tidak jauh berbeda yakni 25 orang siswa per kelasnya (pembulatan 25.39).

Sementara untuk rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar yang dihitung per 10.000 jumlah siswa pendidikan dasar, diperoleh dengan membagi nilai rasio jumlah Guru Per Kelas Pendidikan Dasar (rasionya) dengan jumlah siswa pendidikan dasar yang ada.

2.7.1.1.15. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata Pendidikan Menengah

Data tentang Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.99 dibawah ini.

Tabel 2.99
Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Menengah
Kota Palopo 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) Swasta & Negeri					
1	Jumlah Guru Pendidikan Menengah (Orang)	2.771	990	980	1.085	910
2	Jumlah Kelas Pendidikan Menengah (Buah)	466	477	462	465	465
3	Rasio Guru Per Kelas Pendidikan Menengah (Orang/ Kelas)	5.95	2.08	2.12	2,00	1,95
4	Jumlah Murid Pendidikan Menengah (Orang)	12.017	11.121	11.131	11.671	11.269
5	Rasio Siswa Per Kelas Pendidikan Menengah (Siswa/ Kelas)	26.8	24.6	25.5	26,06	24,23
6	**Rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata**	**4.77**	**1.77**	**1.80**	**1,61**	**1,73**

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Pendikan Menengah per 10000 (Orang/Kelas)					

Sumber : Diolah dari Data BPS Kota Palopo, Palopo dalam Angka 2016-2020 dan Buku Potensi Wilayah Kota Palopo, Dinas Pendidikan Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan menengah (SMA/SMK/Setara) di tahun 2015, tersedia 4-5 orang (pembulatan 4.77) guru untuk setiap kelas pendidikan dasar, di tahun 2018, tersedia 2 orang guru (pembulatan 1.61) untuk setiap ruang kelas pendidikan menengah.

Data diatas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2015, jumlah rata-rata murid untuk setiap kelasnya pada pendidikan menengah sebanyak 26-27 orang per kelas (pembulatan 26.8), di tahun 2018 kondisinya menjadi 26 orang siswa per kelasnya (pembulatan 26.0). Pada Tahun tahun 2019 kondisinya menjadi 24 orang per kelas.

2.7.1.1.16. Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Adalah indikator yang menggambarkan berapa besar penduduk usia 12 tahun pada tahun tertentu, yang berhasil menamatkan pendidikan sekolah dasarnya yang dinyatakan dalam persentase. Ini menunjukkan berapa banyak penduduk Kota Palopo yang berhasil menamatkan pendidikan dasar tingkat SD/MI nya.

2.7.1.1.17. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun, Perempuan dan Laki – Laki

Adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun sampai 24 tahunyang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.Melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.Angka melek huruf berkisar antara 0-100.

Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Contoh: AMH Kota Palopo Tahun 2015 sebesar 92,93 persen, artinya sekitar 93 persen penduduk di Kota Palopo yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.100 berikut ini.

Tabel 2.100
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun, Perempuan dan Laki – Laki Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	**Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang belum melek huruf**	**Orang**	**18**	**11**	**2**	**3**	
	Laki	*Orang*	*8*	*6*	*0*	*2*	*n/a*
	Perempuan	*Orang*	*10*	*7*	*2*	*1*	*n/a*
b	**Banyaknya penduduk usia 15-24 thn**	**Orang**	**39.414**	**40,279**	**41,073**	**50.903**	
	Laki	Orang	*18,457*	*18,896*	*19,273*	*20.336*	*n/a*
	Perempuan	Orang	*20,957*	*21,383*	*21,800*	*30.567*	*n/a*
c	**Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki**	**%**	**99.954**	**99.973**	**99.995**	**100,00**	
	Laki	%	99.96	99.97	100.00	100,00	n/a
	Perempuan	%	99.95	99.97	99.99	100,00	n/a

*Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2019, *Potensi Wilayah Palopo, Statistik Daerah Kota Palopo, Palopo Dalam Angka, Dinas Pendidikan Kota Palopo*

Data di atas menunjukkan bahwa AMH penduduk usia 15-24 tahun Kota Palopo pada tahun 2015 sebesar 99.954%, artinya sebanyak 99 dari 100 orang penduduk usia tersebut di Kota Palopo sudah mampu membaca dan menulis.

Kondisi ini lebih membaik di tahun 2018 dimana AMH penduduk usia 15-24 tahun telah mencapai 100% yang menunjukkan bahwa 100 orang dari 100 penduduk Kota Palopo yang berumur 15-24 tahun pada tahun 2018 sudah mampu membaca dan menulis.

2.7.1.1.18. Penduduk Berusia ≥15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.101 berikut ini.

Tabel 2.101
Persentase Penduduk Berusia ≥15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se Kota Palopo	Orang	117,728	118,993	123,206	126.709	n/a
b	Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun	Orang	119,862	123,168	126,430	129.955	n/a
c	**Penduduk Berusia ≥15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)**	**%**	**98.22**	**96,61**	**97.45**	**97,71**	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Statistik Daerah Kota Palopo, Buku Potensi Wilayah Kota Palopo tahun 2019 Dinas Pendidikan Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 masih terdapat 98.22% penduduk Kota Palopo yang berusia diatas 15 yang tidak buta aksara. Namun pada tahun 2019, angka ini menurun dimana hanya terdapat 97.71% penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf di Kota Palopo.

2.7.1.1.19. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Adalah indikator yang menggambarkan kualitas dari tenaga guru yang ada di Kota Palopo. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kualitas tenaga guru yang ada di Kota Palopo. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.102 dibawah ini.

Tabel 2.102
Persentase Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jml guru beijazah S1-D4	3.343	3.657	3.861	4.049	
2	Jml guru SD/Sederajat+SMP Sederajat +SMA Sederajat	5,431	2,962	2,813	2.742	1708 (sd & smp)
3	**Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi s1/d4**	**61.55**	**123.46**	**137.26**	**147,26**	

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan persentase guru yang berijazah S1-D4 di Kota Palopo meningkat tajam. Jika pada tahun 2015 berada pada angka 61.55%, tahun 2018 berada pada angka 147.26%. Ini menunjukkan bahwa sampai tahun 2018 semua guru yang berstatus ASN di Kota Palopo telah menyandang strata satu atau sarjana/diploma 4.

Kondisi pada tahun 2016, 2017 dan 2018 melebihi angka 100% sebab, terdapat guru yang menempuh strata satu kembali untuk menyesuiakan gelar pendidikan kesarjanaanya sesuai dengan mata pelajaran yang diampuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan para tenaga guru di Kota Palopo sudah sangat kompetitif.

2.7.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

2.7.1.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.

Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Data AKB Kota Palopo selama periode 2015 – 2019 disajikan pada Tabel 2.103 berikut ini.

Tabel 2.103
Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun pada 1 tahun tertentu)	1	6	6	3	2
2	Jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu	2.747	2.755	2.959	3.029	3.282
3	**Rasio Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup**	**0,36**	**2,18**	**2,03**	**0,99**	**0,61**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dari 1000 kelahiran hidup, ada 1 kasus kematian bayi sebelum usia tepat 1 tahun, kemudian 2016-2017 naik menjadi 6 kasus kematian bayi sebelum usia tepat 1 tahun, 2019 mengalami penurunan dalam 1000 kelahiran hidup.

2.7.1.2.2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (100-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Data AKHB dapat dilihat pada sajian Tabel 2.104 berikut ini.

Tabel 2.104
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Per 1000 kelahiran	100	100	100	100	100
2.	AKB per 1000	0,36	2,18	2,03	0,99	0,61
3	AKHB	**100**	**97,82**	**97,97**	**99,01**	**99,39**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 semua bayi hidup per 100 kelahiran hidup sampai tepat usia 1 tahun, kemudian 2016-2019 menjadi 1-2 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun.

2.7.1.2.3. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya.

Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.Misalkan perhitungan dari data Susenas 2004 mendapatkan perkiraan Angka

Kematian Balita sebesar 74 per 1000 balita, dengan referensi waktu Mei 2002. Artinya, pada tahun 2002 setiap 1000 baita (umur 0 sampai 4 tahum 11 bulan 29 hari) pada tahun 2002, 74 anak diantaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat lima tahun.

Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.105 dibawah ini.

Tabel 2.105
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kematian Balita (berumur kurang 5 tahun)	19	21	16	19	19
2.	Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	2.747	2.755	2.959	3.029	3.282
3	**Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup**	**6,92**	**7,62**	**5,41**	**6,27**	**5,79**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan, pada tahun 2015, dari 1000 balita yang lahir, ada 7 balita yang meninggal dan tidak mencapai umur tepat lima tahun. Dan tahun 2019 terdapat 6 kematian balita per 1000 kelahiran. Sesuai data dalam tabel di atas, perlunya meningkatkan program kesehatan terutama ibu, bayi dan balita mengingat adanya trend kenaikan jumlah balita yang meninggal per 1000 kelahiran hidup.

2.7.1.2.4. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh factor factor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Oleh karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.106 dibawah ini

Tabel 2.106
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup(AKABA)
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	17	21	16	11	14
2.	Jumlah Kelahiran Hidup pada Satu Tahun Tertentu	2.747	2.755	2.959	3.029	3.282
3	**Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup**	**6**	**7**	**5**	**3**	**4**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan, pada tahun 2015 dari 1000 kelahiran hidup, terdapat 6 kasus kematian neonatal pada bayi, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 4 kasus kematian neonatal pada bayi per 1000 kelahiran bayi hidup.

2.7.1.2.5. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Atau Maternal Mortality Ratio (MMR) a**dalah** Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. Data tersebut disajikan pada Tabel 2.107 berikut ini.

Tabel 2.107
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Ibu Hamil yang Meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	4	4	2	3	1
2.	Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah tertentu pada kurun waktu yang sama	2.747	2.755	2.959	3.029	3.282
3	**Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup**	**146**	**145**	**68**	**99**	**30**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan, dari 100.000 ibu melahirkan, terdapat 146 kasus kematian ibu atau Maternal Mortality Ratio (MMR) di Kota Palopo pada tahun 2015. Dan pada tahun 2019, terjadi penurunan menjadi 30 kasus kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan. Angka ini menunjukkan bahwa kasus kematian ibu karena melahirkan terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

2.7.1.2.6. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Dari rasio ini dapat diketahui banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh sebuah sarana pelayanan kesehatan. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Indikator tersebut harus disertai dengan kriteria standar dan target yag diinginkan. Kriteria standar untuk kecukupan tidak sama pada setiap wilayah, tergantung dari kebutuhan masyarakat dan jenis pelayanan. Karena itu sebaiknya kriteria standar ditentukan oleh masing-masing daerah.

Perhitungan rasio ini pada berbagai wilayah akan menghasilkan distribusi sarana kesehatan yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk menyusun rancana pemerataan saran pelayanan kesehatan. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.108 berikut ini.

Tabel 2.108
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Posyandu	147	147	149	149	149
2.	Jumlah Balita	15.275	16.178	16.963	17.355	17.724
3	**Rasio Posyandu Per Satuan Balita (1.000)**	**10**	**9**	**9**	**9**	**8**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, untuk melayani 1000 balita, tersedia sebanyak 10 posyandu. Namun pada tahun 2019, hanya tersedia 8 posyandu untuk melayani 1000 orang balita. Ini menggambarkan adanya peningkatan beban kerja posyandu di Kota Palopo.

2.7.1.2.7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui ketersediaan fasilitas kesehatan sepeti puskesmas, pustu dan poliklinik yang bisa disediakan pemerintah dalam melayani masyarakat. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin banyak faskes yang disiapkan pemerintah untuk melayani masyarakatnya. Untuk melihat data tersebut, disajikan pada Tabel 2.109 berikut ini.

Tabel 2.109
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jml	34	48	48	48	48
b.	Jumlah Penduduk	Jiwa	168.894	172.916	176.907	180.678	184614
c	**Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (10.000)**	**Rasio**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, untuk melayani 10.000 orang penduduk tersedia sebanyak 2 faskes (puskesmas, poliklinik dan pustu). Namun pada tahun 2019, sudah tersedia 3 fasilitas kesehatan. Ini menggambarkan adanya pengurangan beban kerja faskes di Kota Palopo.

2.7.1.2.8. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Indikator ini memberikan gambaran perkembangan beban kerja dan daya tampung rumah sakit yang ada di Kota Palopo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Data tersebut disajikan pada Tabel 2.110 berikut ini.

Tabel 2.110
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Rumah Sakit	5	6	7	8	8
2.	Jumlah Penduduk	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
3	**Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk (100.000)**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, untuk melayani penduduk sebanyak 100.000 orang hanya tersedia sebanyak 3 rumah sakit. Namun pada tahun 2016-2019 menjadi 4 rumah sakit per 100.000 penduduk. Ini menggambarkan adanya pengurangan beban kerja yang ada di rumah sakit Kota Palopo.

2.7.1.2.9. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menyusun rencana dalam penyediaan jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan, hingga pendidikan, latihan dan penyebaran tenaga kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dari rasio ini dapat diketahui jumlah penduduk yang harus dilayani oleh seorang tenaga kesehatan tertentu, karena itu rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan tenaga kesehatan untuk suatu jenis pelayanan kesehatan.

Data ini dapat dilihat pada Tabel 2.111 berikut ini.

Tabel 2.111
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah dokter	Orang	82	83	89	112	117
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
c	**Rasio Dokter Persatuan Penduduk**	**Per 10.000**	**5**	**5**	**5**	**6**	**6**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota PalopoTahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, untuk melayani 10.000 jiwa penduduk, Pemerintah Kota Palopo bisa menyiapkan 5 orang dokter atau 1 dokter harus melayani sebanyak 2000 penduduk. Namun pada tahun 2019, meningkat menjadi tersedia 6 orang dokter untuk melayani 10.000 jiwa penduduk Kota Palopo. Ini memberikan informasi bahwa beban kerja tenaga dokter di Kota Palopo sejak 2019 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2015. Ini menunjukkan adanya potensi peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan di Kota Palopo.

2.7.1.2.10. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Adalah indikator yangmenunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga medis yang siap melayani per 1000 penduduk di Kota Palopo. Ini menggambarkan kondisi beban kerja yang dialami tenaga medis. Semakin tinggi nilai rasio indikator ini maka semakin ringan beban kerja para tenaga medis tersebut. Data tersebut disajikan pada Tabel 2.112 dibawah ini.

Tabel 2.112
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah Tenaga Medis	Orang	81	82	89	93	117
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
c	**Rasio tenaga Medis Persatuan Penduduk (10.000)**	**Rasio**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2018, untuk melayani 10.000 jiwa penduduk, Pemerintah Kota Palopo bisa menyiapkan 5 orang tenaga medis. Namun pada tahun 2019, tersedia 6 orang tenaga medis untuk melayani 10.000 jiwa penduduk Kota Palopo.

2.7.1.2.11. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil ibu bersalin, dan ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/ atau bayi, Komplikasi dalam kehamilan, dsb. Semakin tinggi angka indikator ini, menggambarkan tingkat penanganan kesehatan ibu hamil dan bayi yang semakin baik. Data ini dapat dilihat pada Tabel 2.113 berikut ini.

Tabel 2.113
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jml	446	472	457	465	545
2.	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Jml	601	617	647	639	632
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	**%**	**74,21**	**76,49**	**70,63**	**72,77**	**86,23**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat penanganan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Palopo dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015, dari 100 kasus komplikasi kebidanan sebanyak 75 kasus berhasil ditangani. Dan pada tahun 2019 sebanyak 87 kasus berhasil ditangani per 100 kasus komplikasi kebidanan. Ini mengindikasikan membaiknya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil terutama cakupan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

2.7.1.2.12. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Adalah Perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator yang digunakan adalah proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih.. Semakin banyak persalinan yang ditolong dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu melahirkan. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.114 berikut ini.

Tabel 2.114
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.764	2.767	2.956	3035	3279
2.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wiayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Jml	2.870	2.944	3.086	3035	3225
3	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**	**%**	**96,31**	**93,99**	**95,79**	**100**	**101.67**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota PalopoTahun 2020

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Palopo yaitu 100 persen pada tahun 2015 dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 2.764 ibu bersalin (jiwa), dan tahun 2019 sebanyak 3.279 ibu bersalin (jiwa). Sedangkan pada tahun 2019, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu 101.67 persen dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 3.279 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di Kota Palopo sudah ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

2.7.1.2.13. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT.Untuk anak sekolah tingkat dasar rneliputi 1 dosis DT, I dosis campak dan 2 dosis TT. Semakin tinggi persentase inidkator ini semakin baik kinerja UCI. Untuk melihat data ini dapat dilihat pada Tabel 2.115 berikut ini.

Tabel 2.115
Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah desa/kelurahan UCI	Jml	46	47	46	46	45
2.	Jumlah seluruh desa/kelurahan	Jml	48	48	48	48	48
3	**Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**	**%**	**95,83**	**97,92**	**95,83**	**95,83**	**93,75**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota PalopoTahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 cakupan 95,83 persen kelurahan yang ada di Kota Palopo telah memenuhi UCI dimana sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bayi, ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah pada tingkat dasar, dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 93,75.

2.7.1.2.14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk di Kota Palopo yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 100 persen sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.116 dibawah ini.

Tabel 2.116
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	11	3	4	4	0
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	11	3	4	4	0
3	**Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.2.15. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Perkapita/Hari)

Indikator ini memberikan gambaran proporsi dan kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan secara cukup dan bergizi. Umumnya masyarakat miskin belum mampu memenuhi konsumsi pangan minimum baik dari aspek kuantitas maupun kualitas gizi. Indikator ini erat kaitannya dengan aspek kemiskinan. Semakin tinggi angka indikator ini, artinya semakin banyak penduduk yang kekurangan pangan karena kesulitan mengakses kebutuhan dasar akibat aspek ekonomi. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.117 berikut ini.

Tabel 2.117
Penduduk yang Tingkat Konsumsinya Lebih Rendah dari 2.100 kkal/kapita/hari Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 kkal/kapita/hari (Jumlah Penduduk Miskin)						
		Orang	14,510	15,020	15,440	15.428	14370
2	Jumlah Balita (Jumlah Penduduk Berumur di Bawah Lima Tahun)						
		Orang	15.275	16.178	16.963	17.355	17.724
3	**Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)**						
		%	**95.0**	**92.8**	**91.0**	**87,73**	**81.08**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota PalopoTahun 2020

Data di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 balita per 100 balita penduduk miskin, 95 balita memiliki asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum. Namun 2019, kondisinya lebih baik, dimana hanya ada 81 orang balita dari 100 balita keluarga miskin yang tingkat konsumsi kalorinya berada di bawah minimum.

2.7.1.2.16. Persentase Anak Usia 1 (satu) Tahun yang Diimunisasi Campak

Data tentang Persentase Anak Usia 1 (satu) Tahun yang Diimunisasi Campak Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 1.118 dibawah ini.

Tabel 2.118
Persentase Anak Usia 1 (Satu) Tahun yang Diimunisasi Campak Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah anak yang usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun	Orang	3.020	3.081	3.166	3.237	3.892
2.	Jumlah anak usia 1 tahun pada	Orang	2.747	2.755	2.959	3.029	3.952

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
	wilayah dan tahun yang sama						
3	**Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak**	**%**	**109,94**	**111,83**	**107**	**106,87**	**98,48**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan terjadinya penurunan persentase bayi berumur di bawah satu tahun yang memperoleh imunisasi campak di Kota Palopo sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 dari 100 balita rata-rata hanya 98 orang yang mendapatkan imuniasi campak. Ini menunjukkan bahwa kinerja imunisasi perlu ditingkatkan. Misalnya melalui media sosialisasi yang menegaskan keamanan, kehalalan dan arti pentingnya imuniasi bagi para balita.

2.7.1.2.17. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

AFP (Acute Flaccid bahwa kasus AFP bukanlah kasus polio, melainkan Paralysis) merupakan gejala kelumpuhan pada anak yang berumur < 15 tahun yang bersifat layuh/flaccid dan terjadi secara mendadak (akut) bukan karena rudapaksa/trauma/kecelakaan. Untuk membuktikan bahwa virus polio liar sudah tidak ada lagi di Kota Palopo, maka harus ditemukan gejala gejala yang menyerupai penyakit polio.

Dalam penilaian kinerja surveilans AFP, terdapat indikator NonPolio AFP rate > 2 per 100.000 anak usia kurang dari 15tahun per tahun dan spesimen adekuat > 80 %. Non PolioAFP rate merupakan target penemuan kasus per tahun. Jadi apabila suatu wilayahmemiliki jumlahpenduduk <15 tahun sebanyak 500.000, maka wilayahtersebut harus dapat menemukan minimal 10 kasus AFPdalam satu tahun. Jika target penemuan belum dapatdipenuhi, dapat dikatakan bahwa kinerja surveilans AFPbelum baik, karena masih dimungkinkan adanya kasusyang belum terjaring. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.119 dibawah ini.

Tabel 2.119
Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan	Kasus	1	1	0	1	0
2.	Jumlah penduduk < 15 tahun	Orang	49.748	48.835	48.835	51.780	54.522
3	**Non polio AFP rate per 100.000 penduduk**	**Rasio**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dari 100.000 penduduk Kota Palopo survey AFP hanya menemukan 2 kasus non polio AFP Rate, bahkan 2019 sama sekali tak ada. Ini menunjukkan kinerja surveilance Non Polio AFP Rate di Kota Palopo cukup baik.

Ini jika merujuk pada indikator keberhasilan surveilance AFP yang menyebutkan bahwa daerah dengan jumlah penduduk <15 tahun sebanyak 500.000 orang, maka wilayah tersebut harus dapat menemukan minimal 10 kasus AFP dalam satu tahun. Dengan kondisi Kota Palopo yang hanya memiliki jumlah penduduk dibawah 15 tahun berkisar 54 ribu orang pada tahun 2019, target penemuan AFP sebanyak 0 kasus dan itu tercapai. Kondisi ini juga memberikan gambaran, bahwa kemungkinan penyebaran polio atau gejala lainnya yang mirip polio di Kota Palopo sangat kecil.

2.7.1.2.18. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah penyakit infeksi yang menyerang paru, sehingga menyebabkan kantung udara di dalam paru meradang dan membengkak. Kondisi kesehatan ini sering kali disebut dengan paru-paru basah, sebab paru bisa saja dipenuhi dengan air atau cairan lendir.Kondisi paru-paru basah ini dapat dialami oleh siapa pun. Namun pneumonia pada anak bisa sangat berbahaya dan menyebabkan kematian. Bahkan, badan kesehatan dunia (WHO) menyebutkan jika penyakit pneumonia adalah penyebab 16% kematian balita di dunia pada tahun 2015. Sementara, di Indonesia sendiri, dilansir dari CNN, penyakit pneumonia pada anak

menyebabkan 2-3 balita yang meninggal setiap jamnya. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.120.

Tabel 2.120
Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun	Orang	132	51	105	171	163
2.	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	1.528	1.618	1.696	1.736	1.772
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	**%**	**8,64**	**3,15**	**6,19**	**9,85**	**9,20**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Meskipun persentasenya meningkat dari tahun ke tahun, tabel di atas menunjukkan cakupan penanganan balita yang diperkirakan menderita penyakit berbahaya seperti pneumonia di Kota Palopo masih sangat rendah. Pada tahun 2015, kinerjanya hanya berada pada angka 8,64% meskipun meningkat pada tahun 2018 yang mencapai 9,85%. Artinya pada tahun 2018, dari 100 kasus pnemunia, rata-rata hanya ditangani hanya 9-10 kasus. Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas terkait bersama stake holder terkait perlu meningkatkan kinerja untuk menangani kasus pneumonia ini.

2.7.1.2.19. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang sangat mudah sekali dalam penularannya. Seperti halnya penyakit flu biasa, dalam penyebaranya TBC juga melalui udara. Penyakit tuberkolosis sangat mematikan apabila tidak segera dilakukan penanganan. Di Indonesia, penanganan sejak dini sudah dilakukan dengan memberikan paket imunisasi BCG pada balita. Namun demikian, belum sepenuhnya Indonesia 100% terbebas dari penyakit ini. Data ini dapat dilihat pada Tabel 2.121 berikut ini.

Tabel 2.121
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 bulan	Orang	202	241	243	250	415
2.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	Orang	242	222	176	301	349
3	**Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA**	**%**	**84,16**	**108,56**	**138,07**	**83,06**	**119**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa meskipun jumlah penderita TBC BTA naik hampir setiap tahunnya, cakupan pelayanan dan pengobatan terhadap terhadap para penderita juga terus meningkat. Ini menunjukkan kinerja pelayanan untuk menangani kasus atau penderita TBC BTA sudah cukup baik. Angkanya melebih 100% sebab juga terdapat pengidap TBC BTA dari luar Kota Palopo namun mendapat penaganan medis di Kota Palopo, sebagai salah satu daerah yang memiliki pusat layanan rujukan.

2.7.1.2.20. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Adalah indikator yang memnggambarkan tingkat penyebaran penyakit atau pengidap TBC paru per 100.000 penduduk Kota Palopo. Indikator ini untuk mengetahui perkembangan jumlah pengidap penyakit TBC di Kota Palopo. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.122 berikut ini.

Tabel 2.122
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Orang	374	354	430	250	450
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu waktu yang sama	Orang	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
3	**Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**	**Orang**	**221**	**205**	**243**	**138**	**225**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dari 100.000 penduduk Kota Palopo, terdapat 221 orang yang terjangkit atau menjadi pengidap penyakit TBC, jumlah ini meningkat pada tahun 2019 menjadi 225 orang per 100.000 penduduk. Olehnya program program baik yang sifatnya pencegahan maupun pengobatan, mestinya menjadi fokus penanganan pemerintah Kota Palopo melalui Dinas terkait pada tahun tahun mendatang.

2.7.1.2.21. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Adalah indikator yang menggambarkan kasus kematian pengidap TBC paru per 100.000 penduduk Kota Palopo. Semakin tinggi angka kasus ini semakin tinggi tingkat kematian karena penyakit TBC. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.123 berikut ini.

Tabel 2.123
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pasien TB yang meninggal	Orang	0	0	0	0	0
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
3	**Presentase tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**	**Orang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Meski secara jumlah, pengidap TBC di Kota Palopo meningkat setiap tahunnya, namun kematian yang disebabkan oleh karena penyakit ini sepanjang 2015-2019 sama sekali tidak ada. Ini menunjukkan bahwa tindakan pengobatan yang dilaksanakan cukup efektif dalam mengobati para pasien. Kondisi ini juga menunjukkan pengobatan bagi para pasiennya dilakukan dengan standar operasional yang baik, sehingga kematian yang disebabkan oleh penyakit ini di Kota Palopo nihil.

2.7.1.2.22. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

DOTS merupakan strategi penanggulangan Tuberkulosis di Rumah Sakit melalui pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung. DOTs adalah tempat untuk konsultasi pasien TB. Penanggulangan Tuberkulosis merupakan program nasional yang harus dilaksanakan di seluruh Unit Pelayanan Kesehatan termasuk Rumah Sakit. Khusus bagi pelayanan pasien tuberkulosis di Rumah Sakit dilakukan dengan strategi DOTS.

Hal ini memerlukan pengelolaan yang lebih spesifik, karena dibutuhkan kedisplinan dalam penerapan semua standar prosedur operasional yang ditetapkan, disamping itu perlu adanya koordinasi antar unit pelayanan dalam bentuk jejaring serta penerapan standar diagnosa dan terapi yang benar, dan dukungan yang kuat dari jajaran direksi rumah sakit berupa komitmen dalam pengelolaan penanggulangan TB.Semakin tinggi nilai indikatornya, menunjukkan bahwa kinerja program DOTS semakin baik. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.124 berikut ini.

Tabel 2.124
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Orang	91	354	430	250	415
2.	Jumlah pasien baru TB BTA paru yang diperkirakan ada dalam wilayah tertentu	Orang	242	222	176	301	454
3	**Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS**	**%**	**37,60**	**159,46**	**244,32**	**83,06**	**91,41**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa kinerja penanganan pasien TB dalam program DOTs sejak 2015 sampai dengan 2019 cenderung terus membaik. Tahun 2015, hanya 37.60% pasien TB BTA dalam program DOTS mendapatkan pengobatan dan 2019 angka menjadi 91.41% pasien TB BTA yang memperoleh pengobatan melalui program DOTS.

2.7.1.2.23. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Fokus utama DOTS adalah penemuan dan penyembuhan pasien, prioritas diberikan kepada pasien TB tipe menular. Strategi ini akan memutuskan penularan TB dan dengan demikian menurunkan insiden TB di masyarakat. Menemukan dan menyembuhkan pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TB. Semakin tinggi nilai indikatornya, menunjukkan bahwa kinerja program DOTS semakin baik. Data tersebut disajikan pada Tabel 2.125 berikut ini.

Tabel 2.125
Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang sembuh di suatu wilayah selama 1 tahun	Orang	121	159	154	114	66
2.	Jumlah pasien baru TB BTA paru yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama	Orang	202	241	243	250	166
3	**Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS**	**%**	**59,90**	**65,98**	**63,37**	**45,60**	**39,76**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa kinerja program DOTS di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Kondisi ini mengindikasikan cukup banyaknya pasien TB yang tidak menjalankan prosedur pengobatan TB dalam program DOTS secara baik. Ini bisa dipengaruhi banyak faktor, terutama faktor internal pasien atau pengidap TB. Olehnya diperlukan advokasi dan sosialisasi serta edukasi yang lebih intensi dalam meningkatkan motivasi untuk sembuh serta mengikuti program pengobatan secara teratur bagi pasien atau pengidap TB.

2.7.1.2.24. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2015 yaitu 280 kasus, yang ditangani sesuai SOP berjumlah 280 kasus. Pada tahun 2019, jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan dan yang ditangani sesuai SOP sebanyak 105 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mencapai 100 persen, hal ini dipengaruhi oleh keaktifan petugas kesehatan di masing – masing wilayah kerja. Data tersebut disajikan pada Tabel 2.126 dibawah ini.

Tabel 2.126
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderta Penyakit DBD
Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun	Orang	280	366	74	121	105
2.	Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah dalam kurun waktu yang sama	Orang	280	366	74	121	105
3	**Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.2.25. Penderita Diare yang Ditangani

Untuk melihat data Penderita Diare Yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.127 berikut ini.

Tabel 2.127
Penderita Diare Yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2015 –2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu 1 tahun (*)						
	Orang	3.441	3.384	3.287	3.736	3.736
Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) (**)						
	Orang	344	338	328	373	373
Jumlah Penduduk						
	Jiwa	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
Penderita diare yang ditangani						
	%	**0.000061**	**0.000058**	**0.000057**	**0.000058**	**0.000054**
	Per 100.000	**6**	**6**	**6**	**6**	**5**

Sumber Data : (*)Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020, (**) Rumus Permendagri 86 Tahun 2017, (***) BPS Kota Palopo tahun 2019

Tabel di atas menggambarkan tingkat penanganan diare di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 cenderung stagnan. Jika pada tahun 2015, dari 100.000 penduduk Kota Palopo ditangani sebanyak 6 kasus diare, pada 2019, diare yang tertangani 5 kasus diare. Ke depan angka yang menjadi target persentase indikator ini harus ditekan.

2.7.1.2.26. Angka Kejadian Malaria

Untuk melihat data Angka Kejadian Malaria Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.128 berikut ini.

Tabel 2.128
Angka Kejadian Malaria Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penduduk yang	Orang	191	287	226	182	114

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
	menderitra malaria pada tahun tertentu						
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
3	**Penderita malaria yang ditangani per 100.000**	**Per 100.000**	**113**	**166**	**128**	**101**	**62**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2015, dari 100.000 penduduk Kota Palopo terdapat sebanyak 113 kejadian malaria, tahun 2016 naik 166, tahun 2017 turun menjadi 128, tahun 2018 tetap turun menjadi 101 kejadian, jumlah menurun sampai tahun 2019. Ini menunjukkan kinerja penanggulangan angka malaria di Kota Palopo mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik.

2.7.1.2.27. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Untuk melihat data Tingkat Kematian Akibat Malaria Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.129 berikut ini.

Tabel 2.129
Tingkat Kematian Akibat Malaria Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kematian tersangka malaria	Orang	0	0	0	0	0
2.	Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun	Orang	191	287	226	182	114
3	**Tingkat kematian akibat malaria (1.000)**	**Per 1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kematian akibat kasus malaria di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 per 1000 penduduk nihil. Ini menggambarkan bahwa penanganan pasien kasus malaria di Kota Palopo berhasil.

2.7.1.2.28. Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida

Untuk melihat data Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.130 berikut ini.

Tabel 2.130
Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida
Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur menggunakan kelambu yang sudah diproteksi dengan insektisida	Orang	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Jumlah balita	Orang	15.275	16.178	16.963	17.355	17.724
3	**Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.2.29. Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat

Untuk melihat data Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.131 berikut ini.

Tabel 2.131
Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun	Orang	5	24	34	10	30
2.	Jumlah penderita positif dalam 1 tahun	Orang	5	24	34	10	30
3	**Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.2.30. Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi

Prevalensi adalah seberapa sering suatu penyakit atau kondisi terjadi pada sekelompok orang, dalam hal ini adalah HIV AIDS. Atau dengan kata lain merupakan gambaran tentang frekwensi penderita lama dan baru yang ditemukan selama jangka waktu tertentu terhadap sekelompok populasi dalam waktu tertentu. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.132 berikut ini.

Tabel 2.132
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi
Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	6	58	117	128	80
2.	Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
3	**Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi**	**%**	**0,000036**	**0,000335**	**0,000661**	**0,000708**	**0,000433**
4	**Rasio per 100.000**	**per 100.000**	**4**	**34**	**66**	**71**	**43**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa periode 2015-2018 jumlah pengidap HIV AIDS di Kota Palopo meningkat dan tahun 2019 sudah mengalami penurunan. Jika 2015 hanya sebanyak 6 orang, tahun 2019 jumlahnya mencapai 80 orang. Dalam rasio per 100.000 penduduk, pada tahun 2015 terdapat rata-rata 4 kasus HIV AIDS, dan meningkat menjadi rata-rata 43 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2019. Kondisi ini memerlukan perhatian serius pemerintah sehingga jumlahnya setiap tahun seharusnya bisa ditekan.

2.7.1.2.31. Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir

Untuk melihat data Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.133 berikut ini.

Tabel 2.133
Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir
Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Banyaknya penduduk usia 15 – 24 tahun yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
2.	Banyaknya penduduk usia 15 – 24 tahun yang berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
3	**Penggunaaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir**	**%**	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota PalopoTahun 2020

2.7.1.2.32. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Indikator ini menggambarkan cakupan edukasi, sosialisasi tentang bahaya HIV/ AIDS di kalangan 15-24 tahun. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.134 dibawah ini.

Tabel 2.134
Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun yang mempunyai pengetahuan komperehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu	Orang	0	548	0	0	0
2.	Jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama (*)	Orang	39.414	40.279	40.279	41.073	41.727
3	**Proporsi jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun yang memiliki pengetahuan komperehensif tentang HIV/AIDS**	**%**	**0,00**	**1,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020, (*) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Ini juga menunjukkan pelaksanaan program kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan edukasi publik terutama bagi usia 15-24 tahun oleh Pemerintah Kota Palopo belum secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan ini kadang dilaksanakan dan kadang pula tidak dilaksanakan. Pada tahun 2016, dari 10.000 penduduk usia 15-24 tahun hanya 136 orang yang mendapatkan sosialisasi HIV AIDS. Sementara disisi lain jumlah usia 15-24 tahun yang menjadi fokus sasaran

edukasi, jumlahnya terus meningkat. Ini menjadi potensi meningkatnya ancaman bagi prevalensi HIV AIDS di Kota Palopo.

2.7.1.2.33. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Informasi dari Dinas Kesehatan Kota Palopo menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019, tidak ada pasien miskin yang ditolak oleh fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palopo. Pasien miskin yang berobat di fasilitas kesehatan di Kota Palopo telah ditanggung oleh Pemerintah Kota Palopo. Sebab sejak tahun tersebut Pemerintah Kota Palopo membayar premi asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin Kota Palopo.

2.7.1.2.34. Cakupan Kunjungan Bayi

Indikator ini memggambarkan tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada terutama bagi bayi yang baru lahir. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan bayi yang ada. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.135 berikut ini.

Tabel 2.135
Cakupan Kunjungan Bayi Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah kunjungan	2.596	2.638	2.982	3.029	3274
2.	Seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	2.747	2.755	2.959	3.029	3282
3	**Cakupan kunjungan bayi**	**%**	**94,50**	**95,75**	**100,78**	**100,00**	**99,76**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan rentang waktu 2015-2019, tingkat kunjungan bayi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan standar kesehatan, semakin membaik. Ini terkait erat dengan kesadaran masyarakat untuk memantau perkembangan kesehatan bayinya di sejumlah pusat kesehatan yang ada. Jumlah kunjungan bayi setiap tahunnya terus meningkat jika 2015 hanya sebanyak 2.596 tahun 2019 mencapai 3.274 kunjungan atau 99,76 % dari jumlah bayi yang lahir.

2.7.1.2.35. Cakupan Puskesmas

Untuk melihat data Cakupan Puskesmas Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.136 berikut ini.

Tabel 2.136
Cakupan Puskesmas Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah puskesmas	12	12	12	12	12
2.	Jumlah seluruh kecamatan	9	9	9	9	9
3	**Cakupan puskesmas (%)**	**133,33**	**133,33**	**133,33**	**133,33**	**133,33**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kota Palopo memiliki minimal satu pusat kesehatan masyarakat. Bahkan sejak 2015-2019 ada kecamatan yang memiliki lebih dari satu puskesmas. Kondisi ini tentu diharapkan bisa meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Palopo.

.

2.7.1.2.36. Cakupan Pembantu Puskesmas

Untuk melihat data Cakupan Pembantu Puskesmas Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.137 berikut ini.

Tabel 2.137
Cakupan Pembantu Puskesmas Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pembantu puskesmas	22	22	29	30	30
2.	Jumlah seluruh kelurahan	48	48	48	48	48
3	**Cakupan pembantu puskesmas (%)**	**45,83**	**45,83**	**60,42**	**62,50**	**62,50**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2015 ada 22 di Kota Palopo yang memiliki puskesmas pembantu. kondisi ini berlangsung sampai pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 naik menjadi 29, tahun 2018-2019 menjadi 30 puskesmas pembantu. Cakupan pembantu puskesmas yang ada di Kota Palopo pada tahun 2015 45,83% menjadi 62,50% pada tahun 2019. Ini menunjukkan semakin banyaknya jumlah puskesmas pembantu yang diharapkan bisa memperluas akses masyarakat terhadap sarana kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

2.7.1.2.37. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan semakin baiknya kesadaran ibu hamil untuk emmeriksakan kesehatan dirinya dan calon bayinya pada sarana kesehatan yang ada. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.138 dibawah ini.

Tabel 2.138
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan ante-natal K4 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.774	2.796	3.001	3.004	3.159
2.	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	3.007	3.083	3.234	3.193	3.159
3	**Cakupan kunjungan ibu hamil K4**	**%**	**92,25**	**90,69**	**92,80**	**94,08**	**100**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan dirinya dan kesehatan bayinya semakin baik dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2015 sebesar 92,25 % pada tahun 2019 meningkat menjadi 100 %.

2.7.1.2.38. Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Masa nifas merupakan masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandung kembali seperti semula sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 – 8 minggu atau dalam agama islam disebut 40 hari. Tujuan dari masa nifas yaitu untuk mengetahui kesejahtraan ibu dan bayi, baik dari kesehatan, kebersihan , nutrisi, pemberian ASI, tanda bahaya masa nifas, perdarahan, cara mencegah hipotermi pada bayi.Semakin tinggi nilai indikatornya semakin baik kesadaran ibu yang sudah melahirkan terhadap status kesehatan dirinya dan bayinya usai melahirkan. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.139 berikut ini.

Tabel 2.139
Cakupan Pelayanan Nifas Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.635	2.743	2.816	3.177	3.210
2.	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	2.870	2.944	3.087	3.158	3.225
3	**Cakupan pelayanan nifas**	**%**	**91,81**	**93,17**	**91,22**	**100,60**	**99,53**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan tingkat kesadaran ibu usai melahirkan sepanjang 2015-2019 sudah cukup baik. Meski demikian data ini juga mengungkapkan masih adanya ibu yang usai melahirkan namun tidak lagi memanfaatkan pelayanan kesehatan nifas. Olehnya masih dibutuhkan sosialisasi dan edukasi sehingga kesadaran ibu yang telah melahirkan untuk memantau perkembangan kesehatannya semakin baik di tahun mendatang.

2.7.1.2.39. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Menurut World health Organization (WHO) Neonatus adalah bayi baru lahir hingga berumur 28 hari. Sementara menurut kemenkes 2015, adalah bayi yang baru lahir berusia 0-28 hari sejak dilahirkan. Umur ini sangat rentan terhadap berbagai macam gangguan kesehatan. Olehnya penanganan untuk mengatasi atau mencegah munculnya berbagai macam ancaman gangguan kesehatan sangat penting dilaksanakan. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.140 berikut ini.

Tabel 2.140
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	319	310	301	288	376
2.	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	412	413	444	454	492
3	**Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)**	**77,43**	**75,06**	**67,79**	**63,44**	**76,42**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa 2015-2019 jumlah bayi yang lahir di Kota Palopo dengan kondisi neonatus beragam mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2015 hanya 319, tahun 2019 sebanyak 376. Kondisi ini tentu membutuhkan penanganan yang serius terutama pada aspek pencegahan, dimana mengedukasi ibu hamil menjadi point penting dalam upaya tersebut. Melihat persentase penanganan, kinerja indikator ini cukup baik ditandai dengan meningkatnya angka kinerja penanganan bayi dengan komplikasi neonatus.

2.7.1.2.40. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Untuk melihat data Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.141 berikut ini.

Tabel 2.141
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	Orang	5.390	7.248	8.431	8.486	10.418

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.	Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	12.543	12.861	13.487	17.355	14.093
3	**Cakupan pelayanan anak balita**	**%**	**42,97**	**56,36**	**62,51**	**48,90**	**73,92**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa 2015-2019 cakupan pelayanan anak balita menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Per tahun terjadi peningkatan pelayanan terhadap anak balita. Ini menggambarkan semakin baiknya kesadaran para orang tua dalam memeriksakan kesehatan anak balitanya.

2.7.1.2.41. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan Keluarga Miskin

Indikator ini hanya mengukur pada rumah tangga miskin. Kemiskinan umumnya menjadi salah satu dari sekian banyak penyebab anak usia 6-12 tahun di keluarga miskin tidak pernah mendapatkan makanan pendamping ASI, sehingga terjadi kerawanan gizi. Olehnya pemerintah melaksanakan program pemberian makanan pendamping ASI bagi rumah tangga miskin. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.142 berikut ini.

Tabel 2.142
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan Keluarga Miskin Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP ASI	Orang	99	564	507	339	290
2.	Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	Orang	99	564	507	339	290
3	**Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Data diatas menunjukkan bahwa 2015-2019, semua anak berumur 6-12 tahun yang lahir dari keluarga miskin di Kota Palopo menerima makanan pendamping ASI. Ini membuktikan bahwa komitmen Pemkot Palopo untuk memperhatikan gizi bagi masyarakat miskin cukup baik.

2.7.1.2.42. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Indikator ini menunjukkan langkah dan cakupan kemampuan pemerintah daerah dalam memeriksa status kesehatan seluruh siswa sekolah dasar pada tahun tertentu. Semakin tinggi angka indikator ini semakin baik cakupan pemeriksaan siswa sekolah yang ada setingkat sekolah dasar. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.143 berikut ini.

Tabel 2.143
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah murid SD kelas 1 dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	3.188	2.660	2.790	2.619	2.981
2.	Jumlah murid SD kelas 1 dan setingkat di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	3.368	2.692	2.861	2.690	3.044
3	**Cakupan penjaringan kesehatan**	**%**	**94,66**	**98,81**	**97,52**	**97,36**	**97,93**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
	siswa SD dan setingkat						

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa 2015-2019, sebagian besar siswa sekolah dasar di Kota Palopo setiap tahunnya diperiksa status kesehatannya. Cakupan pemeriksaan mencover 97,93 % siswa sekolah dasar yang ada tahun 2019. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Palopo menciptakan generasi yang sehat sejak pendidikan dasar.

2.7.1.2.43. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pelayanan bagi masyarakat miskin di Kota Palopo 2015-2019 telah mencakup semua pasien dari golongan tidak mampu. Besarnya persentase yang melebih angka 100% disebabkan sangat banyaknya pasien masyarakat miskin dari kabupaten di sekitar Kota Palopo yang memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan rujukan yang ada di Kota Palopo yakni RSUD Sawerigading Rampoang.

2.7.1.2.44. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 (Satu) yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Untuk melihat data Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 (Satu) yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.148 berikut ini.

Tabel 2.144
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 (Satu) yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pelayanan gawat darurat level 1	6	6	7	8	9
2.	Jumlah RS	6	6	7	8	9
3	**Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.2.45. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Indikator ini menggambarkan kecepatan pemerintah kota palopo merespon terjadinya sebuah Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah Kota Palopo. Kecepatan merespon sebuah KLB adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatasi KLB di sebuah daerah.

Kejadian Luar Biasa atau KLB merupakan suatu status yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelompokkan suatu peristiwa atau penyait tertentu. Biasa nya penyakit tersebut lebih berpengaruh pada penyakit yang biasanya terjadi.Sehingga KLB dapat didefinisikan sebagai suatu peningkatan kasus yang berbuhungan dengan penyakit, yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.145 berikut ini.

Tabel 2.145
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah KLB di desa/kelurahan ditangani > 24 jam dalam periode tertentu	Kasus	2	4	0	3	0
2.	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	Kasus	2	4	0	3	0
3	**Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan**	**%**	**100**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
	penyelidikan epidemiologi < 24 jam						

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palopo memberikan respon yang sangat baik terhadap adanya KLB di wilayah administrasi Kota Palopo. Namun yang mesti diwaspadai adalah terjadinya KLB hampir setiap tahun di Kota Palopo. Hanya pada tahun 2017 dan tahun 2019 tidak terjadi KLB.

2.7.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.7.1.3.1. Pekerjaan Umum

2.7.1.3.1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jumlah panjang jalan yang dimaksud dalam indicator ini, adalah total keseluruhan panjang jalan yang berada di wilayah Kota Palopo termasuk jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara yang ada

Kondisi jaringan jalan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan. Salah satunya adalah Jalan Kondisi Baik (B) yang didefinisikan sebagai semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6 %), sehingga arus lalu -lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Data tersebut disajikan pada Tabel 2.146 berikut ini.

Tabel 2.146
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berkondisi Baik Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang Jalan Berkondisi Baik (Km)	279.1	279.1	296.68	342.09	350.03
b.	Panjang Jalan Keseluruhan (Km)	502	502	503.16	503.16	503.16
c	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)**	**55.60**	**55.6**	**58.96**	**67.99**	**69.57**

Sumber data : Palopo Dalam Angka, 2020

2.7.1.3.1.2. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Jumlah panjang jalan yang dimaksud dalam indicator ini, adalah total keseluruhan panjang jalan yang berada di wilayah Kota Palopo termasuk jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara yang ada.

Jaringan yang baik sangat mempengaruhi mobilitas dan aksesibilitas pergerakan di dalam jaringan tersebut.Pendekatan yang biasanya digunakan untuk perencanaan jaringan adalah pendekatan ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan nasional dan tidak boleh melupakan hambatan phisik yang mungkin ditemui.

Di dalam sektor transportasi aksesibilitas adalah ukuran kemudahan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga dikatakan kalau aksesibilitas tinggi adalah bila alternatif rute menuju suatu tempat banyak sehingga dapat dicapai dengan gampang dari beberapa tujuan. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.147 dibawah ini.

Tabel 2.147
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah panjang jalan (Jalan Negara + Jalan Propinsi + Jalan Kewenangan Pemkot)	502	502	503.16	503.16	503.16
b.	Jumlah penduduk	168894	172.916	176.907	180.678	184.614
c	**Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (per 10.000)**	**30**	**29**	**28**	**28**	**27**

Sumber Data : BPS Palopo Dalam Angka 2020

2.7.1.3.1.3. Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 (empat)

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sementara pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (UU No 1 Tahun 2011).

Indikator ini menggambarkan kondisi jalan untuk mengakses pemukiman masyarakat yang memperlihatkan konektifitas dan aksesibilitas sebuah kwasan pemukiman penduduk. Semakin besar nilai indikator ini semakin sulit pula aksesibilitas wilayah maupun transportasi penduduk yang bermukim di daerah tersebut.

2.7.1.3.1.4. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Data panjang jalan dalam indicator ini dibatasi pada ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo, tidak termasuk jalan kewenangan Propinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara. Jalan berkondisi baik dikategorikan jika mampu dilewati kendaraan roda empat dengan
kecempatan di atas 40 Km/Jam. Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.148 berikut ini.

Tabel 2.148
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang Jalan Berkondisi Baik yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Km)	279.1	220.49	264.14	309.54	317.48
b.	Panjang Jalan Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Km)	443.39	443.39	443.39	443.39	443.39
c	**Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan Pemerintah Kota Palopo yang dalam kondisi baik (%)**	**62.95**	**49.73**	**59.57**	**69.81**	**71.60**

Sumber Data : Palopo Dalam Angka 2020

Data di atas menunjukkan panjang jalan Kota Palopo berkondisi baik sepanjang tahun 2015-2019 meningkat sebanyak 38,38 Km. Jika tahun 2015 hanya sepanjang 279,10 Km atau 62,95%, pada tahun 2019, panjang jalan berkondisi baik di Kota Palopo menjadi 317,48 Km atau 71,60%.

2.7.1.3.1.5. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Untuk melihat data Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.149 berikut ini.

Tabel 2.149
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	0	0,875	5,663	8,06	10,76
b.	Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	443,39	443,39	443,39	443,39	503,16
c	**Persentase**	**0**	**0,20**	**1,28**	**1,79**	**2,14**

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

Data yang ditampilkan pada tabel di atas hanya data panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang lebarnya lebih dari 1,5 meter, sesuai indikator yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sebab masih terdapat ruas jalan lain di Kota Palopo yang memiliki trotoar dan drainase namun ukurannya lebih kecil daripada 1,5 meter.

Data pada tabel menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2019, hanya 2,14% jalan di Kota Palopo yang memiliki trotoar dan drainase selebar minimal 1,5 meter. Kondisi ini masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016 yang berada pada angka 0,20%. Ini juga menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil ruas jalan di Kota Palopo yang memiliki saluran pembuangan air/drainase yang memadai dengan lebar minimal 1,5 meter.

2.7.1.3.1.6. Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Untuk melihat data Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.150 berikut ini.

Tabel 2.150
Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
b.	Panjang seluruh sempadan jalan kabupaten (km)	835.18	886.78	886.78	886,78	886,78
c	**Persentase**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.3.1.7. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah Tinggal Bersanitasi adalah hunian yang memiliki fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah. Sementara menurut UU No 1 Tahun 2011, rumah tinggal adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.151 berikut ini.

Tabel 2.151
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Rumah Tinggal berakses sanitasi	26.651	37,457	39.183	42.622	42.772
2	Jumlah Rumah Tinggal	40.716	42.262	43.167	44.209	44081
3	**Persentase Rumah Tangga Bersanitasi**	**65,46**	**88.63**	**90.77**	**96,41**	**97,03**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2020

Data di atas menunjukkan terdapat sebanyak 97.03 % rumah tinggal di Kota Palopo telah bersanitasi pada tahun 2019. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang berada pada angka 65,46 %. Ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hunian masyarakat Kota Palopo dalam kurun waktu 2015-2019.

2.7.1.3.1.8. Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Untuk melihat data Persentase Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.152 berikut ini.

Tabel 2.152
Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km)	7.673,93	8.090,78	8.735,01	9.041,97	9.492,93
b.	Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (km)	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97
c	**Persentase (%)**	**40,50**	**42,70**	**46,10**	**47,72**	**50,10**

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sempadan sungai di Kota Palopo dari tahun ke tahun semakin banyak yang diakses oleh bangunan liar/tak berijin. Jika tahun 2015 hanya 40,50% sempadan sungai yang diakses bangunan liar atau sepanjang 7.673,93 Km, tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 50,10%. Kondisi ini menunjukkan perlunya meningkatkan kinerja penataan ruang agar sempadan sungai yang dipakai oleh bangunan liar semakin menurun.

2.7.1.3.1.9. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Untuk melihat data Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.153 berikut ini.

Tabel 2.153
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km)	73,39	64,23	55,47	47,24	46,90
b.	Panjang seluruh drainase di Kota Palopo (km)	498,73	507,90	516,65	524,89	529,04
	Persentase	**14,71**	**12,64**	**10,73**	**8,99**	**8,86**

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan kualitas dan fungsi drainase di Kota Palopo semakin menurun. Jika pada tahun 2015 terdapat 14,71 % drainase Kota Palopo yang kondisinya baik dalam artian tidak tersumbat, pada tahun 2019 hanya ada 8,86 % drainase Kota Palopo yang kondisinya baik atau tidak tersumbat. Ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya Pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan atau mengakselarasi program dan kegiatan penanganan drainase pada tahun mendatang.

2.7.1.3.1.10. Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun

Untuk melihat data Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.154 berikut ini.

Tabel 2.154
Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luasan daerah yang tergenang (Ha)	0,437	0,306	0,214	0,078	11.85
b.	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang (Ha)	3,028	2,120	1,484	0,545	49.22
c	**Persentase (a/b x 100%)**	**14,43**	**14,43**	**14,42**	**14,31**	**24.08**

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan luas daerah yang tidak terjadi genangan di Kota Palopo stagnan atau berjalan di tempat. Sampai tahun 2018, hanya 14,31% daerah di Kota Palopo yang tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali dalam setahun. Ini menunjukkan hanya sebagian kecil daerah rawan genangan di Kota Palopo yang tidak terjadi genangan 2 kali dalam setahun.

Kemudian luas daerah yang tergenang lebih dari dua kali dalam setahun di Kota Palopo jauh berkurang pada tahun 2018 yang berada pada angka 0,078 Ha. Meski pada tahun 2015, luas daerah yang tergenang mencapai 0,437 Ha. Pemerintah Kota Palopo menginginkan tidak ada lagi daerah yang tergenang di Kota Palopo pada tahun-tahun mendatang.

2.7.1.3.1.11. Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor.

Untuk melihat data Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.155 berikut ini.

Tabel 2.155
Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (Km)	927,47	1.071,94	1.074,93	1.164,07	1.242,70
b.	Jumlah seluruh wilayah rawan longsor (Km)	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31.579,94
	Persentase (a/b x 100%)	**2,94**	**3,39**	**3,40**	**3,69**	**5,05**

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan pada tahun 2015 Pemerintah Kota Palopo baru mampu menangani 2,94 % wilayah aliran sungai rawan longsor/jalan penghubung rawan longsor, dengan membangun turap. Namun pada tahun 2019, persentase luas wilayah yang mampu ditangani meningkat menjadi 5,05 %, namun masih menyisakan 94,95% wilayah rawan longsor baik aliran sungai maupun jalan penghubung yang belum tertangani atau memiliki turap.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terjadinya musibah longsor pada daerah rawan termasuk pada lokasi jalan penghubung dan daerah aliran sungai di Kota Palopo potensinya masih sangat besar.

2.7.1.3.1.12. Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik

Untuk melihat data Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.156 berikut ini.

Tabel 2.156
Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	383,09	522,39	678,05	743,29	667,77
b.	Luas irigasi kabupaten (Ha)	800	800	950,45	980,54	907,90
	Persentase (a/b x 100%)	**47,89**	**65,30**	**71,34**	**75,80**	**73,55**

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa luas irigasi di Kota Palopo yang berkondisi baik dari tahun 2015-2018 semakin meningkat, namun tahun 2019 kembali menurun. Jika pada tahun 2015 pada angka 47,89 % dan pada tahun 2019 pada angka 73,55 %. Angka inilah yang mestinya menjadi

target kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang ke depannya dalam melaksanakan program dan kegiata keririgasian.

2.7.1.3.1.13. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.157 berikut ini.

Tabel 2.157
Persentase Rasio Jaringan Irigasi Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang Saluran Irigasi (Km)	27,473	41,760	50,627	55.714	73.715
b.	Luas Lahan Budidaya Pertanian (Sawah) (Ha)	2687	2689	2685	2.686	1.574
c	**Rasio Jaringan Irigasi (Per 1000 Ha)**	**10,22**	**15,53**	**18,86**	**20,74**	**46.83**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2020, Dinas Pertanian, Peternakan Perkebunan Kota Palopo 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019, panjang irigasi untuk mengairi sawah seluas 1000 Ha di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2015 untuk 1000 Ha sawah hanya dilayani irigasi sepanjang 10,22 Km, pada tahun 2019 untuk luasan yang sama telah mampu dilayani jaringan irigasi sepanjang 46,83 Km. Meningkatnya cakupan irigasi terhadap lahan persawahan ini diharapkan mampu meningkatkan produktifitas lahan pertanian dan pada akhirnya menjadi salah satu faktor penghambat alih fungsi lahan pertanian terutama persawahan di Kota Palopo.

2.7.1.3.1.14. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Untuk melihat data Persentase Penduduk Berakses Air Minum Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.158 berikut ini.

Tabel 2.158
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum (jiwa)	144,100	148,725	165,284	171.359	176.521
b.	Jumlah Penduduk (jiwa)	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
	Persentase (a/b x 100%)	**85.32**	**86.01**	**93,00**	**94,84**	**95,61**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2019, besaran penduduk Kota Palopo yang memiliki akses terhadap air minum sebanyak 95,61 %. Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang hanya berada pada angka 85,32 %. Meski demikian ini menunjukkan bahwa masih ada kurang lebih 4,39% penduduk Kota Palopo yang belum memiliki akses air minum.

2.7.1.3.1.15. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. **Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air yangtidak terlindung.**

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas

(layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas meediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

Data pada tabel di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2015, jumlah penduduk Kota Palopo yang memiliki Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak sebanyak 144.100 jiwa atau sebesar 85.32 % dari jumlah penduduk atau dalam satuan rumah tangga sebanyak 26.341 Rumah Tangga atau 71,44 % dari total jumlah rumah tangga yang ada.

Kondisi ini kemudian jauh lebih membaik pada tahun 2018, dimana jumlah penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak 171.359 jiwa atau 94,84% dari jumlah penduduk yang ada atau dalam satuan rumah tangga sebanyak 39.444 Rumah Tangga atau 94.49% dari total jumlah rumah tangga yang ada. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.159 dibawah ini.

Tabel 2.159
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan
Terhadap Air Minum Layak Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Sumber Air Bersih	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
A	**Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan**						
1	Leding (Perpipaan)	RT	21,958	30,929	32680	36.224	38.162
2	Keran Umum	RT	0	0	-	0	0
3	Hydrant Umum	RT	0	0	-	0	67
4	Terminal Air	RT	0	0	-	0	0
5	Air Hujan	RT	0	0	-	0	0
6	Mata air terlindungi	RT	3,427	1,080	1,158	744	n/a
7	Sumur Terlindungi	RT	956	455	410	321	n/a
8	Sumur (Bor/Pompa)	RT	0	0	-	0	0
B	**Jumlah Rumah Tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan**						
		RT	26.341	32.464	34.248	37.269	39.207
C	**Jumlah Rumah Tangga**						
		RT	36.871	37.749	38.641	39.444	40.303
D	**Persentase Rumah Tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan**						
		RT	**71,44**	**86,00**	**88,63**	**94,49**	**97,28**
E	**Jumlah Penduduk Kota Palopo yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan**						
		Jiwa	144.100	148.725	165.284	171.359	176.521
F	**Jumlah Penduduk Kota Palopo**						
		Jiwa	168,894	172,916	176,907	180.678	184.614
G	**Persentase Penduduk Kota Palopo yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan**						
		Persen	**85.32**	**86.01**	**93,43**	**94,84**	**95,61**

Sumber Data : Olahan dari Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo, BPS 2019

2.7.1.3.1.16. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Menurut UU No 1 Tahun 2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.Sementara Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Gambaran tentang data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.160 berikut ini.

Tabel 2.160
Persentase Areal Kawasan Kumuh Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a	Luas kawasan Kumuh (Ha)	85.23	42.58	32.08	20.85	3,85
b	Luas wilayah Kota Palopo (Ha)	2.529.90	2.529.90	2.529.90	2.529,90	2.529,90
c	**Persentase luas areal kawasan kumuh**	**3.30**	**1.60**	**1.20**	**0.82**	**0,15**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019, total luas kawasan kumuh yang telah ditangani sudah mengalami penurunan dimana tahun 2015 sebanyak 85.23 Ha, tahun 2016 berkurang lagi menjadi 42.58 Ha, tahun 2017 tetap mengalami penurunan sebesar 32.08 Ha, tahun 2018 turun lagi menjadi 20.85 Ha, dan tahun 2019 menjadi 3.85 Ha. Persentase luas areal kawasan kumuh Kota Palopo terhadap luas wilayah Kota Palopo tahun 2015 3.30% turun menjadi 1.60% pada tahun 2016, tahun 2017 kembali turun menjadi 1.20%, tahun 2018 juga menurun menjadi 0.82 dan tahun 2019 hanya tersisa 0,15 %.

2.7.1.3.1.17. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Untuk melihat data Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.161 berikut ini.

Tabel 2.161
Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA (ton)	981	1189	3.614	1.376	1.387
b	Total volume sampah (Ton)	38.355	35.674	37.427	34.171	33.699
c	**Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (%)**	**2,5**	**3,3**	**3,5**	**4.02**	**4,11**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo 2020

Data di atas menunjukkan pada tahun 2015, volume sampah yang berhasil dikurangi sebelum sampai ke tempat Pembuangan Akhir Sampah hanya sebanyak 981 ton atau sekitar 2,50% dari produksi sampah yang ada. Tahun 2019, volume sampah yang berhasil dikurangi meningkat menjadi 1.387 Ton atau sebanyak 4,11%.

Ini menunjukkan adanya progress pengurangan sampah di Kota Palopo yang semakin tahun semakin membaik. Artinya proses reduce, recycle dan reuse sampah di Kota Palopo berjalan sesuai yang diharapkan. Dampaknya sampah yang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah bisa dikurangi sehingga masa pakai/oeprasinya juga diharapkan semakin bertambah.

2.7.1.3.1.18. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui kapasitas tampung tempat pemakaman umum yang bisa diakses masyarakat Kota Palopo. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat. pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.162 berikut ini.

Tabel 2.162
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Total Luas Tempat Pemakaman Umum (ha)	30	28	28	28	28
b	Jumlah Lokasi Tempat Pemakaman Umum	17	15	15	15	15
c	Jumlah Penduduk	168.894	172.916	176.907	180.678	184614
c	**Rasio per 10.000 penduduk**	**1.78**	**1.62**	**1.58**	**1,55**	**1.52**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo 2019

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 untuk 10.000 penduduk Kota Palopo rata-rata hanya tersedia 1.52 Ha lahan pemakaman. Rasio ini menurun jika dibandingkan tahun 2015 dimana untuk 10.000 penduduk terdapat 1.78 Ha lahan pemakaman.

Pada tahun 2015 terdapat 17 titik lokasi pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palopo. Tahun 2015 terdapat 17 makam, namun tahun 2016, dua lokasi pemakaman ditutup karena dinyatakan sudah penuh. Sehingga sejak tahun 2016-2019 hanya terdapat 15 lokasi pemakaman umum di Kota Palopo yang bisa diakses masyarakat umum. Kapasitas makan per Ha, diperkirakan mampu menyediakan sebanyak 4000-5000 kuburan.

2.7.1.3.1.19. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui kapasitas tampung rumah ibadah yang bisa diakses masyarakat Kota Palopo. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.163 berikut ini.

Tabel 2.163
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	**Jumlah Tempat Ibadah**	**312**	**312**	**316**	**322**	**336**
	Mesjid	187	187	191	193	202
	Mushola	47	47	47	52	52
	Gereja Protestan	70	70	70	69	74
	Gereja Katolik	5	5	5	5	5
	Vihara	2	2	2	2	2
	Kuil	1	1	1	1	1
b.	Jumlah Penduduk	168.894	172.916	176.907	180.678	184614
c	**Rasio per 1000 penduduk**	**1,84**	**1,79**	**1,78**	**1,78**	**1.82**

Sumber Data : Badan Pusat Statistik,2020

Sesuai angka dalam tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, untuk 1000 penduduk Kota Palopo tersedia sebanyak 2 (pembulatan 1,84) tempat ibadah di Kota Palopo. Kondisi yang serupa juga terjadi pada tahun 2019, dimana hanya terdapat 2 tempat ibadah per 1000 penduduk Kota Palopo.

2.7.1.3.2. Penataan Ruang

2.7.1.3.2.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Hak Guna Bangunan atau **HGB** adalah hak untuk mengusahakan (mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah) tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk jangka waktu tertentu. Sementara **Hak Pengelolaan** atau **HPL** menurut Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, antara lain berupa

perencanaan dan peruntukan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Indikator ini mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam memanfaatkan tanah yang berada dalam penguasaanya menjadi ruang terbuka hijau. Nilai rasio yang semakin tinggi menunjukkan bahwa intensitas pemanfaatan tanah oleh pemerintah daerah untuk ruang terbuka hijau semakin baik. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.164 berikut ini.

Tabel 2.164
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luas ruang terbuka hijau (Ha)	1.168.21	1.169.23	1.170,72	1.171,81	1.174,21
b.	Luas wilayah ber HPL/HGB (Ha)	n/a	n/a	n/a	n/a	31.8511
c	**Rasio Ruang Terbuka Hijau**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.67**

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa luas ruang terbuka hijau di Kota Palopo meningkat sejak tahun 2015. Jika pada tahun 2015 tersedianya ruang terbuka hijau sebanyak 1.168,21 Ha, pada tahun 2019 menjadi 1.174,21 Ha, atau bertambah sebanyak 6 Ha dalam lima tahun terakhir.

2.7.1.3.2.2. Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan terdiri dari : Taman kota, Taman wisata alam, Taman rekreasi, Taman lingkungan perumahan dan permukiman, Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, Taman hutan raya, Hutan kota, dan hutan lindung.

Sesuai Revisi Rencana Tata Ruang Kota Palopo, Ruang Terbuka Hijau Kota Palopo akan dilaksanakan sebagai berikut :

- RTH Publik tersebar di wilayah Kota Palopo direncanakan seluas 1525.89 hektar atau sebesar 20,41%.
- RTH Private seluas 2.601,7 hektar atau sebesar 10,08%.

Untuk melihat gambaran Luasan RTH Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel 2.165 dibawah ini.

Tabel 2.165
Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luasan RTH publik yang tersedia (ha)	1.168.21	1.169.23	1.170.72	1.171,81	1.174,21
b.	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan (Ha)	1.525.89	1.525.89	1.525.89	1.525,89	1.525,89
c	**Persentase Luasan RTH dari Luas Wilayah Kota (%)**	**76.56**	**76.63**	**76.72**	**76,79**	**76,95**

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020, Dok Rencana Tata Ruang Kota Palopo

Angka dalam tabel di atas menunjukkan bahwa 76,95% target luasan RTH di Kota Palopo telah dicapai sampai dengan tahun 2019. Sisanya sebanyak 23,05% belum tercapai.

2.7.1.3.2.3. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan

Untuk melihat data Rasio Bangunan Ber IMB Per satuan Bangunan Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.166 berikut ini.

Tabel 2.166
Rasio Bangunan Ber – IMB Per Satuan Bangunan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah bangunan ber IMB (Buah)	1.853	1.465	1.595	1.202	1.255
b.	Jumlah bangunan (Buah)	18.465	19.227	19.629	21.480	24.488
c	**Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan**	0.1003	0.088	0.0779	0.0556	**0.0535**
d	**Per 100 (%)**	**10.03**	**8.8**	**7.79**	**5.56**	**5.35**

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.3.2.4. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Untuk melihat data Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.167 berikut ini.

Tabel 2.167
Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)					
b.	Jumlah ruang publik yang tersedia (Ha)	2.759	2.761	3.978		
c	**Persentase**					

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2019

2.7.1.3.2.5. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan

Untuk melihat data Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.168 berikut ini.

Tabel 2.168
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara	17.296.88	15.849.92	10.681.98	9983.83	12.298
b.	Luas daratan (Ha)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Rasio	**0.6407**	**0.5871**	**0.3957**	**0.3698**	**0.4555**

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2.7.1.4.1. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Jadi Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.169 dibawah ini.

Tabel 2.169
Rasio Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah rumah layak huni	25.277	28.258	29.777	32.097	34.268
b	Jumlah penduduk	168.894	172.916	176.907	180.678	182.107
c	**Rasio Rumah Layak Huni**	**0,149**	**0,163**	**0,168**	**0,178**	**0,188**
d	***Rasio Rumah Layak Huni Provinsi Sulsel (*)***	***0,21***	***0,22***	***0,19***	***0,19***	

Sumber Data : Dinas Perumahan & Pemukiman Kota Palopo Tahun 2020, (*) RKPD Sulsel 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 meningkat. Jika pada tahun 2015 hanya terdapat sebanyak 25.277 unit rumah layak huni, pada tahun 2019 jumlah rumah layak huni meningkat menjadi 34.268 unit.

Rasio rumah layak huni pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, per 1000 penduduk Kota Palopo hanya terdapat 149 unit rumah layak huni, kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2019 terdapat 188 unit rumah layak huni per 1000 penduduk Kota Palopo.

Jika satu rumah layak huni diasumsikan dihuni oleh lima orang penduduk, artinya pada tahun 2015 dari 1000 penduduk, hanya terdapat 745 orang penduduk yang tinggal di rumah layak huni, sisanya sebanyak 255 orang tinggal di rumah belum layak huni. Sementara di tahun 2019, untuk rasio 1000 penduduk, sebanyak 940 penduduk sudah tinggal di rumah layak huni, sisanya sebanyak 60 orang masih tinggal di rumah belum layak huni.

Meski demikian capaian rasio rumah layak huni ini masih berada di bawah angka rasio rumah layak huni Provinsi Sulawesi Selatan. Rasio rumah layak huni Sulsel yang pada tahun 2018 berada pada angka 0,19, tahun 2016 pada angka 0,22, tahun 2015 pada angka 0,21. Salah satu upaya pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan indikator kinerja ini adalah melaksanakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

2.7.1.4.2. Rasio Pemukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman.Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.170 dibawah ini.

Tabel 2.170
Rasio Permukiman Layak Huni Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a	Luas area permukiman Layak Huni (Ha)	4.219	4.356	4.414	5.078	5.130
b	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	4.590	4.622	4.682	5.561	5.561
c	**Rasio Permukiman Layak Huni (%)**	**91,93**	**94,24**	**94,28**	**91,32**	**92,26**
d	***Rasio Pemukiman Layak Huni Sulsel (%)***	***89***	***89***	***97***	***97***	

Sumber Data : Dinas Perumahan & Pemukiman Kota Palopo Tahun 2020 dan Dok. RKPD Sulsel 2019

Rasio permukiman layak huni dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti yang terlihat pada tabel, rasio permukiman layak huni tahun 2015 pada angka 91.93% menjadi 92.26%. Angka pada tabel di atas juga memperlihatkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 Ha areal pemukiman, terdapat 91.93 Ha areal pemukiman layak huni. Jumlah ini meningkat menjadi 92.26 Ha per 100 Ha areal pemukiman pada tahun 2019.

2.7.1.4.3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Untuk melihat data Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.171 berikut ini.

Tabel 2.171
Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	25.277	28.258	29.777	33.856	34.378
b.	Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	36.548	36.978	37.504	37.076	37.598
	Persentase	**%**	**69,16**	**76,42**	**79,39**	**91,32**	**91,44**

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 rumah yang ada, sebanyak 70 rumah merupakan rumah layak huni. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2019 angkanya menjadi 92 rumah layak huni per 100 rumah. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang 2015-2019.

Keberadaan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan perumahan bagi MBR dan Permendagri 55 Tahun 2017 tentang kemudahan memperoleh perizinan bagi pembangunan perumahan MBR juga berkontribusi terhadap pencapaian ini.

2.7.1.4.4. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Untuk melihat data Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.172 berikut ini.

Tabel 2.172
Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	Unit	3.131	3.412	3.928	4.390	4.912
b.	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Unit	3.693	4.012	4.265	4.727	5.249
	Persentase	**%**	**84,78**	**85,04**	**92,10**	**92,87**	**93,58**

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 rumah tangga MBR yang ada, sebanyak 85 rumah tangga MBR telah menempati rumah layak huni. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2019 angkanya menjadi 94 rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni per 100 rumah tangga MBR. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang 2015-2019. Artinya semakin banyak rumah tangga MBR yang mampu mengakses rumah layak huni.

2.7.1.4.5. Persentase Pemukiman yang Tertata

Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.173 dibawah ini.

Tabel 2.173
Persentase Pemukiman Yang Tertata Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luas area permukiman tertata	Ha	4.501	4.535	4.647	4.703	4.702,47
b.	Luas area permukiman keseluruhan	Ha	4.59	4.622	4682	4.738	4738

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Persentase	**%**	**98,06**	**98,12**	**99,25**	**99,26**	**99.25**

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, persentase luas pemukiman yang tertata di Kota Palopo meningkat dari 98,06 % menjadi 99,25% pada tahun 2019. Selain persentase, luas area pemukiman yang tertata pun meningkat dari 4501 Ha pada tahun 2015 menjadi 4.702,47 Ha pada tahun 2019.

Angka dalam tabel juga menunjukkan dari 100 Ha area pemukiman yang ada, pada tahun 2015 terdapat 98 Ha sudah tertata. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2019 angkanya menjadi 99 Ha area pemukiman yang tertata dari 100 Ha area pemukiman yang ada. Ini menunjukkan luas area pemukiman yang tertata semakin meningkat, di Kota Palopo sepanjang 2015-2019.

2.7.1.4.6. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Lingkungan pemukiman kumuh adalah adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukimanyang mengalami kekumuhan.Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan atau lingkungan pemukiman yangtergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat : Tingkat kepadatan kawasan, Kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut.Penilaian tingkat kekumuhan harus terdiri dari kombinasi dari beberapa indikator kumuh yang ada. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.174 dibawah ini.

Tabel 2.174
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	85.23	42.58	32.08	20,85	3,85
b.	Luas wilayah Kota Palopo	Ha	2.529.9	2.529.90	2.529.90	2.529,90	2.529,90
	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	**%**	**3.36**	**1.68**	**1.26**	**0,82**	**0,15**

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2020, Keterangan : 1 Km2 = 100 Ha

Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2019 persentase luas lingkungan pemukiman kumuh terhadap total luas wilayah Kota Palopo sebanyak 0.15%, menurun dibandingkan kondisi tahun 2015 yang berada pada angka 3.36%.

2.7.1.4.7. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Untuk melihat data Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.175 berikut ini.

Tabel 2.175
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luasan permukiman kumuh yang tertangani	Ha	4.10	46.75	57.25	68,48	85,48
b.	Luas pemukiman kumuh	Ha	85.23	42.58	32.08	20,85	3,85
c	**Persentase luasan pemukiman kumuh**	**%**	**95.46**	**45.15**	**35.91**	**23,34**	**4,31**

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2020

Pada tahun 2015 luas pemukiman kumuh Kota Palopo adalah 85.23 Ha sesuai Surat Keputusan Walikota Palopo. Pada tahun 2015 sebanyak 4.10 Ha ditangani, sehingga Desember 2015 hanya tersisa 85.23 Ha pemukiman kumuh di Kota Palopo.

Pada tahun 2016, akumulasi pemukiman kumuh yang tertangani 46.75, sehingga luas pemukiman kumuh pada tahun 2016 berkurang menjadi 42.58 Ha. Di tahun 2018 kembali ditangani sebanyak 68.48 Ha, sehingga sampai Desember 2018, luas pemukiman kumuh di Kota Palopo hanya tersisa 20,85 Ha.

Angka dalam tabel di atas juga menunjukkan total luas pemukiman kumuh yang sudah ditangani Pemerintah Kota Palopo tahun 2019 sebanyak 85.48 Ha dari kondisi awal 4.10 Ha dan tersisa 3.85 Ha pada tahun 2019.

2.7.1.4.8. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Untuk melihat data Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.176 berikut ini.

Tabel 2.176
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	KK	3.084	2.931	2.864	776	189
b.	Jumlah seluruh rumah tangga	KK	36.871	37.749	38.641	39.778	39.773
	Persentase	**%**	**8,36**	**7,76**	**7,41**	**1,95**	**0,48**

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 rumah tangga di Kota Palopo, terdapat sebanyak 9 rumah tangga kumuh perkotaaan, kondisi ini semakin membaik di tahun 2019, dimana hanya terdapat 1 rumah tangga kumuh dari 100 rumah yang ada.

2.7.1.4.9. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU

Indikator ini menggambarkan keberadaan sarana dan prasarana utilitas umum (PSU) berupa kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin baik kualitas pemukiman masyarakat. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.177 dibawah ini.

Tabel 2.177
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	Kawasan	24	27	30	32	41
b.	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	Kawasan	129	135	143	150	159
	Persentase	**%**	**18,60**	**20,00**	**20,98**	**21,33**	**25,79**

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa kawasan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana Utilitas Umum (PSU) di Kota Palopo semakin berkurang. Jika pada tahun 2015 terdapat 18,60% lingkungan yang didukung PSU, pada tahun 2019 jumlah menurun menjadi 25,79%, yang artinya bahwa dari 100 lingkungan perumahan yang ada pada tahun 2019, hanya 26 (pembulatan 25,79) lingkungan perumahan yang memiliki PSU.

2.7.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat: untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Ukuran yang digunakan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat adalah rasio polisi pamong praja terhadap setiap 10.000 penduduk, jumlah Linmas setiap 10.000 penduduk serta tersedianya pos siskamling per desa/kelurahan atau sebutan lain.

2.7.1.5.1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Untuk melihat data Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.178 berikut ini.

Tabel 2.178
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	100 orang Petugas Linmas di kabupaten/kota daerah pemekaran baru	Orang	96	96	96	96	0
b.	1 wilayah kerja kabupaten/kota	Kelurahan	48	48	48	48	48
	Persentase	**%**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**

Sumber Data : Badan Kesbang Pol Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah petugas Linmas sebanyak 2 orang dalam 1 kelurahan. Beberapa persoalan yang dihadapi dalam peningkatan kinerja indikator ini sesuai data Kesbang Pol Kota Palopo Tahun 2018, adalah anggota Linmas yang tidak terdaftar, dimana personilnya selalu berganti atau tidak permanen, belum adanya insentif bulanan bagi linmas dan kurangnya event pembinaan bagi mereka. Beberapa hal yang menjadi solusi atas kondisi ini adalah memperbaiki tata kelola Linmas dengan menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang anggota Linmas sehingga lebih mengikat dan permanen, kemudian memberikan mereka insentif yang telah memiliki SK dan memberikan pelatihan dalam pelaksanaan tugas di masyarakat.

2.7.1.5.2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Untuk melihat data Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.179 berikut ini.

Tabel 2.179
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	225	215	186	169	153
b.	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	232	233	208	184	160
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	**98,80**	**96,60**	**92,20**	**91,80**	**95,62**

Sumber Data : Dinas SATPOL PP Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 – 2019, seluruh laporan pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo semuanya diselesaikan. Namun sesuai data Pol PP Kota Palopo, jumlah pelanggaran K3 yang mereka selesaikan jauh lebih banyak dari yang dilaporkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meski pelanggaran K3 tersebut tidak dilaporkan, jika ditemukan oleh Satuan Pol PP juga diselesaikan.

2.7.1.5.3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Angka dalam Tabel 2.180 menunjukkan bahwa cakupan jangkauan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2015, hanya 6,06%, tahun 2019 menjadi 10,08%. Artinya sampai dengan tahun 2019, dari 252,99 Km² luas Kota Palopo, yang masuk jangkauan manajemen kebakaran hanya 10 Km². Meski meningkat, kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo ini ke depan harus lebih ditingkatkan mengingat cukup banyak daerah rawan kebakaran terutama di daerah padat penduduk dan perumahan.

Tabel 2.180
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	Km²	15	22,5	22,5	22,5	22.5
b.	Luas wilayah kabupaten/kota	Km²	247,50	247,50	247,50	252,99	252.99
	Persentase	**%**	**6,06**	**9,09**	**9,09**	**10,08**	**10,08**

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran &Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.5.4. Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Indikator tingkat waktu tanggap atau respons time rate adalah indicator yang menggambar tingkat kesigapan petugas pemadam kebakaran untuk menangani kasus kebakaran yang terjadi. Semakin tinggi persentase indicator ini, menunjukkan semakin banyaknya kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.181 berikut ini.

Tabel 2.181
Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Kasus	67	40	37	36	61
b.	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	Kasus	76	60	39	38	93
	Persentase	**%**	**88,16**	**67,67**	**94,87**	**94,74**	**65,59**

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus kebakaran yang ditangani kurang atau dalam waktu maksimal 15 menit, menurun. Pada tahun 2015, dari 76 kasus kebakaran, hanya 67 kasus yang ditangani kurang dalam waktu 15 menit, sementara di 2019, dari 93 kasus kebakaran, yang ditangani kurang atau maksimal 15 menit sebanyak 61 kasus. Ke depan angka yang menjadi target indikator ini harus lebih ditingkatkan.

2.7.1.5.5. Persentase Penegakan PERDA

Data pada Tabel 2.182 di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran Perda di Kota Palopo semakin membaik. Jika tahun 2015 berada pada angka 97,80%, tahun 2019 menurun menjadi 95,62%. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ketetapan Peraturan Daerah.

Tabel 2.182
Persentase Penegakan PERDA Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	225	215	186	169	153
b.	Jumlah pelanggaran PERDA	230	220	190	184	160
	Persentase penegakan PERDA (%)	**97,80**	**97,70**	**97,90**	**91,80**	**95,62**

Sumber Data : Dinas SATPOL PP Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.6. Bidang Urusan Sosial

Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Sosial.

2.7.1.6.1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Adalah indikator yang menggambarkan kemampuan Pemerintah dalam menangani Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Palopo dengan memberikan bantuan sosial. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin baiknya penanganan PMKS di Kota Palopo. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.183 berikut ini.

Tabel 2.183
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	Jiwa	6.813	6.857	8.777	9.586	11.068
b	Jumlah PMKS yang menerima seharusnya menerima bantuan	Jiwa	18.573	18.556	18.388	18.586	20.134
c	**Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial**	**%**	**36.68**	**36.95**	**47.73**	**51.58**	**54,97**

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2020

Pada tahun 2015 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat bantuan sebesar 36,68% dari jumlah PMKS yang ada, dan pada tahun 2016 jumlah tersebut meningkat menjadi 36,95%, hingga tahun 2019 persentase pada angka 54,97%. Ini menunjukkan semakin tahun cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Palopo semakin meningkat. Meski demikian dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

2.7.1.6.2. Persentase PMKS yang Tertangani

Adalah indikator yang menggambarkan cakupan atau besaran penanganan PMKS yang ada di Kota Palopo. Penanganan PMKS bisa dalam bentuk kegiatan seperti langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik penanganan PMKS di Kota Palopo. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.184 dibawah ini.

Tabel 2.184
Persentase PMKS yang Tertangani Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah PMKS yang tertangani	Jiwa	6.858	6.822	6.875	9.598	11.139
b	Jumlah PMKS yang ada	Jiwa	18.608	18.597	18.588	18.662	20.221
c	**Persentase PMKS yang Tertangani**	**%**	**36.85**	**36.68**	**36.98**	**51,43**	**55,09**

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan besaran PMKS yang tertangani di Kota Palopo sejak 2015 – 2016 mengalami penurunan. Jika 2015 sebanyak 36.85 % artinya dari 100 orang PMKS, yang berhasil ditangani sebanyak 37 orang, namun 2019 berhasil ditangani 55 orang dari 100 orang PMKS yang ada. Meski demikian dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

2.7.1.6.3. Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Adalah indikator yang menggambarkan besaran PMKS yang diberikan bantuan sandang pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya. Semakin tinggi indikator ini, semakin banyak PMKS yang terancam kehidupannya akibat persoalan pemenuhan kebutuhan yang sangat mendasar. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.185 dibawah ini.

Tabel 2.185
Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	6.827	7.011	8.748	9.318	10.245

b	Jumlah PMKS dalam 1 tahunyang seharusnya memperolah bantuan social	Jiwa	15.831	16.015	15.184	15.778	16.990
c	**Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**	**%**	**43.12**	**43.77**	**57,61**	**59,06**	**60,30**

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan besaran PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam satu tahun di Kota Palopo sejak 2015 – 2019 meningkat. Jika 2015 sebanyak 43,12% artinya dari 100 orang PMKS, sebanyak 43 orang telah diberikan bantuan sosial, tahun 2019 sebanyak 61 orang bisa diberikan bantuan sosial, dari 100 orang PMKS yang ada. Meski demikian dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

2.7.1.6.4. Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Untuk melihat data Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.186 berikut ini.

Tabel 2.186
Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis						
		Orang	0	0	0	0	0
b	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis						
		Orang	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c	**Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya**						
		%	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.6.5. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Untuk melihat data Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.187 berikut ini.

Tabel 2.187
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos						
		Unit	8	8	8	8	11
b	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos						
		Unit	8	8	8	8	11
c	**Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial**						
		Unit	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2020

Target SPM untuk indikator ini sebesar 100%. Sejak tahun 2015 – 2019, target indikator ini telah dicapai. Ini menunjukkan bahwa semua panti sosial yang ada di Kota Palopo telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial bagi para penghuninya.

2.7.1.6.6. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Untuk melihat data Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.188 berikut ini.

Tabel 2.188
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesos						
		Unit	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**
b	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasrana pelayanan kesos skala						
		Unit	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**
c	**Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial**						
		%	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa semua WKSBM di Kota Palopo telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kota Palopo sejak tahun 2015 – 2019, setiap tahunnya memberikan bantuan kepada kelompok WKSBM.

2.7.1.6.7. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Untuk melihat data Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.189 berikut ini.

Tabel 2.189
Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun						
		Jiwa	39	223	139	347	22
b	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerimabantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun						
		Jiwa	39	223	139	347	78
c	**Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**						
		%	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.6.8. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Untuk melihat data Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.190 berikut ini.

Tabel 2.190
Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun						
		Jiwa	0	42	0	0	0
b	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala						
		Jiwa	0	42	0	0	0
c	**Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap**						
		%	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2020

2.7.1.6.9. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Untuk melihat data Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.191 berikut ini.

Tabel 2.191
Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidakpotensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun						
		Orang	0	39	138	248	672
b	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun						
		Orang	985	992	1.162	1.260	1.622
c	**Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial**						
		%	**0**	**3,93**	**11,88**	**19,68**	**41,43**

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan pada tahun 2019, dari 100 penyandang cacat di Kota Palopo 42 orang penyandang yang menerima jaminan sosial. Capaian indikator ini di Kota palopo sepanjang 2015 – 2019 masih sangat perlu diakselerasi.

2.7.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.7.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

2.7.2.1.1. Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun

Adalah indikator yang menunjukkan jumlah kasus sengketa pengusaha dan pekerja di sebuah daerah per 1000 orang tenaga kerja. Angka ini mengindikasikan hubungan antara pengusaha sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai penyedia jasa tenaga. Semakin tinggi sengketa antara pengusaha dengan pekerja menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang berakibat pada penurunan investasi.

Semakin tinggi angka indikator ini, semakin banyak kasus perselisihan/sengketa antara pengusaha dan tenaga kerja yang terjadi dan akan berpengaruh terhadap iklim usaha dan ketenagakerjaan di sebuah daerah. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.192 dibawah ini.

Tabel 2.192
Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun Di Kota Palopo 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	8	10	14	16	18
2	Jumlah Perusahaan	1.459	1.678	1.685	1.741	1887

3	Jumlah Perusahaan ber TDP(*)	961	829	774	719	707
4	**Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun (x 1000)**	**5,5**	**6,0**	**8,3**	**9,19**	**9.5**
5	**Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja di Perusahaan ber TDP Per Tahun (x 100)**	**0.83**	**1.21**	**1.81**	**2,23**	**2.55**

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja, 2020

Data di atas menunjukkan sepanjang 2015-2019, kasus sengketa pekerja dan penguasaha di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2015, dari 1000 perusahaan yang ada, rata-rata jumlah kasus sengketa ketenagakerjaan antara pekerja dan perusahaan sebanyak 5-6 kasus, tahun 2019 menjadi 9-10 kasus.

2.7.2.1.2. Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Indikator ini menggambarkan besaran sengketa antara pengusaha dan pekerja yang berhasil diseleasikan dengan perjanjian bersama. Semakin tinggi nilai indikator ini artinya semakin banyak sengketa/perselisihan antara buruh/pekerja dan pengusaha yang diselesaikan melalui kesempatan dan musyawarah. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.193 berikut ini.

Tabel 2.193
Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	7	8	10	11	2
2	Kasus yang Dicatat/Dilaporkan	8	10	14	15	18
3	**Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)**	**88**	**80**	**71**	**73**	**11**

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019 besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama menurun, jika 2015 sebanyak 88% tahun 2019 hanya pada angka 11%.

2.7.2.1.3. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Untuk melihat data Pencari Kerja yang Ditempatkan Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.194 berikut ini.

Tabel 2.194
Pencari Kerja yang Ditempatkan Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Org	66	78	121	718	1.072
b.	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	Org	4.179	2.491	2.664	2.74	2.018
Pencari Kerja yang ditempatkan (a/b)		**%**	**1,58**	**3,13**	**4,54**	**26,20**	**53,12**

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa, dari 100 orang pencari kerja yang mendaftar, pada tahun 2015 hanya 1-2 orang tenaga kerja yang ditempatkan. Kondisinya jauh berbeda terjadi pada tahun 2019, dimana 54 orang tenaga kerja yang ditempatkan.

2.7.2.1.4. Keselamatan dan Perlindungan

Indikator ini menggambarkan besaran perusahaan yang memperhatikan dan menerapkan prinsip keselamatan dan perlindungan bagi pekerjanya. Semakin tinggi angka indikator ini

semakin banyak cakupan tenaga kerja yang dilindungi keselamatan dan keamanan kerjanya. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.195 dibawah ini.

Tabel 2.195
Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	Buah	375	406	420	431	478
2	Jumlah Perusahaan	Buah	1.459	1.678	1.689	1.700	1887
3	**Persentase Keselamatan & Perlindungan (x 100)**	**%**	**26**	**24**	**25**	**25**	**25,3**

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan pada tahun 2015, dari 100 perusahaan yang ada, hanya 26% perusahaan yang menerapkan prinsip keselamatan dan perlindungan bagi tenaga kerjanya. Kondisi ini berlangsung cukup stagnan sampai tahun 2019. Dimana rata-rata kinerja indikator ini hanya 25%. Jika dilihat dari jumlah, angka cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

2.7.2.1.5. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Indikator ini menggambarkan cakupan pekerja yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak jumlah pekerja/buruh yang dijamin jaminan sosial bidang ketenagakerjaannya. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.196 dibawah ini.

Tabel 2.196
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Di Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek	Orang	7.853	10.383	10.478	11.438	13.765
2	Jumlah Buruh/Pekerja	Orang	21.735	28.337	28.377	29.337	25.105
3	**Besaran Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek**	**Persen**	**36**	**37**	**37**	**39**	**54.82**

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2020

Data di atas menunjukkan persentase buruh pekerja untuk menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagkerjaan di Kota Palopo dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Ini menggambarkan adanya kesadaran pekerja untuk menjadi bagian dalam program jaminan kesejahteraan sosial ketenagakerjaan ini.

2.7.2.1.6. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Indikator ini menggambarkan pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap angka perselisihan buruh dan pengusaha. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin dinamisnya kondisi ketenagakerjaan di daerah.

2.7.2.1.7. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Indikator yangmenunjukkan cakupan perusahaan yang diperiksa dalam menerapkan prinsip prinsip sesuai UU ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya komitmen pemerintah dan perusahaan memenuhi hak dan kewajibannya bagi para pekerja dan buruh. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.197 dibawah ini.

Tabel 2.197
Persentase Pemeriksaaan Perusahaan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah perusahaan yang telah diperiksa	Buah	8	8	6	8	8

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
2	Jumlah perusahaan terdaftar (ber TDP) (*)	Buah	770	961	829	825	707
3	**Persentase Pemeriksaaan Perusahaan**	**%**	**1,01**	**0,87**	**0,67**	**0,97**	**1.13**

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun

Data diatas menunjukkan bahwa besaran pemeriksaan perusahan di Kota Palopo sepanjang 2015-2019 masih sangat rendah. Tahun 2015, rasio menunjukkan dari 100 perusahaan hanya 1 perusahaan yang diperiksa, kondisi yang tak jauh berbeda dengan tahun 2019. Ini menunjukkan belum optimalnya pengawasan pada sejumlah perusahaan di Kota Palopo.

2.7.2.1.8. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Indikator ini menggambarkan besaran perusahaan yang menggunakan peralatan di perusahaannya namun tetap memperhatikan prinsip prinsip keamanan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerjanya. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik bagi keamanan kerja bagi para karyawannya.

2.7.2.1.9. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Indikator ini memberikan gambaran proporsi tenaga kerja di Kota Palopo yangmemiliki keterampilan kompetensi kerja setelah medapatkan pelatihan. Umumnya hambatan utama untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja (seperti memiliki lebih banyak tenaga kerja terampil) adalah rendahnya akses ke pendidikan menengah berbasis vokasi, apalagi dengan kondisi Kota Palopo dimana sebagian besar angkatan kerja merupakan lulusan SMA/SMK sederajat. Indikator ini akan berdampak pada tingkat produktifitas tenaga kerja yang ada dalam menghasilkan nilai tambah produk barang atau jasa. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.198 dibawah ini.

Tabel 2.198
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	16	16	88	102	236
b.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	210	280	305	319	508
c	**Persentase**	**%**	**7.62**	**5.71**	**28.85**	**31,97**	**46,45**

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Data di atas menunjukkan besaran tenaga kerja yang dilatih dengan berbasis kompetensi meningkat sepanjang tahun 2015-2019. Jika pada tahun 2015 berada pada angka 7.62% pada tahun 2019 sudah mencapai angka 46.45%.

2.7.2.1.10. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam skala komunitas dalam pelatihan ketenagakerjaan. Semakin nilai indikator ini, semakin banyak komunitas komunitas tenaga kerja yang siap kerja di sebuah daerah. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.199 dibawah ini.

Tabel 2.199
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	16	16	32	35	0
b.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	Orang	288	270	286	289	0
	Persentase	**%**	**5.56**	**5.92**	**11.2**	**12,10**	**0**

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2020

2.7.2.1.11. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Untuk melihat data Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.200 berikut ini.

Tabel 2.200
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	16	64	20	18	0
b.	Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan	Orang	40	175	343	341	0
	Persentase	**%**	**40,00**	**36.60**	**5.83**	**5,28**	**0**

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan oleh dinas tenaga kerja semakin menurun. Jika pada tahun 2015 berada pada angka 40%, pada tahun 2019 menjadi 0%.

2.7.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan komitmen pemrintah akan pentingnya akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2.7.2.2.1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Untuk melihat data Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.201 berikut ini.

Tabel 2.201
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Orang	3.293	2.933	2.902	2.811	2.795
b.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	22.726	25.711	26.563	26.532	30135
c	**Persentase**	**%**	**14,49**	**11,40**	**10,92**	**10,59**	**9.27**

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sejak tahun 2015-2019 menurun. Pada tahun 2015 pada angka 14.49% sementara di 2019 hanya pada angka 9.27%.

2.7.2.2.2. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

Untuk melihat data Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.202 berikut ini.

Tabel 2.202
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kursi DPR yang diduduki perempuan	Orang	5	5	5	5	7
b.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang	25	25	25	25	25
c	**Persentase**	**%**	**20**	**20**	**20**	**20**	**28**

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang bekerja di lembaga legislatif Kota Palopo sejak periode 2009-2013 dan periode 2014-2019. Dalam 2 periode pemilihan legislatif,

jumlah perempuan yang duduk menjadi anggota DPRD Kota Palopo hanya 7 orang dengan persentase 28% dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Kota Palopo.

Kondisi ini masih berada di atas capaian nasional dimana hanya 17,32% perempuan yang duduk di lembaga legislatif, termasuk provinsi yang hanya pada angka 17,6%. Jika dibandingkan dengan target pencapaian SDGs yang pada tahun 2030 menargetkan 30% perempuan duduk menjadi anggota lembaga legislatif, Kota Palopo ke depan, paling tidak harus memiliki 8 orang anggota legislatif dari kalangan perempuan.

2.7.2.2.3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Untuk melihat data Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.203 berikut ini.

Tabel 2.203
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Orang	752	801	840	886	412
b.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	22.726	25.711	26.563	26.609	30.135
c	**Persentase**	**%**	**3.31**	**3.12**	**3.16**	**3,33**	**1.37**

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2019

Data di atas menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga swasta sejak tahun 2015-2019 meningkat. Pada tahun 2015 pada angka 3,31% sementara di 2018 pada angka 3,33%. Kondisi ini selaras dengan data partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, yang sejak tahun 2015-2018 menurun.

Artinya pekerja perempuan lebih banyak mengakses lapangan kerja di sektor swasta dari pada lembaga pemerintahan di Kota Palopo. Beberapa lapangan usaha swasta yang banyak diakses oleh pekerja perempuan adalah lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi serta lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

2.7.2.2.4. Rasio KDRT

Untuk melihat data Rasio KDRT Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.204 berikut ini.

Tabel 2.204
Rasio KDRT Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah KDRT	Kasus	20	22	10	8	8
b.	Jumlah rumah tangga	KK	36.871	37.749	38.641	39.444	40.303
c	**Rasio KDRT**	**Per 10.000**	**5**	**6**	**3**	**2**	**1**

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo menurun. Jika pada tahun 2015, dari 10.000 rumah tangga terdapat sebanyak 5 kasus KDRT, sementara di 2019 jumlahnya menurun menjadi 1 kasus.

2.7.2.2.5. Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Semakin tinggi nilai indikator ini mengindikasikan masih lemahnya perlindungan anak. Anak dianggap masih memiliki nilai ekonomi dan seringkali anak dieksploitasi.

2.7.2.2.6. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Untuk melihat data Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.205 berikut ini.

Tabel 2.205
Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	*22.726*	*19.122*	*26.226*	*26.694*	30.135
b	Jumlah angkatan kerja perempuan	Orang	*25.332*	*n/a*	*28.506*	*29.998*	32.953
c	**Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**%**	**89.71**	**n/a**	**92.00**	**88.99**	**91.45**

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Data Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Dari aspek gender, tabel diatas juga menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2015-2019 di Kota Palopo terus meningkat, dari 89.71% di 2015 menjadi 91.45% di 2019.

2.7.2.2.7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Untuk melihat data Persentase Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Terpadu Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.206 berikut ini.

Tabel 2.206
Persentase Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Terpadu
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Laporan	56	18	32	36	11
b.	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Laporan	56	254	145	149	11
	Persentase	**%**	**100**	**7.09**	**22.07**	**24,16**	**100**

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat penanganan pengaduan atau laporan kasus perempuan atau anak korban kekerasan di Kota Palopo mengalami menurun. Jika pada tahun 2015, seluruh laporan ditindaklanjuti, tetapi data penanganan terendah pada Tahun 2016, yaitu hanya 7,09% yang direspon. Walaupun penanganan ini meningkat lagi di Tahun 2018 menjadi 24,16%. Tahun 2019 semua pengaduan ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu.

2.7.2.2.8. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus – Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Untuk melihat data Persentase Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.207 berikut ini.

Tabel 2.207
Persentase Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah perkara diputuskan pengadilan dengan dasar perundang – undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perkara	48	74	87	96	n/a

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
b.	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Perkara	48	74	87	96	n/a
	Persentase	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**n/a**

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2019

2.7.2.2.9. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Untuk melihat data Persentase Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.208 berikut ini.

Tabel 2.208
Persentase Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Orang	-	49	31	36	1
b.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	Orang	-	254	145	150	11
	Persentase	**%**	**-**	**19.29**	**21.38**	**24,00**	**9,09**

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.2.10. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SD

Untuk melihat data Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SD Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.209 berikut ini.

Tabel 2.209
Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	APM – SD Perempuan	%	90,04	90,52	99,31	100	n/a
b.	APM – SD Laki - Laki	%	97,48	100	99,33	99,60	n/a

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, 2019

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2018, lebih banyak siswa laki-laki yang bersekolah tepat waktu dibandingkan siswa perempuan. Tahun 2015 misalnya, dari 100 siswa laki-laki, ada 98 orang yang tepat waktu masuk sekolah, jumlah ini meningkat menjadi 100 orang siswa pada tahun 2018. Sementara siswa perempuan di tahun 2015, hanya ada 90 orang siswa perempuan yang bersekolah tepat waktu. Untuk data Tahun 2019, belum tersedia.

2.7.2.2.11. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMP

Untuk melihat data Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMP Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.210 berikut ini.

Tabel 2.210
Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMP Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	APM – SMP Perempuan	Orang	81,02	75,52	80,28	77,55	n/a
b.	APM – SMP Laki - Laki	Orang	68,49	77,50	75,35	79,35	n/a

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, 2019

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2018, lebih banyak siswa perempuan yang bersekolah tepat waktu dibandingkan siswa laki-laki. Tahun 2015 misalnya, dari 100 siswa perempuan, ada 81 orang yang tepat waktu masuk sekolah, sementara di tahun yang

sama, hanya ada 69 siswa laki-laki yang bersekolah tepat waktu. Akan tetapi pada tahun 2018, jumlah siswa laki-laki tingkat SMP/sederajat yang bersekolah tepat waktu juga lebih banyak dari pada perempuan. Siswa SMP perempuan yang bersekolah tepat waktu pada tahun 2018 sebanyak 78 orang dari 100 siswa SMP perempuan, sedangkan laki-laki ada 80 orang. Untuk data Tahun 2019, belum tersedia.

2.7.2.2.12. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMA

Untuk melihat data Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMA Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.211 berikut ini.

Tabel 2.211
Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMA Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	APM siswa SLTA /sederajata Perempuan	Persen	66,63	64,73	63,24	62,00	n/a
b.	APMS siswa SLTA/sederajat laki-laki	Persen	70,11	66,80	69,65	75,27	n/a

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, 2019

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019 untuk tingkat SLTA/sederajat, lebih banyak siswa laki-laki yang bersekolah tepat waktu dibandingkan siswa perempuan. Tahun 2015 misalnya, dari 100 siswa laki-laki, ada 70 orang yang tepat waktu masuk sekolah, sementara di tahun yang sama, hanya ada 67 siswa perempuan yang bersekolah tepat waktu.

Di tahun 2018, jumlah siswa laki-laki yang bersekolah tepat waktu juga lebih banyak dari pada siswa perempuan. Siswa SLTA laki-laki yang bersekolah tepat waktu pada tahun 2018 sebanyak 75 orang dari 100 siswa SLTA laki-laki, sedangkan perempuan hanya 62 orang yang tepat waktu masuk sekolah. Untuk data Tahun 2019, belum tersedia.

2.7.2.2.13. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di Perguruan Tinggi

Untuk melihat data Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di Perguruan Tinggi Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.212 berikut ini.

Tabel 2.212
Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di Perguruan Tinggi
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	APM perempuan yang masuk perguruan tinggi	Persen	41.25	41.76	42.27	42,63	n/a
b.	APM laki-laki yang masuk Perguruan Tinggi	Persen					

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, 2019

2.7.2.3. Bidang Urusan Pangan

2.7.2.3.1. Ketersediaan Pangan Utama

Parameter ketahanan pangan rumah tangga yang didasarkan pada definisi ketahanan pangan dari UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, mempunyai empatkomponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu

1. Kecukupan ketersediaan pangan
2. Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga Diukur berdasarkan frekuensi makan anggota rumah tangga dalam sehari yaitu makan 3 (tiga) kali sehari, frekuensi makan dapat menggambarkan keberlanjutan ketersediaan pangan dalam rumah tangga.
3. Aksesbilitas atau keterjangkauan terhadap pangan Dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan, yang diukur dari pemilikan lahan (misalkan sawah atau ladang) serta cara rumah tangga memperoleh pangan
4. Kualitas atau keamanan pangan

Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor.

World Health Organization mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Untuk melihat data Persentase Ketersediaan Pangan Utama Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.213 dibawah ini.

Tabel 2.213
Persentase Ketersediaan Pangan Utama Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Rata – rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun						
		Kg	16,783.60	17,774.44	19,466.00	34,568.75	42,545.00
b.	Jumlah penduduk						
		Orang	168,894	172,916	176,907	176,907	184,614
c	Jumlah Konsumsi Rill						
		Kg	17,356.36	17,130.12	16,721.00	18,332.55	106.2
d	**Persentase Ketersediaan Pangan Utama Per Jumlah Penduduk**						
		%	**9.94**	**10.28**	**11.00**	**19.54**	**23.05**
e	*Persentase Ketersediaan Pangan Utama Per Jumlah Konsumsi Rill*						
		%	*96.70*	*103.76*	*116.42*	*188.56*	*40,061.21*

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa angka ketersediaan bahan pangan utama di Kota Palopo meningkat sepanjang tahun 2015 – 2018. Pada tahun 2015, untuk 100 jiwa penduduk Kota Palopo, rata-rata tersedia 9,94 Kg pangan utama, sementara di 2018 tersedia sebanyak 19,54 Kg bahan pangan utama per 100 jiwa penduduk Kota Palopo. Jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi riil, angka ketersediaan pangan utama juga meningkat. Jika pada tahun 2015 pada angka 96,70 %, pada tahun 2018 berada pada angka 188,56 %. Untuk data Tahun 2019, berada pada angka 40,061.21.

2.7.2.3.2. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Untuk melihat data Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.214 berikut ini.

Tabel 2.214
Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Kalori x BDD	Kkal/kapita/hari	22,034	21,301	20,128	38.650	39.81
b	Koefisien	Angka	100	100	100	100	100
1	**Ketersediaan energi**	Kkal/kapita/hari	**2.203,4**	**2.130,1**	**2.012,8**	**3.865**	**2.442**
a	Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Protein x BDD	Kkal/kapita/hari	692	689	691	1.019,6	978.4
b	Koefisien	Angka	100	100	100	100	100
2	**Ketersediaan Protein**	gram/kapita/hari	**69.23**	**68.9**	**69.1**	**101,96**	**97.84**
3	**Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita**	(kkal/kapita/hari)	**2.273**	**2.199**	**2.082**	**3.966**	**2.540**

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2018, RAD Pangan dan Gizi Kota Palopo 2016-2020

Food and Agriculture Organization atau FAO mensyaratkan untuk ketersediaan energi minimal adalah sebesar 2200 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 54 gram/kapita/hari. Sementara standar Indonesia 2000-2100 kkal/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan energi dan protein Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 sudah berada diatas standar minimal FAO. Untuk data Tahun 2019, belum tersedia.

2.7.2.3.3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Untuk melihat data Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.215 berikut ini.

Tabel 2.215
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu						
		Sampel	-	9	9	13	32
b.	Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu						
		Sampel	-	12	11	18	37
	Persentase		**-**	**75**	**82**	**72**	**86**

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.4. Bidang Urusan Pertanahan

Berikut adalah beberapa indikator penyelenggaraan otonomi daerah pada urusan pertanahan. Indikator pertanahan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah.

2.7.2.4.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.216 berikut ini.

Tabel 2.216
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah luas lahan bersertifikat	Km2	3,98	3,23	3,77	5,43	70,43
b.	Jumlah luas wilayah	Km2	247,52	247,52	247,52	249,18	247,52
	Persentase	**%**	**1,61**	**1,31**	**1,52**	**2,17**	**28,46**

Sumber Data : Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan sebagian besar lahan di wilayah Kota Palopo belum bersertifikat. Sampai tahun 2019 hanya 28,46 % wilayah Kota Palopo yang memiliki bukti kepemilikan. Meskipun jika dibandingkan tahun 2015, luas wilayah yang bersertifikat pada tahun 2019 luasnya meningkat.

Data dalam tabel juga menunjukkan bahwa dari 100 Km2 wilayah Kota Palopo, hanya 28,46 Km2 yang bersertifikat sampai pada tahun 2019. Olehnya itu Pemerintah Kota Palopo harus lebih memberikan akses dan melaksanakan advokasi masyarakat tentang pentingnya bukti legalisasi kepemilikan tanah.

2.7.2.4.2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Untuk melihat data Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.217 berikut ini.

Tabel 2.217
Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	0	0	0	1	4
b.	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	4	4	4	4	14
	Persentase	**%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25**	**28,57**

Sumber Data : Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus sengketa tanah negara di Kota Palopo sebanyak empat kasus. Yakni kasus tanah negara dengan tipologi konflik satu konflik tanah ex HGU dan tiga kasus tentang ijin pemanfaatan tanah dan sampai tahun 2019, masih dalam tahap penyelesaian konflik.

Kasus konflik tanah ex HGU sampai tahun 2019 masih dalam tahap penyelesaian, sementara untuk tiga kasus ijin pemanfaatan tanah, satu kasus dalam proses pengadilan, satu kasus belum dilakukan pelaksanaan ganti rugi dan kasus lainnya dalam proses perampungan perda RT RW. Kasus terakhir ini terkait dengan pemanfaatan tanah HPL lokasi Jalan Lingkar di Kota Palopo.

2.7.2.4.3. Penyelesaian Izin Lokasi

Untuk melihat data Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Kota Palopo Tahun 2015 –2019 dapat dilihat pada Tabel 2.218 berikut ini.

Tabel 2.218
Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah ijin lokasi	Buah	1	1	0	0	2
b.	Permohonan ijin lokasi	Buah	1	1	1	1	2
c	**Persentase**	**%**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**

Sumber Data : Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penyelesaian izin lokasi di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 masih fluktuatif. Pada tahun 2015-2016 menjadi 100% dan tahun 2017-2018 0% atau belum ada satupun permohonan izin lokasi yang diterbitkan izin lokasinya. Tahun 2019 kembali menjadi 100%.

2.7.2.5. Lingkungan Hidup

2.7.2.5.1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Untuk data tersusunnya RPPLH Kota Palopo Tahun 2015 –2019, sampai saat ini belum tersedia, seperti yang terlihat pada Tabel 2.219 berikut ini.

Tabel 2.219
Tersusunnya RPPLH Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tersusunnya RPPLH kabupaten/Kota	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.5.2. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

Untuk data Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kota Palopo Tahun 2015 –2019, sampai saat ini belum tersedia, seperti yang terlihat pada Tabel 2.220 berikut ini.

Tabel 2.220
Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/Kota	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.5.3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Kota Palopo

Untuk data Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota Palopo Tahun 2015 – 2019, dapat dilihat pada Tabel 2.221 berikut ini.

Tabel 2.221
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	-	-	Ada (KLHS Revisi RTRW	-	-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan untuk menjamin Kebijakan rencana Program (K/R/P) mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan. Sepanjang 2015-2019, Pemerintah Kota Palopo hanya 3 kali menyelenggarakan KLHS yang menghasilkan 3 dokumen yakni KLHS RTRW pada tahun 2015, KLHS Kawasan Pesisir dan KLHS revisi RT RW Kota Palopo 2012-2032.

2.7.2.5.4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Untuk data Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.222 berikut ini.

Tabel 2.222
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hasil pengukuran indeks kualitas air	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Kondisi di atas menunjukkan bahwa kualitas air secara umum di wilayah Kota Palopo masih dalam batas kewajaran. Sepanjang 2015 – 2019, hasil pengukuran indeks kualitas air di Kota Palopo berada dalam kategori cemar ringan. Data ini diperoleh dengan mengambil sampel air di beberapa sungai dan saluran air/drainase.

2.7.2.5.5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Untuk data Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.223 berikut ini.

Tabel 2.223
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Sangat baik	Sangat baik	Unggul	Sangat baik	Sangat baik

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Palopo pada tahun 2017, kondisinya lebih baik dibandingkan tahun 2015 – 2016. Sesuai hasil uji di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, kualitas udara pada tahun 2015 – 2016 berkategori sangat baik, tahun 2017 berada pada kategori unggul. Namun tahun 2018 – 2019 kembali berada pada kategori sangat baik.

2.7.2.5.6. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Untuk data Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Palopo Tahun 2015 –2019, sampai saat ini belum tersedia, seperti yang terlihat pada Tabel 2.224 berikut ini.

Tabel 2.224
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hasil pengukuran indeks kualitas	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
tutupan lahan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.5.7. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk data Persentase Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.225 berikut ini.

Tabel 2.225
Persentase Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo yang ditangani	Izin	885	1109	1161	1578	1759
b.	Total penanggung jawab usaha dana atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo	Pihak	288	432	432	653	645
	Persentase	**%**	**32,54**	**38,95**	**37,20**	**24,16**	**27,27**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Data diatas menunjukkan sepanjang tahun 2015-2019, masih lebih banyak pelaku usaha di Kota Palopo yang belum taat terhadap kepemilikan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH. Sampai tahun 2019 sebesar 27,27%, artinya masih terdapat 72,73% yang belum taat atas izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH.

2.7.2.5.8. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Untuk data Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2015 –2019, sampai saat ini belum tersedia, seperti yang terlihat pada Tabel 2.226 berikut ini.

Tabel 2.226
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Terlaksanaya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.5.9. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kota Palopo

Untuk data Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2015 – 2019, dapat dilihat pada Tabel 2.227 berikut ini.

Tabel 2.227
Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani Di Kota Palopo
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Pengaduan masyarakat yang ditangani	Buah	15	7	11	13	10
b.	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Buah	15	7	11	13	10
	Persentase	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa penanganan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan di Kota Palopo sepanjang tahun 2015 – 2019, sangat baik. Semua pengaduan yang disampaikan atau dilaporkan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palopo. Ini mengindikasikan Pemerintah Kota Palopo sangat merespon isu isu di masyarakat yang terkait dengan persoalan lingkungan.

2.7.2.5.10. Timbulan Sampah yang Ditangani

Untuk data Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019, dapat dilihat pada Tabel 2.228 berikut ini.

Tabel 2.228
Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Volume timbulan sampah yang ditangani	(Ton)	33.033	31.047	33.040	30.409	30.419
b.	Jumlah total timbulan sampah	(Ton)	38.355	35.674	37.427	34.171	33.699
	Persentase	**%**	**86,12**	**87,02**	**88,28**	**88.90**	**90,26**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Dari data di atas, menunjukkan bahwa persentase volume timbulan sampah yang ditangani dari tahun 2015 – 2019 semakin meningkat. Ini menunjukkan kinerja penanganan sampah di Kota Palopo, membaik. Jika pada tahun 2015 hanya mampu menangani 86,12% timbulan sampah. Tahun 2019, berada pada angka 90,26%.

2.7.2.5.11. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Untuk data Persentase Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019, dapat dilihat pada Tabel 2.229 berikut ini.

Tabel 2.229
Persentase Sampah yang Terkurangi Melalui 3R
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
A	Jumlah Timbulan Sampah yang ditangani (Ton)	Ton	38.355	35.674	37.427	34.171	33.699
B	Jumlah yang tertangani di TPS 3R setara	Ton	981	1.189	1.334	1.376	1.387
C	**Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (b/a)**	**%**	**2,55**	**3,33**	**3,56**	**4,02**	**4,11**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Jumlah sampah yang tertangani di TPS 3R adalah sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah sampah seperti ini meningkat sejak 2015 ke 2019. Ini menunjukkan bahwa peran TPS 3R di Kota Palopo berjalan cukup baik. Jika pada tahun 2015 TPS 3R hanya mampu menangani sebanyak 981 Ton, tahun 2019 mampu menangani 1.387 Ton sampah. Ini menunjukkan bahwa beberapa strategi 3R dalam pengurangan sampah yang masuk TPA, seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, cukup baik.

Dampaknya jumlah sampah yang terangkut ke TPA dari tahun ke tahun di Kota Palopo semakin berkurang, sehingga masa pakai TPA bisa lebih panjang/lama. Sebab akan semakin menurunkan beban tampung yang akan diterima oleh TPAS Kota Palopo yang ada di Kelurahan Mancani.

2.7.2.5.12. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Untuk data Persentase Cakupan Area Pelayanan di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.230 berikut ini.

Tabel 2.230
Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah	km²/ha	147,88	151,72	159,01	166,27	167,89
b.	Luas area Kota Palopo	km²/ha	247,52	247,52	`247,52	247,52	247,52
	Persentase	**%**	**59**	**61**	**64**	**67**	**67,83**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa luas area pelayanan sampah dari tahun ke tahun meningkat. Jika tahun 2015 hanya 59% wilayah Kota Palopo yang terlayani, tahun 2019 wilayah Kota Palopo sudah dijangkau pelayanan sampah sebanyak 67,83%.

2.7.2.5.13. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Untuk data Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.231 berikut ini.

Tabel 2.231
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah sampah yang tertangani	Meter Kubik (ton)	26.928	26.381	29.405	30.601	29.325
b.	Total jumlah timbulan sampah di Kota Palopo	Meter Kubik (ton)	38.355	35.674	37.427	34.171	33.699
	Persentase	**%**	**70,20**	**73,95**	**78,56**	**89,55**	**87,02**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

Dari data di atas, menunjukkan bahwa persentase volume timbulan sampah yang ditangani dari tahun 2015 – 2019 semakin meningkat. Ini menunjukkan kinerja penanganan sampah di Kota Palopo, membaik. Jika pada tahun 2015 hanya mampu menangani 70,20% timbulan sampah. Tahun 2019, berada pada angka 87,02%.

2.7.2.5.14. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Palopo

Untuk data Operasionalisasi TPA/TPST/SPA Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.232 berikut ini.

Tabel 2.232
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71	72,41	75,65	77,81	79,46	n/a

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa nilai predikat Tempat Pembuangan Sampah Kota Palopo semakin menunjukkan peningkatan ke arah lebih baik. Jika pada tahun 2015 hanya pada angka 72,41, pada tahun 2018 menjadi 79,46. Untuk tahun 2019 belum diumumkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.7.2.6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.7.2.6.1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Semakin tinggi nilai indiaktor ini, artinya semakin baik tingkat kepemilikan dokumen kependudkan berupa KTP di masyarakat. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.233 berikut ini.

Tabel 2.233
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Kota Palopo
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP	Orang	96.727	108.634	114.080	122.053	117.965
b.	Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah	Orang	148.783	138.174	145.476	130.842	125.420
c	**Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk**	**Orang**	**0,65**	**0,79**	**0,78**	**0,65**	**0,67**
d	**Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk per 100**	**Orang**	**65**	**79**	**78**	**65**	**67**

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2015 dari 100 penduduk Kota Palopo, sebanyak 65 orang telah penduduk wajib KTP. Sedangkan tahun 2019 sebanyak 67 orang.

2.7.2.6.2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Semakin tinggi nilai indikator ini, artinya semakin banyak bayi yang memiliki akte lahir. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.234 berikut ini.

Tabel 2.234
Rasio Bayi Berakte Kelahiran Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Bayi Berakta Kelahiran	Orang	2.750	2.609	1.397	1.323	2.183
b.	Jumlah bayi	Orang	3.199	2.977	2310	1.569	2.305
c	**Rasio Bayi Berakte Kelahiran**	**Rasio**	**0.86**	**0.88**	**0.605**	**0,84**	**0,94**
d	**Rasio Bayi Berakte Kelahiran per 100**	**Per 100**	**85.96**	**87.64**	**60.48**	**84,32**	**94**

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2015 dari 100 balita yang lahir, sebanyak 86 bayi telah memiliki akte kelahiran. Pada tahun 2019 dari 100 bayi lahir, mencapai 94 yang memiliki akte kelahiran.

2.7.2.6.3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Adalah perbandingan jumlah pasangan nikah dalam 1 tahun yang berakte terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah pada tahun yang sama. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak pasangan suami istri yang memiliki akte nikah. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.235 berikut ini.

Tabel 2.235
Rasio Pasangan Berakte Nikah Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasang	15.967	14.867	16.116	17.274	14.867
b.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasang	42.281	40.003	42.856	38.930	38.882
c.	**Rasio Pasangan Berakta Nikah**	**Rasio**	**0,38**	**0,37**	**0,38**	**0,44**	**0,38**
d	**Rasio Pasangan Berakta Nikah per 100**	**Per 100**	**38**	**37**	**38**	**44**	**38**

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2015 dari 100 penduduk yang menikah, hanya 38 pasangan yang memiliki akte nikah. Kondisi ini jauh lebih baik dari tahun 2018 dimana dari 100 pasangan nikah 44 pasangan yang resmi memiliki akte nikah, tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 dimana dari 100 pasangan nikah hanya 38 pasangan yang resmi memiliki akte nikah.

2.7.2.6.4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota

Untuk data Ketersediaan Data base Kependudukan Skala Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.236 berikut ini.

Tabel 2.236
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.6.5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Untuk data Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Di Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.237 berikut ini.

Tabel 2.237
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.6.6. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Untuk data Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019, dapat dilihat pada Tabel 2.238 berikut ini.

Tabel 2.238
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan	Lembar	98.514	109.003	114.080	122.053	117.695
b.	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	148.783	138.174	138.174	130.843	125.420
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	**%**	**66,21**	**78,89**	**82,56**	**93,28**	**93,84**

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan tahun 2019 sebanyak 93,84 % penduduk Kota Palopo yang wajib memiliki KTP sudah ber KTP, sehingga tersisa 6,16 % penduduk wajib ber KTP namun belum memiliki KTP. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2015 dimana hanya 66,21 % penduduk wajib KTP yang memiliki KTP.

2.7.2.6.7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Untuk data Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.239 berikut ini.

Tabel 2.239
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan (#)	Orang	2.747	2.755	2.959	3.006	1.811
b.	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan (@)	Orang	2.747	2.755	2.959	3.006	1.811
Persentase		**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Kesehatan 2020 (@) dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2020(#)

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 - 2019, cakupan penerbitan akta kelahiran di Kota Palopo sudah mencapai 100% ini menunjukkan bahwa semua bayi yang lahir pada tahun tersebut, pada tahun itu juga langsung memiliki akte kelahiran.

2.7.2.7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

2.7.2.7.1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Untuk data Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.240 berikut ini.

Tabel 2.240
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kantor pemerintahan kelurahan yang baik	Kantor	47	47	47	48	48
b.	Jumlah seluruh pemerintahan Kelurahan	Kelurahan	48	48	48	48	48
Persentase		**Persen**	**97,92**	**97,92**	**97,92**	**100**	**100**

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2019 tidak ada lagi kantor kelurahan di wilayah Kota Palopo yang kondisinya kurang baik.

2.7.2.7.2. Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah LPM. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik kinerja pembinaan organisasi oleh pemerintah daerah. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.241 berikut ini.

Tabel 2.241
Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	48	48	48	48	48
b.	Jumlah LPM	Kelompok	48	48	48	48	48
Rata-rata		**Kelompok**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa tiap kelurahan di Kota Palopo rata-rata memiliki 1 lembaga pemberdayaan masyarakat. Jumlah LPM ini tidak mengalami pertambahan selama 5 tahun.

2.7.2.7.3. Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Untuk data Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.242 berikut ini.

Tabel 2.242
Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	-	-	145	145	145
b.	Jumlah PKK	Unit	58	58	58	58	58
Rata – rata					**2,5**	**2,5**	**2,5**

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 - 2019, 1 PKK di Kota Palopo membina sebanyak 2-3 kelompok binaan. Kelompok binaan PKK ini antara lain adalah Dasawisma dan BKMT di tingkat kelurahan.

2.7.2.7.4. Persentase LSM Aktif

Adalah jumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif. Semakin tinggi nilai indikator ini, artinya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah semakin baik. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.243 berikut ini.

Tabel 2.243
Persentase LSM Aktif Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah LSM aktif	Buah	0	2	1	0	1
b.	Jumlah LSM	Buah	36	36	36	36	36
Persentase		**%**	**0**	**5,55**	**2,77**	**0**	**2,77**

Sumber Data : Badan kesbang Linmas Kota Palopo Tahun 2020

Sesuai data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, sebagian besar LSM di Kota Palopo sampai dengan tahun 2019, tidak aktif. Jumlah LSM yang aktif tersebut berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo.

2.7.2.7.5. Persentase LPM Berprestasi

Untuk data Persentase LPM Berprestasi Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.244 berikut ini.

Tabel 2.244
Persentase LPM Berprestasi Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah LPM berprestasi	Buah	-	-	2	2	2
b.	Jumlah LPM	Buah	-	-	48	48	48
Persentase		**%**	**-**	**-**	**4,17**	**4,17**	**4,17**

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2020

Sesuai data dari Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo, pada tahun 2019 hanya 4,17% atau 2 LPM di Kota Palopo yang berprestasi. Jumlah relatif masih sedikit dibanding jumlah seluruh LPM yang ada di Kota Palopo.

2.7.2.7.6. Persentase PKK Aktif

Untuk data Persentase PKK Aktif Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.245 berikut ini.

Tabel 2.245
Persentase PKK Aktif Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah PKK aktif	Unit	58	58	58	58	58
b.	Jumlah PKK	Unit	58	58	58	58	58
Persentase		**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2019

Sesuai data Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palopo, dari 58 PKK yang ada di Kota Palopo terdiri dari 9 PKK Kecamatan dan 48 PKK Kelurahan.

2.7.2.7.7. Persentase Posyandu Aktif

Untuk data Persentase PKK Aktif Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.246 berikut ini.

Tabel 2.246
Persentase Posyandu Aktif Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah posyandu aktif	Buah	147	147	149	149	149
b.	Total posyandu	Buah	147	147	149	149	149
Persentase		**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda dan Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019, Posyandu di Kota Palopo 100% berfungsi aktif melakukan pembinaan kesehatan masyarakat. Selain itu, data di atas juga menunjukkan bahwa terjadi penambahan 2 unit Posyandu dari 147 unit di tahun 2016 menjadi 149 di tahun 2017-2019.

2.7.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.7.2.8.1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu, angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.247 berikut ini.

Tabel 2.247
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,42	2,38	2,31	2,13	2,18

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2020

2.7.2.8.2. Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek

Adalah indikator yangmenunjukkan adanya dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada pemerintah daerah. Indikator ini menunjukkan adanya garnd desain pada level pemerintah daerah dalam mengendalikan laju peetumbuhan penduduk dan scenario penanganannya. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.248 berikut ini.

Tabel 2.248
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.8.3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Sesuai permendagri 86 tahun 2017, indikator ini adalah persentase Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang aktif di kampung KB terhadap Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ada. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.249 berikut ini.

Tabel 2.249
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif di kampung KB	-	16	16	16	18
Jumlah semua perangkat daerah	40	40	49	49	49
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB	**-**	**40,00**	**32,65**	**32,65**	**36,73**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Perangkat daerah yang berperan aktif di Kampung KB Kota Palopo sejak tahun 2016 - 2019 adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perikanan, 9 Kantor Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

2.7.2.8.4. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Indikator ini untuk melihat rata-rata jumlah anak per kelurga yang ada di Kota Palopo yang mengindikasikan berhasil tidaknya program pengendalian jumlah penduduk melalui program program keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.250 berikut ini.

Tabel 2.250
Rata-rata jumlah anak per keluarga Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah anak (Orang)	65.233	66.155	62.376	62.433	61.121
Jumlah keluarga	34.734	34.660	34.786	34.843	34.925
Rata-rata jumlah anak per keluarga	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa program Keluarga Berencana di Kota Palopo berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk. Data menunjukkan sepanjang tahun 2015-2019, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Palopo hanya 2 orang. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pengendalian penduduk terutama dalam ber KB berhasil.

2.7.2.8.5. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Untuk data Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.251 berikut ini.

Tabel 2.251
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah peserta KB aktif	15.255	16.873	17.774	18.226	16.973
Jumlah pasangan usia subur	21.980	23.181	23.802	24.254	22.411
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	**69,40**	**72,79**	**74,67**	**75,15**	**75,73**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan angka pemakaian alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) dalam memakai alat kontrasepsi. Pada tahun 2019, dari 100 PUS

sekitar 76 PUS telah menggunakan alat kontrasepsi. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun – tahun sebelumnya.

2.7.2.8.6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun

Untuk data Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.252 berikut ini.

Tabel 2.252
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	471	222	239	223	66
Jumlah pasangan usia subur	21.980	23.181	23.802	24.254	22.411
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	**2.14**	**0.96**	**1.00**	**0,92**	**0,29**
Per 1000 PUS	**21**	**10**	**10**	**9**	**3**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2015 dari 1.000 Pasangan Usia Subur, terdapat 21 Pasangan Usia Subur yang memiliki istri berumur di bawah 20 tahun. Namun pada tahun 2019, hanya terdapat 3 pasangan PUS yang memiliki istri berumur dibawah 20 tahun. Ini menunjukkan semakin berkurangnya pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun sekaligus memberikan gambaran semakin membaiknya kesadaran masyarakat Kota Palopo untuk tidak menikah dalam usia dini.

2.7.2.8.7. Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Untuk data Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.253 berikut ini.

Tabel 2.253
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	6.654	5.468	5.350	5.802	2.768
Jumlah pasangan usia subur	21.980	23.181	23.802	24.254	22.411
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	**30.27**	**23.59**	**22.48**	**23,92**	**12,35**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pelayanan ber KB bagi PUS di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 semakin membaik. Tahun 2015 masih terdapat 30,27 % Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber KB, tapi tidak terpenuhi, artinya pada tahun ini hanya ada 69,73 % PUS yang ingin ber KB dan sudah terpenuhi.

Sementara di tahun 2019, persentase PUS yang ingin ber-KB dan sudah terpenuhi telah berada pada angka 87,65 %, karena hanya ada 12,35 % PUS yang ingin ber KB dan belum terpenuhi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin banyak PUS yang ingin ber-KB dan telah mendapatkan pelayanan KB setiap tahunnya. Olehnya angka target indikator ini ke depannya harus lebih ditekan dari tahun 2019.

2.7.2.8.8. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Untuk data Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.254 berikut ini.

Tabel 2.254
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	3.190	3.635	3.877	4.648	3.721
Jumlah akseptor KB	15.255	16.873	17.774	18.545	16.973
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	**20,91**	**21,54**	**21,81**	**25,06**	**21,92**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019, jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kota Palopo semakin meningkat. Baik dalam skala jumlah, maupun dalam skala persentase. Jika pada tahun 2015 terdapat 3.190 akseptor KB menggunakan MKJP (20,91%), tahun 2019 akseptor KB menggunakan MKJP meningkat menjadi 3.721 atau 21,92%.

Data tersebut juga memberikan informasi, bahwa dari 100 akseptor KB, pada tahun 2015, sebanyak 20-21 akseptor menggunakan MKJP, 78-79 akseptor lainnya menggunakan alat kontrasepsi lainnya. Dan pada tahun 2018, jumlahnya menjadi 25 akseptor pengguna MKJP, tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan 22 akseptor.

2.7.2.8.9. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Penggunaan konstrasepsi yang paling lama adalah 72 bulan (6 tahun). Untuk data Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.255 berikut ini.

Tabel 2.255
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan Kontrasepsi	9.196	8.071	8.023	8.794	5.438
Jumlah akseptor KB	15.255	16.873	17.774	18.545	16.973
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	**60,28**	**47,83**	**45,14**	**47,42**	**32,03**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 akseptor KB yang ada, ada 61 pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsinya dan 39 pasangan masih menggunakan alat kontrasepsi.

Kemudian pada tahun 2019, ada 32 pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsinya dan 68 pasangan masih yang menggunakan alat kontrasepsinya. Artinya sejak 2015-2019, jumlah PUS akseptor KB yang masih menggunakan alat kontrasepsi meningkat, dari 61 pasangan tahun 2015 menjadi 32 pasangan pada tahun 2019.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih diturunkan.

2.7.2.8.10. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.256 berikut ini.

Tabel 2.256
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)ber-KB
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	1.035	1.045	3.345	3.981	3.940
Jumlah anggota kelompok BKB	1.535	1.660	4.451	5.087	5.316

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)ber-KB (%)	**67,43**	**62,95**	**75,15**	**78,26**	**74,11**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 anggota kelompok BKB, terdapat 68 anggota kelompok BKB yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 32 belum ber KB. Kemudian pada tahun 2019, ada 74 anggota kelompok BKB, yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 26 belum ber KB.

Artinya sejak 2015-2019, semakin banyak anggota Bina Keluarga Balita yang mengikuti program KB. Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

2.7.2.8.11. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Untuk data Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.257 berikut ini.

Tabel 2.257
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	169	536	2.007	2.632	2.601
Jumlah anggota kelompok BKR	331	1.011	3.427	4.052	4.306
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	**51,06**	**53,02**	**58,56**	**64,96**	**60,61**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), terdapat 51 anggota kelompok BKR yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 49 belum ber KB. Kemudian pada tahun 2019, ada 61 anggota kelompok BKR, yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 39 belum ber KB. Artinya sejak 2015-2019, semakin banyak anggota Bina Keluarga Remaja yang mengikuti program KB dan semakin sedikit anggota BKR yang tidak ber KB.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

2.7.2.8.12. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Untuk data Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.258 berikut ini.

Tabel 2.258
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	122	342	1.458	2.001	1.855
Jumlah anggota kelompok BKL	355	809	3.089	3.632	3.411
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	**34,37**	**42,27**	**47,20**	**55,09**	**54,38**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 anggota kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), terdapat 35 anggota kelompok BKL yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 65 belum ber KB. Kemudian pada tahun 2019, ada 55 anggota kelompok BKL yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 45 belum ber KB. Artinya sejak 2015-2019, semakin banyak anggota Bina Keluarga Lansia yang mengikuti program KB dan semakin sedikit anggota BKL yang tidak ber KB.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

2.7.2.8.13. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Untuk data Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.259 berikut ini.

Tabel 2.259
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PPKS	1	1	1	1	1
Jumlah Kecamatan	9	9	9	9	9
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	**0,11**	**0,11**	**0,11**	**0,11**	**0,11**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Palopo hanya memiliki satu Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera itupun harus melayani 9 kecamatan yang ada.

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Palopo hanya memiliki satu Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera itupun harus melayani 9 kecamatan yang ada.

2.7.2.8.14. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) adalah suatu wadah kegiatan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta perencanaan kehidupan berkeluarga.

Keberadaan dan peranan PIK R/M dilingkungan remaja/mahasiswa sangat penting artinya dalam membantu remaja/mahasiswa untuk memperoleh informasi dan pelayanan konseling yang cukup dan benar tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.260 berikut ini.

Tabel 2.260
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PIK R/M (Buah)	22	66	81	93	184
Jumlah Kecamatan (Buah)	9	9	9	9	9
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (a/b)	**2,44**	**7,33**	**9,00**	**10,33**	**20,44**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Kota Palopo memiliki 22 Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa. Artinya pada tahun ini, untuk setiap kecamatan di Kota Palopo terdapat 2 wadah PIK Remaja dan Mahasiswa yang terbentuk. Pada tahun 2019, kondisinya jauh semakin baik. Sebab satu kecamatan, rata-rata memiliki 20 PIK R/M. Meningkatnya jumlah pusat informasi dan konseling di Kota Palopo diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan kepada remaja dan mahasiswa di Kota Palopo.

2.7.2.8.15. Cakupan PKB/PLKByang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Untuk data Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.261 berikut ini.

Tabel 2.261
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	49	68	68	68	66
Jumlah PKB/PLKB	49	68	68	68	66
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.8.16. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Untuk data Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.262 berikut ini.

Tabel 2.262
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	117	123	640	774	671
Jumlah anggota kelompok UPPKS	454	693	3102	3.791	2.804
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	**25,77**	**17,75**	**20,63**	**20,42**	**23,93**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 anggota kelompok UPPKS, hanya ada 26 anggota yang sudah ber KB Mandiri, sisanya sebanyak 74 anggota belum ber KB secara mandiri.

Kemudian pada tahun 2019, hanya ada 24 anggota kelompok UPPKS yang sudah ber KB mendiri, sisanya sebanyak 76 anggota belum ber KB secara mandiri. Artinya sejak 2015-2018, kemandirian anggota kelompok UPPKS untuk ber KB meningkat, namun tahun 2019 mengalami penurunan. Sebab dari 100 anggota UPPKS, jumlah anggota yang ber KB secara mandiri justru mengalami fluktuatif, dari 26 anggota pada tahun 2015 menurun menjadi 18 anggota, tahun 2017 meningkat lagi menjadi 21 anggota, tahun 2018 kembali berkurang menjadi 21 anggota, dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 24 anggota.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini pada tahun 2019, lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2015. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

2.7.2.8.17. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Untuk data Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Kelurahan Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.263 berikut ini.

Tabel 2.263
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Kelurahan Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	48	48	48	48	48
Jumlah Kelurahan	48	48	48	48	48
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019, satu kelurahan di Kota Palopo telah dilayani satu orang petugas pembantu pembina KB Desa. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan KB dan keberhasilan program KB di setiap kelurahan di Kota Palopo.

2.7.2.8.18. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota

Untuk data Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Gudang Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.264 berikut ini.

Tabel 2.264
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Gudang Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persediaan alat dan obat Kontrasepsi	1.121	5.330	9.688	11.830	13.849
Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan tingkat Kota	260	551	1.331	1.599	1.049
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	**4,31**	**9,67**	**7,28**	**7,39**	**13,20**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.8.19. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes

Untuk data Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.265 berikut ini.

Tabel 2.265
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persediaan alat dan obat Kontrasepsi	59.491	11.673	4.512	1.414	4.512
Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan di Faskes	**119,16**	**211,91**	**67,91**	**32,58**	**67,91**
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	**499.30**	**55.1**	**66.4**	**43,40**	**66,40**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.8.20. Persentase Faskes Dan Jejaringnya (diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Untuk data Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada tabel 2.266 berikut ini.

Tabel 2.266
Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Standarisasi Pelayanan Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	16	19	20	20	23
Jumlah Faskes dan jejaring	16	19	20	20	23
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019, semua fasilitas kesehatan dan jejaringnya seluruhnya telah bekerjasama dengan BPJS. Ini menunjukkan bahwa akses untuk mendapatkan pelayanan KBKR di Kota Palopo semakin terbuka.

2.7.2.8.21. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Untuk data Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.267 berikut ini.

Tabel 2.267
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	48	145	427	465	732
Jumlah kelompok kegiatan	68	139	221	259	732
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	**0,71**	**1,04**	**1,93**	**1,80**	**1,00**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.8.22. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Untuk data Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.268 berikut ini.

Tabel 2.268
Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	991	1.025	3.686	4.284	4.306
Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	4.158	5.220	6.715	6.570	4.306
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	**23,83**	**19,63**	**54,89**	**65,21**	**100**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.8.23. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

Untuk data Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.269 berikut ini.

Tabel 2.269
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	1.541.862.500	3.332.894.600	2.969.721.000	2.784.312.000	2.441.839.000
Jumlah APBD dan APBDes	4.098.597.000	5.112.260.200	3.542.370.000	3.356.961.000	5.909.076.000
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	**37,62**	**65,19**	**83,83**	**82,94**	**41,32**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.9. Bidang Urusan Perhubungan

2.7.2.9.1. Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator ini menggambarkan kinerja operasional layanan angkutan umum yang ada di Kota Palopo. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelengaraan Angkutan Umum,Jumlah penumpang yang dimaksud merupakan jumlah penumpang yang terangkut oleh satu angkutan umum dalam satu hari (satuan dari jumlah penumpang adalah penumpang/angkutan/hari).

Indikator ini merupakan asalah satu dari beberapa parameter evaluasi kinerja sektor perhubungan. Semakin banyak jumlah arus penumpang yang terangkut, semakin mudahnya aksesibiltas sebuah wilayah.

Indikator ini mengurai besaran jumlah arus penumpang angkutan umum untuk masing-masing moda transportasi bis, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun dibagi dengan total Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.270 berikut ini.

Tabel 2.270
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan bis (Orang)	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.326.741	1.323.252
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan kapal laut (Orang)	769	122	445	314	352
Jumlah total arus penumpang angkutan umum (Orang)	**1.689.617**	**1.680.146**	**1.345.436**	**1.327.055**	**1.323.604**

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Data ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 – 2019, jumlah penumpang yang keluar masuk di Kota Palopo menurun. Jika tahun 2015, ada sebanyak 1.689.617 orang, tahun 2019 hanya ada 1.323.604 penumpang angkutan umum. Salah satu faktor yang patut diduga menjadi penyebab penurunan ini, adalah cukup banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi udara.

2.7.2.9.2. Rasio Ijin Trayek

Ijin trayek adalah adalah ijin untuk mengangkut orang dan barang dengan kendaraan angkutan umum (bis atau mobil penumpang) pada jaringan trayek. Satu trayek biasanya dilayani puluhan armada angkutan umum. Trayek sendiri adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang/barang dengan mobil yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Indikator ini memberikan gambaran cakupan pelayanan trayek angkutan umum dalam memenuhi kebutuhan penduduk Kota Palopo. Apakah jumlah trayek yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Palopo sudah mampu melayani seluruh penduduk dalam mengakses wilayah di Kota Palopo menggunakan angkutan umum. Semakin tinggi nilai rasio indikator ini, semakin banyak masyarakat yang terlayani angkutan umum dan semakin mudah mengakses wilayah di Kota Palopo dengan angkutan umum. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.271 berikut ini.

Tabel 2.271
Rasio Ijin Trayek Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Buah	3	3	3	4	4
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	168.894	172.916	176.907	202.483	202.204
c	**Rasio**	**Per 100.000**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dalam mengakses wilayah di Kota Palopo, hanya tersedia 3 trayek angkutan umum bagi 100.000 penduduk Kota Palopo. Jumlah ini relatif stagnan sampai dengan tahun 2019. Dari perspektif layanan angkutan umum, masyarakat akan semakin kesulitan mengakses beberapa spot wilayah di Kota Palopo jika ingin menggunakan angkutan umum massal. Sebab jumlah penduduk akan cenderung terus bertambah. Meski demikian saat ini, Kota Palopo memiliki alternatif transportasi umum lainnya misalnya taksi dan layanan transportasi daring/internet sepeda motor.

2.7.2.9.3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Indikator ini menggambarkan partisipasi para pelaku usaha angkutan umum memenuhi standar kelayakan angkutan umum dari aspek keamanan dan kenyaman serta kelaikan operasional kendaraan nya. Semakin tinggi angka indikator ini, maka semakin banyak angkutan umum yang laik dan aman untuk diakses oleh publik. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.272 berikut ini.

Tabel 2.272
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	1.345	1.301	1.152	1.411	1.381

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.9.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Indikator ini menggambarkan jumlah sentra pelayanan transportasi dan perhubungan masyarakat atau publik yang ada di Kota Palopo. Semakin beragam jumlah sentra atau pusat pelayanan transportasi publik, maka semakin tinggi aksesibilitas sebuah wilayah dijangkau oleh masyarakat. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.273 berikut ini.

Tabel 2.273
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pelabuhan laut	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah terminal bis	Unit	1	1	1	1	1

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.9.5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator yang menunjukkan seberapa besar kemampuan layanan angkutan tranportasi darat yang tersedia untuk memenuhi atau mencover kebutuhan transportasi darat atau penumpang yang ada. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin tinggi kemampuan layanan angkutan darat di Kota Palopo. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.274 berikut ini.

Tabel 2.274
Persentase Layanan Angkutan Darat Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah angkutan darat	Unit	1.524	1.441	1.332	1.452	1.415
b.	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.326.741	1.323.252
Persentase		**%**	**0,090**	**0,085**	**0,099**	**0,109**	**0,106**
Per 10.000 Penumpang			**9,02**	**8,5**	**9,9**	**10,9**	**10,6**

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, untuk melayani 10.000 penumpang angkutan darat di Kota Palopo hanya tersedia 9 unit angkutan darat. Kondisi yang tak jauh

berbeda juga terjadi pada tahun 2019, dimana untuk 10.000 penumpang angkutan darat hanya tersedia 11 unit angkutan darat.

2.7.2.9.6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Indikator yang menggambarkan seberapa besar kedisplinan para pelaku usaha angkutan umum memenuhi standar kelayakan angkutan umum dari aspek keamanan dan kenyaman serta kelaikan operasional kendaraan nya. Semakin tinggi angka indikator ini, maka semakin banyak angkutan umum yang laik dan aman untuk diakses oleh publik. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.275 berikut ini.

Tabel 2.275
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n	Unit	170	140	180	41	12
b.	Jumlah angkutan umum pada tahun n	Unit	1.524	1.441	1.332	1.452	1.393
Persentase		**%**	**10,89**	**11,15**	**9,71**	**13,51**	**0,86**

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dari 100 angkutan umum yang beroperasi di Kota Palopo hanya 11 kendaraan yang tidak memiliki KIR, artinya ada sebanyak 89 kendaraan yang sudah memiliki KIR. Pada tahun 2019, kondisi ini jauh lebih baik, sebab hanya ada 1 kendaraan yang tidak memiliki KIR per 100 kendaraan. Meningkatnya kepemilikan KIR angkutan umum ini mengindikasikan membaiknya tingkat kelayakan dan keamanan angkutan umum.

2.7.2.9.7. Pemasangan Rambu – Rambu

Indikator ini menggambarkan tingkat pengamanan jalan raya bagi pengguna jalan yang tersedia melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Semakin panjang jalan yang menggunakan rambu, maka semakin besar tingkat pengamanan jalan raya yang tersedia. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.276 berikut ini.

Tabel 2.276
Persentase Pemasangan Rambu – Rambu Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah pemasangan rambu – rambu pada tahun n	Buah	142	144	158	179	254
b.	Jumlah rambu – rambu yang seharusnya tersedia	Buah	205	220	250	254	450
Persentase		**%**	**65,27**	**65,45**	**63,20**	**70,47**	**46,40**

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, pemenuhan kebutuhan rambu lalu lintas hanya 65,27%, kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2017 yang berada pada angka 63,20% tetapi kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 yang berada pada angka 70,47%, namun pada tahun 2019 kembali turun pada angka 46,40%. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa tingkat pengamanan jalan raya bagi pengguna jalan di Kota Palopo dari 2015-2019 mengalami fluktuatif.

2.7.2.10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika adalah media yang dapat digunakan untuk memudahkan setiap orang berkomunikasi, menambah pengetahuan serta sebagai sarana hiburan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemudahan setiap orang berkomunikasi yakni tersedianya jaringan telepon, dsb.

2.7.2.10.1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kelompok Informasi Masyarakat adalah Lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhannya terletak di perkotaan/pedesaan beranggotakan 3 (tiga) sampai 30 (tiga puluh) orang dapat terdiri dari remaja, orang dewasa/tua, laki-laki atau perempuan, Pelajar atau mahasiswa, pedagang, petani atau nelayan dll. Semakin tinggi nilai idnikator ini, artinya semakin besar partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan layanan informasi yangmenunjukkan semakin terbukanya masyarakat terhadap perubahan. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.277 berikut ini.

Tabel 2.277
Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah KIM	Kelompok	0	0	30	30	32
b.	Jumlah kecamatan yang ada dalam Kota Palopo	Kecamatan	9	9	9	9	9
Persentase		**%**	**0**	**0**	**3,33**	**3,33**	**3,55**

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa di Kota Palopo sampai dengan tahun 2019 KIM terbentuk sebanyak 32 lembaga. Ini menunjukkan bahwa partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi di Kota Palopo oleh masyarakat mulai melembaga dan dianggap penting.

2.7.2.10.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Indikator yang memggambarkan seberapa besar wilayah dan masyarakat di sebuah wilayah mampu mengakses informasi dan komunikasi. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin lancar arus informasi dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat semakin terbuka dalam memanfaatkan informasi. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.278 berikut ini.

Tabel 2.278
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luas wilayah yang tercoverage	Km²	205,44	212,87	212,87	222,47	222,47
b.	Luas wilayah keseluruhan	Km²	247,52	247,52	247,52	247,52	247,52
Jumlah (a/b)			**0,80**	**0,83**	**0,86**	**0,90**	**0,90**

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan cakupan wilayah Kota Palopo yang mampu diakases jaringan atau layanan telekomunikasi dari 80% menjadi 90%. Peningkatan luas coverage ini menunjukkan semakin besar wilayah Kota palopo termasuk penduduk Kota Palopo yang diakses oleh layanan telekomunikasi. Ini menunjukkan sebuah perkembangan yang cukup baik bagi keterbukaan informasi di sebuah daerah.

2.7.2.10.3. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Indikator yang menunjukkan penggunaan internet pada rumah tangga yang ada di Kota Palopo. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin besar penetrasi internet dalam rumah tangga. Semakin mudah arus komunikasi dan informasi yang mungkin dan bisa diakses oleh masyarakat. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.279 berikut ini.

Tabel 2.279
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah rumah tanggayang memiliki akses internet	KK	2.727	2.837	3.314	7.029	9.045
b.	Jumlah rumah tangga	KK	36.871	37.749	38.641	39.444	39.444
Jumlah (a/b)			**0,07**	**0,07**	**0,08**	**0,18**	**0,23**

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan tahun 2019, dari 100 rumah tangga di Kota Palopo, rata-rata sebanyak 23 Rumah tangga telah mengakses internet. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan tahun 2015 yang hanya pada angka 7 Rumah Tangga saja. Ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan internet pada rumah tangga di Kota Palopo terus mengalami peningkatan, dan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan berbagai sumber informasi.

2.7.2.10.4. Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi

Indikator ini menunjukkan besaran masyarakat atau rumah tangga yang menggunakan komputer pribadi. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin banyak masyarakat atau rumah tangga yang menggunakan komputer pribadi dalam aktifitasnya sehari-hari. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.280 berikut ini.

Tabel 2.280
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	KK	12.167	13.967	15.456	16.383	19.700
b.	Jumlah rumah tangga	KK	36.871	37.749	38.641	39.444	39.444
Jumlah (a/b)			**0,33**	**0,37**	**0,40**	**0,42**	**0,50**

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan jumlah pengguna komputer pribadi per rumah tangga di Kota Palopo terus meningkat. Dari 100 rumah tangga yang ada pada tahun 2015 sebanyak 33 rumah tangga menggunakan komputer pribadi, dan tahun 2019 bertambah menjadi 50 rumah tangga. Ini menunjukkan penggunaan komputer di masyarakat dan di Kota Palopo semakin memasyarakat.

2.7.2.11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.7.2.11.1. Persentase Koperasi Aktif

Pada tahun 2015, jumlah seluruh koperasi di Kota Palopo sebanyak 283 unit dan setiap tahun terus meningkat hingga mencapai 292 unit pada tahun 2019. Namun dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif terus mengalami fluktuatif. Permasalahan dari persentase koperasi aktif, yakni adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.281 berikut ini.

Tabel 2.281
Presentase Koperasi Aktif Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	201	204	204	206	74
b.	Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	283	286	287	290	292
	Jumlah Koperasi Aktif	**%**	**71,02**	**71,32**	**71,08**	**71,03**	**25,34**

Sumber Data : Dinas Koperasi & UMKM Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.11.2. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

LKM memainkan peran yang cukup penting terutama dalam hal Peran Pengentasan Kemiskinan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Keberadaannya mendorong usaha kecil atau usaha mikro yang bersifat produktif melalui penyediaan fasilitas pinjaman skala kecil. Peran Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Dalam upaya peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus bisa mengurangi angka pengangguran dengan mendorong sektor usaha mikro. Usaha tersebut dapat berupa pemberian kredit dengan bunga kecil. Selain itu juga menumbuh kembangkan produksi mikro dalam jumlah yang lebih besar lagi, seperti pada pemberian kredit kepada usaha properti dan jenis usaha lainnya. Hal tersebut dikarenakan usaha kecil mikro sudah jelas terbukti memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi krisis yang tinggi. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.282 berikut ini.

Tabel 2.282
Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	1.512	1.982	2.037	2.158	2.209
b.	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	Unit	1.512	1.982	2.307	2.160	2.211
	Persentase	**%**	**100**	**100**	**100**	**99,91**	**99,91**

Sumber Data : Dinas Koperasi & UMKM Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.11.3. Persentase BPR/LKM Aktif

Yang dimaksud LKM adalah Lembaga Keuangan Mikro, sementara BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.LKM umumnya diakses oleh masyarakat di tingkat pedesaan atau wilayah yang selama ini sulit dijangkau atau menjangkau bank komersial. LKM bisanya berbentuk koperasi atau Perseroan terbatas.

2.7.2.11.4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Maks. 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. 300 juta rupiah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta - 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 Miliar rupiah. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.283 berikut ini.

Tabel 2.283
Presentase Usaha Mikro dan Kecil Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	4.878	6.314	6.561	6.664	6.764
b.	Jumlah seluruh UKM	Unit	6.390	8.296	8.598	8.824	8.975
	Persentase	**%**	**76,34**	**76,11**	**76,31**	**75,52**	**75,37**

Sumber Data : Dinas Koperasi & UMKM Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sejak 2015, usaha mikro dan kecil mendominasi kondisi UMKM yang ada di Kota Palopo. Oleh karenanya program dan kegiatan UMKM akan lebih banyak dirasakan manfaatnya jika difokuskan pada Usaha Mikro dan Usaha kecil yang ada di Kota Palopo.

2.7.2.12. Bidang Urusan Penanaman Modal

Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2.7.2.12.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Berikut adalah tabel jumlah investor berskala nasional di Kota Palopo 2015-2019.Jumlah investor merujuk pada jumlah proyek-proyek penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.284 berikut ini.

Tabel 2.284
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA	95	122	147	129	78

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2019

2.7.2.12.2. Jumlah dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur di dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.Nilai investasi merujuk pada besaran rupiah dari proyek-proyek penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun.

Berikut adalah Tabel 2.285 adalah jumlah investor berskala nasional di Kota Palopo 2015-2019.

Tabel 2.285
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Buah)	95	122	147	129	85
Jumlah nilai investasi verskala nasional (PMA/PMDN) (Juta)	96.603,15	268.331,63	382.322,26	220,859	130,740

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2019

2.7.2.12.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut.Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN terhadap jumlah seluruh PMDN dan PMA. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.286 berikut ini.

Tabel 2.286
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan (*)	Orang	21.735	28.337	28.377	30.140	n/a
b.	Jumlah seluruh PMDN (**)	Juta	96.603,15	268.331,63	382.322,26	220.859	n/a
c	**Rasio per 100 Juta**	**Angka**	**22.50**	**10.56**	**7.42**	**13.65**	

Sumber Data : (**) Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2018, (*) Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Angka dalam tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2015 untuk 100 juta nilai PMDN, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 22-23 orang. Sementara pada tahun 2018 untuk nilai PMDN yang sama yakni 100 juta hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 13-14 orang.

2.7.2.12.4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Untuk data Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.287 berikut ini.

Tabel 2.287
Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Realisasi PMDN tahun evaluasi	Rupiah	(44.673.143.956)	1.717.284.282.177	113.990.629.638	220,859,000,000	130,740,222,514
b.	Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Rupiah	141.276.296.168	96.603.152.212	268.331.634.389	382,322.260.000	220,859.000.000
	Persentase	**%**	**(32)**	**178**	**42,48**	**57,77**	**59,19**

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2018 dan Data Potensi Kota Palopo Tahun 2014 & 2015

2.7.2.13. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

2.7.2.13.1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemuda merupakan generasi yang berpotensial sebagai penerus cita – cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsa. Pemuda masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah yang baik, agar dapat melanjutkan dan mengisi pembangunan yang kini tengah berlangsung. Untuk melihat data Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.288 berikut ini.

Tabel 2.288
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	OKP	148	151	151	151	153
b.	Jumlah seluruh organisasi pemuda	OKP	218	218	218	218	218
	Persentase	**%**	**67,9**	**69,3**	**69,3**	**69,3**	**70,2**

Sumber Data : Dinas Pemuda &Olah Raga Kota Palopo Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase organisasi Pemuda yang aktif mengalami peningkatan dari 67,9% pada tahun 2015 menjadi 69,3% tahun 2016-2018, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 70,2% .

2.7.2.13.2. Persentase Wirausaha Muda

Persentase wirausaha muda di Kota Palopo terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi lingkungan masyarakat. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.289 berikut ini.

Tabel 2.289
Persentase Wirausaha Muda Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah wirausaha muda	Kelompok	120	134	134	134	136
b.	Jumlah seluruh wirausaha	Kelompok	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	Persentase	**%**	**1,56**	**1,75**	**1,75**	**1,75**	**1,77**

Sumber Data : Dinas Pemuda &Olah Raga Kota Palopo Tahun 2020

Dari tabel persentase di atas menunjukkan peningkatan, dimana dari 1.000 kelompok wirausaha terdapat 156 wirausaha muda pada tahun 2015 naik menjadi 175 pada tahun 2016-2018, dan kembali naik pada tahun 2019 sebesar 177 wirausaha muda.

2.7.2.13.3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Untuk data Persentase Pembinaan Olahraga Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.290 berikut ini.

Tabel 2.290
Persentase Pembinaan Olahraga Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2109

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabor	0	10	10	12	16
b.	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabor	26	26	26	26	27
	Persentase	**%**	**0**	**38,46**	**38,46**	**46,15**	**59,26**

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.13.4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Untuk data Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.291 berikut ini.

Tabel 2.291
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	27	27	27	27	27
b.	Jumlah seluruh pelatih	Orang	83	83	83	83	83
	Persentase	**%**	**32,53**	**32,53**	**32,53**	**32,53**	**32,53**

Sumber Data : Dinas Pemuda &Olah Raga Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.13.5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Untuk data Persentase Pembinaan Atlet Muda Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.292 berikut ini.

Tabel 2.292
Persentase Pembinaan Atlet Muda Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	10	36	7	7	4

Sumber Data : Dinas Pemuda &Olah Raga Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.13.6. Jumlah Atlet Berprestasi

Untuk data Persentase Atlet Berprestasi Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.293 berikut ini.

Tabel 2.293
Persentase Atlet Berprestasi Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	10	36	7	7	4

Sumber Data : Dinas Pemuda &Olah Raga Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.13.7. Jumlah Prestasi Olahraga

Untuk data Persentase Prestasi Olahraga Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.294 berikut ini.

Tabel 2.294
PersentasePrestasi Olahraga Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	10	36	7	7	4

Sumber Data : Dinas Pemuda &Olah Raga Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.14. Bidang Urusan Statistik

2.7.2.14.1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi

Untuk data Ketersediaan Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.295 berikut ini.

Tabel 2.295
Ketersediaan Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Dalam Proses

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.14.2. Buku "Palopo Dalam Angka"

Untuk data Ketersediaan Buku "Palopo Dalam Angka" Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.296 berikut ini.

Tabel 2.296
Ketersediaan Buku "Palopo Dalam Angka" Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Buku Palopo Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Dalam Proses

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.14.3. Buku "PDRB"

Untuk data Ketersediaan Buku "PDRB" Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.297 berikut ini.

Tabel 2.297
Ketersediaan Buku "PDRB" Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Buku "PDRB"	Ada	Ada`	Ada	Ada	Dalam Proses

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.15. Bidang Urusan Persandian

2.7.2.15.1. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Indikator ini menggambarkan tingkat pengamanan informasi pada tingkat Pemerintah Kota dan Perangkat daerah Kota Palopo. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan bahwa pengamanan informasi dari aspek jaminan terhadap keotentikan, keutuhan, ketersediaan, dan nir penyangkalan informasi pada pemerintah Kota Palopo, lebih baik. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.298 berikut ini.

Tabel 2.298
Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	OPD	22	30	35	38	39
b.	Jumlah total perangkat daerah	OPD	40	40	49	49	49
	Persentase	**%**	**55**	**75**	**71,42**	**77,55**	**79,59**

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.16. Bidang Urusan Kebudayaan

2.7.2.16.1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Untuk data Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.299 berikut ini.

Tabel 2.299
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	10	12	15	18	14

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2020

Festival merupakan sarana komunikasi yang penting untuk membangun, memberdayakan dan pengakuan suatu identitas budaya. Festival seni dan budaya juga merupakan upaya untuk mempertahankan nilai – nilai seni budaya dan nilai tradisional.

2.7.2.16.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Untuk data Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.300 berikut ini.

Tabel 2.300
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	21	148	148	148	148
b.	Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah	Buah	21	149	149	149	149
	Persentase	**%**	**100**	**99,32**	**99,32**	**99,32**	**99,32**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2020

Dari 149 buah total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah, yang merupakan aset daerah sebanyak 148 buah. 1 buah merupakan rumah pribadi yang berada dalam kawasan cagar budaya sehingga tidak dilakukan pelestarian oleh pemerintah Kota Palopo.

2.7.2.16.3. Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi

Untuk data Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.301 berikut ini.

Tabel 2.301
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	1	0	0	0

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.16.4. Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Untuk data Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.302 berikut ini.

Tabel 2.302
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	37	51	51	51	52

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.17. Bidang Urusan Perpustakaan

2.7.2.17.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Untuk data Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.303 berikut ini.

Tabel 2.303
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Orang	10.833	13.274	13.650	14.456	14.958
b.	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	141.282	144.650	147.955	147.300	147.300
	Persentase	**%**	**7,67**	**9,18**	**9,23**	**9,81**	**10,15**

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2015, hanya 7,67 % masyarakat yang wajib baca yang pernah memafaatkan jasa layanan perpusatakaan daerah Kota Palopo. Namun persentasenya terus meningkat sampai pada tahun 2019 berada pada angka 10,15% atau tumbuh kurang lebih dua persen periode 2015 – 2019.

2.7.2.17.2. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Untuk data Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.304 berikut ini.

Tabel 2.304
Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	624	308	1.232	1.191	7.656
b.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	1.776	895	2.632	2.360	19.891
	Persentase	**%**	**35,14**	**34,41**	**46,81**	**50,46**	**38,49**

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.17.3. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Untuk data Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.305 berikut ini.

Tabel 2.305
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah perpustakaan	Jiwa	205	205	208	208	208
Jumlah penduduk	Jiwa	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	**Per 1000**	**1.21**	**1.19**	**1.18**	**1,16**	**1,13**

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bawah sejak 2015 – 2019, rasio perpustakaan yang di Kota Palopo terhadap jumlah penduduk relatif mengalami penurunan. Jika tahun 2015, untuk 1.000 penduduk tersedia 1 unit perpustakaan, kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2019.

2.7.2.17.4. Jumlah Rata – Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Untuk data Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.306 berikut ini.

Tabel 2.306
Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah rata- rata pengunjung perpustakaan per tahun	902	1.106	1.137	1.204	1.246

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.17.5. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Untuk data Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.307 berikut ini.

Tabel 2.307
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	624	308	1.232	1.191	404

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.17.6. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Untuk data Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.308 berikut ini.

Tabel 2.308
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Orang	0	1	1	1	2
b.	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	Orang	3	3	3	3	3
	Persentase	**%**	**0**	**33**	**33**	**33**	**67**

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.2.18. Bidang Urusan Kearsipan

2.7.2.18.1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Untuk data Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.309 berikut ini.

Tabel 2.309
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku	OPD	1	1	1	8	12
b.	Jumlah perangkat daerah	OPD	40	40	49	49	49
	Persentase	**%**	**2,5**	**2,5**	**2,04**	**16.33**	**24,48**

Sumber Data : Dinas Kearsipan Kota Palopo Tahun 2020

Sampai dengan tahun 2019, sudah 12 Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku. Hal ini disebabkan oleh tenaga fungsional di Perangkat Daerah belum ada dan kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang berada di Perangkat Daerah.

2.7.2.18.2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Untuk data Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.310 berikut ini.

Tabel 2.310
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	7	6	7	6	7

Sumber Data : Dinas Kearsipan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.7.3.1. Bidang Urusan Pariwisata

2.7.3.1.1. Kunjungan Wisata

Untuk data Persentase Kunjungan Wisata Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.311 berikut ini.

Tabel 2.311
Persentase Kunjungan Wisata Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se – Kota Palopo	Orang	110.078	95.918	99.481	106.211	127.410
b.	Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se – Kota Palopo	Orang	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000
	Persentase	**%**	**122,31**	**100,97**	**99,48**	**101,15**	**115,83**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Palopo Tahun 2020

2.7.3.1.2. Lama Kunjungan Wisata

Untuk data Lama Kunjungan Wisata Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.312 berikut ini.

Tabel 2.312
Lama Kunjungan Wisata Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rata – rata kunjungan wisata dalam satu tahun	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama kunjungan per orang wisatawan di Kota Palopo adalah selama dua hari. Jika dibandingkan terhadap data jumlah capaian kinerja kunjungan wisata di Kota Palopo, pada tahun 2019 dimana terdapat 127.410 orang wisatawan di Kota Palopo.

2.7.3.1.3. PAD Sektor Pariwisata

Untuk data Persentase PAD Sektor Pariwisata Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.313 berikut ini.

Tabel 2.313
Persentase PAD Sektor Pariwisata Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
PAD sektor pariwisata	3,832,058,249	4,622,441,398	5,879,898,891	7.027.772.114	8.561.179.405

Total PAD	92.277.283.805,00	134.110.076.220,35	167.310.913.609,15	139.278.661.859,07	167.052.191.690
Persentase	**4.15**	**3.45**	**3.51**	**5,05**	**5,12**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan kontribusi PAD sektor Pariwisata Kota Palopo cenderung meningkat. Jika pada tahun 2015 sebesar 4,15%, pada tahun 2019 hanya sebesar 5.12%.

2.7.3.2. Bidang Urusan Pertanian

2.7.3.2.1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Indikator ini untuk mengetahui jumlah produksi padi atau bahan pangan utama lainnya per ha lahan usaha yang dipanen. Semakin tinggi angka produktifitas menunjukkan semakin baiknya pengelolaan usaha produksi pertanian di Kota Palopo. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.314 berikut ini.

Tabel 2.314
Persentase Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	**Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ton)**					
	Padi	28,630	30167	32,444	33.259	20.335,7
	Jagung	4,737	6,303	5086	4.988	7.493
	Ubi Kayu	177	70.4	70	39,20	n/a
	Ubi jalar	13	18.94	4.55	1,12	n/a
	Sagu	51.33	33.04	15.59	1,67	2.23
b.	**Luas panen tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ha)**					
	Padi	5,098	5,128	5172	5.200	4.954
	Jagung	713	928	753	684	1.111
	Ubi Kayu	8	7	1	1	n/a
	Ubi Jalar	1	1	0	0	n/a
	Sagu	5,098	5,128	5172	5.200	31.32
c	**Produktifitas (Ton/Ha)**					
	Padi	5.62	5.88	6.27	6,40	6.42
	Jagung	6.64	6.79	6.75	7,09	6.75
	Ubi Kayu	22.13	10.06	70	79,52	-
	Ubi jalar	13.00	18.94	4.55	2,95	-
	Sagu	0.46	0.29	0.05	0,01	31.32

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa produktiiftas tanaman padi dan jagung sebagai komiditas utama di Kota Palopo menunjukkan produktifitas yang meningkat. Pada tahun 2015, hanya dihasilkan 5,62 Ton padi per ha, tahun 2018, produktifitas padi menjadi 6.40 Ton/Ha, jagung 7,09 Ton/Ha, ubi kayu 79,52 Ton/Ha, Ubi Jalar 2.95 Ton/Ha dan Sagu sebanyak 0.01 Ton/Ha.

2.7.3.2.2. Cakupan Bina Kelompok Petani

Indikator ini untuk mengetahui kinerja intervensi pemerintah Kota Palopo dalam memberikan bantuan bagi kelompok petani di Kota Palopo dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas petani lokal. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah Kota Palopo membina dan mengembangkan penghidupan masyarakat petani lokal. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.315 berikut ini.

Tabel 2.315
Persentase Pembinaan Kelompok Tani Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda tahun n	Klpk	364	319	222	437	267
b.	Jumlah kelompok tani	Klpk	407	407	438	458	475
	Persentase	**%**	**89,43**	**78,38**	**50,68**	**95.41**	**56.21**

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan cakupan bina kelompok tani periode 2015-2017, terbesar pada tahun 2015. Namun setelah itu cenderung menurun dan mengalami titik terendah pada tahun 2017 sebesar 50,68%. Ini seriing dengan semakin banyak jumlah kelompok tani yang ada, sementara kemampuan anggaran pemerintah Kota Palopo yang makin terbatas.

2.7.3.3. Bidang Urusan Kehutanan

2.7.3.3.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Untuk data Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.316 berikut ini.

Tabel 2.316
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	-	-	-	-	-
b.	Luas total hutan dan lahan kritis	Ha	8.931,77	8.931,77	-	-	-
	Persentase	**%**					

Sumber Data : Dinas Kehutanan Kota Palopo, Data SIPD Kota Palopo

2.7.3.3.2. Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan

Untuk data Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan Di Kota Palopo Tahun 2015 –2019, dapat dilihat pada Tabel 2.317 berikut ini.

Tabel 2.317
Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luas kawasan hutan lindung	Ha	7.328,76	7.328,76	-	8.666	8.666
b.	Total luas kawasan hutan	Ha	8.931,77	8.931.77	-	10.242,82	10.242,82
c	**Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung**	**%**	**82.05**	**82.05**	**-**	**84.60**	**84.60**

Sumber Data : Palopo Dalam Angka, BPS Kota Palopo

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2015-2016 rasio luas kawasan hutan lindung tidak mengalami perubahan sebesar 82,05%, luas kawasan hutan yang ada di Kota Palopo merupakan hutan lindung.

2.7.3.4. Bidang Urusan Energi dan Sumber daya Mineral

2.7.3.4.1. Persentase Pertambangan Tanpa Ijin

Adalah indikator yang menggambarkan cakupan wilayah penambangan liar yang ditertibkan. Semakin tinggi persentase indikator ini, semakin luas wilayah penambangan liar yang ditertibkan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pertambangan telah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.318 berikut ini.

Tabel 2.318
Persentase Pertambangan Tanpa Ijin Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luas penambangan liar yang ditertibkan	Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
b.	Luas area penambangan yang liar	Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase	**%**	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber Data : Dinas Pertambangan & ESDM Kota Palopo

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi terhadap perubahan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa Penyelenggaraan urusan kewenangan kehutanan, kelautan dan energi sumber daya mineral dibagi antara pemeritah dan pemerintah provinisi. Jika dilihat dari matriks pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, maka pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan sebagaimana berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

2.7.3.5. Bidang Urusan Perdagangan

2.7.3.5.1. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara/eksportir yang bertempat di daerah lain atau daerah tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungannya, produksi terpusat di daerah asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kelemahannya, biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme.

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu daerah ke daerah lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari daerah lain ke dalam daerah. Untuk melihat data Nilai Ekspor Bersih Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.124 berikut ini. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.319 berikut ini.

Tabel 2.319
Nilai Ekspor Bersih Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Nilai ekspor	Juta	1.549.986	1.746.139	2.112.272	2,357,785.97	2.539.220,00
b.	Nilai impor	Juta	2.342.937	2.580.805	2.914.631	3,033,366.30	3.543.980,00
c	**Nilai ekspor bersih (a-b)**	**Juta**	**(792.951)**	**(834.666)**	**(802.359)**	**(945,580)**	**(1.004.760,00)**

Sumber Data : Dinas Perdagangan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa eskpor kota Palopo lebih kecil dibandingkan dengan impor yang masuk ke Kota Palopo. Ini menunjukkan bahwa Kota Palopo menjadi market yang cukup potensial bagi sejumlah komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Palopo. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan dan potensi bagi para pelaku usaha di Kota Palopo untuk memenuhi aneka kebutuhan masyarakat Kota Palopo yang selama ini masih diimpor dari luar Kota Palopo.

2.7.3.5.2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Indikator ini untuk mengetahui kinerja intervensi pemerintah Kota Palopo dalam memberikan bantuan bagi kelompok pedagang/usaha informal di Kota Palopo dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas usahanya. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah Kota Palopo membina dan mengembangkan penghidupan pedagang/usaha informal yang ada.

Pedagang besar adalah pedagang yang kegiatannya membeli barang dalam jumlah yang besar dan menjualnya kembali dengan jumlah yang besar. **Pedagang Menengah** adalah pedagang yang membeli barang dagangan dalam jumlah besar dan menjualnya kembali kepada para pedagang kecil dalam jumlah sedang atau kecil. **Pedagang Kecil** adalah pedagang yang membeli barang dagangan dalam jumlah sedang dan menjualnya kembali kepada konsumen akhir. Termasuk didalamnya pedagang mikro (BPS).

2.7.3.6. Bidang Urusan Perindustrian

2.7.3.6.1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Pengrajin adalah pekerja terampil yang menghasilkan atau membuat barang-barang dengan tangan, baik barang-barang fungsional maupun barang-barang dekoratif, misalnya mebel, seni dekoratif, seni pahat, pakaian, perhiasan, perabot dan peralatan rumah tangga. Para perajin mempraktikkan suatu keterampilan, dan dengan pengalaman serta bakat yang dimilikinya dapat saja mencapai tataran ekspresi seorang seniman.

Indikator ini untuk mengetahui kinerja intervensi pemerintah Kota Palopo dalam memberikan bantuan bagi kelompok pengrajin di Kota Palopo dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas usaha pengrajin lokal. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah Kota Palopo membina dan mengembangkan penghidupan pekerja terampil lokal. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.320 berikut ini.

Tabel 2.320
Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Kelompok	71	11	0	0	5
b.	Jumlah kelompok pengrajin	Kelompok	81	83	117	130	204
c	**Persentase**	**%**	**87,65**	**13,25**	**0,00**	**0,00**	**2.45**

Sumber Data : Dinas Perindustrian Kota Palopo Tahun 2020

Angka dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa cakupan binaan bagi kelompok pengrajin di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2018 menurun. Jika 2015 ada sebanyak 87,65% kelompok yang menerima bantuan, tahun 2016 hanya sebanyak 13,25% dan tahun 2017 dan 2018 tak ada bantuan bagi kelompok pengrajin di Kota Palopo dan 2019 kembali meningkat menjadi 2.45%.

2.7.3.7. Bidang Urusan Transmigrasi

2.7.3.7.1. Persentase Transmigran Swakarsa

Transmigrasi swakarsa adalah transmigrasi yang dilaksanakan atas kemauan dan biaya sendiri sedangkan pemerintah hanya menyediakan lahan untuk bertani atau mendirikan rumah untuk tempat tinggalnya. Indikator ini untuk mengetahui tingkat partisipasi dan kemampuan masyarakat secara mandiri untuk melaksanakan transmigrasi.

Suatu penyelenggaraan transmigrasi dapat dikatakan berhasil jika memenuhi syarat sebagai berikut: Jumlah penduduk yang ditransmigrasikan ke daerah lain, tiap tahun lebih banyak daripada pertambahan penduduk daerah yang ditinggalkan. Jika di daerah yang ditinggalkan itu tekanan penduduk sudah berangsur-angsur berkurang dan orang-orang yang ditransmigrasikan itu memperoleh tingkat hidup yang lebih baik. Jika antara pendatang baru (transmigran) dan penduduk yang didatangi dapat hidup berdampingan, dapat terjadi perpaduan kebudayaan, sehingga terhindar dan perasaan kesukuan di antara mereka.

2.7.3.8. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

2.7.3.8.1. Produksi Perikanan

Indikator ini untuk mengetahui capaian target produksi perikanan daerah apakah semakin baik ataukah menunjukkan kinerja yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palopo. Jika persentasenya semakin tinggi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa produksi perikanan Kota Palopo semakin baik. Sehingga kecukupan pangan dari sektor perikanan lebih baik dan mudah diperoleh. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.321 berikut ini.

Tabel 2.321
Persentase Produksi Perikanan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah produksi ikan	Ton	13.767,20	14.861,76	16.951,90	18.387,50	133.481,18
b.	Target daerah	Ton	13.822,00	15.205,00	16.347,76	18.397,00	143.016,07
C	**Persentase**	**%**	**99,60**	**97,74**	**103,70**	**99,95**	**93,33**

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perikanan Tahun 2015-2019 mampu memenuhi target produksi perikanan daerah. Ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah tersebut sangat baik. Produksi perikanan Kota Palopo cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun dan tahun.

2.7.3.8.2. Konsumsi Ikan

Indikator ini untuk mengetahui jumlah konsumsi ikan oleh masyarakat Kota Palopo pada tahun tertentu. Jika persentasenya semakin tinggi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Kota Palopo terhadap hasil perikanan semakin baik. Dimana masyarakat cukup mampu mengakses dan mendapatkan hasil perikanan untuk dikonsumsi. Ini terkait dengan upaya pemerintah memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.322 berikut ini.

Tabel 2.322
Persentase Konsumsi Perikanan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah konsumsi ikan	Kg	57	49,83	53,54	58,34	53,81
b.	Target daerah	Kg	46,7	50	53,47	56,01	54,61
c	**Persentase**	**%**	**122,06**	**99,66**	**100,13**	**104,16**	**97,62**

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2019

2.7.3.8.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Indikator ini untuk mengetahui kinerja intervensi pemerintah Kota Palopo dalam memberikan bantuan bagi kelompok nelayan di Kota Palopo dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas nelayan lokal. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah Kota Palopo membina dan mengembangkan penghidupan masyarakat nelayan lokal. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.323 berikut ini.

Tabel 2.323
Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n	Klpk	35	7	4	15	11
b.	Jumlah kelompok nelayan	Klpk	162	123	127	134	142
	Persentase	**%**	**21,60**	**5,69**	**3,15**	**11,19**	**7,75**

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan bina kelompok nelayan oleh Pemerintah Kota Palopo dari tahun 2016-2017 terus menunjukkan penurunan. Jika tahun 2015 pada angka 21.60% turun menjadi 5,69% pada tahun 2016, tahun 2017 turun lagi menjadi 3,15%, tahun 2018 naik menjadi 11,19%, namun pada tahun 2019 kembali menurun pada angka 7.75%.

2.7.3.8.4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Indikator ini untuk mengetahui tingkat produksi kelompok nelayan lokal terhadap market dan produksi perikanan daerah. Di Kota Palopo produksi komoditas perikanan yang beredart di masyarakat dan pasar, sebagian juga berasal dari tangkapan kelompok nelayan yang ada di

wilayah Luwu Utara, Luwu bahkan beberapa komoditi perikanan dibawa dari provinsi sulawesi tengah.

Semakin tinggi produksi kelompok nelayan Kota Palopo, menunjukkan semakin besarnya kontribusi nelayan lokal dan kemandirian pangan terutama sektor perikanan terhadap kebutuhan masyarakat Kota Palopo. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.324 berikut ini.

Tabel 2.324
Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	9.514,20	11.146,20	12.713,92	13.338,29	14.677,68
b.	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	13.767,20	14.861,76	16.951,90	18.397,50	133.481,18
	Persentase		**69,11%**	**75,00%**	**75,00%**	**72,54%**	**10,99**

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa kontribusi perikanan kelompok nelayan di Kota Palopo sejak 2019 jauh merosot dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Palopo perlu mengakselerasi program dan kegiatan perikanan yang fokus pada peningkatan kontribusi perikanan kelompok nelayan terhadap produksi ikan daerah.

2.7.3.8.5. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Indikator ini untuk mengetahui luas kawasan lindung perairan terhadap seluas seluruh wilayah perairan yang menjadi wilayah sebuah daerah. Semakin tinggi rasio luas kawasan lindung perairan sebuah daerah, semakin tingginya aspek kehatian-kehatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan tersebut. Sejak berlakunya UU No 23 Tahun 2014, kewenangan wilayah kelautan menjadi kewenangan pemerintah provinsi sulawesi selatan.

2.7.3.8.6. Nilai Tukar Nelayan

Adalah Perbandingan antara indeks harga yang diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib) yang dinyatakan dalam persentase.

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan > 100 : berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami surplus. b. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan = 100 : berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami impas/break even. c. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan < 100 : berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami defisit. Tingkat kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada periode sebelumnya.

2.7.4. Fokus Penunjang Urusan

2.7.4.1. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

2.7.4.1.1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD Kota Palopo diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.325 berikut ini.

Tabel 2.325
Ketersediaan Dokumen RPJPD Kota Palopo Tahun 2019

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Palopo Tahun 2005 – 2025

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2020

2.7.4.1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah terhadap regulasi pengelolaan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah lima tahunan secara terencana dan memiliki azas legal. Dokumen RPJMD belaku selama lima tahunan. Daerah yang memiliki dokumen RPJMD yang telah perdakan, menunjukkan keseriusan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan sistematis dan memiliki aspek legalitas. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.326 berikut ini.

Tabel 2.326
Ketersediaan Dokumen RPJMD Kota Palopo Tahun 2019

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018
	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2018 tentangPerubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2020

2.7.4.1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah secara terencana dan memiliki azas legal. Dokumen RKPD belaku satu tahun. Daerah yang memiliki dokumen RKPD yang telah perwalkan, menunjukkan keseriusan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan sistematis dan memiliki aspek legalitas. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.327 berikut ini.

Tabel 2.327
Ketersediaan Dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Ada/Tidak	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Perwal No. 12 Tahun 2014	Perwal No. 22 Tahun 2015	Perwal No. 12 Tahun 2016	Perwal No. 35 Tahun 2017	Perwal No. 40 Tahun 2018

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2020

2.7.4.1.4. Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Adalah indikator yang mengindikasikan tersedianya tujuan dan sasaran serta strategis pembangunan kewilyahan sebuah daerah. Daerah yang memiliki dokumen RT RW yang telah diperdakan, dianggap telah memiliki komitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan peduli pada isu isu lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.328 berikut ini.

Tabel 2.328
Ketersediaan Dokumen RTRW Kota Palopo Tahun 2019

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Palopo Tahun 2012 – 2032

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2020

2.7.4.1.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah pada perencanaan strategis (lima tahunan) dan perencanaan operasional (tahunan). Angka 100 persen menunjukkan tingkat kesesuaian dan keselarasan dokumen RPJMD dan RKPD sangat baik, yang mencerminkan adanya komitmen dan konsistensi pada apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.329 berikut ini.

Tabel 2.329
Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah program RKPD tahun berkenaan	Buah	214	222	192	213	245
b.	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	237	235	243	231	250
	Persentase	**Persen**	**90,29**	**94,46**	**79,01**	**92,20**	**98**

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2020

2.7.4.1.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah menganggarkan apa yang direncanakan dan merencanakan apa yang dianggarkan. Indikator ini juga menggambarkan kualitas perencanaan dan pengelolaan belanja daerah. Semakin tinggi kesesuaian RKPD dengan APBD semakin baik perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.330 berikut ini.

Tabel 2.330
Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah program APBD tahun berkenaan	Buah	188	182	182	158	245
b.	Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	214	222	192	213	245
	Persentase	**%**	**87,85**	**81,98**	**94,79**	**74,17**	**100**

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2020

2.7.4.1.7. Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah untuk menselaraskan rencana pengunaan tata ruang termasuk tujuan, sasaran dan program penetaan ruang dengan rencana pembangunan strategis yang ada. Semakin besar tingkat kesesuaian perencanaan strategis dengan tujuan, sasaran dan program di RT RW semakin baik pengelolaan tata ruang di sebuah daerah.

2.7.4.2. Bidang Urusan Keuangan

2.7.4.2.1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Adalah indikator yang mengindikasikan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah yang sesuai standar akuntansi yang ada. Clean and clear adalah predikat pengelolaan keuangan daerah tertinggi, disusul Wajar Tanpa Pegecualian, Wajar dengan Pengecualian dan terendah dalah Disclaimer. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.331 berikut ini.

Tabel 2.331
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Hasil opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2020

2.7.4.2.2. Persentase SILPA

Sedangkan SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2008 adalah Rp571 milyar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp524 milyar, maka SiLPA-nya adalah Rp47 milyar. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.332 berikut ini.

2.7.4.2.3. Persentase SiLPA Terhadap APBD

SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Biasanya, nilai SiLPA lebih besar atau sama dengan Nol. Hal ini disebabkan karena Pemerintah memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk mengalami kebangkrutan. Nilai SiLPA dapat juga menunjukkan uang yang tersisa pada Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan Nilai Investasi Jangka Pendek pada saat akhir tahun anggaran.

Nilai SiLPA yang baik, tergeantung dari sumber atau penyebab terjadinya SiLPA tersebut. SiLPA yang baik bersumber dari pelampauan target pendapatan dan efesiensi atas belanja daerah, sedangkan SiLPA yang kurang baik bersumber dari kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana atau kegiatan yang telah terlaksana namun belum sempat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan. Untuk lebih jelasnya, perkembangan SiLPA Kota Palopo dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel 2.332 berikut ini:

Tabel 2.332
Persentase SiLPA Terhadap APBD Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Total SILPA	111.155.583.598,18	59.142.126.892,80	22.836.223.879,74	1,151,996,965.34	34.049.876.279,26
Total APBD	761.974.080.717,31	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35
Persentase	**14,59**	**5,15**	**2,25**	**0.12**	**3.56**

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2020, audited

Nilai SiLPA dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Nilai SiLPA tertinggi pada tahun 2015 sebesar Rp. 111.155.583.598,- atau sekitar 14,59% dari total APBD. Besarnya nilai SiLPA pada tahun 2015 disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai DAK Tambahan yang turun pada pertengahan tahun anggaran membuat kegiatan dari DAK Tambahan sebagian besar tidak terlaksana karena keterbatasan penyedia yang memenuhi spesifikasi dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Begitupun yang terjadi pada tahun 2016, sehingga nilai SiLPA tersebut kurang baik, karena sebagian besar disebabkan karena tidak terlaksananya kegiatan.

Nilai SiLPA terkecil pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,151,996,965.34 atau sekitar 0.12 % dari total APBD. Nilai SilPA tersebut lebih baik dari SiLPA yang lainnya karena SiLPA tersebut sebagian besar disebabkan karena adanya efesiensi belanja dan pelampauan target Pendapatan pada tahun 2015.

2.7.4.2.4. Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam melaksanakan program yang tertuang dalam APBD daerah. Semakin tinggi atau banyak program APBD yang tidak dilaksanakan, menujukan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang belum baik. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.333 berikut ini.

Tabel 2.333
Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah program dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Prog	1	1	2	2	1
b.	Total program dalam APBD	Prog	349	346	359	321	381
	Persentase		**0,3**	**0,3**	**0,6**	**0,62**	**0,3**
a.	Jumlah kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Keg	13	10	15	15	12
b.	Total kegiatan dalam APBD	Keg	1429	1361	1414	1.437	1.615
	Persentase		**3,7**	**0,7**	**1,06**	**1,04**	**0,74**

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2020

2.7.4.2.5. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memenuhi spending moneter untuk membiayai urusan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Persentase belanja bidang pendidikan yang semakin mendekati angka 20% menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan dan memenuhi perintah UU mewujudkan anggaran yang layak dalam pembangunan sektor pendidikan. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.334 berikut ini.

Tabel 2.334
Persentase Belanja Pendidikan (20%) Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah belanja bidang pendidikan (Rp)	238.758.938.087,48	255.348.088.498	181.192.586.801	179,786,127,789.00	192.962.137.080,00
Total APBD (Rp)	761.974.080.717,31	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35
Persentase	**31,33**	**22.22**	**17.84**	**18.29**	**20.17**

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa belanja bidang Pendidikan di Kota Palopo cenderung mengalami fluktuatif. Jika pada tahun 2015 berada pada angka 31,33%, tahun 2016 turun menjadi 22,22%, tahun 2017 tetap mengalami penurunan sebesar 17,84%, dan tahun 2018 naik kembali menjadi 18,29%, tahun 2019 tetap mengalami peningkatan menjadi 20,17%, artinya tahun 2019 sudah melebihi angka 20%.

2.7.4.2.6. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memenuhi spending moneter untuk membiayai urusan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Persentase belanja bidang kesehatan yang semakin mendekati angka 10% menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan dan memenuhi perintah UU mewujudkan anggaran yang layak dalam pembangunan sektor kesehatan. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.335 berikut ini.

Tabel 2.335
Persentase Belanja Kesehatan (10%) Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah	156.464.512.54	214.226.652.39	248.704.751.5	258,102,101,6	283.035.096.6

belanja bidang kesehatan (Rp)	2,82	2	33	72.28	18,97
Total APBD (Rp)	761.974.080.717,31	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35
Persentase	**20,53**	**18.64**	**24.48**	**26.26%**	**29.60%**

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa belanja bidang kesehatan di Kota Palopo pada tahun 2019 telah melebihi angka 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palopo sangat komitmen terhadap pembangunan bidang kesehatan di Kota Palopo.

2.7.4.2.7. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah mewujudkan APBD yang lebih pro rakyat dan berorientasi pada pembangunan daerah dan masyarakat. Persentase belanja langsung yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa belanja lebih banyak diarahkan pada pembangunan daerah bukan pada pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah saja. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.336 berikut ini.

Tabel 2.336
Persentase Perbandingan Antara Belanja Langsung
Dengan Belanja Tidak Langsung Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah belanja langsung (Rp)	376.548.104.626,29	719.186.393.030	651.615.212.524	565,990,971,307.28	542.280.383.025,45
Total APBD (Rp)	761.974.080.717,31	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35
Persentase	**49,42**	**62.59**	**64.15**	**57.6%**	**56.70%**
Jumlah belanja tidak langsung (Rp)	385.425.976.091,02	429.944.381.674	364.178.985.490	416,966,106,058.61	414.171.474.004,90
Total APBD (Rp)	761.974.080.717,31	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35
Persentase	**50,60**	**37.41**	**35.85**	**42.42%**	**43.30%**

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan Pemerintah Kota Palopo setiap tahunnya mampu mengalokasikan anggaran yang lebih banyak untuk belanja program dan kegiatan perangkat daerah.

2.7.4.2.8. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Untuk melihat data Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.337 berikut ini.

Tabel 2.337
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian			Tahun		
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah belanja bagi hasil Kab/Kota/Desa		23.386.791.194	18.220.349.272	56,476,634,835.00	62,767,391,329.43
Total APBD		1.149.130.774.	1.015.794.194.	982,957,077,365.	956,778,838,39

		704	014	89	4.35
Persentase		**2,04**	**1,79**	**5.75%**	**6.56%**

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2020

Data dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa persentase dana bagi hasil yang diterima pemerintah Kota Palopo sepanjang 2016-2019 mengalami fluktuatif. Jika tahun 2016 sebesar 2.04%, mengalami penurunan tahun 2017 menjadi 1,79%, tahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar 5,75%, tahun 2019 naik pada angka 6.56%.

2.7.4.2.9. Penetapan APBD

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam memenuhi regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Jika penetapan APBD tepat waktu, menunjukkan bahwa daerah sangat berkomitmen memenuhi standar pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.338 dibawah ini

Tabel 2.338
Ketepatan Waktu Penetapan APBD Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2020

2.7.4.3. Bidang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

2.7.4.3.1. Rata – Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Adalah indikator yang mengindikasikan peningkatan sumber daya manusia aparatur. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.339 dibawah ini.

Tabel 2.339
Rata- Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Hari/Jam Pelajaran	97 Hari/ 867 JP	103 Hari/ 893 JP	103 Hari/ 893 JP	103 Hari/ 893 JP	103 Hari/ 893 JP

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2020

2.7.4.3.2. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Adalah indikator yang mengindikasikan peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah melalui peningkatan jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat formal. Semakin tinggi nilai indikator ini, meniunjukan semakin tingginya komitmen daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama aparatur sipili negara di daerah. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.340 dibawah ini.

Tabel 2.340
Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	31	34	42	36	30
2.	Jumlah total ASN	Orang	5.660	4.794	4.672	4.553	4.503
3	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal**	**%**	**0,5**	**0,7**	**0,9**	**0,79**	**0,67**

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Palopo dalam upaya meningkatkan kapasitas aparaturnya melalui pendidikan dan pelatihan sejak 2015-2019 mengalami fluktuatif. Jika pada tahun 2015 ada sebanyak 0,5% aparatur yang didiklat, pada tahun 2019 sekitar 0,67%.

2.7.4.3.3. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Adalah indikator yang mengindikasikan peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah melalui peningkatan jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat kepemimpinan. Semakin tinggi nilai indikator ini, meniunjukan semakin tingginya komitmen daerah memenuhi salah satu syarat administrasi jabatan struktural di daerah. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.341 berikut ini.

Tabel 2.341
Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	Orang	291	281	286	297	377
2.	Jumlah total jabatan	Orang	961	927	977	979	993
3	**Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural**	**%**	**30,3**	**30,3**	**29,30**	**30,34**	**37,97**

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan sampai tahun 2019, masih ada 62,03% pejabat struktural Kota Palopo yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Olehnya Pemerintah Kota Palopo perlu mengakselerasi program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural dengan lembaga penyelenggara.

2.7.4.3.4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Adalah indikator yang menujukan jumlah jabatan pimpinan tinggi yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan roda pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sekaligus mengukur komitmen daerah dalam menegakan perda tentang susunan organisasi dan perangkat daerah Kota Palopo yang berlaku pada masanya. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.342 dibawah ini.

Tabel 2.342
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Orang	36	34	33	35	33

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2020

2.7.4.3.5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Adalah indikator yang menujukan jumlah jabatan yang melaksanakan tugas administrasi pemerintahan pada pemerintahan Kota Palopo. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.343 dibawah ini.

Tabel 2.343
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Orang	938	900	949	951	960

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah jabatan administrasi pada pemerintah Kota Palopo sejak 2015-2019 bertambah sebanyak 22 jabatan dari 938 jabatan pada tahun 2015 menjadi 960 jabatan administrasi pada tahun 2019.

2.7.4.3.6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Adalah indikator yang mengindikasikan peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah melalui peningkatan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya komitmen daerah terhadap pengembangan sumber daya manusia terutama pejabat fungsional tertentu di daerah. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.344 dibawah ini.

Tabel 2.344
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Orang	3.021	2.261	2.217	2.210	2.213

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada lingkup Pemerintah Kota Palopo sejak 2015-2019 terus berkurang. Kondisi ini terutama diakibatkan oleh perpindahan kewenangan tenaga fungsional guru terutama pada tingkat pendidikan menengah pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pendidikan Menengah dikelola oleh Pemerintah provinsi. Sehingga tenaga guru pada pendidikan menengah juga beralih ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

2.7.4.4. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

2.7.4.4.1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam mewujudkan rencana penelitian dan pengembangan yang ada dalam perencanaan lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan daerah. Semakin tinggi persentase indikator ini, meniunjukan semakin tingginya komitmen daerah terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.345 berikut ini.

Tabel 2.345
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	Prog	20	11	11	11	6
2.	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	Prog	22	11	11	11	6
	Persentase	**%**	**90,9**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Badan Penelitian & Pengembangan, 2020

2.7.4.4.2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan ke dalam perencanaan tahunan perangkat daerah. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin tingginya komitmen perangkat daerah dalam memanfaatkan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.346 berikut ini.

Tabel 2.346
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti		15	17	4	4	3
2.	Jumlah kelitbangan dalam Renja perangkat daerah		20	20	11	11	5
	Persentase	**%**	**75**	**85**	**36,36**	**36,36**	**50**

Sumber Data : Badan Penelitian & Pengembangan Kota Palopo Tahun 2020

2.7.4.4.3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam menerapkan inovasi secara terus menerus dalam rangka peningkatan kinerja. Semakin tinggi persentase indikator ini,

menunjukkan semakin besarnya komitmen perangkat daerah dalam memperbaiki kualitas kinerja dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.7.4.4.4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Adalah indikator yang mengindikasikan jumlah kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam meningkatkan dan memperbaiki kualitas kinerja dan pelayananannya. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin baiknya komitmen ASN untuk memperbaiki kualitas kinerjanya melalui inovasi secara berkelanjutan. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.347 berikut ini.

Tabel 2.347
Persentase Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	Buah	8	6	12	14	18
2.	Jumlah inovasi yang diusulkan	Buah	23	23	23	23	49
	Persentase	**%**	**34,78**	**26,08**	**52,10**	**60,87**	**36.3**

Sumber Data : Badan Penelitian & Pengembangan Kota Palopo, 2020

2.7.4.5. Bidang Urusan Pengawasan

2.7.4.5.1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Adalah indikator yang mengindikasikan tingkat kepatuhan untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan jumlah temuan oleh Inspekktorat atau lembaga lain yang berkompeten. Semakin tinggi persentase tindak lanjut temuan, menunjukkan semakin baiknya komitmen ASN untuk memperbaiki mental dan etos kerjanya. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.348 berikut ini.

Tabel 2.348
Persentase Tindak Lanjut Temuan Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Kasus	326	166	260	202	158
2.	Jumlah total temuan	Kasus	461	399	456	434	211
3	Persentase	**%**	**70,72**	**41,60**	**57,02**	**46,54**	**75**

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam menindaklanjuti temuan di lingkup Pemerintah Kota Palopo justru semakin membaik. Jika pada tahun 2015, persentase temuan yang ditindaklanjuti pada angka 70.72% pada tahun 2019, temuan yang ditindaklanjuti meningkat menjadi 75%.

2.7.4.5.2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Adalah indikator yang mengindikasikan tingkat kepatuhan aparatur sipil negara terhadap aturan kepegawaian dan kedisplinan yang berlaku. Semakin banyak jumlah ASN yang dikenai sanksi menunjukkan komitmen penegakan displin oleh ASN masih sangat rendah. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.349 berikut ini.

Tabel 2.349
Persentase Pelanggaran Pegawai Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang	5	3	2	0	41
2.	Jumlah total ASN	Orang	5.639	4.794	4.672	4.544	4.503
3	**Persentase**	**%**	**0,09**	**0,06**	**0,04**	**0,00**	**0,91**

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan dilihat dari jumlah kasus dan persentase, tingkat pelanggaran pegawai di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2018 mengalami penurunan sampai pada angka 0,00%, dan tahun 2019 kembali naik menjadi 0,91%. Jika pada tahun 2015

sebanyak 9 dari 1000 pegawai Kota Palopo pernah mendapatkan sanksi, jumlah ini meningkat, dari 1000 pegawai kota Palopo 91 orang pernah dikenakan sanksi.

2.7.4.5.3. Jumlah Temuan BPK

Adalah indikator yang mengindikasikan tingkat kepatuhan dan kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Semakin rendah jumlah temuan, semakin baik pengelolaan keuangan daerah. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.350 berikut ini.

Tabel 2.350
Jumlah Temuan BPK Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Temuan BPK	15	9	19	16	12

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa dibandingkan tahun 2015, jumlah temuan kasus di Kota Palopo oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, menurun sampai tahun 2016, namun tahun 2017 mengalami peningkatan dan tahun 2018-2019 kembali mengalami penurunan. Kondisi ini mencerminkan bahwa salah satu fungsi Inspektorat Kota Palopo yakni melaksanakan supervisi, berjalan semakin baik sehingga perangkat daerah lebih baik dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan asetnya.

2.7.4.6. Bidang Urusan Sekretariat Dewan

2.7.4.6.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat – Alat Kelengkapan DPRDProvinsi/Kab/Kota

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui komitmen setiap alat kelengkapan dewan dalam mewujudkan lembaga legislatif yang akuntabel dimana setiap alat kelengkapan dewan memiliki dokumen perencanaan tahunan dan selanjutnya menjadi salah satu bagian dari akuntabilitas kinerja setwan. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.351 berikut ini.

Tabel 2.351
Tersedianya RKT Pada Alat – Alat Kelengkapan DPRD
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat – alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2020

2.7.4.6.2. Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui bahwa pelaksanaan tugas DPRD telah menjadi bagian perencanaan strategis selama lima tahunan maupun perencanaan tahunan dan selanjutnya menjadi salah satu bagian dari akuntabilitas kinerja setwan. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.352 berikut ini.

Tabel 2.352
Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD dengan RPJMD dan RKPD
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja dprd untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahun (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (3)	Ada (3)	Ada (3)

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2020

2.7.4.6.3. Terintegrasinya Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui konsistensi atau kesesuaian perencanaan dan penganggaran pada sekertariat dewan bahwa apa yang dilaksanakan telah direncanakan sebelumnya dan menjadi salah satu bagian dari akuntabilitas kinerja setwan. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.353 berikut ini.

Tabel 2.353
Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terintegrasinya Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2020

2.8. Aspek Daya Saing Daerah

2.8.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah.

2.8.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi **per kapita** adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya **anggota rumah tangga**. Sementara pengeluaran konsumsi **rumah tangga** per kapita adalah total biaya pengeluaran rumah tangga dibagi dengan **banyaknya rumah tangga** yang ada.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumahtangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.354 berikut ini.

Tabel 2.354
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Di Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Milyar /Thn)	3,100.01	3,388.89	3,721.83	4,116.12	4,453.72
2	Jumlah Rumah Tangga (RT)	36871	37,749	38,641	39,444	40,303
	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Juta/Tahun)	**84,077**	**89,774**	**96,318**	**104,354**	**110,506**

Sumber Data : Data BPS Kota Palopo

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah konsumsi rumah tangga di Kota Palopo sejak 2015-2019 meningkat. Jika pada tahun 2015 hanya berada pada angka 84,077 juta per tahun per rumah tangga, tahun 2019 meningkat menjadi 110,506 juta per tahun per rumah tangga.

2.8.3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhanya (pangan dan non pangan) dalam periode waktu tertentu. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Semakin besar belanja dan konsumsi non pangan, semakin besar tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.355 berikut ini.

Tabel 2.355
Persentase Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan Per Kapita
Di Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Pengeluaran Makanan	Rp	447,306	428,060	529.701	623,068	536662
b.	Pengeluaran Non Makanan	Rp	547,171	448,870	570.813	662,290	651984
c	Total Pengeluaran Konsumsi	Rp	994,477	876,930	1,101	1,285,358	1,188,646
d	**Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan**	**%**	**55.02%**	**51.19%**	**51.87%**	**51.53%**	**54.85%**

Sumber Data : BPS Palopo, Buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat dan Palopo Dalam Angka 2019

Data di atas menunjukkan bahwa konsumsi non pangan per kapita masyarakat Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 selalu berada di atas angka konsumsi pangannya. Artinya sebagian besar pendapatan masyarakat di Kota Palopo sepanjang kurun waktu tersebut di atas dipakai lebih banyak untuk belanja non pangan. Ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Palopo sudah relatif cukup baik.

2.8.4. Produktivitas Total Daerah

Produktifitas total daerah diperoleh dengan membagi nilai tambah sektor lapangan usaha dengan jumlah angkatan kerja yang ada dalam kurun waktu tertentu. Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yangmenunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor.

Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.356 berikut ini.

Tabel 2.356
Produktivitas Total Daerah Di Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah Nilai Tambah Sektor (= Jumlah PDRB (Hb/Juta)	5,351,284.90	5.906.480.42	6,550,688.67	7,285,142,35	7,942,480
b	Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	65,346	67,504	75,563	75,829	80854
c	**Produktifitas Total Daerah (Juta/Thn)**	**81.89**	**87.5**	**86.69**	**96.67**	**98.23**

Sumber Data : Diolah dari Buku PDRB Kota Palopo 2019, diolah

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, seorang tenaga kerja yang bekerja hanya menghasilkan nilai tambah produk sebesar 81.89 juta/tahun, tahun 2016 naik sebesar 87,5 juta/tahun, tahun 2017 turun sebesar 86,69 juta/tahun, tahun 2018 naik kembali sebesar 96,67 juta/tahun dan pada tahun 2019 tetap naik menjadi 98.23 juta/tahun/tenaga kerja.

2.8.5. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Adalah perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Indikator ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDB) dengan produk yang berasal dari impor.Apabila rasionya kecil berarti ketergantungan semakin tinggi, sebaliknya apabila rasionya besar berarti ketergantungan terhadap produk impor tidak terlalu tinggi. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.357 berikut ini.

Tabel 2.357
Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB Di Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019(**)
1	Jumlah Ekspor (Juta)	1,549.99	1,723.68	1,859.52	2,239.90	2,539.22
2	Jumlah Impor (Juta)	2,342.94	2,578.30	2,695.62	3,188.62	3,543.98
3	**Jumlah Ekspor + Impor (Juta)**	**3,892.93**	**4,301.98**	**4,555.14**	**5,428.52**	**6,083.20**
4	Jumlah PDRB (Juta)	5,351.28	5,886.52	6,514.94	7,285.14	7,942.48
5	**Rasio Ekspor + Impor (%)**	**72.75**	**73.08**	**69.92**	**74.51**	**76.59**

*Sumber Data : Palopo Dalam Angka 2019, * Sementara, (*) Sangat Sementara*

Angka dalam tabel juga menunjukkan bahwa setaip tahun ekonomi di Kota Palopo semakin terbuka yang ditandai dengan semakin meningkatnya nilai rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kota Palopo.

2.8.6. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yangdiberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank). Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.358 berikut ini.

Tabel 2.358
Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum
Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah pinjaman di bank umum	Juta	24.882.444	26.934.511	n/a	n/a	n/a
b.	Dana pihak ketiga di bank umum	Juta	22.276.855	20.014.741	n/a	n/a	n/a
c	**Rasio**	**Juta**	**1.12**	**1.35**	n/a	n/a	n/a

Sumber Data : Buku Indikator Ekonomi Kota Palopo 2017

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pinjaman umum di bank (dari bank swasta maupun BUMN) di Kota Palopo meningkat sejak tahun 2015 sampai dengan 2016. Jika pada tahun 2015 berada pada angka 24,88 Trilyun Rupiah, tahun 2016 meningkat menjadi 26,93 Trilyun Rupiah atau meningkat sebanyak 2,05 Trilyun. Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan jumlah uang yang akan beredar di Kota Palopo sejak dua tahun terakhir.

2.8.7. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.8.7.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Indikator ini menggambarkan tingkat kepadatanjalan oleh kendaraan per km jalan. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin padat kondisi jalan raya yang ada di Kota Palopo. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.359 berikut ini.

Tabel 2.359
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang jalan	Km	502	502	503.16	503,16	503,16
b.	Jumlah kendaraan	Unit	25.743	26.846	27.998	29.150	30,607
Rasio		**Angka**	**0.020**	**0.019**	**0.018**	**0,017**	**0,016**
Rasio		**Per 1000**	**20**	**19**	**18**	**17**	**16**

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, tingkat kepadatan jalan per Km terdapat 20 kendaraan, tahun 2016 menurun 19 kendaraan, tahun 2017 mengalami penurunan 18 kendaraan, tahun 2018 turun lagi menjadi 17 kendaraan, sementara tahun 2019, tetap turun 16 kendaraan.

2.8.7.2. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Indikator ini menggambarkan kinerja operasional layanan angkutan umum yang ada di Kota Palopo. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelengaraan Angkutan Umum,Jumlah penumpang yang dimaksud merupakan jumlah penumpang yang terangkut oleh satu angkutan umum dalam satu hari (satuan dari jumlah penumpang adalah penumpang/angkutan/hari). Indikator ini merupakan asalah satu dari beberapa parameter evaluasi kinerja sektor perhubungan. Semakin banyak jumlah arus penumpang atau barang yang terangkut, menunjukkan semakin mudahnya aksesibiltas sebuah wilayah baik oleh penumpang maupun lalu lintas barang. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.360 berikut ini.

Tabel 2.360
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.326.741	1.323.252
Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (m3)	601.337	605.649	600.911	603.524	607.024

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

2.8.7.3. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Indikator ini menggambarkan besaran pemanfaatan sentra pelayanan transportasi dan perhubungan masyarakat atau publik yang ada di Kota Palopo. Semakin tinggi angka indikator ini, menunjukkan semakin banyaknya orang dan lalu lintas barang yang keluar dan masuk ke Kota Palopo dalam satu tahun. Ini menunjukkan semakin terbukanya sebuah daerah dan meningkatnya aksesibilitas wilayah terhadap daerah lain. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.361 berikut ini.

Tabel 2.361
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah barang melalui dermaga per tahun (m^3)	601.337	605.649	600.911	603.524	615.594

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah orang melalui dermaga per tahun (orang)	769	122	445	314	352
Jumlah barang melalui terminal per tahun (kg)	3.733	3.360	2.689	3.176	3.620
Jumlah orang melalui terminal per tahun (orang)	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.326.741	1.323.252

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

2.8.7.4. Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan realisasi luas wilayah sesuai dengan peruntukannya dibagi dengan luas wilayah yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Makin tinggi nilai indikator ini menunjukkan makin taatnya pembangunan terhadap rencana RT RW yang ada.

2.8.7.5. Jenis dan Jumlah Bank

Aktifitas Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara pada umumnya dan Palopo pada khususnya. Aktifitas sektor keuangan, atau yang lebih umum dikenal sebagai jasa keuangan, meliputi beberapa sub sektor diantaranya Perbankan, Asuransi dan Dana Pensiun, Jasa Keuangan Lainnya serta Jasa Penunjang Keuangan. Untuk Palopo, peningkatan kinerja sektor keuangan lebih dipengaruhi oleh kinerja positif perbankan. Sektor perbankan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui kredit. Mereka menyediakan para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan resiko rendah. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.362 berikut ini.

Tabel 2.362
Data Jumlah dan Jenis Bank di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Jenis Bank	2015	2016	2017	2018	2019
Bank umum (Konvensional & Syariah)	12	12	12	12	20

Sumber: Potensi Ekonomi Kota Palopo (BPS, 2019)

2.8.7.6. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi

Jika dibanding kabupaten sekitar, walaupun jumlah usaha/perusahaan kategori Jasa Keuangan dan Asuransi bukan yang tertinggi, tetapi dalam penyerapan tenaga kerjanya memiliki nilai yang tertinggi dibanding daerah sekitar. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.363 berikut ini.

Tabel 2.363
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Palopo dan Kabupaten Sekitar, 2016

Wilayah	Jumlah Usaha/ Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
Kab. Luwu	198	1.127
Kab. Tana Toraja	102	751
Kab. Luwu Utara	106	820
Kab. Luwu Timur	131	1.167
Kab. Toraja Utara	70	806
Kota Palopo	154	4.621

Sumber: BPS, 2017

2.8.7.7. Jenis Kelas dan Jumlah Restoran

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu sektor unggulan penggerak ekonomi Palopo. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang meliputi

usaha perhotelan, restoran dan rumah makan. Berdasarkan analisis economic based approach kategori ini terpilih sebagai sektor unggulan di Palopo.

2.8.7.8. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Berikut adalah Tabel 2.364 tentang Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 dibawah ini.

Tabel 2.364
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih
Di Kota Palopo Tahun 2015– 2019

No	Sumber Air Bersih	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Leding (Perpipaan)	17.958	21.958	23.467	25.594	29.103
2	Sumur Lindung	906	956	1.006	1.044	1.478
3	Sumur Tidak Terlindung	6.167	6.217	6.222	6.248	2559
4	Mata Air Terlindung	3.377	3.427	3.477	3.515	3.062
5	Air Kemasan	2.699	2.749	2.799	2.837	2.835
6	Lainnya	667	717	767	805	805
	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih					
		31.774	**36.423**	**37.738**	**38.422**	**39.842**
	Jumlah Rumah Tangga					
		35.914	**36.871**	**37.749**	**39.444**	**37.015**
	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih					
		88,47%	**98,87%**	**99,97%**	**97,41**	**98.37 %**

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palopo Tahun 2019

2.8.7.9. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Adalah indikator yang menggambarkan kondisi energi listrik yang telah dikonsumsi oleh masyarakat Kota Palopo, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan listrik yang ada.

2.8.7.10. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator ini menunjukkan seberapa besar masyarakat Kota Palopo yang mampu menikmati akses listrik. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin banyak masyarakat Kota Palopo yang mengakses listrik, sehingga lebih mudah dalam mengakses pelayanan lain dan menikmati berbagai hasil pembangunan lainnya. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.365 berikut ini.

Tabel 2.365
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	Rumah Tangga	62,613	67,228	n/a	70,172	87 ,949
b.	Jumlah seluruh rumah tangga	Rumah Tangga	36.871	37.749	38.641	39,444	
	Persentase	**%**	**169,82**	**178,09**		**177,90**	

Sumber Data : Palopo Dalam Angka, 2020

2.8.7.11. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Indikator ini menggambarkan seberapa besar penetrasi alat komunikasi berupa ponsel diakses dan digunakan oleh masyarakat. Semakin tinggi nilai indikator ini artinya semakin banyak masyarakat yang memiliki akses informasi dan komunikasi melalui telephone yangmenunjukkan semakin mudah dan terbukanya informasi yang ada. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.366 berikut ini.

Tabel 2.366
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon
Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon	Jiwa	112.703	122.321	140.181	153.493	159.200
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
Persentase		**%**	**66,73**	**70,74**	**79,24**	**84,95**	**86,00**

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan peningkatan yang cukup besar atas akses penduduk terhadap telepon atau handphone di Kota Palopo. Tahun 2015 hanya 66,73% masyarakat yang menggunakan atau bisa mengakses layanan ini. Namun pada 2019 jumlahnya meningkat menjadi 86,00% sudah mengaksesnya. Ini menunjukkan semakin mudahnya komunikasi informasi di tingkat masyarakat.

2.8.8. Fokus Iklim Berinvestasi

2.8.8.1. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Tindak kriminalitas akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama menjaga iklim berinvestasi di daerah. Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.367 berikut ini.

Tabel 2.367
Angka Kriminalitas Yang Tertangani Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun	13	20	-	102	230
b.	Jumlah penduduk	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
Angka kriminalitas yang tertangani (per 10000)		**7**	**8**	**12**	**6**	**12**

Sumber data : BPS Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa dari 10.000 penduduk rata-rata terjadi kasus kejahatan sebanyak 7 kasus yang tertangani pada tahun 2015, sementara pada tahun 2019 angka menjadi 12 kasus tertangani per 10.000 penduduk.

2.8.8.2. Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu Desa/Kelurahan Swadaya, Desa/Kelurahan Swakarsa dan Desa/Kelurahan Swasembada. Desa/Kelurahan Swasembada; adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal.

Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.368 berikut ini.

Tabel 2.368
Persentase Desa Berstatus Berswasemba Terhadap Total Kelurahan Di Kota Palopo Tahun 2015 -2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
A	**Persentase kelurahan berswasembada**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa semua kelurahan yang ada di Kota Palopo sejak 2015 sampai dengan 2019, Kota Palopo dengan 48 kelurahan yang ada dinilai telah berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupannya masyarakatnya mirip dengan kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat yang maju.

2.8.9. Fokus Sumber Daya Manusia

2.8.9.1. Rasio Ketergantungan

Adalah Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.369 berikut ini.

Tabel 2.369
Rasio Ketergantungan Di Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio ketergantungan	49.23	48.81	48.46	48.11	47.98

Sumber Data : Diolah dari Palopo Dalam Angka 2020

Data di atas menunjukkan bahwa untuk 100 orang penduduk usia produktif di Kota palopo pada tahun 2015 mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang usia non produktif. Beban ini mengalami penurunan tahun 2019 dimana untuk 100 orang penduduk usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 48 orang usia non produktif.

2.8.9.2. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.370 berikut ini.

Tabel 2.370
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	Orang	15.833	15.599	16.490	12,452	n/a
b.	Jumlah penduduk	Orang	168.894	172.916	176.374	180.678	184.614
C	**Rasio**	**Per 100**	**9.4**	**9.0**	**9.3**	**14.51**	

Sumber Data : Palopo Dalam Angka 2013-2018

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2015 dari 100 orang penduduk Kota Palopo terdapat 10 orang yang merupakan lulusan perguruan tinggi baik yang berpredikat sarjana, master/magister ataupun doktor. Kondisi tahun 2018 meningkat menjadi 15 orang berpendidikan strata 1 ke atas dari 100 penduduk Kota Palopo.

2.9. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.9.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Gambaran permasalahan dari hasil capaian pembangunan, dan dinamika social yang berkembang di masyarakat yang memerlukan perhatian untuk segera ditangani adalah sebagai berikut :

1. Angka Tingkat Pertumbuhan IPM Kota Palopo 2019 (0.88) adalah yang terkecil di Luwu Raya. Berada di bawah pertumbuhan IPM Kabupaten Luwu (1.14), Luwu Utara (0.97) dan Luwu Timur (0.89), bahkan juga berada dibawah rata-rata pertumbuhan IPM Sulsel (1.07). Olehnya aspek kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan kesehatan masih sangat perlu diakslerasi sebagai dua faktor yang berkontribusi pada pembentukan IPM.
2. Tahun 2019, pertumbuhan PDRB Kota Palopo lebih rendah dibandingkan tahun 2018, belum memenuhi target 2019 (7.14). Meski demikian, Pertumbuhan PDRB Kota Palopo 2019, masih berada diatas nasional (5.02), Kota Pare-Pare (6.65), Kabupaten Luwu (6.26), namun belum lebih baik daripada Luwu Utara (7.11), Makassar (8.79), Sulsel (6.92).
3. PDRB per Kapita (ADHB) Kota Palopo tahun 2019 sebesar 43.02 Juta/Tahun. Ini lebih baik dari tahun 2018 yang berada pada angka 40.32 Juta/Tahun. Bahkan juga melampaui target daerah 2019 yang berada pada angka 37.1 Juta/Tahun. Bahkan juga telah melampaui target akhir RPJMD pada tahun 2023, yang berada pada angka 37.8 Juta/Tahun. Angka PDRB per Kapita (ADHB)Kota Palopo 2019 lebih tinggi/meningkat sebanyak 2.7 Juta/Tahun, dibandingkan tahun 2018.
4. PDRB per Kapita Kota Palopo 2019, lebih baik/lebih tinggi dari Kabupaten Luwu Utara (41.70 Juta/Tahun), tetapi belum lebih baik/lebih tinggi dari Kabupaten Luwu (43.25 Juta/Tahun), Luwu Timur (70.06 Juta/Tahun), Kota Pare-Pare (49.80 Juta/Tahun), Kota Makassar (116.87 Juta/Tahun). Pada level regional dan nasional, PDRB per Kapita Kota Palopo juga masih jauh dibawah rata-rata PDRB per Kapita Sulsel 2019 (57.03 Juta/Tahun), dan nasional (59.1 Juta/Tahun
5. Kualitas Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo yang berada diatas rata-rata nasional maupun provinsi Sulsel, tapi belum significan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin Kota Palopo.
6. Nilai indeks gini atau gini rasio Kota Palopo tahun 2019 pada angka 0.338 dan ini belum memenuhi target daerah 2018 yang berada pada angka 0.330. Namun capaian gini rasio Kota Palopo tahun 2019 adalah yang terbaik sejak tahun 2014, yang semuanya masih menyentuh angka 0.4 point.
7. Proporsi Penduduk Miskin Kota Palopo sampai dengan Tahun 2019 berada pada posisi 7.82% dan 2018 sebesar 7.94%. Meski capaiannya lebih baik dari target daerah, kondisi ini masih menempatkan Kota Palopo pada posisi yang belum lebih baik dibandingkan dengan Kota Makassar yang pada tahun 2018, persentase penduduk miskinnya hanya berada pada angka 4.41%. Jumlah Penduduk Miskin Kota Palopo 2018 pada angka 14,270 Jiwa, jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan penduduk Miskin Kota Pare-Pare yang berada pada angka 8,010 Jiwa. Rentan 2016 s.d 2019, proporsi penduduk miskin Kota Palopo hanya berkurang sebanyak 650 jiwa, dimana penduduk miskin pada tahun 2016 pada angka 15.020 jiwa menjadi 14.370 jiwa tahun 2018.
8. Penurunan propsorsi penduduk miskin di Kota Palopo kurun waktu 2016-2019 berjalan lamban bahkan fluktuatif. Data menunjukan tahun 2016 ke 2017, jumlah penduduk miskin malah meningkat dari 15.020 Jiwa menjadi 15,440 jiwa di tahun 2017. Dan 2017-2018, menurun 1,170 jiwa (dari 15440 jiwa menjadi 14,270 Jiwa). Namun 2018-2019, jumlah meningkat lagi dari 14,270 jiwa (2018) menjadi 14,370 Jiwa (2019).
9. Persentase Jalan Mantap 2019 masih pada angka 67.99%, dengan panjang jalan berkondisi baik 342.09 Km dari total panjang jalan 503.16 Km. Persentase masyarakat yang mengakses air minum layak sebesar 98.37%, belum sesuai target SPM. Persentase sanitasi layak sebesar 91.96%, Persentase Luas RTH publik Terhadap Luas Wilayah pada angka 76.95%, Persentase areal pemukiman tidak kumuh 99.85 dengan Indeks daya saing infrastruktur tahun 2019 sebesar 87.02

10. Indeks kerapatan jalan di Kota Palopo 2019 (1.95 Km/Km2), masih berada dibawah indeks kerapatan jalan di Kota Pare-Pare 2019 (2.73 Km/Km2) dan Kota Makassar 4.41 Km/Km2. Artinya konektifitas dan aksesibilitas transportasi maupun logistic di kedua wilayah tersebut diatas masih lebih baik dibandingkan dengan Kota Palopo.
11. Pemenuhan layanan dasar air bersih dan limbah, di beberapa pemukiman masyarakat belum optimal. Termasuk di dalamnya penuntasan kawasan kumuh.
12. Luas wilayah terdampak banjir di Kota Palopo pada tahun 2019 sebesar 12.38 Ha. Kondisi ini belum memenuhi target RPJMD 2023 yang menempatkan angka 2 Ha sebagai target maksimal luas wilayah yang terdampak banjir. Masih ada lima kelurahan yang terdampak banjir
13. Masih adanya ancaman bencana berupa longsor pada kawasan pemukiman masyarakat, ancaman banjir serta abrasi serta semakin tingginya kerentanan ancaman kebakara akibat semakin padatnya rumah penduduk. Keteraturan bangunan serta penegakan aturan sebelum memulai pembangunan menjadi hal yang perlu mendapatkan penekanan dan perhatian.
14. Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Palopo 2019 (CC) masih jauh tertinggal dibandingkan Kota Makassar bahkan dengan kabupaten Luwu Utara. Capaian SPM pada 6 Urusan, tak seluruhnya memenuhi target yang direncanakan. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo tahun 2019 adalah 52,70 atau kategori CC. Capaian ini belum memenuhi target daerah tahun 2019 yaitu 64 dan masih di bawah target akhir RPJMD yaitu 72.
15. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah serta layanan public yang berstandar dan berbasis inovasi masih sangat perlu dikembangkan oleh Pemerintah Kota Palopo termasuk pelaksanaan pemerintahan yang berbasis elektronik.
16. Inovasi dan komitmen melaksanakan layanan publik pada tingkat perangkat daerah belum optimal. Baru satu perangkat daerah yang layanan publik mendapat apresiasi dari Komisi Ombudsman RI yakni layanan pada DPMPTSP
17. Kontribusi sektor Pariwisata dan Ekraf Terhadap PAD Kota Palopo masih sangat kecil. Sektor pariwisata 2019 hanya menyumbang Rp. 82.100.000 atau sebesar 0.05% dari Total PAD Kota Palopo tahun 2019. Sementara nilai atau angka retribusi dari sector ekonomi kreatif Kota Palopo sebesar Rp. 6.201.259.135,- atau sebesar 3,76% dari total PAD Kota Palopo.

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat dirangkum dalam bentuk Tabel 2.371, sebagai berikut :

Tabel 2.371
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	6.45	6.98	7.17	7.52	6.75	≥7	Tercapai
2	Laju inflasi (%/Tahun)	3.38	2.74	3.95	4.19	1.91	3.5	Tidak tercapai
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	27.38	28.7	34.8	40.03	43.02	36.9	Tercapai
4	Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	12,005	12,156	12,319	12,465	12,986	12,500	Tidak tercapai
5	Indeks Gini (Angka)	0.43	0.37	0.34	0.34	0.34	0.33	Tidak tercapai
6	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)	91.42	91.26	91.22	92.36	92.1	91.11	Tidak tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	8.58	8.74	8.78	7.62	7.9	8.89	Tercapai
8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo (Rp/Kapita/Bulan)	261,056	274,319	228,881	292,602	324,233	247,109	Tidak tercapai
9	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14,510	15,020	15,440	14,270	14,370	15,012	Tidak tercapai
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari (%)	8.59	8.69	8.72	7.62	7.9	8.89	Tercapai
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.76	1.17	1.75	1.14	1.15		
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.52	0.28	0.6	0.26	0.29		
	Indeks Kesehatan	77.23	77.31	77.38	77.44	78.14		
	Indeks Pendidikan	75.87	75.95	76.24	76.81	77.69		
	Indeks Pengeluaran	75.72	76.1	76.51	76.88	78.12		
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka)	76.27	76.45	76.71	77.3	77.98	76.8	Tercapai
12	Angka melek huruf (%)	98.22	96.07	98.02	97.71	98.4	100	Tidak tercapai
13	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	10.25	10.26	10.33	10.51	10.75	9.95	Tercapai
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15.02	15.03	15.05	15.06	15.07	14.49	Tercapai
14	Angka usia harapan hidup (Tahun)	70.3	70.25	70.3	70.49	70.79	70.28	Tercapai
15	Persentase balita gizi buruk (%/Tahun)	0.06	0.02	0.02	0.01	0	0	Tidak tercapai
16	Prevalensi balita gizi kurang (%/Tahun)	1.45	2.14	2.37	1.91		1.5	Tidak tercapai
17	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	100	64	75	100	Tercapai
18	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	54.27	54.81	56.33	58.57	60.49	65	Tidak tercapai
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	*69.43*	*69.51*	*73.99*	*74.04*	74.85	75	Tidak tercapai
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	*40.36*	*41.31*	*40.41*	*44.4*	47.37	50	Tidak tercapai
19	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	57.74	58.09	59.56	58.31	64.58	65	Tidak tercapai
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	73.21	73.03	77.61	77.95	79.16	85	Tidak tercapai
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	43.28	44.15	43.03	47.55	51	50	Tidak tercapai
20	Tingkat pengangguran terbuka (%)	12.07	14.43	10.96	11.6	10.32	5	Tidak tercapai
21	Rasio penduduk yang bekerja (%)	87.93	85.57	89.04	88.4	89.68	95	Tidak tercapai
22	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	72.07	76.66	70.56	72.24	75.4	75	Tidak tercapai
23	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	45.21	46.9	50.15	46.9	50.15	55	Tidak tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
24	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	45.21	46.9	25.51	49.16	54.25	26	Tidak tercapai
	Laki – Laki	n/a	n/a	18.05	25.76	25.07	24	Tidak tercapai
	Perempuan	n/a	n/a	7.46	21.03	n/a	11.5	Tercapai
25	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	40.28	30.34	28.9	26.82	26.09	38	Tercapai
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	40.28	30.34	28.9	26.82	83.08%	Baik	
27	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	10.8	13.35	17.91	14.44	16.83	20	Tidak tercapai
28	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
29	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88.7	90	91.6	92.5	92.6	90	Tercapai
30	Penguatan cadangan pangan (%)	66.3	68.9	69.1	101.96	104.15	90	Tidak tercapai
31	Penanganan daerah rawan pangan (%)	n/a	0.32-0.48	n/a	n/a	n/a	n/a	
32	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	18.96	17.85	17.74	16.91	16.39	17	Tercapai
33	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	
34	Produksi sektor pertanian (Ton/Tahun)	12.040,57	27.454,47	78.511,00	43.194,08	39.505,53		
	Padi	28,631	30,167	32,444	32,664	20.355,70	27,701	Tercapai
	Jagung	4,737	6,303	5,086	3,722	7,493	5,511	Tidak tercapai
	Ubi Kayu	177	70.4	70	141	177	164	Tidak tercapai
	Ubi Jalar	13	18.94	4.55	1.22	13	50	Tidak tercapai
	Sagu	51.33	33.04	15.59	1.67	2.23	51	Tidak tercapai
	Daging (Ruminansia dan Unggas) Ton	2491.46	3318.87	3276.3	3365.5	2491.46	2451	Tercapai
	Daging (Ruminansia) Ton	306.06	232.94	247.48	249.5	306.06	261	Tidak tercapai
	Daging Sapi (Ton)	284	232.24	247.16	222.8	596.87	225	Tidak Tercapai
	Daging Kerbau (Ton)	22.06	0.7	0.32	0.1	1.03	35	Tidak tercapai
	Daging Kambing (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	3.92	n/a	
	Daging Unggas (Ton)	2185.4	3085.93	3028.82	3968.92	3803.16	2191	Tercapai
	Daging Ayam Kampung (Ton)	133.81	143.72	145.012	148.4	123.77	136	Tercapai
	Daging Ayam Pedaging (Ton)	2,043.39	2,934.04	2,875.36		3,666.04	2046	Tidak tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
	Daging Itik/Bebek/Entog (Ton)	8.2	8.17	8.45	8.7	13.36	8	Tercapai
	Telur (Ayam Kampung/Ras/Itik/Entog) (Ton)	666.85	2063.9	1778.18	2065.87	1422.3	1097	Tercapai
	Telur Ayam Buras/Kampung (Ton)	563.08	1999.48	1590.19	n/a	1222.38	997	Tercapai
	Telur Ayam Ras Petelur (Ton)	14.54	n/a	45	n/a	86.87	18	Tercapai
	Itik/Angsa/Entog (Ton)	89.23	64.42	142.99	n/a	113.08	85	Tidak tercapai
35	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
36	Produksi sektor perkebunan (Ton/Tahun)	1851,24	1350,52	1638,01	884,00	1440,06		
	Kelapa Dalam	55.82	49.67	31.92	37.17	17.7	53.47	Tidak tercapai
	Kopi	67.46	66.12	66.27	25.99	50.96	68.94	Tidak tercapai
	Kopi Robusta	66.85	66.07	66.26	25.99	50.96	68.38	Tidak tercapai
	Kopi Arabika	0.61	0.05	0.01	0	0	0.55	Tidak tercapai
	Cengkeh	81.77	110.36	127.99	0	74	105.8	Tidak tercapai
	Kakao	1546,48	1240,17	1411,83	820.84	1297,40	2814	Tidak tercapai
37	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	33608	36592	37620	38289	n/a	n/a	
38	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0.01	0.05	n/a	n/a	n/a	n/a	
39	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	0.19	0.19	0.18	0.17	n/a	0.18	Tercapai
40	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1.18	1.22	1.2	1.18	1.03	1.5	Tercapai
41	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	n/a	Tercapai
42	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	21.91	22.55	23.05	23.66	24.41	24	Tidak Tercapai
43	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2.96	2.91	2.82	2.7	2.72	2.76	Tidak Tercapai
44	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
45	Pertumbuhan Industri (%)	43.99	1.84	22.13	21.99	19.55	20.02	Tercapai
46	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	84,077	89,774	96,318	104,354	110.506	98,000	Tidak Tercapai
2	Nilai tukar petani	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan	55.02	51.19	51.87	51.53	54.85	51	Tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
	perkapita (%)							
4	Produktivitas total daerah (Ribu/Tenaga Kerja/Tahun)	81.89	87.5	86.69	96.67	98.23	87.12	Tercapai
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	100	100	100	100	100	100	Tercapai
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	72.75	73.08	69.92	74.51	76.59	75	Tercapai
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	1.12	1.35	0	1.19	n/a	1.5	Tercapai
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
9	Angka kriminalitas yang tertangani (per 100.000)	7	8	12	6	12	15	Tidak tercapai
10	Rasio ketergantungan	49.23	48.81	48.46	48.11	47.98	47.34	Tidak tercapai
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah								
NO	**BIDANG URUSAN/INDIKATOR**							
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	**Pendidikan**							
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	59.6	61.75	63,16	63.1	62.48	75	Tidak tercapai
2	Angka Partisipasi Kasar							
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	101,81	111,66	106,00	112.89	105.99	100	Tercapai
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	88,23	86,17	84,91	84.17	86.02	100	Tidak tercapai
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	91,56	95,35	85,39	110.31	110.74	100	Tercapai
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)							
	Tidak/Belum Bersekolah (%)	17.03	7.85	7.02	6.31	14 087	7	Tidak tercapai
	Tamat SD/sederajat (%)	19.23	30.47	14.18	12.69	17.05	15	Tidak tercapai
	Tamat SMP/sederajat (%)	18.02	11.82	23.63	24.71	29.84	20	Tercapai
	Tamat SMA (%)	26.12	31.75	36.68	37.88	n/a	30.3	Tercapai
	Tamat SMK (%)	3.89	4.06	2.81	2.39	4.99	4	Tidak tercapai
	Tamat Perguruan Tinggi (%)	15.72	14.08	15.67	16	n/a	14.8	Tercapai
	Diploma I/II (%)	0.33	0.29	0.37	0.38	n/a	0.8	Tidak tercapai
	Diploma III (%)	2.61	1.82	1.39	1.12	n/a	2	Tidak tercapai
	Diploma IV/S1-S3 (%)	12.78	11.97	13.91	14.51	n/a	12	Tercapai
4	Angka Partisipasi Murni							
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	94,11	95,37	99,32	99.78	99.44	100	Tidak tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	75,43	76,61	77,89	78.39	78.11	73.57	Tercapai
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	68,29	65,72	66,42	67.99	67.4	70.71	Tidak tercapai
5	Angka partisipasi sekolah (%)							
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	989.8	1000	993.2	997.8	997	1000	Tidak tercapai
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	985.2	965.7	981.3	100	991.7	990.7	Tidak tercapai
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C (Per 1000)	818,9	884,1	883,4	847.5	844.3	920.1	Tidak tercapai
6	Angka Putus Sekolah:							
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0.4	0	0.68	0.79	0.004	0	Tidak tercapai
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1.45	3.43	1.87	1.26	0.006	0.98	Tidak tercapai
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	15.87	9,10	10.28	7.35	n/a	5.94	Tidak tercapai
7	Angka Kelulusan:							
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	97.48	98.87	100	100	100	100	Tercapai
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99.05	99.62	99.3	99.38	100	99.79	Tidak tercapai
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	102.82	102.44	99.75	100	n/a	99.04	Tercapai
8	Angka Melanjutkan (AM):							
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	131.25	141.24	137.56	140.36	n/a	n/a	Pindah kewenangan
9	Fasilitas Pendidikan:							
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	97.47	97.47	96.25	96.25	100	100	Tidak tercapai
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)	37	33	32	32	36	33	Tidak tercapai
	SD/MI (per 10,000)	43	36	36	36	39	37	Tidak tercapai
	SMP/ MTS (per 10,000)	26	26	26	26	30	26	Tercapai
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah (per 10,000)	27	28	27	28			

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
	SMA/MA/SMK	27	28	27	28		35	Tidak tercapai
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	890	674	635	621	649	750	Tidak tercapai
	SD/MI (per 10,000)	937	633	607	595	601	700	Tidak tercapai
	SMP/ MTS (per 10,000)	800	751	688	670	737	780	Tidak tercapai
12	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah atas /MA/SMK (per 1000)	231	89	88	93	n/a	130	Tidak tercapai
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (per 10.000)	0.81	0.59	0.57	0.55	0,57	0.65	Tidak tercapai
14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata pendidikan menengah (per 10.000)	4.77	1.77	1.8	1.61	1.73	2.69	Tidak tercapai
15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki (%)	99.954	99.973	99.995	100	100	100	Tidak tercapai
17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	98.22	96,61	97.45	97.71	98.42	98.24	Tidak tercapai
18	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	61.55	123.46	137.26	147.26		100	Tercapai
2	**Kesehatan**							
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0.36	2.18	2.03	0.99	0.61	1	Tercapai
2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	100	97.82	97.97	99.01	99.39	99	Tidak tercapai
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	6.92	7.62	5.41	6.27	5.79	2	Tercapai
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	6	7	5	3	4	4	Tercapai
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	146	145	68	99	30	66.75	Tercapai
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	10	9	9	9	8	9	Tercapai
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	2	3	3	3	3	3	Tercapai
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	3	4	4	4	4	4	Tercapai
9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	5	5	5	6	6	5	Tercapai
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	5	5	5	5	6	5	Tercapai
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	74.21	76.49	70.63	72.77	86.23	73,1	Tidak tercapai
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga	96.31	93.99	95.79	100	101.67	94.74	Tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
	kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)							
13	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) (%)	95.83	97.92	95.83	95.83	93.75	95.79	Tercapai
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (%)	95	92.8	91	87.73	81.08	85.19	Tercapai
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	109.94	111.83	107	106.87	98.48	90	Tercapai
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (Rasio)	2	2	0	0	0	0	Tercapai
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	8.64	3.15	6.19	9.85	9.2	6.8	Tercapai
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	84.16	108.56	138.07	83.06	119	100	Tercapai
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	221	205	243	138	225	250.43	Tidak tercapai
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	37.6	159.46	244.32	83.06	91.41	77.21	Tercapai
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	59.9	65.98	63.37	45.6	39.76	59.12	Tercapai
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
25	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	6	6	6	6	5	8	Tercapai
26	Angka kejadian Malaria (per 100.000)	113	166	128	101	62	20	Tercapai
27	Tingkat kematian akibat malaria (per 1000)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (per 100.000)	0.000036	0.00034	0.00066	0.00071	0.00043	21	Tercapai
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir (per 1000)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	2	Tidak tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
	memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)							
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	n/a	n/a	n/a	100	100	100	Tercapai
34	Cakupan kunjungan bayi (%)	94.5	95.75	100.78	100	99.76	100	Tercapai
35	Cakupan puskesmas (%)	133,33	133,33	133,33	133.33	133.33	100	Tercapai
36	Cakupan pembantu puskesmas (%)	45.83	45.83	60.42	62.50	62.50	75	Tercapai
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	92.25	90.69	92.8	94.08	100	92.82	Tidak tercapai
38	Cakupan pelayanan nifas (%)	91.81	93.17	91.22	100.6	99.53	89.03	Tercapai
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	77.43	75.06	67.79	63.44	76.42	70.49	Tidak tercapai
40	Cakupan pelayanan anak balita (%)	42.97	56.36	62.51	48.9	73.92	65.26	Tidak tercapai
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	94,66	98,81	97,52	97.36	97.93	97.21	Tercapai
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	n/a	n/a	n/a	100	100	100	Tercapai
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	0	100	0	100	Tercapai
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
	Pekerjaan Umum:							
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	55.6	55.6	58.96	67.99	69.57	65	Tercapai
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	30	29	28	28	27	30	Tidak tercapai
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a
4	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam) (%)	62.95	49.73	59.57	69.81	71.6	65	Tercapai
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	0	0.2	1.28	1.79	2.14	1.5	Tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	65.46	88.63	90.77	96.41	97.03	72.21	Tercapai
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	40,50	42,70	46,10	47.72	50.1	45	Tercapai
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	14.71	12.64	10.73	8.99	8.86	50	Tidak tercapai
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	14.43	14.43	14.42	14.31	n/a	20	Tidak tercapai
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	2.94	3.39	3.4	3.69	5.05	5	Tidak tercapai
12	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	47.89	65.3	71.34	75.8	73.55	75	Tercapai
13	Rasio Jaringan Irigasi (per 1000 Ha)	10.22	15.53	18.86	20.74		20	Tercapai
14	Persentase penduduk berakses air minum (%)	85.32	86.01	93	94.84	95.61	100	Tidak tercapai
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	71.44	86	88.63	94.49	97.28	85	Tercapai
16	Persentase areal kawasan kumuh (%)	3.3	1.6	1.2	0.82	0.15	0	Tercapai
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	2.5	3.3	3.5	4.02	4.11	5	Tidak tercapai
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	1.78	1.62	1.58	1.55	1.52	1.8	Tidak tercapai
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	1.84	1.79	1.78	1.78	1.82	2	Tidak tercapai
3	**Penataan Ruang:**							
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)	1168,21	1169,23	1170,72	1171,81	1174,21	3003	Tidak tercapai
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	76.56	76.63	76.72	76.79	76.95	80	Tidak tercapai
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	n/a	34,4	n/a	n/a	n/a	50	
4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
6	Ketaatan terhadap RTRW	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**							
1	Rasio rumah layak huni	0.149	0.163	0.168	0.178	0.188	0.25	Tidak tercapai
2	Rasio permukiman layak huni (%)	91.93	94.24	94.28	91.32	92.26	98.96	Tidak tercapai
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	69.16	76.42	79.39	91.32	91.44	80	Tidak tercapai
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	84.78	85.04	92.1	92.87	93.58	90	Tercapai
5	Persentase pemukiman yang tertata (%)	98.06	98.12	99.25	99.26	99.25	90	Tercapai
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	3.36	1.68	1.26	0.82	0.15	0	Tidak tercapai
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	95.46	45.15	35.91	23.34	4.31	0	Tidak tercapai
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	8.36	7.76	7.41	1.95	0.48	0	Tidak tercapai
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	18.6	20	20.98	21.33	25.79	25	Tidak tercapai
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**							
1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	200	200	200	100	0	100	Tercapai
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	98,80	96,60	92,20	91,80	95,62	100	Tercapai
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	6.06	9.09	9.09	10.08	10.08	10	Tidak tercapai
4	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	88.16	67.67	94.87	94.74	65.59	100	Tidak tercapai
5	Persentase Penegakan PERDA	97,80	97,70	97,90	91,80	95,62	100	Tidak tercapai
6.	**Sosial**							
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	36.68	36.95	47.73	51.58	54,97	85	Tidak tercapai
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	36.85	36.68	36.98	51.43	55.09	85	Tidak tercapai
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	43.12	43.77	57.61	59.06	60.3	85	Tidak tercapai
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	0	0	0	0	n/a	10	Tidak tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	0	100	0	0	0	100	Tidak tercapai
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	0	3.93	11.88	19.68	41.43	4.08	Tidak tercapai
Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
1	**Tenaga Kerja**							
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Per 1000)	5.5	6	8.3	9.19	9.5	5	Tercapai
	Angka sengketa pengusaha-pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	0.83	12.1	18.1	2.23	2.55	15	Tercapai
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	88	80	71	73	11	85	Tidak tercapai
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	1.58	3.13	4.54	26.2	53.12	5	Tidak tercapai
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	26	24	25	25		25	Tercapai
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	36	37	37	39	54.82	35	Tercapai
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0	0	0	0	0	0	
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	1.01	0.87	0.67	0.97	1.13	2	Tidak tercapai
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	0.53	0.48	-	0.25		0.5	
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	7.62	5.71	28.85	31.97	46.45	30	Tidak tercapai
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	5.56	5.92	11.2	12.1	0	12	Tidak tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	40	36.6	5.83	5.28	0	20	Tidak tercapai
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	9.4	9	9.3	11.16		10	Tidak tercapai
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	14,49	11,40	10,92	10.59	9.27	15	Tidak tercapai
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	20	20	20	20	28	20	Tercapai
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	3.31	3.12	3.16	3.33		4	Tidak tercapai
4	Rasio KDRT (per 10.000)	5	6	3	2	1	3	Tercapai
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	89.71	44.15	92	88.99	91.45	50	Tidak tercapai
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	7.09	22.07	24.16		100	Tidak tercapai
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100		100	Tercapai
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	-	19.29	21.38	24	9.09	22	Tidak tercapai
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
	korban kekerasan (%)							
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD							
	APM Perempuan pada Tingkat SD	90.04	90.52	99.31	100	n/a	100	Tidak tercapai
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD	97.48	100	99.33	99.6	n/a	100	Tidak tercapai
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP							
	APM Perempuan pada Tingkat SMP	81.02	75.52	80.28	77.55	n/a	85	Tidak tercapai
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP	68.49	77.5	75.35	79.35	n/a	80	Tidak tercapai
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA					n/a		
	APM Perempuan pada Tingkat SMA	66,63	64,73	63,24	62	n/a	68	Tidak tercapai
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMA	70,11	66,80	69,65	75.27	n/a	70	Tidak tercapai
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	41.25	41.76	42.27	42.63	n/a	42.72	Tidak tercapai
	APM Perempuan yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	**Pangan**							
1	Ketersediaan pangan utama (%)	9.94	10.28	11	19.54	42.56	11	Tercapai
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	2,273	2,199	2,082	3,966	4,085	2,329	Tidak tercapai
	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)	2203.4	2,130.10	2012.8	3865	3981	2100	Tidak tercapai
	Ketersediaan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	69.23	68.9	69.1	101.96	104.15	54	Tercapai
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	-	75	82	72	86	85	Tidak tercapai
4	**Pertanahan**							
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	1.61	1.31	1.52	2.17	28.46	2	Tidak tercapai
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	0	0	0	25	28.57	20	Tidak tercapai
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	0	0	100	100	Tidak tercapai
5	**Lingkungan Hidup**							
	Kabupaten/Kota							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Tidak Ada	Tercapai
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Tidak Ada	Tercapai
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	n/a	n/a	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Baik	Tidak tercapai
5	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Sangat Baik	Sangat Baik	Unggul	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Tercapai
6	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	n/a	Tidak tercapai
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	32.54	38.95	37.2	24.16	27.27	40	Tidak tercapai
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota							
	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina (Orang)	0	0	0	0	0	1	Tidak tercapai
	Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum (Orang)	0	0	0	0	0	1	Tidak tercapai
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	0	0	0	0	0	Tidak tercapai
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0	0	
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0	0	
12	Penetapan hak MHA	0	0	0	0	0	0	
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (%)	0	0	0	0	0	0	
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana (%)	0	0	0	0	0	0	
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	0	0	0	0	0	
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Kali)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	86.12	87.02	88.28	88.9	90.26	85	Tercapai
19	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	2.55	3.33	3.56	4.02	4.11	4	Tidak tercapai
20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	59	61	64	67	67.83	67	Tidak tercapai
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	70.2	73.95	78.56	89.55	87.02	82.4	Tidak tercapai
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	72.41	75.65	77.81	79.46	-	75	Tercapai
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	0	0	0	0	0	100	Tidak tercapai
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	100	Tidak tercapai
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.65	0.79	0.78	0.65	0.67	0.81	Tidak tercapai
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.86	0.88	0.6	0.84	0.94	0.8	Tidak tercapai
3	Rasio pasangan berakte nikah	0.38	0.37	0.38	0.44	0.38	0.7	Tidak tercapai
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Tercapai
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Tercapai
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	66.21	78.89	82.56	93.28	93.84	87.03	Tidak tercapai
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	97.92	97.92	97.92	100	100	100	Tidak tercapai
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1	1	1	1	Tercapai
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	-	-	2.5	2.5	2.5	n/a	
4	Persentase LSM aktif (%)	10.81	5.4	0	0.00%	2.78%	5	
5	Persentase LPM Berprestasi (%)	-	-	4.17	4.17	4.17	5	Tidak tercapai
6	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	Tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
7	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Tercapai
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Tercapai
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.42	2.38	2.31	2.23	2.18	2.22	Tercapai
2	Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	0.00%	40	32.65	32.65%	36.73%	50	Tidak tercapai
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2	2	Tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	69.4	72.79	74.67	75.15%	75.74%	77.19	Tidak tercapai
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Tidak tercapai
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	21	10	10	9	3	14	Tidak tercapai
14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	30.27	23.59	22.48	23.92%	12.35%	20.32	Tercapai
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	20.91	21.54	21.81	25.06%	21.92%	23	Tidak tercapai
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	60.28	47.83	45.14	47.42%	32.04%	43	Tercapai
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	67.43	62.95	75.15	78.26%	74.12%	75	Tercapai
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	51.06	53.02	58.56	64.96%	60.61%	60	Tidak tercapai
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	34.37	42.27	47.2	55.09%	54.38%	45	Tercapai
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	Tercapai
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	2.44	7.33	9.00	10.333	20.44	8	Tercapai
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	25.77	17.75	20.63	20.42%	23.93%	30	Tidak tercapai
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100	Tercapai
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	4.31	9.67	7.28	8.74	13.20	10	Tidak tercapai
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes (%)	49.93	55.1	66.4	43.40%	66.44%	75	Tidak tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
29	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	70.59%	104%	193%	180%	100%	2.38	Tidak tercapai
31	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	23.83	19.63	54.89	64.01	100%	60	Tidak tercapai
32	Rata-rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	
33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (%)	37.62	65.19	83.83	82.94%	41.32%	80	Tercapai
9	**Perhubungan**							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	1,689,617	1,680,146	1,345,436	1.327.055	1.323.604	1,285,538	Tercapai
2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	2	2	2	2	2	2	Tercapai
3	Jumlah uji kir angkutan umum (Unit)	1354	1301	1152	1411	1381	750	Tidak tercapai
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	2	2	2	2	2	2	Tercapai
5	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	9.02	8.5	9.9	10.9	10.6	2.734	Tercapai
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	88.8%	90.28%	86.49%	97.18%	99.1%	25	Tidak tercapai
7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	69.27%	65.45%	63.20%	70.47%	56.4%	80	Tidak tercapai
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	20	19	18	17	16	20	Tidak tercapai
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang/Tahun)	1,688,848	1,680,024	1,344,991	1,326,741	1,323,252	1,581,141	Tidak tercapai
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (M3/Tahun)	602,106	605,771	601,356	603,524	607,024	605,250	Tidak tercapai
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	2,294,687	2,289,155	1,949,036	1,933,755	1,942,818	1,823,758	Tercapai
10	**Komunikasi dan Informatika**							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	0	0	3.33	3.33	3.35	3	Tercapai
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.83	0.86	0.86	0.9	0.9	1	Tidak tercapai
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	66.73	70.74	79.24	84.95	86	85	Tidak tercapai
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0.07	0.08	0.09	0.10	0.23	0.09	Tercapai
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0.33	0.37	0.4	0.42	0.5	0.42	Tercapai
11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**							
1	Persentase koperasi aktif (%)	71.02	71.32	71.08	71.03	25.34	70.7	Tercapai
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	100	100	100	99.91	99.91	29.67	Tercapai
3	Persentase BPR/LKM aktif (%)	-	-	-	100	n/a	100	
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	76.34	76.11	76.31	75.52	75.37	100	Tidak tercapai
12	**Penanaman Modal**							
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	95	122	147	129	78	157	Tidak tercapai
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	95	122	147	129	85	0	
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	96,603	268,332	382,322	220,859	130,740	184,830	Tercapai
4	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	22.5	10.56	7.42	9.50	13.65	8	Tidak tercapai
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-32	178	42.48	57.77		40.6	Tercapai
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**							
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	67.90	69.30	69.30	69.27%	70.20%	70	Tidak tercapai
2	Persentase wirausaha muda (%)	1.56	1.75	1.75	1.75%	1.77	2	Tidak tercapai
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	-	38.46	38.46	46.15%	59.26	40	Tidak tercapai
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	63.64	68.18	68.18	32.53%	32.53	70	Tidak tercapai
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	63.64	68.18	68.18	21.18%	28.2	50	Tidak tercapai
6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	10	36	7	7	4	50	Tidak tercapai
7	Jumlah prestasi olahraga (Cabang)	10	36	7	7	4	50	Tidak tercapai
14	**Statistik**							
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
2	Buku "Kota Palopo dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
15	**Persandian**							
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (%)	55	75	71.42	86	79.59%	75	Tidak tercapai
16	**Kebudayaan**							
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	10	12	15	18	14	18	Tidak tercapai
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	99.32	99.32	99.32	99.33%	100	Tidak tercapai
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)	1	1	0	1	0	5	Tercapai
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	37	51	51	56	52	50	Tercapai
17	**Perpustakaan**							
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	7.67	9.18	9.23	9.55	10.15	10	Tidak tercapai
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	35.14	34.41	46.81	50.46	38.49	50	Tidak tercapai
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1000)	1.21	1.19	1.16	1.16	1.13	1.2	Tidak tercapai
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	902	1,106	1,137	1,204	1,246	1,000	Tercapai
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	624	308	1,232	1,191	404	1,393	Tidak tercapai
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	0	33	33	33	67	100	Tercapai
18	**Kearsipan**							
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	2.5	2.5	2.04	16.33	24.49%	2	Tercapai
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	7	6	7	8	7	8	Tidak tercapai
Layanan Urusan Pilihan								
1.	**Pariwisata**							
1	Kunjungan wisata (%)	122.31	100.97	99.48	101.15%	115.83%	94.25	Tercapai
2	Lama kunjungan Wisata (Rata-rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)	2	2	2	2	2	2	Tercapai
3	PAD sektor pariwisata (%)	4.15	3.45	3.51	5.05%	5.12%	4	Tidak tercapai
2.	**Pertanian**							
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	18,96	17,73	17,60	17.39	n/a	18	Tidak tercapai
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
5	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)							
	Padi	28631	30167	32,444	32,664	20,288	27,701	Tercapai
	Jagung	4737	6303	5,086	3,722	4,737	5,511	Tidak tercapai
	Ubi Kayu	177	70.4	70.0	141	n/a	164	Tidak tercapai
	Ubi Jalar	13	18.94	4.6	n/a	n/a	50	Tidak tercapai
	Sagu	51.33	33.04	15.59	n/a	n/a	51	Tidak tercapai
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)							
	Padi	5.62	5.88	6.27	6.40	6.41	5	Tercapai
	Jagung	6.64	6.79	6,75	7.09	7.10	6	Tercapai
	Ubi Kayu	22.13	10.06	70.00	29.52	n/a	28.93	Tidak tercapai
	Ubi jalar	13	18.94	4.55	n/a	n.a	12.33	Tidak tercapai
	Sagu	0.46	0.29	0.05	n/a		0.32	Tidak tercapai
7	Cakupan bina kelompok petani	89.43	78.38	50.68	52.17		50	Tercapai
3	**Energi dan Sumber Daya Mineral**							
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	n/a	n/a	n/a	100	100	100	Tercapai
2	Rasio ketersediaan daya listrik	n/a	n/a	n/a	100	100	100	Tercapai
4	**Perdagangan**							
1	Ekspor Bersih Perdagangan (Nilai/Juta)	-792.951	-834.666	-802.359	-945580	-1,004,760	-600,000	Tidak tercapai
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
5	**Perindustrian**							
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	87,65	13,25	0	0.00%	2.45%	50	
6	**Transmigrasi**							
1	Persentase transmigran swakarsa	0	0	0	0	0	0	
7	**Perikanan**							
1	Produksi perikanan (%)	99.6	97.74	103.7	99.95%	93.33%	104.63	Tidak tercapai
2	Konsumsi ikan (%)	122.06	99.6	100.13	104.16%	98.54%	100	Tercapai
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	21.6	5.69	3.15	11.19%	7.75%	4.5	Tidak tercapai
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	69.11	75	75	72.50%	11.00%	75	Tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
7	Nilai tukar nelayan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Penunjang Urusan								
1.	**Perencanaan Pembangunan**							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	Tercapai
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	Tercapai
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	Tercapai
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	Tercapai
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	90.29	94.46	79.01	92.2	98	100	Tidak tercapai
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	87.85	81.98	94.79	74.17	100	100	Tidak tercapai
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2.	**Keuangan**							
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
2	Persentase SILPA	0	0	0	0	0	0	Tercapai
3	Persentase SiLPA terhadap APBD	12.52	5.15	2.25	0.12%	3.56%	2	Tercapai
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)							
	Persentase program yang tidak terlaksana (%)	0,3	0,3	0,6	0.62%	0.3%	0	Tidak tercapai
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana (%)	3,7	0,7	1,06	1.04%	0.74%	0	Tidak tercapai
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	27.56	22.22	17.84	18.29%	20.17%	20	Tidak tercapai
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	17.69	18.64	24.48	26.26%	29.59%	10	Tercapai
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)							
	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)	54.86	62.59	64.15	57.6	56.7	50	Tercapai
	Perbandingan antara	45.14	37.41	35.85	42.42	43.3	50	Tidak

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
	belanja tidak langsung dengan APBD (%)							tercapai
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	1.51	2.04	1.79	5.75	6.56	2	Tidak tercapai
9	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tercapai
3.	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**							
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Hari/Jam Pelajaran)	97/867	103/893	103/893	103/893	103/894	n/a	
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	0,5	0,7	0,9	0.79%	0.67%	2	tercapai
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	30,3	30,3	29,3	30.4	37.97%	50	tercapai
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	36	34	33	33.3	33	33	Tercapai
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	938	900	949	951	960		Tercapai
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	3021	2261	2217	2210	2213		
4.	**Penelitian dan pengembangan**							
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	90,9	100	100	100	100	100	Tercapai
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	75	85	36,36	23.63	50	85	Tidak tercapai
	Penerapan SIDa:							
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.(%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	34.78	26.08	52.1	60.87	36.3	34.76	Tercapai
5.	**Pengawasan**							
1	Persentase tindak lanjut temuan	70,72	41,60	57,02	46.54	75	100	Tidak tercapai
2	Persentase pelanggaran pegawai	0,09	0,06	0,04	0	0.91	0.01	Tidak tercapai
3	Jumlah temuan BPK	15	9	19	16	12	17	Tercapai
6.	**Sekretariat Dewan**							
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada.A	Ada.A	Ada	Tercapai
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar/Target 2018	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		
	Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)							
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai

2.9.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) :

Berikut adalah Capaian SPM Kota Palopo Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.372 berikut ini.

Tabel 2.372
Capaian SPM Kota Palopo Tahun 2019

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Aspek Pelayanan Dasar						
I	**SPM Bidang Pendidikan**						***100***
	Pendidikan Dasar						
1	Persentase penduduk Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	n/a	n/a	n/a		100
	Pendidikan Kesetaraan						
2	Persentase penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan	%	n/a	n/a	n/a		100
	Kesataraan		n/a	n/a	n/a		
	Pendidikan Anak Usia Dini						
3	Persentase penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	n/a	n/a	n/a		100
II	**SPM Bidang Kesehatan**						***84.06***
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n/a	n/a	92,80	94,08%	96.27
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n/a	n/a	95,76	96,11%	99.79
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n/a	n/a	100	100%	96.86
	Pelayanan kesehatan balita						
4	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n/a	n/a	81,08	48,90%	68.33
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						
5	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n/a	n/a	77,32	96,42%	97.93
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif						
6	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n/a	n/a	121,13	85,34%	50.66
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut						

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
7	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n/a	n/a	74,92	60,52%	74.82
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi						
8	Persentase penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n/a	n/a	9,475	100%	41.88
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus						
9	Persentase penduduk penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n/a	n/a	109,04	100%	87.03
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat						
10	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		n/a	n/a	101,80	98,46%	100
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis						
11	Persentase penduduk terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n/a	n/a	78,47	100%	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)						
12	Persentase penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n/a	n/a	90,37	100%	95.17
III	**SPM Bidang Pekerjaan Umum**						
	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari						***89.51***
1	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	n/a	n/a	n/a	95%	81.70
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik						
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	n/a	n/a	n/a	n/a	97.31
IV	**SPM Bidang Perumahan**						***100***
	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana						
1	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	n/a	n/a	n/a	92,87%	100
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah						
2	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100
V	**SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**						
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum						***79.80***
1	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	n/a	n/a	n/a	95,00%	90.37
	Pelayanan informasi rawan bencana						
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	n/a	n/a	n/a	n/a	88.88
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
3	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	84.17

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
	terhadap bencana						
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						
4	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	n/a	n/a	n/a	n/a	70.00
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						
5	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	n/a	n/a	n/a	n/a	65.59
VI	**SPM Bidang Sosial**						
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti					n/a	***100***
1	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti						
2	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti						
3	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti						
4	Persentase penduduk /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota						
5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100

2.9.3. Capaian Kinerja SDG's/TPB

Tabel. 2.373
Tabel Capaian Indikator Kinerja SDGs/TPB Kota Palopo
Tahun 2019

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2016	2017	2018	2019
Tujuan I Tanpa Kemiskinan					
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	8.74	8.78	7.94	8.1
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	95.16	103.95	100.93	100
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	37	37	n/a	47
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	3.09	1.58	0.05	100
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	3104	3769	3622	3000
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	100	100	100	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	108.6	106.81	96.78	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	72.79	74.67	75.15	76.54
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	n/a	93.43	n/a	90

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2016	2017	2018	2019
keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.					
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	91.24	99.58	n/a	91
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	11.36%	7.10%	n/a	1
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	95.37	99.23	99.78	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	76.61	77.89	78.39	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	n/a	93.57	71.05	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	15005	n/a	n/a	100
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Meninggal 0; Hilang 0;	Mengungsi 121,4 Mengungsi 45,22	n/a	0
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	0	0	n/a	4
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada	Jumlah kerugian ekonomi langsung	n/a	n/a	n/a	750

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2016	2017	2018	2019
dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	akibat bencana.				*juta
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0	0	n/a	0
Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	44.32%	58.07%	n/a	61.15
Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pendidikan 24,43	Pendidikan 18,80	Pendidikan 18,81	Pendidikan 21,04
		Kesehatan 20,50	Kesehatan 25,80	Kesehatan 27,02	Kesehatan 30,37
		Sosial 0,84	Sosial 1,85	Sosial 1,92	Sosial 2,48
Tujuan II Tanpa Kelaparan					
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	10	8.4	48	8.2
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi kekurangan gizi *(underweight)* pada anak balita.	2.14	2.37	2.48	1.79
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Sedang 19,37; Berat 27,97	Sedang 14,42; Berat 30,6	48	Sedang 14
					Berat 30
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	90	91.02	48	7.98
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	28.8	26.21	2.96	20
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	n/a	n/a	4.21	20

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2016	2017	2018	2019
gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.					
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1.6	1.71	2.04	1
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	0.15	0.18	0.85	0
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	n/a	n/a	60.24	60
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	PPH 90, KI 50,82	PPH 92,5	48	91.6
Tujuan III Kehidupan Sehat dan Sejahtera					
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (AKI).	4 Jiwa	2 jiwa (67,59)	99.04	65
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	94.29	94.29	100	100
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	100	100	100	100
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1	1	6.27	1
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	4	3	3.63	4
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1	1	0.99	1

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2016	2017	2018	2019
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Persentase kelurahan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	100	100	n/a	100
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.04	0.036	0.13	0.04
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	230	200	234.5	230
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1,700	1,300	1.38	1,700
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Jumlah kelurahan yang mencapai eliminasi malaria.	1	3	n/a	1
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Persentase kelurahan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	1	3	n/a	1
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Prevalensi tekanan darah tinggi.	11	9	4.07	11
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	25	23	39.42	25
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	2	1	n/a	2
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	72	76	75.1	72
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	72.79	74.67	75.15	76.54
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	21.54	21.81	25.06	23
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19	n/a	n/a	18	12

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2016	2017	2018	2019
reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).				
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Total Fertility Rate (TFR).	n/a	n/a	3.32	3
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Unmet need pelayanan kesehatan.	23.59	22.48	n/a	11
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	90.75	101.61	100.93	100
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	95.16	103.95	100.93	100
Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100	100	100
Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	100	100	5.15	100
Tujuan IV Pendidikan Berkualitas					
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	n/a	97.45	n/a	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	79.48	94.7	n/a	100

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2016	2017	2018	2019
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	65.51	81.8	n/a	85
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	111.66	105.91	112.89	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	86.17	84.91	84.17	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	15.03	n/a	n/a	10.36
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	n/a	16.54	63.1	100
Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	n/a	n/a	n/a	SD/MI (100) SMP/MTs (100)
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	96.41	98.02	97.71	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	99.83	99,41 & 97,45	100	100 & 100
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	n/a	SD (50,61); SMP (54,79); SMA (57,69), SMK (52,46)	n/a	SD (55) SMP (60) SMA (65) SMK (55)
Tujuan V Kesetaraan Gender					
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Jumlah kebijakan yang responsif gender pendukung	3	5	n/a	3

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2016	2017	2018	2019
	pemberdayaan perempuan.				
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	n/a	n/a	n/a	0
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0	0	n/a	0
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0	0	n/a	0
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	60	80	n/a	60
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	9	6	n/a	9
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	20	22	n/a	20
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	30	28	18	30
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	20%	14%	12.91	20%
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	71%	75%	100	71%
Tujuan VI Air Bersih dan Sanitasi Layak					
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	86	93.43	n/a	90

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2016	2017	2018	2019
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	320m3/detik	550l/detik	n/a	505 m3/detik
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	86	93.43	n/a	100
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	86.58	99.58	62.1	91
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	9	9	n/a	9
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	9	9	48	9
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah Kelurahan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	183 Skala Lingkungan	189 Skala Lingkungan	n/a	183 Skala Lingkungan
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	60	80	n/a	60
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	0	2	n/a	0
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Memenuhi Standar	Memenuhi Standar	Memenuhi Standar	Memenuhi Standar
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Ada	Ada	Ada	Ada
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan	Jaringan informasi	Ada	Ada	Ada	Ada

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2016	2017	2018	2019
sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	sumber daya air yang dibentuk.				
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Ada	Ada	Ada	Ada
Tujuan VIII Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi					
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	7.83	8.4	8.88	7.14
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	PDB per kapita.	34.16	37.03	40.32	37.1
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	72.66	76.85		72.66
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	25.6	26.75	n/a	25.6
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	0	3.58	4.06	20
Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	14.43	10.96	n/a	9.81
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	1.16	8.45	0.18	1.22
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah wisatawan mancanegara.	207	622	830	1,100
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	95,711	98,895	105,381	113,900
Tujuan IX Industri, Inovasi, Infrastruktur					
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	3.00%	3.10%	n/a	3.00%
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	5%	7%	n/a	5%

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2016	2017	2018	2019
signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.					
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	2,400	2,600	6.2	2,400
Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	25%	25%	n/a	25%
Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Proporsi individu yang menggunakan internet	0.1	0.11	0.14	0.1
Tujuan X Berkurangnya Kesenjangan					
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Koefisien Gini.	0.339	0.335	0.34	0.339
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8.74	8.78	7.94	8.1
Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	37	37	n/a	39
Tujuan XI Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan					
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	0.16	0.16	91.32	93
Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	n/a	n/a	n/a	15
Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	44	46	n/a	44
Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	1	1	n/a	Ada
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak,	Jumlah korban meninggal, hilang dan	0	0	n/a	0

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2016	2017	2018	2019
dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	terkena dampak bencana per 100.000 orang.				
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	25	15	n/a	25
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	750 *juta	250 *juta	n/a	750 *juta
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	84.47	91.66	n/a	100
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	Jumlah kelurahan yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.	Ada	Ada	Ada	Ada
Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	0	0	n/a	0
Tujuan XII Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab					
Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	410 kg	410 kg	25534.74	430
Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	2	4	n/a	2
Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	n/a	0	n/a	1
Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	1	3	n/a	1
Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan	1	3	n/a	1

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2016	2017	2018	2019
berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Masyarakat (SPM) dan teregister.				
Tujuan XIII Penanganan Perubahan Iklim					
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0	0	n/a	0
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	0	0

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Palopo dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan belanja daerah sampai dengan tahun anggaran 2020 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun dalam penyusunan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2021-2023 akan berpedoman pada regulasi terbaru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

PP nomor 12 tahun 2019 ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu dalam PP ini juga mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023, selain karena adanya perubahan regulasi dibidang pengelolaan keuangan daerah, juga karena adanya perubahan secara umum yaitu Pandemi Covid-19 yang menyebabkan dilakukannya *refocusing* anggaran Tahun 2020 untuk pemenuhan kebutuhan penanganan Covid-19 meliputi kesehatan, jaring pengaman sosial, penanganan dampak ekonomi dan operasional gugus tugas.

Selain itu, penanganan Covid-19 berdampak pada perencanaan pendapatan dan belanja daerah serta perencanaan program utama dan prioritas yang sejak awal akan dilaksanakan. Ketika Covid-19 berdampak pada belanja dan pendapatan, sehingga sangat mungkin tidak sesuai dengan perencanaan awal oleh karenanya perlu dilakukan revisi RPJMD.

Adapun orientasi pemanfaatan anggaran pada 2020 dan 2021 adalah pada sektor kesehatan, jaminan sosial, dan pemulihan ekonomi. Gambaran keuangan daerah masih memberlakukan angka-angka prediksi sebab belum ada yang mengetahui kapan wabah Covid-19 berakhir.

Adanya pandemi COVID-19 menjadikan pelaksanaan aktivitas pelayanan pemerintahan terhambat, yang merombak hampir seluruh tatanan perencanaan yang telah ditetapkan dalam APBD. Selain kondisi penganggaran, pelaksanaan pemerintahpun tidak maksimal, karena sekolah diliburkan, perdagangan dibatasi, transportasi dikendalikan, pelaksanaan ibadah dari berbagai agama ditata baik, pelaksanaan hajatan ditunda, pelayanan rumah sakit juga sangat ketat dan berbagai kondisi yang sampai saat ini masih berjalan.

Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Dunia usaha mengalami tantangan yang berat. Sektor ekonomi informal juga terpukul hebat. Akibatnya penerimaan daerah mengalami penurunan yang besar yang berdampak pada berkurangnya alokasi belanja daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan dimasa lalu. Kinerja keuangan masa lalu tersebut digunakan sebagai referensi dalam melakukan proyeksi kinerja keuangan masa yang akan dating dengan menggunakan berbagai metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi serta dapat melalui kebijakan keuangan nasional.

Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama periode tahun 2017 hingga tahun 2019. Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Secara umum, kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata positif 4,0 persen.
b. Rasio PAD terhadap pendapatan rata-rata 18,1 persen.
c. Rasio ketergantungan keuangan daerah rata-rata 82,76 persen.
d. Pertumbuhan belanja daerah rata-rata 7,2 persen.
e. Proporsi belanja modal terhadap belanja daerah rata-rata 25,4 persen.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD selama tiga tahun terakhir yaitu periode tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan mengukur perkembangan pendapatan dan belanja daerah, capaian kinerja pendapatan dan belanja serta gambaran keuangan Pemerintah Kota Palopo.

Dalam pelaksanaan APBD, Pemerintah Kota Palopo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 . pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pelaksanaan APBD berdasarkan pada pendekatan kinerja.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Palopo selama periode 2015-2019 dengan tiga pendekatan kinerja yang terdiri dari Pendapatan, Pengeluaran, dan Pembiayaan. Kinerja anggaran berdasarkan pendekatan penerimaan menunjukkan hasil yang baik dengan pertumbuhan pendapatan dan pendapatan asli daerah yang positif selama periode 2015-2019. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, alokasi penggunaan anggaran dititiberatkan pada belanja yang menunjang produktifitas masyarakat. Dari sektor pembiayaan menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai program kegiatan pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar Kembali oleh daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dengan memaksimalkan penyelenggaran pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sumber-sumber pendapatan Pemerintah Kota Palopo berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan umum Pendapatan Daerah pada Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 di arahkan pada :

a. Penyesuaian target pendapatan baik pajak langsung maupun tidak langsung dengan mempertimbangan kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan anggaran Pemerintah.
b. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah dan aset daerah agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan pada akhirnya akan mendatangkan pendapatan daerah melalui retribusi atau pendapatan sewa.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan peningkatan sistem perpajakan/retribusi yang jelas dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.
d. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah sesuai kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang.

Perkembangan masing-masing komponen pendapatan daerah selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.3.
Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Palopo
TA. 2015-2019 (Juta)

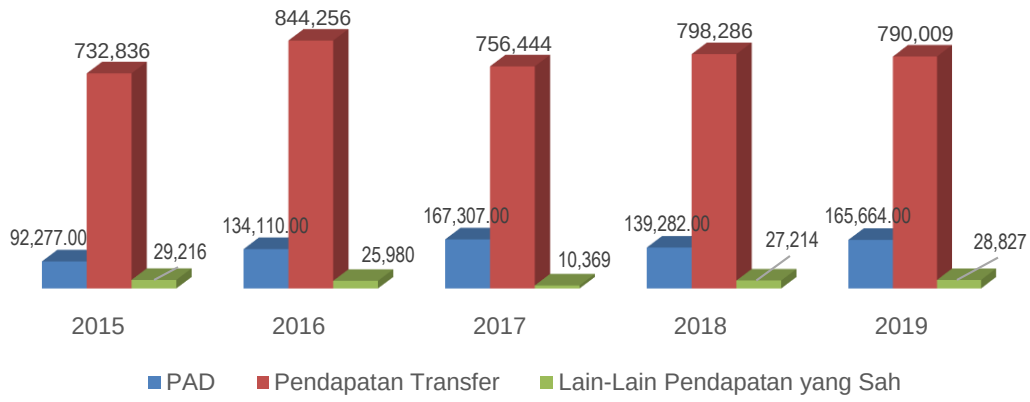

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa meskipun komponen pendapatan transfer masih mendominasi pendapatan daerah, namun jika dilihat dari sisi nominalnya PAD mengalami peningkatan yang pesat dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada tahun 2015 jumlah PAD sebesar Rp92.27 milyar dan meningkat pesat di tahun 2019 menjadi Rp165.66 milyar sementara untuk pendapatan transfer peningkatannya tidak signifikan yang terlihat dari Rp732.83 milyar pada tahun 2015 menjadi Rp790.00 milyar pada tahun 2019.

Kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah Kota Palopo bersumber dari Pemerintah Pusat. Namun demikian Pemerintah Kota Palopo berupaya untuk meningkatkan sumber PAD untuk mengurangi ketergantungan dari Pemerintah Pusat.

Grafik 3.2
Persentase Capaian Pendapatan Daerah Kota Palopo
TA.2015-2019 (%)

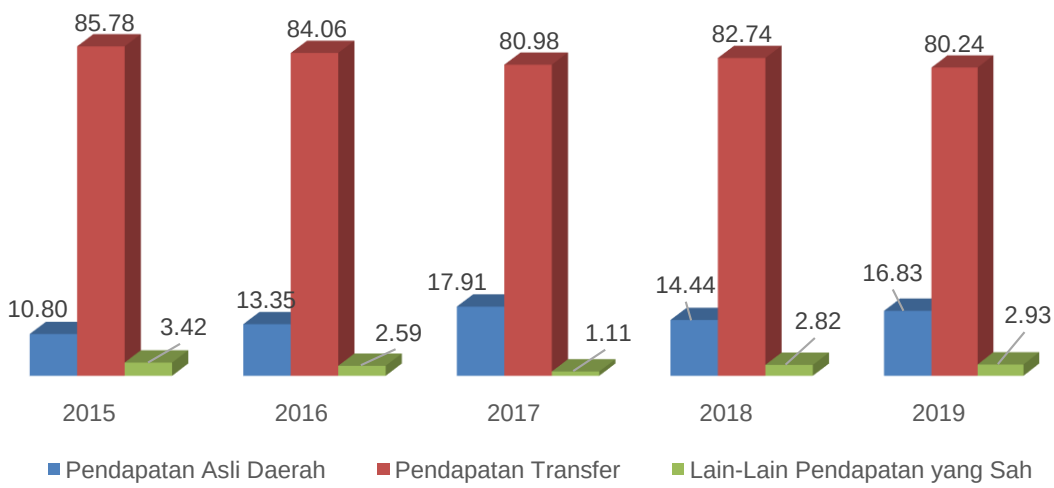

Dari grafik di atas menggambarkan bahwa selama 5 (lima) tahun yaitu periode tahun 2015-2019 komponen pendapatan Kota Palopo masih di dominasi oleh pendapatan transfer dengan rata-rata persentase sebesar 82,76 persen, kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata persentase 14,67 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata sebesar 2,57 persen.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Kota Palopo dalam periode 2015-2019 mengalami fluktuasi yang dinamis. Tahun 2015 proporsi PAD terhadap pendapatan sebesar 10,80 persen dan meningkat menjadi 16,83 persen pada tahun 2019. Secara rata-rata proporsi PAD terhadap pendapatan lima tahun terakhir sebesar 14,67 persen yang menunjukkan kemandirian Pemerintah Kota Palopo terhadap pusat masih rendah.

Pendapatan transfer masih menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah Kota Palopo. Proporsi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah periode tahun 2015-2019 berturut -turut sebesar 85,78 persen, 84,06 persen, 80,98 persen, 82,74 dan 80,24 persen. Meskipun masih masih penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, namun dari sisi nominal ada penurunan persentase dari 85,78 persen pada tahun 2015 menjadi 80,24 persen pada tahun 2019. Jika dirata-ratakan maka proporsi pendapatan transfer terhadap pendapatan mencapai 82,76 persen. Hal ini berarti dari total pendapatan daerah sebanyak 82 persen berasal dari kucuran dana Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan Penerimaan transfer lainnya.

Lain-lain pendapatan daerah sah merupakan pendapatan yang tidak masuk dalam kategori pendapatan asli daerah dan pendapatan dana perimbangan. Selama periode tahun 2015-2019, rata-rata kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendaparan sebesar 2,57 persen. Termasuk dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain pendapatan hibah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber PAD yaitu pajak daerah, retribusi

Grafik. 3.3
Persentase Perkembangan PAD Kota Palopo
Tahun 2015-2019

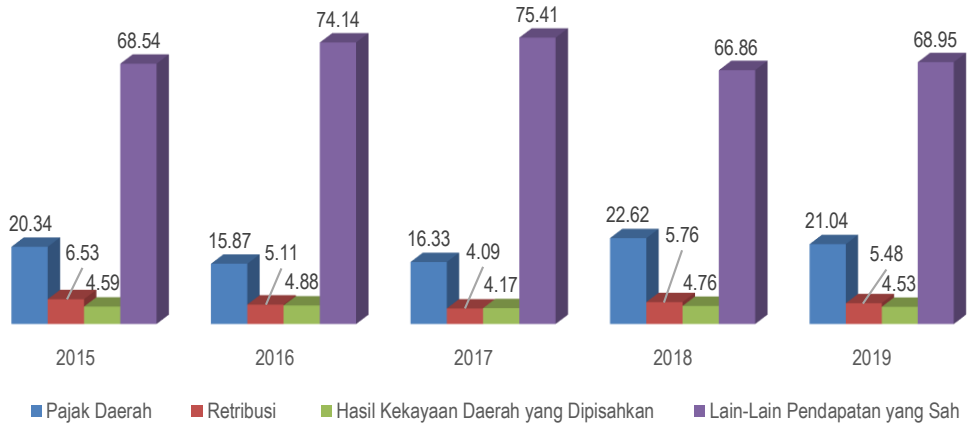

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 20,34 persen. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 15,87 persen. Selanjutnya tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan berturut-turut menjadi 16,33 persen dan 22,62 persen namun pada tahun 2019 kembali menurun menurun menjadi 21,04 persen.

Kontribusi retribusi terhadap PAD juga fluktuatif pada kisaran 4-5 persen selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 retribusi menyumbang 6,53 persen terhadap total PAD namun menurun menjadi 5,11 persen di tahun 2016 dan 4,09 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 sumbangan retribusi meningkat menjadi 5,76 persen dan menurun kembali menjadi 5,48 persen pada tahun 2019.

Sektor hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak banyak memberikan kontribusi terhadap PAD. Pada tahun 2015 sumbangan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4,59 persen dari total PAD, dan tahun menurun 2 tahun berturut-turut menjadi 4,88 persen di tahuh 2016 dan 4,17 persen di tahun 2017. Pada tahun 2018 sedikit meningkat menjadi 4,76 persen namun di tahuh 2019 menurun sedikit menjadi 4,53 persen.

Lain-lain PAD yang sah menjadi penyumbang terbesar dalam PAD Kota Palopo. Kontribusi lain-lain PAD yang sah memberikan pengaruh yang signifikasn terhadap realisasi PAD. Persentase kontribusi lain-lain PAD yang sah sebesar 68, 54 persen pada tahun 2015 meningkat cukup besar menjadi 74, 14 persen di tahun 2016 dan sedikit meningkat pada tahun 2017. Pada tahun 2018 kontribusinya menurun menjadi 66,86 persen dan meningkat Kembali menjadi 68,95 persen di tahun 2019.

Rata-rata kontribusi sumber PAD selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

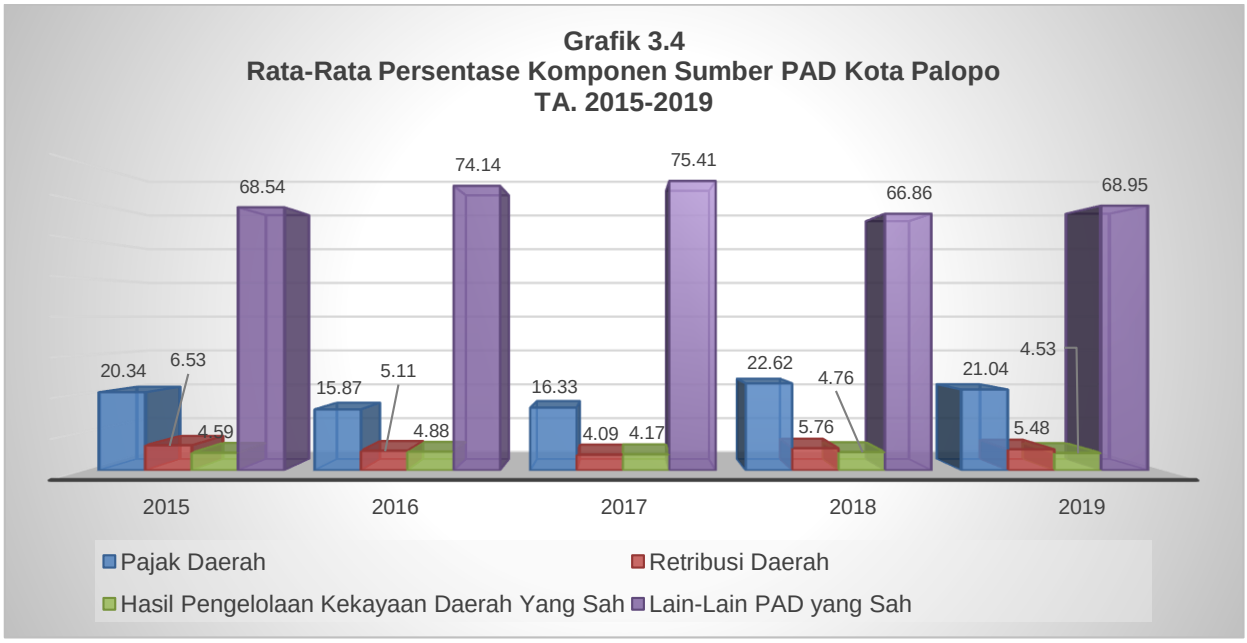

Tahun 2015, realisasi PAD Kota Palopo berasal dari Lain-lain PAD yang sah dengan kontribusi sebesar 68,54 persen dari total realisasi penerimaan. Selanjutnya pajak daerah dengan sumbangan pendapatan sebesar 20,34 persen kemudian retribusi daerah sebesar 6,53 persen dan terakhir hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 4,59 persen.

Pada tahun 2016, realisasi PAD Kota Palopo Sebagian besar masih berasal dari Lain-lain PAD yang sah dengan kontribusi meningkat menjadi sebesar 74,14 persen dari total realisasi penerimaan. Selanjutnya pajak daerah dengan sumbangan pendapatan yang menurun menjadi 15,87 persen dan retribusi daerah uga menurun menjadi 5,11 persen dan hasil pengelolaan kekayaan daerah menurun sedikit sebesar 4,88 persen.

Kontribusi Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2017 meningkat sedikit menjadi 75,41 persen disusul pajak daerah sedikit meningkat menjadi 16,33 persen, retribusi daerah dengan kontribusi sebesar 4,09 persen dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4,17 persen.

Pada tahun 2018 dan 2019, pendapatan lain-lain PAD yang sah tetap memberikan kontribusi terbesar dalam realisasi pendapatan dengan sumbangan sebesar 66,86 persen pada tahun 2018 dan 66,95 persen pada tahun 2019. Kemudian pajak daerah dengan kontribusi 22,62 persen di tahun 2018 dan menurun sedikit menjadi 21,04 persen di tahun 2019. Retribusi daerah dengan kontribusi sebesar 5,76 persen pada tahun 2018 dan sedikit menurun pada tahun 2019 dengan 5,48 persen. Terakhir pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan sumbangan sebesar 4,76 persen tahun 2018 dan 4,53 persen pada tahun 2019.

Selama 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) rata-rata kontribusi PAD Kota Palopo berasal dari pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar 70,78 persen kemudian kontribusi pajak daerah sebesar 19,24 persen, retribusi daerah sebesar 5,40 persen dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4,59 persen.

a) Pajak daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perkembangan pendapatan pajak daerah selama 5 (lima) tahun (2015-2019) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.5.
Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palopo
Tahun 2015-2019

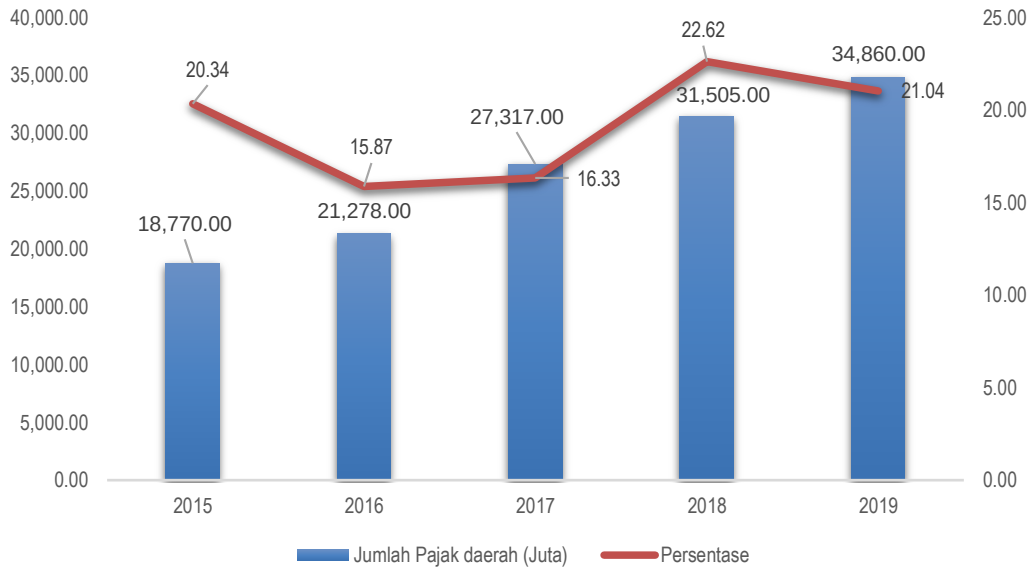

Dari grafik di atas dapat dilihat perkembangan pajak daerah selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015 kontribusi pajak daerah sebesar Rp18,77 milyar dengan persentase 20,34 persen terhadap PAD. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp21,27 milyar namun persentasenya menurun menjadi 15,87 persen. Tahun 2017 kontribusinya menjadi Rp27,31 milyar dengan persentase meningkat 0,46 persen menjadi 16,33 persen. Pada tahun 2018 persentasenya semakin bertambah sebesar 6,29 persen menjadi 22,62 persen dengan kontribusi sebesar Rp31,50 milyar. Tahun 2019 sumbangan pajak daerah menjadi Rp34,68 milyar dengan persentase menurun sedikit menjadi 21,04 persen.

Komponen Pajak Kota Palopo sampai dengan tahun 2019 terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Bawah Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
10. Pajak Bumi dan Bangunan dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kontribusi pajak daerah yang besar tentunya berdampak positif terhadap pembangunan daerah. Kontribusi pajak daerah yang bersumber dari 11 jenis pajak daerah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Berikut adalah realisasi berbagai pajak daerah di Kota Palopo:

Grafik 3.6.
Perkembangan Pajak Daerah Kota Palopo
Tahun 2015-2019 (Juta)

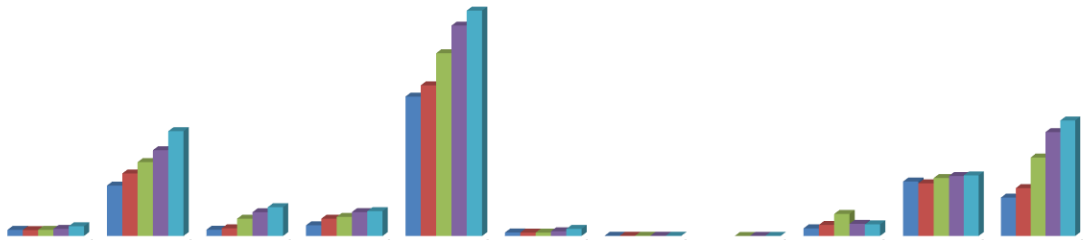

	pajak hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Parkir	Pajak Air Bawah Tanah	Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pajak Bumi dan Bangunan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2015	363	2,982	370	633	8,254	205	14		452	3,220	2,273
2016	350	3,699	455	1,022	8,923	203	14		656	3,118	2,833
2017	364	4,374	1,023	1,130	10,828	202	15	0	1,305	3,429	4,642
2018	419	5,076	1,407	1,416	12,473	279	15	6	717	3,547	6,145
2019	574	6,201	1,703	1,467	13,362	417	15	10	687	3,587	6,834

Perkembangan pajak daerah selama tahun 2015-2019 seperti di gambarkan pada grafik di atas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar pendapatan pajak bersumber dari pajak penerangan jalan (PPJ) kemudian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta pajak restoran. Dari data di atas terlihat bahwa PPJ masih konsisten dan terus tumbuh sebagai penyumbang potensial bagi pajak daerah. Hal ini menunjukkan perkembangan infrastruktur khususnya jalan dan sektor properti juga semakin meningkat. Perkembangan yang pesat dari PPJ juga diikuti dengan peningkatan sektor pajak lainnya seperti pajak restoran dan BPHTB.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana transfer meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk membiayai gaji pegawai, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang digunakan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah).

Adapun capaian kinerja penerimaan dari komponen pendapatan transfer pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Grafik 3.7. Capaian Komponen Pendapatan Transfer Kota Palopo
Tahun 2015-2019 (Juta)

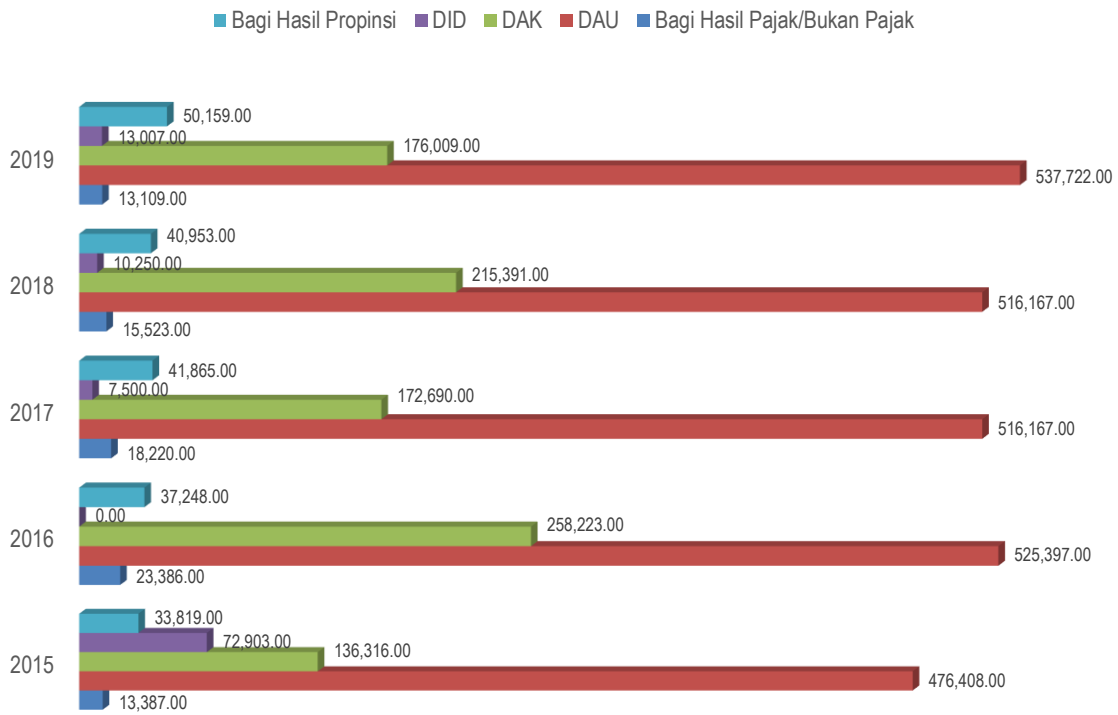

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa kontribusi pendapatan transfer sangat signifikan dalam pembentukan pendapatan daerah. Dana Alokasi Umum menjadi penyumbang terbesar dalam pencapaian pendapatan daerah periode tahun 2015-2019.

Pada tahun 2015 dari total pendapatan sebesar Rp732,83 milyar, kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp476,40 milyar atau 65,01 persen. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 62,23 persen namun kontribusinya meningkat menjadi Rp525,39 milyar. Selanjutnya tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi Rp516,67 milyar dengan persentase yang meningkat menjadi 68,24 persen. Pada tahun 2018 jumlah alokasi DAU sama seperti tahun tahun sebelumnya yaitu Rp516,167 milyar namun persentase terhadap pendapatan daerah menurun menjadi 64,66 persen dan tahun tahun 2019 kembali meningkat menjadi 68,07 persen dengan jumlah realisasi DAU sebesar Rp537,72 milyar.

Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pendapatan daerah juga fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 DAK menyumbang 18,60 persen terhadap total pendapatan atau sebesar Rp136,31 milyar dan meningkat menjadi 30,59 persen di tahun 2016 dengan realisasi sebesar Rp258,22 milyar. Pada tahun 2017 capaian realisasi DAK menurun menjadi Rp172,69 milyar dengan persentase sebesar 22,83 persen. Pada tahun 2018 sumbangan DAK meningkat menjadi 26,98 persen dengan realisasi sebesar Rp215,39 milyar dan menurun kembali menjadi 22,28 persen pada tahun 2019 dengan sumbangan sebesar Rp176,00 milyar..

Untuk pendapatan transfer lainnya memberikan rata-rata kontribusi antara 2-5 persen dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak yang terdiri atas bagi hasil pajak bumi dan bangunan, dan

bagi hasil pajak penghasilan memiliki rata-rata capaian pendapatan sebesar 2,12 persen sedangkan kontribusi dana insentif daerah sebesar 2,77 persen dan kontribusi pendapatan bagi hasil propinsi sebesar 5,21 persen.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lainnya. Pendapatan hibah merupakan hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Palopo. Pendapatan hibah yang diterima antara lain dana Bantuan Operasional Sekolan (BOS). Sedangkan pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah-pendapatan lainnya antara lain terdiri dari bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dan pendapatan lain-lain yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis pendapatan daerah lainnya.

Proporsi lain-lain pendapatan yang sah yang diterima Pemerintah Kota Palopo relatif kecil dibanding dana transfer, namun sangat menunjang kemampuan pendanaan APBD.

Perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.8.
Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2015-2019 (RpJuta)

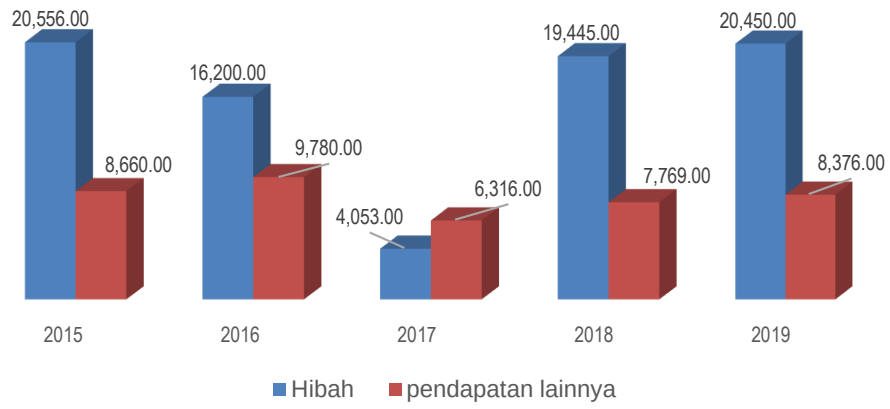

d. Dampak Pandemi terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020

Terjadinya pandemi Covid-19 sejak awal tahun menyebabkan perlunya penyesuaian fundamental dalam penyusunan anggaran dan pendapatan daerah. Perubahan kondisi perekonomian nasional yang berdampak pada keuangan negara berpengaruh terhadap alokasi dana perimbangan pusat-daerah. Dengan demikian asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi APBD difokuskan pada upaya-upaya pemulihan ekonomi sekaligus peningkatan sektor-sektor yang menciptakan lapangan usaha yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Dunia usaha mengalami tantangan yang berat. Sektor ekonomi informal juga terpukul hebat. Akibatnya penerimaan daerah mengalami penurunan yang besar yang berdampak pada

berkurangnya alokasi belanja daerah. Olehnya kebijakan umum Pendapatan Daerah pada Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 di arahkan pada Penyesuaian target pendapatan baik pajak langsung maupun tidak langsung dengan mempertimbangan kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan anggaran Pemerintah.

Oleh karena itu, beberapa dinamika pengelolaan pendapatan pada tahun 2020, sebagai dampak pandemic covid 19 adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah Kota Palopo menurunkan target pendapatan daerah menurun 8.11% dibandingkan target awal pada APBD Pokok tahun 2020. Kondisi ini juga berlaku bagi semua komponen pendapatan daerah yakni PAD, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan yang Sah,
b. Dari komponen PAD, Hasil retribusi daerah merupakan komponen yang targetnya paling banyak dikurangi oleh Pemerintah Kota Palopo (14.94%), akibat pandemic covid 19, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (9.31%), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (8.32%).
c. Pemerintah Kota Palopo juga mengurangi target penerimaan dana perimbangan berupada DAU sebesar 9.15% dan DAK sebesar 9.05%.

Dinamika perubahan target pendapatan daerah Kota Palopo sepanjang tahun 2020, yang dilakukan Pemerintah Kota Palopo di masa pandemic covid 19 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Perubahan Target
Pendapatan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020

URAIAN	Target (Rp.)		%
	APBD Pokok	Perubahan APBD	
PENDAPATAN	**1,006,012,489,608**	**924,382,439,654**	**-8.11%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**189,592,384,308**	**173,393,617,952**	**-8.54%**
Pendapatan Pajak Daerah	35,647,700,000	33,028,000,000	-7.35%
Hasil Retribusi Daerah	10,443,967,200	8,883,482,000	-14.94%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,500,000,000	6,801,973,147	-9.31%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136,000,717,108	124,680,162,805	-8.32%
DANA PERIMBANGAN	**734,654,757,000**	**669,756,718,109**	**-8.83%**
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	15,320,569,000	16,073,016,000	4.91%
Dana Alokasi Umum	549,105,917,000	498,865,870,000	-9.15%
Dana Alokasi Khusus	170,228,271,000	154,817,832,109	-9.05%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**81,765,348,300**	**81,232,103,593**	**-0.65%**
Pendapatan Hibah	19,177,800,000	21,390,800,000	11.54%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	48,475,555,100	46,715,623,393	-3.63%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,970,110,000	6,983,797,000	-12.38%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6,141,883,200	6,141,883,200	0.00%

3.1.1.2. Belanja Daerah

Struktur belanja daerah Kota Palopo dalam 5 tahun terakhir terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja

yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan belanja tidak terduga. Sebagian besar belanja tidak langsung dialokasikan untuk belanja pegawai, yang habis digunakan dalam satu tahun anggaran.

Belanja pegawai merupakan belanja dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lain yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Belanja bunga merupakan belanja yang dialokasikan untuk pembayaran bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo kepada Pemerintah Pusat, belanja hibah merupakan alokasi belanja hibah uang kepada organisasi, belanja bantuan sosial merupakan belanja yang berkaitan dengan bantuan kepada anggota masyarakat dan kelompok masyarakat. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik merupakan belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan belanja tidak terduga merupakan belanja yang dialokasikan untuk kejadian atau peristiwa yang tidak tidak terduga yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program SKPD yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Grafik 3.9.
Perkembangan Komponen Belanja Daerah Kota Palopo
Tahun 2015-2019 (RpJuta)

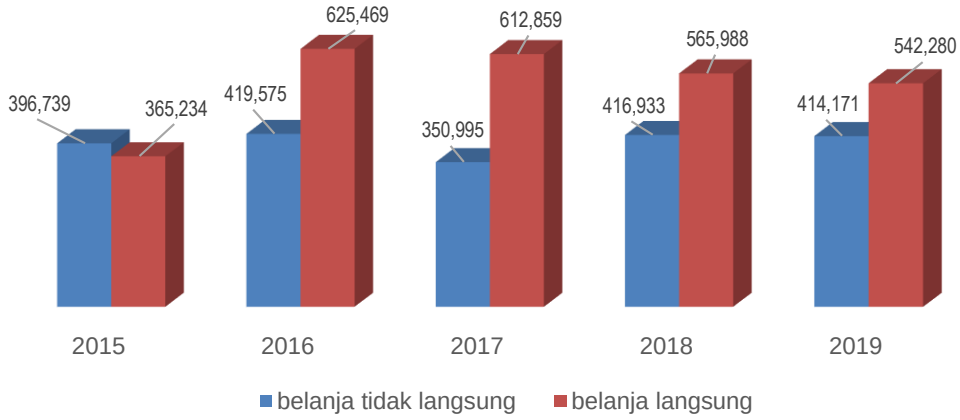

a) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung Pemerintah Kota Palopo Tahun 2015-2019 di alokasikan sebagian besar untuk belanja pegawai dengan rata-rata persentase 94,84 persen dari total belanja tidak langsung. Kemudian belanja hibah dengan proporsi 3,94 persen dari total belanja langsung. Komponen belanja tidak langsung lainnya proporsinya dibawah rata-rata1 persen selama tahun 2015-2019 yaitu belanja bunga 0,68 persen, belanja bantuan sosial 0,34 persen, belanja bantuan keuangan 0,20 persen dan belanja tidak terduga 0,001 persen.

Grafik 3.10.
Rata-Rata Proporsi Komponen Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2015-2019 (%)

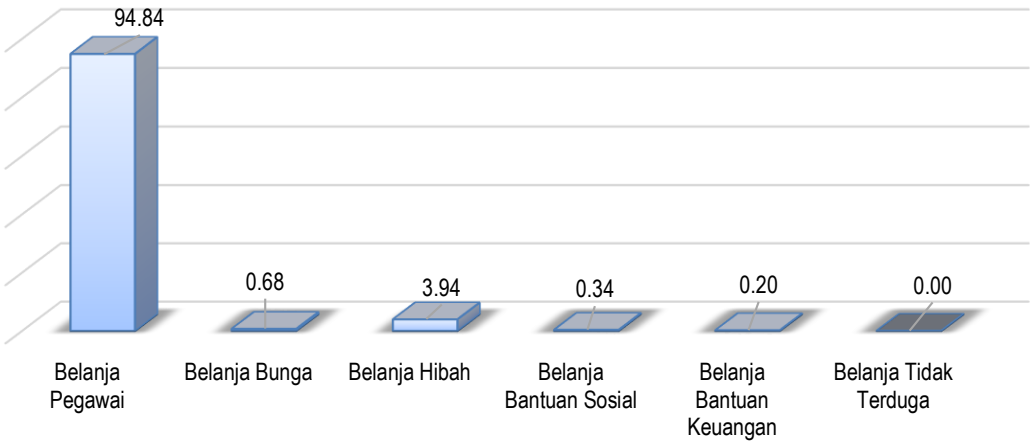

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan proporsi komponen belanja tidak langsung masih di dominasi oleh belanja pegawai.

b) Belanja Langsung

Secara keseluruhan, realisasi belanja langsung Pemerintah Kota Palopo dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki proporsi yang lebih besar daripada belanja tidak langsung kecuali pada tahun 2015 dimana belanja langusng lebih kecil dari belanja tidak langsung. Tingginya alokasi belanja langsung dibandingkan belanja tidak langsung mengindikasikan ketersediaan anggaran untuk membantu masyarakat secara langsung seperti penyediaan sarana pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya.

Rincian struktur belanja langsung terhadap belanja daerah dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

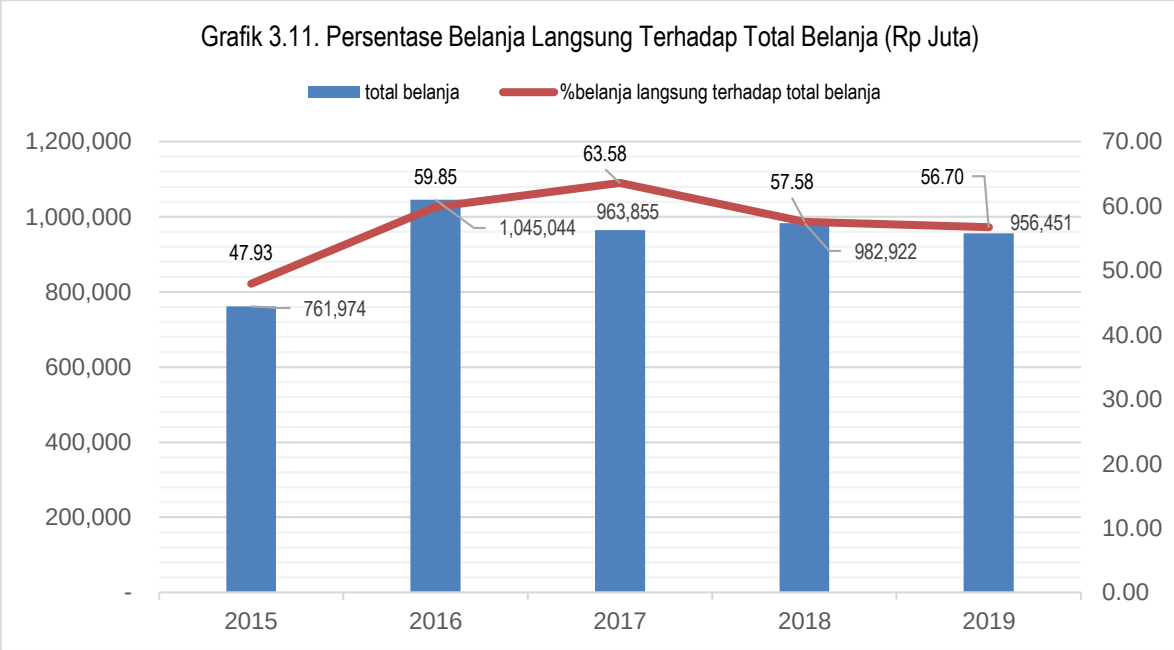

Kondisi belanja daerah mengalami fluktuasi sebagaimana pendapatan daerah. Tahun 2015 total belanja daerah mencapai Rp761,97 milyar dengan proporsi belanja langsung sebesar 47,93 persen kemudian meningkat menjadi Rp1.045,04 milyar dengan proporsi belanja langsung mencapai 59,85 persen. Pada tahun 2017 total belanja mencapai Rp963,85 Milyar dengan kontribusi belanja langsung sebesar 63,58 persen dan tahun 2017 meningkat menjadi Rp982 Milyar lebih namun proporsi belanja langsung menurun menjadi 57,58 persen. Peningkatan belanja ini menggambarkan pengeluaran Pemerintah Kota Palopo dalam membiayai pembangunan semakin besar. Pada tahun 2019 total belanja daerah kembali mengalami penurunan menjadi Rp956 milyar lebih dengan alokasi untuk belanja langsung sebesar 56,70 persen.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Palopo, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima Kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima Kembali dan atau penerimaan yang perlu dibayar Kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya pembiayaan dibagi dalam 2 bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain mencakup :

a. Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
d. Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan
e. Penerimaan Piutang
f. Penerimaan Pinjaman Daerah

Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang antara lain mencakup :

a. Pembentukan Dana Cadangan
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
c. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo
d. Pemberian Pinjaman Daerah

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun 2015-2019 daoat dilihat pada grafik di bawah ini:

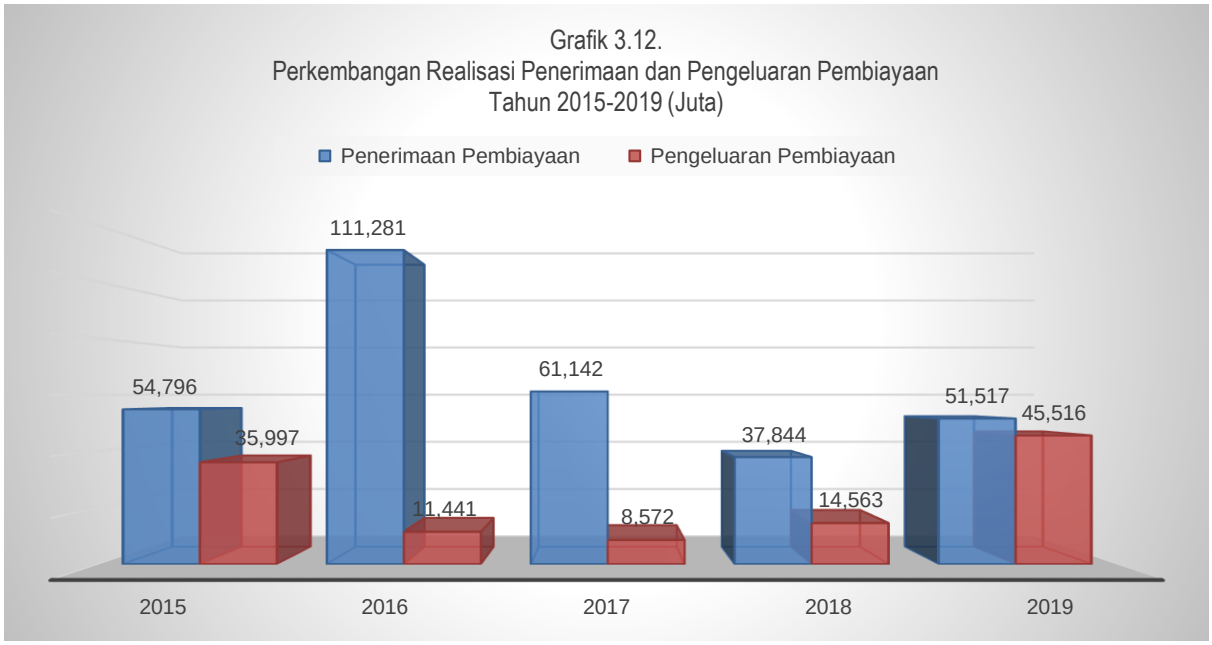

Rincian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2015-2019

Pembiayaan	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan	**54.796.591.740**	**111.281.666.250**	**61.142.126.893**	**37.844.544.937,74**	**51.517.849.148,34**
Penggunaan Silpa	54.750.887.250	111.080.466.250	59.142.126.892,80	22.844.544.937,74	5.142.849.148,34
Penerimaan Piutang Daerah	45.704.490	201.200.000			
Penerimaan Pinjaman Daerah			2.000.000.000,00	15.000.000.000,00	46.375.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	**35.997.373.129,26**	**11.441.373.129,24**	**8.572.324.129,24**	**14.563.020.129,24**	**45.516.373.129,24**
Penyertaan Modal	33.056.000.000	8.500.000.000,00	5.630.951.000,00	621.647.000,00	
Pembayaran Pokok Utang	2.941.373.129,26	2.941.373.129,24	2.941.373.129,24	13.941.373.129,24	45.516.373.129,24

Secara keseluruhan, gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palopo tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2015 – 2019 Kota Palopo

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata - Rata (%)
1.	**PENDAPATAN**	**854.330.445.704,26**	**1.004.346.574.517,06**	**934.121.533.937,22**	**964.783.951.705,73**	**984.500.257.290,51**	**4.0**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**92.277.783.805,00**	**134.110.076.220,35**	**167.307.131.609,15**	**139.282.846.484,07**	**165.664.354.780,08**	**18,1**
1.1.1.	Pajak Daerah	18.770.025.711,00	21.278.599.140,70	27.317.777.187,00	31.505.802.321,00	34.860.944.165,02	16,9
1.1.2	Retribusi daerah	6.029.357.763,00	6.858.696.882,00	6.845.567.072,00	8.022.878.576,00	9.074.168.785,55	11,0
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	4.231.498.917,20	6.546.377.545,00	6.982.537.588,12	6.635.170.716,00	7.496.932.396,00	17,3
1.1.4.	Lain - Lain PAD Yang sah	63.246.901.413,80	99.426.402.652,65	126.161.249.762,03	93.118.994.871,07	114.232.309.433,51	20,1
2.	**Dana Perimbangan**	**626.112.771.484,00**	**807.007.722.676,00**	**707.078.730.039,00**	**747.082.593.924,00**	**726.842.067.622,00**	**4,9**
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	11.004.349.450,00	15.612.004.228,00	14.330.383.160,00	10.960.605.312,00	8.223.532.627,00	-3,7

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata - Rata (%)
2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.383.028.034,00	7.774.786.966,00	3.889.966.112,00	4.562.512.247,00	4.886.273.038,00	50,2
2.3	Dana Alokasi Umum	476.408.524.000,00	525.397.125.000,00	516.167.587.000,00	516.167.587.000,00	537.722.702.000,00	3,2
2.4	Dana Alokasi Khusus	136.316.870.000,00	258.223.806.482,00	172.690.793.767,00	215.391.889.365,00	176.009.559.957,00	15,7
3.	**Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**	**135.939.890.415,26**	**63.228.775.620,71**	**59.735.672.289,07**	**78.418.511.297,66**	**91.993.834.888,43**	**-2,6**
3.1	Hibah	20.556.000.000,00	16.200.000.000,00	2.859.000.000,00	19.445.810.000,00	20.449.560.150,00	120,4
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	33.819.991.764,26	37.248.722.096,00	41.865.752.355,00	40.953.517.276,00	50.159.951.545,43	10,7
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	72.903.542.000,00		7.500.000.000,00	10.250.000.000,00	13.007.644.000,00	-9,1
3.4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.649.466.400,00	9.682.101.989,00	5.959.327.600,00	7.639.440.139,00	8.141.883.200,00	2,1
3.5	Pendapatan Lain-Lain	10.890.251,00	97.951.535,71	1.551.592.334,07	129.743.882,66	234.795.993,00	568,2
2	**BELANJA**	**761.974.080.717,31**	**1.045.044.740.745,20**	**963.855.112.821,04**	**982.922.627.365,89**	**956.451.857.030,35**	**7,17**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**396.739.512.910,02**	**419.575.281.819,79**	**350.995.366.749,04**	**416.933.656.058,61**	**414.171.474.004,90**	**1,88**
2.1.1	Belanja Pegawai	378.136.247.792,12	410.197.733.892,00	332.788.312.856,00	376.082.990.010,00	398.058.052.827,00	2,12
2.2.2	Belanja Bunga	3.154.633.233,90	2.970.714.942,79	2.755.168.538,04	2.346.991.490,61	2.175.102.608,90	-8,81
2.1.3	Belanja Hibah	14.702.686.819,00	5.357.545.000,00	14.412.879.900,00	33.992.044.883,00	10.269.800.000,00	42,88
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	96.400.000,00	85.700.000,00	248.500.000,00	3.671.200.000,00	2.912.700.000,00	383,89
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	649.545.065,00	963.587.985,00	772.703.455,00	840.429.675,00	755.818.569,00	6,81
2.1.6	Belanja Tidak Terduga			17.802.000,00			0,00
2.2	**Belanja Langsung**	**365.234.567.807,29**	**625.469.458.925,41**	**612.859.746.072,00**	**565.988.971.307,28**	**542.280.383.025,45**	**14,35**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata - Rata (%)
2.2.1	Belanja Pegawai	62.690.483.791,00	73.940.410.990,00	84.506.111.539,00	54.081.160.933,10	56.328.312.279,00	0,10
2.2.2	Belanja Barang Jasa	165.318.208.856,00	197.867.947.268,00	239.787.121.510,00	273.116.299.707,18	287.339.065.244,04	15,00
2.2.3	Belanja Modal	137.225.875.160,29	353.661.100.667,41	288.566.513.023,00	238.791.510.667,00	198.613.005.502,41	26,31
	Surplus/Defisit	92.356.364.986,95	(40.698.166.228,14)	(29.733.578.883,82)	(18.138.675.660,16)	28.048.400.260,16	-116,16
3	**PEMBIAYAAN**	**18.799.218.611,23**	**99.840.293.120,94**	**52.569.802.763,56**	**23.281.524.808,50**	**6.001.476.019,10**	**63,45**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	54.796.591.740,49	111.281.666.250,18	61.142.126.892,80	37.844.544.937,74	51.517.849.148,34	14,01
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	35.997.373.129,26	11.441.373.129,24	8.572.324.129,24	14.563.020.129,24	45.516.373.129,24	47,28

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah laporan keuangan yang menyajikan kondisi asset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Posisi neraca daerah akan menggambarkan informasi mengenai kondisi keuangan suatu daerah sehingga menjadi salah satu faktor penentu asumsi-asumsi dalam merumuskan kebijakan daerah.

Perkembangan neraca daerah Kota Palopo dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**ASET**						
1.1	**Aset Lancar**						
1.1.1	Kas	111.217.609.607,18	59.184.225.136,80	22.929.028.173,74	5.147.354.148,34	34.060.011.822,26	94,03
1.1.2	Piutang	21.045.963.874,22	29.522.329.053,29	43.321.575.911,70	81.672.508.976,85	66.448.743.602,71	39,23
1.1.3	Persediaan	12.607.633.088,00	13.062.979.248,00	25.477.720.061,32	25.811.093.793,67	25.861.330.211,12	25,04
	Jumlah Aset Lancar	**144.871.206.569,40**	**101.769.533.438,09**	**91.728.324.146,76**	**112.630.956.918,86**	**126.370.085.636,09**	-1,16
1.2	**Investasi Jangka Panjang**						
1.2.1	Investasi Non Permanen	402.344.409,00	401.144.409,00	401.144.409,00	401.144.409,00	401.144.409,00	-0,07
1.2.2	Penyisihan Dana Bergulir	(402.344.409,00)	(401.144.409,00)	(401.144.409,00)	(401.144.409,00)	(401.144.409,00)	-0,07
1.2.3	Investasi Permanen	90.134.508.991,19	98.434.508.991,19	104.065.459.991,19	104.687.106.991,19	104.687.106.991,19	3,88
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**90.134.508.991,19**	98.434.508.991.19	104.065.459.991,19	104.687.106.991,19	104.687.106.991,19	3,88

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3	**Aset Tetap**						
1.3.1	Tanah	442.505.201.201,62	452.888.660.032,62	457.900.022.915,79	464.676.869.655,79	471.017.883.232,79	1,57
1.3.2	Peralatan dan Mesin	226.867.517.145,58	268.014.571.102,96	276.066.994.872,57	323.290.309.009,57	370.281.080.204,58	13,20
1.3.3	Gedung dan Bangunan	381.564.474.284,33	434.964.098.108,45	467.150.756.744,13	596.030.847.749,13	675.234.242.713,13	15,57
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	420.233.247.374,62	554.720.072.046,78	789.347.747.893,88	925.827.460.745,01	997.572.532.526,03	24,83
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	14.993.164.448,60	20.853.861.375,60	28.336.397.718,60	26.971.563.383,60	31.738.459.523,60	21,96
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	15.680.599.286,61	137.435.935.275,30	103.765.834.467,41	12.346.180.666,00	37.241.386.132,60	216,38
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(365.134.202.898,45)	(439.177.819.299,19)	(485.585.262.5**5**8,24)	(578.516.966.199,84)	(691.496.499.971,33)	17,38
	Jumlah Aset Tetap	**1.136.710.000.842,91**	**1.429.699.378.642,52**	**1.636.982.492.054,14**	**1.770.626.265.009,26**	**1.891.589.084.361,40**	13,82
1.4	**Aset Lainnya**						
1.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran						
1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	8.961.024.700,00	9.255.652.076,35	9.272.087.660,11	10.729.684.491,37	10.633.724.314,48	4,57
1.4.3	Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	(4.401.730.830,00)	(8.797.437.287,64)	(9.060.006.309,37)	(9.363.726.567,38)	(9.622.328.754,37)	27,24
1.4.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	67.310.858.629,00	67.310.858.629,00	67.310.858.629,00	67.310.858.629,00	67.310.858.629,00	0,00
1.4.4	Aset Tak Berwujud	592.261.345,00	1.209.872.000,00	1.299.081.500,00	1.577.679.401,00	1.670.519.401,00	34,75
1.4.5	Aset Lain-lain	24.618.883.613,75	23.975.200.514,75	14.740.248.327,75	52.605.066.902,75	61.316.644.967,75	58,08
1.4.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(445.831.250,00)	(691.461.750,00)	(913.593.500,00)	(1.249.979.475,25)	(1.424.180.100,25)	34,49
	Jumlah Aset Lainnya	**96.635.466.207,75**	**92.262.684.182,46**	**82.648.676.307,49**	**121.609.583.381,49**	**129.885.238.457,61**	9,75
	JUMLAH ASET	**1.468.351.182.611,25**	**1.722.166.105.254,26**	**1.915.424.952.499,58**	**2.109.553.912.300,80**	**2.252.531.515.446,29**	11,36
	KEWAJIBAN						
2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**						
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	8.492.286,00	2.357.500,00	12.848.236,00		4.682.174,00	68,19
2.1.2	Utang Bunga	754.448.888,89	1.397.013.781,81	1.225.057.985,20	1.048.183.972,09	1.052.400.243,52	14,71
2.1.3	Utang PPh Pasal 21						
2.1.4	Utang PPh Pasal 22						
2.1.5	Utang PPh Pasal 23						
2.1.6	Utang PPN						
2.1.7	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2.941.373.129,24	2.941.373.129,24	2.941.373.129,24	2.941.373.129,24	2.941.373.129,24	0,00

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1.8	Pendapatan Diterima Dimuka	306.299.900,75	428.487.530,67	446.684.723,05	569.723.732,57	668.498.236,36	22,26
2.1.9	Utang Beban	5.200.536.367,00	8.240.049.816,00	1.602.034.036,00	20.991.400.073,00	55.364.904.303,54	337,98
2.1.10	Utang Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota						
2.1.11	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.105.170.624,20	67.283.075.415,90	77.083.564.240,41	74.586.358.296,42	54.297.761.873,84	246,55
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**15.316.321.196,08**	**80.292.357.173,62**	83.311.562.349,90	**100.137.039.203,32**	**114.329.619.960,50**	115,59
2.2	**Kewajiban Jangka Panjang**						
2.2.1	Utang Pemerintah Pusat	33.679.890.269,66	30.738.517.140,42	27.797.144.011,18	24.855.770.881,94	21.914.397.752,70	-10,18
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya						
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**33.679.890.269,66**	**30.738.517.140,42**	27.797.144.011,18	24.855.770.881,94	21.914.397.752,70	-10,18
	JUMLAH KEWAJIBAN	**48.996.211.465,74**	**111.030.874.314,04**	**111.108.**706.**361,08**	**124.992.810.085,26**	**136.244.017.713,20**	37,04
3	**EKUITAS DANA**						
3.1	**Jumlah Ekuitas**	1.419.354.971.145,53	1.611.135.230.940,22	1.804.316.246.138,50	1.984.561.102.215,54	2.116.287.497.733,09	10,53
	JUMLAH EKUITAS	1.419.354.971.145,53	1.611.135.230.940,22	1.804.316.246.138,50	1.984.561.102.215,54	2.116.287.497.733,09	10,53
	JUMLAH KEWEAJIBAN DAN EKUITAS	**1.468.351.182.611,25**	**1.722.166.105.254,26**	**1.915.424.**952.**499,58**	**2.109.553.912.300,80**	**2.252.531.515.446,29**	11,36

3.1.2.1. Aset

Kondisi neraca daerah mengalami pertumbuhan sebagaiamana pendapatan daerah. aset lancer Pemerintah Kota Palopo periode 2015 sebesar Rp144,87 milyar dan pada tahun 2019 sebesar Rp126 milyar atau rata-rata pertumbuhan selama periode 2015-2019 mencapai -1,16 persen. Investasi jangka Panjang pada tahun 2015 sebesar Rp90,34 milyar dan tahun 2019 sebesar Rp104,68 milyar dengan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun mencapai 3,88 persen.

Total aset tetap Pemerintah Kota Palopo tahun 2015 sebesar Rp1.136 milyar dan meningkat menjadi Rp1.891 milyar atau rata-rata pertumbuhan mencapai 13,82 persen. Total aset lainnya pada tahun 2015 sebesar Rp96,63 milyar dan meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp129,88 milyar dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 9,75 persen.

Pada tahun 2015 total aset Pemerintah Kota Palopo sebesar Rp1.468 milyar dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp1.722 milyar. Pada tahun 2017 total aset sebesar Rp1.915 milyar dan meningkat menjadi Rp2.109 milyar di tahun 2018. Tahun 2019 total aset menjadi Rp2.252 milyar. Rata-rata pertumbuhan total aset Pemeintah Kota Palopo tahun 2015-2019 mencapai 11,36 persen.

3.1.2.2. Kewajiban

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2015 sebesar Rp15,31 milyar dan pada tahun 2019 sebesar Rp114,32 milyar dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 115,59 persen. Kewajiban jangka Panjang pada tahun 2015 sebesar Rp33,67 milyar menjadi Rp21,91 milyar dengan rata-rata pertumbuhan -10,18 persen.

Total Kewajiban Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2015 sebesar Rp48,99 milyar dan pada tahun 2016 menjadi Rp111.03 milyar. Pada tahun 2017 sebesar Rp111,10 milyar, tahun 2018 sebesar 124,99 milyar dan tahun 2019 sebesar Rp136,24 milyar. Rata-rata pertumbuhan kewajiban selama periode tahun 2015-2019 sebesar 37,04 persen.

3.1.2.3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana menggambarkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Pemerintah Kota Palopo periode tahun 2017-2019 berturut-turut Rp1.804,31 milyar, Rp1.984,56 milyar dan Rp2 .116,28 milyar. Rata-rata pertumbuhan ekuitas selama periode tersebut sebesar 8,3 persen.

3.1.2. 4. Rasio Keuangan

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang digunakan antara lain rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

sedangkan Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

3.1.2.5. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar *(current ratio*), rasio cepat *(quick ratio)* dan rasio kas *(cash ratio)*.

Tabel 3.5.
Rasio Lancar Kota Palopo
Tahun 2017-2019

No	Rasio Lancar	Aktiva Lancar	Utang Jgk Pndk	Persentase (%)
1	2017	91.728.324.146,76	83.311.562.349,90	1,10
2	2018	112.630.956.918,86	100.137.039.203,32	1,12
3	2019	126.370.085.636,09	114.329.619.960,50	1,11

Rasio lancar menunjukkan apakah Pemerintah Daerah memiliki aset yang mencukupi untuk menutupi utangnya.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan Kota Palopo sebagaimana di tunjukkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio lancar pada tahun 2017 sebesar 1,10, tahun 2018 sebesar 1,12 dan tahun 2019 sebesar 1,11. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kota Palopo membayar kewajiban jangka pendek selama periode tersebut cukup baik.

TabeL 3.6.
Rasio Quick Kota Palopo Tahun 2017-2019

No	Quick Rasio	Aset Lancar	Persediaan	Utang Jgk Pndk Lainnya	Persentase (%)
1	2017	91.728.324.146,76	25.477.720.061,32	83.311.562.349,90	0,80
2	2018	112.630.956.918,86	25.811.093.793,67	100.137.039.203,32	0,87
3	2019	126.370.085.636,09	25.861.330.211,12	114.329.619.960,50	0,88

Rasio cepat *(quick ratio)* pada tabel di atas menunjukkan pada tahun 2017 rasio cepat sebesar 0,80, tahun 2018 meningkat menjadi 0,87, dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi 0,88. Rata-rata rasio cepat selama periode tersebut sebesar 0,84. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kota Palopo dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan asset yang lebih likuid adalah sebesar 0,84 kali. Jadi perbandingan antara asset lancar dengan hutang jangka pendek adalah 0,84 : 1.

TabeL 3.7.
Rasio Cash Kota Palopo Tahun 2017-2019

No	Rasio Lancar	Kas	Utang Jgk Pndk	Persentase (%)
1	2017	22.929.028.173,74	83.311.562.349,90	27,52
2	2018	5.147.354.148,34	100.137.039.203,32	5,14
3	2019	34.060.011.822,26	114.329.619.960,50	29,79

Rasio kas menggambarkan ukuran likuiditas yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membayar utang jangka pendek menggunakan kas dan setara kas.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode tahun 2017-2019 secara berturut-turut sebesar 27,52 persen, 5,14 persen dan 29,79 persen. Rata-rata pertumbuhan rasio kas selama periode tersebut sebesar 20,81 persen. Hal ini berarti rata-rata kemampuan pemerintah daerah membayar utang jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kasnya dalam periode tersebut sebesar 20,81 persen.

3.1.2.6. Rasio Solvabilitas

Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total asset *(total debt to total asset ratio)* dan rasio hutang terhadap ekuitas *(total debt to equity ratio*).

Tabe 3.8.
Rasio Total Kewajiban dengan Ekuitas
Kota Palopo Tahun 2017-2019

No	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas	Total Kewajiban	Ekuitas Dana	Persentase (%)
1	**2017**	111.108.706.361,08	1.804.316.246.138,50	0,06
2	2018	124.992.810.085,26	1.984.561.102.215,54	0,06
3	2019	136.244.017.713,20	2.116.287.497.733,09	0,06

Rasio hutang terhadap ekuitas rasio adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rata-rata rasio total kewajiban dengan ekuitas sebesar 0,06. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membayar kewajiban menggunakan ekuitasnya sendiri cukup tinggi sehingga tidak perlu menggunakan dana yang berasal dari luar.

TabeL 3.9.
Rasio Total Kewajiban dengan Aset
Kota Palopo Tahun 2017-2019

No	Rasio Hutang Thdp Aset	Total Kewajiban	Total Aset	Persentase (%)
1	2017	111.108.706.361,08	1.915.424.952.499,58	0,06
2	2018	124.992.810.085,26	2.109.553.912.300,80	0,06
3	2019	136.244.017.713,20	2.252.531.515.446,29	0,06

Rasio total hutang terhadap total asset digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjamin hutangnya dengan asset/aktiva yang dimiliki, dengan rumus total hutang dibagi total asset. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan rasio total kewajiban terhadap aset adalah 0,06 yang artinya bahwa sebesar Rp0,06 dari setiap Rp1,00 total aset pendanaan dari kewajiban, sisanya dari ekuitas.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya displin dalam pengambilan keputusan dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang direncanakan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui :

a. Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan;
b. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku;
c. Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi dalam pemungutan pajak dan retribusi melalui peningkatan layanan teknologi informasi pajak daerah;
d. Peningkatan pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
e. Memberikan insentif kepada instansi pemungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Melakukan pendapatan aset daerah dan legalisasi kepemilikan aset daerah guna tertib aset dan sebagai dasar pemanfaatan aset daerah.

Selanjutnya kebijakan belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa setiap penganggaran harus berbasis kinerja *(performance based budgenting)*. Kebijakan belanja daerah diarahkan pada pemenuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung di gunakan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bunga, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan untuk belanja langsung diarahkan pada :

a. Menjamin ketersediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, baik Pendidikan, Kesehatan, maupun infrastruktur
b. Menjamin ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program pembanguan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ataupun penyediaan lapangan pekerjaan.
c. Peningkatan akuntabilitas dan transaparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja*(performance budget)*yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja yang mencerminkan efsiensi dan efektifitas pelayanan publik.

Gambaran proporsi realisasi belanja daerah Kota Palopo selama periode 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Palopo Tahun 2015 s/d Tahun 2019

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase (%)
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2015	424.155.048.019	797.971.453.846	53,13
	2016	457.822.008.281	1.056.486.113.874	43,33
	2017	387.321.047.682	972.427.436.950	39,96
2	2018	409.703.882.081	997.485.647.495	41,34
3	2019	432.501.293.392	1.001.968.230.160	43,31

Rata-rata proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran di Kota Palopo sebesar 44,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tidak mencapai 50 persen dari total pengeluaran sehingga lebih banyak digunakan untuk belanja program pelayanan kepada masyarakat.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber

pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi maupun hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain pembayaran hutang, dan penyertaan modal. Gambaran pembiayaan riil daerah Kota Palopo dari tahun 2017 sampai dengan 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.11.
Defisit Riil Anggaran Kota Palopo
Tahun 2017 – 2019

No	Uraian	2015 (Rp. Juta)	2016 (Rp. Juta)	2017 (Rp. Juta)	2018 (Rp. Juta)	2019 (Rp. Juta)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	854.330	1.004.346	934.121	964.783	984.500
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	761.974	1.045.044	963.855	982.922	956.451
3	Pengeluaran Pembiayaan	35.997	11.843	8.572	14.563	45.516
(Defisit Riil)		56.358	(52.139)	(38.305)	(32.701)	(17.467)

Dari tabel di atas Nampak bahwa pada tahun 2015 mengalami surplus anggaran sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 terjadi defisit anggaran sehingga diperlukan anggaran penutup defisit. Surplus anggaran pada tahun 2015 dipergunakan sebagai pembiayaan tahun 2016 sedangkan untuk menutup defisit pada tahun 2017 sampai 2019 menggunakan SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman sehingga penerimaan pembiayaan pada tahun berkenaan berkurang sebesar defisit pada masing-masing tahun. Gambaran masing-masing komponen penutup defisit riil dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	99,92	99,82	96,73	60,36	9,98
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	3,27	39,64	90,02
3	Penerimaan Piutang Daerah	0,08	0,18	0,00	0,00	0,00

Komposisi penutup defisit riil anggaran menggambarkan persentase komponen penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran. Pada tahun 2015 proporsi Silpa tahun sebelumnya sebesar 99,92 persen sebagai penutup defisit riil, tahun

2016 proporsinya menurun menjadi 99,82 persen. Pada tahun 2017 proporsi selpa sebagai penutup defisit menjadi 96,73 persen. Pada tahun 2018 komposisi penutup defisit berasal dari silpa tahun sebelumnya sebesar 60,36 persen dan dari penerimaan pinjaman daerah mencapai 39,64 persen. Tahun 2019 komposis penerimaan pinjaman memiliki proporsi terbesar dalam menutup defisit riil yaitu mencapai 90,02 persen sedangkan silpa tahun sebelumnya mencapai 9,98 persen. Penerimaan pinjaman daerah ini merupakan pinjaman jangka pendek BLUD RSUD Sawerigading pada Lembaga keuangan bank untuk menutupi aliran kas operasional akibatnya tersendatnya pembayaran klaim BPJS oleh BPJS kesehetan.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selama tahun 2015-2019 diantaranya bersumber dari efisiensi belanja dan kewajiban pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2015-2019) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Palopo 2017 – 2019

No	Uraian	2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp. Juta	% dari SiLPA	Rp. Juta	% dari SiLPA	Rp. Juta	% dari SiLPA	Rp. Juta	% dari SiLPA	Rp. Juta	% dari SilPA
	Jumlah SiLPA	111.155		59.142		22.836		5.142		34.049	
1	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	4.762	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	106.392	95,72	59.142	100	22.836	**100**	5.142	**100**	34.049	100
3	Kegiatan Lanjutan					-	-	-	-		

3.3. Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan pedoman umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1. Asumsi Ekonomi, Sosial, dan Fiskal

Secara umum, kebijakan belanja organisasi perangkat daerah diarahkan untuk melanjutkan upaya pemulihan sosial-ekonomi dan penekanan penganggaran dengan memperhatikan sektor terdampak seperti pariwisata, perdagangan, manufaktur dan perdagangan.

Terjadinya pandemi Covid-19 sejak awal tahun menyebabkan perlunya penyesuaian fundamental dalam penyusunan anggaran dan pendapatan daerah. Perubahan kondisi perekonomian nasional yang berdampak pada keuangan negara berpengaruh terhadap alokasi dana perimbangan pusat-daerah. Dengan demikian asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi APBD difokuskan pada upaya-upaya pemulihan ekonomi sekaligus peningkatan sektor-sektor yang menciptakan lapangan usaha yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Asumsi-asumsi ekonomi, sosial dan fiskal yang digunakan antara lain:

a. Indikator ekonomi makro, meliputi:
   a) Rata-rata inflasi
   b) rata-rata laju pertumbuhan ekonomi

b. kebijakan keuangan daerah
Proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kota Palopo tahun 2020-2023 dirumuskan dengan mendasarkan pada evaluasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2017-2019, potensi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19 serta mempertimbangkan komponen pos penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi maupun pusat.

Berdasarkan agenda dan prioritas pembangunan sebagaimana tersebut di atas maka asumsi indiator makro ekonomi, sosial dan fiscal Kota Palopo Periode 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14.
Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial
Kota Palopo Tahun 2020-2023

No	Indikator	Tahun			
		Realisasi 2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)*)	0.45	4.16	4.68	5.69
2	Tingkat Pengangguran (%)	10.37	9.03	8.55	8.07
3	Inflasi (%)*)	1.21	2.5	2.4	2
4	PDRB Per Kapita (Rp. juta)	42.61	42	43	44
5	Tingkat Kemiskinan (%)	7.85	6.57	6.28	5.99

Tabel 3.15.
Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kota Palopo
Tahun 2021-2023

No	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Pertumbuhan PAD	10%	10%	10%
2	Pertumbuhan Dana Perimbangan :			
3	a. Pertumbuhan DBH	5%	5%	5%
4	b. Pertumbuhan DAU	2,5%	2,5%	2,5%
5	c. Pertumbuhan DAK	10%	10%	10%

3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Struktur pendapatan dan belanja daerah periode 2020-2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur pendapatan dan belanja berdasarkan aturan ini mulai diterapkan pada tahun anggaran 2021 sehingga dalam penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja tahun 2021-2023 akan menyesuaikan dengan struktur baru sementara untuk tahun 2020 tetap menggunakan struktur sesuai PP Nomor 58 tahun 2005.

Sesuai Pasal 28 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Struktur pendapatan dalam APBD menurut PP Nomor 12 tahun 2019 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah,
   1) Pajak daerah
   2) Retribusi Daerah
   3) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan
   4) Lain-lain PAD yang sah
b. Pendapatan Transfer
   a) Transfer Pemerintah Pusat
      1) Dana Perimbangan

2) Dana Insentif Daerah
3) Dana Otonomi Khusus
4) Dana Keistimewaan
5) Dana Desa

b) Transfer antar daerah
1) Pendapatan bagi hasil
2) Bantuan Keuangan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
1) Hibah
2) Dana Darurat
3) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah

Sedangkan belanja daerah menurut pasal 28 ayat (2) PP Nomor 12 tahun 2019 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Klasifikasi belanja daerah terdiri atas :

a. Belanja Operasional, dirinci atas jenis:
1) Belanja pegawai
2) Belanja barang dan jasa
3) Belanja bunga
4) Belanja subsidi
5) Belanja hibah
6) Belanja bansos

b. Belanja Modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer yaitu pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, dirinci atas jenis:
1) Belanja bagi hasil
2) Belanja bantuan keuangan

3.3.2.1 Proyeksi Pendapatan

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Asumsi umum yang mendasari proyeksi pendapatan selama 4 (empat) tahun ke depan di atas adalah:

1. Dampak pandemi COVID 19 terhadap kegiatan perekonomian di Kota Palopo.
2. Ditetapkannya Undang-Undang Omnibus Law yang diharapkan mendorong peningkatan kegiatan perekonomian khususnya UMKM.
3. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan :
   a. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi
   b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
   c. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah
   d. Peningkatan pelayanan publik dalam layanan dan kemudahan dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

e. Optimalisasi pemanfaatan kekayaan dan barang milik daerah yang mendukung kegiatan produktif dan menghasilkan pendapatan berupa sewa.

4. Pendapatan transfer merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Sistem perhitungan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya dalam mengalokasikan dana transfer mengandung diskresi yang besar terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Oleh karena itu, pemerintah daerah sulit untuk melakukan simulasi perhitungan yang riil sebagai dasar dalam Menyusun proyeksi penerimaannya.
   Pendapatan transfer antar daerah juga sangat terkait dengan aktivitas ekonomi yang akan berkorelasi dengan naiknya turunnya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah daerah harus mendorong nmeningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

5. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat, tetap diupayakan kenaikan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus dan melalui penerimaan hibah.

Dalam menghitung proyeksi pendapatan asli daerah (PAD), asumsi-asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Proyeksi Pajak Hotel berdasarkan asumsi:
   a. Tingkat hunian atau okupansi hotel berdasarkan aktivitas perekenomian daerah sehingga perlu meningkatkan kegiatan *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE) di Kota Palopo untuk mendukung asumsi tersebut.
   b. Rata-rata pertumbuhan pajak hotel 5 tahun terakhir.
2) Proyeksi Pajak Restoran berdasarkan asumsi:
   a. Rata-rata pertumbuhan pajak restoran 5 tahun terkahir
   b. Proyeksi kenaikan jumlah pelaku usaha kuliner di Kota Palopo
3) Proyeksi Pajak Hiburan berdasarkan asumsi:
   a. Rata-rata realisasi pajak hiburan 5 tahun terakhir
   b. Proyeksi peningkatan kegiatan hiburan dan sarana hiburan di Kota Palopo
4) Proyeksi Pajak Reklame berdasarkan asumsi:
   a. Rata-rata pertumbuhan pajak reklame 5 tahun terakhir
5) Proyeksi Pajak Penerangan Jalan berdasarkan asumsi:
   a. Adanya kenaikan tarif dasar listrik
   b. Peningkatan sektor properti seperti perumahan, ruko dan sebagainya.
6) Proyeksi Pajak Parkir berdasarkan asumsi:
   a. Rata-rata pertumbuhan pajak parkir 5 tahun terakhir
   b. Peningkatan aktivitas perdagangan pada objek-objek yang dikenakan pajak parkir
7) Proyeksi Pajak Air Bawah Tanah berdasarkan asumsi:
   a. Rata-rata pertumbuhan pajak air bawah tanah 5 tahun terakhir
8) Proyeksi Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan asumsi:
   a. Rata-rata pertumbuhan pajak sarang burung walet 5 tahun terakhir
9) Proyeksi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan asumsi:
   a. Rata-rata pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan
10) Proyeksi Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan asumsi:
   a. Potensi pertumbuhan bangunan di Kota Palopo pada masa yang akan datang

b. Rata-rata pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan 5 tahun terakhir

11) Proyeksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan asumsi:
    a. Potensi jual beli sektor properti di Kota Palopo
    b. Rata-rata pertumbuhan BPHTB 5 tahun terakhir

Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019. Selain itu Pemerintah Kota Palopo juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara umum proyeksi pendapatan tahun 2020 – 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah

Uraian (sesuai PP58/2005)	Realisasi (Juta) APBD Perubahan 2019	Realisasi (Juta) APBD Perubahan 2020	Uraian (sesuai PP12/2019)	APBD 2021	Proyeksi (Juta) 2022	Proyeksi (Juta) 2023	Rata-rata pertumbuhan
PENDAPATAN	**984.500**	**969.490**	**PENDAPATAN**	**987.407**	**1.046.921**	**1.110.869**	
Pendapatan Asli daerah	**165.664**	**221.553**	**Pendapatan Asli daerah**	**173.417**	**196.585**	**221.435**	
a. Pajak Daerah	34.860	34.032	Pajak Daerah	39.277	43.205	47.526	
b. Retribusi Daerah	9.074	8.880	Retribusi Daerah	10.760	12,913	15.495	
c. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	7.496	6.802	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	7.000	7.500	7.750	
d. Lain-Lain PAD yang sah	114.232	171.839	Lain-Lain PAD yang sah	116.378	132.966	150.663	
Dana Perimbangan	**726.842**	**665.584**					
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	13.109	18.379					
Dana Alokasi Umum	537.722	497.009	**Dana Perimbangan**	**708.075**	**740.165**	**774.794**	
Dana Alokasi Khusus	176.009	150.196	**a. Transfer Umum**	**519.436**	**532.813**	**546.542**	
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	**91.993**	**82.353**	a.1. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	15.582	16.361	17.179	
Pendapatan Hibah	20.449	21.166	a.2. Dana Alokasi Umum	503.854	516.450	529.362	
Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	50.159	41.253	**b. Transfer khusus**	**188.638**	**207.352**	**228.252**	
Dana Penyesuaian	13.007	6.984	Dana Alokasi Khusus Fisik	188.638	207.352	228.252	
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.141	7.665					
Pendapatan Lain-Lain	234	5.286	**Transfer Antar Daerah**				
			Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**105.914**	**110.170**	**114.639**	
			Hibah	20.790	20.790	20.790	
			Dana darurat				
			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya**)	56.137	58.944	61.891	
			Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus***)	28.986	30.435	31.957	

3.3.2.2. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020

Terjadinya pandemi Covid-19 sejak awal tahun menyebabkan perlunya penyesuaian fundamental dalam penyusunan anggaran dan pendapatan daerah. Perubahan kondisi perekonomian nasional yang berdampak pada keuangan negara berpengaruh terhadap alokasi dana perimbangan pusat-daerah. Dengan demikian asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi APBD difokuskan pada upaya-upaya pemulihan ekonomi sekaligus peningkatan sektor-sektor yang menciptakan lapangan usaha yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Dunia usaha mengalami tantangan yang berat. Sektor ekonomi informal juga terpukul hebat. Akibatnya penerimaan daerah mengalami penurunan yang besar yang berdampak pada berkurangnya alokasi belanja daerah. Olehnya kebijakan umum Pendapatan Daerah pada Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 diarahkan pada Penyesuaian target pendapatan baik pajak langsung maupun tidak langsung dengan mempertimbangan kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan anggaran Pemerintah.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023, selain karena adanya perubahan regulasi dibidang pengelolaan keuangan daerah, juga karena adanya perubahan secara umum yaitu Pandemi Covid-19 yang menyebabkan dilakukannya *refocusing* anggaran Tahun 2020 untuk pemenuhan kebutuhan penanganan Covid-19 meliputi kesehatan, jaring pengaman sosial, penanganan dampak ekonomi dan operasional gugus tugas.

Proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kota Palopo tahun 2020-2023 dirumuskan dengan mendasarkan pada evaluasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2017-2019, potensi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19 serta mempertimbangkan komponen pos penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi maupun pusat. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Beberapa dampak pandemic terhadap pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah pada tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 969,49 Milyar menurun dibandingkan tahun 2019 yang berada pada posisi 984,5 Milyar.
2. Besaran pajak retribusi menjadi

3.3.2.3. Proyeksi Belanja

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang ingin dicapai *(performance-based budgeting)*. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selain itu alokasi anggaran belanja perlu dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan dan diadministrasikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman dari Covid-19.

Dalam perencanaan periode 2020-2023, belanja daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai antara lain:

a. Belanja yang dipergunakan untuk membayar gaji pegawai, belanja tambahan penghasilan pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan sejenisnya.
b. Belanja yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat *multiyears*.

c. Belanja yang dipergunakan untuk menjalankan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi kota berupa belanja modal, belanja barang dan jasa dan belanja operasional lainnya.

Selanjutnya terkait dengan analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah periode 2020-2023 guna membiayai program-program RPJMD. Proyeksi belanja tersebut memperhatikan asumsi-asumsi antara lain sebagai berikut:

a. Realisasi belanja daerah Kota Palopo tahun 2015-2019.
b. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

Berdasarkan agenda dan prioritas pembangunan sebagaimana tersebut di atas maka proyeksi anggaran belanja Kota Palopo Periode 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17.
Proyeksi Belanja Daerah

Uraian (PP58/2005)	Realisasi		Uraian (PP12/2019)	APBD 2021	Proyeksi (juta)		Rata-rata Pertumbuhan%
	2019	2020			2022	2023	
BELANJA	**956.451**	**943.913**	**BELANJA**	**991.605**	**1.038.980**	**1.110.275**	**5,35**
Belanja Tidak Langsung	**414.171**	**416.771**	**Belanja Operasi**				
Belanja Pegawai	398.058	396.956	Belanja Pegawai	462.345	473.691	475.635	1,61
Belanja Bunga	2.175	2.053	Belanja Barang dan Jasa	277.079	284.837	282.830	0,83
Belanja Hibah	10.269	5.592	Belanja Bunga	2.357	2.000	2.000	-7,57
Belanja Bantuan Sosial	2.912	2.469	Belanja Subsidi				
Belanja Bantuan Keuangan KepadaPropinsi/kabupaten/Kota dan Partai Politik	755	854	Belanja Hibah	10.713	16.000	25.927	55,70
Belanja Tidak Terduga		8.844	Belanja Bantuan Sosial	1.913	1.500	1.500	-10,79
Belanja Langsung	**542.280**	**527.141**	**Belanja Modal**	**232.695**	**256.450**	**317.881**	**15,54**
Belanja Pegawai	56.328	64.657					
Belanja Barang Jasa	287.339	254.516	**Belanja Tidak Terduga**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0,00**
Belanja Modal	198.613	207.967					

Pada tabel di atas tampak bahwa proyeksi belanja daerah Kota Palopo tahun 2021-2023 terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal meliputi belanja tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan jaringan dan irigasi serta belanja aset tetap lainnya. Sedangkan belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan untuk keadaan darurat dan membutuhkan penanganan cepat yang dapat mengakibatkan dampak negatif kepada masyarakat. Estimasi pertumbuhan belanja dari tahun 2021-2023 memiliki pertumbuhan rata-rata 5,35 persen. Belanja operasi di proyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata 1,83 persen dan belanja modal di proyeksikan bertumbuh dengan rata-rata 15,54 persen.

3.3.2.4. Proyeksi Pembiayaan

Rumusan kebijakan pembiayaan daerah di Kota Palopo diarahkan untuk:

a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus, dan jika terjadi defisit sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
b. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.
c. Membentuk dana cadangan jika diperlukan untuk digunakan membiayai kegiatan-kegiatan strategis pemerintah Kota Palopo.

Penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berasal dari penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan berasal dari penerimaan piutang daerah dan pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib seperti pembayaran pokok utang dan penyertaan modal pada BUMD.

Berdasarkan kebijakan pembiayaan sebagaimana tersebut di atas maka proyeksi pembiayaan Kota Palopo Periode 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18.
Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah

Uraian	Realisasi		APBD 2021	Proyeksi (juta)		Rata-rata Pertumbuhan%
	2019	2020		2022	2023	
Pembiayaan						
Penerimaan Pembiayaan			**30.938**	**40.000**	**40.000**	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.142	34.049	7.138	5.000	5.000	-0,30
Pencairan Dana Cadangan						
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
Penerimaan Pinjaman Daerah	46.375	36.600	23.800	35.000	35.000	0,47
Peneriman Kembali Pinjaman Daerah						
Penerimaan Piutang Daerah						
Pengeluaran Pembiayaan			**26.741**	**37.941**	**37.941**	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				7.941	7.941	0,00
Pembayaran Pokok Utang	45.516	49.341	26.741	30.000	30.000	0,12
Pemberian Pinjaman Daerah						

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai belanja daerah.

Mendasarkan pada proyeksi pendapatan pada tabel sebelumnya, kebijakan kemampuan kemampuan daerah di prioritaskan pada pemenuhan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Belanja tidak langsung antara lain terdiri belanja gaji dan tunjangan, belanja bunga, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja tidak terduga sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari rencana penyertaan modal pemerintah dan pembayaran pokok utang.

Pasal 157 Permerndagri 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa kapasitas riil keuangan daerah dihitung dengan mengurangi total penerimaan daerah, dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung, (sebelum terbitnya PP 12 Tahun 2019, yang termasuk belanja tidak langsung adalah gaji dan tunjangan).

Selanjutnya kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Palopo tahun 2021-2023 sebagaiman tercantum pada table 3.18 berikut ini:

Tabel 3.19.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Palopo 2021-2023

No.	Uraian	Proyeksi Rp.(juta)		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	**Pendapatan**	**987.407**	**1.046.921**	**1.110.869**
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	10,000	2,652
	Total Penerimaan	**987,407**	**1,056,921**	**1,113,521**
	Dikurangi			
4	Pengeluaran Pembiayaan	26,741	37,941	37,941
5	Belanja Tidak Langsung (Gaji & Tunjangan)	462,345	497,692	475,636
Kapasitas riil kemampuan keuangan		**498,321**	**521,288**	**599,944**

Selanjutnya Pasal 158 Permendagri 86 Tahun 2017, menyebutkan kapasitas rill kleuangan daerah, dialokasikan ke dalam prioritas pertama, kedua dan ketiga. **Prioritas pertama** dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. **Prioritas kedua,** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah, dan **prioritas ketiga** untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.20.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Palopo

No.	Uraian	Proyeksi Rp.(jt)		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	498,321	521,288	599,944
2	Prioritas I	282,026	301,271	291,407
3	Prioritas II	162,221	165,013	231,403
3	Prioritas III	54,074	55,004	77,134

3.4 Dampak Pandemi terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020

Terjadinya pandemi Covid-19 sejak awal tahun menyebabkan perlunya penyesuaian fundamental dalam penyusunan anggaran dan pendapatan daerah. Perubahan kondisi

perekonomian nasional yang berdampak pada keuangan negara berpengaruh terhadap alokasi dana perimbangan pusat-daerah. Dengan demikian asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi APBD difokuskan pada upaya-upaya pemulihan ekonomi sekaligus peningkatan sektor-sektor yang menciptakan lapangan usaha yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Dunia usaha mengalami tantangan yang berat. Sektor ekonomi informal juga terpukul hebat. Akibatnya penerimaan daerah mengalami penurunan yang besar yang berdampak pada berkurangnya alokasi belanja daerah. Olehnya kebijakan umum Pendapatan Daerah pada Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 di arahkan pada Penyesuaian target pendapatan baik pajak langsung maupun tidak langsung dengan mempertimbangan kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan anggaran Pemerintah.

Oleh karena itu, beberapa dinamika pengelolaan pendapatan pada tahun 2020, sebagai dampak pandemic covid 19 adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah Kota Palopo menurunkan target pendapatan daerah menurun 8.11% dibandingkan target awal pada APBD Pokok tahun 2020. Kondisi ini juga berlaku bagi semua komponen pendapatan daerah yakni PAD, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan yang Sah,
b. Dari komponen PAD, Hasil retribusi daerah merupakan komponen yang targetnya paling banyak dikurangi oleh Pemerintah Kota Palopo (14.94%), akibat pandemic covid 19, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (9.31%), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (8.32%).
c. Pemerintah Kota Palopo juga mengurangi target penerimaan dana perimbangan berupada DAU sebesar 9.15% dan DAK sebesar 9.05%.

Dinamika perubahan target pendapatan daerah Kota Palopo sepanjang tahun 2020, yang dilakukan Pemerintah Kota Palopo di masa pandemic covid 19 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21.
Perubahan Target
Pendapatan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020

URAIAN	Target (Rp.)		%
	APBD Pokok	Perubahan APBD	
PENDAPATAN	**1,006,012,489,608**	**924,382,439,654**	**-8.11%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**189,592,384,308**	**173,393,617,952**	**-8.54%**
Pendapatan Pajak Daerah	35,647,700,000	33,028,000,000	-7.35%
Hasil Retribusi Daerah	10,443,967,200	8,883,482,000	-14.94%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,500,000,000	6,801,973,147	-9.31%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136,000,717,108	124,680,162,805	-8.32%
DANA PERIMBANGAN	**734,654,757,000**	**669,756,718,109**	**-8.83%**
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	15,320,569,000	16,073,016,000	4.91%
Dana Alokasi Umum	549,105,917,000	498,865,870,000	-9.15%
Dana Alokasi Khusus	170,228,271,000	154,817,832,109	-9.05%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**81,765,348,300**	**81,232,103,593**	**-0.65%**
Pendapatan Hibah	19,177,800,000	21,390,800,000	11.54%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	48,475,555,100	46,715,623,393	-3.63%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,970,110,000	6,983,797,000	-12.38%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6,141,883,200	6,141,883,200	0.00%

3.5. Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah

Sesuai semangat Otonomi Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka tantangan Pemerintah Kota Palopo adalah bagaimana meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, yang akan selalu diperhadapkan pada keterbatasan anggaran pembangunan. Olehnya ada tiga alternative pembiayaan pembangunan yang bisa ditempuh yakni Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Obligasi dan Corporate Sosial Responsibility (CSR).

1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) (*Public Private Partnership)*

Perjanjian kerjasama pemerintah adalah kesepakatan tertulis untuk penyediaan infrastruktur antara Menteri/ Kepala lembaga/ Kepala daerah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum. Tujuan Kerjasama Pemerintah adalah mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat, meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan infrastruktur, mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan ketentuan yang mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan tetap memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak terkait.

Manfaat penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; kesinambungan dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan; serta mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah melalui pengerahan dana swasta, sehingga penyediaan infrastruktur dapat lebih dioptimalisasi.

Dengan landasan hukumnya yang telah dimuat dalam Perpres No.38/2015 dimana dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (user fee), pembayaran oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (availability payment), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur antara lain :

1. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
2. Termasuk ke dalam 19 jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
3. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (Value for Money) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, Skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah.

Proyek infrastruktur dengan skema KPBU dapat diprakarsai oleh pihak menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang disebut dengan solicited project maupun oleh pihak swasta/Badan Usaha/BUMN/BUMD yang disebut sebagai unsolicited project. Untuk mengimplementasikan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya, perlu disiapkan kelembagaan, pengorganisasian dan penguatan pelaksanaan skema KPBU yang efektif dan fleksibel serta mampu berperan dalam mengakselerasi pengimplementasiannya baik pada tataran Sekretariat Pengelolaan KPBU, Simpul KPBU, Tim KPBU maupun Panitia Pengadaan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Palopo harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang. Sehingga sampai 2023, pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU akan difokuskan pada percepatan pengimplementasian kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota Palopo,

Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha adalah transportasi meliputi pelabuhan, bandara, rel kereta api, dan stasiun KA, Jalan (Tol dan Jembatan Tol), Pengairan, Air Minum, Air Limbah, Telekomunikasi, Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah Kota Palopo.

2. Obligasi

Adalah Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dan diterbitkan melalui pasar modal domestik dengan menggunakan mata uang rupiah. Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal. Obligasi daerah diharapakan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat dan provinsi dengan memanfaatkan dana dari masyarakat.

Karakteristik Obligasi Daerah merupakan pinjaman jangka panjang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri. Dikeluarkan dalam mata uang rupiah. Hasil penjualan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karakteristik Kegiatan yang Dapat Didanai dengan Obligasi Daerah antara lain : Kegiatan investasi sarana dan prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan menghasilkan penerimaan bagi APBD, sesuai dengan dokumen perencanaan daerah, merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada, dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari obligasi daerah

Kegiatan yang didanai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah. Menurut DJPK beberapa pekerjaan yang dapat dilaksanakan dalahan adalah Pelayanan air minum, Penanganan limbah dan persampahan, Transportasi, Rumah sakit, Pasar tradisional, Tempat perbelanjaan, Pusat hiburan, Wilayah wisata dan pelestarian alam, Terminal dan sub-terminal, Perumahan dan rumah susun, Pelabuahan lokal dan regional.

3. Coorporate Social Responsibility (CSR)

Adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya CSR juga merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Beberapa potensi bidang pelayanan yang bisa diintervensi dengan pola CSR adalah perbaikan layanan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pembangunan dan penyediaan infrastruktur, pembinaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan bidang lain sepanjang bersinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.
`

4.1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa dating dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Tabel 4.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pertumbuhan IPM Masih Tertinggal. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo yang mengindikasikan perubahan Kualitas Sumber Daya Manusia s.d tahun 2019, masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan IPM Sulsel (1.07), Kabupaten Luwu (1.14) Luwu Utara (0.97) dan Luwu Timur (0,89).	Angka Pertumbuhan IPM Kota Palopo 2019 (0.88 Poin) **masih berada dibawah** angka rata-rata pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan 2019 (1.07 Poin). Angka Pertumbuhan IPM Kota Palopo ini **bahkan kalah** dengan Kabupaten Toraja Utara (1.08 Poin), Kabupaten Luwu Timur (0.89 Poin) dan Luwu Utara (0.97 Poin), Kabupaten Luwu (1.14 Poin). IPM dicapai dengan tiga dimensi yakni pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak.	Beberapa penyebab dalam aspek ini adalah : 1. Kesenjangan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan antara wilayah (kecamatan dan kelurahan), termasuk sarana dan prasarana, partisipasi kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan terutama menekan angka putus sekolah. 2. Kesenjangan akses dan mutu serta cakupan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan prasarana, serta sumber daya kesehatan. 3. Ketepatan sasaran upaya rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dan sinerginya dengan upaya pengendalian penduduk dan penanganan kesejahteraan social. Belum meratanya pemenuhan kualitas sarana-prasarana dan SDM Pendidikan dalam mendukung akses/partisipasi pada pendidikan dasar, pemenuhan layanan minimal pendidikan dasar, dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. 4. Belum meratanya pemenuhan kualitas sarana-prasarana dan SDM kesehatan dalam mendukung akses masyarakat atas layanan kesehatan, pemenuhan pelayanan minimal kesehatan, pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat serta belum optimalnya penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat.
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Palopo s.d tahun 2019 masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Sulsel.	Persentase penduduk miskin Kota Palopo (2019) 7.82% adalah **yang terbesar** diantara 3 kota di Sulsel, dimana persentase penduduk miskin Kota Pare-Pare 2019 (5.26%), Kota Makassar (4.28%). Tingkat pengangguran Kota Palopo 2019 (10.32%) adalah yang tertinggi di Sulsel setelah Kota Makassar (10.39%), jauh berada diatas rata-rata tingkat pengangguran Sulsel 2019 (4.97%) dan nasional (5.3%). PDRB per kapita masyarakat Kota Palopo 2019 (43.02 Juta/Kapita/Thn) masih tertinggal dibandingkan dua Kota lainnya di Sulsel yakni Pare-Pare 2019 (49.80 Juta/Kapita/Thn) dan Makassar 2019 (116.87 Juta/Kapita/Thn).	1. Belum optimalnya perkembangan sektor perekonomian sekunder dan tersier terutama perdagangan, industri dan jasa perkotaan akibat pandemic covid 19. 2. Belum optimalnya perkembangan investasi dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk pada sektor ekonomi kreatif akibat pandemic covid 19. 3. Rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja karena terbatasnya akses untuk meningkatkan keterampilan kerja dan etos kewirausahaan. 4. Turunnya aktifitas produksi dan produktivitas serta daya saing produk sektor perekonomian yang banyak menyerap tenaga kerja akibat pandemic covid 19. 5. Belum optimalnya sinergi program penanggulangan kemiskinan daerah dan ketepatan sasaran upaya rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan penanganan kesejahteraan social, termasuk pembangunan kesejahteraan berbasis keluarga. 6. Ketersediaan lapangan kerja yang belum seimbang dengan pertumbuhan dan pengelolaan pengendalian penduduk termasuk pengelolaan migrasi penduduk. 7. Belum optimalnya jiwa kewirausahaan, serta masih terbatas kesempatan berusaha masyarakat 8. Kesenjangan antara kebutuhan lapangan kerja yang tersedia dengan kompetensi angkatan kerja yang ada.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		9. Dampak pandemic covid 19 yang menurunkan aktifitas ekonomi sehingga menurunkan pendapatan masyarakat.
Daya Saing Infrastruktur Wilayah dan Aksesibilitas serta Pemerataan Pembangunan Belum Kompetitif.	Rasio rumah layak huni Kota Palopo 2019 (0.18) masih berada dibawah rasio rumah layak huni Sulsel (0.19). Rasio pemukiman layak huni Palopo 2019 (92.26%) juga masih dibawah Sulsel (97%). Rasio kerapatan jalan per luas Wilayah Palopo 2019 (1.95 Km/Km2), masih tertinggal dibandingkan Kota Pare-Pare (2.73 Km/Km2) dan Kota Makassar (4.41 Km/Km2). Persentase Jalan Berkondisi Baik Kota Palopo 2019 masih pada angka 69.57 %, Persentase Rumah Tangga Bersanitasi masih pada angka 97.03%.	1. Tingkat kepadatan penduduk per luas wilayah, 2019 (746 Jiwa/Km2) yang cenderung meningkat serta pengembangan kawasan perumahan atau pemukiman, belum berbanding lurus dengan upaya penyediaan infrastruktur dasar masyarakat. 2. Demikian halnya dengan pemenuhan layanan-layanan dan infrastruktur dasar seperti sanitasi, air bersih, limbah dan lingkungan kumuh. 3. Upaya menata dan mengembangkan potensi kawasan hunian untuk produktif belum optimal. 4. Keterbatasan kemampuan daerah dan kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Daerah belum optimal. 5. Kesenjangan dan pembangunan layanan infrastruktur yang masih lebih banyak terpusat pada wilayah yang berada dekat dengan pusat kota. Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam pemeliharaan jalan dan jembatan dan infrastruktur lainnya. 6. Sinergi pembiayaan infrastruktur antara pemerintahan dan antar pemerintah dengan dunia usaha, dalam penanganan aksesibilitas dan konektifitas wilayah belum optimal berjalan. 7. Kurang berkembangnya kesadaran masyarakat atas penataan lingkungan permukiman dan perumahan, terutama dalam mewujudkan lingkungan layak huni.
Ancaman terhadap bencana dan daya tamping dan daya dukung lingkungan serta sumberdaya alam, cenderung meningkat.	Masih ada 140 Ha kawasan yang terdampak banjir. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan, meningkatnya kerawanan terhadap kebakaran 2019 menjadi (93 kasus di 2019) meningkat dibandingkan 2018 (38 kasus). Seiring dengan tingkat kepadatan yang semakin meningkat 2019 (746 Jiwa/Km2) dibandingkan 2018 (730 Jiwa/Km2). Bencana Longsor 2019 (5 Ha di Batang Barat),	1. Alih fungsi lahan untuk perumahan dan kawasan pemukiman yang cenderung meningkat, terus mengurangi tingkat tutupan lahan, dan menggerus keberadaan lahan pertanian atau lahan produktif lainnya. 2. Bertambahnya potensi bencana karena kerusakan alam/lingkungan, perubahan iklim dan dinamika demografi wilayah seperti kepadatan penduduk. Jumlah spot/lokasi rawan bencana seperti tanah longsor, banjir, genangan, abrasi, rob, kekeringan dan kebakaran cenderung bertambah. 3. Beberapa spot pada DAS dalam keadaan kritis yang berakibat resapan air hujan ke dalam sistim akuifer semakin berkurang dan erosi lahan semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan pula sedimentasi di alur dan muara sungai yang juga tinggi. Misalnya pada beberapa kelurahan di Kecamatan Telluwanua. 4. Kapasitas sistem pengendali banjir yang ada seperti dimensi sungai, sistem drainase dan lainnya, fungsinya terus berkurang dan kurang optimal. 5. Kerjasama dan Sinergi Pengelolaan Lingkungan dan Memantapkan Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengendalian & Pemanfaatan ruang belum optimal 6. Bertambahnya intensitas konversi lahan pertanian menjadi peruntukan non pertanian serta perambahan atas lokasi hutan. 7. Adanya tekanan ekologi dan sosial pada kawasan pesisir akibat perluasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		pemukiman dan perkembangan pusat aktivitas perekonomian. 8. Kurang efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya dalam RTRW. 9. Adanya ancaman pencemaran air serta ketersediaan dan sustainabilitas pasokan sumber air bersih masyarakat 10. Luas dan kualitas Lahan Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik belum seimbang dengan pertumbuhan dan kebutuhan serta kondisi penduduk Kota Palopo
Belum Semua Target Standar Pelayanan Minimal sebagai salah bentuk layanan dasar dan layanan public yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, belum memenuhi/mencapai target SPM.	Capaian kinerja Layanan SPM Kesehatan s.d 2019 pada posisi 84.06%, Pendidikan 100%, Pekerjaan Umum (89.51%), Perumahan dan Pemukiman (100%), Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (79.80%), Urusan Sosial (100%).	1. Pandemi covid 19 yang diikuti pembatasan social berskala besar memicu respon masyarakat untuk mengakses layanan standar pelayanan minimal pada beberapa urusan misalnya kesehatan, sangat terbatas. 2. Refocusing sejumlah anggaran infrastruktur yang diarahkan pada pemenuhan infrastruktur layanan standar pelayanan minimal. 3. Tidak tercukupinya kebutuhan sarana/ prasarana, fasilitas, alokasi pembiayaan dan SDM dalam penyelenggaraan SPM pelayanan dasar. 4. Kualitas dan ketersediaan data kinerja SPM serta akuntabilitas kinerja pencapaian SPM pada perangkat daerah penyelenggara urusan masih lemah.
Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palopo belum sesuai target yang diharapkan. .	Predikat SAKIP Kota Palopo 2019 sebagai implementasi dari akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah masih berpredikat CC dengan nilai 50.32, dan belum memenuhi target daerah (B). Demikian pula dengan Indeks Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo tahun 2019 adalah 52,70 atau kategori CC, sebagai salah satu bentuk implementasi perbaikan tata kelola pemerintahan dan layanan public	1. Kualitas dan ketersediaan data dan informasi pembangunan serta Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) belum optimal, termasuk pada tingkat OPD. 2. Tingkat kesesuaian antara perencanaan kinerja dan penganggaran tingkat kota dan OPD belum optimal dalam asistensi, verifikasi dan sinkronisasi yang belum memadai. 3. Kualitas dan transparansi informasi publik dan implementasi 8 area perubahan dalam reformasi birorasi masih belum optimal 4. Kualitas SDM perencanaan pada level kota dan OPD belum optimal 5. Pelaksanaan delapan area perubahan reformasi birokrasi dan peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal dalam penerapannya. 6. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal dan Pelaksanaan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi masih berada dibawah standar regulasi yang berlaku 7. Inovasi dalam berbagai aktifitas pemerintahan belum optimal.
Produktifitas Daerah Cenderung Menurun dan Capaian Kinerjanya Belum se-Kompetitif daerah Lain	Laju pertumbuhan PDRB Kota Palopo cenderung menurun, tahun 2019 (6.75) lebih rendah dibandingkan tahun 2018 (7.52%). Pertumbuhan PDRB Kota Palopo 2019 ini masih	1. Sistem Layanan dan Kerjasama Daerah dalam hal Ketenagakerjaan dan Penyediaan Lapangan Kerja serta Peningkatan SDM Angkatan Kerja yang disertai dengan pengembangan Promosi, Sarana Prasarana dan Kualitas Daya Dukung Investasi masih kurang bersinergi antara perangkat daerah, wilayah dan level pemerintahan.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
di Sulsel	berada dibawah Kota makassar (8.79%) dan rata-rata pertumbuhan PDRB Sulsel (6.92%). Ancaman perlambatan ekonomi cenderung menguat akibat dampak pandemic covid 19.	2. Pengembangan Produksi dan Produktifitas Daerah, Penguatan Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Produktif Masyarakat, peningkatan Skala Usaha dan Aksesibiltas Kelembagaan Usaha Masyarakat serta pengembangan industri unggulan dan industri potensial lainnya belum bersinergi. 3. Kondisi ini kemudian diperparah dengan pandemic covid 19 yang juga memberikan pengaruh yang sangat besar bagi produktifitas daerah, karena kebijakan pembatasan dalam berbagai aktifitas produksi sebagai respon dalam aspek kesehatan 4. Peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui Pelatihan Kerja (Life Skill), Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi, Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Produktif belum optimal, dan harus sinergi dan selaras dengan mempertimbangkan kondisi dan dampak Pandemi Covid 19 di sektor Produksi dan Produktifitas Daerah 5. Peningkatan Daya Saing Produk/Komoditas Daerah belum optimal karena pembatasan social akibat Pandemi Covid 19 harus selaras dan sejalan, antara ekonomi dan kesehatan. 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi di masa pandemic covid 19 oleh para pelaku usaha belum massive dan sustaianabel sebagai sebuah model pengelolaan usaha di masa new normal.
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Belum Berperan sesuai dengan yang diharapkan.	Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Daerah cenderung menurun akibat dampak pandemic covid 19 karena diikuti pembatasan social berskala besar bagi masyarakat. Demikian halnya dengan lapangan Usaha Kuliner, jasa akomodasi dan hotel, cenderung melambat akibat pandemic.	1. Pengembangan pariwisata Palopo masih lebih banyak bertumpu pada daya Tarik spot destinasi wisata. 2. Pengembangan iven-iven kepariwisataan belum bersinergi baik dengan sejumlah program perangkat daerah yang berpotensi menunjang pengembangan pariwisata daerah berbasis iven-iven. 3. Pengembangan Fasilitas dan sarana prasarana pada spot destinasi wisata Kota Palopo belum optimal dilakukan. 4. Partisipasi kelompok masyarakat pada spot destinasi wisata belum optimal. 5. Pengembangan industry dan ekonomi kreatif Kota Palopo termasuk pembinaan para pelaku usahanya belum massive dilaksanakan. Pelaksanaan iven iven daerah yang mampu meningkatkan angka kunjungan ke Kota Palopo, belum optimal. 6. Sinergi program perangkat daerah yang berpotensi dikelola menjadi sebuah iven pariwisata Palopo, belum terorganisir dengan baik. 7. Model pengembangan dan pengelolaan fasilitas, sarana dan prasarana pada spot destinasi wisata antara pemerintah dengan dunia usaha serta masyarakat, belum berjalan dengan baik. 8. Optimalisasi promosi spot destinasi wisata dan iven kepariwisataan daerah berbasis pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi, juga belum berjalan dengan optimal. Demikian halnya dengan ekonomi kreatif. 9. Pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif dan iven-iven yang mampu mengaktualisasi para pelaku usaha masih minim.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		10. Pelaksanaan Iven-iven ekonomi kreatif daerah baik dalam hal jumlah maupun skalanya belum berkembang dengan optimal,

4.2 Permasalahan Untuk Penyelenggaraan Urusan

A. Permasalahan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar

(1) Urusan Pendidikan

1. Penyebaran lembaga dan prasarana pendidikan pada semua jenjang masih banyak terfokus di Kecamatan di dekat wilayah perkotaan (Wara, Eara Utara, Bara, Eara Timur). dari 147 unit pada semua tingkatan masing-masing 26 unit Sekolah berada di Kecamatan Wara dan Bara dan masing-masing 19 unit sekolah berada di Kecamatan Wara Timur dan Wara Utara.
2. Pertumbuhan jumlah anak usia sekolah pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum berbanding lurus dengan penyediaan sarana dan prasarana gedung sekolah.
3. Rasio guru dan murid menunjukan trend negatif dan tidak berimbang.
4. Penyebaran tenaga pendidik belum merata dan lebih banyak terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di kota, termasuk penyebaran tenaga pendidikan yang bersertifikasi.
5. Pendidikan non formal dan pendidikan luar biasa belum berkembang dengan baik dan berstandarisasi.
6. Penerapan standar nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan masih terbatas pada sekolah di dalam kota sementara di luar kota masih berkutat pada persoalan akses terhadap pendidikan terutama bagi keluarga miskin.
7. Pembinaan terhadap kelompok belajar masyarakat belum optimal dalam mendorong pendidikan kesetaraan.
8. Penguatan dan pemberian peran yang lebih besar kepada Dewan Pendidikan belum konsisten.
9. Perlunya penambahan muatan kurikulum terkait pendidikan karakter pada semua PAUD dan pendidikan dasar.

(2) Urusan Kesehatan

1. Penangan dampak pandemic covid 19 berupa penanganan kasus baik pasien maupun ketersediaan sarana dan prasarana, pelacakan kasus, dan pencegahan penularan yang lebih massive.
2. Pencapaian penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan belum mencakupi seluruh unsur pelayanan yang dipersyaratkan.
3. Ketersediaan jumlah angkutan medis (ambulance) dan jangkauan pelayanan masih terbatas terutama pada daerah-daerah terluar Kota Palopo.
4. Jumlah dan ketersediaan ruang rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (Rumah Sakit) belum memadai akibat pertumbuhan jumlah penduduk.
5. Rasio jumlah balita dan posyandu dari waktu ke waktu terus menunjukan trend yang tidak berimbang. Demikian halnya dengan rasio ideal pelayanan dokter umum, dokter spesialis terhadap jumlah pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (RS).
6. Ketersediaan ruang rawat inap, ketersediaan obat dan peralatan esensial, termasuk perbaikan sarana dan prasarana Fasilitas Kesehatan (Faskes) tingkat pertama lebih banyak terpusat di sekitar kota. Demikian halnya dengan pelayanan kesehatan dan keselamatan anak, balita, ibu hamil dan melahirkan, serta lansia.
7. Koordinasi tentang asksesibilitas dari pemukiman masyarakat ke Faskes antara Dinas Kesehatan dengan perangkat daerah terkait belum optimal.
8. Upaya mengembangkan obat tradisional dengan memanfaatkan potensi lokal belum memadai.
9. Upaya penanggulangan penyakit menular dan penciptaan lingkungan yang sehat, perbaikan gizi, dan promosi kesehatan lainnya belum optimal, terutama pada kantong-kantong kekumuhan dan penduduk miskin.
10. Terbatasnya kemampuan daerah dalam hal penyediaan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana dan prasarana di RSUD.

(3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai belum memadai.
2. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir belum optimal.
3. Pembangunan prasarana pengaman pantai belum memadai.
4. Pembangunan dan peningkatan kualitas serta pemeliharaan jalan dan jembatan (wilayah pinggiran) belum memadai dan merata.
5. Koordinasi dengan sejumlah stake holder terkait yang membutuhkan penanganan akses jalan dan jembatan, belum terjalin dengan baik seperti akses jalan jembatan ke fasilitas kesehatan, pendidikan, sentra produksi/budidaya.
6. Koordinasi perencanaan dan pemanfaatan serta pengelolaan tata ruang dan perencanaan infrastruktur jaringan belum memadai.
7. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau belum maksimal.
8. Eksistensi lahan pertanian di Kota Palopo terus tertekan oleh pengembangan perumahan.
9. Jaringan irigasi sebagian mengalami kerusakan sehingga kurang efektif dalam layanan air.
10. Kualitas hasil pekerjaan konstruksi belum optimal akibat minimnya pembinaan peningkatan kompetensi dan skill tenaga konstruksi.
11. Pemenuhan layanan standar layanan minimal bidang ke PU-an belum optimal termasuk layanan bagi masyarakat miskin.

(4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Pengembangan perumahan dan lingkungan sehat perumahan belum optimal dalam menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan perumahan, termasuk masih adanya rumah tidak layak huni.
2. Pemberdayaan komunitas perumahan belum memadai dalam penataan pemukiman termasuk penataan lingkungan pemukiman kumuh.
3. Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dalam masyarakat termasuk pada lingkungan perumahan belum memadai.
4. Belum tercukupinya dukungan prasarana dan sarana umum (PSU) dalam menghadirkan lingkungan perumahan/pemukiman yang sehat dan aman.
5. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan Perumahan;
6. Penataan perumahan dan permukiman yang layak dengan akses sanitasi yang memadai belum terbangun secara optimal terutama pada lokasi kantong kekumuhan dan masyarakat miskin.
7. Terbatasnya data Luas lahan terbangun akibat pertumbuhan permukiman baru di Kota Palopo;

(5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal kurang bersinergi antar stakeholder
2. Fasilitas, sarana-prasarana serta kapasitas SDM Satpol PP dalam penegakan Perda secara menyeluruh belum memadai.
3. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban, termasuk pelibatannya dalam pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dan menjaga keamanan, belum memadai.
4. Kecukupan sarana dan prasarana serta peralatan penanganan kebakaran belum memadai dalam memenuhi tingkat waktu tanggap (response time rate) yang baik pada wilayah manajemen kebakaran (WMK).
5. Kapasitas dalam penyediaan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum berkembang seiring dengan tuntutan/kebutuhan.

6. Kapasitas dan kerjasama stakeholder daerah dalam pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat, serta deteksi dini dan pencegahan konflik sosial, masih rendah.

(6) Urusan Sosial

1. Perlindungan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial masyarakat di masa pandemic dan pasca pandemic covid 19
2. Pemanfaatan Basis Data Terpadu belum optimal program-program perlidungan, pemberdayaan dan rehabilitasi social masyarakat.
3. Ketersediaan sumberdaya manusia, finansial dan sarana-prasarana dalam penanganan, pemberian bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS masih terbatas.
4. Kemampuan panti sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) dalam penyediaan sarana pelayanan sosial dan prasarana kesejahteraan sosial masih terbatas.
5. Kemampuan SDM dan sarana-prasarana dalam rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, lanjut usia telantar di luar panti, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dan masyarakat miskin, masih terbatas.
6. Kemampuan SDM dan sarana-prasarana dalam evakuasi, bantuan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana masih terbatas.

B. Permasalahan pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

(1) Urusan Tenaga Kerja

1. Data yang lengkap tentang pekerja dan pencari kerja untuk kepentingan penyaluran pencari kerja, keselamatan dan perlindungan pekerja, serta kepesertaan dalam program Jamsostek belum tersedia belum dimutahirkan .
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kesempatan kerja (bursa kerja) belum memadai.
3. Kondisi peluang kesempatan kerja dan lapangan berusaha tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja.
3. Cakupan besaran pencari kerja dan tenaga kerja dalam pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan belum memadai.
4. Belum optimalnya pengembangan kualitas kelembagaan Ketenaga kerjaan;
5. Perlindungan Ketenagakerjaan belum optimal.
6. Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi dengan perkembangan lapangan kerja yang terbatas, diantaranya adalah karena keterbatasan keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya;
7. Bencana Non Alam COVID 19 mengakibatkan terjadinya pemutusan kerja dan Sebagian dirumahkan sementara pada ± 2.086 orang dari sektor pariwisata (Karyawan hotel), transportasi/angkutan, sector UMKM dan Investasi khusunya bidang property dan pengembang perumahan.

(2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak secara fisik dan psikologis, penyalahgunaan zat aditif dan napza menunjukan trend yang terus meningkat.
2. Kapasitas unit pelayanan terpadu dalam penanganan pengaduan, rehabilitasi sosial, layanan kesehatan dan layanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih terbatas.
3. Kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum efektif dalam pengintegrasian pada kebijakan dan penganggaran.
4. Kapasitas dalam layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan belum memadai.

(3) Urusan Pangan

1. Koordinasi dan penanganan daerah rawan pangan dengan stake holder lain yang terkait belum efektif
2. Pemantauan dan analisis akses pangan, harga pangan, cadangan pangan dan pengembangan model distribusi, pemasaran hasil, dan sistem informasi pangan yang efisien belum memadai
3. Diversifikasi pemanfaatan pangan dan lingkungan hunian masyarakat belum optimal dalam mendukung pemenuhan pangan berimbang sesuai pola pangan harapan termasuk masa pandemic covid 19
4. Sinergi dan koordinasi dengan stake holder terkait dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan belum optimal

(4) Urusan Pertanahan

1. Sistem informasi, pendaftaran dan sertifikasi tanah belum memadai dikembangkan.
2. Penataan penguasaaan, pemilikan dan penggunan dan pemanfaatan tanah belum optimal dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tanah negara maupun tanah masyarakat.
3. Koordinasi dalam pemberian izin lokasi dan izin-izin lainnya dengan Perangkat daerah lainnya belum optimal.

(5) Urusan Lingkungan Hidup

1. Beberapa wilayah masih sering dilanda banjir dan di beberapa titik lainnya digenangi air saat musim hujan.
2. Sering terjadi kebakaran hutan pada musim kemarau.
3. Luas lahan kritis dan tingkat kerusakan hutan terus bertambah seriring dengan semakin menurunnya daya tampung lingkungan, kapasitas dan kualitas air baku, akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan.
4. Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama;
5. Pengintegrasian RPPLH dan KLHS kedalam dokumen perencanaan daerah belum terukur dan belum dilengkapi data mutakhir.
6. Pemantauan, pengukuran dan pengendalian kualitas tutupan lahan, air dan udara belum terkordinasikan secara rutin dan efektif.
7. Identifikasi, verifikasi, penetapan dan pendampingan masyarakat hukum adat serta kearifan dan pengetahuan lokal terkait pengelolaan lingkungan hidup belum terprioritaskan.
8. Luas area penanganan sampah serta pengurangan sampah melalui mekanisme reduce, reuse dan recicle (3R) masih terbatas.
9. Dampak pemanasan global semakin meningkatdalam kondisi penanganan efek gas rumah kaca belum optimal.
10. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.

(6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Lambatnya pengiriman blangko menghambat pelayanan penerbitan KTP secara tepat waktu dan memuaskan.
2. Komitmen pelaporan kelahiran dan pengurusan akte kelahiran oleh masyarakat belum maksimal.
3. Kordinasi antar stakeholder dalam penerbitan akte nikah belum optimal.
4. Pelaporan dan pencatatan penduduk datang, pergi dan meninggal belum optimal.
5. Penerapan protocol kesehatan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

(7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

1. Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran kelurahan yang baik

belum terpenuhi secara merata termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi.
2. Kinerja LPM dalam pemberdayaan masyarakat belum efektif dan merata.
3. Kinerja PKK dalam pembinaan masyarakat belum efektif dan merata.
4. Kapasitas SDM dan perlengkapan pada posyandu tidak mendukung pelayanan pada ibu hamil dan bayi.
5. Keswadayaan masyarakat dalam mendorong dan memeliharan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat belum optimal
6. Kapasitas SDM pemerintahan kelurahan dalam menjalankan kewenangan pemerintahan kelurahan, pembangunan kelurahan, pembinaan kemasyarakatan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan belum mencukupi.

(8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Pemanfaatan Rencana Induk Pengendalian Penduduk dan kebijakan kependudukan lainnya dalam pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk belum efektif.
2. Pelayanan kontrasepsi belum menjangkau secara menyeluruh pada pasangan usia subur dalam menekan angka kelahiran anak.
3. Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri serta kesadaran kesehatan reproduksi belum memadai.
4. Bina keluarga balita, keluarga remaja dan keluarga lansia belum didukung oleh tenaga pendampingyang memadai.
5. Model operasional BKB-Posyandu-PADU belum terkoordinasi.
6. Pembinaan ketahanan keluarga dalam masa pandemic covid 19.

(9) Urusan Perhubungan

1. Pembangunan dan penyediaan sarana prasarana perhubungan, pelayanan terminal dan penataan izin trayek belum optimal dalam merespons pertambahan kebutuhan angkutan umum,.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ kurang optimal
3. Pengawasan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum belum optimal .
4. Pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan belum tergali dengan baik.
5. Uji KIR sesuai standar belum mencakupi semua angkutan umum.
6. Pemenuhan rambu-rambu lalu lintas belum mencakupi sesuai kebutuhan.
7. Penguji kendaraan bermotor belum memenuhi standar.
8. Penerapan standar protocol kesehatan dalam aktifitas transportasi public.

(10) Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat kecamatan belum terbina secara efektif.
2. Layanan telekomunikasi dan jaringan internet belum menjangkau seluruh wilayah Kota Palopo.
3. Data tentang kepemilikan hand-phone/telepon, akses internet dan komputer pribadi belum valid.
4. SDM bidang teknologi komunikasi dan informasi pada OPD belum terpenuhi.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik belum optimal.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perlabagi aktifitas produksi, ekonomi dan berusaha masyarakat.

(11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Iklim usaha kecil dan menengah belum kondusif.
2. Kemampuan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM belum memadai
3. Masih rendahnya kapasitas Koperasi & UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan.
4. Masih lemahnya data produk dan Sistim Informasi Pemasaran

5. Kapasitas SDM, teknologi dan permodalan dalam pengelolaan UKM, lembaga keuangan mikro (LKM) dan BPR terbatas.
6. Daya saing produk usaha mikro dan kecil masih rendah.

(12) Urusan Penanaman Modal

1. Ketersediaan data potensi ekonomi daerah yang siap ditawarkan kepada investor nasional dan asing belum lengkap.
2. Upaya promosi dan kerjasama investasipada level domestik dan luar negeri masih minim.
3. Pengembangan data dan informasi statistik daerah terkait investasi belum tersinergikan antar OPD.
4. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
5. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang
6. Penerapan standar protocol kesehatan dalam pelayanan penanaman modal

(13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1. Sarana/prasarana serta kordinasi antar elemen pemuda dalam mendorong keaktifan organisasi dan peran serta pemuda belum memadai.
2. Jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda belum memadai.
3. Sarana/prasarana serta fasilitas olah raga serta pelatih cabang olah raga dalam mendorong atlet/cabang olah raga berprestasi masih terbatas.
4. Kebijakan dan manajemen serta pemasyarakatan olahraga belum memadai
5. Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi pemuda
6. Peningkatan iven-iven olahraga yang mampu meningkatkan angka kunjungan ke Kota Palopo dengan tetap menegakkan protocol kesehatan.

(14) Urusan Statistik

1. Belum tersedianya data lengkap berdasarkan indikator kinerja kunci masing-masing perangkat daerah.
2. Terlambatnya ketersediaan data umum kondisi daerah yang termuat dalam "Kota Palopo dalam Angka", "PDRB" dan "IPM Daerah" sehingga kurang mutakhir dijadikan dasar dalam perencanaan tahunan.
3. Upaya pengembangan data/informasi/statistik daerah belum terkoodinasi dan masih sektoral.
4. Data dan informasi belum berbasis web.

(15) Urusan Persandian

1. Arah pengembangan dan pengelolaan SDM persandian daerah belum terstruktur secara massive dan terkoordinasi dengan baik.
2. Penggunaan sandi belum termanifestasikan dalam komunikasi perangkat daerah
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan persandian

(16) Urusan Kebudayaan

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang berpotensi mendatangkan angka kunjungan ke kota Palopo dalam menunjang pengembangan pariwisata berbasis iven..
2. Belum dilaksanakan pendataan karya budaya untuk kepentingan inventarisasi dan revitalisasi belum akurat dan komprensif.
3. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;

4. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa

(17) Urusan Perpustakaan

1. Budaya baca dan pembinaan perpustakaan di sejumlah lembaga pendidikan belum memadai dan belum merata.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan minat baca masyarakat masih sangat kurang.
3. Kualitas SDM (pustakawan, tenaga teknis, dan penilai) dalam pengelolaan perpustakaan daerah masih rendah.
4. Cakupan materi dan jumlah unit pada koleksi buku perpustakaan daerah masih terbatas.
5. Penerapan standar protocol kesehatan dalam pelayanan di perpusatkaan

(18) Urusan Kearsipan

1. Belum ada Depo dan standar pengelolaan arsip secara baku
2. Jumlah dan kualitas SDM pengelola kearsipan belum cukup untuk mendukung perbaikan sistem kearsipan, penyelamatan dokumen daerah dan pemeliharaan sarana prasana kearsipan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi digital dalam pengelolaan kearsipan belum memadai.

C. Urusan Pilihan

(1) Urusan Pariwisata

1. Pengembangan kepariwisataan belum banyak menyentuh pada pariwisata berbasis iven yang mampu meningkatkan angka kunjungan ke Kota Palopo
2. Destinasi wisata yang ada belum tertata mengikuti perkembangan kontemporer kepariwisataan dan masih ada potensi destinasi wisata yang belum dikembangkan.
3. Pemasaran dan jaringan kemitraan kepariwisataan belum efektif mendukung peningkatan jumlah pengunjung wisata.
4. Pengembangan komunikasi dan informasi dalam promosi kepariwisataan masih minim.
5. Penerimaan dan kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PAD dan PDRB belum optimal.
6. Pengintegrasian ekonomi kreatif sebagai salah satu fokus komoditas penunjang kepariwisataan masih terkendala dengan belum tersedianya lokasi yang memadai.
7. Pendayagunaan keindahan alam dan lingkungan hidup dan atraksi wisata sebagai salah satu potensi wisata belum optimal.
8. Covid 19 berdampak negative pada sector pariwisata ditandai dengan tidak beroperasinya/tutp sementara 5 buah hotel, sedangkan okupansi hotel yang masih buka hanya di kisaran 5 % dengan mekanisme 70 % operasional 70 % karyawan di rumahkan.

(2) Urusan Pertanian

1. Penerapan teknologi dan ketersediaan sarana prasarana pendukung pertanian, peternakan dan perkebunan masih terbatas.
2. Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap ketersediaan lahan pertanian;
3. Pengolahan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan belum optimal
4. Jaringan dan kemitraan usaha baik produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perkebunan belum memadai
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sektor pertanian secara luas masih minim
6. Kualifikasi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam mendukung peningkatan produktivitas usahatani masih rendah.

(3) Urusan Perdagangan

1. Simpul distribusi dan sentra ekonomi masyarakat lainnya masih jauh dari kondisi nyaman
2. Kelembagaan dan kemitraan perdagangan belum optimal
3. Pengawasan mutu dan peredaran barang yang beredar belum memadai dan terkoordinasi baik dengan PD lainnya.
4. Perlindungan atas konsumen belum optimal
5. Pembinaan terhadap personal dan kelembagaan pedagang kaki lima dan asongan belum optimal.
6. Data tentang pedagang/usaha informal belum tersedia dengan cukup sebagai dasar dalam pembinaan.
7. Optimalisasi Promosi produk unggulan daerah .

(4) Urusan Perindustrian

1. Belum tersedia data potensi dan karaketeristik usaha kelompok pengrajin.
2. Kluster industri kecil dan menengah dalam suatu kawasan industri belum berkembang dengan optimal.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan sinergi antar pihak dalam pengembangan industri belum memadai.

(5) Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Kapasitas perahu dan teknologi penangkapan ikan belum berkembang mengikuti tuntutan baru dalam modernisasi perikanan.
2. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan masih minim.
3. Kelompok nelayan belum berkembang optimal sebagai wahana peningkatan produksi dan edukasi bagi penangkapan yang ramah lingkungan
4. Kesenjangan antara nelayan lapis atas dan nelayan lapisan bawah masih tinggi.

D. Penunjang Urusan

(1) Perencanaan

1. Kualitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah masih sangat terbatas
2. Ketersediaan data sesuai indikator kinerja kunci berbagai urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah masih terbatas.
3. Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam penyelenggaraan urusan oleh perangkat daerah belum akurat dan tepat waktu.
4. Pembahasan prioritas Renja/RKPD dalam proses musrenbang RKPD belum substantif berbasis fakta.
5. Penjabaran konsistensi perencanana strategis ke dalam perencanaan tahunan sampai kepada penganggaran belum optimal.
6. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam membangun konsistensi RTRW belum akurat dan menyeluruh.

(2) Keuangan

1. SDM berkualitas pada OPD dalam analisis dan pelaporan keuangan masih terbatas.
2. Porsi SILPA dalam penyelenggaraan keuangan daerah masih signifikan.
3. Program/kegiatan yang tidak berjalan karena keterbatasan anggaran.
4. Pendapatan Asli Daerah masih sangat minim.
5. Pengagaran daearah masih mengandalkan Dana Alokasi Umum.

(3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Kebutuhan dana untuk pendidikan dan pelatihan formal, struktural dan fungsional bagi ASN tidak mencukupi sesuai tingkat kebutuhan ASN.
2. Penyelenggaraan tugas jabatan fungsional pada beberapa PD belum optimal dalam peningkatan capaian kinerja.
3. Pemanfaaatan IT untuk mengukur kinerja ASN belum optimal.

(4) Penelitian dan Pengembangan

1. SDM dan sarana/prasarana kelitbangan daerah belum memadai dalam mendukung kegiatan kelitbangan
2. Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terbatas.
3. Iklim pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah belum berjalan dengan baik.
4. Pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik;

(5) Pengawasan

1. Masih adanya temuan pelanggaran administrative dan keuangan serta asset dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah.
2. Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK belum maksimal.

(6) Sekretariat Dewan

1. Kualitas dan Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD belum akurat.
2. Penyusunan Program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi budgeting, legislasi, pengawasan, belum optimal.

(7) **Sekretariat Daerah**

1. Pelaksanaan koordinasi reformasi birokrasi, dan koordinasi pemenuhan layanan standar pelayanan minimal dan koordinasi program pembangunan daerah dan layana public lainnya belum sepenuhnya efektif mendukung penyelenggaraan urusan.

(8) Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur pada Layanan public pada kecamatan dan kelurahan termaskuk pemanfaatan teknologi informasi perlu diakselerasi.
2. Inovasi layanan-layanan public pada kecamatan, belum optima;l
3. Fungsi kordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan PD di kecamatan, penerapan dan penegakan Perda belum sepenuhnya efektif.
4. Fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan di kelurahan belum sepenuhnya efektif.
5. Fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan umum belum sepenuhnya optimal.

Tabel 4.2.
Interpretasi Capain Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kota Palopo

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Layanan Urusan Wajib Dasar				
1.	Pendidikan			
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	(<) Belum Tercapai 62,48	Sarana PAUD belum merata disetiap Kecamatan	Perlu penambahan sarana/sekolah PAUD tiap Kecamatan
2	Angka Partisipasi Kasar			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	Melampaui (>) 105.99	Rasio Guru belum Merata	Distribusi guru yang sesuai dengan kebutuhan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	Belum Tercapai (<) 86.02	Jumlah, teresediaan saran dan prasarana belum memadai	Penambahan jumlah guru dan ruang belajar
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	Melampauai (<)110.74	Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA/ Paket C yang tidak sesuai usia sekolah (16-18 tahun)	Mendorong partisipasi masyarakat terhadap usia sekolah dijenjang SMP/MTs/Paket B
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)			
	Tidak/Belum Bersekolah (%)	Melampaui (>) 14.08	1. Kemiskinan Penduduk berpengaruh kemampuan siswa 2. Gizi yang rendah berpengaruh pada minat belajar siswa	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penuntasan wajar dikdas
	Tamat SD/sederajat (%)	Belum tercapai (<) 17.05		
	Tamat SMP/sederajat (%)	Belum teccapai (<) 29.84		
	Tamat SMA (%)	-	Ketersediaan Layanan Pendidikan	Pemerataan layanan Pendidikan
	Tamat SMK (%)	Melampaui (>) 3.52		
	Tamat Perguruan Tinggi (%)	>		
	Diploma I/II (%)	Belum mencapai (<) 0.39	Ketersediaan layanan Pendidikan	Pemerataan layanan Pendidikan
	Diploma III (%)	Belum mencapai (<) 1.39		
	Diploma IV/S1-S3 (%)	Melampauia (>) 15.66		
4	Angka Partisipasi Murni			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	Belum tercapai (<) 99.44	Kesadaran masyarakat akan pentinggnya Pendidikan masih rendah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menuntaskan Wajar
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	Belum tercapai (>) 78.11		
	Angka Partisipasi Murni (APM)	< 67.40		

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	SMA/SMK/MA/Paket C (%)			
5	Angka partisipasi sekolah (%)			
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	Belum tercapai (<) 99.70	1. Sarana prasarana sekolah yang belum memadai 2. Jumlah guru belum mencukupi	1. Peniungkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah 2. Penambahan jumlah guru
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	Belum Tefcapai (<) 99.17		
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C (Per 1000)	84.43		
6	Angka Putus Sekolah:			
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	Belum tercapai (<) 0,004	1. Masalah ekonomi keluarga 2. Jarak sekolah dengan tempat domisili 3. Bullying/ dan persekusi	3. Penguatan paket kegiatan A, B dan C 4. Perbaikan system penerimaan siswa (ZONASI) 5. Penguatan Guru pembinan Konseling
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Belum tercapai (<) 0,006		
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	Belum tercapai (<) 0.003		
7	Angka Kelulusan:			
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	Sesuai (=) 100	Tenaga pendidik belum memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan	Peningkatan kualitas tenaga pendidik
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	Sesuai (=) 100		
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)			
8	Angka Melanjutkan (AM):			
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	tercapai (>) 140.36	1.Persoalan ekonomi keluarga 2.Masih ada orang tua yang memperkejakan anaknya	1.Bantuan khusus untuk siswa miskin yang berprestasi 2.Penuntasan Program Wajar
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)			
9	Fasilitas Pendidikan:			
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Sesuai (=) 100	Perlu upaya pemeliharaan untuk menjaga kualitas bangunan	1. Penambahan alokasi anggaran
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	Sesuai (=) 100		
	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)			
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)			
	SD/MI (per 10,000)	Melampaui (>) 39	1. Kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar masih terbatas 2. Meningkatnya jumlah siswa yang	1. Penambahan sarana dan prasarana Pendidikan 2. Penambahan ruang kelas dan tenaga guru
	SMP/ MTS (per 10,000)	Melampaui (>) 30		

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
			membutuhkan Pendidikan setiap tahun	
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah (per 10,000)			
	SMA/MA/SMK			
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)			
	SD/MI (per 10,000)	Belum tercapai (<) 601	1. Penempatan tenaga guru yang tidak efektif 2. Perbandingan antara jumlah Guru dengan jumlah siswa pada jenjang belum seimbang	1. Pemerataan sebaran guru 2. Penambahan jumlah guru secara proporsional
	SMP/ MTS (per 10,000)	melampaui (>) 737		
12	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah atas /MA/SMK (per 1000)	Belum tercapai (>) 93		
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (per 10.000)	Belum tercapai (<) 0,55		
14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pendidikan menengah (per 10.000)	Sesuai (=) 1,61		
15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)			
16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki (%)	Sesuai (=) 100	Adanya anak yang putus sekolah yang karena tidak ada upaya pemeliharaan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung menjadi buta huruf kembali (relapse illiteracy).	Penyediaan layanan pendidikan dasar secara besar-besaran melalui program wajib belajar untuk mendorong peningkatan kemampuan penduduk dalam membaca, menulis, dan berhitung.
17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	Melampaui (>) 97,71	Tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) menjadi kendala dalam penuntasana buta aksara	Bantuan biaya pendidikan dan pembinaan melalui jalur pendidkan Non Formal.
18	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	Melampaui (>) 147,26	Terbatasnya anggaran untuk peningkatan kualitas	Bantuan biaya Pendidikan bagi tenaga guru
2.	Kesehatan			
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Melampaui (>) 0.61	1. Rendahnya perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, 2. Rendahnya kulitas lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan	1. Meningkatkan perilaku masyarakat dan keluarga yang dapat menjamin kehamilan, kelahiran, dan perawatan bayi baru lahir yang lebih sehat
2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	Melampaui (>) 100		
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Belum mencapai (<) 5.79		

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
			pemenuhan gizi yang cukup. 3. Belum optimalnya mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita	2. Keaktifan dan prasarana kader dalam meningkatkan kunjungan bayi di posyandu 3. Peingkatan kapsitas tenaga medis
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Belum mencapai (<) 30.47	kualitas pelayanan persalinan, dan penanganan BBL yg kurang optimal segera setelah lahir dan bbrp hari pertama setelah lahir	Diperlukan kesiapan Pelayanan Kebidanan berkualitas yg berkesinambungan setiap saat (24jam/7hari) untuk menurunkan kematian ibu (dan neonatal)
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Melampaui (>) 30.47	komplikasi kebidanan yang tidak ditangani dengan baik dan tepat waktu	
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	Belum mencapai (<) 0.16	Menurunnya angka balita yang dilayani di Pos yandu	Meningkatkan kesadaran dan kulitas pelayanan Posyandu
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	Belum mencapai (<) 0.16	Belum optimalnya penyediaan jumlah fasilitas kesehatan yang didukung oleh ketersediaan tenaga medis.	Peningkatan kualitas saranan prasarana dan kualitas tenaga medis
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	Melampaui (>) 0.04	kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan belum maksimal	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	Melampaui (>) 0.63	1. Kurangnya jumlah dokter Ahli 2. Tidak meratanya sebaran dokter	1. Penambahan jumlah dokter ahli 2. Perlu dibuat regulasi/ aturan agar penempatan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	Melampaui (>) 0.63	1. Kurangnya tenaga medis 2. Tidak meratanya sebaran tenaga medis	1. Penambahan jumlah tenaga medis 2. Perlu dibuat regulasi/aturan agar penempatan tenaga medis disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	Melampaui (>) 86.23%	1. Kemampuan Bidan untuk	1. Peningkatan kapasitas bidan

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
			mengidentiifikasi komplikasi masih rendah 2. Puskesmas belum mampu melakukan penatalaksanaan pelayanan standar	2. Penguatan puskesmas
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan (%)	Melampaui (>) 101.67%	1. Tidak semua Bidan Desa menetap di wilayah kerjanya 2. ANC(Antenatal Care) terpadu yang berkualitas belum optimal 3. Tidak semua persalinan oleh nakes dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan	1. Penegakan regulasi tentang Bidan Desa 2. Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan 3. Peningkatan fasilitas pelayanan KIA disarana pelayanan kesehatan
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	Bekum tercapai (<) 93.75%	1. Mutasi petugas membawa dampak 2. Ketrampilan petugas terlatih 3. Sarana dan prasarana penunjang pemberian imunisasi yang terstandarisasi 4. Kantong-kantong daerah tak terjangkau imunisasi mempunyai risiko timbulnya dan menyebarnya penyakit- penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	1. Mengkaji dan Menganalisi data hingga merencanakan kegiatan ditingkat puskesmas, identifikasi masalah dan mencari solusi 2. Revitalisasi outreach (daerah sulit dijangkau) melalui pelayanan posyandu, pustu yang terjadwal antara petugas dan masyarakat 3. Memperkuat kemitraan dengan lintas sektor terkait, Lembaga pendidikan, Organisasi
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	Sesuai (=) 100	Masih adanya persepsi masyarakat yang keliru terhadap gizi buruk	1. Penanganan Medis secara intensif 2. Penanganan Gizi Buruk ditingkat RumahTangga (PascaRawat) 3. Perlu regulasi tentang Ketenangaan 4. Penyediaan Buffer Stock Bahan Antisipasi KLB Gizi Buruk
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar		Rendahnya asupan kalori banyaj ditemukan pada warga miskin	Penurunan angka kemiskinan

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (%)			
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	Melampaui (>) 98.48%	1. Ketersediaan tenaga kesehatan berkompeten, 2. kualitas sistem pelayanan kesehatan anak 3. Partispasi masyarakat	Peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan dan sitem pelayanan Kesehatan anak serta peningkatan partispasi masyarakat
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (Rasio)	Sesuai (=) 0.00%	1. Rendahnya akurasi surveilans AFP 2. Data AFP yang belum akurat	1. Penyaiapan tenaga surveilans 2. Penyaiapan data AFP
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	Melampaui (>) 9.20%	Kondisi lingkungan, social ekonomi, mal nutrisi dan imuninsasi	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya PHBS
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	Melampaui (>) 118.91%	Pemahaman masyarakat tentang TB belum optimal	Mengefektifkan AKMS (Advokasi, Komunikasi, Mobilisasi Sosial) Program TB
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	Melampaui (>) 224.79		
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Seuai (=) 0.00		
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	Melampaui (>) 91.41%	Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan melakukan Program TBDOTS (Directly Observed Treatment Short/ Pengobatan Jangka Pendek)	Melakukan intervensi ke Rumah Sakit untuk melakukan Program TBDOTS
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	Belum tercapai (<) 39.76%		
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	Sesuai (=) 100%	1. Angka bebas jentik masih rendah 2. Masih terjadi KLBD BD dibeberapa lokasi	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 2. Peningkatan PHBS
25	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	Melampaui 76.59	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola hidup sehat dan bersih	Perbaikan kondisi lingkungan, social ekonomi dan imunisasi masyarakat
26	Angka kejadian Malaria (per 100.000)	Belum tercapai (<) 0.62		
27	Tingkat kematian akibat malaria (per 1000)	Sesuai (=) 0.00	Lambatnya penanganan oleh karena pasien terlambat diantar ke Faskes	Pemahaman ciri dan tanda terjangkitnya malaria
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	n/a		

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (%)	Sesuai (=) 100%	Masih rendahnya kesadaran warga untuk membersihkan lingkungannya	Menggalakkan kegiatan gotong royong dan kerja bakti dilingkungan masing-masing
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (per 100.000)	Belum tercapai 0.04	Window periode dan fase asimtomatik (tanpa Gejala)	Advokasi dan bimbingan P4GN
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir (per 1000)	n/a		
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	Belum tercapai (<) 0.00	Rendahnya pengawasan dan bimbingan orang tua	Advokasi dan bimbingan P4GN
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	n/a	Jumlah Kunjungan pasien miskin disarana Kesehatan masih minim	Peningkatan akses layanan Kesehatan
34	Cakupan kunjungan bayi (%)	Belum tercapai (<) 99.76%	Kunjungan bayi pada faskes belum optimal	Peningkatan kesadaran orang tua
35	Cakupan puskesmas (%)	Sesuai (=) 133.33	Mutu layanan puskesmas belum memenuhi standar dan kualitas yang dipesyaratkan	penguatan sistem kesehatan, menjamin pelayanan yang terjangkau, meningkatkan akses terhadap pelayanan yang bermutu dan Membangun Kapasitas.
36	Cakupan pembantu puskesmas (%)	Belum tercapai (<) 62.50%	Tenaga Medis yang masih terbatas	Penambahan tenaga medis
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	Melampaui (>) 100.00%	Jumlah ibu hamil yang membutuhkan pelayanan /kunjungan semakin meningkat	Peningkatan kualitas dan penambahan tenaga medis untuk meningkatkan layanan kunjungan
38	Cakupan pelayanan nifas (%)	Melampaui (>) 99.53%	Tidak ada dukungan dana dan transportasi kunjungan nifas ke rumah pasien,	Penyiapan kendaraan dan tambahan dana operasional
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	Melampaui (>) 76.42%	Belum adanya Indikator untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi.	Pemanfaatn SIM dan penamabahan tenaga pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter, dan bidan di sarana pelayanan kesehatan

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
40	Cakupan pelayanan anak balita (%)	Melampaui (>) 73.92%	Pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang belum optimal	Peningkatan kualitas apparat dalam hal pemanfaatan buku KIA
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	Sesuai (=) 100%	1. Surveilans gizi termasuk penemuan kasus secara aktif 2. Pendampingan kasus gizi buruk	Pelaksanaan Bintek dan peningkatan supervise berjenjang
42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	Belum mencapai (<) 97.93%	Pelatihan petugas, guru UKSUKGS dan dokter kecil belum optimal	1.Pembinaan guru dan program ekstrakuriukuler dokter kecil di sekolah 2.Pengalokasian dana dari sekolah
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	n/a		
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	Sesuai (=) 100%	Rendahnya kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri.	1. Program Kelurahan Siaga 2. Pemahaman mengenai prilaku hidup bersih melalui program PHBS 3. Surveilance berbasi masyarakat
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	Sesuai (=)	Masih ada stigma penyakit epidemologi adalah aib bagi keluarga	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait KLB dan epidemologi
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Pekerjaan Umum:			
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	Sesuia (=) 69.57	Masih ada jaringan jalan yang belum berkualitas baik terutama pada daerah pinggiran kota	Meningkatkan kualitas jaringan jalan
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	Sesuai (=) 28	Masih banyak jalan yang belum memenuuhi standar dan beum seimbang	Cepatnya laju pertumbuhan pengguna kendaraan bermotor
3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	n/a		
4	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam) (%)	Sesai (=) 60	1. Rendahnya kinerja jaringan jalan 2. Terbatasnya jumlah ruas jalan yang diperbaiki tiap tahunnya	1. Peningkatan kinerja jaringan jalan Penambahan jumlah ruas jalan yang diperbaiki tiap tahunnya

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	Sesuai (=) 1.3	Masih terbatasnya jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal1,5 m hanya terdapat dibeberapa kecamatan antara lain	Peningkatan jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal1,5 m hanya terdapat dibeberapa kecamatan antara lain
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	n/a	Sempadan jalan tidak difungsikan secara proposrsional	Perlu regulasi terkait pemanfaatan sempadan jalan
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	Sesuai (=) 91	Belum terlaksananya program L2T2	Perlu ada komitmen dan regulasi yang dibuat.
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	Sesuai (=) 40	Masih banyak sempadan sungai yang dijadikan sebagai temlat tinggal	Perlu regulasi dan penegakan perda sempadan sungai
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	Sesuai (=) 15	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pemeliharaan darinase	Perlu penegakan perda terkait drainase
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	Sesuai (=) 15	Masih ada wilayah yang tergenang Ketika musim hujan.	Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk membersihakan drainase dari sampah.
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	Sesuai (=) 4	Belum ada titik rawan lonsor yang dipetakan dalam sebuah dokumen	Pembuatan dokumen wilayah rawan bencana
12	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	Sesuai (=) 71.5	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk merawat dan memelihara irigasi yag sudah dibanguna	Dibentuk kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP)
13	Rasio Jaringan Irigasi (per 1000 Ha)	Sesuai (=) 19.1	Masih besarnya persentase lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya air.	Peningkatan rasio lahan budidaya yang terairi oleh jaringan irigasi danpeningkatan kemampuan petani untuk mengelola sumberdaya air
14	Persentase penduduk berakses air minum (%)	Sesuai (=) 100	Masih terbatsnya akses air minum aman	Perlu penambahan akses air minum berkategori aman
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	Sesuai (=) 90	Koordinasi dengan sejumlah stake holder terkait yang membutuhkan penanganan akses jalan dan	Meningkatkan koordinasi antar stake holder melalui Rapat, pertemuan dan FGD

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
16	Persentase areal kawasan kumuh (%)		jembatan, belum terjalin dengan baik seperti akses jalan jembatan ke fasilitas kesehatan, pendidikan, sentra produksi/budidaya.	
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Sesuai (=) 4,6	Rendahnya kesadaran masyarakt merawat dan memelihara sarana dan prasarana kebersihan.	Mengiktu sertakan KSM dan KPP dalam kegiatan Sosialisasi kebersihan dan PHBS
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	Sesuai (=) 1.6	Terbatsanya lahan untuk lokasi pemakaman umum	Koordinasi dengan tokoh masyarakat dan Agsma
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	Sesuai (=) 1.8	Terbatasnya lahan untuk persiapan pemakaman	Penyaiapan lahan untuk pemakaman umum di Kota palopo
3	Penataan Ruang:			
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB			
	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)			
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	Sesuai (=) 76.83	belum terealisasinya keberadaan RTH khususnya kawasan perkotaan sebagaiman arahan UU No. 26/2007 tentang penataan ruang	Penambahan luasan RTH di Kota palopo sesuai yang disyaratkan
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	Sesuai (=) 50	Belum terawasinya dengan baik pendirian bangunan yang dilakukan oleh masyarakat	Pendataan dan penertiban bangunan yang ber IMB yang harus sesuai dengan RTRW
4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	n/a		
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	n/a		
6	Ketaatan terhadap RTRW	Sesuai (=) 100	1. Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang 2. Belum tersedianya instrument pengedalian keruangan yang optimal terhdap pelanggaran rencana tata ruang	Penegakan perda tentang RTRW khususnya terkait pengendalian pemanfaatan ruang
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	Rasio rumah layak huni	Melampuai (>) 0.168	Masih besarnya jumlahr umah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBRterhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan.	1. Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah susun; 2. Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR;
2	Rasio permukiman layak huni (%)	Belum tercapai (<) 92.26	Masih terdapat luasan kawasan permukiman yang belum layak huni.	Peningkatan kualitaslingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan.
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	Melampauia (>) 91.44	Masih ada warga yang tinggal dirmah yg tidak layak huni	Penyiapan program rumah susun sewa
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	Belum tercapai (<) 93.58	Rendahnya akses MBR untuk medapatkan rumah karena harga yang tinggi	
5	Persentase pemukiman yang tertata (%)	Belum tercapai (<) 99.25	Masih terdapat pemukiman yang belum tersentuh program penataan kawasan	Penyiapan baseline data lokasi Kawasan pemukiman yang belum tersentuh program penataan.
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	Melampaui (>) 0.15	Bertambahnya lingkungan kumuh hasil baseline data terkahir	Singkronisasi data Kawasan kumuh yang telah tertangani.
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	Melampaui (>) 4.38		
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	Melampaui (>) 1.95	Banyaknya urbanisasi memicu tumbuhnya pemukiman kumuh baru	Penertiban dan operasi yustisi untuk penegakan aturan
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	Melampaui (>) 25.79	Rendahnya kesadaran masyarakay untuk merawat PSU yang telah dibanguan oleh Pemerintah	Sosialiasasi dan mengaktifkan kelompok penerima dan pemelihata ditingkat kelurahan

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	1	Banyak Anggota Linmas tidak terdafta dan elalu berganti	Perbaikan tata Kelola dan data base
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	Banyaknya anggota masyarakat yang melanggar karena	Penegakan perda
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Melampaui (>) 22.5	Semakin banyaknya pemukiman baru yang menciptakan wilayah yang padat penduduk	Penambahan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Bekum mencapai (<) 65.59		
5	Persentase Penegakan PERDA	Sesuai (=) 100	Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap regulasi yang telah dibuat oleh pemkot Palopo	Sosialisasi dan advokasi kepada tokoh masyarakat
6.	Sosial			
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	Melampuai (>) 54.97	1. Belum akuratnya data PMKS. 2. Belum akuratnya kreiteria PMKS penerima bantaun	1. Optimalisasi ketersediaan data PMKS yang akurat 2. Penyediaan SOP dan penentuan kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	Melampuai (>) 55.09	Masih terbatasnya anggaran yang tersedia	Perlu perhatian dari TAPD
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	60.30	Belum optimalnya pengelolaan SPM	Penerapan Juknis SPM Bidang Sosial
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	n/a		
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	Sesuai (=) 100	1. Belum optimalnya pengelolaan saran dan parsarana Kesehatan 2. Terbatsanya tenaga medis yang melayani	Optimalisasi dan penambahan tenaga Kesehatan
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	Sesuai (=) 100	Masih kurangnya WKBSM yang dibina	Penyaiapan data base untuk pembinaan WKBSM

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	Sesuai (=) 100	Beum tersedia tempat pengunsian yang permanent selama masa tanggap darurat	Penyediaan saana dan prasarana tempat pengungsian yang permanet.
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	Sesuai (=) 100	Terbatsanya sarana dan prasarana evakuasi	Optimalisasi sarana dan parsarana evakuasi
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	Melampaui (>) 41.43	Semakain bertambahnya penyandang cacat fisik mental dari luar kota	Pendataan penyandang cacat fisik di Kota Palopo
Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1	Tenaga Kerja			
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Per 1000)	Belum mencapai (<) 9.50	Belum adanya regulasi daerah tentang ketenagakerjaan	Penetapan regulasi daerah tentang ketenagakerjaan dan implementasiny
	Angka sengketa pengusaha-pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	Melampaui (>) 2.55		
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	Belum mencapai (<) 11	Tidak adanya kesepahaman antara pihak buruh dan	Meningkatkan peran pemerintah daerah dan lembaga lainnya dalam penyelesaian
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	Melampaui (>) 53.12	1. Terbatasnya lapangan kerja 2. Ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja yang tersedia	1. Pembukaan lapangan kerja baru 2. Optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK)
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	Seuaia (=) 26	Kurangnya pemahaman tentang Jamsostek bagi tenaga kerja	Perlu pemahaman/sosialisasi tentang keberadaan jamsostek
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	Belum mencapai (<) 1.13	Masih ada tenaga kerja yang belum tercover program jamsostek	Akselerasi dan sosialisasi tentang pentingnya program jamsostek bagi Perlindungan buruh dan tenaga kerja
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0		
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	Sesuai (=) 0.8	Masih lemahnya pengawasan	Peningkatan kinerja dari Dinas Tenaga Kerja
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	Sesuai (=) 0.5	Belum tertibnya pelaporan dari setiap perusahaan	Peningkatan pengawasan dan kinerja Dinas Tenaga Kerja
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	Melampaui (>) 46.45	rendahnya akses ke pendidikan menengah berbasis vokasi	Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan berbasi vokasi

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	0	Belum terlaksananya pelatihan berbasis masyarakat	Optimalisasi kegiatan pelatihannberbasi masyarakat
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	Sesuai (=) 8	1. Terbatasnya akses untuk mendapatkan pelatihan berbasi wirausah 2. Pelatihan berbasis wirausaha sangat mahal	Menggiatkan kelompok kelompok belajar masyarkat berbasis wirausaha
12	Rasio lulusan S1/S2/S3			
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	Belum tercapai (<) 9.7	Kurangnya peluang untuk mendapatkan peningkatan kapasitas	Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	Belum tercapai (<) 7	Belum mampu memenuhi target SDGs 30 %	Pernaikan system rekruitmen dan kaderisasi partai
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	Sesuai (=) 3.2	Masih lemahnya posisi perempuan di Lembaga swasta	Perempuan banyak ditempatkan pada posisi front office
4	Rasio KDRT (per 10.000)	Sesuai (=) 3	Masih ada kasus KDRT yang diesbabkjan oleh tekanan ekonomi	Pembukaan lapangan kerja baru
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)			
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	Sesuai (=) 44.82	TPAK Perempuan masih dibawah TPAK laki-laki	pengarusutamaan gender dalam aspek ketenagakerjaan
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	Sesuai (=) 100	Masih ada KDRT yang terjadi di tengah-tengah masyarakat	Penegakan aturan terkait Kekerasan dalam rumah tangga
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)			
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan			

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	terpadu.(%)			
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	Sesuai (=) 100		
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)			
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	Sesuai (=) 20	Masih terdapat kekerasan perempuan dan anak	Evaluasi dan pemantauan dari program pemerintah yang telah dilaksanakan
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)			
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD			
	APM Perempuan pada Tingkat SD	Sesuai (=0 100	Masih terdapat ketimpangan dari segi jumlah	Peningkatan pemahaman masyarakat bahwa 1. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia 2. esetaraan pendidikan perempuan akan memberikan peran aktif perempuan dalam pembangunan dan merupakan determinan yang penting dalam pembangunan ekonomi.
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD	Sesuai (=) 100		
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP			
	APM Perempuan pada Tingkat SMP	Sesuai (=) 81	1. Masih ada perempuan yang belum bersekolah tepat waktu 2. APM laki-laki lebih rendah dari APM Perempuan	1. Peningkatan kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya 2. Program Pendidikan berbasi gender 3. Maksimalisasi Perda PUG
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP	Sesuai (=) 77		
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA			
	APM Perempuan pada Tingkat SMA	Sesuai (=) 70		
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMA	Sesuai (=) 71		
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Sesuai (=) 42.27		
	APM Perempuan yang masuk Tingkat	n/a		

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	Perguruan Tinggi			
	APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a		
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a		
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian			
3	Pangan			
1	Ketersediaan pangan utama (%)	Melampaui (>) 23.04	Tingginya tingkat urbanisasi akan berpengaruh pada ketersediaan pangan utama	Penguatan peran pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam menekan alih fungsi lahan
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	Melampaui (>) 4.085	Masih terbatasnya variasi asupan aenergi dan protein	Peningkatan variasi asupa energi dan protein
	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)	Melampaui (>) 3.981,00	Keragaman pangan yang terbatas	sistem distribusi dan perdagangan pangan antar daerah dan kecamatan untuk memperkuat akses pangan masyarakat baik secara fisik, sosial, dan ekonomi sangat diperlukan.
	Ketersediaan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	Melampaui (>) 104.15		
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Belum tercapai (<) 86.49	Masih rendahnya Pengawasan dan	Perlu dibuat tim khusus terkait pembinaan dan keamanan pangan
4	Pertanahan			
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	Sesuai (=) 1.6	Masih bada tanah yang bersertifikat di Kota Palopo	akses dan advokasi masyarakat tentang pentingnya bukti legalisasi kepemilikan tanah.
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	Sesuai (=) 2	Masih ada kasus tanah negara terkait pemanfaatan	Upaya penyelsaian melalui mediasi APH
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	Sesuai (=) 100		
5	Lingkungan Hidup			
	Kabupaten/Kota			
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Belum ada	Terbatasnya alokasi anggaran	Opti alisasmi alokasi anggaran
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Belum ada	Belum ada dokumen RPPLH	Penyusunan dokumen RPPLH oleh Dinas LH Kota Palopo

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Sudah ada	Belum menjadi rujukan dalan proses perencanaan	Advokasi dan sosialisasi regulasi terkait KLHS
4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Cemar ringan	Kurannya kesadaran masyarakat dalam hal menjaga sumber air	Kampanye perbaikan kualitas air
5	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Baik	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas udara	Advokasi dan sosialialisai
6	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	n/a		
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	27.27	Masih banyak pengusaha yang belum taat izin lingkungan	1. Sosialisasi regulasi terkait izin lingkungan 2. Penegakan aturan terkait izin lingkungan
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	n/a		
	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina (Orang)	n/a		
	Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum (Orang)	n/a		
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	n/a		
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	n/a		
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	n/a		
12	Penetapan hak MHA	n/a		
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (%)	n/a		
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana (%)	n/a		
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	n/a		
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Kali)	Tidak ada		
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah	Sesuai (=) 100	1. Belum ada dokumen RPPL yang menjadi acuan PPLH 2. Rendahnya kesadaran	1. Pengadaan Dokumen RPPL sebagai pedoman pengendalian

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)		masyarakat/Pengusaha/Investor terkait PPLH	2. Menyusun rencana Aksi PPLH
18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	Melampaui (>) 90,26	Masih rendahnya partispasi masyarakat	Sosialisasi dan bimbingan untuk meningkatkan partispasi masyarakat
19	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	Belum tercapai (<) 4,11	TPS 3 R belum dimanfaatkan secara maksimal	Optimalisasi pemanfaaatn TPS 3 R
20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	Melampaui (>) 67,83	Semakin banyaknya area pemukiman baru	Pengaturan jadwal dan penambahan armada pengangkutan
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Melampaui (>) 87,020	Masyarakat tidak disiplin membuang sampah di TPS	Perlu sosialisasi terkait peningkatana kesadaran masyarakat.
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Melampaui (>) 78.53		
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	Belum ada	Rendahnya minat swasta untuk mengelola sampah di Kota Palopo	Belum ada pedoman Kerjasama yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Palopo
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Belum ada	Belum ada data base terkait swasta yang mengelola sampahnya sendiri	Penyiapan MIS yang terintegrasi
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Belum tercapai (<) 0.67	Masih ada penduduk yang belum berKTP	Perlu penegakan aturan terkait kepemilikan dokumen kependudukan
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Melampaui (>) 0.94	Belum semua Ibu hamil melahirkan di Rumah Sakit	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melahirkan di rumah sakit
3	Rasio pasangan berakte nikah	Belum tercapai) (<) 0.38	Masih ada warga yang belum memiliki dokumen akte nikah	Program Nikah Massal
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Sesuai (=) ada	Sinkronisasi data yang belum optimal	Optimalisasi program satu data
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sesuai (=) sudah	Urbanisasi yang tidak terkoordinir	Operasi Justisi
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	Melampaui (>) 93.84	Keterlambatan penyediaan dokumen KTP	Koordinasi dengan Kemendagri
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	Sesuai (=) 100	Masih ada warga yang melahirkan menggunakan jasa bidan tradisonal	Sosialisasi dan advokasi terkait penerbitan Akta kelahiran
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	Sesuai (=) 100	Kurangnya biaya pemeliharaan	Dikoordinasikan dengan BPKAD
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	Belum berfungsi secara maksimal	Optimalisasi fungsi dan peran LPM
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	2.5	Pembinaan dasawisma belum berjalan optimal	Optimalisasi pembinaan Dasawisma
4	Persentase LSM aktif (%)	5	Banyak LSM yang belum terdaftar	Koordinasi dengan Kesbang Linmas
5	Persentase LPM Berprestasi (%)	5	Masih lemahnya daya kreatifitas LPM	Peningkatakn kapasitas SDM LPM
6	Persentase PKK aktif	100		
7	Persentase Posyandu aktif (%)	100	Banyak pos yandu belum memiliki tempat sendiri	Optimalisasi posyandu
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n/a		
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	n/a		
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Melampaui (>) 2,18	Berpengaruh pada kualitas kehdiupan masyarakat	Akselerasi program keluarga Berencana
2	Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	Melampauia (>) 2,31	Berpotensi meningkatkan laju pertumbuhan penduduk	Pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak ada	Belum ada dokumen Grand Design kependudukan	Pengalokasian anggaran untuk penyusunan grand design kependudukan
4	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	n/a		
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	Belum mencapai (<) 37%	Belum semua OPD ikut berperan dalam pengendalian penduduk	Pencanangan KB sebagai gerakan sehingga semua OPD bertanggung jawab dalam mensukseskan gerakan tersebut.
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	n/a		

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	n/a		
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	n/a		
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Melampaui (>) 2		
10	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Sesuai (=) 2	Masih rendahnya kesadaran ber KB 2. Masih kurangnya partisipasi tokoh agama dalam penyuluhan KB	Melakukan pembinaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi wanita dan remaja
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	Belum mencapai (<) 75,73	Masih ada pasangan yang belum menggunakan alat kontrasepsi	Peningkatan pemahaman tentang pentingnya pemakaian kontrasepsi .
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Melampaui (>) 18,6	Rendahnya pengawasan orang tua terhadap tingkat pergaulan remaja	Upaya pencegahan melalui edukasi, konseling kepada ramaj, disekolah maupun diperguruan tinggi
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	Sesuai (=) 0,3%	1. Banyak PUS tidak menggunakan alat KB untuk mencegah / menunda kehamilan 2. Banyak PUS belum terlayani dikarenakan beberapa faktor, seperti masalah budaya, akses pelayanan yang jauh, atau tidak mengetahui program KB (disebut dengan unmet need).	1. Pelaksanaan program pemakaian alat KB secara gratis 2. Pelaskanaan sosialisasi terkait Unmeet 3. Penyiapan data base Pasangan usia subur
14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	Melampaui (>) 12,35		
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	Belum mencapai (<) 21,92		
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	Belum mencapai (<) 32%	Pengaruh karakteristik dan tingkat pendidikan	Sosialisasi dan pembinaan kepada warga pengguna kontrasepsi
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	Belum mencapai (<) 74,11	1. Rendahnya Komitmen antar sector terkait dan mitra kerja, dalam memberikan pelayanan secara integrative dengan BKB.	Pelatihan dan pembinaan bagi kader-kader BKB secara Holistik
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	Belum mencapai (<) 60,40		

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
			2. Rendahnya Kualitas Data BKB 3. Rendahnya kualitas kader & PLKB, 4. Rendahnya kesadaran orangtua untuk aktif dalam kegiatan BKB.	
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	Melampaui (>) 54,38	1. Rendahnya Kualitas Data BKL 2. Rendahnya kualitas kader & PLKB,	Pelatihan dan pembinaan bagi kader-kader BKL secara Holistik
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	n/a		
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	n/a		
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	Sesuai (=) 100	Masih rendahnya pemahaman tupoksi dari apparat PKB/PLKB	Peningkatan pemahaman Tupoksi dan peran penting PKB/PLKB
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	Melampaui (>) 26,42	1. Terbatasnya data dan informasi cakupan PUS dan KB 2. Masih kurangnya sumber daya untuk program UPKKS	Penyiapan dana operasional untuk pendataan serta upaya peningkatan program UPPKS dengan melibatkan pihak ketiga dan swasta melalui dana CSR.
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Sesuai (=) 100	Terbatasnya data mengenai rasio PPKB	Penyiapan alokasi anggraan secara proporsional.
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	Sesuai (=) 8	Terbatasnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi	Penambahan alat dan obat kontrasepsi.
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes (%)	Sesuai (=) 65		
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	Sesuai (=) 100	1. Kesiapan institusi untuk melaksanakan pelayanan KB dalam JKN belum maksimal. 2. Sistem informasi Fasilitas Kesehatan antara BKKBN dan BPJS Kesehatan belum terpadu.	1. Memberi informasi data fasilitas kesehatan (Faskes), 2. Melakukan sosialisasi pelayanan KB dalam JKN. 3. Melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, pengawasan dan evaluasi Program KB dalam JKN

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Kelurahan (%)	Melampaui (>) 66	Belum diterapkannya system satu data	Penerpana system satu dan dan sosialisasi satandar dalam pelayanan KB.
29	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	n/a		
30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	n/a		
31	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	n/a		
32	Rata-rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	n/a		
33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (%)	n/a		
9	Perhubungan			
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	Belum mncapai (<) 1.323.604	Hadirnya Bandar Udara lagaligo berpengaruh pada jumlah penumpang	Peningkatan fsilitas angkutan dan saana transportasi lainnya
2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	Sesuai (=) 2	Tidak da penambahan rute baru	Evaluasi rute yang lama untuk upaya pengembangan layanan
3	Jumlah uji kir angkutan umum (Unit)	Belum mecapai (<) 297	Sarana Prasaran uji Kir yang belum maksimal	Optimalisasi tempat pengujian KIR
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	Sesuai (=) 2	Belum ada penambahan lokasi terminal baik laut maupun darat	Pengembangan sarana terminal baru.
5	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	Melampaui (>) 12.32	Banyak kendaraan angkutan darat yang perlu di remajakan	Peningkatan pengawasan terhadap angkutan darat yang layak jalan.
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	Melampaui (>) 24.61	Rendahnya pengawasan terhadap kepemilikan Uji Kir	Peningkatan pengawasan kepemilikian Uji Kir.
7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	Belum mencapai (<) 55.60	Terbatasnya alokasi anggaran untuk pemasangan rambu	Optimalisasi alokasi anggaraan secara proporsional.
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	Belum mencapai (<) 12		
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang/Tahun)	Belum mencapai (<) 1.323.252	Belum ada Managemen Information System (MIS) untuk mendukung	Advokasi kepada pimpinan untuk penyediaan MIS dalam

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (M3/Tahun)	Melampaui (>) 605.594	tersedianya data base	rangka mendukung layanan
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Melampaui (>) 2.094.130		
10	Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	Sesuai (=) 3.45	Lembaga KIM belum berfunsgi optimal	Optimalisai peran dan fungsi KIM di tenganh-tengah masyaraat
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.86	Masih ada area yang belum terjangkau akses layanan komunikasi	Insentif pemberian izin pendiran BTS
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	NA		
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet			
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi			
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah			
1	Persentase koperasi aktif (%)	Sesuai (=) 71	Rendahnya peran aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan koperasi 2. Kurangnya regulasi sector ekonomi untuk mendororng kegiatan usaha koperasi	Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi 2. Pembuatan regulasi sector ekonomi yang berpihak pada koperasi
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	Sesuai (=) 30	Masih rendahnya kemampuan UKM non BPR dalam mengakses sumber2 pendanaan	Fasilitasi melalui program kredit Lunak
3	Persentase BPR/LKM aktif (%)	n/a		
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	Sesuai (=) 100	Masih rendahnya akses UMKM ke fasilitas Keuangan	Kemudahan akses terhadap Lembaga untuk penguatan modal usaha
12	Penanaman Modal			
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Belum tercapai (<) 78	Masih kurangnya sarana dan infrakstruktur daerah terkait informasi peluang dan potensi investasi	Adanya regulasi yang mendukung kemudahan berinvestasi dan penyusunan potensi serta peluang investasi yang lengkap
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	Sesuai (=) 0	Masih kurangnya regulasi dan infrastruktur	Meningkatkan promosi investasi dan pelayanan perizinan yang transparan dan cepat

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	Belum tercapai (<) 130.740	Belummjelas pembagian jenis usaha yang terbukan dan tertutup	Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
4	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	Belum tercapai (<) 8	Masih rendahnya serapan tenaga kerja oleh PMDN	Peningkatan kapasitas ca;on tenaga kerja dan pemberian kemudahan perizinan bagi para investor
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Tidak tercapai (<) 42.48	Realisasi PMDM masih fluktuatif	Kemudahan iklim investasi
13	Kepemudaan dan Olah Raga			
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	Melampaui (>) 70.2	Belum terpolanya pemberdayaan pemuda	Meningkatkan fasilitasi terhadap pemberdayaan pemuda dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan
2	Persentase wirausaha muda (%)	Tidak tercapai (<) 1.77	Terbatanya alokasi anggaran untuk Diklat dan pembinaan Wirausaha Muda	Alokasi anggaran secara proporsional
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	Melampaui (>) 57.14	Belum terpolanya permaslahan dan pembibitan olahraga	Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	Tidak tercapai (<) 32.53	Masih kuragnya Diklat/Bimtek sertifikasi pelatih yang dilaksanakan	KONI Focus pada pembinaan pelatih bersertifikat
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	Tidak tercapai (<) 28.22	Masih kurangnya sarana dan prasarana gelanggang remaja	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana olah raga
6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	Tidak tercapai (<) 6	Masih kurangnya sarana dan prasarana olah raga	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana olah raga
7	Jumlah prestasi olahraga (Cabang)	Tidak tercapai (<) 3		
14	Statistik			
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Belum	Belum tersedia sumber daya yang memadai untuk megelola system data yang terintegrasi	Pelatihan dan pembinaaan SDM pengelola system informasi manajemen
2	Buku "Kota dalam angka"	ada		
3	Buku "PDRB"	ada		
15	Persandian			
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (%)	Melampaui (>) 75.51	1. Belum semua OPD memanfaatkan fsilitas sandi 2. Terbatsanya tenaga Sandi	1. Dibutuhkannkomitmen kuat untuk memanfaatkan fasilitas sandi

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
				2. Perlunya penambahan tenaga sandi terlatih
16	Kebudayaan			
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Melampauai (>) 19	Masih kurangnya fasilitas pemerintah Rendahnya partisipasi masyarakat	Adanya agenda yang tersistematis
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	Sesuai (=) 100	Masih banyak warisan budaya yang belum terdaftar	Inventarisasi warisan cagar budaya
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)			
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Melampaui (>) 53	Masih rendahnya alokasi anggaran untuk pengelolaan cabar budaya	Disediakan dana atau alokasi anggaran
17	Perpustakaan			
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	Sesuai (=) 9.32	Suasana perpustakaan yang tidak kondusif dan bising	Penigkatan fasilitas ruang baca
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Sesuai (=) 47	Sistim katalog buku yang masih manual	Digitalisasi katalog buku koleksi perpustakaan
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1000)	Sesuai (=) 1.20	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan bagi pengembangan kualitas bangsa	Sosialisasi terkait pemahaman tentang pentingnya Perpustakaan dalam engemabngan kualitas SDM
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Melampaui (>) 14,958		
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Belum tercapai (<) 404	Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pemgadaan buku	Pengalokasian anggaran secara proporsional
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	Sesuain(=) 100	Masih terbatasnya jumlah tenaga teknis dan putakawan.	Peningkatan kualitas sumber daya pustakawan
18	Kearsipan			
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Sesuai (=) 24.49 %	Belum ada kantor/Depo Arsip yang representatif	Pengadaan sarana prasaran perkantoran
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Sesuai (=) 8	Pengelola arsip masih terbatas	tenaga fungsional di perangkat daerah belum ada dan kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang berada di perangkat daerah
	Layanan Urusan Pilihan			
1.	Pariwisata			
1	Kunjungan wisata (%)	Melampaui (>) 106.18	Promosi wisata belum maksimal	Sinergi dengan semua stakeholder terkait
2	Lama kunjungan Wisata (Rata-rata	Sesuai (=) 2	Destinasi wisata belum dikelola secara	Pelibatan pihak ketiga dalam

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)		baik dan profesional	pengelolaan destinasi wisata
3	PAD sektor pariwisata (%)	Melampaui 5.17	Sektor pariwisata belum menjadi prioritas	Akselerasi sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif
2.	Pertanian			
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Belum tercapai (<) 16.39	Semakin banyak lahan pertanian yang beralih fungsi	Penegakan perda tentang RTRW dan pengendalian pemanfaaat ruang
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	n/a		
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a		
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a		
5	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)			
	Padi	Belum tercapai (<) 20.355,7	Kepemilikan lahan pertanian semakin sempit	Pembuatan Perda LP2B
	Jagung	Melampaui (>) 7.493,61	Rendahnya minat untuk menanam jagung	Perbaikan harga jagung ditingkat petani
	Ubi Kayu	n/a		
	Ubi Jalar	n/a		
	Sagu	Belum mencapai (<) 2,23	Program Sagu Tekno Park Belum berjalan maksimal	Koordinasi dengan LIPI dan Bappenas untuk percepatan Sagu Tekno Park.
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)	n/a		
	Padi	Melampaui (>) 6.42	Kepemilikan lahan pertanian semakin sempit	Pembuatan Perda LP2B
	Jagung	Belum tercapai (<) 6.75	Rendahnya minat untuk menanam jagun	Perbaikan harga jagung ditingkat petani
	Ubi Kayu	-		
	Ubi jalar	-		
	Sagu	Melampaui (>) 31.32	Berkurangnya luasan kebun sagu masyarakat	1. Pembibitan dan penanaman Kembali 2. Program Sagu Teknopark
7	Cakupan bina kelompok petani	Melampuai (>) 56.21	Kelompok tani semakin banyak, alokasi bantuan sangat terbatas	Pelibatan pihak ketiga melalui dana CSR untuk pembinaan kelompok tani

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
3	Energi dan Sumber Daya Mineral			
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	n/a		
2	Rasio ketersediaan daya listrik	n/a		
4	Perdagangan			
1	Ekspor Bersih Perdagangan (Nilai/Juta)	Sesuai (=) 1.004.746		
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	n/a		
5	Perindustrian			
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	Belum mencapai (<) 2.45	Masih banyak pengrajin yang belum bergabung dalam kelompok	Peningkatan pembinaan dan sosialisasi program bantuan pemerintah kepada kelompok pengrajin
6	Transmigrasi			
1	Persentase transmigran swakarsa	Belum ada	Belum tersedia lahan untuk para trasmigran	Penyiapan dan penataan lahan transmigrasi
7	Perikanan			
1	Produksi perikanan (%)	Belum mencapai (<) 93,33	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan	Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan kawasan produksi perikanan
2	Konsumsi ikan (%)	Belum tercapai (<) 98,54	Produksi dengan kebutuhan daging ikan Belum seimbangnya	Peningkatan produksi perikanan
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	Melampaui (>) 8,89	Masih rendahnya kualitas kelembagaan kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan	Peningkatan SDM nelayan. Pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	Belum mencapai (<) 10,99	Masih rendahnya produksi kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan	Pemanfaatan teknologi pada proses penangkapan, pemgolahan dan juga pemasaran
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	n/a		
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	n/a		
7	Nilai tukar nelayan	Melampaui (>) 107,62	Mutu dan hasil tangkapan masih rendah	Pelaksanaan Bimtek dan diklat Pra dan Pasca tangkapan
	Penunjang Urusan			
1.	Perencanaan Pembangunan			

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Sesuai (=) ada	1. Masih terbatasnya data yang valid 2. Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan 3. Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan perencanaan pembangunan	1. Koordinasi antar bidang dn sektor dalam hal penyiapan data . 2. Peningkatan SDM dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan 3. Peningkatan pemahaman regulasi
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Sesuai (=) ada		
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Sesuai (=) ada		
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Sesuai (=) ada	1. Masih terbatasnya data yang valid 2. Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan 3. Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan perencanaan pembangunan	
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	Belum mencapai (<) 98		
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	Sesuai (=) 100		
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	n/a		
2.	Keuangan			
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Sesuai (=) WTP	1. Belum ada survey terkait indek kepuasan layanan . 2. Masih ada kendala dalam hal ketepatapn waktu pelayanan 3. Masih ada kendala dalam hal ketepatan waktu penetapan APBD	1. Penegakan aturan 2. Pengetatan dalam hal pelaksanaan SOP
2	Persentase SILPA	Sesuai (=) 0 %		
3	Persentase SiLPA terhadap APBD	Melampaui (>) 3.56		
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	Sesuai (=) 0		
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	melampaui (>) 20.17 %		
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	Melampaui (>) 29.59		
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)	Melampaui (>) 72 %		
	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)	Melampaui (>) 56.7		
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	Belum mencapai (<) 43.3		
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	Melampaui (>) 6.56 %		
9	Penetapan APBD	Sesuai (=) Tepat waktu		
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan			
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Hari/Jam Pelajaran)	Sesuai (=) 103/893	Terbatasnya alokasi anggaran yang disiapkan untuk Diklat pegawai.	Pengaalokasian anggaran secara proporsional
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan	Belum tercapai (<) 0.67	Belum semua pegawai mendapatkan	Perbaikan database pegawai

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	dan pelatihan formal (%)		pelatihan	yang pernah mengikuti Diklat
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Melampaui (>) 37.97	Belum semua struktural mengikuti diklat penjenjangan	Mengikutkan para pejabat struttural dalam diklat secara berkala
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Sesuai (=) 33		1. Evaluasi Anjab dan Evjab 2. Penyusunan Human Capital Developmen Plan
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Melampaui (>) 960		
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	Melampaui 2.213	Masih ada jabatan Fungsional tertentu yang belum tersedia formasinya	
4.	Penelitian dan pengembangan			
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	Sesuai (=) 100	1. Terbatasnya anggaran terkait kelitbangan 2. Belum termanfaatkannnya hasil-hasil kelitbangan	1. Pengalokasian anggaran yang proporsional 2. Pelaksanaan kegiatan lomba inovasi dan kreasi secara berkala
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	Sesuai (=) 100		
	Penerapan SIDa:			
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.(%)	Melampaui (>) 18	3. Masih rendahnya kualitas inovasi	
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	Melampaui (>) 61		
5.	Pengawasan			
1	Persentase tindak lanjut temuan	Belum mencapai (<) 75	1. Rendahnya kesadaran ASN dlam menyelesaikan Temuan LHP 2. Masih rendahnya kesadaran ASN dalam mengikuti aturan kepegawaian 3. akuntabilitas kinerja dan pengawasan APIP belum optimal	1. Penerapan dan penguatan SOP pengawasan 2. Sosialisasi tentang akuntabilitas kinerja 3. Peningkatakn kapasitas SDM APIP
2	Persentase pelanggaran pegawai	Melampaui (>) 0.91		
3	Jumlah temuan BPK	Melampaui (>) 12		
6.	Sekretariat Dewan			
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Sesuai (=) ada	Belum ada system informasi manajemen yang mendukung pelaksanaan kegiatan	Advokasi kepada pimpinan mengenai pentingnya penggunaan Managemen Infoematiaon System dalam mendukung kegiatan kesekeratariatan Dewan perwakilan rakyat daerah.
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam	Sesuai (=) ada		

No	Bidang Urusan/Indikator	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)			
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Sesuai (=) Ada		

4.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, dan mendesak, dalam menentukan tujuan jangka menengah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu strategis ini dianalisis pada level internasional/global, nasional dan daerah.

4.3.1 Isu Strategis Global

Isu strategis global adalah sebagai berikut :

4.3.1.1 Pandemi Covid-19

Sejak awal Tahun 2020, pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terjadi. Virus yang petama kali ditemukan di Wuhan, China menyebar ke hampir seluruh negara dan pada awal Maret 2020 terjadi kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama tersebut, virus ini telah dengan cepat menyebar keseluruh provinsi di Indonesia. Sampai dengan saat ini Virus Corona ini tersebar di 34 provinsi, 505 kabupaten/kota di Indonesia. Tingginya angka yang terkonfirmasi Covid menunjukkan bagaimana Covid 19 menjadi ancaman yang membahayakan pada semua aspek baik Kesehatan maupun dalam tatanan bernegara.

Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan terganggunya hampir semua aktifitas lapangan usaha masyarakat pada tahun 2020. Termasuk merubah perilaku masyarakat dunia di semua kalangan. Kendati begitu, dalam keadaan saat ini juga memunculkan peluang dan harapan. Ada sektor-sektor relevan yang justru bisnisnya membaik. Misalnya sektor medis dan kesehatan, perdagangan online atau e-commerce, sampai fast moving consumer goods (FMGC) seperti obat-obatan, barang elektronik berbasis IT, produk makanan dan minuman kemasan.

Apalagi produk FMCG yang sangat kuat di offline kini harus beralih distribusinya secara daring. Beberapa produk mulai beradaptasi dengan penjualan via e-commerce, yang ternyata lonjakannya signifikan. Bahkan setiap negara harus merespon perubahan alam dan persaingan teknologi secara terintegrasi dan komprehensif.

Respon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil sehingga tantangan pandemi Covid-19 di era revolusi industri 4.0 saat ini dapat dikelola menjadi peluang.

Untuk Kota Palopo di tahun 2020, dampak Covid juga terasa pada kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah. Upaya mengatasi penyebaran corona juga sudah gencar dilakukan oleh pemerintah, Selain penetapan regulasi, dilakukan langkah-langkah antara lain membatasi interaksi antar manusia. Pembatasan sosial (social distancing) dilakukan dalam bentuk pelarangan perjalanan (travelling), penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah. Berbagai langkah ini menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis.

Dampaknya pada tahun 2020, aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (demand) maupun dari sisi penawaran (supply). Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, rantai pasokan global terganggu. Semua ini berujung pada penurunan output global yang sangat besar. Ketika kondisi ini berlanjut, maka rambatan dampaknya juga berpotensi mengakibatkan gangguan stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini dialami hampir seluruh negara yang terdampak COVID-19.

4.3.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDG's)*

Suistainable Developmen Goals (SDGs) adalah sebuah dokumen kesepakatan yang menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Konsep SDGs melanjutkan konsep MDGs yang telah berakhir pada tahun 2015. diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan,

membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan.

Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tujuanya menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia (human development) yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau social economic development, dan lingkungan dalam skala besar atau environmental development berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik.

Keterkaitan SDGS dengan tanggung jawab pemerintah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.3.
Keterkaitan SDGS dengan tanggung jawab pemerintah

No	Pilar Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan pembangunan Berkelanjutan	OPD Penanggung jawab
1	Pilar Sosial	Tanpa kemiskinan	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Dukcapil 3. Bappeda 4. Dinas KB 5. Dinas PPA 6. Dinas Pertanian, perkebunan dan Peternakan 7. Dinas Ketahanan pangan
		Tanpa Kelaparan	
		Kehidupan Sehat dan Sejahtera	
		Pendidikan berkualitas	
		Kesetaraan gender	
2	Pilar Lingkungan	Air Bersih & Sanitasi Layak	1. Dinas PUPR 2. Dinas Perkim 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas LH 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Pertanian
		Kota & pemukiman Berkelanjutan	
		Komsumsi dan Produksi Yang bertanggung Jawab	
		Penanganan perubahan Iklim	
		Ekosistem lautan	
		Ekosistem daratan	
3	Pilar Ekonomi	Energi Bersih & terjangkau	1. Bappeda 2. Dinas Perdagangan 3. Dinas Perindustrian 4. BPKAD 5. Bapenda 6. Dinas PUPR 7. Balitbangda
		Pekerjaan layak & Pertumbuhan Ekonomi	
		Industri, Inovasi & Infrastruktut	
		Berkurangnya Kesenjangan	
		Kemitraan untuk	

No	Pilar Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan pembangunan Berkelanjutan	OPD Penanggung jawab
		mencapai tujuan	
4	Pilar Hukum & Tata Kelola	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan tangguh	1. Badan kesbang dan Linmas 2. Dinas Sosial 3. Satpol PP 4. Kabag Hukum 5. Kecamatan se Kota Palopo

Penelaahan lebih mendalam didukung dengan data terkini mengenai TPB yang diterapkan Kota Palopo dilakukan terhadap hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada dokumen KLHS Perubahan RPJMD sudah memuat juga substansi mengenai TPB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

4.3.1.3 Perubahan Iklim *(Climate Change)*

Bumi secara luas telah dibebani oleh berbagai persoalan hingga hari ini. Yang sangat menjadi perhatian adalah adanya perubahan iklim. Hal ini akan mengakibatkan banyaknya bencana yang cepat atau lambat akan dihadapi oleh manusia di bumi. Perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi mengakibatkan terjadinya global warming merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh mahluk di dalamnya. Pemanasan global akan mengakibatkan lelehnya es di kutub utara yang dampak ikutannya adalah meningkatnya permukaan air laut.

Selain kenaikan suhu permukaan air laut akibat pemanasan global, perubahan iklim secara ekstrim di berbagai belahan bumi. Dampaknya kemudian sangat terasa pada berbagai bidang kehidupan manusia, diantaranya pada sektor pertanian dan peternakan. Perubahan iklim menyebabkan petani tidak mampu menentukan dengan tepat musim tanam yang baik sehingga hal ini mempengaruhi produktivitas sektor pertanian. Pada sektor peternakan, perubahan iklim dapat menyebabkan ternak tidak mampu berproduksi dengan baik karena adanya perubahan pola makan yang tidak baik.

Selaian dampak diatas yang menjadi focus pemerintah dalam perubahan iklim adalah tentang peningkatan emisi gas rumah kaca diakibatkan oleh meningkatnya alih fungsi lahan, aktivitas pertanian dan peternakan yang tidak ramah lingkungan, penggunaan energi fosil berlebihan, dan limbah domestik yang tidak terkelola menjadikan kualitas lingkungan hidup stagnan secara historis serta dampak perubahan yang iklim yang semakin nyata dari beberapa sumber didapatkan data bahwa populasi satwa berkurang 86 % dalam 46 tahun terkahir (https://livingplanetindex.org/), dunia kehilangan 800.000 Ha lahan mangrove setiap tahunnya (https://www.conservation.org/) , serta terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan ekstrem.

Pembangunan Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, yakni di atas 5 persen pada tahun 2016 dan 2017. Namun, kemampuan sumber daya alam kita terus menurun akibat beragam tekanan, seperti urbanisasi, limbah dan pencemaran udara, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan dan lahan. Kualitas keanekaragaman hayati kita pun menurun. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipertahankan apabila kita mengabaikan kemampuan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup. Untuk itu kita perlu bertransformai business as usual menuju pembangunan rendah karbon

sebagai paradigma baru pembangunan di dunia internasional melalui intervensi ***Green Policy*** yang diharapkan menjadi acuan bagi pembangunan di daerah agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkesinambungan dan tentunya perencanaan pembangunan rendah karbon (low carbon development) dibuat berdasarkan penilaian berbasis ilmiah (scientific-based assessment) agar menghasilkan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy).

4.3.1.4 Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan keadaan dimana struktur penduduk akan sangat menguntungkan ditinjau dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangatlah besar. Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Implikasinya adalah meningkatkannya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

Tetapi berkah ini bisa berbalik menjadi bencana jika bonus demografi tidak dipersiapkan kedatangannya. Permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi adalah;

1. Lembaga pendidikan di Indonesia didominasi sekolah nonvokasi yang mengedepankan kemampuan kognisi dan teori sehingga tidak bisa langsung terjun ke dunia kerja karena tidak punya skill yang dibutuhkan lapangan kerja.
2. Revitalisasi sekolah kejuruan dan politeknik baru dilaksanakan beberapa tahun, sedangkan masa bonus demografi tinggal sudah di depan mata. Artinya, tenaga terampil yang seharunya mempunyai softskill dan hardskill hasil pendidikan sekolah kejuruan dan politeknik belum sampai pada tahap mahir.
3. Pemerintah pusat dan daerah belum terlihat melakukan koordinasi dan membuat road map dan blueprint yang dijadikan sebagai kebijakan demografi dalam menghadapi bonus demografi.
4. Persoalah jumlah lapangan pekerjaan yang siap menyerap tenaga kerja juga belum bisa diprediksi, sehingga kalaupun jumlah SDM yang tersedia cukup sementara lapangan pekerjaan tidak ada justeru akan berakibat pada peningkatan jumlah pengangguran.

Oleh karena itu, pemerintah pusat beserta seluruh stockholder harus terus melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah menyiapkan SDM dan jumlah lapangan kerja secara sistemik. Melalui beberapa langkah; pertama, mempercepat revitalisasi pendidikan kejuruan dan politeknik supaya nanti pada saatnya bonus demografi tiba semua sudah siap. Lembaga pendidikan nonvokasi juga harus berlomba menyiapkan program-program khusus untuk mengasah softskill dan hardskill sehingga lulusannya juga bisa langsung masuk dunia kerja. Kedua, pemerintah harus mampu menjadi agent of development dengan cara memperbaiki mutu modal manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, serta penguasaan teknologi. Ketiga, pemerintah pusat dan daerah beserta dinas-dinas terkait bersinergis dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk membuat perencanaan khusus menyambut bonus demografi yang hanya akan sekali di dapat oleh Indonesia. Pemerintah juga harus menggandeng lembaga-lembaga swasta yang mempunyai kredibiltas tinggi terhadap usaha peningkatan lifeskill SDM Indonesia.

4.3.1.5 Revolusi 4.0/ Era Digital/Transformasi Digital

Dunia saat ini telah memasuki era revolusi industri keempat. Pada revolusi industri ini terjadi lompatan besar dalam sektor industri, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Agar mampu bersaing, Indonesia harus mampu mengadopsi Industri 4.0 ini dan mempersiapkan strategi yang tepat di semua sektor.

Indonesia telah berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi Industri 4.0. Hal ini ditandai dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap dan strategi Indonesia memasuki era digital. Kementerian Perindustrian merancang Making

Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap untuk mengimplementasikan sejumlah strategi secara terintegrasi.

Era Revolusi Industri 4.0. Era ini kerap menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak soal pekerjaan manusia yang akan digantikan teknologi mutakhir. revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara bidang fisik, digital dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat akan mengacu pada bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. perubahan teknologi ini secara drastis akan mengubah cara individu, perusahaan, dan pemerintah bekerja yang pada akhirnya mengarah pada transformasi masyarakat yang serupa dengan revolusi industri sebelumnya.

4.3.2 Isu Strategis Nasional

Isu Strategis Nasional adalah sebagai berikut :

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Isu pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan layanan dasar, perlindungan social, pengembangan produktifitas dan pembangunan karakter. Ini mencakup pelayanan pendidikan kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan tata kelola kependudukan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Selain itu juga meliputi penguasaan iptek, dan peningkatan prestasi olahraga, revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila, pemajuan dan pelestarian budaya, moderasi beragama, budaya literasi, inovasi dan kreatifitas. Isu ini mencakup pemenuhan mandatory spending di Kota Palopo di bidang pendidikan, kesehatan.

Pembangunan Infrastruktur

Isu pembangunan infrastruktur diarahkan pada akses perumahan dan pemukiman, akses air minum dan sanitasi, transporasi, dan infrastruktur kebencanaan, konektifitas, transportasi dan aksesibilitas wilayah (jalan dan pelayaran), infrastruktur ekonomi, pawisata dan sector pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan, dan infrastruktur TIK dan infrastruktur persampahan.

Penyederhanaan Regulasi

Isu diarahkan pada upaya pengurangan regulasi yang saling tumpeng tindih, tetapi regulasi yang berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Olehnya penyederhanaan regulasi diarahkan pada penyederhanaan, pencabutan dan penggabungan. Tujuannya dalah menyediakan regulasi yang lebih mudah dan melindungi UMKM, dan memudahkan kesempatan berusaha.

Penyederhanaan Birokrasi

Isu ini mencakup penyederhanaan prosedur dan penyelenggaraan elektronik government yang akan dilaksanakan melalui implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan public, sehingga maturitas system pemerintahan berbasis elektronik bias terus ditingkatkan.

Transformasi Ekonomi

Isu ini mencakup industrialisasi, pengembangan destinasi unggulan dan penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Industrialisasi dilaksanakan dengan berbasis SDA dan rantai produksi yang mengglobal, pengembangan destiansi unggulan dilakukan melalui perbaikan aksesibilitas, atraksasi di destinasi wisata, sementara pegembangan ekonomi kreatif dan digital pada sector kuliner, aplkikasi dan konten digital, musick dan film serta kriya.

4.3.3 Penetapan Isu Strategis Kota Palopo

Untuk menemukan isu strategis secara terprioritaskan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka diperlukan kriteria prioritisasi dan proses menilai isu berdasarkan kriteria tersebut. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas untuk dijadikan dasar perumusan visi dan misi serta tujuan dan sasaran. Adapun kriteria yang digunakan untuk memprioritisasi isu strategis RPJM Kota Palopo dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.4.
Kriteria dan Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	15
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab/kewenangan pemerintah kota	30
3.	Memiliki dampak terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5.	Memungkinkan untuk ditangani	15

Dengan demikian, Isu strategis Kota Palopo sesuai hasil analisa permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Layanan Dasar, Layanan Publik serta Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Kapasitas Infratsruktur Daerah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah
5. Pembangunan Wilayah dan Produktifitas Ekonomi Daerah

Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa aspek utama dalam Isu strategis ini adalah peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat serta taraf hidup masyarakat Kota Palopo. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat akan diarahkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, baik dalam angka maupun pertumbuhan IPM itu sendiri. Upaya ini diseleraskan dengan Peningkatan Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan Masyarakat termasuk penanganan pada aspek kesehatan dampak pandemic covid 19.
Selain itu upaya lainnya adalah meningkatkan rata rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masyarakat Kota Palopo termasuk angka indeks pendidikan dari tahun ke tahun.
Pada aspek kesejahteraan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan standar hidup layak masyarakat Kota Palopo dan menurunkan angka kemiskinan yang akan diarahkan pada upaya peningkatan daya beli masyarakat dan indeks pengeluaran masyarakat.

Layanan Dasar, Layanan Publik serta Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan

Beberapa aspek utama dalam isu startegis ini adalah mengoptimalisasi pemenuhan standar pelayanan minimal bagi masyarakat, meningkatkan kualitas layanan public dan tata kelola pemerintahan, melalui pengembangan budaya inovasi dalam pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, implementasi reformasi birokrasi secara massive dan memperkuat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum. Upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan komptensi Sumber daya manusia aparatur, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana layanan public dengan tata kelola yang jelas, cepat dan mudah diakses, penguatan sinergi pelaksanaan program pembangunan berbasis outcome secara akuntabel.

Kapasitas Infratsruktur Daerah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Beberapa aspek utama dalam isu ini adalah pengembangan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur daerah, seperti perumahan pemukiman, SPM urusan ke PUan (air minum dan air limbah), aksesibilitas konektifitas wilayah, perhubungan dan komunikasi, sarana dan prasarana perekonomian, penanganan bencana, serta parasarana public lainnya termasuk ruang terbuka hijau, dan sejumlah indicator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), dengan mengoptimalisasi indicator yang sudah dilaksnaakan dan belum mencapai target dan mengupayakan pelaksanaan sejumlah indicator TPB yang menjadi kewenangan Kota Palopo namun belum dilaksnaakan, sehingga dapat dinikmati masyarakat Kota Palopo.
Pada aspek pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada penyediaan infrastruktur yang tangguh bencana, dan pemanfaatan ruang dan lingkungan secara sustainable, sesuai dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan.

Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah

Beberapa aspek utama dalam isu ini adalah pengurangan kesenjangan wilayah dengan mengembangkan dan mengoptimalisasi kawasan kawasan produktif daerah dengan sarana prasarana yang lebih baik dalam berbagai aspek. Pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah diarahkan pada penguatan konektivitas atau keterkaitan wilayah, sebagai sebuah system, yang diharapkan mampu menurunkan kesenjangan antara wilayah karena adanya saling keterkaitan tersebut. Upaya upaya ini diharapkan mampu menekan angka kesenjangan social di masyarakat dan berkontribusi bagi menurunnya angka pengangguran di Kota Palopo.

Pemerataan pembangunan perlu mendapat dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industry yang secara langsung juga mengungkit daya saing daerah. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Kota Palopo.

Pemerataan pembangunan diwujudkan dalam pembangunan berbasis tata ruang yang berkelanjutan serta pemenuhan utilitas atau pemenuhan sarana dan prasaran umum Kawasan permukiman seperti sanitasi, persampahan dan air minum yang layak dan aman.

Pembangunan Wilayah dan Produktifitas Ekonomi Daerah

Beberapa aspek utama dalam isu ini adalah potensi potensi ekonomi local yang ada, terutama pariwisata daerah berbasis iven dan ekonomi kreatif yang ada. Mengakselerasi sejumlah lapangan usaha yang menjadi contributor ekonomi terbesar seperti perdagangan, pertanian, perikanan dan jasa lainnya di Kota Palopo. Mengembangkan inovasi, kemitraan dan kerjsama menjadi bagian penting dalam isu staretgis ini, dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam semua aktifitas ekonomi. Sehingga terus mampu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Kota Palopo.

Memulihkan kembali investasi daerah, mengakselerasi dan memulihkan usaha kecil dan menengah, menjadi beberapa poin penting dalam mengakselerasi ulang potensi potensi ekonomi Kota Palopo akibat pandemic COVID-19. Poin penting dalam isu strategis ini adalah menjaga keseimbangan antara penanganan aspek kesehatan dengan aktifitas produksi dan berusaha masyarakat sebagai respon dalam menangani dampak pandemic covid 19. Poin penting dalam isu strategis ini adalah pemulihan ekonomi daerah dengan mengelaborasi dan mensinergikan peran berbagai lapangan usaha dalam upaya memulihkan kondisi ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo 2018-2023 juga memiliki keterkaitan dengan RPJMD kabupaten yang berada di sekitar Kota Palopo.

Berikut adalah table keterkaitan RPJMD Kota Palopo dengan kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur.

Tabel 4.5.
Penelaahan RPJMD Daerah lain dengan Kebijakan Pembangunan Kota Palopo

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1.	Kabupaten Luwu	2019-2024	Mewujudkan pemerintahan yang professional berwibawa, amanah dan tranparan dan akuntabel	Salah satu kebijakan pemerintah Kota palopo dalam bidang reformasi birokrasi adalah Memodernisasi layanan publik, meningkatan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan
2.	Kabupaten Luwu Utara	2016-2021	Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata	Kota Palopo dalam salah satu misinya adalah Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu. Akan berpeluang untuk membangun Kerjasama yang saling menguntungkan.
3.	Kab. Luwu Timur	2016 -2021	1.Penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup 2.Pembangunan Infrastruktur Transportasi 3.Pembangunan infrastruktur energi, sumber daya air dan perumahan.	Salah satu Misi dari pemerintah Kota Palopo adalah mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrstuktur perkotaan, penaatan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau;

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, visi dalam RPJMD ini diartikan sebagai gambaran tentang kondisi Kota Palopo yang diharapkan terwujud/tercapai pada akhir periode 2018-2023.Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penjelasan visinya dijabarkan sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah.

Kemudian sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang RPJPD Kota Palopo 2005-2025, Visi RPJPD Kota Palopo 2005-2025 yakni "**Menjadi Kota Moderen Terkemuka di Kawasan Timur Indonesia yang Berbasis Potensi Sumberdaya dan Kearifan Lokal serta Bernafaskan Religi dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**" yang dicapai dengan melaksanakan 7 misi yakni :

1. Meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemandirian pembangunan
2. Mengembangkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan profesionalisme aparatur, kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat.
3. Mengembangkan produktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
4. Meningkatkan hubungan sinergitas dan kerjasama daerah
5. Meningkatkan kesadaraan hukum dan HAM serta menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan jasa pelayanan industri dan kepariwisataan serta pelestarian budaya daerah
7. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Visi Kota Palopo Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023".

Pada Visi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Maju, Palopo yang maju bermakna bahwa kota ini bergerak kearah yang lebih positif, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan warga.

Inovatif, Palopo yang inovatif bermakna bahwa kota ini selalu member solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan public yang efisien, efektif dan berbasis riset, serta industri kreatif berkembang sebagai sektor utama penggerak ekonomi.

Berkelanjutan Palopo yang berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan dilakukan secara harmoni sesuai daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup, inklusif secara sosial dan memperlihatkan kelestarian budaya local

Palopo Maju, Inovatif dan Berkelanjutan bermakna bahwa Kota Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan keseimbangan harmonis antara lingkungan hidup dan kondisi budaya.

5.2. Misi

Sesuai dengan Visi tersebut diatas dan sebagai upaya dalam mewujudkannya, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Palopo Tahun 2018 – 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan;
2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrstuktur perkotaan, penaatan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau;
3. Memodernisasi layanan publik, meningkatan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan;
4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampinagan bisnis;

5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

Tabel 5.1.
Penjelasan Misi dan Keterkaitan dengan Visi

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan	Misi ini bermakna bahwa pembangunan manusia dilaksanakan melalui intervensi sektor pendidikan, kesehatan, dan pelaksanaan perlindungan sosial masyarakat, utamanya bagi kelompok-kelompok rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok minoritas.	Maju
2	Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau	Misi ini bermakna bahwa Palopo sebagai habitat manusia memberikan daya dukung dan daya tampung yang layak, ditinjau dari kapasitas infrastruktur kota, permukiman, air bersih, sanitasi dan kualitas lingkungan hidup.	Berkelanjutan dan Maju
3	Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan	Modernisasi layanan public bermakna bahwa pelaksanaan layanan public diubah menjadi lebih inovatif, professional, serta efektif dan efisien, melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas aparatur, dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan, serta pelibatan public dalam pembangunan.	Inovatif
4	Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisinis	Kewirausahan berbasis jasa dan niaga bermakna bahwa perekonomian dan penyediaan lapangan kerja didorong pada sector usaha jasa dan niaga, yang dicapai melalui upaya-upaya peningkatan kualitas angkatan kerja dan kapasitas bisnis masyarakat.	Maju
5	Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu	Iklim yang toleran terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif bermakna bahwa sector pariwisata dan ekonomi kreatif berkembang melalui dukungan berbagai sumberdaya dan memiliki identitas budaya Luwu yang berdimensi religi (agama).	Maju dan Berkelanjutan

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil

(outcome) program Perangkat Daerah. Jumlah tujuan pembangunan Kota Palopo sebanyak 5 (lima) dan sasaran sebanyak 11 (sebelas)

Perumusan tujuan dan sasaran strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain menerjemahkan visi/misi, perumusan tujuan dan sasaran juga dimaksudkan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis daerah, dan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 5.2.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kota Palopo Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
Visi : Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023									
Misi 1 : Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan									
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)		1	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	77.98	78.06	78.4	78.82	79.25	79.25
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	2	Indeks Pendidikan (Poin)	77.69	77.76	78.37	78.48	78.59	78.59
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	3	Indeks Kesehatan (poin)	78.14	78.28	78.21	78.58	78.76	78.76
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.82	7.85	6.57	6.28	5.99	5.99
		5	PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Thn) (ADHB)	43.02	42.61	42	43	44	44
Misi 2 : Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau									
Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)		6	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	85.77	85.88	85.9	86. 20	86.7	86.7
	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	7	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	1.68	0.02	1.61	1.57	1.53	1.53
	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	8	Indeks Layanan Jalan (Poin)	67.51	67.09	67.95	68.15	68.45	68.45
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	9	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	12.58	54.95	10	7	2	2
		10	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	79.95	76.95	79.98	80	80.1	80.1
Misi 3 : Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan									
Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)		11	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	52.73	50.33	65	70	75	75
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	12	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	52.43	60.03 (B)	70 (BB)	75 (BB)	80 (A)	80 (A)

Misi/Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	13	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	83.08	83.06	84	85	86	86
Misi 4 : Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis									
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)		14	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.75	0.45	4.16	4.68	5.69	5.69
	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10.32	10.37	9.03	8.55	8.07	8.07
	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	16	Produktifitas Total Daerah (Juta/Tenaga Kerja/Tahun)	98.23	94.39	104.13	109.94	115.75	115.75
Misi 5 : Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu									
Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)		17	Total Kontribusi PAD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PAD (%)	8.88	2.28	8.78	9.8	10.89	10.89
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	18	Kontribusi PAD Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	5.12	0.02	5	6	7	7
		19	Kontribusi PAD Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	3.76	2.26	3.78	3.8	3.89	3.89

5.4 Keterkaitan RPJMN dengan RPJMD Kota Palopo 2018-2023

Sebagai bagian dari system perencanaan pembangunan nasional, misi Pemerintah Kota Palopo tersebut memiliki keterkaitan dengan misi pembangunan nasional dan kegiatan prioritas nasional, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2020-2023. Kemudian dalam (buku) arah pembangunan wilayah Sulawesi sebagaiman termuat dalam RPJMN tersebut untuk wilayah Sulawesi, hanya terdapat kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. Pengembangan sector unggulan
2. Pengembangan Kawasan Strategis
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan
4. Pengembangan Pengembangan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi
5. Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Sementara kegiatan prioritas nasional yang lokusnya di Kota Palopo, sesuai RPJMN 2020-2024 diuraikan dalam table sebagai berikut, yang juga menguraikan keterkaitan RPJMN 2020-2024 terhadap Perubahan RPJMD Kota 2018-2023 :

Tabel 5. 3.
Keterkaitan Misi RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023
dengan RPJMN Tahun 2020-2024

No	RPJMN 2020-2024		RPJMD Palopo 2018-2023
	Misi	Kegiatan Prioritas Pembangunan Wilayah di Kota Palopo	Misi
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	**Pengembangan Kawasan Strategis** 1. Pengurangan risiko krisis kesehatan	Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan
2	Struktur Ekonomi yang Produktif Mandiri dan Berdaya Saing	-	Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisinis
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	-	Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	**Pengembangan Kawasan Perkotaan** 1. Penyediaan SPALD-S Skala Kota (IPLT) 2. Penyediaan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA) 3. Pemetaan Garis Pantai 4. Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	-	Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas	-	Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur

No	RPJMN 2020-2024		RPJMD Palopo 2018-2023
	Misi	Kegiatan Prioritas Pembangunan Wilayah di Kota Palopo	Misi
	Korupsi, Bermartabat dan Terpecaya		dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan
7	Perlindungan bagi Segenap bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh warga	-	Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Terpecaya	-	Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	-	Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan

Sinergitas Visi Misi Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Nasional

Tabel 5.4.
Sinergitas Visi Misi RPJMD Kota Palopo
Terhadap RPJMD Sulsel 2018-2023 dan RPJMN 2020-2024

Visi Misi Kota Palopo	Visi Misi Sulsel	Visi Misi Nasional
Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023	Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter	Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong
1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan; 2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrstuktur perkotaan, penaatan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau; 3. Memodernisasi layanan publik, meningkatan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan; 4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif 2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel 3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif 4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter 5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Struktur Ekonomi yang Produktif Mandiri dan Berdaya Saing 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpecaya

peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampinagan bisnis; 5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.		7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi segenap warga 8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersif efektif dan terpecaya 9. Sinergi pemerintah daerah dalam Kerangka Negera kesatuan

5.5. Keterkaitan RPJPD Kota Palopo 2005-2025 dengan RPJMD 2018-2023

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Palopo 2005-2025 ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 yang memuat sebanyak 7 agenda pembangunan. Agenda pembangunan dalam RPJPD ini memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo 2018-2023. Berikut adalah penjelasan keterkaitan Perubahan RPJMD 2018-2023 terhadap RPJPD Kota Palopo 2005-2025 :

1. **Agenda 1 RPJPD : Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Dalam RPJMD 2018-2023, agenda ini akan diilaksanakan dengan misi pertama yakni Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan yang kemudian diturunkan dalam tujuan "Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat" dengan tiga sasaran yakni Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat, Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Palopo.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam melaksanakan agenda ini adalah meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan secara proprosional dengan meningkatkan partisipasi kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan mengoptimalisasi sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien dan cakupan rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang beriringan dengan pengendalian penduduk serta meningkatkan partisipasi, kerjasama dan sinergitas penanganan kesejahteraan social.

Arah kebijakan dalam melaksanakan agenda ini adalah, peningkatan pada Akses, Kualitas Layanan, Keberlanjutan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Pendidikan. Pada dimensi kesehatan, arah kebijakan diarahkan pada akses, kualitas Layanan dan Layanan Kesehatan Dasar Masyarakat Termasuk penanganan dampak pandemic covid, sementara pada dimensi kesejahteraan social, diarahkan pada Pada Pemenuhan Hak Dasar Sosial, Pengendalian Penduduk, Pengarusutamaan Gender, Kesetaraan, dan Penanganan Kelompok Rentan, Termasuk Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid.

,

2. **Agenda 2 RPJPD : Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Masyarakat**

Dalam RPJMD 2018-2023, agenda ini akan berupaya diwujudkan dengan pelaksanaan misi keempat yakni Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui

peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis yang diturunkan dalam tujuan "Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah" dengan sasaran Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja dan Meningkatnya Produksi dan Produktifitas.

Strategi untuk melaksanakan agenda ini dalam perubahan RPJMD 2018-2023 adalah mengembangkan Sistem Layanan dan Kerjasama Daerah dalam hal Ketenagakerjaan dan Penyediaan Lapangan Kerja serta Peningkatan SDM Angkatan Kerja yang disertai dengan pengembangan Promosi, Sarana Prasarana dan Kualitas Daya Dukung Investasi dan Mengembangkan Produksi dan Produktifitas Daerah, Menguatkan Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Produktif Masyarakat disertai peningkatan Skala Usaha dan Aksesibiltas Kelembagaan Usaha Masyarakat serta pengembangan industri unggulan dan industri potensial lainnya

Sementara Arah kebijakan dalam melaksanakan agenda ini dalam perubahan RPJMD 2018-2023 adalah Peningkatan Pada Peningkatan Skil Kompetensi tenaga Kerja, Kuantitas dan Kualitas Investasi, dan Fasilitasi tenaga Kerja, Termasuk Dampak Ekonomi Pandemi Covid dan Pada Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, serta Kualitas dan Daya Saing Produk

3. **Agenda 3 RPJPD : Mewujudkan Profesionalisme Aparatur dan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat**

Dalam RPJMD 2018-2023, agenda ini akan dilaksanakan dengan melaksanakan misi keempat yakni Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan yang dijabarkan dalam tujuan "Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani" dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Meningkatnya kualitas pelayanan public yang kemudian dijabarkan dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Meningkatnya kualitas pelayanan public.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam melaksanakan agenda ini adalah meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan dengan prinsip e government dengan memantapkan regulasi, struktur, tata kelola layanan sistem serta kinerja pemerintah daerah yang dibarengi dengan pemantapan kualitas SDM, kinerja aparatur serta sarana dan prasarana yang ada dan meningkatkan Kapasitas Aparatur Pelayanan Publik, penguatan sistem/regulasi dan penegakan standarisasi pelayanan yang beriringan dengan upaya pemantapan sarana dan prasarana, Inovasi , Teknologi Sistem Layanan dan Aksesibilitas Publik Atas ayanan dengan Penerapan Prinsip Smart City.

Sementara arah kebijakan pelaksanaanya diarahkan pada peningkatan *Tata Kelola Layanan, Kinerja, Sarana dan Prasarana serta Kapasitas SDM Aparatur dan Pemenuhan Semua Layanan Dasar dan Layanan Publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*

4. **Agenda 4 RPJPD : Meningkatkan Hubungan Kerjasama Daerah**

Dalam RPJMD 2018-2023, hubungan kerjasama daerah diarahkan pada peningkatan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang terus kompetitif. Dalam RPJMD 2018-2023, agenda ini akan dilaksanakan dengan melaksanakan misi ketiga dan keempat yang masing-masing berbunyi "Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan" dan Misi ke empat yakni "Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis" sementara tujuan, sasaran, strategi dana rah kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan misi kempat dan misi ke tiga RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023.

5. **Agenda 5 RPJPD : Mendorong Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM serta Pembinaan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**

Agenda untuk mendorong peningkatan kesadaran hokum dan HAM akan dilaksanakan dengan misi ketiga yakni Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan sementara agenda pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat diarahkan pada upaya menciptakan kesejahteraan social di masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam misi pertama RPJMD 2018-2023 yakni Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan. Demikian pula dengan tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan untuk melaksanakan agenda ini, menyesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan sebagaimana yang terurai dalam masing-masing misi tersebut.

6. **Agenda 6 RPJPD : Meningkatkan Pelayanan Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya Daerah**

Agenda ini akan dilaksanakan dengan misi kelima RPJMD 2018-2023 yakni "Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu" dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah.

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk agenda ini adalah meningkatkan daya saing pariwisata disertai dengan peningkatan SDM, Kelembagaan, Penguasaan Teknologi dan Iklim Usaha yang Kondusif dengan ikut menguatkan dan mengembangkan sarana prasarana, kerjasama dan pemasaran produk ekonomi kreatif daerah, dengan arah kebijakan menguatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana dan kapasitas usaha serta permodalan para pelaku usaha, peningkatan jangkauan pemasaran pariwisata dan pemanfaatan teknologi informasi serta pemantapan pembinaan kelembagaan usaha dan kemitraan diantara para pelaku usaha.

7. **Agenda 7 RPJPD : Meningkatkan Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

Agenda ini akan dilaksanakan melalui misi kedua yakni "Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau dengan tujuan mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas dan sasaran meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan, Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Strategi yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan permukiman secara beriringan dengan upaya menata dan mengembangkan potensi kawasan hunian untuk produktif, meningkatkan infrastruktur strategis perkotaan yang beriringan dengan pengembangan usaha serta kawasan produktif daerah yang ada, dan meningkatkan Pengelolaan Lingkungan dan Memantapkan Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengendalian & Pemanfaatan ruang.

Sementara arah kebijakan yang akan ditempuh adalah peningkatan pada Akses, Kualitas Sanitasi, Perumahan & Pemukiman Layak serta Layanan Dasar Perumahan dan Ke PU-an, peningkatan Jangkauan dan Kualitas Mantap Jalan serta Daya Saing

Infrastruktur Daerah, dan Penanganan Kebencanaan, Kawasan Banjir Pengelolaan Sumber Daya Air, Penanganan Sampah dan serta Ruang Terbuka Hijau.

Dari uraian diatas maka dapat digambarkan keterkaitan RPJPD Kota Palopo 2005-2025 dengan RPJMD 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 5.5.
Keterkaitan RPJPD Kota Palopo 2005-2025
dengan RPJMD 2018-2023

RPJPD Kota Palopo	RPJMD Kota Palopo
Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat, Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Palopo
Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja dan Meningkatnya Produksi dan Produktifitas
Mewujudkan Profesionalisme Aparatur dan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya kualitas pelayanan public yang kemudian dijabarkan dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Meningkatnya kualitas pelayanan public
Meningkatkan Hubungan Kerjasama Daerah	Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis
Mendorong Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM serta Pembinaan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan
Meningkatkan Pelayanan Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya Daerah	Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah
Meningkatkan Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan, Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara dan upaya Pemerintah Kota Palopo mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi Kota Palopo secara berkelanjutan.

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu atau lebih sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Dalam kaitan ini, arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Perencanaan strategik ini didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan. Dalam perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah yakni (1) perspektif masyarakat/layanan; (2) perspektif proses internal; (3) perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan.

Berikut adalah Tabel Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Strategi untuk mencapai setiap tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo 2018-2023.

Tabel 6.1.
Rumusan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Palopo 2018-2023

Visi : Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Misi 1 : Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan		
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S.1)	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan secara proprosional dengan meningkatkan partisipasi kesempatan belajar, keberlanjutan pendidikan dan pemenuhan SPM Pendidikan (Stra (Stra. 1)
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan mengoptimalisasi sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien serta pemenuhan SPM Kesehatan (Stra 2)
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Meningkatkan rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang beriringan dengan pengendalian penduduk serta meningkatkan partisipasi, kerjasama dan sinergitas penanganan kesejahteraan sosial (Stra 3)
Misi 2 : Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau		
Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan permukiman secara beriringan dengan upaya menata dan mengembangkan potensi kawasan hunian untuk produktif. (Stra 4)
	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Mengembangkan infrastruktur strategis perkotaan yang beriringan dengan pengembangan usaha serta kawasan produktif daerah yang ada (Stra 5)
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Meningkatkan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan dan Memantapkan Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengendalian & Pemanfaatan ruang (Stra 6)
Misi 3 : Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan		
Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan dengan prinsip e government dengan memantapkan regulasi, struktur, tata kelola layanan sistem serta kinerja pemerintah daerah yang dibarengi dengan pemantapan kualitas SDM, kinerja aparatur serta sarana dan prasarana yang ada serta pemenuhan SPM (Stra 7))
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pelayanan Publik, penguatan sistem/regulasi dan penegakan standarisasi pelayanan yang beriringan dengan upaya pemantapan sarana dan prasarana, Inovasi , Teknologi Sistem Layanan dan Aksesibilitas Publik Atas Layanan dengan Penerapan Prinsip Smart City (Stra 8)
Misi 4 : Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisinis		

Visi : Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Mengembangkan Sistem Layanan dan Kerjasama Daerah dalam hal Ketenagakerjaan dan Penyediaan Lapangan Kerja serta Peningkatan SDM Angkatan Kerja yang disertai dengan pengembangan Promosi, Sarana Prasarana dan Kualitas Daya Dukung Investasi (Stra 9)
	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	Mengembangkan Produksi dan Produktifitas Daerah, Menguatkan Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Produktif Masyarakat disertai peningkatan Skala Usaha dan Aksesibiltas Kelembagaan Usaha Masyarakat serta pengembangan industri unggulan dan industri potensial lainnya (Stra 10)
Misi 5 : Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu		
Terwujudnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Meningkatkan daya saing pariwisata disertai dengan peningkatan SDM dan partisipasi masyarakat serta iven pariwisata, Kelembagaan, Penguasaan Teknologi dan Iklim Usaha yang Kondusif dengan ikut menguatkan dan mengembangkan sarana prasarana, kerjasama dan pemasaran produk ekonomi kreatif daerah (Stra 11)

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan pembangunan Kota Palopo periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2.
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palopo 2018-2023

	Arah Kebijakan Tahun								
	2019		**2020**		**2021**		**2022**		**2023**
	Tema : Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat		**Tema : Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Produktifitas dan Perekonomian Daerah**		**Tema : Akselerasi Pemulihan Kondisi Ekonomi-Sosial dan Kesehatan Masyarakat**		**Tema : Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah**		**Tema : Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat, Perekonomian Daerah, Kualitas Layanan**
1	Peningkatan akses, cakupan, kualitas layanan & tenaga pendidikan, serta SPM Pendidikan	1	Peningkatan partisipasi kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan, serta SPM Pendidikan	1	Akselerasi peningkatan tata kelola dan kualitas layanan pendidikan, keberlanjutan pendidikan serta SPM Pendidikan	1	Pemantapan tata kelola dan kualitas layanan pendidikan, keberlanjutan pendidikan serta SPM Pendidikan	1	Optimalisasi tata kelola dan kualitas layanan pendidikan, keberlanjutan pendidikan, serta SPM Pendidikan
2	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan (UHC) dan seluruh sumber daya kesehatan serta SPM Kesehatan	2	Penguatan cakupan dan kualitas serta tata kelola pelayanan dan **sistem kesehatan** serta pemenuhan UHC serta SPM Kesehatan	2	Pemantapan cakupan dan kualitas serta tata kelola pelayanan dan **sistem kesehata**n serta pemenuhan UHC serta SPM Kesehatan dan Penanganan Dampak Pandemi Covid 19	2	Optimalisasi cakupan dan kualitas serta tata kelola pelayanan dan **sistem kesehatan** serta pemenuhan UHC serta SPM Kesehatan, Penanganan Dampak Pandemi Covid 19	2	Pemenuhan cakupan dan kualitas serta tata kelola pelayanan dan **sistem kesehatan** serta pemenuhan UHC serta SPM Kesehatan
3	Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Fakir Miskin, Kelompok Rentan serta PMKS yang Berbasis Data BDT (Basis Data Terpadu) dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang Responsif Gender, serta Cakupan SPM Sosial	3	Penguatan Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis BDT (Basis Data Terpadu/SPKD), dan Pembinaan dan Pemberdayaan dan **Perlindungan Sosia**l bagi Kelompok Rentan Berbasis Rumah Tangga/Keluarga yang Responsif Gender serta Cakupan SPM Sosial	3	Pemantapan Upaya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis BDT (Basis Data Terpadu/SPKD), dan Pembinaan dan Pemberdayaan dan **Perlindungan Sosia**l bagi Kelompok Rentan Berbasis Rumah Tangga/Keluarga yang Responsif Gender serta Cakupan SPM Sosial, Penanganan Dampak Pandemi Covid 19	3	Optimalisasi Upaya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis BDT (Basis Data Terpadu/SPKD), dan Pembinaan dan Pemberdayaan dan **Perlindungan Sosia**l bagi Kelompok Rentan Berbasis Rumah Tangga/Keluarga yang Responsif Gender serta Cakupan SPM Sosial, Penanganan Dampak Pandemi Covid 19	3	Akselerasi Upaya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis BDT (Basis Data Terpadu/SPKD), dan Pembinaan dan Pemberdayaan dan **Perlindungan Sosia**l bagi Kelompok Rentan Berbasis Rumah Tangga/Keluarga yang Responsif Gender serta Cakupan SPM Sosial
4	Peningkatan Akses dan Kualitas Sanitasi, Akses	4	Penguatan Pemenuhan Sanitasi dan Pemukiman	4	Pemantapan Akses dan Kualitas Sanitasi, Akses	4	Akselarasi Peningkatan Kawasan Hunian Produktif	4	Optimalisasi Peningkatan Kawasan Hunian Sehat

	Arah Kebijakan Tahun								
	2019		**2020**		**2021**		**2022**		**2023**
	Terhadap perumahan dan permukiman layak serta Penataan Perumahan & Pemukiman serta SPM Perumahan Pemukiman		Layak dan Pencegahan Munculnya Kawasan dan Rumah Tangga Kumuh SPM Perumahan Pemukiman		Terhadap perumahan dan permukiman layak serta Penataan Perumahan & Pemukiman yang Sehat dan Produktif SPM Perumahan Pemukiman		Tanpa Kumuh dengan Akses Sanitasi dan Cakupan Rumah Layak Huni, SPM Perumahan Pemukiman		Produktif, dan Optimalisasi Peran Serta Stake Holder, iKemitraan, dengan lembaga filantropi/donor serta SPM Perumahan Pemukiman
5	Peningkatan Kordinasi dengan Pemerintah Daerah Lainnya Terutama Provinsi dalam pembukaan dan perbaikan infrastruktur wilayah serta SPM PU PR	5	Peningkatan jangkauan, kualitas dan kemantapan jalan di daerah dan fasilitas perkotaan lainnya serta SPM PU PR	5	Penyediaan sarana dan prasarana serta cakupan fasilitas Infrastruktur Perkotaan serta SPM PU PR	5	Pemantapan kapasitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas Infrastruktur Perkotaan serta SPM PU PR	5	Optimalisasi kapasitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas Infrastruktur Perkotaan serta SPM PU PR
6	Peningkatan Upaya Penanganan/Pengurangan Luas Terdampak Banjir, serta SPM Kebencanaan dan Genangan serta Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	6	Akselarasi Upaya Penanganan/Pengurangan Luas Terdampak Banjir, serta SPM Kebencanaan dan Genangan serta Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	6	Pemantapan Upaya Penanganan/Pengurangan Luas Terdampak Banjir dan Genangan, serta SPM Kebencanaan serta Peningkatan Ruang Terbuka Hijau serta SPM Kebencanaan	6	Optimalisasi Upaya Penanganan/Pengurangan Luas Terdampak Banjir dan Genangan serta Peningkatan Ruang Terbuka Hijau serta SPM Kebencanaan	6	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang DAS dan Tata Kelola dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau serta SPM Kebencanaan
7	Peningkatan Tata Kelola Layanan Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur	7	Akselerasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur	7	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak Pandemi Covid 19, Penigkatan Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur	7	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak Pandemi Covid 19, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur	7	Pemenuhan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur yang Berkualitas
8	Penataan dan peningkatan layanan dasar maupun layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik	8	Akselerasi layanan dasar maupun layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik	8	Pemantapan layanan dasar maupun kualitas layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan mempertimbangkan	8	Optimalisasi layanan dasar maupun kualitas layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan mempertimbangkan perkembangan dampak Pandemi Covid 19	8	Pemantapan pemenuhan layanan dasar maupun kualitas layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik

	Arah Kebijakan Tahun								
	2019		**2020**		**2021**		**2022**		**2023**
					perkembangan dampak Pandemi Covid 19				
9	Pembukaan dan Peningkatan Upaya Fasilitasi Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha,	9	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Kerja (Life Skill) dan Peningkatan Rasio Daya Derap Tenaga Kerja,	9	Peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui Pelatihan Kerja (Life Skill), Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi, Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Produktif dan Penanganan Dampak Pandemi Covid 19 di sektor Produksi dan Produktifitas Daerah	9	Akselarasi Penyediaan Lapangan Kerja, Kualitas Tenaga Kerja dan Kesesuaian Kompetensi Angkatan Kerja dengan Kebutuhan Lapangan Kerja dan Penanganan Dampak Pandemi Covid 19 di sektor Produksi dan Produktifitas Daerah	9	Optimalisasi Penyediaan Lapangan Kerja, Kualitas Tenaga Kerja dan Kesesuaian Kompetensi Angkatan Kerja dengan Kebutuhan Lapangan Kerja.
10	Peningkatan produksi komoditas daerah	10	Peningkatan Nilai Tambah Produk	10	Peningkatan Daya Saing Produk/Komoditas Daerah dengan mempertimbangkan dampak Pandemi Covid 19.	10	Optimalisasi Daya Saing Produk/Komoditas Daerah dengan mempertimbangkan dampak Pandemi Covid 19.	10	Peningkatan Produktifitas Ekonomi Masyarakat dan Daerah
11	Peningkatan Pembinaan Kapasitas Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.	11	Akselerasi Pembinaan Usaha,Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.	11	Pemantapan Pembinaan Kapasitas Pelaku Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.	11	Optimalisasi Pembinaan Kapasitas Pelaku Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.	11	Pengembangan Pembinaan Kapasitas Pelaku Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.

Tabel 6.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Pemerintah Kota Palopo 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan Tahun								
				2019		2020		2021		2022		2023
Visi : Palopo Maju Inovatif Berkelanjutan												
Misi : Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan												
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan secara proprosional dengan meningkatkan partisipasi kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan serta pemenuhan SPM Pendidikan (Stra 1)	1	Peningkatan akses, cakupan, kualitas layanan & tenaga pendidikan, serta SPM Pendidikan	1	Peningkatan partisipasi kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan, serta SPM Pendidikan	1	Akselerasi peningkatan tata kelola dan kualitas layanan pendidikan, keberlanjutan pendidikan serta SPM Pendidikan	1	Pemantapan tata kelola dan kualitas layanan pendidikan, keberlanjutan pendidikan serta SPM Pendidikan	1	Optimalisasi tata kelola dan kualitas layanan pendidikan, keberlanjutan pendidikan, serta SPM Pendidikan
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan mengoptimalisasi sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien serta Pemenuhan SPM Kesehatan (Stra 2)	2	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan (UHC) dan seluruh sumber daya kesehatan serta SPM Kesehatan	2	Penguatan cakupan dan kualitas serta tata kelola pelayanan dan **sistem kesehatan** serta pemenuhan UHC serta SPM Kesehatan dan Penanganan Dampak Pandemi Covid 19	2	Pemantapan cakupan dan kualitas serta tata kelola pelayanan dan **sistem kesehata**n serta pemenuhan UHC serta SPM Kesehatan dan Penanganan Dampak Pandemi Covid 19	2	Optimalisasi cakupan dan kualitas serta tata kelola pelayanan dan **sistem kesehatan** serta pemenuhan UHC serta SPM Kesehatan Penanganan Dampak Pandemi Covid 19	2	Pemenuhan cakupan dan kualitas serta tata kelola pelayanan dan **sistem kesehatan** serta pemenuhan UHC serta SPM Kesehatan
	Meningkatnya derajat kesejahteraan	Meningkatkan rehabilitasi, perlindungan dan	3	Peningkatan Pengendalian Penduduk dan	3	Penguatan Pengendalian Penduduk	3	Pemantapan Upaya Pengendalian	3	Optimalisasi Upaya Pengendalian	3	Akselerasi Upaya Pengendalian

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan Tahun								
				2019		2020		2021		2022		2023
Visi : Palopo Maju Inovatif Berkelanjutan												
	sosial masyarakat (S.3)	pemberdayaan masyarakat yang beriringan dengan pengendalian penduduk serta meningkatkan partisipasi, kerjasama dan sinergitas penanganan kesejahteraan sosial (Stra 3)		Kesejahteraan Fakir Miskin, Kelompok Rentan serta PMKS yang Berbasis Data BDT (Basis Data Terpadu) dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang Responsif Gender, serta Cakupan SPM Sosial		dan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis BDT (Basis Data Terpadu/SPKD), dan Pembinaan dan Pemberdayaan dan **Perlindungan Sosia**l bagi Kelompok Rentan Berbasis Rumah Tangga/Keluarga yang Responsif Gender serta Cakupan SPM Sosial dan Penanganan Dampak Pandemi Covid 19		Penduduk dan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis BDT (Basis Data Terpadu/SPKD), dan Pembinaan dan Pemberdayaan dan **Perlindungan Sosia**l bagi Kelompok Rentan Berbasis Rumah Tangga/Keluarga yang Responsif Gender serta Cakupan SPM Sosial, Penanganan Dampak Pandemi Covid 19		Penduduk dan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis BDT (Basis Data Terpadu/SPKD), dan Pembinaan dan Pemberdayaan dan **Perlindungan Sosia**l bagi Kelompok Rentan Berbasis Rumah Tangga/Keluarga yang Responsif Gender serta Cakupan SPM Sosial, Penanganan Dampak Pandemi Covid 19		Penduduk dan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis BDT (Basis Data Terpadu/SPKD), dan Pembinaan dan Pemberdayaan dan **Perlindungan Sosia**l bagi Kelompok Rentan Berbasis Rumah Tangga/Keluarga yang Responsif Gender serta Cakupan SPM Sosial
Misi 2 : Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau												
Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan permukiman secara beriringan dengan	4	Peningkatan Akses dan Kualitas Sanitasi, Akses Terhadap perumahan	4	Penguatan Pemenuhan Sanitasi dan Pemukiman Layak dan Pencegahan	4	Pemantapan Akses dan Kualitas Sanitasi, Akses Terhadap perumahan dan permukiman	4	Akselarasi Peningkatan Kawasan Hunian Produktif Tanpa Kumuh	4	Optimalisasi Peningkatan Kawasan Hunian Sehat Produktif, dan Optimalisasi

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan Tahun								
				2019		2020		2021		2022		2023
Visi : Palopo Maju Inovatif Berkelanjutan												
berkualitas (T.2)		upaya menata dan mengembangkan potensi kawasan hunian untuk produktif. (Stra 4)		dan permukiman layak serta Penataan Perumahan & Pemukiman serta SPM Perumahan Pemukiman, dan Layanan SPM Ke PU-an		Munculnya Kawasan dan Rumah Tangga Kumuh SPM Perumahan Pemukiman dan Layanan SPM Ke PU-an		layak serta Penataan Perumahan & Pemukiman yang Sehat dan Produktif SPM Perumahan Pemukiman dan Layanan SPM Ke PU-an		dengan Akses Sanitasi dan Cakupan Rumah Layak Huni, SPM Perumahan Pemukiman dan Layanan SPM Ke PU-an		Peran Serta Stake Holder, iKemitraan, dengan lembaga filantropi/donor serta SPM Perumahan Pemukiman dan Layanan SPM Ke PU-an
	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Mengembangkan infrastruktur strategis perkotaan yang beriringan dengan pengembangan usaha serta kawasan produktif daerah yang ada (Stra 5)	5	Peningkatan Kordinasi dengan Pemerintah Daerah Lainnya Terutama Provinsi dalam pembukaan dan perbaikan infrastruktur wilayah	5	Peningkatan jangkauan, kualitas dan kemantapan jalan di daerah dan fasilitas perkotaan lainnya	5	Penyediaan sarana dan prasarana serta cakupan fasilitas Infrastruktur Perkotaan	5	Pemantapan kapasitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas Infrastruktur Perkotaan	5	Optimalisasi kapasitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas Infrastruktur Perkotaan
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan dan Memantapkan Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengendalian & Pemanfaatan ruang (Stra 6)	6	Peningkatan Upaya Penanganan/Pengurangan Luas Terdampak Banjir, serta SPM Kebencanaan dan Genangan serta Peningkatan	6	Akselarasi Upaya Penanganan/ Pengurangan Luas Terdampak Banjir, serta SPM Kebencanaan dan Genangan serta Peningkatan	6	Pemantapan Upaya Penanganan/Pengurangan Luas Terdampak Banjir dan Genangan, serta SPM Kebencanaan serta Peningkatan Ruang Terbuka	6	Optimalisasi Upaya Penanganan/ Pengurangan Luas Terdampak Banjir dan Genangan serta Peningkatan Ruang Terbuka Hijau serta SPM	6	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang DAS dan Tata Kelola dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau serta SPM

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan Tahun								
				2019		2020		2021		2022		2023
Visi : Palopo Maju Inovatif Berkelanjutan												
				Ruang Terbuka Hijau		Ruang Terbuka Hijau		Hijau serta SPM Kebencanaan		Kebencanaan		Kebencanaan
Misi 3 : Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan												
Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan dengan prinsip e government dengan memantapkan regulasi, struktur, tata kelola layanan sistem serta kinerja pemerintah daerah yang dibarengi dengan pemantapan kualitas SDM, kinerja aparatur serta sarana dan prasarana yang ada serta pemenuhan SPM (Stra 7)	7	Peningkatan Tata Kelola Layanan Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur	7	Akselerasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur	7	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak Pandemi Covid 19, Penigkatan Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur	7	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak Pandemi Covid 19, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur	7	Pemenuhan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur yang Berkualitas
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pelayanan Publik, penguatan sistem/regulasi dan penegakan standarisasi pelayanan yang beriringan dengan upaya pemantapan sarana dan prasarana, Inovasi , Teknologi Sistem	8	Penataan dan peningkatan layanan dasar maupun layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik	8	Akselerasi layanan dasar maupun layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik	8	Pemantapan layanan dasar maupun kualitas layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan mempertimbangkan	8	Optimalisasi layanan dasar maupun kualitas layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik	8	Pemantapan pemenuhan layanan dasar maupun kualitas layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintaha

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan Tahun							
				2019		2020		2021		2022		2023
Visi : Palopo Maju Inovatif Berkelanjutan												
		Layanan dan Aksesibilitas Publik Atas Layanan dengan Penerapan Prinsip Smart City (Stra 8)						perkembangan dampak Pandemi Covid 19		dengan mempertimbangkan perkembangan dampak Pandemi Covid 19		n berbasis elektronik
Misi 4 Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisinis												
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Mengembangkan Sistem Layanan dan Kerjasama Daerah dalam hal Ketenagakerjaan dan Penyediaan Lapangan Kerja serta Peningkatan SDM Angkatan Kerja yang disertai dengan pengembangan Promosi, Sarana Prasarana dan Kualitas Daya Dukung Investasi (Stra 9)	9	Pembukaan dan Peningkatan Upaya Fasilitasi Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha,	9	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Kerja (Life Skill) dan Peningkatan Rasio Daya Derap Tenaga Kerja,	9	Peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui Pelatihan Kerja (Life Skill), Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi, Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Produktif dan Penanganan Dampak Pandemi Covid 19 di sektor Produksi dan Produktifitas Daerah	9	Akselarasi Penyediaan Lapangan Kerja, Kualitas Tenaga Kerja dan Kesesuaian Kompetensi Angkatan Kerja dengan Kebutuhan Lapangan Kerja dan Penanganan Dampak Pandemi Covid 19 di sektor Produksi dan Produktifitas Daerah	9	Optimalisasi Penyediaan Lapangan Kerja, Kualitas Tenaga Kerja dan Kesesuaian Kompetensi Angkatan Kerja dengan Kebutuhan Lapangan Kerja.
	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	Mengembangkan Produksi dan Produktifitas Daerah, Menguatkan Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Produktif	10	Peningkatan produksi komoditas daerah	10	Peningkatan Nilai Tambah Produk	10	Peningkatan Daya Saing Produk/Komoditas Daerah dengan mempertimbangkan dampak	10	Optimalisasi Daya Saing Produk/Komoditas Daerah dengan mempertimbangkan	10	Peningkatan Produktifitas Ekonomi Masyarakat dan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan Tahun								
				2019		2020		2021		2022		2023
Visi : Palopo Maju Inovatif Berkelanjutan												
		Masyarakat disertai peningkatan Skala Usaha dan Aksesibiltas Kelembagaan Usaha Masyarakat serta pengembangan industri unggulan dan industri potensial lainnya (Stra 10)						Pandemi Covid 19.		dampak Pandemi Covid 19.		
Misi 5 Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu												
Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Meningkatkan daya saing pariwisata disertai dengan peningkatan SDM dan partisipasi masyarakat serta iven pariwisata, Kelembagaan, Penguasaan Teknologi dan Iklim Usaha yang Kondusif dengan ikut menguatkan dan mengembangkan sarana prasarana, kerjasama dan pemasaran produk ekonomi kreatif daerah (Stra 11)	11	Peningkatan Pembinaan Kapasitas Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.	11	Akselerasi Pembinaan Usaha,Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.	11	Pemantapan Pembinaan Kapasitas Pelaku Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.	11	Optimalisasi Pembinaan Kapasitas Pelaku Usaha, Permodalan/ Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.	11	Pengembangan Pembinaan Kapasitas Pelaku Usaha, Permodalan/ Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.

6.3. Program Pembangunan Daerah

Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, Program Pembangunan Daerah adalah **program strategis daerah** yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sehingga sebuah **program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.**

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan **untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran** yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran, Pemerintah Kota Palopo memiliki 12 Program Pembangunan Daerah. Berikut adalah program Pembangunan Daerah Kota Palopo 2019-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6.4.
Program Pembangunan Daerah Kota Palopo 2019-2023
(Sesudah Perubahan RPJMD)

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
VISI ; PALOPO MAJU INOVATIF BERKELANJUTAN											
Misi 1 : Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan											
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)	**Indeks Pembangunan Manusia (Point)**	**77.98**	**78.4**	**279,254,206,490**	**78.82**	**284,527,483,759**	**79.25**	**302,484,486,983**	**79.25**	**866,266,177,232**	
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Indeks Pendidikan	77.79	78.37	65,527,909,000	78.48	60,298,731,725	78.59	66,428,897,015	78.59	192,255,537,740	
PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PP 1)	**Angka Rata-Rata Putus Sekolah Pendidikan Dasar (%)**	**1.18**	**0**	**65,527,909,000**	**0**	**60,298,731,725**	**0**	**66,428,897,015**	**0**	**192,255,537,740**	
	Angka Melek Huruf (%)	**98.4**	**100**		**100**		**100**		**100**		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99.44	100	65,295,000,000	100	60,000,000,000	100	65,864,696,997	100	191,159,696,997	OPD Pelaksanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Lokal (%)	n/a			5	50,000,000	30	307,500,000	35.00	357,500,000	OPD Pelaksanan Urusan Pemerintah

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
											an Bidang Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang Memenuhi Rasio Ideal Guru dan Siswa	n/a	100	62,371,000	100	63,930,275	100	65,528,532	100.00	191,829,807	OPD Pelaksanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan di Palopo yang Aktif (%)		10.24	170,538,000	16.70	184,801,450	22.50	191,171,486	22.50	546,510,936	OPD Pelaksanan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Indeks Kesehatan	78.14	78.21	213,726,297,490	78.58	224,228,752,034	78.76	236,055,589,968	78.76	674,010,639,491	
PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN (PP2)	**Angka Partisipasi Penduduk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (%)**	**96.04**	**100**	**213,726,297,490**	**100**	**224,228,752,034**	**100**	**236,055,589,968**	**100**	**674,010,639,491**	
	Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	**30.47**	**30**		**20**		**10**		**10**		
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	**0.61**	**0.5**		**0.4**		**0.3**		**0.3**		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Universal Helath Coverage (%)	96.04	100	207,779,593,390	100.00	217,492,227,181	100.00	229,109,876,994	100.00	654,381,697,565	OPD Pelaksana Urusan Pem. Bidang Kesehatan (& RSUD)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS (%)	37.00	-	-	41.00	766,000,000	42.00	820,000,000	42.00	1,586,000,000	OPD Pelaksana Urusan Pem. Bidang Kesehatan
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang Ber KB (%)	n/a	80.29	5,946,704,100	82	5,970,524,853	84	6,125,712,974	84.04	18,042,941,926	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.82	6.57	9,704,068,452	6.28	9,469,607,213	5.99	10,330,462,466	5.99	29,504,150,997	
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)	**Paritas Daya Beli**	**12,986**	**13,048**	**9,704,068,452**	**13,320**	**9,469,607,213**	**13,413**	**10,330,462,466**		**29,504,150,997**	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
	Indeks Pengeluaran	**78.12**	**78.2**		**78.38**		**78.85**		**78.85**		
	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	**26.09**	**26.28**		**25.74**		**25.10**		**25.10**		
	Tingkat Pertumbuhan Penduduk (%)	**2.17**	**2.29**		**2.28**		**2.27**		**2.27**		
	Rasio ketergantungan	**47.98**	**47.14**		**46.70**		**46.26**		**46.26**		
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	**77.53**	**77.85**		**78.20**		**78.56**		**78.56**		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Layanan Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	63.27	63	178,200,000	64	182,655,000	65	250,000,000	65	610,855,000	Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	44.27	55.25	5,267,200,000	56	5,398,658,600	56	5,533,625,065	56	16,199,483,665	Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Peningkatan	n/a	1	28,232,000	1	25,276,500	1	25,908,413	3	79,416,913	Pengendalian

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Keluarga Sejahtera I yang Meningkat Menjadi Keluarga Sejahtera (%)										Penduduk & Keluarga Berencana
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	35,000,000	2	35,875,000	2	36,771,875	2	107,646,875	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pembinaan Kualitas Keluarga	-	80	23,100,000	87	90,000,000	95	90,000,000	95	203,100,000	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase keluarga miskin yang telah memiliki rumah layak huni	93.58	97.62	2,488,235,452	98.10	2,239,866,338	98.50	2,850,000,000	98.50	7,578,101,790	Perumahan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan (%)	14	28	629,137,000	28	643,266,425	28	659,348,086	100.00	1,931,751,511	Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Lokasi Rawan pangan Kota Palopo (Kelurahan)	7	6	76,650,000	5	78,566,250	4	80,530,406	4	235,746,656	Pangan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Distributor Barang Bersubsidi , Bahan Pokok dan Penting Lainnya Yang Diawasi	100	100	398,000,000	100	402,000,000	100	419,000,000	100	1,219,000,000	Perdagangan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Keluarga Miskin yang Mendapatkan Edukasi (%)	-	2	131,314,000	2.00	134,443,100	2.00	137,804,178	2.00	403,561,278	Bakesbangpol
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang Menyediakan Layanan Perlindungan Perempuan yang Terstandarisasi (%)	2	2	449,000,000	2	152,000,000	2	158,474,444	6	759,474,444	PP& PA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Diselesaikan (%)	100		0	100	87,000,000	100	89,000,000	100	176,000,000	PP& PA
Misi 2 : Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau											
Terwujudnya Infrastruktur	**Indeks Daya Saing**	**85.77**	**85.9**	**111,801,762,000**	**86.2**	**132,675,394,570**	**86.7**	**158,908,112,775**	**86.7**	**403,385,269,345**	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
Perkotaan yang berkualitas (T.2)	**Infrastruktur (Angka)**										
Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	1.68	1.61	563,195,500	1.57	2,427,087,138	1.53	2,743,033,803	1.53	5,733,316,441	
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DAN HUNIAN LAYAK (PP4)	**Angka Persentase Pemukiman yang Tertata (%)**	**92.84**	**93**	**563,195,500**	**93.5**	**2,427,087,138**	**93.75**	**2,743,033,803**	**93.75**	**5,733,316,534**	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	4.31		0	0.60	1,200,000,000	0.40	1,200,000,000	0.40	2,400,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Perumahan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)	25.79	30	53,950,000	35	54,810,500	40	57,700,250	40	166,460,750	OPD Penyelenggara Urusan Perumahan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Luas Permukiman yang Infrastrukturnya dikembangkan (Ha)	0		0	0.02	650,000,000	0.03	950,000,000	0.05	1,600,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	52	54	407,545,500	55	417,734,138	56	428,177,491	56	1,253,457,128	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Objek Tanah Kosong	30	40	8,000,000	50.00	8,500,000	60.00	8,712,500	60.00	25,212,500	OPD Penyelenggara Urusan Pertanahan
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Luas Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	40	52	93,700,000	83.00	96,042,500	90.00	98,443,563	90.00	288,186,063	OPD Penyelenggara Urusan Transmigrasi
Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Indeks Layanan Jalan (Poin)	67.51	67.95	20,253,548,000	68.15	19,741,811,700	68.45	19,876,106,993	68.45	59,871,466,693	
PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH (PP5)	**Proprosi Panjang Jalan yang Berkondisi Baik (%)**	**69.57**	***70.00***	**20,253,548,000**	***71.00***	**19,741,811,700**	***72.00***	**19,876,106,993**	**72.00**	**59,871,466,693**	
	Rasio Ketersediaan/Kerapatan Jalan per Luas Wilayah (Km/Km2)	**1.98**	**2.00**		**2.10**		**2.20**		**2.20**		
	Rasio Panjang Jalan per	**27.25**	**29.00**		**30**		**30**		**30**		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
	Jumlah Penduduk (Km/Per 10.000 Jiwa)										
	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (Km/1000 Unit Kendaraan)	**13.18**	**14**		**15**		**16**		**16**		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proprosi Panjang Jalan yang Berkondisi Baik (%)	69.57	70	15,437,000,000	71	14,290,000,000	72	14,780,000,000	72	44,507,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat			1,022,468,000		1,562,879,700		1,109,951,693		3,695,299,393	OPD Penyelenggara Urusan Perhubungan
	Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kota Palopo yang Dijangkau Penerangan Jalan Umum (%)			3,720,000,000		3,813,000,000		3,908,325,000		11,441,325,000	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Usaha Pelayaran yang Berizin	n/a	25	74,080,000		75,932,000		77,830,300		227,842,300	OPD Penyelenggara Urusan Perhubungan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	12.58	10	90,985,018,500	7	110,506,495,733	2	136,288,971,979	2	337,780,486,211	
	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.95	79.98		80		80.1		80.1		
PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)	**Jumlah Kejadian Banjir Kategori Bencana (Kali/Tahun)**	**5**	**0**	**90,985,018,500**	**0**	**110,506,495,733**	**0**	**136,288,971,979**	**0**	**337,780,486,211**	
	Jumlah Kelurahan yang Terdampak Banjir (Keluarahan/Tahun)	**6 (2018)**	**4**		**3**		**2**		**1**		
	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola/ditangani (Ha)	**4222**	**4222**		**4224**		**4226**		**4226**		
	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	**4.11**	**4.2**		**4.3**		**4.4**		**4.4**		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Wilayah Rawan Banjir dan Kawasan Produktif yang Sarana Prasarana	60	62	1,157,118,500	65	1,186,046,463	70	3,129,318,134	70	5,472,483,097	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum &

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
	Sumber Daya Airnya Ditangani (Ha)										Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	8.87	9	3,653,000,000	10	3,528,582,532	11	3,837,933,125	11	11,019,515,657	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Luas ruang terbuka Hijau yang tertata	-	-	0	45	562,454,651	47	1,045,499,999	47	1,607,954,650	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung berizin Yang Terbangun (%)	0.036	23	70,010,000,000	24	87,654,334,587	25	107,234,266,283	25	264,898,600,870	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola/ditanganI (Ha)	1500	1174	2,999,600,000	1176	3,100,000,000	1177	3,565,000,000	1177	9,664,600,000	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan (%	67.83	67.85	12,980,000,000	67.88	13,100,000,000	67.9	16,375,000,000	67.9	42,455,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Kajian Lingkungan yang Disusun (Buah)	0	1	26,200,000	4	300,000,000		0		326,200,000	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana Prasarana persampahan yang berfungsi dengan baik (%)	4.1		0	4.9	912,000,000	5	934,800,000	5	1,846,800,000	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status Kualitas Air dan Udara	Cemar Ringan	Cemar Ringan	146,000,000	Baik	149,650,000	Baik	153,391,250	Baik	449,041,250	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Sumber Limbah B3 di Kota Palopo yang diawasi	100	100	13,100,000	100	13,427,500	100	13,763,188	100	40,290,688	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
Misi 3 : Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan											
Terwujudnya Birokrasi Profesional	**Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)**	**52.7**	**68**	**237,009,918,224**	**70**	**243,378,051,507**	**72**	**258,789,818,133**	**72**	**739,177,787,864**	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
Kompetitif dan Melayani (T.3)											
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	52.43	70	44,316,254,500	80	47,121,140,430	85	56,483,070,665	85		
PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7)	**Proporsi Perangkat Daerah yang Nilai LHE SAKIPnya Diatas 50 Poin (%)**	**12**	**33**	**44,316,254,500**	**45**	**47,121,140,430**	**60**	**56,483,070,665**	**60**	**147,920,465,595**	
	Proprosi Perangkat Daerah yang memiliki nilai LHE PMPRB Diatas 50 Poin (%)	**12**	**33**		**50**		**60**		**60**		
	Rata-Rata Indeks Profesionalisme Aparatur (Point)	**50.01**	**51**		**52**		**53**		**53**		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Kinerja Tahunan Terhadap Target Kinerja Tahunan dalam RKPD (%)	87.71	90	648,800,000	91	887,693,921	92	3,056,619,517	92	4,593,113,438	Bappeda
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Tingkat Kesesuaian Program/Kegiatan Perangkat	99.44	100	716,037,500	100	903,938,438	100	2,475,000,000	100	4,094,975,938	Bappeda

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
PEMBANGUNAN DAERAH	Daerah Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah (%)										
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67.13	70	2,085,000,000	75	2,515,478,000	80	2,585,478,000	80	7,185,956,000	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rata-Rata Nilai PMPRB Organisasi Perangkat Daerah	58.7	70	30,975,000	75	550,000,000	80	590,000,000	80	1,170,975,000	Inspektorat
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	100	19,840,000,000	100	20,335,959,513	100	22,844,358,500	100	63,020,318,013	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah	-	100	1,275,000,000	100	1,306,531,333	100	3,339,194,616	100	5,920,725,949	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Angka Tingkat Ketersediaan Data Statistik Sektoral	0	0	80,890,800	0	82,913,070	0	84,985,897	0	248,789,767	OPD Pelaksana Fungsi Statistik

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
	Perangkat Daerah sesuai Permendagri 86 (%)										
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang ditempatkan sesuai Syarat Jabatan & Syarat Kompetensinya	42	51	2,272,000,000	56	2,257,319,238	60	2,313,752,218	60	6,843,071,456	Kepegawaian dan Pengembangan SDM
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	166	170	3,869,000,000	175	3,965,315,769	180	4,065,040,988	180	11,899,356,757	Kepegawaian dan Pengembangan SDM
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Arsip (%)	2	6	45,000,000	8	45,977,400	10	47,126,835	10	138,104,235	OPD Pelaksana Fungsi Arsip
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan	15	17	34,751,200	19	35,618,750	22	36,509,219	22	106,879,169	OPD Pelaksana Fungsi Arsip

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
	pertanggungjawaban										
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Prog, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Dokumen Penganggaran Terhadap Dokumen Perencanaan (%)	96.77	100	10,275,000,000	100	10,345,000,000	100	10,665,000,000	100	31,285,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Pengelola Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Barang yang Memenuhi SAP	92.06	100	3,120,000,000	100	3,865,000,000	100	4,355,000,000	100	11,340,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Pengelola Keuangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang pengelolaan Informasi sesuai SOP (%)	0	0	23,800,000	0	24,395,000	0	25,004,875	0	73,199,875	OPD Pelaksana Fungsi Persandian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	83.4	84	192,693,663,724	85	196,256,911,077	86	202,306,747,468	86	591,257,322,269	
PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)	**Rata-rata Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)**	**92.23**	**100**	**161,346,758,500**	**100**	**163,916,523,875**	**100**	**168,471,146,809**	**100**	**493,734,429,184**	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
	Pemerintah Kota (%)										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99.44	100	65,295,000,000	100	65,200,000,000	100	65,864,696,997	100	196,359,696,997	OPD Pelaksanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Universal Helath Coverage (%)	96.04	100	83,878,000,000	100	88,142,227,181	100	91,776,126,994	100	263,796,354,175	OPD Pelaksana Urusan Pem. Bidang Kesehatan
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Menerima Layanan Sesuai Standar	100	100	237,000,000	100	242,613,656	100	350,000,000	100	829,613,656	Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi	100	100	158,888,750	100	162,759,494	100	166,828,481	100	488,476,725	Sosial

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
	kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah										
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Total Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	847,950,000	100	821,659,475	100	842,200,962	100	2,511,810,437	BPBD
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Total Persentase Rata-rata Gangguan Trantibum dan Perda/Perkada yang dapat diselesaikan	100	100	2,490,000,000	100	2,498,591,250	100	2,561,056,031	100	7,549,647,281	Satpol PP
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rata-rata Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi	100	100	98,320,000	100	100,778,000	100	103,297,450	100	302,395,450	Perumahan & Kawasan Pemukiman,

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
	serta Fasilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Terdampak Program Pemerintah di Kota Palopo										
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Telah Memiliki Akses Terhadap Air Minum (%)	95.61	100	5,877,500,000	100	4,156,000,000	100	4,174,633,125	100	14,208,133,125	Pekerjaan Umum
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	89.5	100	696,799,750	100	714,181,819	100	732,036,364	100	2,143,017,933	Pekerjaan Umum
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Pengaduan dan Evakuasi yang Dilaksanakan dengan Memenuhi Respon Time 15 Menit	100	100	1,767,300,000	100	1,877,713,000	100	1,900,270,404	100	5,545,283,404	Pemadam Kebakaran

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)	**Proporsi Perangkat Daerah yang Telah Melaksanakan Layanan Publik Ber SOP (%)**	**n/a**	**60**	**31,346,905,224**	**70**	**32,340,387,202**	**80**	**33,835,600,659**	**80**	**97,522,893,085**	
	Angka Proprosi Perangkat Daerah yang Menyusun Inovasi Layanan Publik (%)	**1**	**3**		**4**		**5**		**5**		
	Angka Rata-Rata Pemenuhan Usulan Prioritas Per Kecamatan yang sampai pada dokumen APBD (%)	**25**	**27**		**29**		**32**		**32**		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	100	100	5,467,435,000	100	5,675,870,875	100	5,817,767,648	100	16,961,073,523	Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata LPM, LSM, LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	100	100	4,326,400,000	100	4,434,560,000	100	4,545,424,000	100	13,306,384,000	Kecamatan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	97.9	100	335,206,000	100	343,586,150	100	352,175,804	100	1,030,967,954	Kecamatan
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Wajib KTP yang Terlayani (%)	85	90	87,000,000	95	88,621,500	100	90,837,038	100	266,458,538	OPD Pelaksana Fungsi Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	65	80	731,000,000	85	749,042,452	90	767,768,513	90	2,247,810,966	OPD Pelaksana Fungsi Komunikasi & Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase KIM masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	60	70	2,885,000,000	85	2,956,151,250	90	3,030,055,031	90	8,871,206,281	OPD Pelaksana Fungsi Komunikasi & Informatika
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan yang Berizin	100			100	50,000,000	100	51,250,000	100	101,250,000	OPD Pelaksanan Urusan Pemerintah

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
											an Bidang Pendidikan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat dan Alat Kesehatan, serta Usaha TTM & TTU dan Usaha Lain yang Memenuhi Syarat Kesehatan (%)	35	36	505,783,000	37	555,000,000	38	568,875,000	38	1,629,658,000	OPD Pelaksana Urusan Pem. Bidang Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter Per Satuan Puskesmas (Orang/Puskesmas)	4.83	5	6,550,000	5	6,713,750	5	6,881,594	5	20,145,344	OPD Pelaksana Urusan Pem. Bidang Kesehatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Izin tentang Lingkungan yang Diproses Tepat Waktu (%)	100	100	49,900,000	100	50,000,000	100	51,250,000	100	151,150,000	OPD Pelaksana Fungsi Lingkungan Hidup
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Usaha Simpan Pinjam yang Berizin	71			72	12,000,000	73	12,300,000	73	24,300,000	OPD Pelaksana Fungsi Koperasi & UMKM

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin	0	0	0	30	38,000,000	35	38,950,000	35	76,950,000	OPD Pelaksana Fungsi Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentasel Unit Industri yang Berizin	12.04	14	40,000,000	16	41,000,000	18	42,025,000	18	123,025,000	OPD Pelaksana Fungsi Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penyelesaian Ijin Lokasi Tanah Negara (%)	100	100	8,100,000	100	8,302,500	100	8,510,063	100	24,912,563	OPD Pelaksana Fungsi Pertanahan
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Subjek Ganti Kerugian Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah	0	40	9,005,000,000	60	9,075,000,000	70	10,000,000,000	70	28,080,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Pertanahan
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi (Privat) (%)	22.53	40	6,600,000	45	6,765,000	55	6,934,125	55	20,299,125	OPD Pelaksana Fungsi Pertanahan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kwartir Pramuka yang Aktif			0	100	120,000,000	100	150,000,000	100	270,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Kepemudaan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian	100	100	467,000,000	100	478,411,319	100	490,371,602	100	1,435,782,920	OPD Pelaksana Fungsi Penelitian &

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
	Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, dan Teknologi yang Diwujudkan										pengembangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanaan Pangan	86,49	89	39,392,500	90	40,148,225	91	41,151,931	91	120,692,656	OPD Pelaksana Fungsi Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Sistem Data Gender dan Anak yang Berfungsi Baik		1	14,020,000	1	48,347,719	1	49,500,000	1	111,867,719	OPD Pelaksana Fungsi PPPA
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Angka Tngkat Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak	703.25	705	96,812,500	706	143,000,000	710	148,000,000	710	387,812,500	OPD Pelaksana Fungsi PPPA
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Luas Taman Makam Pahlawan yang Dikelola (Ha)	2.5	2.5	58,000,000	2.5	59,404,900	2.5	60,890,023	2.5	178,294,923	OPD Pelaksana Fungsi Sosial
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	93.84	95	852,000,000	95	873,300,000	98	895,132,500	98	2,620,432,500	OPD Pelaksana Fungsi Kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	Jumlah Sistem Informasi Kependudukan	1	1	237,000,000	1	237,000,000	1	237,000,000	1	711,000,000	OPD Pelaksana Fungsi

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	yang Berfungsi Baik										Kependudukan
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	36.36	33.33	31,920,000	35	32,718,000	37	33,535,950	37	98,173,950	OPD Pelaksana Fungsi Pertanahan
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penetapan Objek Redistribusi Tanah	83.33	40	60,354,000	70	61,862,850	75	63,409,421	75	185,626,271	OPD Pelaksana Fungsi Pertanahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Angka Pertumbuhan Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar	-	100	1,400,000,000	100	1,358,125,000	100	1,392,078,125	100	4,150,203,125	OPD Pelaksana Fungsi Kesatuan Bangsa
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	100	113,000,000	100	115,620,000	100	118,510,500	100	347,130,500	OPD Pelaksana Fungsi Kesatuan Bangsa
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN	Cakupan Lembaga atau Organisasi yang Mendapatkan	-	100	953,192,490	100	976,714,802	100	1,001,132,672	100	2,931,039,965	OPD Pelaksana Fungsi

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pendidikan Politik										Kesatuan Bangsa
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Prolegda yang Ditetapkan Menjadi Perda	0	0	3,019,000,000	0	3,048,489,060	0	3,088,804,272	0	9,156,293,332	Setwan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang Tersertifikasi dan Teregistrasi (%/Thn)	0	10	39,175,000	20	40,154,375	30	43,190,437	30	122,519,812	OPD Pelaksana Fungsi Perumahan & Pemukiman
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Kasus Korban Tindak Kekerasan Migran yang Diseleksaikan (%)	-		0	50	45,000,000	50	46,125,000	50	91,125,000	OPD Pelaksanan PPPA
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN	Persentase Wilayah Rawan Konflik yang Dibina (%)	100	100	466,035,734	100	524,297,750	100	537,405,194	100	1,527,738,678	OPD Pelaksana Fungsi

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											Kesatuan Bangsa
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Aktif	100	100	17,575,000	100	18,014,375	100	18,464,734	100	54,054,109	OPD Pelaksana Fungsi Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	100	100	28,454,000	100	29,165,350	100	29,894,484	100	87,513,834	OPD Pelaksana Fungsi Lingkungan Hidup
Misi 4 : Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis											
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	**Pertumbuhan PDRB (%)**	**6.75**	**4.16**	**14,912,847,820**	**4.68**	**17,761,955,439**	**5.69**	**18,532,297,298**	**5.69**	**51,207,100,557**	
Meningkatnya Kesempatan Berusaha dan Kualitas Tenaga Kerja (S.9)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10.32	9.03	2,422,412,390	8.55	2,677,178,019	8.07	2,679,216,186	8.07	7,778,806,595	
PROGRAM PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN USAHA SERTA PENINGKATAN	**Rasio Penduduk yang Bekerja**	**89.68**	**90.95**	**2,422,412,390**	**91.43**	**2,677,178,019**	**91.91**	**2,679,216,186**	**91.91**	**7,778,806,595**	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
KUALITAS TENAGA KERJA (PP10)											
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	53.12	54	216,300,000	55	221,707,500	56	227,250,188	56	665,257,688	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	11	12	123,300,000	13	126,382,500	14	129,542,063	14	379,224,563	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Tenaga Kerja
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	75.4			78.95	61,730,000			78.95	61,730,000	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Tenaga Kerja
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Per 100 Juta Nilai PMDN)	13.65 (2018)	14	41,400,000	15	42,435,000	16	43,495,875	16	127,330,875	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Penanaman Modal
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi yang Masuk per Tahun (%/Thn)	-39.01	20	155,000,000	30	158,875,000	40	162,846,875	90	476,721,875	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Penanaman Modal

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi /Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	55	60	95,934,000	65	98,332,350	70	100,790,659	70	295,057,009	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata & Ekonomi Kreatif Daerah (%)	n/a	75	300,000,000	80	307,295,000	90	314,977,375	90	922,272,375	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.35	1.36	1,019,000,000	1.38	1,044,475,000	1.39	1,070,586,875	5.02	3,134,061,875	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Kepemudaan
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (%)	30	30	451,904,000	35	463,201,600	36	474,781,640	36	1,389,887,240	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Koperasi dan UMKM
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	51	46.6	14,554,390	47.49	147,598,569	48.39	149,670,500	48.39	311,823,459	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Pemberdayaan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
											Perempuan & Perlindungan Anak
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	luas pemanafaatan dan penggunaan tanah (Ha)		12.706	5,020,000	16.006	5,145,500	17.025	5,274,138	17.025	15,439,638	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Pertanahan
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	Produktifitas Total Daerah (Juta/Tahun)	98.23	104.13	12,490,435,430	109.94	15,084,777,420	115.75	15,853,081,112	115.75	43,428,293,962	
PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)	**Nilai PDRB ADHB Kota Palopo (Trilyun Rupiah)**	**7,942.48**	**8,232.01**	**12,490,435,430**	**8,604.23**	**15,084,777,420**	**9,084.90**	**15,853,081,112**	**9,084.90**	**43,428,293,962**	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil (%/Tahun)	30	30	109,000,000	35	327,000,000	36	250,000,000	36	686,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Koperasi dan UMKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Angka Persentase Koperasi yang Aktif (%/Thn)	72	71	10,600,000	72	10,865,000	73	11,136,625	73	32,601,625	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Koperasi dan UMKM
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat (%/Thn)	80	73	13,850,000	73	14,196,250	73	14,551,156	73	42,597,406	OPD Penyelenggara Urusan Bidang

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
											Koperasi dan UMKM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya	71	71	10,800,000	71	11,070,000	72	11,346,750	72	33,216,750	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Koperasi dan UMKM
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Thn)	18,347	19,702	265,904,730	19,899	272,552,348	20,098	279,366,157	59,699	817,823,235	OPD Penyelenggara Urusan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Thn)	115,134	136,794	437,800,000	143,634	448,745,000	150,816	459,963,625	431,244	1,346,508,625	OPD Penyelenggara Urusan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton/Thn)	121	112	66,620,000	112	68,285,500	113	69,992,638	338	204,898,138	OPD Penyelenggara Urusan Perikanan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan & Perkebunan	5	5	4,776,000,000	5	4,894,000,145	5	5,016,350,149	5	14,686,350,294	OPD Penyelenggara Urusan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Lahan Sawah ber Indeks Pertanaman (IP) diatas 2	5	5	185,325,000	7	1,436,329,550	9	1,518,087,788	9	3,139,742,338	OPD Penyelenggara Urusan Pertanian

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang Mampu Meningkatkan Produksi/Produktifitasnya	52	53	560,000,000	54	573,576,675	55	587,916,092	55	1,721,492,767	OPD Penyelenggara Urusan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% Luas Lahan Pertanian yang Gagal Panen/Gagal Tanam (Ha/Thn)	0.7	0.7	72,902,000	0.6	74,778,875	0.5	76,648,347	0.5	224,329,222	OPD Penyelenggara Urusan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1.05	1..2	329,000,000	1.26	145,000,000	1.32	148,625,000	1.32	622,625,000	OPD Penyelenggara Urusan Pertanian
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Kelompok Tani yang Memanfaatkan Infrastruktur Ketahanan Pangan (Kelompok)	n/a		0	3	992,902,917	3	1,098,162,156	6	2,091,065,073	OPD Penyelenggara Urusan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Jumlah Retribusi dari Pasar (%/Tahun)	12.41	12.5	837,270,000	13	875,000,000	13.5	898,000,000	13.5	2,610,270,000	OPD Penyelenggara Urusan Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI	Persentase alat-alat	50.08	55	65,420,000	62	66,000,000	65	67,500,000	65	198,920,000	OPD Penyelengg

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku										ara Urusan Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha Produk lokal Yang Masuk Pasar	n/a	19.23	24,552,500	26.92	33,000,000	30.76	40,000,000	30.76	97,552,500	OPD Penyelenggara Urusan Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	% Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	n/a	85	113,360,000	90	116,194,000	95	119,098,850	95	348,652,850	OPD Penyelenggara Urusan Perindustrian
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja	98.23	104.13	189,000,000	109.94	192,904,180	115.75	540,649,375	115.8	922,553,555	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Tenaga Kerja
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Realisasi Pendapatan Daerah dengan Target	97.88	100	3,492,558,200	100	3,579,872,155	100	3,669,368,959	100	10,741,799,314	OPD Penyelenggara Urusan Keuangan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
	Pendapatan Daerah (%/Thn)										
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Angka Pertumbuhan Jumlah Investor di Daerah (%)	-39.53%	10	593,900,000	12	607,517,500	15	622,705,438	37	1,824,122,938	OPD Penyelenggara Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Investor dan Penanam Modal di Daerah yang yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	100	100	322,573,000	100	330,637,325	100	338,903,258	100	992,113,583	OPD Penyelenggara Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri Kecil Menengah dan Perusahaan di Kawasan Industri Kota Palopo yang Datanya Masuk dalam SII Nasional	0	20	14,000,000	35	14,350,000	45	14,708,750	45	43,058,750	OPD Penyelenggara Urusan Perindustrian
Misi 5 : Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu											
Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)	**Total Kontribusi PAD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PAD (%)**	**8.8**	**8.78**	**2,817,392,000**	**9.8**	**3,477,822,375**	**10.89**	**9,054,439,809**	**10.89**	**15,349,654,184**	
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan	Kontribusi Pariwisata terhadap	5.12	5	2,817,392,000	6	3,477,822,375	7	9,054,439,809	7	15,349,654,184	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)										
	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	3.76	3.78		3.8		3.89		3.89		
PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA, EKRAF DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG (PP12)	**Nilai PAD dari ekonomi kreatif daerah (Rupiah)**	**6.2 Milyar**	**6,5 Milyar**	**2,817,392,000**	**6.8 Milyar**	**3,477,822,375**	**7.09 Milyar**	**9,054,439,809**	**7.09 Milyar**	**15,349,654,184**	
	Nilai PAD sektor pariwisata (Rupiah)	**8.5 Milyar**	**8 Milyar**		**9 Milyar**		**10 Milyar**		**10 Milyar**		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Pengunjung Pada Destinasi Wisata Unggulan Daerah (Orang/Tahun)	n/a`	120000	45,000,000	125000	46,125,000	130000	3,800,000,000	375000	3,891,125,000	OPD Pelaksanan Urusan Parwisata & Ekraf
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan (%/Tahun)	n/a`	5	69,500,000	5	70,933,075	10	72,706,402	20	213,139,477	OPD Pelaksanan Urusan Parwisata & Ekraf

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Usaha Ekraf Binaan yang Aktif Berusaha (%)	n/a		0	80	750,000,000	90	2,500,000,000	90	3,250,000,000	OPD Pelaksanan Urusan Parwisata & Ekraf
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah binaan yang berpredikat adiwiyata	100	100	41,395,000	100	42,429,875	100	43,490,622	100	127,315,497	OPD Pelaksanan Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Kelompok Budaya Binaan dalam Iven Kepariwisataan Daerah	100	100	382,000,000	100	195,000,000	100	199,875,000	100	776,875,000	OPD Pelaksanan Urusan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Kesenian Masyarakat yang Aktif Berpartisipasi dalam Event Kepariwisataan Daerah	-	100	27,978,000	100	28,677,450	100	29,394,386	100	86,049,836	OPD Pelaksanan Urusan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Iven Pameran Sejarah yang	-	5	28,369,000	5	29,078,225	5	29,805,181	15	87,252,406	OPD Pelaksanan Urusan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023				
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
	Dilaksanakan (Kali/Tahun)										Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Luas Lokasi Cagar Budaya yang Dikelola (Ha)	-	1	126,000,000	1	126,000,000	1	129,150,000	3	381,150,000	OPD Pelaksanan Urusan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Event Olahraga yang Dilaksanan untuk Mendukung Kepariwisataan (Kali/Tahun)	n/a	1	2,088,000,000	1	2,140,200,000	2	2,193,705,000	4	6,421,905,000	OPD Pelaksanan Urusan Keolahragaan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Usaha kepariwisataan dan ekraf yang tergabung dalam koperasi (%)	n/a	-	9,150,000	4	9,378,750	5	9,613,219	5	28,141,969	OPD Pelaksanan Urusan Koperasi & UMKM
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Event Pameran Naskah Kuno yang Dilaksanakan (Kali/Tahun)			0	1	40,000,000	1	46,700,000	2	86,700,000	OPD Pelaksanan Urusan Perpustakaan

Tabel 6.5.
Program Pembangunan Daerah s.d Tahun 2020

(Sebelum Perubahan RPJMD)

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
Misi 1 : Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan							
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	76.71	77.86		77.98		
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10.33	10.36		10.39		
PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PP 1)	Persentase Rata-Rata Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar (%)	1.27	0	240,965	0	192,841	Dinas Pendidikan & Dinas Perpustakaan
	Angka Melek Huruf	98.02	100		100		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Angka Harapan Hidup	70.3	70.32		70.34		
PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN (PP2)	Tingkat Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) (%)	88.87	100	120,351	100	96,420	Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pemuda dan Olahraga
	Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	68	65		60		
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	2	1		1		
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase Penduduk Miskin (%)	8.78	8.1		7.64		
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	40.07	39.97	81,308	39.91	25,121	Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Dinas PPA, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan,
	Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	12319	12,684		12,866		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
	Rasio ketergantungan	48.46	48.02		47.58		Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Setda, Bappeda, Bakesbang Pol Linmas
	Tingkat Pertumbuhan Penduduk (%)	2.31	2.3		2.29		
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.91 (2015)	73.85		74.15		
Misi 2 : Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau							
Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	n/a	80		81		
Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	1.2	0		0		
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DAN HUNIAN LAYAK (PP4)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	20.98	25	24,556	30	15,334	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman, Dinas PU PR, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas LH dan Kebersihan, Dinas Transmigrasi
	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	90.77	91		92		
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	88.63	90		95		
	Backlog Perumahan (Angka)	5633 (2018)	5133		4633		
Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	9.9	11.02		11.47		
PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH (PP5)	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	1,893,357	1,962,956	81,308	2,032,555	45,128	Dis PU PR, Dinas Perhubungan, Dis Komunikasi dan Informas,

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	18	21		22		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	20.47	18		15		
	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.72	76.83		76.93		
PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)	Jumlah Kejadian Banjir Kategori Bencana (Kali/Tahun)	4	0	35,126	0	28,256	Dis PU PR, Dis Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Bappeda
	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	3.5	4.13		4.77		
Misi 3 : Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan							
Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	62,44	64		66		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	40.33	70		75		
	Level SPIP Daerah (Point)	2.86	3		3		
PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7)	Indeks Profesionalisme Aparatur (Angka)	n/a	70	40,121	71	25,209	Bappeda, BPKAD, Inspektorat, BKDPSDM, Dis Persandian Statistik, Dinas Kearsipan, Bapenda, Sekertariat DPRD, Sekertariat Daerah,
	Jumlah temuan BPK	19	16		15		
	Persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen kelengkapan SAKIP yang terukur (Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, IKU, Rencana Aksi, Laporan Kinerja Triwulan dan Laporan Kinerja Tahunan)	n/a	80		90		
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Ada		Ada		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	79.9	80.78		81.12		
PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)	Rata-rata Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota (%)	n/a	100	35,349	100	27,389	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU PR, Dinas Sosial, Dis Perumahan & Kawasan Pemukiman, BPBD, Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, Satuan Pol PP,
PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)	Predikat Zona Pelayanan Publik (Ombudman)	81.8	82	20,412	83	13,090	DPMPTSP, Dis LH & Kebersihan, Dis Pengendalian Penduduk & KB, Dis Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, Satuan Pol PP, Dis Pertanahan, Dinas Kearsipan, Sekretariat Daerah, Balitbangda, Dis Kominfo, Dis Pemuda & Olahraga, Bakesbang Pol &Linmas, Kecamatan
Misi 4 : Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis							

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	Pertumbuhan PDRB (%)	7.19	7.14		7.16		
Meningkatnya Kesempatan Berusaha dan Kualitas Tenaga Kerja (S.9)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10.96	9.81		9.51		
PROGRAM PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN USAHA SERTA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA (PP10)	Rasio Penduduk yang Bekerja	89.04	90	40,654	90.47	23,639	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	59.56	62.02		63.24		
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (per 100 Juta Investasi)	7.42	9		9		
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37	37.1		37.3		
PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	76.74	77.67	42,757	78.6	20,298	Dis Perindustrian, Dinas Perikanan, Dis Pertanian Peternakan dan Perkebunan,
	Produktivitas total daerah (Juta/Tenaga Kerja/Tahun)	86.69	92.5		98.32		
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2.82	2.9		2.92		
Misi 5 : Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu							
Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)	Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)	1.21 (2016 : Pariwisata Saja)	2	0	2.2	0	
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0.13	0.15		0.17		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		
			Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	2.77	2.8		2.82		
PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA, EKRAF DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG (PP12)	Nilai PAD dari ekonomi kreatif daerah (Rupiah)	4,63 Milyar	4.65 Milyar	50,177	4.67 Milyar	23,189	Dis Pemuda & Olahraga, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dis Koperasi & UMKM, Dis Perhubungan, Dinas PU PR
	Nilai PAD sektor pariwisata (Rupiah)	213 Juta	215 Juta		220 Juta		
	Lama kunjungan wisata (Rata - rata lama kunjungan wisata dalam 1 tahun)	2	2		2		

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional, dimana kerangka pendanaan bersifat indikatif. Dalam perubahan RPJMD ini, kerangka pendanaan merupakan rencana penganggaran tiga tahun ke depan, yang analisis harus didasarkan atas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok-pokok kebijakan fiskal, sebagaimana yang diuraikan pada bab III Perubahan RPJMD Kota Palopo.

Beberapa pertimbangan utama penyusunan kerangka pendanaan adalah proyeksi asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah tiga tahun ke depan, sebagaiman yang diuraikan pada bab III dan Bab IV dokumen perubahan RPJMD Kota Palopo 2018-2023.

Terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah, desain penganggaran sudah harus menunjukkan besaran anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah untuk tiga tahun ke depan. Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah, berikut adalah tabel kerangka pendanaan keuangan daerah Kota Palopo untuk tiga tahun ke depan. Kerangka pendanaan ini memaparkan hasil penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta dengan alokasi prioritas pembangunan daerah Kota Palopo, yang diuraikan sebagai berikiut :

Kerangka pendanaan juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pengalokasian pengaggaran dengan mengakomodir beberapa pendanaan pembangunan daerah yang bersifat multiyears. Berikut adalah tabel kerangka pendanaan pembangunan daerah 2021 s.d 2023 :

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023
Kota Palopo

No.	Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi (Rp)(Juta)		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	**498,321**	**521,288**	**599,944**
5	**BELANJA DAERAH**	**991.605**	**1.038.980**	**1.110.275**
5.1	**Belanja Operasi**	***749.395***	***772.489***	***744.979***
5.1.1	Belanja pegawai	462.345	473.691	475.635
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	277.079	284.837	282.83
5.1.3	Belanja Bunga	2.357	2.000	2.000
5.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
5.1.5	Belanja Hibah	10.713	16.00	25.927
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.913	1.500	1.500
5.2	**Belanja Modal**	**232.695**	**256.45**	**317.881**
5.3	**Belanja Tidak terduga**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5.4	**Belanja Transfer**	**0**	**0**	**0**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0	0	0
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kotadan Pemerintah Desa	0	0	0

7.2. Program Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

Dalam hal program di dalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program pembangunan daerah.

Program baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatanyang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Perumusan program bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Berikut adalah tabel kerangka pendanaan pembangunan Kota Palopo dan Program Perangkat Daerah 2021-2023 :

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Prog ram Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Palopo Tahun 2021-2023

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	8	-9	-10	-11	-12	-13
							-	-	0	-	0			
1			**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**653,282,893,990**		**684,769,119,869**		**728,278,005,510**		**2,066,330,019,369**	
1	**1**		**URUSAN PENDIDIKAN (5)**				**216,357,371,000**		**216,463,930,275**		**221,166,475,529**		**653,987,776,804**	
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	151,000,000,000	100	156,300,000,000	100	154,877,500,000	100	462,177,500,000	OPD Pelaksana Fungsi Pendidikan
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99.44	100	65,295,000,000	100	60,000,000,000	100	65,864,696,997	100	191,159,696,997	OPD Pelaksana Fungsi Pendidikan
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Lokal (%)	n/a	-	-	5	50,000,000	30	307,500,000	35	357,500,000	OPD Pelaksana Fungsi Pendidikan
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang Memenuhi Rasio Ideal Guru dan Siswa	n/a	100	62,371,000	100	63,930,275	100	65,528,532	100	191,829,807	OPD Pelaksana Fungsi Pendidikan
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar yang Berizin	100	-	-	100	50,000,000	100	51,250,000	100	101,250,000	OPD Pelaksana Fungsi Pendidikan
1	**2**		**URUSAN KESEHATAN**	**5**			**138,215,333,000**		**149,336,640,931**		**158,514,883,588**		**446,066,857,519**	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	48,825,000,000	100	49,866,700,000	100	50,343,000,000	100	149,034,700,000	OPD Pelaksana Fungsi Kesehatan
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Universal Helath Coverage (%)	96.04	100	88,878,000,000	100	98,142,227,181	100	106,776,126,994	100	293,796,354,175	OPD Pelaksana Fungsi Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter Per Satuan Puskesmas (Orang/Puskesmas)	4.83	5	6,550,000	5	6,713,750	5	6,881,594	5	20,145,344	OPD Pelaksana Fungsi Kesehatan
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat dan Alat Kesehatan, serta Usaha TTM & TTU dan Usaha Lain yang Memenuhi Syarat Kesehatan (%)	35	36	505,783,000	37	555,000,000	38	568,875,000	38	1,629,658,000	OPD Pelaksana Fungsi Kesehatan
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS (%)	37	-	-	41	766,000,000	42	820,000,000	42	1,586,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Kesehatan
1	**2**	**2**	**RSUD SAWERIGADING (2)**				**149,030,593,390**		**150,211,000,000**		**153,966,275,000**		**453,207,868,390**	
1	2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	30,129,000,000	100	30,861,000,000	100	31,632,525,000	100	92,622,525,000	OPD Pelaksana Fungsi Kesehatan
1	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Universal Helath Coverage (%)	96.04	100	118,901,593,390	100	119,350,000,000	100	122,333,750,000	100	360,585,343,390	OPD Pelaksana Fungsi Kesehatan
1	**3**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (12)**				**119,549,897,750**		**136,619,666,540**		**161,059,955,180**		**417,229,519,470**	
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	22,215,000,000	100	22,450,000,000	100	23,712,500,000	100	68,377,500,000	OPD Pelaksana Fungsi Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Wilayah Rawan Banjir dan Kawasan Produktif yang Sarana Prasarana Sumber Daya	60	62	1,157,118,500	65	1,186,046,463	70	3,129,318,134	70	5,472,483,097	OPD Pelaksana Fungsi Pekerjaan Umum

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
				Airnya Ditangani (Ha)										
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Telah Memiliki Akses Terhadap Air Minum (%)	95.61	100	5,877,500,000	100	4,156,000,000	100	4,174,633,125	100	14,208,133,125	OPD Pelaksana Fungsi Pekerjaan Umum
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana Prasarana persampahan yang berfungsi dengan baik (%)	4.1	-	-	4.9	912,000,000	5	934,800,000	5	1,846,800,000	OPD Pelaksana Fungsi Pekerjaan Umum
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	89.5	100	696,799,750	100	714,181,819	100	732,036,364	100	2,143,017,933	OPD Pelaksana Fungsi Pekerjaan Umum
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)	8.87	9	3,653,000,000	10	3,528,582,532	11	3,837,933,125	11	11,019,515,657	OPD Pelaksana Fungsi Pekerjaan Umum
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Luas Permukiman yang Infrastrukturnya dikembangkan (Ha)	0	-	-	0.022	650,000,000	0.032	950,000,000	0.053	1,600,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Pekerjaan Umum
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung berizin Yang Terbangun (%)	0.036	23	70,010,000,000	24	87,654,334,587	25	107,234,266,283.00	25	264,898,600,870	OPD Pelaksana Fungsi Penataan Ruang
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Luas ruang terbuka Hijau yang tertata	-	-	-	45	562,454,651	47	1,045,499,999	47	1,607,954,650	OPD Pelaksana Fungsi Penataan Ruang
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proprosi Panjang Jalan yang Berkondisi Baik (%)	69.57	70	15,437,000,000	71	14,290,000,000	72	14,780,000,000	72	44,507,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Pekerjaan Umum

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	55	60	95,934,000	65	98,332,350	70	100,790,659	70	295,057,009	OPD Pelaksana Fungsi Pekerjaan Umum
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	52	54	407,545,500	55	417,734,138	56	428,177,491	56	1,253,457,129	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**4**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (6)**				**6,164,610,100**		**7,443,047,543**		**8,118,496,562**		**21,726,154,205**	
1	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	3,484,929,648	100	3,807,438,330	100	3,864,308,425	100	11,156,676,403	OPD Pelaksanan Fungsi Perumahan Pemukiman
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rata-rata Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi serta Fasilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Terdampak Program Pemerintah di Kota Palopo	100	100	98,320,000	100	100,778,000	100	103,297,450	100	302,395,450	OPD Pelaksanan Fungsi Perumahan Pemukiman
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase keluarga miskin yang telah memiliki rumah layak huni	93.58	97.62	2,488,235,452	98.1	2,239,866,338	98.5	2,850,000,000	98.5	7,578,101,790	OPD Pelaksanan Fungsi Perumahan Pemukiman
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	4.31	-	-	0.6	1,200,000,000	0.4	1,200,000,000	0.4	2,400,000,000	OPD Pelaksanan Fungsi Perumahan Pemukiman
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)	25.79	30	53,950,000	35	54,810,500	40	57,700,250	40	166,460,750	OPD Pelaksanan Fungsi Perumahan Pemukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	4	6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang Tersertifikasi dan Teregistrasi (%/Thn)	0	10	39,175,000	20	40,154,375	30	43,190,437	30	122,519,812	OPD Pelaksanan Fungsi Perumahan Pemukiman
1	**5**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (6)**				**15,350,800,000**		**15,800,051,225**		**16,170,667,085**		**47,321,518,310**	
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	4,442,000,000	100	4,553,050,000	100	4,666,876,250	100	13,661,926,250	OPD Pelaksanan Fungsi Ketentraman & Ketertiban
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Total Persentase Rata-rata Gangguan Trantibum dan Perda/Perkada yang dapat diselesaikan	100	100	2,438,000,000	100	2,498,591,250	100	2,561,056,031	100	7,497,647,281	OPD Pelaksanan Fungsi Ketentraman & Ketertiban
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	3,253,500,000	100	3,334,837,500	100	3,418,208,438	100	10,006,545,938	OPD Pelaksanan Fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Pengaduan dan Evakuasi yang Dilaksanakan dengan Memenuhi Respon Time 15 Menit	100	100	1,767,300,000	100	1,877,713,000	100	1,900,270,404	100	5,545,283,404	OPD Pelaksanan Fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2,648,000,000	100	2,714,200,000	100	2,782,055,000	100	8,144,255,000	OPD Pelaksanan Fungsi Penanggulangan Bencana
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Total Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, layanan	100	100	802,000,000	100	821,659,475	100	842,200,962	100	2,465,860,437	OPD Pelaksanan Fungsi Penanggulangan Bencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
				pencegahan dan kesiapsiagaan serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana										
1	**6**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**7**			**8,614,288,750**		**8,894,783,355**		**9,281,252,566**		**26,790,324,671**	
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2,715,000,000	100	2,803,691,705	100	2,873,783,997	100	8,392,475,702	OPD Pelaksanan Fungsi Sosial
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	63.27	63	178,200,000	64	182,655,000	65	250,000,000	65	610,855,000	OPD Pelaksanan Fungsi Sosial
1	6	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Kasus Korban Tindak Kekerasan Migran yang Diseleksaikan (%)	-	-	-	50	45,000,000	50	46,125,000	50	91,125,000	OPD Pelaksanan Fungsi Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Menerima Layanan Sesuai Standar	100	100	237,000,000	100	242,613,656	100	350,000,000	100	829,613,656	OPD Pelaksanan Fungsi Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	44.27	55.25	5,267,200,000	55.5	5,398,658,600	56	5,533,625,065	56	16,199,483,665	OPD Pelaksanan Fungsi Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100	100	158,888,750	100	162,759,494	100	166,828,481	100	488,476,725	OPD Pelaksanan Fungsi Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Luas Taman Makam Pahlawan yang Dikelola (Ha)	2.5	2.5	58,000,000	2.5	59,404,900	2.5	60,890,023	2.5	178,294,923	OPD Pelaksanan Fungsi Sosial
2			**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**				**105,816,978,773**		**111,637,209,817**		**118,789,639,294**		**336,243,827,884**	
2	**7**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**5**			**2,975,600,000**		**3,072,073,830**		**3,428,525,017**		**9,476,198,847**	
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2,447,000,000	100	2,469,349,650	100	2,531,083,391	100	7,447,433,041	OPD Pelaksanan Fungsi Ketenagakerjaan
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Perencanaan tenaga Kerja yang Ditetapkan (%)	75.4	-	-	78.95	61,730,000	-	-	78.95	61,730,000	OPD Pelaksanan Fungsi Ketenagakerjaan
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi (%)	98.23	104.13	189,000,000	109.94	192,904,180	115.75	540,649,375	115.8	922,553,555	OPD Pelaksanan Fungsi Ketenagakerjaan
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	53.12	54	216,300,000	55	221,707,500	56	227,250,188	56	665,257,688	OPD Pelaksanan Fungsi Ketenagakerjaan
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	11	12	123,300,000	13	126,382,500	14	129,542,063	14	379,224,563	OPD Pelaksanan Fungsi Ketenagakerjaan
2	**8**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**7**			**2,805,486,890**		**2,899,953,719**		**2,972,452,561**		**8,677,893,170**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2	8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2,208,000,000	100	2,232,007,431	100	2,287,807,617	100	6,727,815,048	OPD Pelaksanan Fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	51	46.6	14,554,390	47.49	147,598,569	48.39	149,670,500	48.39	311,823,459	OPD Pelaksanan Fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang Menyediakan Layanan Perlindungan Perempuan yang Terstandarisasi (%)	2	2	449,000,000	2	152,000,000	2	158,474,444	6	759,474,444	OPD Pelaksanan Fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pembinaan Kualitas Keluarga	-	80	23,100,000	87	90,000,000	95	90,000,000	95	203,100,000	OPD Pelaksanan Fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Sistem Data Gender dan Anak yang Berfungsi Baik	-	1	14,020,000	1	48,347,719	1	49,500,000	1	111,867,719	OPD Pelaksanan Fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Angka Tngkat Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak (Poin)	703.25	705	96,812,500	706	143,000,000	710	148,000,000	710	387,812,500	OPD Pelaksanan Fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Diselesaikan (%)	100	-	-	100	87,000,000	100	89,000,000	100	176,000,000	OPD Pelaksanan Fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**9**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**5**			**2,822,502,500**		**3,884,139,892**		**4,061,680,056**		**10,768,322,448**	
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2,077,323,000	100	2,129,256,075	100	2,182,487,477	100	6,389,066,552	OPD Pelaksanan Fungsi Ketahanan Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
			DAERAH KABUPATEN/KOTA											
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Kelompok Tani yang Memanfaatkan Infrastruktur Ketahanan Pangan (Kelompok)	n/a	-	-	3	992,902,917	3	1,098,162,156	6	2,091,065,073	OPD Pelaksanan Fungsi Ketahanan Pangan
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan (%)	14	28	629,137,000	28	643,266,425	28	659,348,086	100	1,931,751,511	OPD Pelaksanan Fungsi Ketahanan Pangan
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Lokasi Rawan pangan Kota Palopo (Kelurahan)	7	6	76,650,000	5	78,566,250	4	80,530,406	4	235,746,656	OPD Pelaksanan Fungsi Ketahanan Pangan
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanaan Pangan	86,49	89	39,392,500	90	40,148,225	91	41,151,931	91	120,692,656	OPD Pelaksanan Fungsi Ketahanan Pangan
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**8**			**11,509,383,000**		**11,638,003,975**		**12,627,079,075**		**35,774,466,050**	
2	10	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2,384,389,000	100	2,439,710,125	100	2,500,702,878	100	7,324,802,003	OPD Pelaksanan Fungsi Pertanahan
2	10	2	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi (Privat) (%)	22.53	40	6,600,000	45	6,765,000	55	6,934,125	55	20,299,125	OPD Pelaksanan Fungsi Pertanahan
2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	36.36	33.33	31,920,000	35	32,718,000	37	33,535,950	37	98,173,950	OPD Pelaksanan Fungsi Pertanahan
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Subjek Ganti Kerugian Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah	0	40	9,005,000,000	60	9,075,000,000	70	10,000,000,000	70	28,080,000,000	OPD Pelaksanan Fungsi Pertanahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2	10	6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penetapan Objek Redistribusi Tanah	83.33	40	60,354,000	70	61,862,850	75	63,409,421	75	185,626,271	OPD Pelaksanan Fungsi Pertanahan
2	10	8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Objek Tanah Kosong	30	40	8,000,000	50	8,500,000	60	8,712,500	60	25,212,500	OPD Pelaksanan Fungsi Pertanahan
2	10	9	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penyelesaian Ijin Lokasi Tanah Negara (%)	100	100	8,100,000	100	8,302,500	100	8,510,063	100	24,912,563	OPD Pelaksanan Fungsi Pertanahan
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	luas pemanafaatan dan penggunaan tanah (Ha)	n/a	12.706	5,020,000	16.006	5,145,500	17.025	5,274,138	3	15,439,638	OPD Pelaksanan Fungsi Pertanahan
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	11			**33,276,330,783**		**34,865,423,428**		**38,764,559,013**		**107,554,388,224**	
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	13,256,681,783	100	14,249,736,328	100	14,605,979,736	100	42,112,397,847	OPD Pelaksanan Fungsi Lingkungan Hidup
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Kajian Lingkungan yang Disusun (Buah)	0	1	26,200,000	4	300,000,000	-	-	5	326,200,000	OPD Pelaksanan Fungsi Lingkungan Hidup
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status Kualitas Air dan Udara	Cemar Ringan	Cemar Ringan	146,000,000	Baik	149,650,000	Baik	153,391,250	Baik	449,041,250	OPD Pelaksanan Fungsi Lingkungan Hidup
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola/ditanganI (Ha)	1500	1174	2,999,600,000	1176	3,100,000,000	1177	3,565,000,000	1177	9,664,600,000	OPD Pelaksanan Fungsi Lingkungan Hidup
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	Persentase Sumber Limbah B3 di Kota Palopo yang diawasi	100	100	13,100,000	100	13,427,500	100	13,763,188	100	40,290,688	OPD Pelaksanan Fungsi Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
			BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Izin tentang Lingkungan yang Diproses Tepat Waktu (%)	100	100	49,900,000	100	50,000,000	100	51,250,000	100	151,150,000	OPD Pelaksanan Fungsi Lingkungan Hidup
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Aktif	100	100	20,000,000	100	18,014,375	100	18,464,734	100	56,479,109	OPD Pelaksanan Fungsi Lingkungan Hidup
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah binaan yang berpredikat adiwiyata	100	100	41,395,000	100	42,429,875	100	43,490,622	100	127,315,497	OPD Pelaksanan Fungsi Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	100	100	28,454,000	100	29,165,350	100	29,894,484	100	87,513,834	OPD Pelaksanan Fungsi Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan (%)	67.83	67.85	12,975,000,000	67.88	13,100,000,000	67.9	16,375,000,000	67.9	42,450,000,000	OPD Pelaksanan Fungsi Kebersihan
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kota Palopo yang Dijangkau Penerangan Jalan Umum (%)	99.9	100	3,720,000,000	100	3,813,000,000	100	3,908,325,000	100	11,441,325,000	OPD Pelaksanan Fungsi Lingkungan Hidup
2	**6**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (4)**				**4,333,535,000**		**4,378,220,205**		**4,481,750,711**		**13,193,505,916**	**OPD Pelaksanan Fungsi Kependudukan & Pencatatan Sipil**
2	12		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	3,157,535,000	100	3,179,298,705	100	3,258,781,173	100	9,595,614,878	OPD Pelaksanan Fungsi Kependudukan & Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	93.84	95	852,000,000	97	873,300,000	98	895,132,500	98	2,620,432,500	OPD Pelaksanan Fungsi Kependudukan & Pencatatan Sipil
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Wajib KTP yang Terlayani (%)	85	90	87,000,000	95	88,621,500	100	90,837,038	100	266,458,538	OPD Pelaksanan Fungsi Kependudukan & Pencatatan Sipil
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Sistem Informasi Kependudukan yang Berfungsi Baik	1	1	237,000,000	1	237,000,000	1	237,000,000	1	711,000,000	OPD Pelaksanan Fungsi Kependudukan & Pencatatan Sipil
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (4)**				**9,960,936,100**		**10,588,326,353**		**10,964,658,266**		**30,381,800,089**	**OPD Pelaksanan Fungsi Pengendalian Penduduk & KB**
2	14	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	3,951,000,000	100	4,096,650,000	100	4,147,350,000	100	12,195,000,000	OPD Pelaksanan Fungsi Pengendalian Penduduk & KB
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	35,000,000	2	245,875,000	2	470,875,000	2	751,750,000	OPD Pelaksanan Fungsi Pengendalian Penduduk & KB
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang Ber KB (%)	n/a	80.29	5,946,704,100	82.16	6,020,524,853	84.04	6,070,524,853	84.04	18,037,753,806	OPD Pelaksanan Fungsi Pengendalian Penduduk & KB
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera I yang Meningkat Menjadi Keluarga Sejahtera (%)	n/a	1	28,232,000	1	225,276,500	1	275,908,413	3	529,416,913	OPD Pelaksanan Fungsi Pengendalian Penduduk & KB
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN (3)**				**7,059,548,000**		**7,270,886,700**		**7,452,658,868**		**21,817,093,568**	
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	5,963,000,000	100	5,632,075,000	100	6,264,876,875	100	17,859,951,875	OPD Pelaksanan Fungsi Perhubungan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	0.10	3.94	1,022,468,000	4.14	1,562,879,700	4.35	1,109,951,693	4.35	3,695,299,393	OPD Pelaksanan Fungsi Perhubungan
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Usaha Pelayaran Kewenangan Daerah yang Berizin	n/a	25	74,080,000	30	75,932,000	35	77,830,300	35	227,842,300	OPD Pelaksanan Fungsi Perhubungan
2	**16**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (3)**				**6,112,000,000**		**6,263,593,702**		**6,420,183,545**		**18,795,777,247**	**OPD Pelaksanan Fungsi Komunikasi & Informatika**
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2,496,000,000	100	2,558,400,000	100	2,622,360,000	100	7,676,760,000	OPD Pelaksanan Fungsi Komunikasi & Informatika
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase KIM masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	60	70	2,885,000,000	85	2,956,151,250	90	3,030,055,031	90	8,871,206,281	OPD Pelaksanan Fungsi Komunikasi & Informatika
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	65	80	731,000,000	85	749,042,452	90	767,768,513	90	2,247,810,965	OPD Pelaksanan Fungsi Komunikasi & Informatika
2	**17**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH (8)**				**3,185,645,000**		**3,677,193,975**		**3,904,763,293**		**11,157,906,268**	**OPD Pelaksanan Fungsi Koperasi & UMKM**
			KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	**8**			**3,185,645,000**		**3,677,193,975**		**3,904,763,293**		**10,767,602,268**	**OPD Pelaksanan Fungsi Koperasi & UMKM**
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2,980,795,000	100	3,044,911,125	100	3,293,428,712	100	9,319,134,837	OPD Pelaksanan Fungsi Koperasi & UMKM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Usaha Simpan Pinjam yang Berizin	71	-	0	72	12,000,000	73	12,300,000	73	24,300,000	OPD Pelaksanan Fungsi Koperasi & UMKM
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya	71	71	10,800,000	71	11,070,000	72	11,346,750	72	33,216,750	OPD Pelaksanan Fungsi Koperasi & UMKM
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat (%/Thn)	80	73	13,850,000	73	14,196,250	73	14,551,156	73	42,597,406	OPD Pelaksanan Fungsi Koperasi & UMKM
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Usaha kepariwisataan dan ekraf yang tergabung dalam koperasi (%)	n/a	-	0	4	213,000,000	5	220,000,000	5	433,000,000	OPD Pelaksanan Fungsi Koperasi & UMKM
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Angka Persentase Koperasi yang Aktif (%/Thn)	72	71	10,600,000	72	10,865,000	73	11,136,675	73	32,601,675	OPD Pelaksanan Fungsi Koperasi & UMKM
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (%)	30	30	60,600,000	35	44,151,600	36	92,000,000	36	196,751,600	OPD Pelaksanan Fungsi Koperasi & UMKM
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil (%/Tahun)	30	30	109,000,000	35	327,000,000	36	250,000,000	36	686,000,000	OPD Pelaksanan Fungsi Koperasi & UMKM
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL (5)**				**6,131,873,000**		**6,724,223,450**		**6,892,329,037**		**19,748,425,487**	**OPD Pelaksanan Fungsi Penanaman Modal**
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	5,019,000,000	100	5,584,758,625	100	5,724,377,591	100	16,328,136,216	OPD Pelaksanan Fungsi Penanaman Modal
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Per 100 Juta Nilai PMDN)	13.65 (2018)	14	41,400,000	15	42,435,000	16	43,495,875	16	127,330,875	OPD Pelaksanan Fungsi Penanaman Modal

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi yang Masuk per Tahun (%/Thn)	-39.01	20	155,000,000	30	158,875,000	40	162,846,875	90	476,721,875	OPD Pelaksanan Fungsi Penanaman Modal
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Angka Pertumbuhan Jumlah Investor di Daerah (%)	-39.53%	10	593,900,000	12	607,517,500	15	622,705,438	37	1,824,122,938	OPD Pelaksanan Fungsi Penanaman Modal
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Investor dan Penanam Modal di Daerah yang yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	100	100	322,573,000	100	330,637,325	100	338,903,258	100	992,113,583	OPD Pelaksanan Fungsi Penanaman Modal
2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (4)**				**5,590,000,000**		**6,259,750,000**		**6,443,243,750**		**18,292,993,750**	**OPD Pelaksanan Fungsi Kepemudaan & Olahraga**
2	19	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2,483,000,000	100	2,955,075,000	100	3,028,951,875		8,467,026,875	OPD Pelaksanan Fungsi Kepemudaan & Olahraga
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	1.35	1.36	1,019,000,000	1.38	1,044,475,000	1.39	1,070,586,875	5.02	3,134,061,875	OPD Pelaksanan Fungsi Kepemudaan
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Event Olahraga yang Dilaksanan untuk Mendukung Kepariwisataan (Kali/Tahun)	n/a	1	2,088,000,000	1	2,140,200,000	2	2,193,705,000	4	6,421,905,000	OPD Pelaksanan Fungsi Olahraga
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kwartir Pramuka yang Aktif	100	-	-	100	120,000,000	100	150,000,000	100	270,000,000	OPD Pelaksanan Fungsi Kepemudaan &
2	**20**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK (3)**				**2,418,155,000**		**2,503,003,875**		**2,565,578,972**		**7,486,737,847**	**OPD Pelaksanan Fungsi Statistik**
			STATISTIK	**3**			**2,418,155,000**		**2,503,003,875**		**2,565,578,972**		**7,486,737,847**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2	20	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2,337,264,200	100	2,420,090,805	100	2,480,593,075	100	7,237,948,080	OPD Pelaksanan Fungsi Statistik & Persandian
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Angka Tingkat Ketersediaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah sesuai Permendagri 86 (%)			80,890,800		82,913,070		84,985,897		248,789,767	OPD Pelaksanan Fungsi Statistik
2	**21**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**23,800,000**		**24,395,000**		**25,004,875**		**73,199,875**	
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang pengelolaan Informasi sesuai SOP (%)			23,800,000		24,395,000		25,004,875		73,199,875	OPD Pelaksanan Fungsi Persandian
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN (5)**				**2,835,067,500**		**2,706,244,188**		**2,773,900,292**		**8,315,211,980**	
2	22	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2,270,720,500	100	2,327,488,513	100	2,385,675,725	100	6,983,884,738	OPD Pelaksanan Fungsi Kebudayaan
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kelompok budaya binaan yang berpartisipasi dalam event kepariwisataan daerah (%)	100	100	382,000,000	100	195,000,000	100	199,875,000	100	776,875,000	OPD Pelaksanan Fungsi Kebudayaan
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Kesenian Masyarakat yang Aktif Berpartisipasi dalam Event Kepariwisataan Daerah	-	100	27,978,000	100	28,677,450	100	29,394,386	100	86,049,836	OPD Pelaksanan Fungsi Kebudayaan
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Iven Pameran Sejarah yang	-	5	28,369,000	5	29,078,225	5	29,805,181	15	87,252,406	OPD Pelaksanan Fungsi Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
				Dilaksanakan (Kali/Tahun)										
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Luas Lokasi Cagar Budaya yang Dikelola (Ha)	-	1	126,000,000	1	126,000,000	1	129,150,000	3	381,150,000	OPD Pelaksanan Fungsi Kebudayaan
2	**23**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN (5)**				**2,820,295,000**		**2,940,802,375**		**3,021,772,434**		**8,782,869,809**	
2	23		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2,649,757,000	100	2,716,000,925	100	2,783,900,948	100	8,149,658,873	OPD Pelaksanan Fungsi Perpustakaan
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan di Palopo yang Aktif (%)	n/a	10.24	170,538,000	16.7	184,801,450	22.5	191,171,486	22.5	546,510,936	OPD Pelaksanan Fungsi Perpustakaan
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Event Pameran Naskah Kuno yang Dilaksanakan (Kali/Tahun)	0	-	-	1	40,000,000	1	46,700,000	2	86,700,000	OPD Pelaksanan Fungsi Perpustakaan
2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN (3)**				**1,956,821,000**		**1,940,975,150**		**1,989,499,529**		**5,887,295,679**	
2	24	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	1,877,069,800	100	1,859,379,000	100	1,905,863,475	100	5,642,312,275	OPD Pelaksanan Fungsi Kearsipan
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Arsip (%)	2	6	45,000,000	8	45,977,400	10	47,126,835	10	138,104,235	OPD Pelaksanan Fungsi Kearsipan
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban	15	17	34,751,200	19	35,618,750	22	36,509,219	22	106,879,169	OPD Pelaksanan Fungsi Kearsipan
3			**URUSAN PILIHAN**				**38,015,698,780**		**41,124,240,481**		**47,636,318,369**		**126,776,257,630**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (4)**				**4,895,188,730**		**4,875,501,848**		**4,997,389,395**		**14,768,079,973**	
3	25	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	4,124,864,000	100	4,085,919,000	100	4,188,066,975	100	12,398,849,975	OPD Pelaksanan Fungsi Perikanan
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Thn)	18,347	19,702	265,904,730	19,899	272,552,348	20,098	279,366,157	59,699	817,823,235	OPD Pelaksanan Fungsi Perikanan
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Thn)	115,134	136,794	437,800,000	143,634	448,745,000	150,816	459,963,625	431,244	1,346,508,625	OPD Pelaksanan Fungsi Perikanan
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton/Thn)	121.09	111.7	66,620,000	112.48	68,285,500	113.38	69,992,638	338	204,898,138	OPD Pelaksanan Fungsi Perikanan
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA (5)**				**3,705,604,000**		**4,489,210,075**		**10,085,412,202**		**18,280,226,277**	
3	26	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	3,291,104,000	100	3,314,857,000	100	3,397,728,425	100	10,003,689,425	OPD Pelaksana Fungsi Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Pengunjung Pada Destinasi Wisata Unggulan Daerah (Orang/Tahun)	n/a`	120,000	45,000,000	125,000	46,125,000	130,000	3,800,000,000	375,000	3,891,125,000	OPD Pelaksana Fungsi Pariwisata
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan (%/Tahun)	n/a`	5	69,500,000	5	70,933,075	10	72,706,402	20	213,139,477	OPD Pelaksana Fungsi Pariwisata
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Usaha Ekraf Binaan yang Aktif Berusaha (%)	n/a	-	-	80	750,000,000	90	2,500,000,000	90	3,250,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Ekonomi Kreatif
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Pelaku	n/a	75	300,000,000	80	307,295,000	90	314,977,375	90	922,272,375	OPD Pelaksana Fungsi Pariwisata & Ekonomi Kreatif

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
			DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Usaha Pariwisata & Ekonomi Kreatif Daerah (%)										
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (7)**				**19,336,556,550**		**21,327,685,245**		**21,860,877,376**		**62,525,119,171**	
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	13,413,329,550	100	14,166,000,000	100	14,474,300,000	100	40,174,992,339	OPD Pelaksana Fungsi Pertanian, Peternakan & Perkebunan
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan & Perkebunan	5	5	4,776,000,000	5	4,894,000,145	5	5,016,350,149	5	14,686,350,294	OPD Pelaksana Fungsi Pertanian, Peternakan & Perkebunan
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Lahan Sawah ber Indeks Pertanaman (IP) diatas 2	5	5	185,325,000	7	1,436,329,550	9	1,518,087,788	9	3,139,742,338	OPD Pelaksana Fungsi Pertanian, Peternakan & Perkebunan
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1.05	1..2	329,000,000	1.26	145,000,000	1.32	148,625,000	1.32	622,625,000	OPD Pelaksana Fungsi Peternakan
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% Luas Lahan Pertanian yang Gagal Panen/Gagal Tanam (Ha/Thn)	0.7	0.7	72,902,000	0.6	74,778,875	0.5	76,648,347	0.5	224,329,222	OPD Pelaksana Fungsi Pertanian, Perkebunan
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin		-	-	30	38,000,000	35	38,950,000	35	76,950,000	OPD Pelaksana Fungsi Pertanian, Peternakan & Perkebunan
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang Mampu Meningkatkan Produksi/Produktifitasnya	52	53	560,000,000	54	573,576,675	55	587,916,092	55	1,721,492,767	OPD Pelaksana Fungsi Pertanian, Peternakan & Perkebunan
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN (5)**				**5,720,975,500**		**5,741,710,613**		**5,885,253,378**		**17,347,939,491**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
3	30	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	4,395,733,000	100	4,365,710,613	100	4,460,753,378	100	13,222,196,991	OPD Pelaksana Fungsi Perdagangan
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Jumlah Retribusi dari Pasar (%/Tahun)	12.41	12.5	837,270,000	13	875,000,000	13.5	898,000,000	13.5	2,610,270,000	OPD Pelaksana Fungsi Perdagangan
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Distributor Barang Bersubsidi , Bahan Pokok dan Penting Lainnya Yang Diawasi	100	100	398,000,000	100	402,000,000	100	419,000,000	100	1,219,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Perdagangan
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapanny a (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	50.08	55	65,420,000	62	66,000,000	65	67,500,000	65	198,920,000	OPD Pelaksana Fungsi Perdagangan
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha Produk lokal Yang Masuk Pasar	n/a	19.23	24,552,500	26.92	33,000,000	30.76	40,000,000	30.76	97,552,500	OPD Pelaksana Fungsi Perdagangan
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN (4)**				**2,236,990,000**		**2,516,739,100**		**2,579,657,578**		**7,333,386,678**	
3	31		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2,069,630,000	100	2,345,195,100	100	2,403,824,978	100	6,818,650,078	OPD Pelaksana Fungsi Perindustrian
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	% Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	n/a	85	113,360,000	90	116,194,000	95	119,098,850	95	348,652,850	OPD Pelaksana Fungsi Perindustrian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentasel Unit Industri yang Berizin	12.04	14	40,000,000	16	41,000,000	18	42,025,000	18	123,025,000	OPD Pelaksana Fungsi Perindustrian
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri Kecil Menengah dan Perusahaan di Kawasan Industri Kota Palopo yang Datanya Masuk dalam SII Nasional	0	20	14,000,000	35	14,350,000	45	14,708,750	45	43,058,750	OPD Pelaksana Fungsi Perindustrian
3	**32**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI (2)**				**2,120,384,000**		**2,173,393,600**		**2,227,728,440**		**6,521,506,040**	
3	32	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2,026,684,000	100	2,077,351,100	100	2,129,284,878	100	6,233,319,978	OPD Pelaksana Fungsi Transmigrasi
3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Luas Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya (Ha)	40	52	93,700,000	83	96,042,500	90	98,443,563	90	288,186,063	OPD Pelaksana Fungsi Transmigrasi
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (3,2,5)**				**77,513,640,440**		**78,088,957,681**		**84,005,284,607**		**239,607,882,728**	
4	**1**		**SEKRETARIAT DAERAH**	**3**			**50,546,824,450**		**51,092,652,631**		**56,369,968,946**		**158,009,446,027**	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	29,431,824,450	100	29,450,161,785	100	30,186,415,830	100	89,068,402,065	Sekretariat Daerah
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat Capaian Kinerja **Program Pembangunan Daerah** Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	100	19,840,000,000	100	20,335,959,513	100	22,844,358,500	100	63,020,318,013	Sekretariat Daerah
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Capaian Kinerja **Program Pembangunan Daerah Bidang** Perekonomian	-	100	1,275,000,000	100	1,306,531,333	100	3,339,194,616	100	5,920,725,949	Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
				dan Pembangunan Daerah										
4	**2**		**DPRD**	**2**			**26,966,815,990**		**26,996,305,050**		**27,635,315,661**		**81,598,436,701**	
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	23,947,815,990	100	23,947,815,990	100	24,546,511,390	100	72,442,143,370	Sekretariat DPRD
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Prolegda yang Ditetapkan Menjadi Regulasi Daerah			3,019,000,000		3,048,489,060		3,088,804,272		9,156,293,332	Sekretariat DPRD
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (3,3,2)**				**50,487,660,700**		**52,791,740,265**		**58,901,918,074**		**162,181,319,039**	
			PERENCANAAN PEMBANGUNAN				**5,421,000,500**		**6,022,920,484**		**10,627,525,475**		**22,071,446,459**	
5	**1**		**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**3**			**5,421,000,500**		**6,022,920,484**		**10,627,525,475**		**22,071,446,459**	
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	4,055,000,000	100	4,231,288,125	100	5,095,905,958	100	13,382,194,083	OPD Pelaksana Fungsi Perencanaan
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Kinerja Tahunan Terhadap Target Kinerja Tahunan dalam RKPD (%)	87.71	90	649,000,000	91	887,693,921	92	3,056,619,517	92	4,593,313,438	OPD Pelaksana Fungsi Perencanaan
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah (%)	99.44	100	717,000,500	100	903,938,438	100	2,475,000,000	100	4,095,938,938	OPD Pelaksana Fungsi Perencanaan
			KEUANGAN				**31,694,058,200**		**33,189,447,155**		**34,354,943,334**		**99,238,448,689**	
5	**2**		**PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**3**			**21,098,500,000**		**22,124,000,000**		**22,994,000,000**		**66,216,500,000**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	7,703,500,000	100	7,914,000,000	100	7,974,000,000	100	23,591,500,000	OPD Pelaksana Fungsi Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Prog, Kegiatan,sub kegiatan pada Dokumen Penganggaran Terhadap Dokumen Perencanaan (%)	96.77	100	10,275,000,000	100	10,345,000,000	100	10,665,000,000	100	31,285,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Pengelolaan Keuangan
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Barang yang Memenuhi SAP	92.06	100	3,120,000,000	100	3,865,000,000	100	4,355,000,000	100	11,340,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
5	**2**		**PENDAPATAN DAERAH**	**2**			**10,595,558,200**		**11,065,447,155**		**11,360,943,334**		**33,021,948,689**	
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	7,103,000,000	100	7,485,575,000	100	7,691,574,375	100	22,280,149,375	OPD Pelaksana Fungsi Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Realisasi Pendapatan Daerah dengan Target Pendapatan Daerah (%/Thn)	97.88	100	3,492,558,200	100	3,579,872,155	100	3,669,368,959	100	10,741,799,314	OPD Pelaksana Fungsi Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**3**		**KEPEGAWAIAN (3)**				**10,700,602,000**		**10,896,227,056**		**11,169,225,058**		**32,766,054,114**	
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	4,559,602,000	100	4,673,592,050	100	4,790,431,851	100	14,023,625,901	OPD Pelaksana Fungsi Kepegawaian & Pengembangan SDM
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang ditempatkan	42	51	2,272,000,000	56	2,257,319,238	60	2,313,752,218	60	6,843,071,456	OPD Pelaksana Fungsi Kepegawaian &

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
				sesuai Syarat Jabatan & Syarat Kompetensinya										
5	**4**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**3,869,000,000**		**3,965,315,769**		**4,065,040,988**		**11,899,356,757**	
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	166	170	3,869,000,000	175	3,965,315,769	180	4,065,040,988	180	11,899,356,757	OPD Pelaksana Fungsi Pengembangan SDM
5	**5**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (2)**				**2,672,000,000**		**2,683,145,569**		**2,750,224,208**		**8,105,369,777**	
5	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	99.24	100	2,205,000,000	100	2,204,734,250	100	2,259,852,606	100	6,669,586,856	OPD Pelaksana Fungsi Penelitian & Pengembangan
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, dan Teknologi yang Diwujudkan (Inovasi)	100	100	467,000,000	100	478,411,319	100	490,371,602	100	1,435,782,921	OPD Pelaksana Fungsi Penelitian & Pengembangan
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN (3)**				**7,886,629,550**		**10,308,759,288**		**10,897,364,610**		**29,092,753,448**	
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	5,770,654,550	100	7,243,281,288	100	7,721,886,610	100	20,735,822,448	OPD Pelaksana Fungsi Pengawasan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67.13	70	2,085,000,000	75	2,515,478,000	80	2,585,478,000	80	7,185,956,000	OPD Pelaksana Fungsi Pengawasan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rata-Rata Nilai PMPRB Organisasi Perangkat Daerah	58.7	70	30,975,000	75	550,000,000	80	590,000,000	80	1,170,975,000	OPD Pelaksana Fungsi Pengawasan
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**				**52,533,529,143**		**54,153,112,626**		**55,506,940,442**		**162,338,582,211**	
7	**1**		**KECAMATAN WARA**	**4**			**6,701,451,643**		**7,006,108,188**		**7,181,260,892**		**20,888,820,723**	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	5,305,264,000	100	5,437,895,600	100	5,573,842,990	100	16,317,002,590	Kecamatan Wara
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	83	84	596,835,000	85	611,755,875	86	627,049,772	86	1,835,640,647	Kecamatan Wara
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	100	100	763,176,643	100	919,376,313	100	942,360,720	100	2,624,913,676	Kecamatan Wara
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	100	100	36,176,000	100	37,080,400	100	38,007,410	100	111,263,810	Kecamatan Wara
7	**1**		**KECAMATAN WARA UTARA**	**4**			**5,629,200,000**		**5,769,930,000**		**5,914,178,250**		**17,313,308,250**	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	4,666,000,000	100	4,782,650,000	100	4,902,216,250	100	14,350,866,250	Kecamatan Wara Utara
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	100	100	655,000,000	100	671,375,000	100	688,159,375	100	2,014,534,375	Kecamatan Wara Utara
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Rata-rata LPM, PKK,	100	100	262,000,000	100	268,550,000	100	275,263,750	100	805,813,750	Kecamatan Wara Utara

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Posyandu yang Aktif (%)										
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	100	100	46,200,000	100	47,355,000	100	48,538,875	100	142,093,875	Kecamatan Wara Utara
7	**1**		**KECAMATAN WARA TIMUR**	**4**			**7,446,211,500**		**7,652,866,788**		**7,844,188,457**		**22,943,266,745**	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	6,170,000,000	100	6,324,250,000	100	6,482,356,250	100	18,976,606,250	Kecamatan Wara Timur
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	100	100	658,000,000	100	694,950,000	100	712,323,750	100	2,065,273,750	Kecamatan Wara Timur
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	100	100	550,411,500	100	564,171,788	100	578,276,082	100	1,692,859,370	Kecamatan Wara Timur
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	100	100	67,800,000	100	69,495,000	100	71,232,375	100	208,527,375	Kecamatan Wara Timur
7	**1**		**KECAMATAN WARA BARAT**	**4**			**5,554,782,000**		**5,744,901,550**		**5,888,524,089**		**17,238,207,639**	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	4,264,000,000	100	4,370,600,000	100	4,479,865,000	100	13,114,465,000	Kecamatan Wara Barat
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	100	100	570,100,000	100	584,352,500	100	598,961,313	100	1,753,413,813	Kecamatan Wara Barat
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	100	100	679,882,000	100	748,129,050	100	766,832,276	100	2,194,843,326	Kecamatan Wara Barat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	100	100	40,800,000	100	41,820,000	100	42,865,500	100	125,485,500	Kecamatan Wara Barat
7	**1**		**KECAMATAN WARA SELATAN**	**4**			**5,097,500,000**		**5,224,937,500**		**5,355,560,938**		**15,677,998,438**	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	4,282,000,000	100	4,389,050,000	100	4,498,776,250	100	13,169,826,250	Kecamatan Wara Selatan
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	83	84	430,000,000	85	440,750,000	86	451,768,750	86	1,322,518,750	Kecamatan Wara Selatan
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	100	100	361,500,000	100	370,537,500	100	379,800,938	100	1,111,838,438	Kecamatan Wara Selatan
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	100	100	24,000,000	100	24,600,000	100	25,215,000	100	73,815,000	Kecamatan Wara Selatan
7	**1**		**KECAMATAN BARA**	**4**			**6,480,012,000**		**6,688,137,300**		**6,855,340,733**		**20,068,490,033**	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	5,239,000,000	100	5,369,975,000	100	5,504,224,375	100	16,113,199,375	Kecamatan Bara
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	100	100	546,500,000	100	560,162,500	100	574,166,563	100	1,680,829,063	Kecamatan Bara
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	100	100	668,512,000	100	731,349,800	100	749,633,545	100	2,149,495,345	Kecamatan Bara

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	100	100	26,000,000	100	26,650,000	100	27,316,250	100	79,966,250	Kecamatan Bara
7	**1**		**KECAMATAN MUNGKAJANG**	**4**			**4,937,772,000**		**5,061,216,300**		**5,187,746,708**		**15,186,735,008**	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	3,761,000,000	100	3,855,025,000	100	3,951,400,625	100	11,567,425,625	Kecamatan Mungkajang
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	100	100	440,000,000	100	451,000,000	100	462,275,000	100	1,353,275,000	Kecamatan Mungkajang
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	100	100	712,142,000	100	729,945,550	100	748,194,189	100	2,190,281,739	Kecamatan Mungkajang
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	100	100	24,630,000	100	25,245,750	100	25,876,894	100	75,752,644	Kecamatan Mungkajang
7	**1**		**KECAMATAN SENDANA**	**4**			**4,736,200,000**		**4,854,605,000**		**4,975,970,125**		**14,566,775,125**	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	4,234,000,000	100	4,339,850,000	100	4,448,346,250	100	13,022,196,250	Kecamatan Sendana
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	100	100	433,000,000	100	443,825,000	100	454,920,625	100	1,331,745,625	Kecamatan Sendana
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	100	100	50,000,000	100	51,250,000	100	52,531,250	100	153,781,250	Kecamatan Sendana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	100	100	19,200,000	100	19,680,000	100	20,172,000	100	59,052,000	Kecamatan Sendana
7	**1**		**KECAMATAN TELLUWANUA**	**4**			**5,950,400,000**		**6,150,410,000**		**6,304,170,250**		**18,454,980,250**	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	5,152,000,000	100	5,280,800,000	100	5,412,820,000	100	15,845,620,000	Kecamatan Telluwanua
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	100	100	698,000,000	100	766,700,000	100	785,867,500	100	2,250,567,500	Kecamatan Telluwanua
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	100	100	50,000,000	100	51,250,000	100	52,531,250	100	153,781,250	Kecamatan Telluwanua
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	100	100	50,400,000	100	51,660,000	100	52,951,500	100	155,011,500	Kecamatan Telluwanua
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (6)**				**6,067,968,624**		**6,106,859,973**		**6,259,529,094**		**18,434,357,691**	
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	3,030,064,400	100	2,997,657,000	100	3,072,598,425	100	9,100,319,825	OPD Pelaksanan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	-	100	113,000,000	100	115,620,000	100	118,510,500	100	347,130,500	OPD Pelaksanan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Cakupan Lembaga atau Organisasi yang Mendapatkan Pendidikan Politik	-	100	953,192,490	100	976,714,802	100	1,001,132,672	100	2,931,039,964	OPD Pelaksanan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
			PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Angka Pertumbuhan Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar	-	100	1,374,362,000	100	1,358,125,000	100	1,392,078,125	100	4,124,565,125	OPD Pelaksanan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Keluarga Miskin yang Mendapatkan Edukasi (%)	-	2	131,314,000	2	134,443,100	2	137,804,178	6	403,561,278	OPD Pelaksanan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Wilayah Rawan Konflik yang Dibina (%)	100	100	466,035,734	100	524,300,071	100	537,405,194	100	1,527,740,999	OPD Pelaksanan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH							**991,605,000,000**		**1,038,980,000,000**		**1,110,275,000,000**		**3,140,860,000,000**	

Tabel 7.3.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan Kota Palopo 2018-2020

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM KESEKRETARIATAN				110,601,482,676		64,333,000,000	
1. 01. 1. 01. 01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti	100	100	86,696,452,930	-	-	Semua OPD Kota Palopo
1. 01. 1. 01. 01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik/layak	100	100	15,582,589,752	-	-	Semua OPD Kota Palopo
1. 01. 1. 01. 01. 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio pejabat fungsional tertentu terhadap jumlah aparatur	100	100	5,530,863,097			Semua OPD Kota Palopo
		persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis				-	-	
		Persentase pejabat struktural tyang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan stuktural						
1. 01. 1. 01. 01. 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP perangkat daerah (angka hasil review APIP Kota Palopo)	100	100	1,213,972,468			Semua OPD Kota Palopo
		Nilai laporan keuangan dan aset perangkat daerah (angka hasil review APIP Kota Palopo)				-	-	
1. 01. 1. 01. 01. 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase kasus pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti	100	100	1,577,604,429	-	-	Semua OPD Kota Palopo
1. 01. 1. 01. 01. 01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	-	-	100	63,684,000,000	Semua OPD Kota Palopo
1. 01. 1. 01. 01. 06	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	-	-	100	649,000,000	Semua OPD Kota Palopo
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				581,864,197,047		654,640,000,000	
1. 01	URUSAN PENDIDIKAN				39,979,000,000		46,923,000,000	
1. 01. 1. 01. 01. 18	Program Pendidikan Non Formal	persentase penyelenggaraan Pendidikan Paket Kesetaraan	n/a	100	1,938,000,000	-	-	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1. 01. 1. 01. 01. 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	63,12	100	1,941,000,000	100	9,145,000,000	Dinas Pendidikan
1. 01. 1. 01. 01. 16	Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun .	Persentase penduduk Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	95.45	100	16,379,000,000	100	25,000,000,000	Dinas Pendidikan
1. 01.1. 01. 01. 24	Program Pelaksanaan Pendidikan Gratis .	Persentase Murid Pendidikan Dasar yang Menerima Bantuan Pendidikan (%)	100	100	16,621,000,000	100	7,067,000,000	Dinas Pendidikan
1. 01. 1. 01. 01. 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	137,26	100	1,890,000,000	100	1,838,000,000	Dinas Pendidikan
1. 01. 1. 01. 01. 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rata-rata Rasio guru/murid pendidikan dasar (per 10.000)	647,5	666	1,210,000,000	685,5	1,885,000,000	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Pendidikan Kesetaraan	Persentase penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	n/a	-	-	100	1,988,000,000	Dinas Pendidikan
1. 02.	URUSAN KESEHATAN				179,369,865,000		181,892,000,000	
1. 20. 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	n/a	100	1,881,865,000	-	-	Dinas kesehatan
1. 20. 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan puskesmas (%)	133.33	93.41	35,881,310,000	-	-	Dinas kesehatan
1. 20. 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase jumlah obat dan makanan yang tersalurkan tepat sasaran	n/a	100	820,000,000	-	-	Dinas kesehatan
1. 20. 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase posyandu mandiri	n/a	100	2,667,000,000	-	-	Dinas kesehatan
1. 20. 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	persentase penyaluran bantuan Gizi yang tepat sasaran	n/a	100	947,800,000	-	-	Dinas kesehatan
1. 20. 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Puskesmas yang melaksanakan dokumen UKL dan UPL	n/a	100	1,813,890,000	-	-	Dinas kesehatan
1. 20. 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penderita penyakit menular	n/a	100	950,000,000	-	-	Dinas kesehatan
1. 20. 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	n/a	90	1,600,000,000	-	-	Dinas kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1. 20. 1.02.01 . 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	3	100	17,150,000,000	-	-	Dinas kesehatan
1. 20. 1.02.01 . 28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Masyarakat yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan (%)	100	94.02	15,650,800,000	-	-	Dinas kesehatan
1. 20. 1.02.01 . 29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	1,457,000,000	-	-	Dinas kesehatan
1. 20. 1.02.01 . 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	1,601,000,000	-	-	Dinas kesehatan
1. 02. 1.02.01 . 35	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan JKN	100	100	1,560,400,000	-	-	Dinas kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 03	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil .	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	92,8	-	-	100	1,990,000,000	Dinas kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 04	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin .	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	95,79	-	-	100	15,600,000,000	Dinas kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir .	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	98	-	-	100	1,755,000,000	Dinas kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 06	Program Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	62,51	-	-	100	1,885,000,000	Dinas kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 07	Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar .	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	97,52	-	-	100	1,996,000,000	Dinas kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 13	Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif .	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	82,55	-	-	100	749,000,000	Dinas kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 14	Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	133,47	-	-	100	815,000,000	Dinas kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 10	Program Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi .	Persentase penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	79,45	-	-	100	1,835,000,000	Dinas kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 11	Program Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus .	Persentase penduduk penderita diabetes mellitus yang	91,7	-	-	100	989,000,000	Dinas kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		mendapatkan layanan kesehatan						
1.02 . 1.02.01 . 12	Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat .	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	98,23	-	-	100	979,000,000	Dinas kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 08	Program Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis .	Persentase penduduk terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	127,44	-	-	100	989,000,000	Dinas kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 09	Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) .	Persentase penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	90,37	-	-	100	959,000,000	Dinas kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan .	Persentase Masyarakat yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan (%)	88,87	-	-	100	29,000,000,000	Dinas kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan .	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	-	-	100	16,000,000,000	Dinas kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 18	Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persentase Faskes Pertama Bersertifikat ISO (%)	8	-	-	8	1,051,000,000	Dinas kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan puskesmas (%)	133,33	-	-	133,33	4,000,000,000	Dinas kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	3	-	-	3	800,000,000	Dinas kesehatan
1. 02. 1.02.02 . 34	Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan	% Pencapaian Indikator Kinerja BLUD RS (Keuangan & Pelayanan)	75	80	91,388,800,000	85	96,000,000,000	RSUD Sawerigading, Dinas kesehatan
1. 02. 1.02.02 . 35	Program pengadaan, peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	% Ketersediaan Sarana dan PRasarana RS	65-75	70-80	4,000,000,000	75-85	4,500,000,000	RSUD Sawerigading
	URUSAN PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG				325,749,133,830		386,436,000,000	
1. 03. 1.03.01 . 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase dokumen tata ruang yang diperdakan	n/a	70.00	834,000,000	-	-	Dinas PUPR
1. 03. 1.03.01 . 16	Program Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	n/a	45.00	1,296,330,000	-	-	Dinas PUPR
1. 03. 1.03.01 . 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase ruang publik yang berubah peruntukannya	n/a	96.00	1,050,000,000	-	-	Dinas PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1. 03. 1.03.01 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	n/a	90.00	268,935,000,000	-	-	Dinas PUPR
1. 03. 1.03.01 . 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	n/a	100	7,350,000,000	-	-	Dinas PUPR
1. 03. 1.03.01 . 17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	n/a	95.00	8,600,000,000	-	-	Dinas PUPR
1. 03. 1.03.01 . 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	n/a	95.00	5,440,000,000	-	-	Dinas PUPR
1. 03. 1.03.01 . 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	kebinamargaanPersentase sarana kebinamargaan yang memadai	n/a	70	2,263,670,000	-	-	Dinas PUPR
1. 03. 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	n/a	100	1,090,000,000	-	-	Dinas PUPR
1. 03. 1.03.01 . 28	Program Pengendalian Banjir	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	n/a	85.00	1,925,000,000	-	-	Dinas PUPR
1. 03. 1.03.01 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase infrastruktur menuju kawasan wisata kondisi baik	n/a	80.00	25,395,133,830	-	-	Dinas PUPR
1. 03. 1.03.01 . 34	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Konstruksi yang Lulus Sertifikasi (%/Tahun)	n/a	100	604,600,000	-	-	Dinas PUPR
1. 03. 1.03.01 . 35	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang ditempatkan sesuai serifikasi	n/a	100	505,900,000	-	-	Dinas PUPR
1. 03. 1.03.01 . 36	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Konstruksi yang Lulus Sertifikasi (%/Tahun)	n/a	100	459,500,000	-	-	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 03	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	89.43 (2016)	-	-	100	2,660,000,000	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 04	Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	n/a	-	-	100	5,700,000,000	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 05	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan .	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	28	-	-	29	112,550,000,000	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 06	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan .	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	58,33	-	-	61	8,805,000,000	Dinas PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1.03 . 1.03.01 . 07	Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	10,73	-	-	25	6,850,000,000	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 08	Program Pembangunan/Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	3,4	-	-	5	5,850,000,000	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 09	Program Pengendalian Banjir	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	14,42	-	-	20	3,080,000,000	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 10	Program Pembangunan Infrastuktur Publik/Strategis Daerah	Cakupan Penyediaan Infrastruktur Publik &Strategis Daerah	n/a	-	-	10	228,249,000,000	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 11	Program Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)	1,171	-	-	1,175	5,352,000,000	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 12	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	71,34	-	-	72	2,850,000,000	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 13	Program Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	n/a	-	-	52	3,875,000,000	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 14	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Konstruksi yang Lulus Sertifikasi (%/Tahun)	n/a	-	-	80	615,000,000	Dinas PUPR
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT				10,376,493,000		9,475,000,000	
1. 04. 1.04.01 . 17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	persenase Pemberdayaan Komunitas Insfrastruktur Permumukiman	n/a	70	1,551,000,000	-	-	Dinas Perumahan dan pemukiman
1.04 . 1.04.01 . 06	Program Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	n/a	100	1,850,000,000	100	1,768,000,000	Dinas Perumahan dan pemukiman
1.04 . 1.04.01 . 07	Program Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah .	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	n/a	100	1,810,000,000	100	1,967,000,000	Dinas Perumahan dan pemukiman
1.04 . 1.04.01 . 03	Program Rumah Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni (%/Tahun)	n/a	1	1,870,000,000	1,2	1,950,000,000	Dinas Perumahan dan pemukiman
1.04 . 1.04.01 . 04	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	79,39	90	1,625,493,000	91,4	1,900,000,000	Dinas Perumahan dan pemukiman
1.04 . 1.04.01 . 05	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase pemukiman yang tertata (%)	99,25	100	1,670,000,000	100	1,890,000,000	Dinas Perumahan dan pemukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT				15,247,677,229		15,575,000,000	
1.19 . 1.19.03 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang dapat diatasi	n/a	100	819,735,000	-	-	Badan Kesbangpol
1.19 . 1.19.03 . 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penanganan Gangguan Keamanan DalamNegeri/pengawasan Konflik sosial	n/a	100	1,218,845,000	-	-	Badan Kesbangpol
1.19 . 1.19.03 . 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham Wasbang dan nilai–nilai sejarah perjuangan bangsa.	n/a	100	803,820,000	-	-	Badan Kesbangpol
1.19 . 1.19.03 . 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		n/a	100	840,000,000	-	-	Badan Kesbangpol
1.19 . 1.19.03 . 19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Kelurahan yang memiliki Petugas Linmas	n/a	100	939,340,000	-	-	Badan Kesbangpol
1.19 . 1.19.03 . 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	persentase peran masyarakat dalam penanggulangan narkoba dan pekat	n/a	100	657,880,000	-	-	Badan Kesbangpol
1.19 . 1.19.03 . 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rata - rata Persentase Tingkat Keikut sertaan Masyarakat Dalam Pemilu (Kada/ Legislatif)	n/a	100	1,002,780,000	27	1,880,000,000	Badan Kesbangpol
1.19 . 1.19.03 . 07	Program Penanganan Konflik dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Wilayah Rawan Konflik yang Dibina (%)	100	-	-	100	750,000,000	Badan Kesbangpol
1.19 . 1.19.03 . 10	Program Peningkatan Demokratisasi Ideologi dan Pembauran	Tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan FKUB dan FPK	n/a	-	-	100	900,000,000	Badan Kesbangpol
1.19 . 1.19.01 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penegakan PERDA	97,9	100	1,587,000,000	-	-	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.19 . 1.19.01 . 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Wilayah Rawan Konflik yang Dibina (%)	n/a	98.58	1,411,909,750	-	-	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.19 . 1.19.01 . 19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (%)	97,9	100	1,338,090,250	-	-	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.19 . 1.19.01 . 04	Program Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (%)	97,9	-	-	100	2,150,000,000	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1.19 . 1.19.01 . 08	Program Peningkatan Keamanan dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan PERDA	97,9	-	-	100	2,050,000,000	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.04 . 1.19.02 . 19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	n/a	100	2,173,377,229	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.19 . 1.19.02 . 05	Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran .	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	n/a	-	-	100	3,600,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.19 . 1.19.02 . 09	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran .	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	9,09	-	-	13,13	870,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.19 . 1.19.04 . 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	n/a	100	2,454,900,000	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.19 . 1.19.04 . 05	Program Pelayanan Informasi rawan bencana .	Persentase penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	n/a	-	-	100	565,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.19 . 1.19.04 . 06	Program Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana .	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	n/a	-	-	100	2,120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.19 . 1.19.04 . 08	Program Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	n/a	-	-	100	690,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	URUSAN SOSIAL				11,142,027,988		14,339,000,000	
1.13 . 1.13.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Fakir Miskin dan PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	n/a	100	3,200,000,000	-	-	Dinas Sosial
1.13 . 1.13.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan taraf hidup lanjut usia	n/a	100	1,234,027,988	-	-	Dinas Sosial
1.13 . 1.13.01 . 17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	n/a		1,970,000,000	-	-	Dinas Sosial
1.13 . 1.13.01 . 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	n/a	100	2,853,000,000	-	-	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1.13 . 1.13.01 . 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)		n/a	91.19	1,885,000,000	-	-	Dinas Sosial
1.13 . 1.13.01 . 03	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	n/a	-	-	100	895,000,000	Dinas Sosial
1.13 . 1.13.01 . 04	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	n/a	-	-	100	975,000,000	Dinas Sosial
1.13 . 1.13.01 . 05	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	n/a	-	-	100	800,000,000	Dinas Sosial
1.13 . 1.13.01 . 06	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Susila Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Persentase penduduk /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	n/a	-	-	100	700,000,000	Dinas Sosial
1.13 . 1.13.01 . 07	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	n/a	-	-	100	919,000,000	Dinas Sosial
1.13 . 1.13.01 . 08	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan	Persentase WKSBM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	-	-	100	870,000,000	Dinas Sosial
1.13 . 1.13.01 . 09	Program Bantuan Non Tunai	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	79,11	-	-	79,45	725,000,000	Dinas Sosial
1.13 . 1.13.01 . 10	Program Pembinaan Penyandang Cacat	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	1,58	-	-	2,61	605,000,000	Dinas Sosial
1.13 . 1.13.01 . 11	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Fakir Miskin dan PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	78,97	-	-	79,26	7,850,000,000	Dinas Sosial
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				106,208,239,797		110,290,000,000	
	URUSAN KETENAGA KERJAAN				3,379,626,770		3,106,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1.14 . 1.14.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	37	40	1,920,000,000	45	987,000,000	Dinas Tenaga Kerja
1.14 . 1.14.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	59,56	62,02	1,459,626,770	63,24	800,000,000	Dinas Tenaga Kerja
1.14 . 1.14.01 . 05	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	70,56	-	-	74,76	320,000,000	Dinas Tenaga Kerja
1.14 . 1.14.01 . 06	Program Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	4,54	-	-	6	999,000,000	Dinas Tenaga Kerja
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5,381,579,300		3,940,000,000	
1.11 . 1.11.01 . 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		n/a	92.84	1,625,621,100	-	-	Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak
1.11 . 1.11.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase SKPD yang Menerapkan Prinsip PUG dan Anak	n/a	94.68	1,959,122,080	-	-	Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak
1.11 . 1.11.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (%)	3	3	815,000,000	-	-	Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak
1.11 . 1.11.01 . 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	43,03	44.82	981,836,120	45,71	1,970,000,000	Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak
1.11 . 1.11.01 . 19	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio KDRT (per 10.000)	3	-	-	3	1,970,000,000	Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak
	PANGAN				3,787,290,315		3,725,000,000	
1. 21. 1.21.01 . 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Luas Lahan Pekarangan yang Dimanfaatkan (ha)	n/a	2	1,800,000,000	-	-	Dinas Ketahanan Pangan
1. 21. 1.21.01 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,6	91.6	1,987,290,315	91,65	1,950,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 04	Program Peningkatan Produktifitas Kawasan Hunian dan Lingkungan Pemukiman	Luas Lahan Pekarangan yang Dimanfaatkan	n/a	-	-	2	1,775,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
	PERTANAHAN				23,083,746,716		32,765,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1.09 . 1.09.01 . 15	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Persentase Lahan yang Bersertifikat (ha)	n/a	5	1,935,000,000	-	-	Dinas Pertanahan
1.09 . 1.09.01 . 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pertanahan Untuk Kepentingan Umum (ha)	n/a	68.44	20,314,526,716	-	-	Dinas Pertanahan
1.09 . 1.09.01 . 17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		n/a	100	834,220,000	-	-	Dinas Pertanahan
1.09 . 1.09.01 . 03	Program Pelayanan Pertanahan	Cakupan pengadaaan tanah utk pemerintah daerah (Ha)	n/a	-	-	6	31,000,000,000	Dinas Pertanahan
1.09 . 1.09.01 . 04	Program Perencanaan dan Pengendalian Tanah	Cakupan pengaturan tanah pemerintah (Ha)	n/a	-	-	13,2	1,765,000,000	Dinas Pertanahan
	LINGKUNGAN HIDUP				34,310,000,000		32,150,000,000	
1.04 . 1.08.01 . 20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman		1.58	1,6	2,550,000,000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
1.08 . 1.08.01 . 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTRH yang dikelolah	n/a	99.63	1,984,000,000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
1.08 . 1.08.01 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		n/a	95.27	925,200,000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
2.03 . 1.08.01 . 19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Persentase Luas Wilayah Pemukiman yang Dijangkau Penerangan Jalan Umum (%)	60 (2013)	70	14,200,000,000	72	11,350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Cemar ringan	baik	2,150,800,000	Baik	2,400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
1.08 . 1.08.01 . 16		Hasil Pengukuran indeks Kualitas Lingkungan	n/a					
		Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Sangat baik	sangat baik		Sangat Baik		
1.08 . 1.08.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan (%)	64	67	12,500,000,000	70	15,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
1.08 . 1.08.01 . 06	Program Pelayanan Pemakaman & Pengelolaan Pertamanan	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	1,58	-	-	1,8	3,400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL				2,230,287,046		1,055,000,000	
1.10 . 1.10.01 . 16	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Wajib KTP yang Terlayani (%)	n/a	86.00	1,200,000,000	-	-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil		n/a	86.00	1,030,287,046	85	1,055,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA				6,970,000,000		5,240,000,000	
1.12 . 1.12.01 . 15	Program Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Prasejahtera dalam BDT yang Mendapatkan Bina Keluarga (%)	n/a	50	989,800,000	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
1.12 . 1.12.01 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja		n/a	100	910,200,000	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
1.12 . 1.12.01 . 17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Pasangan Usia Subur yang Menggunakan Kontrasepsi (%)	n/a	90.00	1,398,785,500	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
1.12 . 1.12.01 . 18	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri		n/a	88.33	1,694,414,500	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
1.12 . 1.12.01 . 20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR		n/a	100	1,976,800,000	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
1.12 . 1.12.01 . 03	Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	Persentase Pasangan Usia Subur yang Menggunakan Kontrasepsi (%)	n/a	-	-	12	3,350,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
1.12 . 1.12.01 . 04	Program Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Prasejahtera dalam BDT yang Mendapatkan Bina Keluarga (%)	n/a	-	-	3	1,890,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	PERHUBUNGAN				5,390,000,000		4,990,000,000	
1.07.1.07.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		n/a	100	1,854,000,000	-	-	Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.15	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		n/a		936,000,000	-	-	Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		n/a	100	950,000,000	-	-	Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.03	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	22,19	23,45	1,650,000,000	24,7	1,155,000,000	Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.04	Program Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	1.345.436	-	-	1.464.415	1,895,000,000	Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.05	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	63,2	-	-	71	1,940,000,000	Dinas Perhubungan
	KOMUNIKASI & INFORMATIKA				2,002,000,000		2,765,000,000	
1.25 . 1.25.01 . 18	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa		n/a	2	962,000,000	-	-	Dinas Komunikasi & Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1.25 . 1.25.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,09	0.1	1,040,000,000	0,1	965,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika
1.25 . 1.25.01 . 04	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dan Informasi	Jumlah Produk Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi yang Dibuat (Buah)	n/a	-	-	2	955,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika
1.25 . 1.25.01 . 05	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	3,33	-	-	3,45	845,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika
	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				3,617,709,650		3,875,000,000	
1.15 . 1.15.01 . 15	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif	Terciptanya UKM yang baru & Akses pembiayaan	n/a	100	959,027,000	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
1.15 . 1.15.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	persentase usaha mikro yang meningkat dari menjadi usaha kecil	n/a	100	917,682,650	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
1.15 . 1.15.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang dikuatkan dalam hal kelembagaan, permodalan dan manajemen	13	5	806,000,000	5	1,905,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
1.15 . 1.15.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah	Persentase UMKM yang difasilitasi dalam hal permodalan dan peralatan	n/a	5	935,000,000	5	1,970,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
	PENANAMAN MODAL				4,857,000,000		4,850,000,000	
1.16 . 1.16.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	147	149	1,961,000,000	150	1,950,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.16 . 1.16.01 . 18	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta)	382	437	1,481,000,000	491	1,050,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.16 . 1.16.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	7,42	9	1,415,000,000	9	1,850,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				4,906,000,000		5,260,000,000	
1.18 . 1.18.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase pembinaan alet muda (%)	38,46	39	1,716,000,000	40	1,800,000,000	Dinas pemuda & Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1.18 . 1.18.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga (%)	68	68.2	2,100,000,000	68,3	1,525,000,000	Dinas pemuda & Olahraga
1.18 . 1.18.01 . 16	Program Peningkatan Peran Serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	69,3	70	1,090,000,000	71	1,000,000,000	Dinas pemuda & Olahraga
1.18 . 1.18.01 . 17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirahausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase wirausaha muda (%)	1,75	-	-	1,9	935,000,000	Dinas pemuda & Olahraga
	STATISTIK				1,245,000,000		1,144,000,000	
1.23 . 1.23.01 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersusunnya data Statistik Kota Palopo		75	670,000,000	-	-	Dinas Persandian & Statistik
1.20 . 1.23.01 . 37	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (%)	71,42	75	575,000,000	76	569,000,000	Dinas Persandian & Statistik
1.23 . 1.23.01 . 03	Program Pengembangan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang Pemenuhan Data Statistiknya Diatas 75%	n/a	-	-	80	575,000,000	Dinas Persandian & Statistik
	KEBUDAYAAN				2,400,000,000		2,755,000,000	
1.17 . 1.17.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	51	50	847,938,100	-	-	Dinas kebudayaan
1.17 . 1.17.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	99,32	100	750,000,000	100	950,000,000	Dinas kebudayaan
1.17 . 1.17.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)	n/a	3	802,061,900	3	825,000,000	Dinas kebudayaan
1.17 . 1.17.01 . 18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	51	-	-	50	980,000,000	Dinas kebudayaan
	PERPUSTAKAAN				865,000,000		800,000,000	
1.01 . 1.26.01 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	9,23	9.3	865,000,000	9,45	800,000,000	Dinas Perpustakaan
	KEARSIPAN				1,783,000,000		1,870,000,000	
1.24 . 1.24.01 . 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase OPD yang memiliki standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan arsip	2	30	368,102,000	-	-	Dinas Kearsipan
1.24 . 1.24.01 . 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase dokumen / arsip daerah yang dimiliki	n/a	100	966,898,000	-	-	Dinas Kearsipan
1.24 . 1.24.01 . 17	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Petsentase cakupan sarana dan prasarana kearsipan yang berfungsi baik	n/a	100	222,500,000	-	-	Dinas Kearsipan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1.24 . 1.24.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase OPD yang memiliki Petugas Khusus Pengelola Arsip Terlatih (%)	2	2	225,500,000	-	-	Dinas Kearsipan
1.24 . 1.24.01 . 03	Program Pembinaan Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	2	-	-	6	970,000,000	Dinas Kearsipan
1.24 . 1.24.01 . 04	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang Memiliki Petugas Khusus Pengelola Arsip Terlatih (%)	2	-	-	45	900,000,000	Dinas Kearsipan
	URUSAN PILIHAN				41,945,449,804		37,288,000,000	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN				8,180,000,000		8,425,000,000	
2.05 . 2.05.01 . 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	10 (2018)	12	924,090,000	-	-	Dinas Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	nilai tukar nelayan	n/a	108.1	853,000,000	-	-	Dinas Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 24	Program Pengembangan Database dan Informasi Kelautan	persentase databese kelautan yang ditindaklanjuti	n/a	80	921,735,000	-	-	Dinas Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 25	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, Air Tawar	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	12.418,56 (2018)	15.840,88	629,275,000	-	-	Dinas Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	17	20	2,463,900,000	21	3,100,000,000	Dinas Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	116	124	2,388,000,000	130	3,210,000,000	Dinas Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 05	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	262	-	-	262	2,115,000,000	Dinas Perikanan
	PARIWISATA				3,657,550,760		5,188,000,000	
2.04 . 2.04.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Pengunung Wisata Domestic dan Mancanegara (Orang/Tahun)	99,481	100,973	1,380,000,000	-	-	Dinas pariwisata & Ekonomi kreatif
2.04 . 2.04.01 . 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata (%/Tahun)	n/a	1.5	1,277,000,000	1,5	1,900,000,000	Dinas pariwisata & Ekonomi kreatif
2.04 . 2.04.01 . 18	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif yang Dibina (%)	n/a	12	1,000,550,760	13	1,890,000,000	Dinas pariwisata & Ekonomi kreatif
2.04 . 2.04.01 . 03	Program Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pengunung Wisata Domestic dan Mancanegara (Orang/Tahun)	99,481	-	-	102,487	1,398,000,000	Dinas pariwisata & Ekonomi kreatif
	PERTANIAN				14,323,899,044		11,240,000,000	
2.01 . 2.01.01 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	pengadaan peralatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	n/a	100	671,920,246	-	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2.01 . 2.01.01 . 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi sektor perkebunan (Ton/Tahun)	563	646	1,865,000,000	-	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		n/a	100	857,978,798	-	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)	38	40	4,571,639,399	-	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan		n/a	100	882,412,615	-	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		n/a	100	576,947,986	-	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging dan Telur Daerah (Ton/Tahun)	5	5	2,450,289,894	-	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		n/a	100	758,490,106	-	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 24	Program Peningkatan Produksi Peternakan		n/a	100	856,220,000	-	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Angka Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	50,68	51	833,000,000	52	2,515,000,000	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 04	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Pemasaran Hasil Pertanian	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)	38	-	-	42	2,900,000,000	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 06	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Produksi sektor perkebunan (Ton/Tahun)	563	-	-	701	2,870,000,000	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 07	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan	Produksi Daging dan Telur Daerah (Ton/Tahun)	5	-	-	5	2,955,000,000	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	PERDAGANGAN				6,807,000,000		6,165,000,000	
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terkendalinya barang yang beredar dan penyaluran BBM	n/a	100	854,068,500	-	-	Dinas perdagangan
2.06 . 2.06.01 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		n/a	100	1,429,750,000	-	-	Dinas perdagangan
2.06 . 2.06.01 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal (%)	n/a	100	1,618,513,732	-	-	Dinas perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2.06 . 2.06.01 . 19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		n/a	15	990,250,000	-	-	Dinas perdagangan
2.06 . 2.06.01 . 04	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Barang Bersubsidi yang Diawasi (%)	n/a	100	1,914,417,768	100	2,865,000,000	Dinas perdagangan
2.06 . 2.06.01 . 03	Program Pembinaan Pedagang	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	n/a	-	-	15,3	3,300,000,000	Dinas perdagangan
	PERINDUSTRIAN				5,404,000,000		4,395,000,000	
2.07 . 2.07.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	13.25 (2016)	15	915,000,000	-	-	Dinas Perindustrian
2.07 . 2.07.01 . 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		n/a	100	854,585,973	-	-	Dinas Perindustrian
2.07 . 2.07.01 . 18	Program Penataan Struktur Industri		n/a		771,000,000	-	-	Dinas Perindustrian
2.07 . 2.07.01 . 19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Persentase Pertumbuhan Industri (%/Tahun)	22,13	255	1,900,000,000	-	-	Dinas Perindustrian
2.07 . 2.07.01 . 15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Nilai Industri Pengolahan (Milyar/Tahun)	184,7	199,05	963,414,027	213,3	670,000,000	Dinas Perindustrian
2.07 . 2.07.01 . 04	Program Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	13.25 (2016)	-	-	15	1,825,000,000	Dinas Perindustrian
2.07 . 2.07.01 . 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Potensi Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri (%/Tahun)	22,13	-	-	5	1,900,000,000	Dinas Perindustrian
	TRANSMIGRASI				3,573,000,000		1,875,000,000	
2.08 . 2.08.01 . 16	Program Transmigrasi Lokal		n/a	100	780,125,000	-	-	Dinas Transmigrasi
2.08 . 2.08.01 . 15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Luas wilayah transmigrasi yang dikembangkan (ha)	n/a	2	1,863,675,000	-	-	
2.08 . 2.08.01 . 18	Program Pembangunan Daerah Terpencil		n/a	100	929,200,000	-	-	Dinas Transmigrasi
2.08 . 2.08.01 . 03	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Luas Kawasan Transmigrasi yang akan Dikembangkan (Ha)	n/a	-	-	2	1,875,000,000	Dinas Transmigrasi
	PENUNJANG URUSAN				115,832,487,706		113,362,000,000	
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				6,700,000,000		5,825,000,000	
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi	persentase perangkat daerah yang menyediakan data dalam SIPD	n/a	100	825,028,400	-	-	BAPPEDA
1.06 .1.06.01 . 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	n/a	100	1,839,091,600	-	-	BAPPEDA
1.06 .1.06.01 . 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase pemenuhan RPIJM dan SSK	n/a	100	687,166,400	-	-	BAPPEDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1.06 .1.06.01 . 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jumlah OPD yang menyusun perencanaan tepat waktu & mengacu pada Dokumen Perencanaan	n/a	100	835,880,000	-	-	BAPPEDA
1.06 .1.06.01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	79,01	100	712,833,600	-	-	BAPPEDA
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Capaian indikator makro ekonomi daerah yang memenuhi target	n/a	100	852,274,381	-	-	BAPPEDA
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tingkat pemenuhan capaian indikator kota sehat	n/a	100	947,725,619	-	-	BAPPEDA
1.06 . 1.06.01 . 03	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	79,01	-	-	100	1,995,000,000	BAPPEDA
1.06 . 1.06.01 . 04	Program Perencanaan Pengembangan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RT RW	n/a	-	-	100	1,964,000,000	BAPPEDA
1.06 . 1.06.01 . 05	Program Perencanaan Ekonomi & Sosial Budaya	Kesesuaian rencana pembangunan dengan SDGs/TPB	n/a	-	-	100	1,866,000,000	BAPPEDA
	KEUANGAN				12,898,000,000		10,900,000,000	
1.20 . 1.20.05 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Regulasi Daerah yang terkait APBD yang ditetapkan sesuai dengan target waktu	n/a	99.97	6,390,000,000	-	-	BPKAD
1.20 . 1.20.05 . 18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Anggaran Perangkat Daerah yang diasistensi (%)	n/a	100	1,350,000,000	-	-	BPKAD
1.20 . 1.20.05 . 25	Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Persentase Regulasi Daerah yang terkait APBD yang ditetapkan sesuai dengan target waktu	n/a	-	-		5,400,000,000	BPKAD
1.20 . 1.20.05 . 26	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Anggaran Perangkat Daerah yang Diasistensi (%)	n/a	-	-		1,200,000,000	BPKAD
1.20 . 1.20.06 . 18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang Pendapatan Asli Daerahnya Mencapai Target	n/a	100	2,541,698,000	-	-	BAPENDA
1.20 . 1.20.06 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Nilai Pajak Daerah (Rp/Milyar)	27,31	34,92	2,616,302,000	-	-	BAPENDA
1.20 . 1.20.06 . 30	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Pajak Daerah (Rp/Milyar)	27,31	-	-	38,9	4,300,000,000	BAPENDA
		Nilai Retribusi Daerah (Rp/Milyar)	6,84	-	-	7,88		
		Nilai Lain-Lain Pendapatan Daerah (Rp/Milyar)	126,16	-	-	139,85		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				7,671,034,873		7,326,000,000	
1.20 . 1.20.04 . 04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS		n/a	100	1,855,645,000	-	-	BKDPSDM
1.20 . 1.20.04 . 32	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendiidkan dan pelatihan struktural	n/a	95.00	3,077,389,873	-	-	BKDPSDM
1.20 . 1.20.04 . 34	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Pemangku Jabaan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	n/a	81.55	2,738,000,000	-	-	BKDPSDM
1.20 . 1.20.04 . 19	Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Cakupan Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang Ditangani (%)	100	-	-	100	1,020,000,000	BKDPSDM
1.20 . 1.20.04 . 20	Program Pelayanan Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karir	Cakupan Layanan Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karir Aparatur (%)	100	-	-	100	1,840,000,000	BKDPSDM
1.20 . 1.20.04 . 21	Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Sumber Daya Aparatur	Cakupan Layanan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Sumber Daya Aparatur yang Ditangani (%)	100	-	-	100	4,466,000,000	BKDPSDM
	PENELITIAN & PENGEMBANGAN				2,835,000,000		3,685,000,000	
1.20 . 1.20.07 . 35	Program Penelitian dan Pengembangan SDM dan IPTEK Daerah	Jumlah rekomendasi penelitian, Naskah Akademik, dan Model Program serta hasil Evaluasi kebijakan yang dikomunikasikan kepada perangkat Daerah	n/a	15	1,835,000,000	-	-	BALITBANG
1.20 . 1.20.07 . 36	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Persentase Perangkat Daetah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	25	100	1,000,000,000	-	-	BALITBANG
1.20 . 1.20.07 . 27	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	36,36	-	-	40	1,985,000,000	BALITBANG
1.20 . 1.20.07 . 28	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.(%)	25	-	-	33	1,700,000,000	BALITBANG
	PENGAWASAN				5,883,539,500		5,960,000,000	
1.20 . 1.20.03 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan	n/a	100	3,063,539,500	-	-	Inspektorat
1.20 . 1.20.03 . 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga	Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemkot (Level)	2	100	2,820,000,000	3 (DC)	2,930,000,000	Inspektorat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan							
1.20 . 1.20.03 . 17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Persentase tindak lanjut temuan	57,02	-	-	75	3,030,000,000	Inspektorat
	UNSUR KEWILAYAHAN				20,400,915,333		23,010,000,000	
1.20 . 1.20.10 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi kegiatan pembangunan serta pelayanan di kecamatan (%)	100	100	1,900,000,000	100	1,915,000,000	Kec. Wara Selatan
1.20. 1.20.13 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi kegiatan pembangunan serta pelayanan di kecamatan (%)	100	100	3,200,000,000	100	3,315,000,000	Kec. Wara Timur
1.20 . 1.20.09 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi kegiatan pembangunan serta pelayanan di kecamatan (%)	100	100	2,700,000,000	100	2,805,000,000	Kec. Wara Utara
1.20 . 1.20.08 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi kegiatan pembangunan serta pelayanan di kecamatan (%)	100	100	1,962,000,000	100	2,800,000,000	Kec. Wara
1. 20. 1.20.12 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi kegiatan pembangunan serta pelayanan di kecamatan (%)	100	100	2,305,000,000	100	2,700,000,000	Kec. Wara Barat
1.20 . 1.20.15 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi kegiatan pembangunan serta pelayanan di kecamatan (%)	100	100	1,720,000,000	100	2,400,000,000	Kec. Bara
1. 20. 1.20.16 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi kegiatan pembangunan serta pelayanan di kecamatan (%)	100	100	1,800,000,000	100	1,900,000,000	Kec. Sendana
1. 20. 1.20.14 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi kegiatan	100	100	1,513,915,333	100	1,925,000,000	Kec. Mungkajang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		pembangunan serta pelayanan di kecamatan (%)						
1. 20. 1.20.11 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi kegiatan pembangunan sertapelayanan di kecamatan (%)	100	100	3,300,000,000	100	3,250,000,000	Kec. Telluwanua
	URUSAN PENDUKUNG				59,443,998,000		56,656,000,000	
1. 20. 1.20.01 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Layanan Produk Hukum Daerah yang Dikaji dan Difinalisasi (%)	n/a	100	1,782,000,000	-	-	SEKDA
1. 20. 1.20.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		n/a	100	1,941,799,900	-	-	SEKDA
1. 20. 1.20.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		n/a	100	1,815,000,000	-	-	SEKDA
1. 20. 1.20.01 . 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		n/a	100	1,750,000,000	-	-	SEKDA
1. 20. 1.20.01 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		n/a	100	1,968,000,000	-	-	SEKDA
1. 20. 1.20.01 . 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media		n/a	100	4,825,000,000	-	-	SEKDA
1. 20. 1.20.01 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian		n/a	100	1,254,450,000	-	-	SEKDA
1. 20. 1.20.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan dan Sosial Kemasyarakatan yang Ditangani (%)	n/a	100	1,974,007,000	-	-	SEKDA
1. 20. 1.20.01 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		n/a	100	1,920,000,000	-	-	SEKDA
1. 20. 1.20.01 . 30	Program Pengendalian/Pengawasan dan Pendataan Potensi Perekonomian	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pengelolaan Perekonomian Daerah (%)	n/a	100	1,805,000,000	-	-	SEKDA
1. 20. 1.20.01 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan		n/a	100	1,027,591,100	-	-	SEKDA
1. 20. 1.20.01 . 34	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		n/a	100	1,855,500,000	-	-	SEKDA
1. 20. 1.20.01 . 36	Program Pengaturan Jasa Konstruksi		n/a	100	1,877,500,000	-	-	SEKDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1. 20. 1.20.01 . 37	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		n/a	100	1,821,543,000	-	-	SEKDA
1. 20. 1.20.01 . 28	Program Perencanaan Pengadaan Barang dan jasa		58.82 (2018)	70	1,696,000,000	-	-	SEKDA
1.20 . 1.20.01 . 05	Program Pembinaan Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	Cakupan Koordinasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan yang Ditangani (%)	100	100	1,250,000,000	100	6,600,000,000	SEKDA
1.20 . 1.20.01 . 06	Program Koordinasi Pengelolaan Perekonomian Daerah	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pengelolaan Perekonomian Daerah (%)	n/a	100	1,863,000,000	100	1,935,000,000	SEKDA
1.20 . 1.20.01 . 04	Program Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan Ketersediaan Dokumen LKPJ dan LPPD Tepat Waktu	n/a	100	6,937,000,000	100	5,455,000,000	SEKDA
1.20 . 1.20.01 . 05	Program Pengelolaan Ketatausahaan, Keprotokoleran dan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga (%)	100	100	5,535,000,000	100	4,605,000,000	SEKDA
1.20 . 1.20.01 . 10	Program Pengembangan Pengelolaan Kehumasan	Cakupan Layanan Kehumasan yang Ditangani (%)	100	100	3,900,000,000	100	2,810,000,000	SEKDA
1.20 . 1.20.01 . 11	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan, Perbendaharaan dan TPTGR	Cakupan Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan TPTGR yang Ditangani (%)	100	100	1,255,000,000	100	6,125,000,000	SEKDA
1. 20. 1.20.01 . 25	Program Kerjasama dan Kemitraan Pemerintah Daerah	Cakupan Kerjasama dan Kemitraan Pemerintah Daerah yang Dikaji dan Difinalisasi (%)	100	100	1,975,000,000	100	1,850,000,000	SEKDA
1.20 . 1.20.01 . 03	Program Tata Laksana Kelembagaan, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik	Angka Rata-Rata Kinerja SPM Perangkat Daerah (%)	100	100	1,877,000,000	100	1,876,000,000	SEKDA
		Cakupan Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah						
1.20 . 1.20.01 . 14	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Persentase Rata-rata LPM, LSM, LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	n/a	55	1,948,000,000	60	6,250,000,000	SEKDA
1.20 . 1.20.01 . 08	Program Pengelolaan Administrasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Dikoordinasikan (%)	100	-	-	100	1,985,000,000	SEKDA
1.20 . 1.20.01 . 07	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan Pemenuhan 17 Standar LPSE (%)	58.82 (2018)	-	-	80	1,090,000,000	SEKDA
1.20 . 1.20.01 . 13	Program Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	Cakupan Layanan Produk Hukum Daerah yang Dikaji dan Difinalisasi (%)	100	-	-	100	2,100,000,000	SEKDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1.20 . 1.20.02 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	100	1,754,107,000	Ada	12,000,000,000	DPRD
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota						
1.20 . 1.20.02 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	100	1,836,500,000	Ada	1,975,000,000	DPRD
TOTAL SELURUHNYA					956,451,857,030		979,913,000,000	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah diukur dari seperangkat Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil *(outcomes)* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama *(key performance indicator)*. Berikut adalah table indicator kinerja pembangunan Kota Palopo Tahun 2018-2023 :

8.1.1. Indikator Kinerja Makro

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing–masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 8.1.
Indikator & Target Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kota Palopo 2018-2020

Indikator Kinerja Makro	Realisasi		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode
	2019	2020	2021	2022	2023	
Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	78.06	78.06	78.4	78.82	79.25	79.25
Persentase Penduduk Miskin (%)	7.82	7.85	6.57	6.28	5.99	5.99
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10.32	10.37	9.03	8.55	8.07	8.07
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.75	0.45	4.16	4.68	5.69	5.69
PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Thn) (ADHB)	43.02	42.61	42	43	44	44
Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio/Poin)	0.338	0.354	0.335	0.333	0.332	0.332
Inflasi	1.91	1.21	2.5	2.4	2	2.5

8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Adapun target IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kota Palopo 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	77.98	78.06	78.4	78.82	79.25	79.25
2	Indeks Pendidikan (Poin)	77.69	77.76	78.37	78.48	78.59	78.59
3	Indeks Kesehatan (poin)	78.14	78.28	78.21	78.58	78.76	78.76
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.82	7.85	6.57	6.28	5.99	5.99
5	PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Thn) (ADHB)	43.02	42.61	42	43	44	44
6	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	85.77	85.88	85.9	86. 20	86.7	86.7
7	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	1.68	0.02	1.61	1.57	1.53	1.53
8	Indeks Layanan Jalan (Poin)	67.51	67.09	67.95	68.15	68.45	68.45
9	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	12.58	54.95	10	7	2	2
10	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	79.95	76.95	79.98	80	80.1	80.1
11	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	52.73	50.33	65	70	75	75
12	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	52.43	60.03	70	75	80	80
13	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	83.08	83.06	84	85	86	86
14	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.75	0.45	4.16	4.68	5.69	5.69
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10.32	10.37	9.03	8.55	8.07	8.07
16	Produktifitas Total Daerah (Juta/Tenaga Kerja/Tahun)	98.23	94.39	104.13	109.94	115.75	115.75
17	Total Kontribusi PAD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PAD (%)	8.88	2.28	8.78	9.8	10.89	10.89
18	Kontribusi PAD Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	5.12	0.02	5	6	7	7
19	Kontribusi PAD Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	3.76	2.26	3.78	3.8	3.89	3.89

8.1.3. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain menetapkan indicator kinerja utama untuk mengukur pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk mengukur kinerja semua urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah Kota Palopo, juga ditetapkan target indicator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan masing-maisng urusan pemerintahan daerah atau indicator kinerja kunci (IKK), sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri 86 Tahun 2017, dan Permendagri 18 Tahun 2020, yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 8.3.
Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Palopo 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	6.75	0.45	4.16	4.68	5.69	5.69
2	Laju inflasi (%/Tahun)	1.91	1.21	2.5	2.4	2	2
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	43.02	42.61	42	43	44	44
4	Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	12,986	12,995	13048	13320	13413	13413
5	Indeks Gini (Angka)	0.338	0.354	0.335	0.333	0.332	0.332
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	92.18	92.15	93.43	93.72	94.01	94.01
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.82	7.85*	6.57	6.28	5.99	5.99
8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo (Rp/Kapita/Bulan)	324,233	362,859	362850	363423	365415	365415
9	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14,370	14,710	14532	14241	13957	13957
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari (%)	7.82	7.85	6.57	6.28	5.99	5.99
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.15	0.95	1.2	1.19	1.1	1.1
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.29	0.21	0.38	0.3	0.28	0.28
	Indeks Kesehatan	78.14	78.28	78.21	78.58	78.76	78.76
	Indeks Pendidikan	77.69	77.76	78.37	78.48	78.59	78.59
	Indeks Pengeluaran	78.12	78.14	78.2	78.38	78.85	78.85
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka)	77.98	78.06	78.4	78.82	79.25	79.25

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
12	Angka melek huruf (%)	98.4	98.16	100	100	100	100
13	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	10.75	10.76	10.82	10.85	10.9	10.9
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15.07	15.08	15.17	15.19	15.21	15.21
14	Angka usia harapan hidup (Tahun)	70.79	70.88	71.03	71.15	71.27	71.27
15	Persentase balita gizi buruk (%/Tahun)	0	0	0	0	0	0
16	Prevalensi balita gizi kurang (%/Tahun)	3.84	3.24	0.64	0.06	0	0
17	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (%)	100	100	100	100	100	100
18	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	60.49	62.35	60.63	61.69	62.75	62.75
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	74.85	75,66	79.3	80.63	81.96	81.96
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	47.37	50,34	43.42	44.17	44.93	44.93
19	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	64.58	61.23*	60.59	60.85	60.95	60.95
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	79.16	76.23	74.95	75.1	75.25	75.25
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	51	47.14	46.6	47.49	48.39	48.39
20	Tingkat pengangguran terbuka (%)	10.32	10.37*	9.03	8.55	8.07	8.07
21	Rasio penduduk yang bekerja (%)	89.68%	89.63	90.95	91.43	91.91	91.91
22	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	75.4	71.80%	76.85	78.95	78.95	78.95
23	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	54.25%	51.57%	55.09	56.33	57.56	57.56
24	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	25.07%	33.62%	26.75	26.8	26.95	26.95
	Laki – Laki	-	22.15	18.45	18.55	18.75	18.75
	Perempuan	-	11.46	8.3	8.25	8.2	8.2
25	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	26.09%	26.09 (2019)	39.86	39.81	39.76	39.76
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.08	83.06	84	85	86	86
27	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	16.83%	22.85%	16	19	20	20
28	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92.6	90.1	91.7	91.8	91.9	91.9
30	Penguatan cadangan pangan (%)	115.2	87.53	97	97.5	98.1	98.1
31	Penanganan daerah rawan pangan (%)	n/a	n/a	0	0	0	0

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
32	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	7	8	9	9
33	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	n/a	n/a	3	3	3	3
34	Produksi sektor pertanian (Ton/Tahun)	25,025	21,756	44,187	46,388	48,699	48699
	Padi	20,288	17,019	37,842	39,734	41,720	41720
	Jagung	4,737	4,737	6,139	6,446	6,768	6768
	Ubi Kayu	n/a	n/a	182	183	185	185
	Ubi Jalar	n/a	n/a	6	6	6	6
	Sagu	n/a	n/a	18	19	20	20
	Daging (Ruminansia dan Unggas) Ton	4404.99	3642.79	3,377	3,413	3,448	3448
	Daging (Ruminansia) Ton	601.82	375.62	255	258	260	260
	Daging Sapi (Ton)	596.87	370.18	255	257	260	260
	Daging Kerbau (Ton)	1.03	3.77	0	0	0	0
	Daging Kambing (Ton)	3.92	1.67	1	1	1	1
	Daging Unggas (Ton)	3803.16	3267.17	3,122	3,155	3,188	3188
	Daging Ayam Kampung (Ton)	123.77	124.28	158	160	162	162
	Daging Ayam Pedaging (Ton)	3,666.04	3,129.60	2,964	2,995	3,027	3027
	Daging Itik/Bebek/Entog (Ton)	13.36	13.29	8,71	8,80	8,89	8,89
	Telur (Ayam Kampung/Ras/Itik/Entog) (Ton)	1422.3	1354.3	1,833	1,852	1,872	1872
	Telur Ayam Buras/Kampung (Ton)	1222.384	1,083	1,639	1,656	1,674	1674
	Telur Ayam Ras Petelur (Ton)	86.872	150.688	46	47	47	47
	Itik/Angsa/Entog (Ton)	113.08	120.55	147	149	151	151
35	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	3	3	3	3
36	Produksi sektor perkebunan (Ton/Tahun)	2018.66	1364.64	2305.39	2359.89	2414.4	2414.4
	Kelapa Dalam	17.70	7.24	33.38	33.88	34.39	34.39
	Kopi	50.96	60.40	69	70	71	71
	Kopi Robusta	n/a	n/a	69	70	71	71
	Kopi Arabika	n/a	n/a	0.01	0.01	0.01	0.01
	Cengkeh'	n/a	n/a	134	136	138	138
	Kakao	1,950	1,297	2000	2050	2100	2100

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
37	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	2	2	2	2
38	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	0.03	0.03	0.03	0.03
39	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	0.19	0.19	0.19	0.19
40	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0.21	0.14	1.24	1.25	1.26	1.26
41	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	6	7	8	8
42	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	24.41%	24.47%	22	23	24	24
43	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2.72%	2.56%	2.95	2.98	3	3
44	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
45	Pertumbuhan Industri (%)	n/a	n/a	5	5	5	5
46	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	0	0	0	0
ASPEK DAYA SAING DAERAH							0
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	110.51	112,776.50	117,815	124,981	132,147	132147
2	Nilai tukar petani	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	54.85	55.34	53	54	54	54
4	Produktivitas total daerah (Ribu/Tenaga Kerja/Tahun)	98.23	94.39	104	110	116	115.75
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	100	100	100	100	100	100
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	76.59%	n/a	70	71	72	72
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	n/a	n/a	2	2	3	2.54
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Angka kriminalitas yang tertangani (per 10.000)	12	8	21	23	25	25
10	Rasio ketergantungan	47.98	45.31	47	47	46	46.26

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah							
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR						0
ASPEK PELAYANAN UMUM							0
Layanan Urusan Wajib Dasar							0
1.	**Pendidikan**						0
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	62.48	54.6	100	100	100	100
2	Angka Partisipasi Kasar						0
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	105.99	104.62	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	86.02	87.87	100	100	100	100
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)						0
	Tidak/Belum Bersekolah (%)	6.64	7.32	5.7	5.6	5.5	5.5
	Tamat SD/sederajat (%)	15.79	17.01	10	9	7	7
	Tamat SMP/sederajat (%)	20.02	22.53	22	21	20	20
	Tamat SMA (%)	36.19	33.58	39	40	41	41
	Tamat SMK (%)	3.52	3.04	5	6	7	7
	Tamat Perguruan Tinggi (%)	17.84	16.52	18	18	19	19
	Diploma I/II (%)	0.39	0.41	0.7	0.8	0.9	0.9
	Diploma III (%)	1.79	1.47	3.1	3.3	3.9	3.9
	Diploma IV/S1-S3 (%)	15.66	14.64	14.2	14.3	14.4	14.4
4	Angka Partisipasi Murni						0
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99.44	99.01	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	78.11	78.33	100	100	100	100
5	Angka partisipasi sekolah (%)						0
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	997	995.3	1000	1000	1000	1000
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	991.7	986.9	1000	1000	1000	1000
6	Angka Putus Sekolah:						0
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0.04	0.43	0	0	0	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0.006	0.78	0	0	0	0
7	Angka Kelulusan:						0

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100	100	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM):						0
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100	100	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	-	-	100	100	100	100
9	Fasilitas Pendidikan:						0
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100	100	100	100	100	100
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	100	100	100	100	100	100
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)	-	-				0
	SD/MI (per 10,000)	39	36	39	39	39	39
	SMP/ MTS (per 10,000)	30	26	30	30	30	30
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	649	672	691	709	728	728
	SD/MI (per 10,000)	601	640	656	672	688	688
	SMP/ MTS (per 10,000)	737	731	752	773	794	794
12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (per 10.000)	n/a	0.59	0.6	0.61	0.62	0.62
13	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	n/a	n/a	100	100	100	100
14	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki (%)	98.16	-	100	100	100	100
15	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	98.42		100	100	100	100
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	-	94.06	100	100	100	100
17	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			100	100	100	100
18	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			100	100	100	100
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-			100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama						
20	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan mengengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			100	100	100	100
2.	**Kesehatan**						
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0.61	0.95	0.5	0.4	0.3	0.3
2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	99.39	98.98	99	99	99	99
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	5.79	3.74	5	5	4	4
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4.27	2.72	3	3	2	2
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	30.47	33.96	30	20	10	48
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	8.41	8.23	10	10	11	11
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	3	3	4	4	4	4
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	4	4.33	4	4	4	4
9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	0.63	0.62	6	6	6	6
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	6	6	6	6	6	6
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	86.23%	66.92%	86	86.42	86.98	75
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	101.67%	89.44%	100	100	100	97
13	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) (%)	93.75%	70.83%	100	100	100	97.8
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	Tidak ada Kasus	-	100	100	100	100
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di	-	-	81	82	83	74.13

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (%)						
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	98.48%	104.27%	98.48	98.5	98.52	90.5
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (Rasio)	0	-	0	0	0	0
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	9.20%	7.61%	9.7	10.5	12	12
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	118.91%	100.00%	100	100	100	100
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	224.79	162.50	200	190	195	195
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	0	0	0	0	0
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	91.41%	100.00%	92	93	94	85.1
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	39.76%	93.00%	40	41	42	65.9
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100
25	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	5		8	9	10	10
26	Angka kejadian Malaria (per 1000)	0.62	0.72	60	58	55	10
27	Tingkat kematian akibat malaria (per 1000)	0	-	0	0	0	0
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (%)	100	-	100	100	100	100
30	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (%)	0.04%	0.070%	36	34	32	32
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir (per 1000)	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24	n/a	-	2.4	2.4	3	3

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)						
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100	100
34	Cakupan kunjungan bayi (%)	99.76%	94.87%	100	100	100	100
35	Cakupan puskesmas (%)	133.33	133.33	133,33	133,33	133,33	133,33
36	Cakupan pembantu puskesmas (%)	62.50%	62.50%	65	70	75	77
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	100.00%	82.79%	100	100	100	.93.50
38	Cakupan pelayanan nifas (%)	99.53%	85.10%	100	100	100	92.3
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	76.42%	67.63%	76	77	78	78.9
40	Cakupan pelayanan anak balita (%)	73.92%	39.20%	74	75	76	75
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100	-	100	100	100	100
42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	97.93	95.83	100	100	100	100
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)		-	100	100	100	100
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100	100
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	Tidak ada Kasus	100	100	100	100	100
46	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (%)	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.55
47	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	0.78	0.78	0.78	0.79	0.79	0.79
48	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96.27	100	100	100	100	100
49	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99.79	100	100	100	100	100
50	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	96.86	100	100	100	100	100
51	Cakupan pelayanan kesehatan balita	68.33	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	sesuai standar						
52	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97.93	100	100	100	100	100
53	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	50.66	100	100	100	100	100
54	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatakan sesuai standar	74.82	100	100	100	100	100
55	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41.88	100	100	100	100	100
56	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87.03	100	100	100	100	100
57	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	100	100	100
58	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	100	100	100
59	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	95.17	100	100	100	100	100
60	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	0	0
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
	Pekerjaan Umum:						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	69.57%	67.87%	70	71	72	72
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	27	27	29	30	30	30
3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam) (%)	71.60%	69.67%	72	73	74	74
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan	2.14%	51.82	1.34	1.36	1.38	1.38

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)						
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	97.03	83.68	97	98	99	99
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	50.1	41.85	49	48	47	47
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	8.87%	n/a	9	10	11	11
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	24.08	18.478	14	13	12	12
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	58.56%	59.13%	6	7	8	8
12	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	73.55%	77.95	73	74	75	75
13	Rasio Jaringan Irigasi (per 1000 Ha)	81.2	82.610	21	22	23	23
14	Persentase penduduk berakses air minum (%)	95.61	95.11	100	100	100	100
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	97.28	n/a	100	100	100	100
16	Persentase areal kawasan kumuh (%)	0.15	0.16	1.61	1.57	1.53	1.53
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	4.1%		4.8	4.9	5	5
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	1.52	1.52	1.9	1.9	1.9	1.9
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	1.82	1.84	2	2	2	2
20	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	-	-	6	7	8	8
21	Rasio luas kawasan permukiman	-	-	6	7	8	8

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	sepanjang pantai rawan abrasi,erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota						
22	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	-	21	22	23	23
23	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	-	-	100	100	100	100
24	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic		97.31	100.00	100.00	100.00	100.00
3	**Penataan Ruang:**						
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	36.92	36.92	76.98	77.1	77.2	77.2
2	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)	1,174	1,174	1174.63	1176.46	1177.99	1177.99
3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	76.98	76.98	79.98	80	80.1	77.2
4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0.053	0.045	79.98	80	80.1	80.1
5	Ruang publik yang berubah peruntukannya	n/a	n/a	79.98	80	80.1	n/a
6	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0.4555	0.4046	79.98	80	80.1	n/a
7	Ketaatan terhadap RTRW	52	54	55	56	56	56
8	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	n/a	52	79.98	80	80.1	80.1
9	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota	69.57	64	70	71	72	72
10	Rasio tenaga/operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	55	60	60	65	70	70
11	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan	n/a	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	konstruksi						
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**						
1	Rasio rumah layak huni	0.19	0.191	0.2	0.21	0.22	0.22
2	Rasio permukiman layak huni (%)	92.26%	93.60%	95.78	96.23	96.67	96.67
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	91.44%	92.75%	97.4	98	98	98
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	93.58	92.75	98.5	98.7	98.7	98.7
5	Persentase pemukiman yang tertata (%)	92.84	67.67	93	93.5	93.75	93.75
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	0.15	1.7	0.6	0.4	0	0
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	4.31	22.20	10	4	0	0
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	0.47	21.8	3	2	0	0
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	25.79	28.05	35	40	45	45
10	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100
11	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100
12	Persentase permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	n/a	10	30	30	30	100
13	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)(%)	n/a	1.2	1.2	1.2	1.2	6
14	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	25.79	28.05	35	40	45	45
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**						
1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	200	200	100	100	100	100
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	95,62	94.93	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	10,08	10,08	15.15	13.13	15.15	15.15
4	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	65,59	98,13	100	100	100	100
5	Persentase Penegakan PERDA	95,62	94,93	100	100	100	100
6	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	114	100	100	100	100	100
7	Persentase Perda dan perkada yang ditegakkann	95.62	100	100	100	100	100
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	88.88	100	100	100	100	100
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	84.17	100	100	100	100	100
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	100
11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	100
12	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	65.59	100	100	100	100	100
6.	**Sosial**						
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	54,97	69.06	55	56	57	57
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	55.09	69.3	56	57	58	58
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	60.3	76.81	61	62	63	63
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	0	0	2	3	4	4
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	sosial (%)						
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100	100
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100	100
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	0	0	100	100	100	100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	41.43	16.79	42	42	44	44
10	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	41.43	14.2	42	42	44	44
11	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1	**Tenaga Kerja**						
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Per 1000)	9.50	0.57	8	7	6	6
	Angka sengketa pengusaha-pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	2.55	1.5	2	2	1	1
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	11.00	100.00	12	13	14	14
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	53.12	42.51	54	55	56	56
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	25.3	25.4	26	27	28	28
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	54.82	44	55	56	57	57

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0	0	0	0	0	0
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	1.13	9.1	1.5	1.7	1.9	1.9
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	-	-	1.5	2	2.5	2.5
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	46.45	0.00	47	48	49	49
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	0	0	12	13	15	15
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	0	0	5	6	7	7
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	-	-	10.5	10.7	10.85	10.85
13	Persentase kegiatan yang dilaksanan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	n/a	60	65	70	75	75
14	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	n/a	2	3	4	5	5
15	Tingkat produktivitas tenaga kerja (Ribu/Tenaga Kerja/Thn)	98.23	98.32	104.13	109.94	115.75	115.75
16	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	25 (2018)	27	26	27	28	30
17	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalan dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	53.12	56	54	55	56	56
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	9.27%	9.27%	10	11	12	15
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	28.00%	28.00%	28	28	28	20
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	1.4%	-	3.5	4	5	4
4	Rasio KDRT (per 10.000)	1	-	1	1	1	2
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	umur (%)						
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	91.45%	-	46.6	47.49	48.39	48.39
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	25	26	27	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100	100	40	50	60	60
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)	n/a	n/a	30	40	50	50
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	-	-	100	100	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	-	-	40	50	60	60
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	9.09	76.92	10	11	12	30
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	n/a	n/a	20	25	30	30
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD			0	0	0	0
	APM Perempuan pada Tingkat SD	n/a	n/a	100	100	100	100
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD	n/a	n/a	100	100	100	100
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	n/a	n/a	0	0	0	0
	APM Perempuan pada Tingkat SMP	n/a	n/a	78	79	80	82
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP	n/a	n/a	80	81	82	82
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	n/a	n/a	0	0	0	0

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	APM Perempuan pada Tingkat SMA	n/a	n/a	63	64	65	75
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMA	n/a	n/a	76	77	78	75
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	n/a	n/a	43.85	44.1	44.85	44.85
	APM Perempuan yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	43.48%	n/a	44	45	46	n/a
20	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	n/a	10.00%	20.00%	30.00%	40.00%	40.00%
21	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	72.2	100	100	100	100
22	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	n/a	3	3	3	3	3
3	**Pangan**						
1	Ketersediaan pangan utama (%)	23.05	36.60	11.6	11.8	12	12
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	4,085	2,540	2497	2498	2499	2499
	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)	3981	2,442	2400	2400	2400	2400
	Ketersediaan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	104.15	97.84	97.8	98	99	99
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	86.00	94.00	89	90	91	91
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	115.2	87.53	97	97.5	98.1	98.1
4	**Pertanahan**						
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	27.84%	28.71	29	30	31	31
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	28.57%	27.27	29	30	31	31
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	100%	100%	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	0	0	100	100	100	100
5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	0	100	100	100	100
6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0	0	2	3	3	3
7	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diresdistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	0	9	9	10	10
8	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	0	2	2	2	2
9	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (Kasus)	0	0	3	3	3	3
5	**Lingkungan Hidup**						
	Kabupaten/Kota						
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Belum ada	Belum ada	Ada	ada	ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Belum ada	Belum ada	ada	ada	ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada	Ada	0	0	0	0
4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Cemar Ringan	Cemar Ringan	31.22	31.32	31.46	31.46
5	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Sangat Baik	Sangat Baik	88.12	88.41	88.81	88.81
6	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	Belum tersedia	Belum tersedia	19.39	19.46	19.55	19.55
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	36.67	4.33	28	29	30	40.8
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana			0	0	0	0

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota						
	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina (Orang)	0	0	1	1	1	1
	Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum (Orang)	0	0	1	1	1	1
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	0	0	0	0	0
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0	0
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0	0
12	Penetapan hak MHA	0	0	0	0	0	0
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (%)	0	0	0	0	0	0
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana (%)	0	0	0	0	0	0
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	0	0	0	0	0
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Kali)	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	100%	100%	100	100	100	100
18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	90.27%	88.63	91	92	93	96.95
19	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	4.12%	4.76	4.2	4.3	4.4	6.67
20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	90.26%	81.43	87.85	87.88	87.9	87.9
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	87.02%	47.62	88	89	90	99
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	-	-	80	80.2	80.3	78.2
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	0	0	100	100	100	100
24	Persentase pengelolaan sampah oleh	0	0	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan						
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kab/kota	45.68	43.37	43.56	43.7	43.90	43.90
26	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	79.46 (2018)	77.98	80	80.2	80.3	78.2
27	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadapat izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	0	0	0	0	0
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.67	0.69	0.85	0.87	0.9	0.9
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.94	0.97	0.9	0.96	0.98	0.98
3	Rasio pasangan berakte nikah	0.38	0.39	0.85	0.9	0.95	0.95
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	93.84	93.16	97	98	100	100
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	100	100	100	100	100	100
8	Perekaman KTP elektronik	0	0	0	0	0	0
9	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memilikan KIA	0	0	0	0	0	0
10	Kepemilikan akta kelahiran	0.94	0.87	0.9	0.96	0.98	0.98
11	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	n/a	3	4	5	6	6
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	100	100	100	100	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1	1	1	1
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	4.17	4.17	2.5	2.5	2.5	2.5

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	(%)						
4	Persentase LSM aktif (%)	2.78%	-	2.8	2.9	3	9
5	Persentase LPM Berprestasi (%)	4.17	4.17	4.18	4.19	4.2	12
6	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	100	100
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	0	0	0	0	0
11	Persentase peningkatan status desa mandiri	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.18	2.17	2.28	2.27	2.26	2.26
2	Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	2.32 (2018)	2.6	2.5	2.25	2	2
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	-	-	2	3	4	4
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	36.73%	38.78	37	38	39	39
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	-	2	3	4	4
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	-	-	1	0	0	1

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	-	0	2	2	2
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	-	0	0	1	1
10	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2	2
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	75.74%	75.60%	80.29	82.16	84.04	84.04
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	18.68	-	10	9	8	8
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	3	-	6	5	3	3
14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12.35%	12.07	14	12	9	9
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	21.92%	23.86%	24	25	25	25
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	32.04%	22.47	31.66	26.26	20.86	20.86
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	74.12%	73.75	86.07	89.71	93.35	93.35
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	60.61%	58.64	69.78	73.52	77.26	77.26
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	54.38%	48.04	51.06	52.35	53.63	53.63
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	11.11	11.11	0.11	0.11	0.11	0.11
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	20.44	7.6	12	13	14	14
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	23.93%	22.90	30.35	33.59	36.83	36.83
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	13.20	15.82	10	11	12	12
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes (%)	66.44%	18.47	67	68	69	69
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100	100	100	100	100
28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
29	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	100%	100%	3.15	3.56	3.96	3.96
31	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	100%	100%	100	100	100	100
32	Rata-rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	-	-	22	23	25	25
33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (%)	41.32%	61.87	0.27	0.28	0.29	0.29
	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.32 (2018)	2.6	2.5	2.25	2	2
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	75.74	78.42	80.29	82.16	84.04	84.04

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mPCR)						
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12.35	17	14	12	9	9
9	**Perhubungan**						
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	2,005,012	539,500	1,523,904	1,583,393	1,642,882	1,642,882
2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	2	2	2	2	2	2
3	Jumlah uji kir angkutan umum (Unit)	2608	2602	1,400	1,450	1,500	807
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	2	2	2	2	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	10.6	6.07	0	0	0	0.13
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	76.80	74.79	1	1	1	28
7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	46.0%	76.7%	47	48	49	75
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	16	16	17	18	19	25
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang/Tahun)	2,094,130	573,160	1,523,350	1,582,803	1,642,256	1,642,256
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (M3/Tahun)	607,024	n/a	613,037	616,931	620,825	620,825
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	2,094,130	1,054,677	2,102,153	2,171,752	2,241,351	2,241,351
12	Rasio konektivitas kabupaten/kota						
13	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota						
10	**Komunikasi dan Informatika**						
1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	3.35	3.77	3.65	3.75	4	4
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.9	0.9	0.9	0.92	0.98	0.98
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	86	-	80.5	80.7	80.9	80.9
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0.23	0.25	0.11	0.11	0.12	0.12
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki	0.5	0.5	0.55	0.75	0.9	0.9

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	komputer pribadi						
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	80	85	90	95	95	95
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	65	75	80	85	90	90
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	60	65	70	85	90	90
11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**						
1	Persentase koperasi aktif (%)	25.34	23.6	71	72	73	73
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	99.91	100	100	100	100	100
3	Persentase BPR/LKM aktif (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	75.37	81.85	76	77	78	78
5	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	71.00	70.00	71.00	71.00	72.00	72.00
6	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	n/a	5	6.00	7.00	8.00	8.00
12	**Penanaman Modal**						
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	78	74	70	71	72	156
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	130,740	109,484	150,000	170000	190000	654947
4	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	13.65	9.00	14	15	16	12
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	59.19	21.25	10	20	30	40
6	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	n/a	5	5	5	5	20
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**						
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	70.20%	71.06%	52.7	54.1	55.4	55.4
2	Persentase wirausaha muda (%)	1.77	1.3	1.36	1.38	1.39	1.39

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	59.26	96.96	64.29	67.86	71.43	71.43
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	32.53	27.71	34.94	36.14	37.35	37.35
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	28.2	0	68.8	69.4	70.6	70.6
6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	4	0	7	8	10	10
7	Jumlah prestasi olahraga (Cabang)	4	0	2	3	4	4
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.35	1.35	1.36	1.38	1.39	1.39
9	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	9.84	9.85	9.91	9.96	10	10
10	Peningkatan prestasi olahrgaa	4	0	3	4	5	5
14	**Statistik**						
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Dalam Proses	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	n/a	100	100	100	100	100
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	n/a	100	100	100	100	100
15	**Persandian**						
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (%)	79.59%	79.59	80	81	82	85
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	n/a	65	75	85	95	95
16	**Kebudayaan**						
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	14	5	15	16	17	15
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	99.33%	100	100	100	100	100
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)	0	0	1	1	1	3
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	52	53	52	52	52	50

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	Terlestarikannya Cagar Budaya						
17	**Perpustakaan**						
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	10.15	23.23	11	12	13	9.8
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	38.49	37.55	39	40	41	51
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1000)	1.13	1.17	1.15	1.3	1.45	1.24
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	1,246	2,964	1300	1350	1400	1451.13
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	404	185	430	450	500	1482
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	67	100	67	68	69	100
7	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	n/a	51	51.5	52	52.5	52.5
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	6	7	8	9	9
18	**Kearsipan**						
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	24.49%	12.24%	25	26	27	80
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	7	6	8	9	10	12
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Rahun 2009 tentang Kearsipan	n/a	100	100	100	100	100
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	n/a	75	80	85	90	90
Layanan Urusan Pilihan							
1.	**Pariwisata**						
1	Kunjungan wisata (%)	115.83%	53.28%	100	100	100	100
2	Lama kunjungan Wisata (Rata-rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)	2	1	2.5	2.5	2.5	2.5
3	PAD sektor pariwisata (%)	5.12%	3.63%	5	6	7	7

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
4	Persentase pertumbuhan jumah wisatawan mancanegara per kebangsaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	n/a	2	2	2	2	8
6	Tingkat hunian akomodasi (%)	31.99	32	32	32	33	33
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.51	1.23	1.24	1.25	1.26	1.26
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5.12	0.17	5	6	7	7
2.	**Pertanian**						
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	n/a	n/a	15.40	15.35	15.3	15.3
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	4	5	6	6
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	3	3.5	4	4
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	30	32	35	35
5	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)	25,028	22,963				
	Padi	20,288	17,585	37,842	39,734	41,720	189,659
	Jagung	4,737	5,360	6,139	6,446	6,768	30,768
	Ubi Kayu	n/a	n/a	182	183	185	912
	Ubi Jalar	n/a	n/a	6	6	6	28
	Sagu	2.23	18.2	18	19	20	90
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)						
	Padi	6.41	5.76	6,61	6,71	6,81	6,81
	Jagung	7.10	6.19	7,36	7,47	7,58	7,58
	Ubi Kayu	n/a	n/a	29	30	31	31
	Ubi jalar	n.a	n.a	14	15	16	16
	Sagu	n.a	0.25	0	0.4	0.45	0.45
7	Cakupan bina kelompok petani	56.21	87.98	53	54	55	55
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6.40 (2018)	6,51	6,61	6,71	6,81	6,81
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah	n/a	5	10	15	20	20

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	kasus penyakit hewan menular						
3	**Energi dan Sumber Daya Mineral**						
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	100	100	100	100	100	100
2	Rasio ketersediaan daya listrik	100	100	100	100	100	100
4	**Perdagangan**						
1	Ekspor Bersih Perdagangan (Nilai/Juta)	- 1,004,760	(1,005,968.10)	-924,251	-886,449	-850,195	-850,195
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	10.67	-	13	14	15	15
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	71.54	72.52	73.52	74.53	75.55	75.55
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	53.03	54	55	55	57	57
5	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	50.08	53	56	59	62	62
5	**Perindustrian**						
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	2.45%	1.69	2.5	2.6	2.7	10.25
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	5	5	5	5	5	5
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	n/a	80	85	90	95	95
4	Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	n/a	96	96.3	96.5	96.9	96.8
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	n/a	13.97	14.77	11.1	11.35	11.35
7	Tersedianya informasi industri secara	n/a	n/a	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	lengkap dan terkini						
6	**Transmigrasi**						
1	Persentase transmigran swakarsa						
7	**Perikanan**						
1	Produksi perikanan (%)	93.33%	96.90	100	100	100	100
	Target Produksi Perikanan Daerah (Ton/Tahun)	133,481	145,143	156,497	163,533	170,914	612,831
2	Konsumsi ikan (%)	98.54%	98.20	100	100	100	100
	Target Konsumsi Perikanan Daerah (Kg/Kapita/Tahun)	53.81	54.7	57.37	58.52	59.69	59.69
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	7.75%	2.80	2.09	4.17	4.83	4.83
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	11.00%	6.75	6.67	6.77	6.87	6.87
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Nilai tukar nelayan	n/a	n/a				
	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	134,857	149,898	156,607	163,645	171,027	171,027
Penunjang Urusan							
1.	**Perencanaan Pembangunan**						
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	98	98	98	98	98	98
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	RTRW						
2.	**Keuangan**						
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	0	0	0	0	0	0
3	Persentase SiLPA terhadap APBD	3.56%	4.96%	1.4	1.2	1.2	1.2
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)						
	Persentase program yang tidak terlaksana (%)	0.3%	1.24	0	0	0	0
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana (%)	0.74%	0.73	0	0	0	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	20.17%	19.55	20	20	20	20
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	29.59%	37.14	10	10	10	10
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)						
	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)	56.7	55.85				
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	43.3	44.15				
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	6.56	4.92	2	2.25	2.43	2.43
9	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Perbandingan antara belanja operasi, modal dan tidak terduga						
	Belanja Operasi Terhadap APBD (%)			75	75	75	75
	Belanja Modal Terhadap APBD (%)			24	24	24	24
	Belanja Tidak Terduga Terhadap APBD (%)			1	1	1	1
10	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kerja kesehatan	52.82	20	20	20	20	20
	Rasio PAD (%)	16.83	7.58	16.21	19.54	20.41	20.41
	Devialisasi realisasi belanja terhadapa belanja total dalam APBD (%)	96.33	100	100	100	100	100
	Devialisasi realisasi belanja terhadapa anggaran PAD dalam APBD (%)						
	Manajemen Aset						

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)	5.11	0	0	0	0	0
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	100	100	100	100	100
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	0.4	0.33	0.8	1	1	1
	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	100	100	100	100	100
3.	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**						
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Hari/Jam Pelajaran)	103/893	103/894	103/894	103/894	103/894	103/894
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	0.67%	0.09%	1.2	1.3	1.4	1.4
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	37.97%	38.17%	40	45	50	50
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	33	33	33	33	33	33
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	960	975	949	949	949	949
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	2213	2122	2284	2307	2330	2330
7	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	n/a	65	66	67	68	68
8	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	n/a	35	36	37	38	38
9	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	n/a	2	3	4	5	5
4.	**Penelitian dan pengembangan**						
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	50	50	100	100	100	100
	Penerapan SIDa:						
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.(%)	n/a	n/a	33	41	59	59
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	36.3	100	100	100	100	100
5.	**Pengawasan**						
1	Persentase tindak lanjut temuan	75	97.64	82	83	83	83
2	Persentase pelanggaran pegawai	0.91	0.86	0.4	0.4	0.3	0.3
3	Jumlah temuan BPK	12	27	14	13	12	12
4	Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	2 (2.8)	3 (Nilai 3.2)	3 (Nilai 3.2)	3 (Nilai 3.3)	3 (Nilai 3.4)	3 (Nilai 3.4)
5	Peningkatan Kapabilitass Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level	3 (DC)	3 (DC)	3	3	3	3
6.	**Sekretariat Dewan**						
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	**Sekretariat Daerah**						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang	n/a	0	0	0	0	0

No	Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun			Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	ditandatangani pada kuartal pertama (%)						
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	n/a	0.2	30	35	40	40
3	Rasio belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	n/a	75	92	92	93	93

8.2. Indikator & Target Standar pelayanan Minimal (SPM)

Selain indicator tersebut diatas, Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, Pemerintah Kota Palopo juga menetapkan beberapa target indicator Standar Pelayanan Minimal dengan merujuk pada beberapa regulasi sebagai berikut :

1. Permendikbud 32 Tahun 2018
2. Permenkes No 4 Tahun 2019
3. Permen PUPR 29 Tahun 2018
4. Permendagri 121 Tahun 2018
5. Permendagri 101 Tahun 2018
6. Permendagri 114 Tahun 2018
7. Permensos No 9 Tahun 2018

Target indicator kinerja untuk masing-masing Standar pelayanan Minimal masing-masing urusan pada Pemerintah Kota Palopo ditetapkan dalam table sebagai berikut :

Tabel 8.4.
Penetapan Target Indikator Kinerja
Terhadap Capaian Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minim (SPM)
Kota Palopo 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023
	Aspek Pelayanan Dasar						
I	SPM Bidang Pendidikan		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	Pendidikan Dasar						
1	Persentase penduduk Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	100	100	100	100
	Pendidikan Kesetaraan						
2	Persentase penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100
	Pendidikan Anak Usia Dini						
3	Persentase penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100	100	100	100
II	SPM Bidang Kesehatan		*84.06*	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	96.27	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	99.79	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	96.86	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan balita						
4	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	68.33	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						
5	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97.93	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif						
6	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	50.66	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut						
7	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	74.82	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi						
8	Persentase penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	41.88	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus						
9	Persentase penduduk penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	87.03	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat						
10	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis						
11	Persentase penduduk terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)						
12	Persentase penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	95.17	100	100	100	100
III	SPM Bidang Pekerjaan Umum	%	*89.51*				
	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari		*89.51*	100	100	100	100
1	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	81.7	100	100	100	100
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik						
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	97.31	100	100	100	100
IV	SPM Bidang Perumahan	%	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana						
1	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah						
2	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100
V	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	79.8	100	100	100	100
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum						
1	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	90.37	100	100	100	100
	Pelayanan informasi rawan bencana						
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	88.88	100	100	100	100
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
3	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	84.17	100	100	100	100
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						
4	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	70	100	100	100	100
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						
5	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	65.59	100	100	100	100
VI	SPM Bidang Sosial	%	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti						
1	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti						
2	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti						
3	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti						
4	Persentase penduduk /gelandangan	%	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023
	dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti						
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota						
5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	100	100	100	100	100

8.3. Indikator & Target SDGs

Selain indicator tersebut diatas, Sesuai Peraturan Pemerintah Presiden Nomor 59 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pemerintah Kota Palopo juga menetapkan sejumlah target kinerja untuk indicator TPB yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dalam table sebagai berikut :

Tabel 8.5.
Penetapan Target Indikator Kinerja
Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Kota Palopo 2019-2023

Indikator	Realisasi Tahun		Target Pencapaian		
	2019	2020	2021	2022	2023
Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun					
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7.82	7.64	7.15	6.63	6.08
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	82.16	100	100	100	100
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	54.82	57	67	77	87
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	54.82	100	100	100	100
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	3,519	3000	3000	3000	3000
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	100	100	100	100	100
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	98	100	100	100	100
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	101.74	78.42	80.29	82.16	84.04
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	90	95	100	100	100
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	91	95	100	100	100

Indikator	Realisasi Tahun		Target Pencapaian		
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	0.48	0.5	0	0	0
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	92.28	100	100	100	100
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	98.04	100	100	100	100
Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	100	100	100	100	100
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	100	100	100	100	100
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban Meninggal 0,54	0	0	0	0
	Korban Hilang 0	0	0	0	0
	Korban Luka 2,71	0	0	0	0
Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Tidak Ada Data	4	4	4	2
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Tidak Ada Data	500 Juta	250 Juta	0	0
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Tidak Ada Data	1	0	0	0
Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	77.58	62.8	63.1	51.92	51.36
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pend. 17,49	Pend. 21	Pend. 22	Pend. 23	Pend. 24
	Kes. 26,50	Kes. 26	Kes. 27	Kes. 28	Kes.29
	Perl. Sos. 1,21	Perl. Sos. 6	Perl. Sos. 7	Perl. Sos. 8	Perl. Sos. 9
Tujuan 2 : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan					
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	3.24	8	7.8	7.6	7.4
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	3.84	1.22	0.64	0.06	0
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Sedang 4,74	Sedang 13	Sedang 12	Sedang 11	Sedang 10
	Berat 2,58	Berat 29	Berat 28	Berat 27	Berat 26
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	21.99	6.98	5.98	4.98	3.98
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	3.19	15	10	5	0
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	4.06	15	10	5	0
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5	2.29	0.5	0	0	0

Indikator	Realisasi Tahun		Target Pencapaian		
	2019	2020	2021	2022	2023
tahun, berdasarkan tipe.					
Prevalensi anemia pada ibu hamil.	12.88	0	0	0	0
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	44.02	70	80	90	100
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	92.6	91.65	91.7	91.8	92.9
Angka Kematian Ibu (AKI).	30.47	60	55	50	48
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	101.67	100	100	100	100
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	101.67	100	100	100	100
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	5.79	1	1	1	1
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	0.43	4	3	3	2
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	5.18	1	1	1	1
Persentase kelurahan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	93.75	100	100	100	100
Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.02	0.038	0.036	0.034	0.032
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	251.28	210	200	190	195
Kejadian Malaria per 1000 orang.	0.23	1,400	1,300	1,200	1,000
Jumlah kelurahan yang mencapai eliminasi malaria.	27	2	3	4	5
Persentase kelurahan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	0.13	2	3	4	5
Prevalensi tekanan darah tinggi.	8.58	10	9	8	7
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	35.76	24	23	22	21
Prevalensi penyalahgunaan narkoba.		1.5	1	0.5	0
Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	131.57	74	76	78	80
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	101.74	78.42	80.29	82.16	84.04
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	131.57	24	24	25	25
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		11	10	9	8
Total Fertility Rate (TFR).	2.8	2.75	2.5	2.25	2
Unmet need pelayanan kesehatan.	101.74	10	10	9	9
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	82.16	100	100	100	100

Indikator	Realisasi Tahun		Target Pencapaian		
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	82.16	100	100	100	100
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100	100	100	100
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	5.04	100	100	100	100
Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.		100	100	100	100
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	97.4	100	100	100	100
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	92	90	95	100	100
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	92.28	100	100	100	100
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	98.04	100	100	100	100
Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.		10.39	10.45	10.48	10.56
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	62.48	100	100	100	100
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.		SD/MI (100)	SD/MI (100)	SD/MI (100)	SD/MI (100)
		SMP/MTs (100)	SMP/MTs (100)	SMP/MTs (100)	SMP/MTs (100)
Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.		100	100	100	100
Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.		100	100	100	100
		&	&	&	&
		100	100	100	100
Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	SD (53,17)	SD (57)	SD (59)	SD (61)	SD (63)
	SMP (53,17)	SMP (62)	SMP (64)	SMP (66)	SMP (68)
		SMA (67)	SMA (69)	SMA (71)	SMA (73)
		SMK (57)	SMK (59)	SMK (61)	SMK (63)
Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan					
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	2	4	5	6	7
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Fisik 0,00036	0	0	0	0
	Seksual 0,002	0	0	0	0
	Fisik & Seksual 0,012	0	0	0	0
	Emosional 0,009	0	0	0	0

Indikator	Realisasi Tahun		Target Pencapaian		
	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0.091	0	0	0	0
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0.002	0	0	0	0
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100	70	80	90	100
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	9	7	6	5	3
Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	20	21	22	23	24
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	30	29	28	27	26
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	53	17	14	12	9
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	119	73	75	80	85
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	90	95	100	100	100
Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	505 m3/detik	510 m3/detik	515 m3/detik	520 m3/detik	525 m3/detik
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	100	100	100	100	100
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	91	92	93	94	95
Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	9	9	9	9	9
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	9	9	9	9	9
Jumlah Kelurahan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	183 Skala Lingkungan	186 Skala Lingkungan	189 Skala Lingkungan	192 Skala Lingkungan	195 Skala Lingkungan
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	60	70	80	90	100
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	0.8	1	2	3	4
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Memenuhi Standar	Memenuhi Standar	Memenuhi Standar	Memenuhi Standar	Memenuhi Standar
Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator	Realisasi Tahun		Target Pencapaian		
	2019	2020	2021	2022	2023
Ruang Wilayah (RTRW).					
Jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Laju pertumbuhan PDB per kapita.	6.75	7.16	6.5	6.9	7.22
PDRB per kapita.	43.02	37.3	40	41	42
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	98.23	98.32	104.13	109.94	115.75
Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	29	26.65	26.75	26.8	26.95
Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	31	25	30	35	40
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	10.32	9.51	9.03	8.55	8.07
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	1.51	1.23	1.24	1.25	1.26
Jumlah wisatawan mancanegara.	953	1,150	1,220	1,300	1,400
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	126,457	119,600	125,580	131,700	138,250
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	3	3.06	3.1	3.2	3.3
Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	7.75%	6%	7%	8%	9%
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	3,224	2,500	2,600	2,700	2,819
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	25	25%	25%	25%	25%
Proporsi individu yang menggunakan internet	0.81	0.1	0.11	0.11	0.12
Koefisien Gini.	0.338	0.337	0.335	0.333	0.332
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7.82	7.64	7.15	6.63	6.08
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	54.82	41	43	45	47
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	93	95	97	99	100
Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	15	20	25	30	35
Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	44	45	46	47	48
Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban Meninggal 0,54	0	0	0	0
	Korban Hilang 0	0	0	0	0

Indikator	Realisasi Tahun		Target Pencapaian		
	2019	2020	2021	2022	2023
	Korban Luka 2,71	0	0	0	0
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	25	20	15	10	5
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	750 Juta	500 Juta	250 Juta	0 Juta	1 Juta
Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	87.02	88.37	88	89	90
Jumlah kelurahan yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.		Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		1	0	0	0
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	430	460	500	550	610
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	2	3	4	5	6
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	1	2	3	4	5
Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	1	2	3	4	5
Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	1	2	3	4	5
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Tidak Ada Data	1	0	0	0
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban Meninggal 0,54	0	0	0	0
	KorbanHilang 0				
	Korban Luka 2,71				
Tujuan 15 : Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati					
Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	n/a	61	62	63	64
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	n/a	12	14	16	18
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	0	3	2	1	0
Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0	0	0	0
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	0.17	3	2	1	0
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	100	85	90	95	100
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis	0	3	2	1	0

Indikator	Realisasi Tahun		Target Pencapaian		
	2019	2020	2021	2022	2023
dari pengasuh dalam setahun terakhir.					
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	7	3	2	1	0
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	0	3	2	1	0
Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	CC	B	BB	A	AA
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	55	65	70	75	80
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	52.7	66	68	70	72
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	100	100	100	100	100
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	5	6	7	8	9
Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	20	8	9	10	11
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	100	100	100	100	100
Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	n/a	100	100	100	100
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	100	100	100	100	100
Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	0	2	3	4	5
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	2.09	3.5	4	4.5	5
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0.42	0.54	0.64	0.75	0.75
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	0	0	0	0
Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	0	0	0	0

Indikator	Realisasi Tahun		Target Pencapaian		
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	n/a	70	80	90	100
Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

BAB IX
PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo periode 2018-2023, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan sasaran dan program pemerintah Kota Palopo. Pada Tahun 2023 yang akan datang merupakan tahun transisi pemerintahan Walikota Drs. H. M Judas Amir, MH dan Wakil Walikota Palopo Dr. Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si

Terkait dengan hal tersebut diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada tahun 2023 yang harus disusun ditahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 (masa transisi) yang disusun pada tahun 2023 atau setelah Perubahan RPJMD periode 2018-2023 berakhir, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo tahun 2005 -2025 untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Namun RKPD masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya (2023-2028). Program-program pada tahun 2023 masa transisi tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023 tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023 merupakan penjabaran tahap keempat RPJPD Kota Palopo Tahun 2005-2025. Sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program yang tercantum dalam perubahan RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perubahan RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Walikota Palopo ;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Walikota Palopo dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Palopo ;
3. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palopo agar melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Prioritas, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023;
5. Perubahan RPJMD ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukukan penyusunan perubahan Renstra-PD sesuai dengan periode Perubahan RPJMD. Renstra-PD ini memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program dan kegiatan perangkat daerah, serta indikator kinerja perangkat daerah. Renstra-PD selanjutnya menjadi acuan dalam penjabaran rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja-PD, hingga penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah.
6. Dalam rangka perencanaan tahunan, Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo selama periode berlakunya perubahan RPJMD ini. RKPD disusun setiap tahunnya selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran daerah, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan APBD setiap tahun anggaran;

7. Berkaitan dengan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023, dan melakukan sosialisasi baik aparat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat sipil guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal;
8. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kota Palopo yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Perubahan RPJMD ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kota Palopo untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Pemerintah Kota Palopo bersama DPRD serta masyarakat harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode 5 (lima) tahun yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dimaksud, dan untuk menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal serta menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.

WALIKOTA PALOPO

H.M. JUDAS AMIR